BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2025







Nomor : 22.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026
Tanggal : 28 Mei 2026

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Moch. Toha No. 164, Bandung

BUKU I

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

Nomor : **22.A/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026**
Tanggal : **28 Mei 2026**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT
Jalan Moch. Toha No. 164 Bandung

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 terdiri dari dua laporan yaitu:

I. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan
   a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
   b. Gambaran Umum Pemeriksaan yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
   c. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025.

II. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

   Laporan ini memuat:

   a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
   b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
   c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Keuangan Sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI i

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 1

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN 3

1. Dasar Hukum Pemeriksaan 3
2. Standar Pemeriksaan 3
3. Tujuan Pemeriksaan 3
4. Entitas yang Diperiksa 3
5. Lingkup Pemeriksaan 3
6. Metodologi Pemeriksaan 4
7. Jangka Waktu Pemeriksaan 5
8. Batasan Pemeriksaan 5

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. Laporan Arus Kas
6. Laporan Perubahan Ekuitas
7. Catatan atas Laporan Keuangan

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2025, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tanggal 31 Desember 2025, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 22.B/T/LHP/DJPKN-V.BDG/PPD.01/05/2026 tanggal 28 Mei 2026 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan ini.

Bandung, 28 Mei 2026
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Penanggung Jawab Pemeriksaan,

Firman Nurcahyadi S.E., M.E., CSFA, CertDA, ChFA, CLA, ERMAP, CIISA.

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. **Dasar Hukum Pemeriksaan**

   a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan

   b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. **Standar Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. **Tujuan Pemeriksaan**

   Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang didasarkan pada kriteria:

   a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan;

   b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*);

   c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

   d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

4. **Entitas yang Diperiksa**

   Pemeriksaan dilakukan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang memiliki 47 SKPD.

5. **Lingkup Pemeriksaan**

   Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 yang terdiri dari:

   a. Neraca per 31 Desember 2025;

   b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

   c. Laporan Operasional (LO);

   d. Laporan Arus Kas (LAK)

   e. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);

   f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

   g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

   Pengujian atas laporan keuangan tersebut di atas meliputi:

   a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca dan Laporan Perubahan SAL per 31 Desember 2025;

   b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025;

d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;

f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam LKPD; dan

g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

6. **Metodologi Pemeriksaan**

Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk sistem pengendalian intern terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar Laporan Keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, penghitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis, serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur tersebut dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. **Jangka Waktu Pemeriksaan**

Jangka waktu pemeriksaan:

a. Pemeriksaan Interim selama 30 hari mulai tanggal 13 Februari s.d. 14 Maret 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 08/T/ST/DJPKN-V.BDG/PPD.01/02/2026 tanggal 10 Februari 2026; dan

b. Pemeriksaan Terinci selama 35 hari mulai tanggal 06 April s.d. 10 Mei 2026 berdasarkan Surat Tugas Nomor 76/T/ST/DJPKN-V.BDG/PPD.01/03/2026 tanggal 31 Maret 2026.

8. **Batasan Pemeriksaan**

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/ penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BUPATI BANDUNG BARAT

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bandung Barat, 28 Mei 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

Komplek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Jalan Raya Padalarang - Cisarua Km. 2,
Mekarsari – Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat, KodePos 40552

KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	Anggaran 2025	Realisasi 2025	%	Realisasi 2024
1	2	3	4	5	6	7
1	**PENDAPATAN DAERAH**	**5.1.2.1**	**3.443.659.170.878,00**	**3.394.853.479.480,00**	**98,58**	**3.410.490.980.435,97**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)**	**5.1.2.1.1**	**1.011.631.723.145,00**	**981.483.458.987,00**	**97,02**	**799.932.118.378,97**
3	Pajak Daerah	5.1.2.1.1.1	771.086.897.175,00	743.748.765.926,00	96,45	590.254.784.373,00
4	Retribusi Daerah	5.1.2.1.1.2	224.648.918.659,00	218.559.812.666,00	97,29	196.467.981.967,00
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.2.1.1.3	1.253.070.525,00	1.256.835.358,00	100,30	1.306.239.012,00
6	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.2.1.1.4	14.642.836.786,00	17.918.045.037,00	122,37	11.903.113.026,97
7	**PENDAPATAN TRANSFER**	**5.1.2.1.2**	**2.432.027.447.733,00**	**2.413.370.020.493,00**	**99,23**	**2.610.558.862.057,00**
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.2.1.2.1	2.204.854.414.000,00	2.193.985.867.415,00	99,51	2.222.223.055.903,00
9	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.2.1.2.2	227.173.033.733,00	219.384.153.078,00	96,57	388.335.806.154,00
10	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**5.1.2.1.3**	-	-	-	-
11	**BELANJA DAERAH**	**5.1.2.2**	**3.521.890.135.318,00**	**3.267.407.817.371,00**	**92,77**	**3.259.188.525.434,00**
12	**BELANJA OPERASI**	**5.1.2.2.1**	**2.635.474.825.626,33**	**2.475.804.994.111,00**	**93,94**	**2.406.129.792.315,70**
13	Belanja Pegawai	5.1.2.2.1.1	1.377.097.770.000,60	1.293.542.540.191,00	93,93	1.243.654.808.162,00
14	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.2.1.2	1.182.427.995.625,73	1.106.680.765.952,00	93,59	1.032.553.814.067,70
15	Belanja Bunga	5.1.2.2.1.3	-	-	-	3.212.359.686,00
16	Belanja Subsidi	5.1.2.2.1.4	-	-	-	-
17	Belanja Hibah	5.1.2.2.1.5	70.294.060.000,00	69.926.687.968,00	99,48	123.753.810.400,00
18	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.2.1.6	5.655.000.000,00	5.655.000.000,00	100,00	2.955.000.000,00
19	**BELANJA MODAL**	**5.1.2.3**	**328.656.247.026,67**	**301.416.412.683,00**	**91,71**	**401.734.675.346,30**
20	Belanja Modal Tanah	5.1.2.3.1	12.946.113.825,00	3.180.185.537,00	24,56	-
21	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.3.2	137.303.548.092,00	129.103.772.848,00	94,03	206.530.329.113,30
22	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.3.3	74.099.889.035,67	66.813.132.281,00	90,17	57.500.309.714,00
23	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.3.4	79.770.264.700,00	78.032.212.447,00	97,82	123.152.366.703,00
24	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.3.5	22.692.940.410,00	22.692.669.310,00	100,00	14.355.008.616,00
25	Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.2.3.6	1.843.490.964,00	1.594.440.260,00	86,49	196.661.200,00
26	**BELANJA TAK TERDUGA**	**5.1.2.4**	**42.993.129.198,00**	-	-	**3.749.217.954,00**
27	Belanja Tak Terduga		42.993.129.198,00	-	-	3.749.217.954,00
28	**BELANJA TRANSFER**	**5.1.2.5**	**514.765.933.467,00**	**490.186.410.577,00**	**95,23**	**447.574.839.818,00**
29	Belanja Bagi Hasil		84.422.871.559,00	75.182.319.761,00	89,05	55.239.082.625,00
30	Belanja Bantuan Keuangan		430.343.061.908,00	415.004.090.816,00	96,44	392.335.757.193,00
31	**SURPLUS/(DEFISIT)**	**5.1.2.6**	**(78.230.964.440,00)**	**127.445.662.109,00**	**(162,91)**	**151.302.455.001,97**
32	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**5.1.2.7**	**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**	**(73.071.490.561,97)**
33	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN**		**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**	**26.071.448.838,03**
34	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		78.230.964.440,00	78.230.964.440,00	100,00	26.071.448.838,03
35	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN**		-	-	-	**99.142.939.400,00**
36	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	-	-	99.142.939.400,00
37	**PEMBIAYAAN NETTO**		**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**	**(73.071.490.561,97)**
38	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)**	**5.1.2.8**	-	**205.676.626.549,00**	-	**78.230.964.440,00**

Bandung Barat, 28 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

NO	U R A I A N	Ref	2025	2024
1	2	3	4	5
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2	78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
3	**Subtotal (1-2)**		**(0,00)**	-
4	SURPLUS/(DEFISIT)		127.445.662.109,00	151.302.455.001,97
5	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan		78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
6	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	(99.142.939.400,00)
7	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4+5+6+7+8+9+10)**		**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		-	-
9	Lain-lain		-	-
10	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (11+12+13)**		**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**

Bandung Barat, 28 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
NERACA
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Ref	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**ASET**	**5.3.1**	**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**
2	**ASET LANCAR**	**5.3.1.1**	**469.004.434.712,74**	**363.034.293.211,50**
3	**Kas dan Setara Kas**	**5.3.1.1.1**	**205.676.660.549,00**	**78.247.454.444,00**
4	Kas di Kas Daerah		188.923.080.748,00	62.162.729.892,00
5	Kas di Bendahara Penerimaan		-	-
6	Kas di Bendahara Pengeluaran		2.267.800,00	-
7	Kas di BLUD		14.250.419.213,00	13.256.878.492,00
8	Kas Dana BOS		13.450.700,00	15.334.411,00
9	Kas Dana BOP		-	-
10	Kas Dana BOK		2.431.950.227,00	2.796.021.645,00
11	Setara Kas		55.457.861,00	-
12	Kas Lainnya		34.000,00	16.490.004,00
13	**Piutang Pajak Daerah**	**5.3.1.1.2**	**406.915.946.608,65**	**416.376.018.292,65**
14	Piutang Pajak Hotel		4.596.617.420,23	3.220.970.636,23
15	Piutang Pajak Restoran		6.917.442.986,42	6.596.828.028,42
16	Piutang Pajak Hiburan		2.002.570.507,00	927.065.088,00
17	Piutang Pajak Reklame		491.677.131,00	488.113.048,00
18	Piutang Pajak Penerangan Jalan		13.622,00	13.622,00
19	Piutang Pajak Parkir		257.293.179,00	248.481.413,00
20	Piutang Pajak Air Tanah		5.028.847.575,00	4.984.172.459,00
21	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		841.789.617,00	885.534.282,00
22	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		386.779.694.571,00	399.024.839.716,00
23	**Piutang Retribusi Daerah**	**5.3.1.1.3**	**14.872.957.705,00**	**11.042.692.939,00**
24	Piutang Retribusi Jasa Umum		14.604.523.595,00	10.864.077.424,00
25	Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		268.434.110,00	178.615.515,00
26	**Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**5.3.1.1.4**	**351.896.968,84**	**530.896.968,84**
27	Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		351.896.968,84	530.896.968,84
28	**Piutang Lain-lain PAD yang Sah**	**5.3.1.1.5**	**43.588.327.118,59**	**45.131.686.792,67**
29	Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		33.678.798.780,00	37.156.844.534,00
30	Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		9.344.357.651,00	7.732.487.762,00
31	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		143.708.608,92	135.499.163,00
32	Piutang Pendapatan dari Pengembalian		343.106.745,00	23.000.000,00
33	Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		78.355.333,67	83.855.333,67
34	**Piutang Transfer Pemerintah Pusat**	**5.3.1.1.6**	-	-
35	Piutang DBH CHT in transit		-	-

No	Uraian	Ref	2025	2024
1	2	3	4	5
36	**Piutang Transfer Antar Daerah**	**5.3.1.1.7**	**2.109.618.363,00**	**12.918.103.288,00**
37	Piutang Bagi Hasil		1.619.379.963,00	10.797.824.986,00
38	Piutang Bantuan Keuangan		490.238.400,00	2.120.278.302,00
39	**Piutang Lainnya**	**5.3.1.1.8**	**87.548.295.752,00**	**90.048.865.226,00**
40	Piutang Lain-lain		87.548.295.752,00	90.048.865.226,00
41	**Penyisihan Piutang**	**5.3.1.1.9**	**(346.322.524.614,58)**	**(343.602.926.224,21)**
42	Penyisihan Piutang Pendapatan		(262.353.182.533,08)	(262.138.311.972,51)
43	Penyisihan Piutang Lainnya		(83.969.342.081,50)	(81.464.614.251,70)
44	**Beban Dibayar Dimuka**	**5.3.1.1.10**	**1.408.331.704,88**	**638.466.007,54**
45	Beban Dibayar Dimuka		1.408.331.704,88	638.466.007,54
46	**Persediaan**	**5.3.1.2.0**	**52.854.924.557,36**	**51.703.035.477,01**
47	Barang Pakai Habis		52.836.861.638,36	51.703.035.477,01
48	Barang Tak Habis Pakai		18.062.919,00	-
49	**INVESTASI JANGKA PANJANG**		**54.435.826.535,00**	**54.258.204.546,00**
50	**Investasi Jangka Panjang Permanen**	**5.3.1.2.1**	**54.435.826.535,00**	**54.258.204.546,00**
51	Penyertaan Modal		54.435.826.535,00	54.258.204.546,00
52	**ASET TETAP**	**5.3.1.3**	**4.406.242.448.758,74**	**4.338.244.561.427,25**
53	Tanah	5.3.1.3.1	1.589.369.468.656,55	1.508.698.868.872,00
54	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	1.607.756.374.507,03	1.568.627.766.495,27
55	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	2.135.911.493.583,68	2.076.266.396.458,64
56	Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.1.3.4	1.839.900.501.044,17	1.748.837.089.653,67
57	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	121.189.585.921,23	119.291.118.897,23
58	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	28.934.472.727,00	32.811.825.381,00
59	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.916.819.447.680,92)	(2.716.288.504.330,56)
60	**ASET LAINNYA**	**5.3.1.4**	**129.358.624.903,14**	**149.668.006.074,63**
61	Tagihan Jangka Panjang		16.038.262.419,95	17.766.282.718,05
62	Kemitraan dengan Pihak Ketiga		53.999.373.530,00	53.999.373.530,00
63	Aset Tidak Berwujud		19.876.091.108,00	17.978.579.548,00
64	Aset Lain-lain		195.079.056.019,55	72.211.983.210,98
65	Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		(17.172.319.518,00)	(14.036.135.932,40)
66	Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		(138.461.838.656,36)	-
67	Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)		-	1.747.923.000,00
68	**JUMLAH ASET**		**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**
69	**KEWAJIBAN**	**5.3.2**	**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**
70	**KEWAJIBAN JANGKA PENDEK**	**5.3.2.1**	**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**
71	Utang PFK		34.000,00	16.490.004,00
72	Utang Bunga		-	-
73	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		-	-
74	Pendapatan Diterima Dimuka		3.170.788.815,09	3.492.065.534,64
75	Utang Belanja		22.143.481.821,60	24.743.397.906,60
76	**KEWAJIBAN JANGKA PANJANG**	**5.3.2.2**	-	-
77	**JUMLAH KEWAJIBAN**		**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**
78	**EKUITAS**	**5.3.3**	**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**
79	Ekuitas		5.033.727.030.272,93	4.876.953.111.814,14
80	**JUMLAH EKUITAS DANA**		**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**
81	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**		**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**

Bandung Barat, 28 Mei 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,

IR. H. RITCHIE ISMAIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN OPERASIONAL
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
	KEGIATAN OPERASIONAL					
1	**PENDAPATAN DAERAH-LO**	5.4.1	**3.598.340.916.770,41**	**3.641.969.156.042,83**	**(43.628.239.272,42)**	**(1,20)**
2	**PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO**	5.4.1.1	-	-	-	-
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	783.250.046.022,99	626.322.235.167,45	156.927.810.855,54	25,06
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	222.420.978.114,66	201.457.279.733,35	20.963.698.381,31	10,41
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	1.077.835.358,00	1.201.739.012,00	(123.903.654,00)	(10,31)
6	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	16.402.467.147,82	18.934.400.841,10	(2.531.933.693,28)	(13,37)
7	**Jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO**		**1.023.151.326.643,47**	**847.915.654.753,90**	**175.235.671.889,57**	**20,67**
8	**PENDAPATAN TRANSFER-LO**	5.4.2.1	-	-	-	-
9	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO**	5.4.2.1.1	-	-	-	-
10	**Dana Perimbangan**		-	-	-	-
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		109.149.885.500,00	88.991.642.000,00	20.158.243.500,00	22,65
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO		1.301.028.239.493,00	1.222.075.022.945,00	78.953.216.548,00	6,46
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO		12.014.160.081,00	157.126.319.747,00	(145.112.159.666,00)	(92,35)
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO		527.477.344.921,00	478.500.585.361,00	48.976.759.560,00	10,24
15	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**		**1.949.669.629.995,00**	**1.946.693.570.053,00**	**2.976.059.942,00**	**0,15**
16	**TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA**	5.4.2.1.2	-	-	-	-
17	Dana Desa-LO		234.366.852.420,00	246.984.621.850,00	(12.617.769.430,00)	(5,11)
18	Insentif Fiskal-LO		8.201.462.000,00	-	8.201.462.000,00	100,00
19	**Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya**		**242.568.314.420,00**	**246.984.621.850,00**	**(4.416.307.430,00)**	**(1,79)**
20	**Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO**	5.4.2.1.2	-	-	-	-
21	Pendapatan Bagi Hasil-LO		193.503.184.849,00	297.865.106.436,00	(104.361.921.587,00)	(35,04)
22	Bantuan Keuangan - LO		16.794.153.676,00	91.179.287.516,00	(74.385.133.840,00)	(81,58)
23	**Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah**		**210.297.338.525,00**	**389.044.393.952,00**	**(178.747.055.427,00)**	**(45,95)**
24	**Jumlah Pendapatan Transfer**		**2.402.535.282.940,00**	**2.582.722.585.855,00**	**(180.187.302.915,00)**	**(6,98)**
25	**LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO**	5.4.2.1.3	-	-	-	-
26	Pendapatan Hibah-LO		172.654.307.186,94	211.330.915.433,93	(38.676.608.246,99)	(18,30)
27	**Jumlah Lain-lain Pendapatan yang sah**		**172.654.307.186,94**	**211.330.915.433,93**	**(38.676.608.246,99)**	**(18,30)**
28	**JUMLAH PENDAPATAN**		**3.598.340.916.770,41**	**3.641.969.156.042,83**	**(43.628.239.272,42)**	**(1,20)**
29	**BEBAN**		-	-	-	-
30	**BEBAN OPERASI**	5.4.3	-	-	-	-
31	Beban Pegawai - LO	5.4.3.1	1.293.271.813.458,00	1.230.274.183.419,00	62.997.630.039,00	5,12
32	Beban Persediaan - LO	5.4.3.2	582.312.307.649,47	534.536.192.431,36	47.776.115.218,11	8,94
33	Beban Jasa dan Sewa - LO	5.4.3.3	470.259.699.664,66	353.308.537.635,74	116.951.162.028,92	33,10
34	Beban Pemeliharaan - LO	5.4.3.4	26.710.216.312,46	18.137.000.185,42	8.573.216.127,04	47,27
35	Beban Perjalanan Dinas - LO	5.4.3.5	57.400.954.255,00	59.113.065.700,00	(1.712.111.445,00)	(2,90)
36	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	5.4.3.6	28.854.577.443,00	25.212.368.600,00	3.642.208.843,00	14,45
37	Beban Bunga - LO	5.4.3.7	-	-	-	-
38	Beban Subsidi - LO	5.4.3.8	-	-	-	-
39	Beban Hibah - LO	5.4.3.9	69.926.687.968,00	123.753.810.400,00	(53.827.122.432,00)	(43,50)
40	Beban Bantuan Sosial - LO	5.4.3.10	5.655.000.000,00	2.955.000.000,00	2.700.000.000,00	91,37
41	Beban Penyisihan Piutang -LO	5.4.3.11	6.779.027.028,30	25.977.878.151,91	(19.198.851.123,61)	(73,90)
42	Beban Penyusutan - LO	5.4.3.12	299.062.951.736,71	350.605.967.133,91	(51.543.015.397,20)	(14,70)
43	Beban Amortisasi - LO	5.4.3.13	3.136.183.585,60	3.187.256.043,60	(51.072.458,00)	(1,60)
44	Beban Transfer - LO	5.4.3.14	484.768.644.417,00	452.831.809.547,60	31.936.834.869,40	7,05
45	Beban Tak Terduga - LO	5.4.3.15	-	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)
46	**JUMLAH BEBAN OPERASI**		**3.328.138.063.518,20**	**3.183.642.287.202,54**	**144.495.776.315,66**	**4,54**
47	**SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI**		**270.202.853.252,21**	**458.326.868.840,29**	**(188.124.015.588,08)**	**(41,05)**

No	URAIAN	Ref	2025	2024	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
48	**SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO**		-	-	-	-
49	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		4.202.745.287,93	-	4.202.745.287,93	100,00
50	**JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL**		**4.202.745.287,93**	-	**4.202.745.287,93**	**100,00**
51	**SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**		**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**	**(183.921.270.300,15)**	**(40,13)**
52	**POS LUAR BIASA**		-	-	-	-
53	**Pendapatan Luar Biasa**		-	-	-	-
54	**Beban Luar Biasa**		-	-	-	-
55	**POS LUAR BIASA**		-	-	-	-
56	**SURPLUS/DEFISIT-LO**	5.4.4	**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**	**(183.921.270.300,15)**	**(40,13)**

Bandung Barat, 28 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN ARUS KAS
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2025	2024
1	**ARUS KAS AKTIVITAS OPERASI**	**5.6.1**	-	-
2	**Arus Masuk Kas**		-	-
3	Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah		743.748.765.926,00	590.254.784.373,00
4	Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah		218.559.812.666,00	14.701.304.603,00
5	Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		1.256.835.358,00	1.306.239.012,00
6	Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah		17.738.403.537,00	193.669.790.390,97
7	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		2.193.985.867.415,00	2.222.223.055.903,00
8	Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		-	-
9	Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah		219.384.153.078,00	388.335.806.154,00
10	Penerimaan Bantuan Keuangan		-	-
11	Penerimaan Pendapatan Hibah		-	-
12	Penerimaan Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya		-	-
13	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**3.394.673.837.980,00**	**3.410.490.980.435,97**
14	**Arus Keluar Kas**		-	-
15	Pembayaran Pegawai		1.293.542.540.191,00	1.243.654.808.162,00
16	Pembayaran Barang dan Jasa		1.106.680.765.952,00	1.032.553.814.067,70
17	Belanja Bunga		-	3.212.359.686,00
18	Belanja Subsidi		-	-
19	Pembayaran Hibah		69.926.687.968,00	123.753.810.400,00
20	Pembayaran Bantuan Sosial		5.655.000.000,00	2.955.000.000,00
21	Pembayaran Tak Terduga		-	3.749.217.954,00
22	Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah		71.588.741.051,00	53.916.548.836,00
23	Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah		3.593.578.710,00	1.322.533.789,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa		415.004.090.816,00	392.335.757.193,00
25	Pembayaran Bantuan Keuangan Lainnya		-	-
26	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**2.965.991.404.688,00**	**2.857.453.850.087,70**
27	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi**		**428.682.433.292,00**	**553.037.130.348,27**
28	**ARUS KAS AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN**	**5.6.2**	-	-
29	**Arus Masuk Kas**		-	-
30	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin - LRA		119.641.500,00	-
31	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan - LRA		60.000.000,00	-
32	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**179.641.500,00**	-
33	**Arus Keluar Kas**		-	-
34	Perolehan Tanah		3.180.185.537,00	-
35	Perolehan Peralatan dan Mesin		129.103.772.848,00	206.530.329.113,30
36	Perolehan Gedung dan Bangunan		66.813.132.281,00	57.500.309.714,00
37	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		78.032.212.447,00	123.152.366.703,00

NO	URAIAN	Ref	2025	2024
38	Perolehan Aset Tetap Lainnya		22.692.669.310,00	14.355.008.616,00
39	Perolehan Aset Lainnya		1.594.440.260,00	196.661.200,00
40	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**301.416.412.683,00**	**401.734.675.346,30**
41	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan**		**(301.236.771.183,00)**	**(401.734.675.346,30)**
42	**ARUS KAS AKTIVITAS PEMBIAYAAN**	5.6.3	-	-
43	**Arus Masuk Kas**		-	-
44	Pencairan Dana Cadangan		-	-
45	Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)		-	-
46	**Jumlah Arus Masuk Kas**		-	-
47	**Arus Keluar Kas**		-	-
48	Pembentukan Dana Cadangan		-	-
49	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah		-	-
50	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		-	99.142.939.400,00
51	**Jumlah Arus Keluar Kas**		-	**99.142.939.400,00**
52	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan**		-	**(99.142.939.400,00)**
53	**ARUS KAS AKTIVITAS TRANSITORIS**	5.6.4	-	-
54	**Arus Masuk Kas**		-	-
55	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		322.442.348.789,00	159.014.476.884,00
56	**Jumlah Arus Masuk Kas**		**322.442.348.789,00**	**159.014.476.884,00**
57	**Arus Keluar Kas**		-	-
58	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)		322.458.804.793,00	158.997.986.880,00
59	**Jumlah Arus Keluar Kas**		**322.458.804.793,00**	**158.997.986.880,00**
60	**Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris**		**(16.456.004,00)**	**16.490.004,00**
61	**Kenaikan/Penurunan Kas**		**127.429.206.105,00**	**52.176.005.605,97**
62	Saldo Awal Kas Setara Kas		78.247.454.444,00	26.071.448.838,03
63	Penggunaan Kas Lainnya- Utang PFK yang Belum Disetor		(34.000,00)	(16.490.004,00)
64	**Saldo Akhir Kas di BUD & Kas di Bendahara**		**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**
65	Kas Lainnya - Uang PFK		34.000,00	16.490.004,00
66	**Saldo Akhir Kas Pemkab Bandung Barat**	5.6.5	**205.676.660.549,00**	**78.247.454.444,00**

Bandung Barat, 28 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
(AUDITED)
Untuk Periode yang Berakhir Sampai Dengan 31 Desember 2025 dan 2024

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	Ref	2025	2024
1	2	3	4	5
1	**EKUITAS AWAL**	5.5.1	**4.876.953.111.814,14**	**4.611.572.184.162,15**
2	**Surplus/Defisit - LO**	5.5.2	**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**
3	**KOREKSI EKUITAS**	5.5.3	**(117.809.302.070,35)**	**(56.974.135.807,22)**
4	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG		(240.427.480,00)	-
5	KOREKSI PENCATATAN PIUTANG		(52.680.569.895,00)	(1.490.853.807,00)
6	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG		-	(85.485.130.542,93)
7	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	20.072.148,01
8	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH		5.861.700.728,00	14.439.125.412,00
9	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN		(174.807.000,00)	(256.478.400,00)
10	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN		182.770.270,00	181.339.088,41
11	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI		-	28.175.561.026,00
12	KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR		(1.728.020.298,10)	188.000.000,00
13	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN		(2.523.889.382,03)	(619.766.599,60)
14	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN		-	(3.834.035.414,90)
15	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI		1.322.882.880,00	(8.662.900.084,03)
16	KOREKSI PENCATATAN PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN		(67.846.225.293,22)	(251.276.666,00)
17	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG		17.283.400,00	622.208.032,82
18	**DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR**	5.5.4	**177.621.989,00**	**(135.971.805.381,08)**
19	PENURUNAN NILAI PENYISIHAN PIUTANG AKIBAT		-	750.870.288,76
20	PENURUNAN ASET TETAP AKIBAT NILAI DI BAWAH KAPITALISASI		-	(136.767.392.398,84)
21	PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH		177.621.989,00	44.716.729,00
22	**JUMLAH EKUITAS AKHIR**	5.5.5	**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**

Bandung Barat, 28 Mei 2026
BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur ke Hadirat Allah SWT, Laporan Keuangan Pemerintah Derah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 telah selesai disusun. Laporan Keuangan ini disajikan dengan berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah.

Laporan Keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan serta dilampiri Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Daerah. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, sebelum disampaikan kepada DPRD, LKPD Tahun Anggaran (TA) 2025 disampaikan terlebih dahulu kepada BPK untuk diaudit paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.

Tujuan dari pemeriksaan tersebut adalah untuk menilai kewajaran informasi yang disajikan dalam LKPD. LKPD TA 2025 yang kami sajikan ini berstatus sebagai laporan keuangan yang telah diperiksa (*Audited*). LKPD TA 2025 ini merupakan konsolidasian Laporan Keuangan SKPKD yang disusun oleh Badan Keuangan dan Aset Daerah, dan Laporan Keuangan Perangkat Daerah yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah. LKPD tersebut disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 85 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2023 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Laporan Realisasi APBD untuk satu tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2025, diketahui realisasi Pendapatan sebesar Rp3.394.853.479.480,00 atau mencapai 98,58% dari target anggaran tahun 2025 sebesar Rp3.443.659.170.878,00, sedangkan realisasi Belanja Daerah sebesar Rp3.267.407.817.371,00 atau mencapai 92,77% dari anggaran setelah perubahan TA 2025 sebesar Rp3.521.890.135.318,00. Apabila dilihat dari sisi realisasi total Pendapatan dan total Belanja dan Transfer terdapat selisih lebih realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau surplus sebesar Rp127.445.662.109,00. Dari pos Pembiayaan terdapat selisih lebih realisasi Penerimaan Pembiayaan atas realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp78.230.964.440,00.
2. Berdasarkan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025, diketahui Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp78.230.964.440,00, Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan sebesar Rp78.230.964.440,00, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp78.230.964.440,00, Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp0,00 sehingga Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp205.676.626.549,00.
3. Selanjutnya Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan informasi mengenai posisi Aset, Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2025. Nilai total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.059.041.334.909,62 jumlah tersebut naik sebesar Rp153.836.269.650,25 atau 3,14% dibandingkan dengan posisi total nilai aset TA 2024 yang mencapai sebesar Rp4.905.205.065.259,38.

   Nilai total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp25.314.304.636,69 jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp2.937.648.808,55 atau mencapai 10,40% dibandingkan dengan total nilai Kewajiban TA 2024 yang mencapai Rp28.251.953.445,24.

   Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 sebesar Rp5.033.727.030.272,93 jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp156.773.918.458,79 atau mencapai 3,21% dari total ekuitas TA 2024 sebesar Rp4.876.953.111.814,14.

4. Jumlah Total Pendapatan Operasional yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.598.340.916.770,41 dan Rp3.641.969.156.042,83. Saldo TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.628.239.272,42 atau 1,20% dibandingkan Pendapatan Operasional yang dicapai periode sebelumnya.

   Jumlah Total Beban Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode TA 2025 dan 2024 mencapai sebesar Rp3.328.138.063.518,20 dan Rp3.183.642.287.202,54. Saldo TA 2025 tersebut naik Rp144.495.776.315,66 atau 4,54% dibandingkan Beban Operasional yang dicapai periode sebelumnya.

   Jumlah Total Capaian Pendapatan dan Beban Operasional TA 2025 dan 2024 tersebut menghasilkan Surplus/Defisit dari Operasi periode TA 2025 sebesar Rp270.202.853.252,22 dan Rp458.326.868.840,29. Nilai tersebut mengalami penurunan sebesar Rp 188.124.015.588,08 atau 41,05% dari capaian Surplus/Defisit dari Operasi periode sebelumnya.

   Suplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional untuk Tahun 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.202.745.287,93 dan Rp0,00.

   Atas hal-hal tersebut, Surplus/Defisit-LO yang diperoleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir periode TA 2025 dan 2024 masing masing sebesar Rp274.405.598.540,14 dan Rp458.326.868.840,29, saldo TA Tahun 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp183.921.270.300,15 atau 40,13% dari nilai Surplus/Defisit-LO yang dicapai pada periode sebelumnya.

5. Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang disusun sudah termasuk arus kas keluar masuk dari aktivitas BLUD sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan BLUD RSUD CILILIN, BLUD RSUD CIKALONGWETAN, BLUD RSUD LEMBANG, 32 BLUD PKM, 1 BLUD Labkesda, Dana BOS Pusat, BOP dan BOK yang dikelola diluar mekanisme APBD. Total nilai Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp205.676.660.549,00. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, arus kas bersih naik sebesar Rp127.429.206.105,00 atau sebesar 162,85%.

6. Saldo Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 yaitu saldo ekuitas akhir Audited BPK-RI per 31 Desember 2024 sebesar Rp4.876.953.111.814,14.

Saldo Surplus/Defisit-Laporan Operasional dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan Saldo Surplus/Defisit – LO yang dihasilkan pada periode TA 2025 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025) sebesar Rp274.405.598.540,14 (setelah *closing entry*).

Saldo Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan Saldo Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan yaitu berkurang sebesar Rp117.809.302.070,35. Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan Saldo Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan yang bertambah sebesar Rp177.621.989,00 sehingga Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember 2025 sebesar Rp5.033.727.030.272,93.

Demikian disampaikan, semoga dengan penyajian Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Bandung Barat, 28 Mei 2026

BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL

BUPATI BANDUNG BARAT

Bandung Barat, 28 Mei 2026

Nomor : 900.1/1752/BKAD
Lampiran : -
Perihal : Representasi Manajemen

Kepada Yth.
Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Mohammad Toha No. 164
di
Bandung

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 untuk tujuan menyatakan suatu opini tentang apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) di Indonesia. Kami menegaskan bahwa kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan SAP. Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP;
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK;
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan;
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
5. Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki hak penuh atas aset yang

5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut;
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan;
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan;
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan;
9. Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran;
10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2025 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan;
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern;
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern;
13. Kami telah menilai efektivitas sistem pengendalian intern dalam hal:
    a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah;
    b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan;
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan siginifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material;
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP;
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan; dan
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap

peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025.

BUPATI BANDUNG BARAT,

JEJE RITCHIE ISMAIL

DAFTAR ISI

URAIAN			HALAMAN
KATA PENGANTAR			i - iv
REPRESENTASI MANAJEMEN			v - vii
DAFTAR ISI			viii – ix
DAFTAR TABEL			x – xvi
DAFTAR GAMBAR			xvii
DAFTAR LAMPIRAN			xviii – xx
Bab I	**Pendahuluan**		1
	1.1.	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
	1.2.	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	8
	1.3.	Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan	13
Bab II	**Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD**		15
	2.1.	Ekonomi Makro	16
	2.2.	Kebijakan Keuangan	23
	2.3.	Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD	38
Bab III	**Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan**		48
	3.1.	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah	48
Bab IV	**Kebijakan Akuntansi**		68
	4.1.	Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	68
	4.2.	Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	73
	4.3.	Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	73
	4.4.	Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	111
Bab V	**Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan**		113
	5.1.	Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos LRA	114

	5.2.	Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan SAL	155
	5.3.	Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Neraca	155
	5.4.	Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional	221
	5.5.	Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Arus Kas	247
	5.6.	Rincian dari Penjelasan Masin Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas	256
Bab VI	**Penjelasan Atas Informasi - informasi Non Keuangan**		266
Bab VII	**Penutup**		283

DAFTAR TABEL

			HALAMAN
BAB II			
Tabel	2.1	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen), 2021–2025	17 – 17
Tabel	2.2	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2021–2025	18 – 19
Tabel	2.3	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2021–2025	19 – 20
Tabel	2.4	Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2021–2025	20 – 21
Tabel	2.5	Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2021–2025	21 – 22
Tabel	2.6	Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat 2021–2025	22 – 23
Tabel	2.7	Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2025	23 – 23
Tabel	2.8	Capaian Realisasi Anggaran Per Uraian Urusan	45 – 47
BAB III			
Tabel	3.1	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025	48 – 48
Tabel	3.2	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	48 – 49
Tabel	3.3	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025	50 – 50
Tabel	3.4	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025	51 – 51
Tabel	3.5	Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025	51 – 51
Tabel	3.6	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	52 – 52
Tabel	3.7	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	53 – 53
Tabel	3.8	Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	54 – 54
Tabel	3.9	Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2025	55 – 55
Tabel	3.10	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025	56 – 56
Tabel	3.11	Anggaran dan Realisasi DBHCHT Tahun 2025	57 – 57
Tabel	3.12	Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025	58 – 66
Tabel	3.13	Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (*Spesific Grant*) Tahun 2025	67 – 67

BAB IV

Tabel	4.1	Daftar Biaya-biaya yang Diatribusikan pada Aset Tetap	97 – 98
Tabel	4.2	Klasifikasi Kewajiban	109 – 109

BAB V

Tabel	5.1	Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024	114 – 114
Tabel	5.2	Rincian Realisasi PAD Tahun 2025 dan Tahun 2024	116 – 116
Tabel	5.3	Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	116 – 117
Tabel	5.4	Rincian Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	123 – 123
Tabel	5.5	Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024	124 – 124
Tabel	5.6	Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024	125 – 126
Tabel	5.7	Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024	127 – 127
Tabel	5.8	Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	128 – 129
Tabel	5.9	Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 dan Tahun 2024	129 – 130
Tabel	5.10	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024	131 – 131
Tabel	5.11	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024	131 – 131
Tabel	5.12	Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	133 – 133
Tabel	5.13	Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024	133 – 134
Tabel	5.14	Rincian Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024	134 – 134
Tabel	5.15	Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025	135 – 135
Tabel	5.16	Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024	135 – 135
Tabel	5.17	Rincian Belanja Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024	137 137
Tabel	5.18	Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	137 – 137
Tabel	5.19	Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 – 2024	138 – 138
Tabel	5.20	Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024	139 – 141
Tabel	5.21	Rincian Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 dan Tahun 2024	141 – 141
Tabel	5.22	Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024	142 – 142
Tabel	5.23	Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024	142 – 143
Tabel	5.24	Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024	143 – 144
Tabel	5.25	Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2025	144 – 144
Tabel	5.26	Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024	145 – 147
Tabel	5.27	Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024	147 – 148

Tabel	5.28	Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	148 – 149
Tabel	5.29	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024	149 – 150
Tabel	5.30	Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2025	150 – 151
Tabel	5.31	Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dan Tahun 2024	151 – 151
Tabel	5.32	Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024	152 – 152
Tabel	5.33	Rincian SiLPA Tahun 2025 dan Tahun 2024	154 – 154
Tabel	5.34	Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan Tahun 2024	155 – 155
Tabel	5.35	Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	156 – 156
Tabel	5.36	Neraca Aset Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	157 – 157
Tabel	5.37	Neraca Aset Lancar Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2025	157 – 157
Tabel	5.38	Neraca Kas di Kas Daerah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	158 – 158
Tabel	5.39	Rincian Kas Daerah per 31 Desember 2025	159 – 159
Tabel	5.40	Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	159 – 159
Tabel	5.41	Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	160 – 160
Tabel	5.42	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	161 – 161
Tabel	5.43	Rincian Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	161 – 161
Tabel	5.44	Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SDN Tahun 2025	162 – 163
Tabel	5.45	Rincian Perhitungan Saldo Kas BOS SMPN Tahun 2025	163 – 163
Tabel	5.46	Rincian Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	164 – 164
Tabel	5.47	Rincian Kas Dana BOK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	164 – 164
Tabel	5.48	Rincian Kas Dana BOK per BLUD 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	164 – 165
Tabel	5.49	Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	166 – 166
Tabel	5.50	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	166 – 167
Tabel	5.51	Rekapitulasi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lainnya (Non BPHTB dan PBB P2) Tahun Anggaran 2025	167 – 167
Tabel	5.52	Mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2025	168 – 168
Tabel	5.53	Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2025	168 – 168
Tabel	5.54	Mutasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2025	169 – 169
Tabel	5.55	Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2025	169 – 169

Tabel	5.56	Mutasi Piutang Pajak Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025	170 – 170
Tabel	5.57	Mutasi Piutang Pajak Parkir Tahun 2025	170 – 170
Tabel	5.58	Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025	171 – 171
Tabel	5.59	Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025	171 – 171
Tabel	5.60	Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	173 – 173
Tabel	5.61	Mutasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025	173 – 173
Tabel	5.62	Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	174 – 174
Tabel	5.63	RUPS Pembagian Dividen PT Tirta Wibawa Mukti Tahun 2025	174 – 174
Tabel	5.64	Penerimaan Deviden PT. Tirta Wibawa Mukti Tahun 2025	174 – 175
Tabel	5.65	Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	175 – 176
Tabel	5.66	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	178 – 178
Tabel	5.67	Perhitungan Piutang Kompensasi Dampak Negatif Persampahan TPA Sarimukti per 31 Desember 2025	179 – 179
Tabel	5.68	Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	179 – 179
Tabel	5.69	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	180 – 180
Tabel	5.70	Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	181 – 181
Tabel	5.71	Rincian Beban Dibayar Dimuka Per SKPD Tahun 2025	182 – 182
Tabel	5.72	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	182 – 182
Tabel	5.73	Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2025	184 – 185
Tabel	5.74	Rincian Investasi Jangka Panjang Permanen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	186 – 186
Tabel	5.75	Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025	187 – 187
Tabel	5.76	Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025	188 – 188
Tabel	5.77	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	189 – 189
Tabel	5.78	Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	190 – 190
Tabel	5.79	Daftar Kasus Sengketa Tanah pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025	193 – 194
Tabel	5.80	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	198 – 198
Tabel	5.81	Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	201 – 201
Tabel	5.82	Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	204 – 204

Tabel	5.83	Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	206 – 206
Tabel	5.84	Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	207 – 207
Tabel	5.85	Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	207 – 208
Tabel	5.86	Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	209 – 209
Tabel	5.87	Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2025	210 – 210
Tabel	5.88	Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	216 – 216
Tabel	5.89	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	216 – 216
Tabel	5.90	Pendapatan Diterima di Muka SKPD Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	217 – 217
Tabel	5.91	Rincian Utang Beban/Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024	218 – 218
Tabel	5.92	Rincian Utang Belanja Pegawai pada BLUD Tahun 2025	218 – 218
Tabel	5.93	Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2025	219 – 219
Tabel	5.94	Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada BLUD Tahun 2025	219 – 219
Tabel	5.95	Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025	220 – 220
Tabel	5.96	Rincian Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	220 – 220
Tabel	5.97	Ikhtisar Laporan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024	221 – 221
Tabel	5.98	Rincian Pendapatan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	222 – 222
Tabel	5.99	Rincian Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	222 – 223
Tabel	5.100	Mutasi Pajak Daerah – LO Tahun 2025	223 – 224
Tabel	5.101	Rincian Pajak Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	224 – 224
Tabel	5.102	Mutasi Retribusi Daerah – LO Tahun 2025	225 – 225
Tabel	5.103	Rincian Retribusi Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	225 – 226
Tabel	5.104	Mutasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025	227 – 227
Tabel	5.105	Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	227 – 227
Tabel	5.106	Mutasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025	228 – 228
Tabel	5.107	Rincian Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025 - 2024	228 – 229
Tabel	5.108	Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	229 – 229
Tabel	5.109	Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025	229 – 230
Tabel	5.110	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	230 – 231
Tabel	5.111	Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO Tahun 2025	231 – 231

Tabel	5.112	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	231 – 232
Tabel	5.113	Mutasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025	232 – 232
Tabel	5.114	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	233 – 233
Tabel	5.115	Rincian Beban Operasi – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	233 – 233
Tabel	5.116	Mutasi Beban Pegawai– LO Tahun 2025	234 – 234
Tabel	5.117	Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	234 – 234
Tabel	5.118	Mutasi Beban Persediaan– LO Tahun 2025	235 – 235
Tabel	5.119	Rincian Beban Persediaan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	236 – 236
Tabel	5.120	Penjelasan Perhitungan Beban Persediaan – LO Tahun 2025	236 – 236
Tabel	5.121	Mutasi Beban Jasa dan Sewa – LO Tahun 2025	237 – 237
Tabel	5.122	Rincian Beban Jasa dan Sewa – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	237 – 238
Tabel	5.123	Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025	238 – 238
Tabel	5.124	Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025 - 2024	238 – 239
Tabel	5.125	Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO TA 2025 - dan Tahun 2024	239 – 239
Tabel	5.126	Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025	240 – 240
Tabel	5.127	Rincian Beban Hibah - LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	241 – 241
Tabel	5.128	Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	241 – 241
Tabel	5.129	Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	242 – 242
Tabel	5.130	Rincian Beban Penyusutan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	243 – 244
Tabel	5.131	Rincian Beban Amortisasi – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	244 – 244
Tabel	5.132	Mutasi Beban Transfer – LO Tahun 2025	245 – 245
Tabel	5.133	Rincian Beban Transfer – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024	245 – 245
Tabel	5.134	Rincian Mutasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO Tahun 2025	246 – 246
Tabel	5.135	Rincian Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	246 – 246
Tabel	5.136	Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024	247 – 248
Tabel	5.137	Arus Kas dari Aktivitas Non Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024	252 – 253
Tabel	5.138	Rincian Perolehan Aset Tetap Tahun 2025 dan Tahun 2024	254 – 254
Tabel	5.139	Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024	255 – 255
Tabel	5.140	Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan Tahun 2024	255 – 256
Tabel	5.141	Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	256 – 256
Tabel	5.142	Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024	257 – 257
Tabel	5.143	Rincian Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	257 – 257
Tabel	5.144	Rincian Surplus/Defisit - LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	257 – 257
Tabel	5.145	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024	258 – 258

Tabel	5.146	Rincian SKPD yang Mengalami Koreksi Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2025	262 – 262
Tabel	5.147	Rincian Tabel Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025	263 – 264
Tabel	5.148	Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025	264 – 265
Tabel	5.149	Rincian Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	265 – 265

BAB VI

Tabel	6.1	Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat Masa Jabatan Tahun 2024-2029	274 – 278
Tabel	6.2	Nama-nama Pejabat Kabupaten Bandung Barat	278 – 279
Tabel	6.3	Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan PPPK di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat	280 – 281

DAFTAR GAMBAR

HALAMAN

BAB III

Gambar	3.1	Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025	48
Gambar	3.2	Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025	49
Gambar	3.3	Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025	50
Gambar	3.4	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025	51
Gambar	3.5	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025	53
Gambar	3.6	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025	54
Gambar	3.7	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Terduga Tahun 2025	55
Gambar	3.8	Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025	56
Gambar	3.9	Grafik Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025	57

BAB VI

Gambar	6.1	Peta Wilayah Kabupaten Bandung Barat	266
Gambar	6.2	Luas Daerah menurut Kecamatan (%)	267
Gambar	6.3	Presentase Luas Kecamatan	268
Gambar	6.4	Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 2025	271

DAFTAR LAMPIRAN

CaLK 1	Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025
CaLK 1a	Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Spesific Grant) Dinas Pendidikan
CaLK 1b	Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Spesific Grant) Dinas Kesehatan
CaLK 1c	Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Spesific Grant) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
CaLK 1d	Pendapatan Pajak Daerah per Sub Rincian Objek Tahun Anggaran 2025
CaLK 1e	Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025
CaLK 2a	Rincian Kas Mandatory di Kas Daerah per 31 Desember 2025
CaLK 2b	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025
CaLK 2c	Realisasi Pendapatan dan Belanja BLUD RSUD TA 2025
CaLK 2d	Rekapitulasi Sisa Dana BOS per Sekolah Jenjang Sekolah Dasar (SD) Negeri per tanggal 31 Desember 2025
CaLK 2e	Rekapitulasi Sisa Dana BOS per Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri per tanggal 31 Desember 2025
CaLK 2f	Rincian Kas Lainnya Tahun 2025
CaLK 3	Rekap Keseluruhan Piutang Pajak Daerah Lainnya Per 31 Desember 2025
CaLK 4	Perhitungan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Buku I s/d buku V per Tahun Pajak per 31 Desember Tahun 2025
CaLK 5	Rincian Mutasi Piutang Pajak Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025
CaLK 6	Piutang BLUD 2025
CaLK 6a	Rekap Piutang Izin Mendirikan Bangunan Tahun 2025
CaLK 7	Rekap Piutang Retribusi PBG Tahun 2025
CaLK 8	Piutang Kemitraan Dengan Pihak Ketiga
CaLK 9a	Rekap Piutang Denda Pajak 2025
CaLK 9b	Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2025

CaLK 9c Piutang Taspen TA. 2025
CaLK 9d Data Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan 2025
CaLK 9e Data Lebih Salur Bagi Hasil Retribusi Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan 2025
CaLK 9f Rekap Piutang atas Cicilan Denda Kontribusi Maribaya Tahun 2025
CaLK 10 Perhitungan Piutang Kompensasi Dampak Negatif Persampahan TPA Sarimukti per 31 Desember 2025
CaLK 11 Rekapitulasi Data Penyisihan Piutang Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025
CaLK 12 Daftar Beban Sewa Dibayar Dimuka Tahun 2025
CaLK 13 Daftar Persediaan Tahun Anggaran 2025
CaLK 13a Barang Persediaan Kadaluarsa Tahun 2025
CaLK 14 Rekap Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Sampai Dengan 31 Desember 2025
CaLK 15 Aset Tetap Tanah Tahun 2025
CaLK 16 Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2025
CaLK 17 Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2025
CaLK 17a Rekapitulasi Revitalisasi Satuan Pendidikan Dasar Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025
CaLK 17b Rekapitulasi Revitalisasi Sekolah Pendidikan Menengah Pertama (SMP) Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025
CaLK 18 Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2025
CaLK 19 Aset Tetap Lainnya Tahun 2025
CaLK 20 Kartu Inventaris Barang (KIB) F Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2025
CaLK 21 Rekap Akumulasi Penyusutan Aset Tahun 2025
CaLK 22a Rekap Aset Tidak Berwujud Tahun 2025
CaLK 22b Rekap Mutasi Aset Lain-lain Tahun 2025
CaLK 22c Rincian Aset Lain-lain Tahun 2024
CaLK 22d Rincian Aset Lain-lain Tahun 2025
CaLK 23a Daftar Penerimaan Diterima dimuka Pajak Reklame Tahun 2025

CaLK 23b Pendapatan Diterima dimuka atas Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing Tahun 2025

CaLK 23c Pendapatan Diterima dimuka atas Pemanfaatan Lahan/Gedung untuk Penyediaan ATM BJB TA. 2025

CaLK 24 Rekap Utang Belanja BLUD 2025

CaLK 25 .Rekapitulasi Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun Anggaran 2025

CaLK 26 Kewajiban Kompensasi Jasa Pelayanan (KJP) Persampahan Sarimukti Tahun Anggaran 2025

CaLK 27 Rekapitulasi Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2025

CaLK 28a Data Kurang Salur Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025

CaLK 28b Data Kurang Salur Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025

CaLK 28c Data Kurang Salur Alokasi Dana Desa Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 dan 2025

CaLK 29 Kertas Kerja Beban Persediaan 2025

CaLK 30 Perhitungan Laporan Perubahan Ekuitas Per 31 Desember 2025

CaLK 31 Koreksi Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin

CaLK 32 Koreksi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Dan Irigasi

CaLK 33 Koreksi Penghapusan Aset Lain-Lain

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam melaksanakan pembangunan yang telah ditetapkan dalam target APBD TA 2025 berparadigma penyelenggaraan pemerintahan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik yang merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pembangunan dapat dilaksanakan dengan capaian target secara maksimal dan pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sedangkan dalam pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam menyusun dan melaksanakan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pedoman tersebut mengisyaratkan bahwa dalam pengelolaan keuangan daerah agar berasaskan prestasi kerja. Hal tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban dari suatu kegiatan untuk sebuah produk/hasil yang mengutamakan *output*.

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Maksud penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah bentuk pertanggungjawaban Bupati Bandung Barat atas pengelolaan keuangan yang laporannya dibuat terstruktur serta sebagai sarana informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja serta pembiayaan dengan anggaran yang ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selaku entitas pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan;

1. Akuntabilitas

   Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2. Manajemen

   Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan suatu entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban dan ekuitas.

3. Transparansi

   Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundangan.

4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

   Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan pemerintah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan dampak generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

5. Evaluasi Kinerja

   Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola pemerintah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Tujuan penyusunan laporan keuangan adalah menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Informasi yang disajikan mencakup:

1. Penyediaan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Penyediaan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Penyediaan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan dalam entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Penyediaan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Penyediaan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan; dan
7. Penyediaan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas suatu entitas pelaporan.

1.1.3. Komponen Laporan Keuangan

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL);

3. Laporan Operasional (LO);
4. Neraca;
5. Laporan Arus Kas (LAK);
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar, sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai peraturan perundang-undangan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pendapatan-LRA;
b. Belanja-LRA;
c. Transfer-LRA;
d. Surplus/Defisit-LRA;
e. Pembiayaan; dan
f. Sisa lobih/kurang pembiayaan anggaran.

2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL)

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

3. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Setiap entitas pelaporan mengklasifikasikan asetnya dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajibannya menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal

pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a. Kas dan setara kas;
b. Investasi jangka pendek;
c. Piutang pajak dan bukan pajak;
d. Persediaan;
e. Investasi jangka panjang;
f. Aset tetap;
g. Aset Lainnya;
h. Kewajiban jangka pendek;
i. Kewajiban jangka panjang; dan
j. Ekuitas.

4. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional (LO) menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu periode pelaporan. Laporan Operasional (LO) menyajikan pos-pos sebagai berikut:

a. Pendapatan - LO dari Kegiatan Operasional

   Pendapatan - LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.

b. Beban dari Kegiatan Operasional

   Beban adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

c. Surplus/Defisit dari Kegiatan Operasional

   Surplus/defisit dari kegiatan operasional adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan beban selama satu periode pelaporan.

d. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

   Pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Yang termasuk dalam pendapatan/beban dari kegiatan non operasional antara lain surplus/defisit

penjualan aset non lancar, surplus/defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan surplus/defisit dari kegiatan non operasional lainnya.

e. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa adalah pendapatan atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian yang tidak diramalkan terjadi pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang, dan kejadian di luar kendali entitas pemerintah. Sifat dan jumlah rupiah kejadian luar biasa harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

f. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Defisit-LO adalah penjumlahan selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Saldo Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

5. Laporan Arus Kas (LAK)

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah; dan

b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah.

6. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan pos-pos:

a. Ekuitas awal adalah kekayaan bersih awal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah;

b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;

c. Koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, seperti koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya dan perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap; dan

d. Ekuitas akhir adalah kekayaan bersih akhir pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

7. **Catatan atas Laporan Keuangan**

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Mengungkapkan informasi umum tentang Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi;

b. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro;

c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;

d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;

e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;

f. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan

g. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang

wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, dengan terlebih dahulu melakukan konversi laporan keuangan yang telah disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Daerah.

Konversi dilakukan dengan mengacu kepada Buletin Teknis Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dengan Konversi yang diterbitkan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). Konversi mencakup jenis laporan, basis akuntansi, pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan pos-pos laporan keuangan, struktur APBD, klasifikasi anggaran, aset, kewajiban, ekuitas, arus kas, serta catatan atas laporan keuangan.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Landasan hukum dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4688);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020 Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2018 Nomor 8 Seri E, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: 3/126/2018, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (9/274/2024));
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 1);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat : (6/198/2025));

31. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 4);
32. Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan (Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2022 Nomor 51); dan
33. Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 188.45/Kep.446-BPKD/2020 tentang Penambahan Kodefikasi Barang pada Sub Rincian Objek dalam Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

- 2.1 Ekonomi Makro
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah
- 3.2 Alokasi Anggaran dan Realisasi DBCHT TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat
- 3.3 Alokasi Anggaran dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat
- 3.4 Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Spesifik Grant) TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat

Bab IV Kebijakan Akuntansi

4.1 Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.1 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos LRA

5.2 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan SAL

5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Neraca

5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Operasional

5.5 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Arus Kas

5.6 Rincian dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Nonkeuangan

Bab VII Penutup

BAB II
EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

Pembangunan merupakan suatu proses yang harus dilakukan secara terus menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi berkelanjutan. Di samping itu, pembangunan yang dilakukan juga merupakan suatu proses multidimensional yang menyangkut perubahan-perubahan penting dalam suatu struktur, sistem sosial, ekonomi, sikap masyarakat, percepatan pertumbuhan ekonomi, pengurangan angka pengangguran dan penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu perlu dirumuskan dalam suatu perencanaan pembangunan Daerah yang transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan, yang bertujuan untuk mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik serta daya saing Daerah.

RKPD Tahun 2025 memastikan beberapa tema dan isu pembangunan yang menjadi prioritas nasional di Tahun 2025, mencakup:

a. Penguatan SDM pendidikan dan kesehatan
b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
c. Pencegahan stunting dan kemiskinan ekstrim
d. Pengendalian inflasi daerah
e. Peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah
f. Dukungan swasembada pangan
g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan UMKM

Sejalan dengan prioritas nasional, di Kabupaten Bandung Barat arah kebijakan bidang perekonomian yang tercantum di dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025-2029 dalam rangka mewujudkan Bandung Barat AMANAH (Agamis, Maju, Adaptif, Nyaman, Aspiratif, Harmonis) sebagaimana dirumusan mengenai upaya-upaya dalam mewujudkan Visi tersebut sebagaimana tercantum pada Misi ke 2 yaitu "Meningkatkan Produktifitas dan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Potensi Sektor Unggulan

Daerah". Tujuan dan sasaran pembangunan pada tahun 2025-2029 yang ingin dicapai pada Misi ke 2 dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dengan sasaran:

1. Meningkatnya Pertumbuhan dan Stabilitas Ekonomi Daerah yang didukung Aktifitas Investasi
2. Menurunnya Angka Kemiskinan dan Ketimpangan Berkurang
3. Meningkatnya Produktifitas dan Kesempatan Kerja

Pencapaian rencana kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), PDRB Perkapita dan Tingkat Inflasi.

2.1. Ekonomi Makro

Salah satu indikator kinerja Pembangunan suatu daerah diukur melalui indikator-indikator makro ekonomi yang secara umum telah diakui dan diberlakukan. Pencapaian perekonomian suatu daerah merupakan gambaran dari prestasi Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di daerah. Indikator pencapaian pembangunan ekonomi yang secara umum diakui adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan Inflasi. Besaran kontribusi perekonomian di Kabupaten Bandung Barat masih tetap dipengaruhi oleh sektor utama yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel dan restoran serta sektor pertanian.

2.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 secara riil ditunjukkan oleh laju pertumbuhan ekonomi (LPE) atas dasar harga konstan Tahun 2010 sebesar 5,28% mengalami kenaikan jika dibandingkan Tahun 2024 yang mencapai sebesar 4,94%.

Tabel 2.1
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Bandung Barat Atas Dasar Harga Konstan Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat (persen), 2021-2025

Kabupaten/Kota	Tahun				
Regency/Municipality	2021	2022	2023	2024	2025**
1	2	3	4	5	6
3201 Bogor	3,55	5.25	5.19	5,21	
3202 Sukabumi	3,75	5.12	5.17	5,15	
3203 Cianjur	3,48	5.04	5.16	5,14	
3204 Bandung	3,56	5.35	4.97	5,04	
3205 Garut	3,58	5.08	4.94	4,95	
3206 Tasikmalaya	3,43	4.70	4.69	4,64	
3207 Ciamis	3,66	5.02	4.99	4,97	
3208 Kuningan	3,56	5.53	5.25	5,61	
3209 Cirebon	2,47	4.09	4.85	5,83	
3210 Majalengka	4,75	6.63	6.15	6,38	
3211 Sumedang	3,17	5.03	5.01	4,05	
3212 Indramayu	0,58	2.88	9.76	2,18	
3213 Subang	2,4	4.29	4.64	4,81	
3214 Purwakarta	3,42	5.24	4.97	4,64	
3215 Karawang	5,85	6.31	5.40	4,20	
3216 Bekasi	3,65	5.30	5.32	5,17	
3217 Bandung Barat	3,46	5.34	5.00	4,94	5,28

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

Kinerja perekonomian Kabupaten Bandung Barat secara umum cukup menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meski masih banyak potensi ekonomi yang belum dikembangkan secara optimal. Arah dan gerak pembangunan daerah harus tetap fokus dan terarah, pembangunan tidak hanya semata-mata mengejar laju pertumbuhan ekonomi saja, namun aspek pemerataan menjadi salah satu target pembangunan yang penting.

2.1.2. PDRB per Kapita

Indikator yang sering dipakai untuk menggambarkan tingkat kemakmuran masyarakat secara makro adalah pendapatan perkapita atau *Percapita Income*. Semakin tinggi pendapatan yang diterima penduduk di suatu wilayah maka tingkat kesejahteraan di wilayah yang bersangkutan dapat dikatakan bertambah baik. Oleh karena pendapatan faktor produksi dan transfer yang mengalir keluar (*transfer out*) serta transfer masuk (*transfer in*) yang merupakan komponen penghitungan

pendapatan regional, belum dapat dihitung maka dalam penghitungan pendapatan per kapita menggunakan PDRB perkapita. Angka ini diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun.

1. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2021-2025

Tabel 2.2
Produk Domestik Regional Bruto
Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bandung Barat 2021-2025

No.	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	6.140,22	6.812,50	7.247,21	7.732,00	8.584,3
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	506,84	517,68	535,9	574,97	591,84
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	20.188,77	22.012,92	23.440,63	25.014,94	26.620,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	418,08	441,35	463,1	511,74	531,63
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	21,6	23,85	24,50	28,83	31,73
F	Konstruksi/*Construction*	3.683,20	3.878,19	4.184,36	4.238,63	4.620,90
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	6.188,06	6.535,27	7.060,70	7.583,22	8.069,95
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	2.511,57	2.905,25	3.409,12	3.794,05	4.204,42
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	2.417,65	2.783,85	3.063,80	3.203,71	3.315,43
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	1.069,96	1.120,75	1.191,52	1.261,78	1.333,08
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	455,56	490,38	516,24	612,70	679,11
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	939,98	1.016,14	1.096,94	1.214,39	1.310,70
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	218,83	253,49	283,21	325,89	388,97
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	1.242,43	1.201,45	1.247,80	1.310,23	1.379,56
P	Jasa Pendidikan/*Education*	1.983,84	2.078,60	2.248,48	2.727,92	3.059,12

No.	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	274,36	290,83	316,87	388,32	435,47
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	503,35	558,78	614,81	713,04	757,04
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**48.764,30**	**52.921,28**	**56.945,19**	**61.236,36**	**65.913,64**

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

2. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2021-2025

Tabel 2.3
Produk Domestik Regional Bruto
atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bandung Barat 2021-2025

No	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	3.672,83	3.823,82	3.884,46	4.100,25	4.444,05
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	342,68	342,29	344,65	355,05	345,75
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	13.126,08	13.970,00	14.710,29	15.171,50	15,702,08
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	254,96	266,93	273,12	282,88	289,26
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	13,89	14,95	15,28	15,82	16,51
F	Konstruksi/*Construction*	2.378,25	2.419,98	2.528,35	2.661,56	2.746,42
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	4.142,79	4.305,72	4.479,13	4.684,35	4.927,54
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	1.561,04	1.716,34	1.894,38	2.080,10	2.352,31
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	1.553,41	1.709,15	1 866,42	1.987,30	2.146,84
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	1.094,91	1.155,96	1.228,47	1.335,51	1.448,43
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	277,91	274,48	284,16	303,95	309,86
L	Real Estat/Real Estate *Activities*	676,51	731,75	777,36	840,82	887,61
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	146,31	161,89	173,66	184,85	193,63

No	Lapangan Usaha/*Industry*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	688,15	666,91	683	728,77	753,31
P	Jasa Pendidikan/*Education*	1.241,87	1.272,15	1.322,48	1.414,62	1.492,61
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	181,52	19,58	203,64	214,94	224,91
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	346,54	368,19	393,35	431,41	455,73
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**31.699,65**	**33.220,09**	**35.062,20**	**36.793,68**	**38.736,85**

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

3. Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat, 2021-2025

Tabel 2.4
Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/*Agriculture, Forestry, and Fishing*	12,59	12,87	12,73	12,63	13,02
B	Pertambangan dan Penggalian/*Mining and Quarrying*	1,04	0,98	0,94	0,94	0,90
C	Industri Pengolahan/*Manufacturing*	41,20	41,60	41,16	40,85	40,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas/*Electricity and Gas*	0,86	0,83	0,81	0,84	0,81
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/*Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities*	0,04	0,05	0,04	0,05	0,05
F	Konstruksi/*Construction*	7,55	7,33	7,35	6,92	7,01
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/*Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles*	12,69	12,35	12,40	12,38	12,24
H	Transportasi dan Pergudangan/*Transportation and Storage*	5,15	5,49	5,99	6,20	6,38
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/*Accommodation and Food Service Activities*	4,96	5,26	5,38	5,23	5,03
J	Informasi dan Komunikasi/ *Information and Communication*	2,19	2,12	2,09	2,06	2,02

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ *Financial and Insurance Activities*	0,93	0,93	0,91	1,00	1,03
L	Real Estat/*Real Estate Activities*	1,93	1,92	1,93	1,98	1,99
M,N	Jasa Perusahaan/*Business Activities*	0,45	0,48	0,50	0,53	0,59
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/*Public Administration and Defence; Compulsory Social Security*	2,55	2,27	2,19	2,14	2,09
P	Jasa Pendidikan/*Education*	4,07	3,93	3,95	4,45	4,64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/*Human Health and Social Work Activities*	0,56	0,55	0,56	0,63	0,66
R,S,T,U	Jasa Lainnya/*Other Services Activities*	1,03	1,06	1,08	1,16	1,15
	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**99,79**	**100,02**	**100,01**	**99,99**	**100,00**

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

4. Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Bandung Barat (persen), 2021-2025

Tabel 2.5
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto
atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha
di Kabupaten Bandung Barat 2021-2025

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	(1,03)	4,11	1,59	5,56	8,38
B	Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	6,26	(0,11)	0,69	3,02	(2,62)
C	Industri Pengolahan/Manufacturing	4,87	6,43	5,30	3,14	3,50
D	Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	10,94	4,70	2,32	3,57	2,25
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage, Waste Management, and Remediation Activities	9,58	7,61	2,23	3,51	4,37
F	Konstruksi/Construction	7,38	1,75	4,48	5,27	3,19

No	Lapangan Usaha	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	2,93	3,93	4,03	4,58	5,19
H	Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,10	9,95	10,37	9,80	13,09
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	(0,99)	10,03	9,20	6,48	8,03
J	Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	7,79	5,58	6,27	8,71	8,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi/ Financial and Insurance Activities	5,61	(1,24)	3,53	6,97	1,94
L	Real Estat/Real Estate Activities	9,86	8,06	6,23	8,16	5.57
M,N	Jasa Perusahaan/Business Activities	7,98	10,65	7,27	6,45	4.75
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	(2,56)	(3,09)	2,41	6,70	3,37
P	Jasa Pendidikan/Education	0,04	2,44	3,96	6,97	5,51
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	6,09	5,25	5,74	5,55	4,64
R,S,T,U	Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,76	6,30	6,78	9,68	5,64
	Produk Domestik Regional Bruto/Gross *Regional Domestic Product*	**3,65**	**3,92**	**3,92**	**4,96**	**4,06**

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

5. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran di Kabupaten Bandung Barat (miliar rupiah), 2021-2025

Tabel 2.6
Produk Domestik Regional Bruto
atas Dasar Harga Berlaku Menurut Jenis Pengeluaran
di Kabupaten Bandung Barat 2021-2025

No	Jenis Pengeluaran/ *Type of Expenditure*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga/*Household Consumption Expenditure*	32.262,77	35.585,57	38.904,79	41.368,99	43.437,43
2	Pengeluaran Konsumsi LNPRT NPISH *Consumption Expenditure*	455,28	486,46	556,40	612,28	637,95
3	Pengeluaran Konsumsi Pemerintah/*Government Consumption Expenditure*	3.078,08	3.080,70	3.204,43	3.514,89	3.661,26

No	Jenis Pengeluaran/ *Type of Expenditure*	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
4	Pembentukan Modal Tetap Bruto / *Gross Fixed Capital Formation*	10.540,03	11.216,89	12.110,42	12.639,69	13.494,58
5	Perubahan Inventori/ *Changes in Inventories*	-387,66	58,65	50,86	63,27	8,83
6	Net Ekspor Barang dan Jasa/ *Net Exports of Goods and Services*	2.815,82	2.493,01	2.118,28	3.037,21	4.673,57
7	Produk Domestik Regional Bruto/*Gross Regional Domestic Product*	**48.764,32**	**52.921,30**	**56.945,18**	**61,236,33**	**65,913,62**

Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026

PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk secara nominal. PDRB per kapita berlaku selama kurun waktu Tahun 2021-2025 (Sumber: Data Makro BPS Kab. Bandung Barat Dalam Angka Tahun 2026).

2.1.3. Tingkat Inflasi

Perubahan harga dapat diukur dengan menggunakan perubahan indeks harga, seperti Indeks Harga Konsumen (IHK), Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB), dan indeks harga implisit. Secara makro, inflasi dalam konteks ini adalah menunjukkan perubahan indeks implisit di Kabupaten Bandung Barat. Pada Tahun 2025 inflasi mencapai 2,24%; mengalami penurunan jika dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai sebesar 2,48%.

Tabel 2.7
Laju Inflasi PDRB Kabupaten Bandung Barat Tahun 2021-2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7
1	PDRB atas dasar harga berlaku(Miliar Rp)	48.764,31	52.921,29	56.945,18	61.236,34	65.913,62
2	PDRB atas dasar harga konstan tahun 2000 (Miliar Rp)	31.701,79	33.393,29	35.062,19	36.793,68	38.736,85
3	Indeks Harga Implisit	154,00	158,00	162,00	166,00	170,00
4	Laju Inflasi (persen)	1,4	3,00	3,00	2,00	2,00

2.2 Kebijakan Keuangan

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan. Semua sumber keuangan yang melekat

pada urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber penerimaan yang cukup dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas, dapat dilihat dari penerimaan fiskal daerah. Terbatasnya sumber-sumber penerimaan fiskal telah menempatkan pengelolaan aset daerah secara profesional pada posisi yang amat potensial untuk menunjang penerimaan Pemerintah Daerah. Dalam rangka mendanai pelaksanaan program dan kegiatan selain pendanaan melalui APBD, terdapat sumber pendanaan lainnya di luar APBD (non-APBD) antara lain pendanaan melalui pendanaan Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Khusus non-Fisik, serta Bantuan Keuangan Provinsi dan Nasional.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2025, telah dituangkan dalam Nota Kesepakatan antara Pemerintah Daerah dan DPRD Nomor: 900.1.1.4/MOU.48-BKAD/2025 900/1.1.4/MOU.002-DPRD/2025 tentang Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja (KUPA) Tahun Anggaran 2025.

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 disusun berdasarkan RKPD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD.

Pengelolaan keuangan daerah merupakan rangkaian siklus APBD yang pelaksanaannya dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan/pemeriksaan sampai dengan pertanggungjawaban yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. APBD Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2023 Nomor 9, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat (9/274/2024) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 Nomor 6, Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Provinsi Jawa Barat: (6/198/2025). Kebijakan umum pengelolaan keuangan sebagaimana diamanatkan dalam Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Pada TA 2025, untuk pendapatan daerah diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan dana perimbangan. Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pendapatan daerah tersebut adalah:

1. Memantapkan kelembagaan dan pelayanan publik melalui peningkatan peran dan fungsi Kantor Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas/Balai Penghasil;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi;
3. Meningkatkan pengelolaan aset-aset daerah yang dapat menghasilkan potensi pendapatan bagi daerah;
4. Meningkatkan koordinasi dan perbitungan lebih intensif, bersama antara pusat-daerah untuk pengalokasian sumber pendapatan dari dana perimbangan dan non perimbangan;
5. Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan kepercayaan serta partisipasi aktif masyarakat/lembaga dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak dan retribusi;
6. Meningkatkan sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pendapatan;
7. Memantapkan kinerja organisasi dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak;
8. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari PERUMDA (Perusahan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti) sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah; dan
9. Meningkatkan kemampuan aparatur yang berkompeten dan terpercaya dalam rangka peningkatan pendapatan dengan menciptakan kepuasan pelayanan prima.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan penerimaan pajak orang pribadi dalam negeri (PPh SKPDN), PPh Pasal 21, pajak ekspor, dan PPh Badan;
2. Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan bagi hasil dalam dana perimbangan;
3. Meningkatkan penyerapan penggunaan DAK sesuai peruntukannya; dan

4. Meningkatkan koordinasi secara intensif dengan pemerintah pusat untuk dana perimbangan dan kabupaten/kota serta provinsi.

Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah terdiri atas:

1. PBB-P2;
2. Pajak Reklame;
3. PAT;
4. Opsen PKB; dan
5. Opsen BBNKB

Opsen pajak diatur melalui UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (HKPD) dan ditegaskan dalam PP No. 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Opsen adalah pungutan tambahan pajak (66% untuk PKB/BBNKB kabupaten/kota) yang mulai berlaku efektif 5 Januari 2025 untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Jenis Pajak kabupaten/kota yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:

1. BPHTB;
2. PBJT atas:
   a) Makanan dan/atau Minuman;
   b) Tenaga Listrik;
   c) Jasa Perhotelan;
   d) Jasa Parkir; dan
   e) Jasa Kesenian dan Hiburan;
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet.

PAD juga didapatkan dengan melibatkan SKPD pengelola, dari restribusi daerah yang diantaranya terdiri dari: Parkir, Terminal, PBG, Pasar, Perdagangan, Industri, Sampah, dan lain-lain.

Selain dari jenis pajak di atas, daerah dilarang memungut jenis pajak lainnya. Namun demikian sebelas jenis pajak tersebut dapat tidak dipungut apabila potensinya kurang memadai dan/atau disesuaikan dengan kebijakan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sedangkan untuk retribusi daerah, dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) objek retribusi yaitu: retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

Salah satu penyumbang kontribusi yang cukup besar bagi PAD Kabupaten Bandung Barat adalah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Penerangan Jalan dari pemakai listrik industri.

b. Upaya-upaya lain yang dilakukan dalam rangka peningkatan PAD diantaranya adalah: penyederhanaan sistem serta prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, melakukan sosialisasi peraturan yang dapat meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah, peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan untuk terciptanya efektivitas serta efisiensi yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, ketepatan, dan kecepatan pelayanan.

c. Mengoptimalkan potensi pendapatan dari BUMD Perusahaan Air Minum Tirta Wibawa Mukti Bandung Barat sebagai badan usaha yang dapat menghasilkan profit bagi pemerintah daerah.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

a. Dana Bagi Hasil

Besarnya dana bagi hasil pajak tergantung pada peningkatan masing-masing komponen pajak yang mempengaruhinya. Semakin besar pajak yang disetor ke kas negara, maka semakin besar pula bagi hasil pajak yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat, Alokasi Dana Bagi Hasil secara keseluruhan adalah sebesar Rp105.826.344.000,00.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

DAU merupakan salah satu sumber PAD yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai kebutuhan belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan

pelayanan umum, sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2007. Alokasi DAU yang diterima oleh Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian alokasi Anggaran Dana Transfer ke Daerah adalah sebesar Rp1.301.427.209.000,00. Alokasi DAU setiap Daerah terdiri atas bagian DAU yang tidak ditentukan penggunaannya dan bagian DAU yang ditentukan penggunaannya adalah sebesar Rp1.095.278.699.000,00. Bagian DAU yang ditentukan penggunaannya terdiri atas:

- Dukungan penggajian PPPK Daerah sebesar Rp9.826.872.000,00;
- Dukungan pembangunan sarana dan prasarana, pemberdayaan masyarakat di Kelurahan;
- Dukungan bidang Pendidikan sebesar Rp101.242.198.000,00;
- Dukungan bidang Kesehatan sebesar Rp95.079.440.000,00; dan
- Dukungan bidang pekerjaan umum.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

DAK merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penggunaannya diprioritaskan untuk mendanai pembangunan sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah. Pemanfaatannya sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh kementerian terkait sebagaimana telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. DAK akan menambah belanja langsung SKPD sesuai dengan peruntukannya. Alokasi DAK Fisik berdasarkan KMK Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian alokasi Anggaran Dana Transfer ke Daerah secara keseluruhan sebesar Rp13.131.194.000,00 sedangkan berdasarkan KMK Nomor 453 Tahun 2024 untuk DAK Non Fisik sebesar Rp531.247.028.000,00.

d. Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang dialokasikan khusus untuk desa, disalurkan melalui APBD kabupaten/kota guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tujuannya adalah meningkatkan pelayanan publik, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian, serta

memperkuat kemandirian desa. Alokasi Dana Desa berdasarkan PMK Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa TA 2025 adalah sebesar Rp245.021.177.000,00.

e. Insentif Fiskal

Insentif fiskal adalah dana dari APBN yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah berkinerja baik, serta berbagai fasilitas keringanan pajak (seperti pengurangan pajak atau bea masuk) bagi dunia usaha. Tujuannya adalah mengapresiasi tata kelola keuangan/pelayanan daerah, mendorong pembangunan ekonomi, dan meningkatkan daya saing investasi. Alokasi Insentif Fiskal berdasarkan KMK Nomor 138 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Dana Insentif Fiskal TA 2025 untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Adalah sebesar Rp8.201.462.000,00.

Penggunaan dana transfer pusat diprioritaskan untuk:

1) Mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum dari sumber DAU;

2) Mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah antara lain program dan kegiatan pendidikan, kesehatan, air minum, sanitasi, perikanan, sarana pemerintahan dan lain-lain sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan dari sumber DAK;

3) Mendanai pemeliharaan, peningkatan dan pembangunan jaringan jalan, jembatan dan irigasi;

4) Mendanai perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan; dan

5) Mendanai pembangunan perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Pendapatan Transfer Antar Daerah

Jenis pendapatan ini dipengaruhi oleh penghasilan/pendapatan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, karena Kabupaten Bandung Barat akan diberikan dana bantuan keuangan, bagi hasil pajak rokok, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dari Provinsi Jawa Barat dan Kompensasi Dampak Negatif (KDN) dari Kabupaten Bandung, Kota Bandung, dan Kota Cimahi.

2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Prinsip *money follow function* harus diubah menjadi prinsip *money follow program* dengan memperhatikan prioritas pembangunan sesuai permasalahan serta situasi dan kondisi pada tahun mendatang. Artinya, program dan kegiatan strategis yang memang menjadi prioritas yang mendapatkan anggaran. Hal ini juga yang menjadi pedoman untuk pelaksanaan pembangunan Tahun 2025. Kebijakan umum belanja daerah diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan penetapan prioritas alokasi anggaran. Selain itu, kebijakan belanja daerah juga diarahkan untuk mencapai visi dan misi yang ditetapkan dalam rangka memperbaiki kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Secara spesifik, efisiensi dan efektivitas belanja harus menjadi kebijakan yang diaplikasikan pada semua pos-pos belanja. Belanja daerah terdiri dari:

1. Belanja Operasi;
2. Belanja Modal;
3. Belanja Tidak Terduga; dan
4. Belanja Transfer.

Kebijakan belanja daerah diupayakan penggunaannya untuk:

1. Dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat. Komponen belanja langsung wajib dan mengikat meliputi: Honorarium Pegawai ASN BLUD; Belanja Jasa Kantor Listrik, Air, Telepon/Internet); Belanja Premi Asuransi; Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor serta belanja daerah diprioritaskan untuk urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
2. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

3. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.
4. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
5. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
6. Belanja daerah untuk infrastruktur jalan dan jembatan.
7. Penggunaan dana transfer digunakan untuk kebutuhan sebagai berikut:
   a. Dana Alokasi Umum (DAU) ditujukan untuk mendanai kebutuhan belanja pegawai negeri sipil daerah dan urusan wajib dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum.
   b. Dana Alokasi Khusus (DAK) dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kebutuhan fisik, sarana dan prasarana dasar yang menjadi urusan daerah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh menteri teknis terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
   c. Penerimaan dana bagi hasil pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman di perkotaan dan di perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan.
   d. Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) kewenangan kabupaten, meliputi 29 (dua puluh sembilan) jenis pelayanan dasar yaitu:
      1) PENDIDIKAN
         - Pendidikan anak usia dini;
         - Pendidikan dasar; dan
         - Pendidikan kesetaraan.
      2) KESEHATAN
         - Pelayanan kesehatan ibu hamil;
         - Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
         - Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
         - Pelayanan kesehatan balita;
         - Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
         - Pelayanan kesehatan pada usia produktif;
         - Pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
         - Pelayanan kesehatan penderita DM;

- Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
- Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
- Pelayanan kesehatan orang dengan TB; dan
- Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV).

3) PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
   - Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
   - Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4) PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
   - Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
   - Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5) TRANTIBUM LINMAS
   - Pelayanan trantibum;
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
   - Pelayanan informasi rawan bencana;
   - Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana; dan
   - Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
6) SOSIAL
   - Rehabsosdas penyandang disabilitas telantar;
   - Rehabsosdas anak telantar;
   - Rehabsosdas lansia telantar;
   - Rehabsosdas tuna sosial khususnya gepeng; dan
   - Perlijams pada saat dan setelah tanggap darurat bencana.

Rencana belanja daerah tahun 2025 lebih besar dibandingkan dengan tahun sebelumnya dalam rangka pemulihan ekonomi daerah sesuai dengan program yang dicanangkan oleh nasional. Hal ini dikarenakan pada bagian belanja daerah belum termasuk belanja-belanja yang bersumber dari: Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau, Dana Bagi Hasil Pajak dan Bantuan dari Provinsi Jawa Barat, kemudian juga penambahan dari Dana Alokasi Umum sebagai dampak dari berkembangnya angka dalam APBN tiap tahunnya.

Belanja daerah pada TA 2025 diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan. Sesuai dengan visi pembangunan yang telah ditetapkan. Belanja

daerah dapat digunakan sebagai instrumen pencapaian visi tersebut. Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi), dimana keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat (hasil).

Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD dipergunakan untuk:

1. Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. Penyelenggaraan Urusan Wajib dimaksudkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial, sedangkan penyelenggaraan Urusan Pilihan dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban daerah disesuaikan potensi daerah dan wilayah;
3. Peningkatan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran;
4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, dan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di daerah, termasuk investasi bidang pendidikan; dan
5. Menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.
6. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam merencanakan penggunaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut:

    a. Belanja Pegawai

        1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;

2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas, dan keempat belas PNSD dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3) Dalam merencanakan belanja pegawai telah diperhitungkan "*accres*" gaji paling tinggi 2,50% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;

4) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap dianggarkan dalam program dan kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud, yang besarnya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah dengan memperhatikan asas kepatutan dan kewajaran; dan

5) Pemberian honorarium bagi PNSD dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarannya ditetapkan dalam keputusan Bupati Bandung Barat tentang standar biaya belanja dan standar satuan harga barang jasa.

b. Belanja Hibah

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, hibah berupa uang yang diberikan dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung dengan rincian objek belanja hibah adalah pemerintah, pemerintah daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Lembaga, Badan dan Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Nasional.

c. Bantuan Sosial

Dalam Pasal 23A Permendagri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah, dijelaskan bahwa bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/atau keluarga, terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan.

Bantuan sosial yang direncanakan dialokasikan kepada individu dan/atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat, penerima, dan besarannya pada saat penyusunan APBD. Sedangkan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa digunakan dalam rangka peningkatan kemampuan keuangan bagi desa. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah desa penerima bantuan, sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus rutin diberikan setiap tahun, tertuang dalam Alokasi Dana Desa (ADD). Penggunaannya diarahkan untuk memenuhi dana perimbangan pada desa sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor 90 Tahun 2025. Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Bandung Barat diberikan kepada 165 desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat. Besarnya ADD masing-masing desa tergantung pada variabel dan kondisi setiap desa.

e. Belanja Bagi Hasil Desa

Belanja bagi hasil bagi Pemerintah Desa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengalokasikan pada pemerintah desa berupa Bagian Hasil Pajak Daerah (BHPD) dan Bagian Hasil Retribusi Daerah (BHRD), tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2025.

f. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat dalam rangka pencegahan dan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan dan

ketertiban di daerah dan tidak diharapkan berulang. Yang termasuk jenis belanja ini seperti kegiatan tanggap darurat penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang terjadi di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Pelaksana teknis untuk tanggap darurat bencana ini tetap berada dalam koordinasi SKPD terkait.

Kebijakan Belanja Daerah TA 2025 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Upaya tersebut antara lain adalah:

1. Penggunaan anggaran untuk sektor pendidikan seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan. Belanja untuk Dinas Pendidikan Tahun 2025 masih dominan dan diprioritaskan pada pembangunan/peningkatan sarana dan prasarana pendidikan;
2. Untuk sektor kesehatan, peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan diupayakan melalui perbaikan fasilitas dan pengadaan pelayanan dasar kesehatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, ada kebijakan bahwa besaran anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10,00% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji;
3. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah terutama prasarana jalan kabupaten melalui peningkatan dan pemeliharaan secara terpadu. Infrastruktur jalan diprioritaskan guna meningkatkan distribusi barang/jasa yang mendukung sektor ekonomi masyarakat, terutama jalan yang menghubungi pusat-pusat distribusi pertanian, perikanan, pelayanan pendidikan dan kesehatan. Selain prasarana jalan, infrastruktur wilayah yang diprioritaskan pada Tahun 2025 adalah peningkatan/pemeliharaan jembatan, irigasi/drainase, listrik desa, air minum, persampahan, perumahan, dan permukiman serta sarana pendukung lainnya;
4. Peningkatan kinerja aparatur pemerintahan daerah;
5. Pengentasan kemiskinan dan peningkatan daya beli masyarakat;
6. Mitigasi bencana;
7. Peningkatan UMKM dan koperasi serta akses kewirausahaan;
8. Peningkatan produksi pangan; dan

9. Pengembangan kemandirian pemberdayaan pemerintahan desa, dan masyarakat.

Selain itu, pada Tahun 2025 ini terdapat pula beberapa kebijakan penggunaan belanja yang digunakan untuk:

1. Peningkatan keterlibatan pemerintah dan masyarakat desa dalam program dan kegiatan partisipatif, baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, yang dalam implementasinya merupakan program terpadu antara aparatur di wilayah, masyarakat, dan SKPD;
2. Peningkatan penciptaan lapangan kerja untuk mengurangi tingkat pengangguran melalui upaya-upaya pemberdayaan masyarakat di pedesaan dengan berbagai pelatihan/keterampilan praktis dengan jiwa kewirausahaan untuk mengoptimalkan penurunan kemiskinan ekstrem sampai 0,00% pada tahun 2025; dan
3. Optimalisasi peran serta para kader desa (Kesehatan, KB) guna meningkatkan kualitas pelayanan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya program kesehatan lingkungan dan KB dengan fokus turunkan stunting.

2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutup defisit tersebut diantaranya bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman, dan penerimaan kembali pemberian pinjaman atau penerimaan piutang. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, bahwa Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan daerah dan pengeluaran daerah. Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar daripada penerimaan sehingga terdapat defisit. Kebijakan pembiayaan harus terkait dengan penyelesaian permasalahan pembangunan daerah maupun pemanfaatan potensi-potensi daerah. Penerimaan pembiayaan dari SiLPA diproyeksikan menurun setiap tahunnya baik dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung terutama dalam pengadaan barang/jasa yang melalui proses pelelangan. Pada bagian pengeluaran pembiayaan terdiri dari pembentukan dana cadangan, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran cicilan pokok hutang yang jatuh tempo, dan pemberian

pinjaman. Selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan disebut sebagai pembiayaan *netto*. Jumlah pembiayaan *netto* harus dapat menutup defisit APBD. Kebijakan penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 harus sesuai dengan yang telah diamanatkan dalam APBD-P TA 2025.

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Prioritas Pembangunan Daerah

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat (KBB) TA 2025 mencakup peningkatan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan pariwisata terintegrasi, pemulihan dan penguatan ekonomi kerakyatan, peningkatan pelayanan jaminan sosial, pengendalian lingkungan, inovasi teknologi di bidang agrikultur, dan reformasi birokrasi.

Berikut adalah rincian lebih lanjut:

1. Peningkatan Infrastruktur dan Konektivitas

   KBB akan fokus pada perbaikan infrastruktur jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas antar wilayah.

2. Pengembangan Pariwisata Terintegrasi

   KBB akan mengembangkan pariwisata sebagai sektor unggulan dengan fokus pada pengembangan destinasi yang terintegrasi dan mampu memberikan kontribusi PAD yang signifikan.

3. Pemulihan dan Penguatan Ekonomi Kerakyatan

   Pemerintah akan fokus pada pemulihan dan penguatan ekonomi masyarakat melalui berbagai program, seperti peningkatan keterampilan, bantuan modal usaha, dan pengembangan pemasaran produk secara digital.

4. Peningkatan Pelayanan Jaminan Sosial

   KBB akan meningkatkan akses dan kualitas pelayanan jaminan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk jaminan kesehatan dan jaminan sosial lainnya.

5. Pengendalian Lingkungan

   KBB akan melakukan upaya pengendalian pencemaran lingkungan dan antisipasi risiko perubahan iklim untuk mendukung pembangunan berkelanjutan.

6. Inovasi Teknologi di Bidang Agrikultur

   KBB akan mendorong inovasi dan teknologi di bidang agrikultur untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan masyarakat.

7. Reformasi Birokrasi

   KBB akan melakukan reformasi birokrasi yang integratif, inovatif, dan dinamis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik.

Kebijakan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Bandung Barat tahun 2025, mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2008-2025 periode lima tahun ketiga, dan kepada Rencana Pembangunaan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Barat tahun 2018-2023 yaitu untuk periode tahun keempat. Dengan melalui proses tahapan perencanaan mulai dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa, Musrenbang Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten, telah didapatkan prioritas program kegiatan pembangunan untuk Tahun 2025.

Berdasarkan isu-isu strategis tersebut telah disusun prioritas program pembangunan Kabupaten Bandung Barat dengan memperhatikan hasil evaluasi pembangunan, kerangka ekonomi daerah, serta aspirasi masyarakat yang berkembang dalam proses Musrenbang RKPD. Selanjutnya dari isu strategis yang telah mengacu pada arah pembangunan baik nasional maupun provinsi, maka disusun prioritas pembangunan dan program yang mendukungnya.

Substansi dari prioritas program pembangunan merupakan hasil rumusan dari isu strategis, usulan SKPD yang tidak terlepas dari aspirasi masyarakat yang disepakati dalam Musrenbang. Adapun Prioritas Pembangunan Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah:

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan program prioritasnya Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA); Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum; Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional; Program Pengelolaan dan

Pengembangan Sistem Air Limbah; Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase; Program Pengembangan Permukiman; Program Penataan Bangunan Gedung; Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya; Program Penyelenggaraan Jalan; Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

2. Dinas Perumahan dan Pemukiman dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman Serta Permukiman Kumuh; Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU); Program Pengelolaan Izin Lokasi; Program Redistribusi Tanah, serta Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee; Program Pengelolaan Tanah Kosong; dan Program Penatagunaan Tanah.
3. Dinas Lingkungan Hidup, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup; Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3); Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh); Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat; dan Program Pengelolaan Persampahan.
4. Dinas Perhubungan dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ); dan Program Pengelolaan Pelayaran.

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

1. Dinas Perikanan dan Peternakan, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Perikanan Tangkap; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya; Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan; Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; Program Perizinan Usaha Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian.

2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan; Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; Program Penanganan Kerawanan Pangan; Program Pengawasan Keamanan Pangan; Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian; Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian; Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian; dan Program Penyuluhan Pertanian;
3. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kebudayaan; Program Pembinaan Sejarah; Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya; Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata; Program Pemasaran Pariwisata; Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; serta Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal; Program Promosi Penanaman Modal; Program Pelayanan Penanaman Modal; Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal; serta Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dengan program prioritasnya Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan; Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan; Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting; Program Pengembangan Ekspor; Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen; Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; Program Perencanaan dan Pembangunan Industri; Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.
6. Dinas Koperasi dan UMKM, dengan program prioritasnya adalah Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi; Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi; Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian; Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi; Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM); dan Program Pengembangan UMKM.

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia,

1. Dinas Pendidikan, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Pendidikan; Program Pengembangan Kurikulum; Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan; Program Pengendalian Perizinan Pendidikan; serta Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.
2. Dinas Pemuda dan Olahraga, dengan program prioritasnya adalah Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan; Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.
3. Dinas Kesehatan, program prioritasnya adalah Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat; program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan; serta Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman.
4. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, program prioritasnya adalah Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan; Program Perlindungan Perempuan; Program Peningkatan Kualitas Keluarga; Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak; Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); Program Perlindungan Khusus Anak; Program Pengendalian Penduduk; Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB); serta Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).
5. Dinas Sosial, program prioritasnya adalah Program Pemberdayaan Sosial; Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan; Program Rehabilitasi Sosial; Program Perlindungan dan Jaminan Sosial; Program Penanganan Bencana; dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.
6. Dinas Tenaga Kerja, dengan program prioritasnya adalah Program Perencanaan Tenaga Kerja; Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja; Program Penempatan Tenaga Kerja; Program Hubungan Industrial; dan Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, program prioritasnya adalah Program Penanggulangan Bencana.
8. Sekretariat Daerah, dengan program prioritasnya adalah Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; serta Program Perekonomian dan Pembangunan.

9. Badan Keuangan dan Aset Daerah, program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Keuangan Daerah; dan Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah, Program Prioritasnya adalah Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah; Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; sera Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.
11. Sekretariat Dewan, program prioritasnya adalah Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD.
12. Dinas Arsip dan Perpustakaan, program prioritasnya adalah Program Pembinaan Perpustakaan; Program Pengelolaan Arsip; serta Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.
13. Satuan Polisi Pamong Praja, dengan program prioritasnya adalah Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
14. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, dengan program prioritasnya adalah Program Penguatan Idcologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan; Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik; Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan; Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya; dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional, Peningkatan Kualitas, dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial.
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, program prioritasnya adalah Program Penataan Desa; Program Peningkatan Kerja sama Desa; Program Administrasi Pemerintahan Desa; Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, serta Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat.
16. Inspektorat Daerah, dengan program prioritasnya adalah Program Penyelenggaraan Pengawasan; serta Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi.
17. Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia, program prioritasnya adalah Program Kepegawaian Daerah; dan Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.
18. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan program prioritasnya adalah Program Pendaftaran Penduduk; Program Pencatatan Sipil; Program

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan; dan Program Pengelolaan Profil Kependudukan.

19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik, dengan program prioritasnya adalah Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik; Program Aplikasi Informatika; Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral; dan Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.
20. Kecamatan sebanyak 16 Kecamatan dengan program prioritasnya Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

2.3.2 Capaian Target Kinerja APBD

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7), realisasi program dan kegiatan pelaksanaan pembangunan TA 2025 menurut Pemerintahan Daerah dan Organisasi terdiri dari enam Urusan Wajib Pelayanan Dasar, delapan belas Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, delapan Urusan Pilihan, dan tujuh Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang.

Pengalokasian anggaran pembangunan Kabupaten Bandung Barat TA 2025 menurut fungsi keselarasan urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah meliputi:

1. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 95,83%;
2. Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar sebesar 89,81%;
3. Urusan pemerintahan pilihan sebesar 92,46%;
4. Unsur pendukung urusan pemerintahan sebesar 96,55%;
5. Unsur penunjang urusan pemerintahan sebesar 85,33%;
6. Unsur pengawasan urusan pemerintahan sebesar 92,41%;
7. Unsur kewilayahan sebesar 93,23%; dan
8. Unsur pemerintahan umum sebesar 91,17%.

Rekapitulasi capaian realisasi anggaran SKPD dalam melaksanakan program kegiatan APBD menurut urusan pemerintahan dan menurut fungsi keselarasan

urusan pemerintahan dan keterpaduan pengelolaan keuangan daerah guna mencapai sasaran prioritas pembangunan TA 2025 ditunjukkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.8

Capaian Realisasi Anggaran Per Uraian Urusan

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	1.897.435.753.096,00	1.818.225.980.470,99	95,83
1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	1.011.519.624.730,00	994.671.772.744,00	98,33
1.01	Dinas Pendidikan	1.011.519.624.730,00	994.671.772.744,00	98,33
1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	636.742.088.562,00	590.224.535.238,00	92,69
1.02	Dinas Kesehatan	365.501.627.610,00	347.279.922.162,00	95,01
1.02	RSUD Cililin	72.202.695.617,00	65.050.510.860,00	90,09
1.02	RSUD Cikalongwetan	35.148.704.840,00	33.674.036.084,00	95,80
1.02	RSUD Lembang	48.121.990.048,00	42.572.310.484,00	88,47
1.02	Puskesmas DTP Cililin	4.008.627.967,00	3.776.120.915,00	94,20
1.02	Puskesmas Pataruman	3.874.905.643,00	3.297.737.780,00	85,10
1.02	Puskesmas DTP Gununghalu	5.140.849.609,00	4.503.376.315,00	87,60
1.02	Puskesmas Rongga	3.754.044.879,00	3.469.815.082,00	92,43
1.02	Puskesmas Cipatat	4.037.676.652,00	3.834.072.359,00	94,96
1.02	Puskesmas DTP Rajamandala	3.843.687.975,00	3.433.951.636,00	89,34
1.02	Puskesmas Sumurbandung	2.356.603.786,00	2.173.118.568,00	92,21
1.02	Puskesmas Padalarang	3.190.273.602,00	3.007.599.380,00	94,27
1.02	Puskesmas Tagog Apu	2.743.793.036,00	2.428.894.440,00	88,52
1.02	Puskesmas Jayamekar	2.625.681.112,00	2.283.685.103,00	86,97
1.02	Puskesmas Cipeundeuy	3.718.584.256,00	3.572.500.703,00	96,07
1.02	Puskesmas Cirata	2.637.316.961,00	2.252.953.608,00	85,43
1.02	Puskesmas DTP Cikalongwetan	6.507.639.586,00	6.070.005.731,00	93,28
1.02	Puskesmas Rende	3.258.641.176,00	2.800.124.302,00	85,93
1.02	Puskesmas Cisarua	3.098.552.198,00	2.710.946.330,00	87,49
1.02	Puskesmas Pasirlangu	2.243.365.144,00	1.949.359.505,00	86,89
1.02	Puskesmas Lembang	3.497.369.955,00	3.183.354.136,00	91,02
1.02	Puskesmas Cikole	2.274.789.745,00	2.009.103.453,00	88,32
1.02	Puskesmas DTP Jayagiri	3.694.702.795,00	3.076.017.328,00	83,25
1.02	Puskesmas Cibodas	2.395.212.815,00	2.074.380.996,00	86,61
1.02	Puskesmas Batujajar	5.771.032.592,00	5.420.494.475,00	93,93
1.02	Puskesmas DTP Saguling	3.621.520.870,00	3.263.656.216,00	90,12
1.02	Puskesmas Ngamprah	3.634.333.190,00	2.946.784.793,00	81,08
1.02	Puskesmas Cimareme	4.158.233.883,00	3.810.701.607,00	91,64
1.02	Puskesmas Cipongkor	4.729.483.728,00	3.576.550.409,00	75,62
1.02	Puskesmas Citalem	3.251.081.289,00	2.518.058.956,00	77,45
1.02	Puskesmas Ciwaruga	2.192.337.185,00	1.934.379.361,00	88,23
1.02	Puskesmas Parongpong	2.647.239.434,00	2.353.841.269,00	88,92
1.02	Puskesmas Cihampelas	5.277.988.275,00	4.015.049.521,00	76,07
1.02	Puskesmas Mukapayung	3.141.639.278,00	2.543.721.950,00	80,97
1.02	Puskesmas Sindangkerta	2.851.628.534,00	2.250.420.595,00	78,92
1.02	Puskesmas Cicangkanggirang	2.913.670.981,00	2.650.850.026,00	90,98
1.02	UPT Lab Kesda	2.674.562.316,00	2.456.128.800,00	91,83
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	158.022.056.853,00	148.456.991.017,00	93,95
1.03	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	158.022.056.853,00	148.456.991.017,00	93,95
1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	28.334.191.170,00	26.439.757.266,00	93,31
1.04	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	28.334.191.170,00	26.439.757.266,00	93,31
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	48.347.504.871,00	45.354.278.365,00	93,81
1.05	Satuan Polisi Pamong Praja	17.274.516.044,00	16.394.798.554,00	94,91
1.05	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.531.224.728,00	12.351.858.918,00	91,28
1.05	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.541.764.099,00	16.607.620.893,00	94,67

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	14.470.286.910,00	13.078.645.841,00	90,38
1.06	Dinas Sosial	14.470.286.910,00	13.078.645.841,00	90,38
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	365.479.179.085,00	328.241.790.995,01	89,81
2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	19.114.935.877,00	18.382.327.098,00	96,17
2.07	Dinas Tenaga Kerja	19.114.935.877,00	18.382.327.098,00	96,17
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	4.377.040.562,00	4.355.476.903,00	99,51
2.08	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	4.377.040.562,00	4.355.476.903,00	99,51
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	29.549.326.158,00	28.280.964.141,00	95,71
2.09	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	29.549.326.158,00	28.280.964.141,00	95,71
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN	16.277.598.014,00	5.831.821.285,00	35,83
2.10	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	16.277.598.014,00	5.831.821.285,00	35,83
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	52.624.763.271,00	46.328.772.746,00	88,04
2.11	Dinas Lingkungan Hidup	52.624.763.271,00	46.328.772.746,00	88,04
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	15.688.945.862,00	14.224.337.654,00	90,66
2.12	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	15.688.945.862,00	14.224.337.654,00	90,66
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	20.048.127.266,00	17.540.581.675,00	87,49
2.13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	20.048.127.266,00	17.540.581.675,00	87,49
2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	34.473.139.976,00	31.976.462.883,00	92,76
2.14	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	34.473.139.976,00	31.976.462.883,00	92,76
2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	31.981.829.631,00	29.539.762.752,00	92,36
2.15	Dinas Perhubungan	31.981.829.631,00	29.539.762.752,00	92,36
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	48.390.275.822,00	46.195.838.302,00	95,47
2.16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	48.390.275.822,00	46.195.838.302,00	95,47
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	14.329.251.091,00	13.470.287.369,00	94,01
2.17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	14.329.251.091,00	13.470.287.369,00	94,01
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	10.748.870.112,00	9.165.069.454,00	85,27
2.18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	10.748.870.112,00	9.165.069.454,00	85,27
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	49.200.479.719,00	45.881.437.176,00	93,25
2.19	Dinas Pemuda dan Olahraga	49.200.479.719,00	45.881.437.176,00	93,25
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	954.725.705,00	911.839.860,00	95,51
2.20	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	954.725.705,00	911.839.860,00	95,51
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	1.373.859.988,00	1.087.780.843,00	79,18
2.21	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.373.859.988,00	1.087.780.843,00	79,18
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	3.129.555.692,00	2.682.135.954,00	85,70
2.22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.129.555.692,00	2.682.135.954,00	85,70
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	3.920.979.180,00	3.707.067.490,00	94,54
2.23	Dinas Arsip dan Perpustakaan	3.920.979.180,00	3.707.067.490,00	94,54
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	9.295.475.159,00	8.679.827.410,00	93,38
2.24	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.295.475.159,00	8.679.827.410,00	93,38
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN	97.276.661.184,00	89.941.765.344,00	92,46
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN	17.145.024.252,00	15.935.823.235,00	92,95
3.25	Dinas Perikanan dan Peternakan	17.145.024.252,00	15.935.823.235,00	92,95
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	14.234.519.749,00	12.773.680.722,00	89,74

Kode	Uraian Urusan, Organisasi, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	TA 2025		
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
3.26	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	14.234.519.749,00	12.773.680.722,00	89,74
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	38.290.925.324,00	37.064.932.794,00	96,80
3.27	Dinas Perikanan dan Peternakan	21.534.595.484,00	20.724.481.822,00	96,24
3.27	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	16.756.329.840,00	16.340.450.972,00	97,52
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	19.851.290.721,00	16.788.773.980,00	84,57
3.30	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	19.051.290.721,00	16.700.773.980,00	04,57
3.31	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN	7.754.901.138,00	7.378.554.613,00	95,15
3.31	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	7.754.901.138,00	7.378.554.613,00	95,15
4	UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN	258.061.748.289,00	249.161.670.819,00	96,55
4.01	SEKRETARIAT DAERAH	91.561.141.872,00	84.610.746.787,00	92,41
4.01	Sekretariat Daerah	91.561.141.872,00	84.610.746.787,00	92,41
4.02	SEKRETARIAT DPRD	166.500.606.417,00	164.550.924.032,00	98,83
4.02	Sekretariat DPRD	166.500.606.417,00	164.550.924.032,00	98,83
5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	760.943.622.416,00	649.341.064.007,00	85,33
5.01	PERENCANAAN	18.294.259.660,00	16.983.526.519,00	92,84
5.01	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	18.294.259.660,00	16.983.526.519,00	92,84
5.02	KEUANGAN	710.870.079.499,00	602.202.858.153,00	84,71
5.02	Badan Keuangan dan Aset Daerah	672.101.227.906,00	567.827.269.600,00	84,49
5.02	Badan Pendapatan Daerah	38.768.851.593,00	34.375.588.553,00	88,67
5.03	KEPEGAWAIAN	26.910.323.557,00	25.462.027.540,00	94,62
5.03	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	26.910.323.557,00	25.462.027.540,00	94,62
5.04	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	3.914.459.700,00	3.773.545.283,00	96,40
5.04	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.914.459.700,00	3.773.545.283,00	96,40
5.05	PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	954.500.000,00	919.106.512,00	96,29
5.05	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	954.500.000,00	919.106.512,00	96,29
6	UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN	29.113.927.119,00	26.905.411.318,00	92,41
6.01	INSPEKTORAT DAERAH	29.113.927.119,00	26.905.411.318,00	92,41
6.01	Inspektorat Daerah	29.113.927.119,00	26.905.411.318,00	92,41
7	UNSUR KEWILAYAHAN	98.806.461.716,00	92.121.445.972,00	93,23
7.01	KECAMATAN	98.806.461.716,00	92.121.445.972,00	93,23
7.01	Kecamatan Batujajar	5.866.462.249,00	5.477.457.022,00	93,37
7.01	Kecamatan Cipeundeuy	5.675.473.787,00	5.280.283.070,00	93,04
7.01	Kecamatan Gununghalu	5.807.800.904,00	5.411.821.340,00	93,18
7.01	Kecamatan Padalarang	6.804.153.792,00	6.545.232.411,00	96,19
7.01	Kecamatan Lembang	8.154.501.154,00	7.526.293.469,00	92,30
7.01	Kecamatan Sindangkerta	5.523.965.903,00	5.007.591.192,00	90,65
7.01	Kecamatan Cisarua	6.370.005.708,00	5.798.268.973,00	91,02
7.01	Kecamatan Ngamprah	6.084.796.284,00	5.890.955.487,00	96,81
7.01	Kecamatan Cikalongwetan	6.856.800.453,00	6.379.734.235,00	93,04
7.01	Kecamatan Cipongkor	6.074.458.998,00	5.641.121.086,00	92,87
7.01	Kecamatan Saguling	4.729.808.619,00	4.598.848.343,00	97,23
7.01	Kecamatan Cililin	6.603.563.736,00	6.264.529.294,00	94,87
7.01	Kecamatan Parongpong	6.082.875.772,00	5.577.709.805,00	91,70
7.01	Kecamatan Cipatat	6.599.452.907,00	6.058.159.554,00	91,80
7.01	Kecamatan Cihampelas	6.256.230.135,00	5.527.726.505,00	88,36
7.01	Kecamatan Rongga	5.316.111.315,00	5.135.714.186,00	96,61
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM	14.772.782.413,00	13.468.688.445,00	91,17
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	14.772.782.413,00	13.468.688.445,00	91,17
8.01	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	14.772.782.413,00	13.468.688.445,00	91,17
JUMLAH		**3.521.890.135.318,00**	**3.267.407.817.371,00**	**92,77**

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

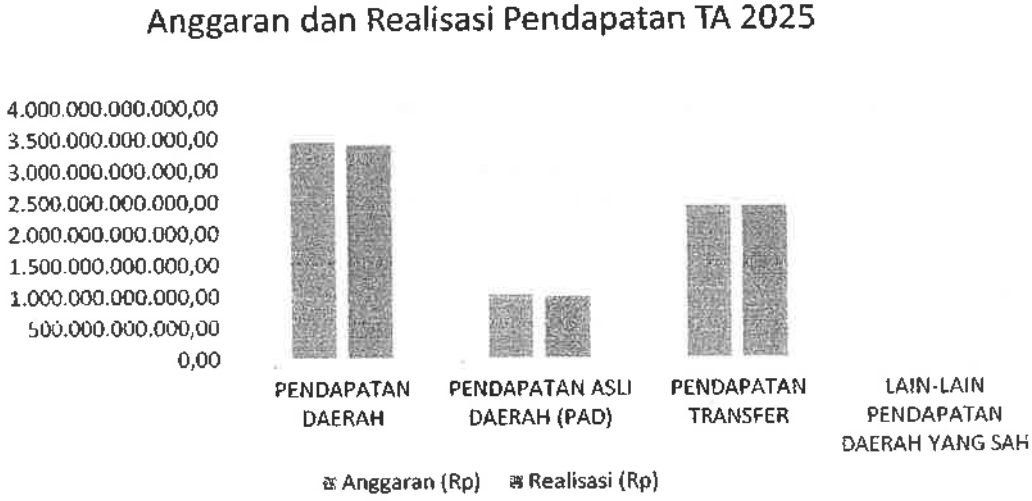
3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

3.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan TA 2025

Tabel 3.1
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

Kode Rek	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4	5
4.	**PENDAPATAN DAERAH**	**3.443.659.170.878,00**	**3.394.853.479.480,00**	**98,58**
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.011.631.723.145,00	981.483.458.987,00	97,02
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	2.432.027.447.733,00	2.413.370.020.493,00	99,23
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp3.394.853.479.480,00 atau sebesar 98,58% dari anggaran pendapatan sebesar Rp3.443.659.170.878,00. Gambar di bawah ini menggambarkan grafik realisasi pendapatan dari anggaran pada TA 2025.



Gambar 3.1
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Tahun 2025

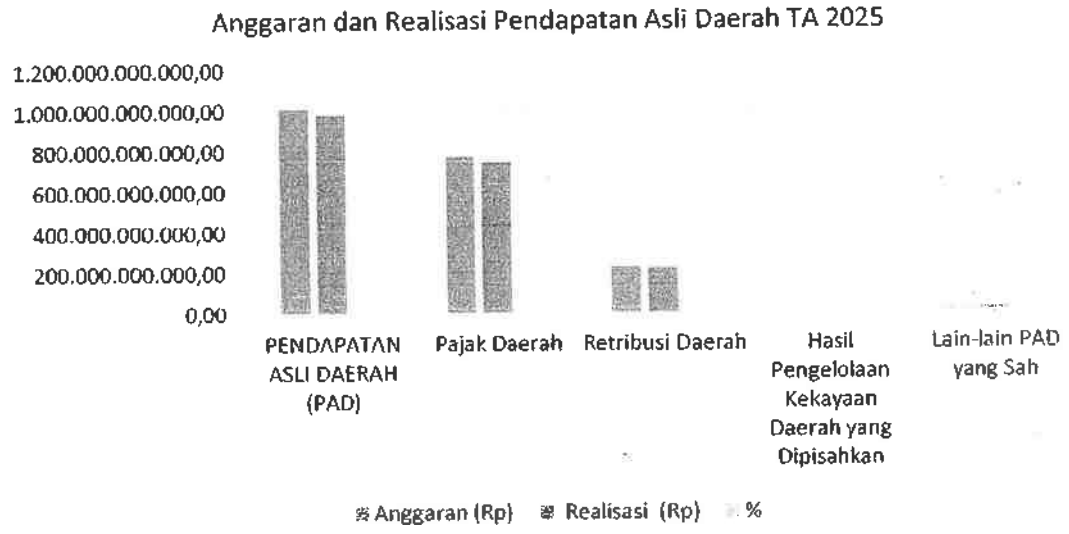
3.1.1.1. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah

Tabel 3.2
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.011.631.723.145,00**	**981.483.458.987,00**	**97,02**
Pajak Daerah	771.086.897.175,00	743.748.765.926,00	96,45
Retribusi Daerah	224.648.918.659,00	218.559.812.666,00	97,29

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525,00	1.256.835.358,00	100,30
Lain-lain PAD yang Sah	14.642.836.786,00	17.918.045.037,00	122,37

Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bandung Barat TA 2025 tergolong masih relatif rendah yaitu sebesar 28,91% dari total pendapatan daerah. Dengan demikian ketergantungan keuangan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat masih cukup besar. Komposisi PAD terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah sebagaimana yang tertera pada tabel di atas. Dari penerimaan PAD ini, yang memberikan kontribusi terbesar adalah dari pajak daerah yaitu sebesar Rp743.748.765.926,00. Realjsasi PAD digambarkan dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.2
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2025

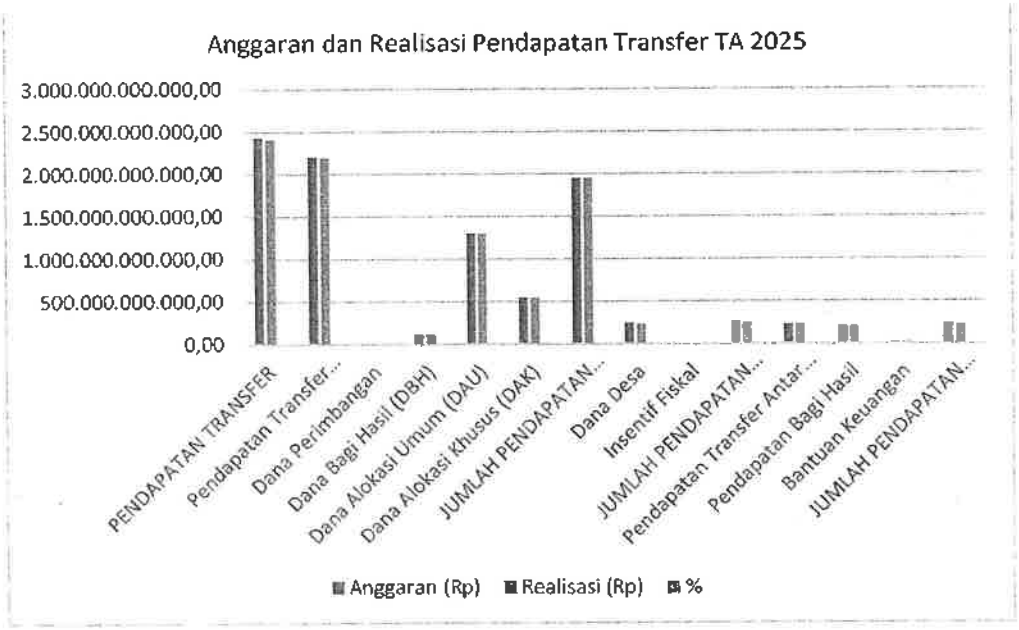
3.1.1.2. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 sebesar Rp2.413.370.020.493,00 mencapai 99,23% dari anggaran yang telah ditetapkan yaitu Rp2.432.027.447.733,00, dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PENDAPATAN TRANSFER	**2.432.027.447.733,00**	**2.413.370.020.493,00**	**99,23**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.204.854.414.000,00**	**2.193.985.867.415,00**	**99,51**
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)	105.826.344.000,00	110.897.808.500,00	104,79
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.301.427.209.000,00	1.301.028.239.493,00	99,97
Dana Alokasi Khusus (DAK)	544.378.222.000,00	539.491.505.002,00	99,10
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER DANA PERIMBANGAN	**1.951.631.775.000,00**	**1.951.417.552.995,00**	**99,99**
Dana Desa	245.021.177.000,00	234.366.852.420,00	95,65
Insentif Fiskal	8.201.462.000,00	8.201.462.000,00	100,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA	**253.222.639.000,00**	**242.568.314.420,00**	**95,79**
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**227.173.033.733,00**	**219.384.153.078,00**	**96,57**
Pendapatan Bagi Hasil	207.516.033.733,00	202.681.629.872,00	97,67
Bantuan Keuangan	19.657.000.000,00	16.702.523.206,00	84,97
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	**227.173.033.733,00**	**219.384.153.078,00**	**96,57**

Realisasi Pendapatan Transfer TA 2025 digambarkan dalam grafik berikut ini:



Gambar 3.3
Grafik Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025

3.1.1.3. Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2025 Sebesar Rp0,00 hal ini dikarenakan akun tersebut di atas yang sebelumnya digunakan untuk mencatat penerimaan Dana BOS pada tahun ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku dicatat pada akun Pendapatan Transfer.

Tabel 3.4
Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Tahun 2025

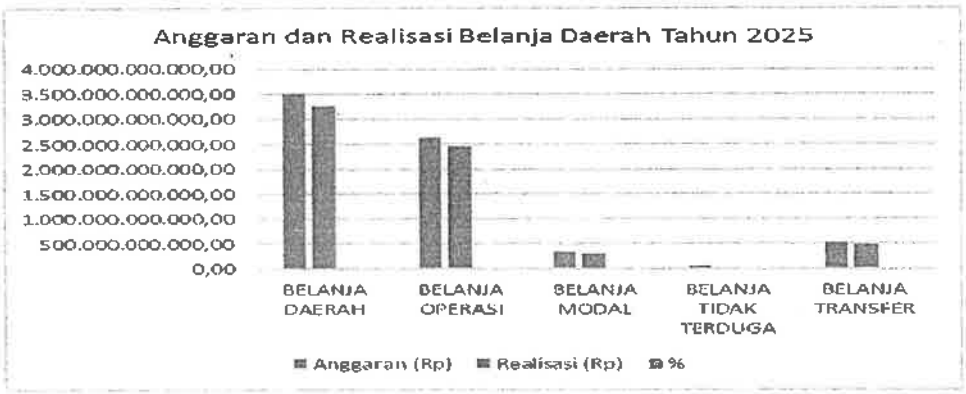
URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	%
1	2	3	4
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan – Dana BOS	0,00	0,00	0,00

3.1.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah

Realisasi Belanja Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp3.267.407.817.371,00 mencapai 92,77% dari total anggaran Belanja Daerah yang ditetapkan sebesar Rp3.521.890.135.318,00. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah yang di jelaskan pada tabel dan gambar grafik berikut ini:

Tabel 3.5
Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA DAERAH	**3.521.890.135.318,00**	**3.267.407.817.371,00**	**92,77**
BELANJA OPERASI	2.635.474.825.626,33	2.475.804.994.111,00	93,94
BELANJA MODAL	328.656.247.026,67	301.416.412.683,00	91,71
BELANJA TIDAK TERDUGA	42.993.129.198,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER	514.765.933.467,00	490.186.410.577,00	95,23



Gambar 3.4
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah Tahun 2025

3.1.2.1. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi

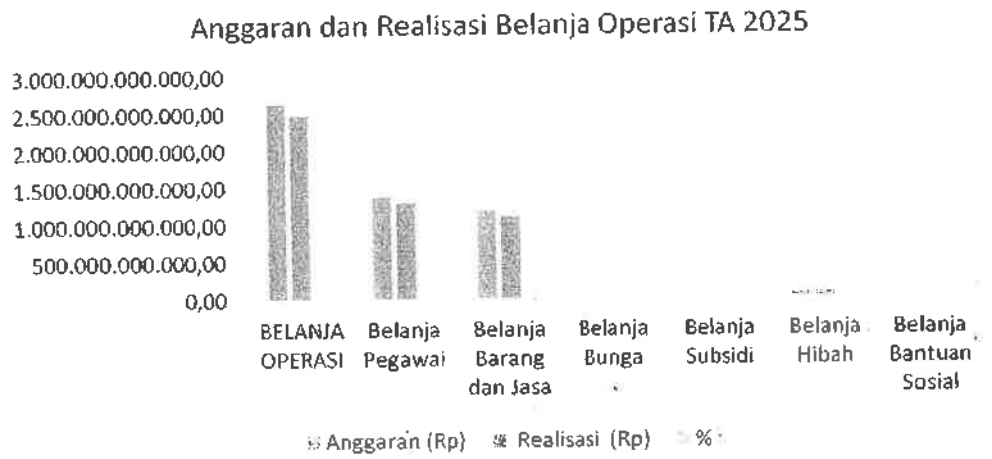
Realisasi Belanja Operasi TA 2025 adalah sebesar Rp2.475.804.994.111,00 atau mencapai 93,94% dari jumlah Anggaran Belanja Operasi TA 2025 sebesar Rp2.635.474.825.626,33. Realisasi Belanja Operasi dari seluruh komponen belanja daerah mencapai yaitu sebesar 75,77% dari jumlah Realisasi Belanja Daerah TA 2025. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, rincian Belanja Operasi diungkapkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6

Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA OPERASI	**2.635.474.825.626,33**	**2.475.804.994.111,00**	**93,94**
Belanja Pegawai	1.377.097.770.000,60	1.293.542.540.191,00	93,93
Belanja Barang dan Jasa	1.182.427.995.625,73	1.106.680.765.952,00	93,59
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	70.294.060.000,00	69.926.687.968,00	99,48
Belanja Bantuan Sosial	5.655.000.000,00	5.655.000.000,00	100,00

Komposisi dari komponen realisasi Belanja Operasi adalah realisasi Belanja Pegawai sebesar 93,93%, realiasi Belanja Barang dan Jasa sebesar 93,59%, realisasi Belanja Bunga sebesar 0,00%, realisasi Belanja Subsidi sebesar 0,00%, realisasi Belanja Hibah sebesar 99,48%, dan realiasi Belanja Bantuan Sosial sebesar 100,00%. Pencapaian kinerja keuangan pada realisasi Belanja Operasi Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.5
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025

3.1.2.2. Anggaran dan Realisasi Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal TA 2025 adalah sebesar Rp301.416.412.683,00 atau mencapai 91,71% dari jumlah Anggaran Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp328.656.247.026,67. Rincian realisasi Belanja Modal diungkapkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.7
Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA MODAL	**328.656.247.026,67**	**301.416.412.683,00**	**91,71**
Belanja Modal Tanah	12.946.113.825,00	3.180.185.537,00	24,56
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.303.548.092,00	129.103.772.848,00	94,03
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.099.889.035,67	66.813.132.281,00	90,17
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.770.264.700,00	78.032.212.447,00	97,82
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.692.940.410,00	22.692.669.310,00	100,00
Belanja Modal Aset Lainnya	1.843.490.964,00	1.594.440.260,00	86,49

Belanja Modal terealisasi sebesar 9,22% dari jumlah realisasi seluruh komponen Belanja Daerah TA 2025. Komposisi dari realisasi komponen realisasi Belanja Modal adalah realisasi Belanja Modal Tanah sebesar 24,56%, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar 94,03%, realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar 90,17%, realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar 97,82 %, realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar

100,00 %, dan realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar 86,49%.

Pencapaian kinerja keuangan pada realisasi Belanja Modal Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.6
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Tahun 2025

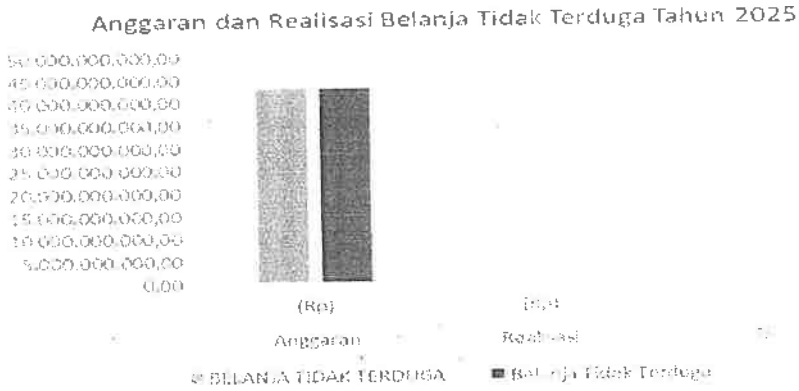
3.1.2.3. Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga

Realisasi Belanja Tak Terduga TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atáu mencapai 0,00% dari jumlah Anggaran Belanja Tak Terduga TA 2025 sebesar Rp42.993.129.198,00 dengan rician sebagai berikut:

Tabel 3.8
Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
Belanja Tak Terduga	42.993.129.198,00	0,00	0,00

Pencapaian kinerja keuangan pada realisasi Belanja Tak Terduga Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.7
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025

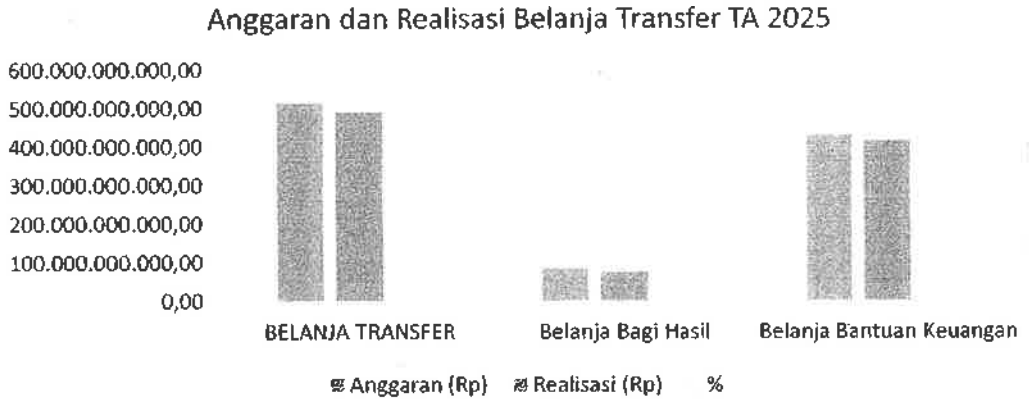
3.1.2.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 adalah sebesar Rp490.186.410.577,00 atau 95,23% dari Anggaran Belanja Transfer yang telah ditetapkan sebesar Rp514.765.933.467,00. Realisasi Belanja Transfer diuangkapkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.9
Anggaran dan Realisasi Transfer Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
BELANJA TRANSFER	**514.765.933.467,00**	**490.186.410.577,00**	**95,23**
Belanja Bagi Hasil	84.422.871.559,00	75.182.319.761,00	89,05
Belanja Bantuan Keuangan	430.343.061.908,00	415.004.090.816,00	96,44

Realisasi Belanja Transfer TA 2025 adalah sebesar 15,00% dari jumlah realisasi Belanja Daerah TA 2025. Komposisi dari Belanja Transfer terdiri dari Transfer Bagi Hasil terealisasi sebesar Rp75.182.319.761,00 atau 89,05% dan Belanja Transfer Bantuan Keuangan terealisasi sebesar Rp415.004.090.816,00 atau 96,44%. Pencapaian kinerja keuangan pada realisasi Belanja Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dalam grafik berikut ini.



Gambar 3.8
Grafik Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025

3.1.3. Anggaran dan Realisasi Pembiayaan

Tabel 3.10
Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Tahun 2025

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	2	3	4
PEMBIAYAAN DAERAH	**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	78.230.964.440,00	78.230.964.440,00	100,00
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	0,00	0,00

Realisasi Pembiayaan Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp78.230.964.440,00 atau 100% dari Anggaran Pembiayaan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp78.230.964.440,00.

Komposisi dari Pembiayaan Daerah TA 2025 terdiri dari:

1. Penerimaan Pembiayaan; dan
2. Pengeluaran Pembiayaan

Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Bandung Barat tersebut di atas digambarkan dengan grafik sebagai berikut:



Gambar 3.9
Grafik Anggaran dan Realisasi Pembiayaan Daerah Tahun 2025

3.2. Alokasi Anggaran dan Realisasi DBHCHT TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat

Pagu Alokasi DBHCHT TA 2025 adalah sebesar Rp9.633.990.000,00 ditambah pagu alokasi sisa DBHCHT TA 2024 sebesar Rp1.872.848.077,00 sehingga total Pagu DBHCHT TA 2025 sebesar Rp11.506.838.077,00 dengan realisasi sebesar Rp10.721.435.866,00, sehingga sisa pagu alokasi DBHCHT TA 2025 sebesar Rp785.402.211,00 ditambah kurang bayar DBHCHT TA 2023 sebesar 279.632.000,00 yang belum ditetapkan pagu alokasinya jadi total silpa DBHCHT TA 2025 sebesar Rp1.065.034.211,00.

Tabel 3.11
Anggaran dan Realisasi DBHCHT Tahun 2025

No	SKPD	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Silpa (Rp)
1	2	3	4	5
1	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	3.211.224.039	3.092.930.095	118.293.944
2	Dinas Ketenagakerjaan	1.350.000.000	1.300.521.600	49.478.400
3	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	630.390.000	629.520.747	869.253
4	Satuan Polisi Pamong Praja	976.511.208	907.299.163	69.212.045
5	Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik	174.172.600	174.172.600	0,00
6	Dinas Kesehatan	4.902.735.230	4.403.691.661	499.043.570
7	Bagian Perekonomian Setda	261.805.000	213.300.000	48.505.000
Jumlah		**11.506.838.077**	**10.721.435.866**	**785.402.211**

3.3. Alokasi Anggaran dan Realisasi Program Percepatan Penurunan Stunting TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat

Pagu Alokasi Program Percepatan Penurunan Stunting TA 2025 adalah sebesar Rp241.709.656.342,83 dengan realisasi sebesar Rp232.494.729.927,00.

Tabel 3.12
Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	213.707.600,00	213.366.255,00	341.345,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	150.948.611.413,00	147.108.013.332,00	3.840.598.081,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	282.944.000,00	276.487.715,00	6.456.285,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	334.310.000,00	332.820.000,00	1.490.000,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	17.842.685.660,00	16.824.012.771,00	1.018.672.889,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	678.269.000,00	678.244.000,00	25.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	96.000.000,00	95.838.754,00	161.246,00
Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100.999.957,00	100.755.205,00	244.752,00
Puskesmas Batujajar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	256.137.000,00	253.085.000,00	3.052.000,00
Puskesmas Cibodas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	265.264.000,00	264.868.000,00	396.000,00
Puskesmas Cicangkanggirang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	235.503.000,00	226.145.300,00	9.357.700,00
Puskesmas Cihampelas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	269.114.000,00	266.113.000,00	3.001.000,00
Puskesmas Cikole	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	254.146.000,00	227.117.200,00	27.328.800,00
Puskesmas Cimareme	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.157.000,00	257.903.700,00	8.253.300,00
Puskesmas Cipatat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	210.346.000,00	186.328.000,00	24.018.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
	PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			
Puskesmas Cipeundeuy	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	234.271.000,00	233.518.200,00	752.800,00
Puskesmas Cipongkor	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	144.387.000,00	116.562.000,00	27.825.000,00
Puskesmas Cirata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	214.430.000,00	175.852.400,00	38.577.600,00
Puskesmas Cisarua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	201.570.000,00	199.357.600,00	2.212.400,00
Puskesmas Citalem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	176.588.000,00	175.743.600,00	844.400,00
Puskesmas Ciwaruga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	243.805.000,00	171.781.600,00	72.023.400,00
Puskesmas DTP Gununghalu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	220.574.000,00	220.574.000,00	0,00
Puskesmas DTP Cikalongwetan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	282.889.000,00	190.189.000,00	92.700.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
	KESEHATAN MASYARAKAT				
Puskesmas DTP Cililin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	209.242.000,00	194.217.100,00	15.024.900,00
Puskesmas DTP Jayagiri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	239.232.000,00	199.482.000,00	39.750.000,00
Puskesmas DTP Rajamandala	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	163.133.000,00	153.768.000,00	9.365.000,00
Puskesmas DTP Saguling	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	287.967.000,00	231.206.400,00	56.760.600,00
Puskesmas Jayamekar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	222.485.000,00	221.135.000,00	1.350.000,00
Puskesmas Lembang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	267.241.000,00	266.041.000,00	1.200.000,00
Puskesmas Mukapayung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	281.109.000,00	280.275.800,00	833.200,00
Puskesmas Ngamprah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	241.125.000,00	203.787.000,00	37.338.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Puskesmas Padalarang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	278.650.000,00	277.448.200,00	1.201.800,00
Puskesmas Parongpong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	253.102.000,00	253.090.600,00	11.400,00
Puskesmas Pasirlangu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	384.991.702,00	280.427.000,00	104.564.702,00
Puskesmas Pataruman	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	266.330.000,00	204.688.500,00	61.641.500,00
Puskesmas Rende	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	258.811.000,00	224.675.000,00	34.136.000,00
Puskesmas Rongga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	218.883.000,00	218.883.000,00	0,00
Puskesmas Sindangkerta	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	198.103.000,00	196.781.600,00	1.321.400,00
Puskesmas Sumurbandung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	239.924.000,00	239.442.000,00	482.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Puskesmas Tagogapu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	181.823.000,00	159.073.575,00	22.749.425,00
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	4.620.515.820,00	4.578.768.820,00	41.747.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	1.048.105.864,00	1.048.041.064,00	64.800,00
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.130.426.564,00	1.130.345.564,00	81.000,00
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	216.600.000,00	216.600.000,00	0,00
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	4.147.705.000,00	4.147.705.000,00	0,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	156.590.000,00	155.840.004,00	749.996,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	483.732.764,00	480.059.984,00	3.672.780,00
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	1.113.183.764,00	1.106.243.431,00	6.940.333,00
Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	9.100.000,00	5.200.000,00	3.900.000,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	3.942.010.656,00	3.899.038.910,00	42.971.746,00
Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	7.238.616.837,00	6.814.695.520,00	423.921.317,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.783.000,00	9.075.000,00	1.708.000,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	95.632.500,00	66.680.000,00	28.952.500,00
Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	2.391.080.950,00	2.322.986.100,00	68.094.850,00
Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	396.317.000,00	394.174.000,00	2.143.000,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	5.004.477.120,00	4.571.120.111,00	433.357.009,00
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	4.751.396.427,00	3.279.382.330,00	1.472.014.097,00
Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1.187.601.644,83	855.446.578,00	332.155.066,83
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	187.471.800,00	186.682.600,00	789.200,00
Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	203.424.500,00	187.500.500,00	15.924.000,00
Kecamatan Batujajar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.472.724.400	1.408.307.000	64.417.400
Kecamatan Cihampelas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.579.008.800,00	1.129.593.000,00	449.415.800,00
Kecamatan Cikalongwetan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.003.760.800,00	1.955.782.000,00	47.978.800,00
Kecamatan Cililin	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.977.136.000,00	1.964.076.004,00	13.059.996,00
Kecamatan Cipatat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.200.532.600,00	2.105.072.300,00	95.460.300,00

PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Cipeundeuy	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	379.196.300,00	379.115.300,00	81.000,00
Kecamatan Cipongkor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.372.157.000,00	1.370.083.400,00	2.073.600,00
Kecamatan Cisarua	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.276.344.600,00	1.242.677.000,00	33.667.600,00
Kecamatan Gununghalu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.740.409.100,00	1.708.853.300,00	31.555.800,00
Kecamatan Lembang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.267.504.000,00	2.259.663.200,00	7.840.800,00
Kecamatan Ngamprah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.004.533.400,00	2.004.533.400,00	0,00
Kecamatan Padalarang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	2.138.345.800,00	2.123.879.800,00	14.466.000,00
Kecamatan Parongpong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.200.196.300,00	1.200.196.300,00	0,00
Kecamatan Rongga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.562.767.300,00	1.560.761.100,00	2.006.200,00
Kecamatan Saguling	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	585.685.000,00	585.685.000,00	0,00
Kecamatan Sindangkerta	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	1.449.422.400,00	1.441.767.900,00	7.654.500,00
JUMLAH			**241.709.656.342,83**	**232.494.729.927,00**	**9.214.926.415,83**

Rincian per Sub kegiatan tersaji pada **Lampiran 1.**

3.4. Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (*Spesific Grant*) TA 2025 di Kabupaten Bandung Barat

Pagu Alokasi DAU Mandatory (*Spesific Grant*) TA 2025 adalah sebesar Rp202.819.622.742,00 dengan realisasi sebesar Rp196.037.016.163,00 sehingga terdapat sisa sebesar Rp6.782.606.579,00, dengan tabel sebagai berikut:

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (*Spesific Grant*) Tahun 2025

No	SKPD	Silpa 2024 (Rp)	Anggaran 2025 (Rp)	Realisasi Silpa 2024 (Rp)	Realisasi 2025 (Rp)	Sisa Silpa 2024 (Rp)	Sisa 2025 (Rp)
1	Bidang Pendidikan	5.601.118.086	101.242.198.000,00	5.411.189.518,00	99.519.986.252,00	189.928.568,00	1.722.211.748,00
2	Bidang Kesehatan	594.930.572	95.079.440.000,00	326.130.572,00	90.498.043.721,00	268.800.000,00	4.581.396.279,00
3	Bidang Tata Ruang	301.936.084	0,00	281.666.100,00	0,00	20.269.984,00	0,00
Jumlah		**6.497.984.742,00**	**196.321.638.000,00**	**6.018.986.190,00**	**190.018.029.973,00**	**478.998.552,00**	**6.303.608.027,00**

Adapun rincian per kegiatan tersaji pada **Lampiran 1a, 1b, dan 1c.**

BAB IV
KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
2. Menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan entitas pelaporan serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas pelaporan mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi entitas pelaporan berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman; dan
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan entitas pelaporan, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode berjalan.

Sedangkan tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi

yang berkelanjutan, serta risiko dan ketidakpastian yang terkait. Pelaporan keuangan juga menyajikan informasi bagi pengguna mengenai:

a. Indikasi apakah sumber daya telah diperoleh dan digunakan sesuai dengan anggaran; dan

b. Indikasi apakah sumber daya diperoleh dan digunakan sesuai dengan ketentuan, termasuk batas anggaran yang ditetapkan oleh DPRD.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Laporan keuangan yang disusun terdiri dari:

a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);

b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);

c. Neraca;

d. Laporan Operasional (LO);

e. Laporan Arus Kas (LAK);

f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan

g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Struktur APBD TA 2025 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengeloaan Keuangan Dacrah.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menetapkan kebijakan akuntansi yang berlaku untuk Entitas pelaporan yaitu Bupati sebagai Kepala Daerah yang wajib menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah

Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memberikan wewenang kepada Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) melalui Bidang Perbendaharaan, Akuntansi dan Pelaporan untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 merupakan konsolidasian dari Laporan Keuangan SKPD/UKPD selaku entitas akuntansi. Pada proses konsolidasi, dilakukan penggabungan Laporan Keuangan entitas akuntansi menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan Perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

a. Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
b. Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
d. Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

Adapun SKPD sebagai Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
7. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman;
8. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
9. Satuan Polisi Pamong Praja;
10. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
11. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Dinas Sosial;
13. Dinas Tenaga Kerja;
14. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
15. Dinas Lingkungan Hidup;
16. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
17. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
18. Dinas Perhubungan;
19. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik;
20. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
21. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
22. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
23. Dinas Arsip dan Perpustakaan;
24. Dinas Perikanan dan Peternakan;
25. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
26. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;

27. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
28. Kecamatan Ngamprah;
29. Kecamatan Cipatat;
30. Kecamatan Batujajar;
31. Kecamatan Padalarang;
32. Kecamatan Sindangkerta;
33. Kecamatan Cipongkor;
34. Kecamatan Gununghalu;
35. Kecamatan Rongga;
36. Kecamatan Cililin;
37. Kecamatan Cikalongwetan;
38. Kecamatan Cipeundeuy;
39. Kecamatan Parongpong;
40. Kecamatan Cisarua;
41. Kecamatan Lembang;
42. Kecamatan Cihampelas;
43. Kecamatan Saguling;
44. Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
45. Badan Keuangan dan Aset Daerah;
46. Badan Pendapatan Daerah;
47. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; dan
48. 36 BLUD terdiri dari 3 RSUD, 32 Puskesmas, dan 1 Labkesda.

LKPD ini tidak mencakup entitas:

1. Pemerintah Pusat; dan
2. Perusahaan Umum Daerah dan Air Minum Tirta Wibawa Mukti.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas, sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan SKPD Kabupaten Bandung Barat disusun berdasarkan basis akrual. Namun, dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas.

Basis akrual untuk Laporan Operasional (LO) berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan di lingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
   a. Asumsi kemandirian entitas;
   b. Asumsi kesinambungan entitas; dan
   c. Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
2. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. **Relevan**, dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantunya dalam mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan, dan menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi pengguna laporan di masa lalu. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan adalah yang dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan harus:

   1) Memiliki manfaat umpan balik *(feedback value)*;
   2) Memiliki manfaat prediktif *(predictive value)*;
   3) Tepat waktu; dan
   4) Lengkap.

b. **Andal**, di mana informasi dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi akuntansi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal harus memenuhi karakteristik:

   1) Penyajiannya jujur, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan;
   2) Dapat diverifikasi *(verified)*, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya harus tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh; dan
   3) Netralitas, artinya bahwa laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat harus memuat informasi yang diarahkan untuk memenuhi kebutuhan umum dan dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

c. **Dapat dibandingkan**, di mana informasi yang termuat dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan Pemerintah Daerah lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menerapkan kebijakan

akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila Pemerintah Daerah yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan kebijakan akuntansi harus diungkapkan pada periode terjadinya perubahan tersebut.

d. **Dapat dipahami**, di mana informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna laporan. Untuk itu, pengguna laporan diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, serta adanya kemauan pengguna laporan untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

3. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam menyusun standar, penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dalam memahami laporan keuangan yang disajikan. Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:

   a. Basis akuntansi: basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas. Dalam hal peraturan perundangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian;

   b. Prinsip nilai historis *(historical cost)*: aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan SKPD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait;

c. Prinsip realisasi *(realization)*: bagi pemerintah, pendapatan basis kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi kas. Prinsip layak temu biaya-pendapatan (*matching-cost against revenue principle*) dalam akuntansi pemerintah tidak mendapat penekanan sebagaimana dipraktikan dalam akuntansi komersial;

d. Prinsip substansi mengungguli bentuk formal *(substance over form)*: informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

e. Prinsip periodesitas *(periodicity)*: Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan;

f. Prinsip konsistensi *(consistency)*: Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan;

g. Prinsip pengungkapan lengkap *(full disclosure)*: laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat ditempatkan pada lembar

muka (*on the face)* laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat atau Catatan atas Laporan Keuangan; dan

h. Prinsip penyajian wajar *(fair presentation)*: Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi penyusun laporan keuangan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya, pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat kewajiban atau belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan menjadi tidak netral dan tidak andal.

4. Kendala informasi yang relevan dan andal: kendala informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan. Tiga hal yang menimbulkan kendala dalam informasi akuntansi dan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, yaitu:

   a. Materialitas: walaupun idealnya memuat segala informasi, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat hanya diharuskan memuat informasi yang memenuhi kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabila kelalaian untuk mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

   b. Pertimbangan biaya dan manfaat: manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Oleh karena itu, laporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat tidak semestinya menyajikan segala informasi yang manfaatnya lebih kecil dari biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya itu juga tidak harus dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat. Manfaat mungkin juga dinikmati oleh pengguna lain di samping mereka yang menjadi tujuan informasi, misalnya penyediaan informasi lanjutan kepada kreditor mungkin akan mengurangi biaya yang dipikul oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat; dan

c. Keseimbangan antar karakteristik kualitatif: keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan dipenuhi oleh laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Kepentingan relatif antar karakteristik dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut merupakan masalah pertimbangan profesional.

5. Pengakuan unsur laporan keuangan: pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, belanja, dan pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait. Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui yaitu:

   a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

   b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal; dan

   c. Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu mempertimbangkan aspek materialitas.

6. Kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi: dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep kemungkinan besar manfaat ekonomi masa depan terjadi

digunakan dalam pengertian derajat kepastian tinggi bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke entitas pelaporan. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada saat penyusunan laporan keuangan.

7. Keandalan pengukuran: kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun ada kalanya pengakuan didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan biaya dan estimasi yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi demikian cukup diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Penundaan pengakuan suatu pos atau peristiwa dapat terjadi apabila kriteria pengakuan baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau kcadaan lain di masa mendatang.

4.3.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat :

a. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
b. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
c. Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
d. Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
e. Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.

Pendapatan-LRA disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan Pendapatan-LRA, antara lain:

a. penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.2 Belanja LRA

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Belanja diakui pada saat:

a. Terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk seluruh transaksi di SKPD dan PPKD setelah dilakukan pengesahan definitif oleh fungsi BUD untuk masing-masing transaksi yang terjadi di SKPD dan PPKD;
b. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran setelah diverifikasi oleh PPK-SKPD; dan
c. Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah untuk pengeluaran dari Kas Daerah atau pengesahan oleh bendahara umum daerah dan diukur berdasarkan asas bruto.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal jika barang berwujud aset tetap yang diperoleh dari belanja modal tersebut memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
f. merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
g. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal pada pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

a. Pengeluaran tersebut berakibat bertambahnya
    1) Masa manfaat ekonomi, dan/atau;
    2) Ekonomis/efisen dan/atau;
    3) Kapasitas dan/atau;
    4) Kualitas dan/atau;
    5) Kapasitas produksi dan/atau; dan
    6) Volume aset yang telah dimiliki.
b. Pengeluaran tersebut memenuhi batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap yang sama dengan batas kapitalisasi perolehan aset tetap.

Nilai batasan satuan minimum kapitalisasi aset tetap adalah nilai kriteria material/batasan minimal nilai kapitalisasi aset tetap apakah pengeluaran pengadaan baru dan pengeluaran setelah perolehan awas suatu aset tetap seperti penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai batasan satuan minimum kapitalisasi aset tetap dapat dilihat pada Lampiran 1 Bab XII tentang Kebijakan Akuntansi Aset Tetap.

Nilai batasan satuan minimum kapitalisasi aset tetap dikecualikan terhadap pengeluaran untuk tanah, jalan dan jembatan, serta bangunan air/irigasi. Instalasi, jaringan, dan peralatan untuk proses belajar mengajar serta aset tetap lainnya berupa buku dan koleksi perpustakaan serta barang bercorak budaya/kesenian.

Pengeluaran belanja barang aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap di atas akan diperlakukan sebagai barang inventaris yang dianggarkan pada belanja barang dan dicatat secara ekstrakomptabel serta diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan

Suatu pengeluaran belanja juga diperlakukan sebagai belanja modal terhadap barang tidak berwujud sebagai berikut:

a. *Goodwill*;
b. Hak Paten atau Hak Cipta;
c. Royalti;
d. *Software*, kecuali sistem informasi manajemen keuangan daerah yang dianggarkan dalam belanja jasa dan baru dikapitalisasi jika terbukti dapat digunakan;
e. Lisensi;
f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang;
g. Aset Tak Berwujud Lainnya; dan
h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan.

Belanja dinilai sebesar nilai tercatat dan disajikan pada laporan realisasi anggaran berdasarkan belanja langsung dan tidak langsung.

Belanja disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sesuai dengan klasifikasi ekonomi dan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yaitu:

a. Belanja Operasi;
b. Belanja Modal;

c. Belanja Tak Terduga; dan

d. Belanja Transfer.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Perlu diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan aset tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.3 Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

4.3.4 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO pada dasarnya terdiri dari pendapatan operasional, pendapatan non operasional, dan pendapatan luar biasa.

Pendapatan operasional diklasifikasi berdasarkan sumbernya, secara garis besar ada tiga kelompok pendapatan daerah, yaitu:

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);

b. Pendapatan Transfer; dan

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

a. Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*) atau
b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

   Pengakuan pendapatan-LO ini diakui pada saat:

   1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
   2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
   3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
   4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD; dan
   5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) menurut jenis pendapatan sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar. Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.5 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Beban diklasifikasi menurut klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban diakui pada:

a. Saat timbulnya kewajiban;
b. Saat terjadinya konsumsi aset; dan
c. Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
    1) Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah daerah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon air, internet, dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar pemerintah dapat diakui sebagai beban;
    2) Saat terjadinya konsumsi asset artinya beban diakui padasaat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah; dan
    3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa artinya beban diakui pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan / berlalunya waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

Beban dinilai sebesar akumulasi beban yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (*line item*).

Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu:

a. Beban Operasi, yang terdiri dari: Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyusutan dan Amortisasi, Beban Penyisihan Piutang, dan Beban lain-lain;
b. Beban Transfer;

c. Beban Non Operasional; dan

d. Beban Luar Biasa.

4.3.6 Transfer

Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Transfer diklasifikasikan menurut sumber dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar (BAS).

Pengakuan untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah. Kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar atau pada saat timbulnya kewajiban pemerintah daerah (jika terdapat dokumen yang memadai seperti surat keputusan kepala daerah/peraturan kepala daerah).

Pengukuran Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer:

a. Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah; dan

b. Untuk kepentingan penyusunan penyajian pendapatan transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Pengukuran Transfer Keluar dan Beban Transfer:

a. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.

b. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya/tidak tercapainya target penerimaan transfer masuk daerah;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional;
4. Penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;
5. Penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; dan
6. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, rincian realisasi beban transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
2. Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya/penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar;
3. Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional; dan
4. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.3.7 Aset Lancar

Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. Diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan; atau
2. Berupa kas dan setara kas.

Aset lancar meliputi:

a. Kas dan Setara Kas

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Setara Kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Kas meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan (UYHD)/ Uang Persediaan yang wajib dipertanggungjawabkan dan dilaporkan dalam neraca. Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran.

Setara Kas pada pemerintah daerah ditujukan untuk memenuhi kebutuhan kas jangka pendek atau untuk tujuan lainnya. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi jangka pendek harus segera dapat diubah menjadi kas dalam jumlah yang dapat diketahui tanpa ada risiko perubahan nilai yang signifikan. Oleh karena itu, suatu investasi disebut setara kas kalau investasi dimaksud mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan dari tanggal perolehannya.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab bendahara umum daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain bendahara umum daerah, misalnya bendahara pengeluaran dan bendahara penerimaan.

Kas dan Setara Kas diakui pada saat kas dan setara kas diterima dan/atau dikeluarkan/dibayarkan. Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca pada kelompok aset lancar dan Laporan Arus Kas.

Hal-hal yang harus diungkapkan berkaitan dengan kas dan setara kas, antara lain:

1) Rincian dan nilai kas yang disajikan dalam laporan keuangan;
2) Kebijakan manajemen setara kas;
3) Rincian dan nilai kas yang ada dalam Rekening Kas Umum Daerah namun merupakan kas transitoris yang belum disetorkan ke pihak yang

berkepentingan, seperti PPN/PPh yang dipungut, tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, Iuran Tunjangan Kesehatan/Taspen/ Taperum yang belum disetorkan dan lain-lain; dan

4) Rincian dan nilai kas yang dianggap sebagai bagian dari Kas Umum Daerah.

Apabila terdapat bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggung-jawabkan yang berasal dari penggunaan dana uang persediaan pada bendahara pengeluaran, maka hal ini harus diungkapkan dalam CaLK. Saldo yang belum disetorkan kembali ke kas daerah per tanggal neraca merupakan bagian dari SAL/SiLPA.

Kas pada BLUD, Kas BOS, dan Kas BOK merupakan bagian dari kas pada pemerintah daerah sehingga harus dilaporkan pada neraca pemerintah daerah.

Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris pada Laporan Arus Kas.

Pengungkapan kas dan setara kas dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi penerimaan dan pengeluaran kas;
2) Penjelasan dan sifat dari tiap akun kas dan setara kas;
3) Rincian dan daftar dari masing-masing rekening kas dan setara kas yang signifikan, termasuk jenis dan jangka waktunya;
4) Kas di Bendahara Pengeluaran yang mencakup bukti-bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan;
5) Kebijakan manajemen setara kas;
6) Jumlah kas yang dibatasi penggunaannya, bila ada;
7) Selisih kas, bila ada;
8) Rincian dana cadangan, bila ada;
9) Rincian uang yang disajikan sebagai aset yang dibatasi penggunaannya;
10) Rincian uang yang disajikan sebagai aset non lancar lainnya;
11) Selisih kurs atas kas, baik yang telah terealisasi (*realized*) dan belum terealisasi (*unrealized*);
12) Kurs yang digunakan pada tanggal neraca; dan
13) Informasi lainnya yang dianggap penting.

b. Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain (estimasi yang dilakukan untuk piutang tidak tertagih pada akhir setiap periode yang dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang berdasarkan penggolongan kualitas piutang). Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk Pajak, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (limapuluh perseratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus perseratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) Kualitas Lancar sebesar 0,5%;
2) Kualitas Kurang Lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);

3) Kualitas Diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) Kualitas Macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih untuk objek bukan pajak selain Retribusi, ditetapkan sebesar:

1) 0,5% (nol koma lima perseratus) dari Piutang dengan kualitas lancar;
2) 10% (sepuluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
3) 50% (lima puluh perseratus) dari Piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada); dan
4) 100% (seratus perseratus) dari Piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).

Piutang diakui saat timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas lain. Piutang dapat diakui ketika:

1) Diterbitkan surat ketetapan/dokumen yang sah; atau
2) Telah diterbitkan surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan; atau
3) Belum dilunasi sampai dengan akhir periode pelaporan.

Piutang dicatat dan diukur sebesar:

1) Nilai yang belum dilunasi dari setiap tagihan yang ditetapkan; atau
2) Nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).

Penyisihan piutang yang tidak dapat ditagih dilakukan setiap akhir periode pelaporan. Perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih menggunakan pendekatan neraca (*balance sheet*), yaitu dengan cara perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*).

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam Catatan Atas Laporan Keuangan. Informasi dimaksud dapat berupa:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
3) Penjelasan atas penyelesaian piutang; dan
4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.

Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbuku, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak/PNBP atau melalui akun Penerimaan Pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.

c. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diklasifikasikan berdasarkan wujudnya merupakan aset yang berupa:

1) Barang atau perlengkapan (*supplies*) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas;
2) Bahan atau perlengkapan (*supplies*) yang akan digunakan dalam proses produksi, misalnya bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku pembuatan benih;
3) Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, misalnya adalah alat-alat pertanian setengah jadi, benih yang belum cukup umur;
4) Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, misalnya adalah tanah, bangunan, peralatan dan mesin serta hewan dan bibit tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

5) Barang-barang yang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti persediaan logistik, dan seterusnya.

Persediaan dalam kondisi rusak atau usang atau mati tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat:

1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal; dan
2) diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik *(stock opname)*.

Sistem pencatatan persediaan dilakukan dengan:

Metode perpetual, pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional SKPD.

Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang digunakan/dijual pertama kali. Sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

Dikecualikan untuk persediaan obat-obatan penilaian persediaan dapat menggunakan metode FEFO (*First Expired First Out*), yaitu metode mengeluarkan obat-obatan yang tanggal kedaluarsanya lebih pendek dari obat-obatan yang tanggal kedaluarsanya lebih lama.

Dalam metode ini fungsi akuntansi selalu mengkinikan nilai persediaan pada akhir bulan untuk persediaan yang masuk maupun yang keluar. Metode ini digunakan untuk semua jenis persediaan di SKPD.

Persediaan disajikan sebesar:

1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan

harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan persediaan;

2) Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis;
3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi, proses pengembangbiakan hewan dan tanaman, rampasan dan lainnya. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm length transaction*); dan
4) Untuk barang kuasi materai, prangko, dinilai sebesar harga nominal yang tercetak pada barang tersebut.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal (yang seringkali disebut sebagai benda berharga) yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai sebesar biaya perolehan/pembuatan benda berharga, bukan sebesar nilai nominal karcis yang telah diporporasi. Jika jumlah persediaan benda berharga pada akhir periode pelaporan terdiri atas lebih dari satu kali proses pembuatan atau perolehan maka nilai benda berharga yang disajikan dalam neraca dicatat sebesar harga pembuatan/perolehan terakhir.

Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Beban persediaan dicatat sebesar pemakaian persediaan (*use of goods*). Penghitungan beban persediaan dilakukan dalam rangka penyajian Laporan Operasional.

Dalam hal persediaan dicatat secara perpetual, maka pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan nilai per unit sesuai metode FIFO (*First In First Out*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan:

1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan;
2) Persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang atau perlengkapan yang digunakan

dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan

3) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang.

d. Investasi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, dengan memanfaatkan surplus anggaran untuk memperoleh pendapatan dalam jangka panjang dan memanfaatkan dana yang belum digunakan untuk investasi jangka pendek dalam rangka manajemen kas sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset nonlancar.

Pengungkapan investasi dalam Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
2) Jenis-jenis investasi, baik investasi jangka pendek, investasi permanen maupun nonpermanen;
3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan
6) Perubahan pos investasi.

Investasi non permanen yang akan jatuh tempo dalam waktu dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan direklasifikasi menjadi bagian lancar investasi non permanen pada aset lancar.

Hasil investasi seperti bunga dan dividen diakui sebagai pendapatan dan disajikan pada LRA dan LO. Apabila terdapat hasil investasi yang masih terutang disajikan sebagai piutang pada neraca.

4.3.8 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Aset tetap dalam sengketa atau sedang menunggu proses pengadilan, harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi aset tetap adalah sebagai berikut:

a. Tanah;
b. Peralatan dan Mesin;
c. Gedung dan Bangunan;
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
e. Aset Tetap Lainnya; dan
f. Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pengakuan Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan aset tetap sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.

Untuk dapat diakui sebagai aset tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

a. Berwujud;
b. Mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan;
c. Biaya perolehan aset dapat diukur secara handal;
d. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
e. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan
f. Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual atau dihibahkan.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah. Saat penguasaan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Untuk aset tetap yang telah dikuasai dan dimanfaatkan dalam waktu lama, namun belum ada bukti kepemilikannya, maka dengan menggunakan prinsip substansi mengungguli formalitas maka aset tetap tersebut dicatat dalam neraca dan dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Terhadap aset tetap tersebut harus segera diproses bukti kepemilikannya.

Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan aset tetap tidak tersedia, maka nilai aset tetap dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Berikut adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan pada aset tetap:

Tabel 4.1
Daftar Biaya-biaya yang Diatribusikan pada Aset Tetap

No	Jenis Aset	Biaya yang dikapitalisasikan
1	Tanah	• harga pembelian atau biaya pembebasan tanah • biaya appraisal/penilai harga tanah • biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak/biaya pembuat sertifikat, (pengukuran, permohonan sk, pembelian tanda batas) • biaya pelepasan • biaya pematangan (dalam rangka penyiapan lahan) • Ijin Peruntukan Lahan (IPL) • honor tim pengadaan tanah.
2	Peralatan dan Mesin	• harga pembelian • biaya pengangkutan/distribusi • biaya instalasi/pemasangan

No	Jenis Aset	Biaya yang dikapitalisasikan
		• biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas,) • Pajak
3	Gedung dan Bangunan	• biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung • biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas) • harga pembelian atau biaya konstruksi • biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL) • biaya pengurusan IMBB • pajak.
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	• biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan Jalan, Irigasi dan jaringan • biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas) • biaya perolehan atau biaya konstruksi • biaya perencanaan, pengawasan, konsultan • pajak.
5	Aset Tetap Lainnya	• harga pembelian • biaya pengangkutan/distribusi • biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll) • pajak.
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	• biaya pematangan lahan dalam rangka pembangunan gedung • biaya pengadaan/lelang (dokumen, pengumuman, perjalanan dinas, dll) • harga pembelian atau biaya konstruksi • biaya perencanaan, pengawasan, konsultan (AMDAL, UKL/UPL) • biaya pengurusan IMBB • pajak.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi:

a. biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku; dan
b. biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan; dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan adalah jumlah kas/setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk digunakan.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau harga konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat didistribusikan

secara langsung secara proporsional ke setiap unit sehingga membawa aset tersebut ke kondisi dan tempat yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Aset tetap berupa tanah, gedung dan bangunan yang belum ada nilai perolehannya dinilai dengan menggunakan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) pada Tahun penyusunan Neraca Awal.

Sedangkan Aset tetap selain tanah, gedung dan bangunan yang belum ada nilai perolehannya, dinilai dengan menggunakan Standar Harga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Tahun penyusunan Neraca Awal.

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas (seperti *goodwill*, merek dagang, waralaba dengan kehidupan yang tak terbatas, abadi waralaba, dll). Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

Amortisasi dilakukan dengan metode seperti garis lurus. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan masa manfaat selama 5 tahun yang dilakukan setiap akhir periode tanpa nilai sisa.

Amortisasi tidak dilakukan terhadap:

a. Aset Tak Berwujud yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah;
b. Sesuai ketentuan perundang-undangan di bidang Hak Cipta (*copyright*) dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, untuk dilakukan penghapusannya; dan
c. Aset Tak Berwujud dalam kondisi usang dan/atau rusak berat yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4.3.8.1 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.

Penyusutan diakui pada saat:

a. Alokasi nilai suatu aset tetap yang disusutkan dapat diketahui; atau
b. Akhir periode akuntansi.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan harus dapat menggambarkan manfaat ekonomi atau kemungkinan jasa (*service potential*) yang akan mengalir ke pemerintah.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Perhitungan aset tetap dilakukan tahunan dan pencatatan penyusutan aset tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.

Ada kalanya aset tetap diperoleh awal tahun, pertengahan tahun atau akhir tahun. Hal ini menimbulkan permasalahan dalam perhitungan penyusutan.

Dalam hal terjadi perubahan nilai Aset Tetap sebagai akibat koreksi nilai Aset Tetap yang disebabkan oleh kesalahan dalam pencantuman nilai yang diketahui di kemudian hari, maka dilakukan penyesuaian terhadap Penyusutan Aset Tetap tersebut. Penyesuaiannya meliputi atas nilai yang dapat disusutkan dan nilai akumulasi penyusutan.

Nilai yang dapat disusutkan didasarkan pada nilai buku tahunan, kecuali untuk penyusutan pertama kali, didasarkan pada nilai buku akhir tahun pembukuan sebelum diberlakukannya penyusutan.

Barang ekstrakomptabel tidak disusutkan, melainkan diterapkan penghapusan pada saat barang tersebut sudah tidak dapat digunakan/rusak.

Aset Tetap yang seluruh nilainya telah disusutkan/nilai penyusutan Nol, namun secara teknis masih dapat dimanfaatkan tetap disajikan di neraca dengan menunjukkan nilai perolehan dan akumulasi penyusutannya, dan dicatat dalam kelompok Aset Tetap dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Barang hibah dilaksanakan penyusutan pada saat barang hibah tersebut diterima. Nilai yang dapat disusutkan atas barang hasil perolehan hibah didasarkan pada berita acara serah terima dan/atau keputusan hibah. Masa manfaat barang hibah dihitung sejak tahun barang hibah tersebut diperoleh.

Untuk menentukan waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan aset yang diperoleh ditengah tahun ada beberapa pendekatan yang digunakan:

1) Hari penggunaán;
2) Bulan penggunaan;
3) Semester (tengah tahun); dan
4) Tahunan.

Dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menggunakan pendekatan Tahunan dimana penyusutan dapat dihitung satu tahun meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari dengan formula penghitungan penyusutan Metode Garis Lurus.

4.3.9 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengakuan yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang

   Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah.

   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III.

   b. Tagihan Tuntutan Kerugian Daerah

      Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K).

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

   Untuk mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah yang dimilikinya, pemerintah daerah diperkenankan melakukan kemitraan

dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan sesuai peraturan perundang-undangan. Kemitraan ini dapat berupa:

a. Kemitraan dengan Pihak Ketiga-Sewa

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa.

b. Kerja Sama Pemanfaatan (KSP)

Permendagri Nomor 17 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah menyebutkan bahwa kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan daerah dan sumber pembiayaan lainnya. Kerjasama pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/ kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi asset lainnya kerjasama-pemanfaatan (KSP).

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Guna Serah (BGS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa pemanfaatan asset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, kemudian menyerahkan kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak.

BGS dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. Aset yang berada dalam BGS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap.

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

Buletin Teknis SAP Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah menyebutkan bahwa Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak

ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut

BSG diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/ investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat juga dilakukan secara bagi hasil.

3. Aset Tidak Berwujud (ATB)

Buletin Teknis SAP Nomor 11 tentang Aset Tidak Berwujud (ATB) menyebutkan bahwa aset tidak berwujud (ATB) adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas:

a. *Goodwill*

Goodwill adalah kelebihaan nilai yang diakui oleh pemerintah daerah akibat adanya pembelian kepentingan/saham di atas nilai buku. *Goodwill* dihitung berdasarkan selisih antara nilai entitas berdasarkan pengakuan dari suatu transaksi peralihan/penjualan kepentingan/saham dengan nilai buku kekayaan bersih perusahaan;

b. Hak Paten atau Hak Cipta

Hak-hak ini pada dasarnya diperoleh karena adanya kepemilikan kekayaan intelektual atau atas suatu pengetahuan teknis atau suatu karya yang dapat menghasilkan manfaat bagi pemerintah daerah. Selain itu dengan adanya hak ini dapat mengendalikan pemanfaatan aset tersebut dan membatasi pihak lain yang tidak berhak untuk memanfaatkannya;

c. Royalti

Nilai manfaat ekonomi yang akan/dapat diterima atas kepemilikan hak cipta/hak paten/hak lainnya pada saat hak dimaksud akan dimanfaatkan oleh orang, instansi atau perusahaan lain;

d. Software

Software komputer yang masuk dalam kategori aset tak berwujud adalah *software* yang bukan merupakan bagian tak terpisahkan dari hardware komputer tertentu. Jadi *software* ini adalah yang dapat digunakan di computer lain. *Software* yang diakui sebagai ATB memiliki karakteristik berupa adanya hak istimewa/eksklusif atas *software* berkenaan;

e. Lisensi

Lisensi adalah izin yang diberikan pemilik hak paten atau hak cipta yang diberikan kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu Hak Kekayaan Intelektual yang diberi perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu;

f. Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Hasil kajian/pengembangan yang memberikan manfaat jangka panjang adalah suatu kajian atau pengembangan yang memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial dimasa yang akan datang yang dapat diidentifikasi sebagai asset;

g. Aset Tak Berwujud Lainnya

Aset tak berwujud lainnya merupakan jenis aset tak berwujud yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam jenis aset tak berwujud yang ada; dan

h. Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Terdapat kemungkinan pengembangan suatu aset tak berwujud yang diperoleh secara internal yang jangka waktu penyelesaiannya melebihi satu tahun anggaran atau pelaksanaan pengembangannya melewati tanggal pelaporan. Dalam hal terjadi seperti ini, maka atas pengeluaran yang telah terjadi dalam rangka pengembangan tersebut sampai dengan tanggal pelaporan harus diakui sebagai aset tak berwujud dalam Pengerjaan (*intangible asset – work in progress*),

dan setelah pekerjaan selesai kemudian akan direklasifikasi menjadi aset tak berwujud yang bersangkutan.

Sesuatu diakui sebagai aset tidak berwujud jika dan hanya jika:

1) Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan
2) Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

4. Aset Lain-Lain, terdiri dari :
   a. *Detail Engineering Design* (DED) yaitu desain secara detail dari rencana pembangunan suatu proyek fisik yang belum atau sedang dikerjakan;
   b. *Software* (Perangkat Lunak) tanpa Hak Ekslusif/Istimewa;
   c. Aset Tetap Dalam Proses Penghapusan/TGR;
   d. Aset Tetap Dalam Proses Penghapusan/TGR dan Aset Tetap Rusak Berat yaitu aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain; dan
   e. Aset lain-lain lainnya yaitu akun aset lain-lain yang belum dapat di klasifikasi ke dalam kelompok yang sudah dijelaskan di atas.

Setiap kelompok aset lainnya memiliki karakteristik pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1. Tagihan Jangka Panjang
   a. Tagihan Penjualan Angsuran

      Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

   b. Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah
      1) Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTJM); dan

2) Jika terdapat tagihan jangka panjang yang akan jatuh tempo pada tahun berikutnya, maka dilakukan reklasifikasi sejumlah nilai yang jatuh tempo tersebut dari Aset Lainnya ke akun Bagian Lancar TP/TGR.

2. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

a. Sewa

Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan;

b. Kerjasama Pemanfaatan (KSP)

Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji;

c. Bangun Guna Serah-BGS (*Build, Operate, Transfer*-BOT)

BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut; dan

d. Bangun Serah Guna-BSG (*Build, Transfer, Operate*-BTO)

BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan pemerintah daerah ditambah dengan nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

3. Aset Tak Berwujud

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari:

a. Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat;
b. Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk

penggunaan yang dimaksudkan. Contoh dari biaya yang dapat diatribusikan secara langsung adalah:

1) Biaya staf yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan;
2) Biaya professional yang timbul secara langsung agar aset tersebut dapat digunakan; dan
3) Biaya pengujian untuk menjamin aset tersebut dapat berfungsi secara baik.

Pengukuran aset tak berwujud yang diperoleh secara internal adalah:

a. Aset Tak Berwujud dari kegiatan pengembangan yang memenuhi syarat pengakuan, diakui sebesar biaya perolehan yang meliputi biaya yang dikeluarkan sejak memenuhi kriteria pengakuan;
b. Pengeluaran atas unsur tidak berwujud yang awalnya telah diakui oleh entitas sebagai beban tidak boleh diakui sebagai bagian dari harga perolehan aset tak berwujud di kemudian hari;
c. Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari pengembangan *software* komputer, maka pengeluaran yang dapat dikapitalisasi adalah pengeluaran tahap pengembangan aplikasi; dan
d. Aset yang memenuhi definisi dan syarat pengakuan aset tak berwujud, namun biaya perolehannya tidak dapat ditelusuri dapat disajikan sebesar nilai wajar.

4. Aset Lain-lain

Salah satu yang termasuk dalam kategori dalam aset lain-lain adalah aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain menurut nilai tercatat/nilai bukunya.

Pengungkapan aset lainnya dalam catatan atas laporan keuangan, sekurang-kurangnya harus diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

a. Besaran dan rincian aset lainnya;
b. Kebijakan amortisasi atas Aset Tidak Berwujud;
c. Kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BOT dan BTO); dan
d. Informasi lainnya yang penting.

4.3.10 Dana Cadangan

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan dibukukan dalam rekening tersendiri atas nama dana cadangan pemerintah daerah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).

Pembentukan dan peruntukan suatu Dana Cadangan harus didasarkan pada peraturan daerah tentang pembentukan Dana Cadangan tersebut sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peraturan Daerah tentang Pembentukan dana cadangan mencakup:

a. Penetapan tujuan pembentukan dana cadangan;
b. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan;
c. Besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan dalam bentuk rekening tersendiri;
d. Sumber dana cadangan; dan
e. Tahun anggaran pelaksanaan dana cadangan.

Pembentukan dana cadangan ini akan dianggarkan dalam pengeluaran pembiayaan, sedangkan pencairannya akan dianggarkan pada penerimaan pembiayaan. Untuk penggunaannya dianggarkan dalam program kegiatan yang sudah tercantum di dalam peraturan daerah.

Dana cadangan diakui saat terjadi pemindahan dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening dana cadangan yang ditandai oleh terbitnya SP2D-LS Pembentukan Dana Cadangan. Proses pemindahan ini harus melalui proses penatausahaan yang menggunakan mekanisme LS.

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pencairan Dana Cadangan diakui pada saat terbit dokumen pemindah-bukuan atau yang sejenisnya atas Dana Cadangan, yang dikeluarkan oleh BUD atau Kuasa BUD atas persetujuan Bupati.

Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah merupakan penambah Dana Cadangan.

Dana Cadangan diukur sesuai dengan nilai nominal dari Kas yang diklasifikasikan ke Dana Cadangan.

Dalam hal Dana Cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka Dana Cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

Pengungkapan Dana Cadangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Peraturan daerah pembentukan Dana Cadangan;
b. Tujuan pembentukan Dana Cadangan;
c. Program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
d. Besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening Dana Cadangan;
e. Sumber Dana Cadangan; dan
f. Tahun anggaran pelaksanaan dan pencairan Dana Cadangan.

Pencairan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai penerimaan pembiayaan. Pembentukan dana cadangan disajikan dalam LRA sebagai Pengeluaran pembiayaan.

Pencairan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus masuk kas dari aktivitas investasi.

Pembentukan dana cadangan disajikan di Laporan Arus Kas dalam kelompok arus kas keluar dari aktivitas investasi.

4.3.11 Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

Tabel 4.2
Klasifikasi Kewajiban

Nama Akun	Nama Sub Akun
Kewajiban Jangka Pendek	Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)
	Utang Bunga
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
	Pendapatan Diterima Dimuka
	Utang Belanja
	Utang Jangka Pendek Lainnya
Kewajiban Jangka Panjang	Utang Dalam Negeri
	Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka

pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

a. Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan;
b. Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan
c. Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal.

Pengungkapan Kewajiban dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), sekurang-kurangnya meliputi hal-hal sebagai berikut:

a. Kebijakan akuntansi kewajiban;
b. Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberipinjaman;
c. Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;
d. Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
e. Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
    1) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi:
        a) Pengurangan pinjaman;
        b) Modifikasi persyaratan utang;
        c) Pengurangan tingkatbungapinjaman;
        d) Pengunduran jatuhtempo pinjaman;
        e) Pengurangan nilai jatuhtempo pinjaman; dan
        f) Pengurangan jumlah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan.

2) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang berdasarkan kreditur;
3) Biaya pinjaman:
   a) Perlakuan biaya pinjaman;
   b) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan; dan
   c) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan.

f. Utang pemerintah harus diungkapkan secara rinci dalam bentuk daftar skedul utang untuk memberikan informasi yang lebih baik kepada pemakainya.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan setiap rekening dalam laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan serta mengacu pada Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Di dalam Kebijakan Akuntansi ini memuat Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, Kebijakan Akuntansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dan Kebijakan Akuntansi untuk setiap akun dalam Laporan Keuangan.

Bagan akun standar mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Kemudian untuk pengukuran nilai persediaan menggunakan metode perpetual. Pencatatan dengan metode ini dilakukan secara aktual, yaitu setiap persediaan yang masuk dan keluar langsung dicatat, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Harga pokok dari barang-barang yang pertama kali dibeli akan menjadi harga barang yang

digunakan/dijual pertama kali, sehingga nilai persediaan akhir dihitung dimulai dari harga pembelian terakhir.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun Anggaran (TA) 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, pada Lampiran 1.01. Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan menyatakan bahwa Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Kerangka tersebut di atas dapat dimaknai bahwa Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan/menyajikan/menyediakan hal-hal sebagai berikut:

1. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
2. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan dan ekonomi makro;
3. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
4. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
5. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan;
6. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan; dan
7. Menyediakan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Memenuhi ketentuan dimaksud, maka Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 memberikan gambaran ringkas pencapaian kebijakan keuangan dan target kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2025. Selain itu, dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat juga memedomani Peraturan Pemerintah

Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang disinkronkan dengan berbagai ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah sehingga menjadi satu kesatuan (*omnibus regulation*) dan pedoman pokok bagi pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan. Berdasarkan hal tersebut, berikut kami ungkapkan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

5.1. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos LRA

5.1.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi APBD

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan. Semua pendapatan, belanja, dan pembiayaan dianggarkan dan dicatat berdasarkan asas bruto. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan yang dicatat berdasarkan basis kas. Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran TA 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.1
Ikhtisar Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN DAERAH	**3.443.659.170.878,00**	**3.394.853.479.480,00**	**98,58**	**3.410.490.980.435,97**	**(15.637.500.955,97)**	**(0,46)**
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.011.631.723.145,00	981.483.458.987,00	97,02	799.932.118.378,97	181.551.340.608,03	22,70
PENDAPATAN TRANSFER	2.432.027.447.733,00	2.413.370.020.493,00	99,23	2.610.558.862.057,00	(197.188.841.564,00)	(7,55)
BELANJA DAERAH	**3.521.890.135.318,00**	**3.267.407.817.371,00**	**92,77**	**3.259.188.525.434,00**	**8.219.291.937,00**	**0,25**
BELANJA OPERASI	2.635.474.825.626,33	2.475.804.994.111,00	93,94	2.406.129.792.315,70	69.675.201.795,30	2,90
BELANJA MODAL	328.656.247.026,67	301.416.412.683,00	91,71	401.734.675.346,30	(100.318.262.663,30)	(24,97)
BELANJA TIDAK TERDUGA	42.993.129.198,00	0,00	0,00	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)
BELANJA TRANSFER	514.765.933.467,00	490.186.410.577,00	95,23	447.574.839.818,00	42.611.570.759,00	9,52
SURPLUS/(DEFISIT)	**(78.230.964.440,00)**	**127.445.662.109,00**	**(162,91)**	**151.302.455.001,97**	**(23.856.792.892,97)**	**(15,77)**
PEMBIAYAAN DAERAH	**78.230.964.440,00**	**78.230.964.440,00**	**100,00**	**(73.071.490.561,97)**	**151.302.455.001,97**	**(207,06)**
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	78.230.964.440,00	78.230.964.440,00	100,00	26.071.448.838,03	52.159.515.601,97	200,06
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	0,00	0,00	0,00	99.142.939.400,00	(99.142.939.400,00)	(100,00)
PEMBIAYAAN NETTO	**0,00**	**78.230.964.440,00**	**0,00**	**(73.071.490.561,97)**	**151.302.455.001,97**	**(207,06)**
SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN (SILPA)	**0,00**	**205.676.626.549,00**	**0,00**	**78.230.964.440,00**	**127.445.662.109,00**	**162,91**

5.1.2. Penjelasan Per Pos Laporan Realisasi APBD

5.1.2.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu:
   a. Hasil Pajak Daerah;
   b. Hasil Retribusi Daerah;
   c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan
   d. Lain-lain PAD yang Sah.
2. Pendapatan Transfer, yaitu:
   a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat; dan
   b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.
3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, yaitu:
   a. Pendapatan Hibah; dan
   b. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran TA 2025, diperoleh realisasi total Penerimaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp3.394.853.479.480,00 atau mencapai 98,58% dari anggaran Pendapatan Daerah yang telah ditetapkan sebesar Rp3.443.659.170.878,00. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp981.483.458.987,00, Pendapatan Transfer sebesar Rp2.413.370.020.493,00, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp0,00 untuk lebih jelasnya total Penerimaan Pendapatan Daerah untuk periode dimaksud terdiri dari:

5.1.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LRA

Realisasi PAD Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 sebesar Rp981.483.458.987,00 atau mencapai 97,02% dari anggaran Pendapatan Asli Daerah pada TA 2025 yang telah ditetapkan sebesar Rp1.011.631.723.145,00. Penerimaan PAD TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp181.551.340.608,03 atau 22,70 % jika dibandingkan dengan realisasi PAD TA 2024 dengan rincian:

Tabel 5.2
Rincian Realisasi PAD Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	1	2	3
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	**1.011.631.723.145,00**	**981.483.458.987,00**	**97,02**	**799.932.118.378,97**	**181.551.340.608,03**	**22,70**
Pajak Daerah	771.086.897.175,00	743.748.765.926,00	96,45	590.254.784.373,00	153.493.981.553,00	26,00
Retribusi Daerah	224.648.918.659,00	218.559.812.666,00	97,29	196.467.981.967,00	22.091.830.699,00	11,24
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.253.070.525,00	1.256.835.358,00	100,30	1.306.239.012,00	(49.403.654,00)	(3,78)
Lain-lain PAD yang Sah	14.642.836.786,00	17.918.045.037,00	122,37	11.903.113.026,97	.6.014.932.010,03	50,53

Berdasarkan data tersebut di atas terjadi kenaikan pada semua komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) terkecuali Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan.

Berdasarkan data tersebut di atas, tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah disebabkan karena ada beberapa objek pendapatan yang realisasinya tidak mencapai target yang ditetapkan seperti Pendapatan Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

5.1.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp743.748.765.926,00 atau 96,45% dari target penerimaan Pajak Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp771.086.897.175,00. Penerimaan Pajak Daerah TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp153.493.981.553,00 atau 26,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Daerah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3
Rincian Realisasi Pajak Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Daerah	**771.086.897.175,00**	**743.748.765.926,00**	**96,45**	**590.254.784.373,00**	**153.493.981.553,00**	**26,00**
Pajak Hotel	0,00	0,00	0,00	33.817.742.351,00	(33.817.742.351,00)	(100,00)
Pajak Restoran	0,00	0,00	0,00	66.160.630.903,00	(66.160.630.903,00)	(100,00)
Pajak Hiburan	0,00	0,00	0,00	15.044.356.033,00	(15.044.356.033,00)	(100,00)
Pajak Reklame	5.000.000.000,00	5.209.151.364,00	104,18	4.915.273.173,00	293.878.191,00	5,98
Pajak Penerangan Jalan	0,00	0,00	0,00	78.154.354.611,00	(78.154.354.611,00)	(100,00)
Pajak Parkir	0,00	0,00	0,00	1.348.930.067,00	(1.348.930.067,00)	(100,00)

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		(Rp)	%
1	2	3	4	5	6	7
Pajak Air Tanah	42.000.000.000,00	36.175.711.231,00	86,13	39.560.139.537,00	(3.384.428.306,00)	(8,56)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.800.000.000,00	3.073.434.937,00	109,76	2.054.143.562,00	1.019.291.375,00	49,62
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	122.000.000.000,00	127.585.540.798,00	104,57	123.355.414.772,00	4.230.126.026,00	3,43
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	204.500.000.000,00	209.774.231.505,00	102,57	224.459.477.510,00	(14.685.246.005,00)	(6,54)
Pajak barang dan Jasa tertentu (PBJT)	204.700.000.000,00	199.269.403.791,00	97,34	1.384.321.854,00	197.885.081.937,00	14.294,73
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	124.634.149.900,00	107.574.612.400,00	86,31	0,00	107.574.612.400,00	100,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	65.452.747.275,00	55.086.679.900,00	84,16	0,00	55.086.679.900,00	100,00

Berdasarkan sepuluh objek pajak daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, seluruh penerimaan objek pajak TA 2025 mengalami kenaikan dan penurunan penerimaan dibandingkan dengan penerimaan TA 2024 dengan uraian sebagai berikut:

1) Pajak Hotel

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Sedangkan yang dimaksud dengan hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari sepuluh.

Pajak Hotel TA 2025 dialokasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Perhotelan, sehingga realisasi penerimaan Pajak Hotel Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target penerimaan Pajak Hotel yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pajak Hotel TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp33.817.742.351,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Hotel TA 2024 yaitu sebesar Rp33.817.742.351,00.

2) Pajak Restoran

Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/*catering*. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran.

Pajak Restoran TA 2025 dialokasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Makanan dan/atau Minuman, sehingga realisasi penerimaan Pajak Restoran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target penerimaan Pajak Restoran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pajak Restoran TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp66.160.630.903,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran TA 2024 yaitu sebesar Rp66.160.630.903,00.

3) Pajak Hiburan

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran. Pajak Hiburan dipungut pajak atas penyelenggaraan Hiburan.

Pajak Hiburan TA 2025 dialokasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Hiburan, sehingga realisasi penerimaan Pajak Hiburan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target penerimaan Pajak Hiburan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pajak Hiburan TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp15.044.356.033,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Restoran TA 2024 yaitu sebesar Rp15.044.356.033,00.

4) Pajak Reklame

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.

Realisasi penerimaan Pajak Reklame Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp5.209.151.364,00 atau 104,18% dari target penerimaan Pajak Reklame yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.000.000.000,00 dengan demikian realisasi Pajak reklame melebihi target sebesar Rp209.151.364 atau 4,18%.

Penerimaan Pajak Reklame TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp293.878.191,00 atau 5,98% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Reklame TA 2024.

5) Pajak Penerangan Jalan

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Pajak penerangan jalan dipungut pajak atas setiap penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain.

Pajak Penerangan Jalan TA 2025 dialokasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Tenaga Listrik, sehingga realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target penerimaan Pajak Penerangan Jalan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp78.154.354.611,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Penerangan Jalan TA 2024.

6) Pajak Parkir

Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan, berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

Pajak Parkir Tahun 2025 dialokasikan ke Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) Jasa Parkir, sehingga realisasi penerimaan Pajak Parkir Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari target penerimaan Pajak Parkir yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00.

Penerimaan Pajak Parkir TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp1.348.930.067,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Parkir TA 2024.

7) Pajak Air Tanah

Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.

Realisasi Penerimaan Pajak Air Tanah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp36.175.711.231,00 atau 86,13% dari target penerimaan Pajak Air Tanah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp42.000.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Air Tanah tidak mencapai target sebesar Rp5.824.288.769,00 atau 13,87%.

Penerimaan Pajak Air Tanah TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.384.428.306,00 atau 8,56% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Air Tanah TA 2024.

8) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara.

Realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp3.073.434.937,00 atau 109,76% dari target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.800.000.000,00, dengan demikian realisasi Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan melebihi target sebesar Rp273.434.937,00 atau 9,76%.

Penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.019.291.375,00 atau 49,62% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan TA 2024.

9) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)

PBB-P2 adalah pajak atas Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yaitu Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Realisasi penerimaan PBB-P2 Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp127.585.540.798,00 atau 104,57% dari target penerimaan PBB-P2 yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp122.000.000.000,00 dengan demikian realisasi penerimaan PBB-P2 melebihi target sebesar Rp5.585.540.798,00 atau 4,57%.

Penerimaan PBB-P2 TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp4.230.126.026,00. atau 3,43% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan PBB-P2 TA 2024.

10) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

BPHTB pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Badan.

Realisasi penerimaan BPHTB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp209.774.231.505,00 atau 102,57% dari target penerimaan BPHTB yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp204.500.000.000,00 dengan demikian realisasi BPHTB melebihi target sebesar Rp5.274.231.505,00 atau 2,57%.

Penerimaan BPHTB TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp14.685.246.005,00 atau 6,54% jika dibandingkan dengan realisasi penerimaan BPHTB TA 2024.

11) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)

Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu, terdiri atas:

1. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran;
2. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit Tenaga Listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik;
3. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya;
4. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor; dan

5. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.

PBJT tersebut dipungut berdasarkan Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu per tanggal 03 Oktober 2024.

Realisasi penerimaan PBJT Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp199.269.403.791,00 atau 97,34% dari target penerimaan PBJT yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp204.500.000.000,00 dengan demikian pendapatan PBJT TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp197.885.081.937,00 atau 14.294,73% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan PBJT TA 2024.

12) Opsen Pajak Kendaran Bermotor (PKB)

Realisasi Penerimaan PKB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp107.574.612.400,00 atau 86,31% dari target penerimaan PKB yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp124.634.149.900,00 dengan demikian, penerimaan PKB TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp107.574.612.400,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan PKB TA 2024.

13) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

Realisasi penerimaan BBNKB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp55.086.679.900,00 atau 84,16% dari target pendapatan BBNKB yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp65.452.747.275,00 dengan demikian, pendapatan BBNKB TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp55.086.679.900,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan BBNKB TA 2024.

Informasi lebih lanjut mengenai rincian pendapatan Pajak Daerah per sub rincian objek untuk TA 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 1d** sebagai bagian dari CaLK.

5.1.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp218.559.812.666,00 atau 97,29% dari target penerimaan Retribusi Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp224.648.918.659,00. Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.091.830.699,00 atau

11,24% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Retribusi Daerah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4
Rincian Realisasi Retribusi Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Retribusi Daerah	**224.648.918.659,00**	**218.559.812.666,00**	**97,29**	**196.467.981.967,00**	**22.091.830.699,00**	**11,24**
Retribusi Jasa Umum	213.515.125.359,00	205.433.658.855,00	96,21	185.590.633.228,00	19.843.025.627,00	10,69
Retribusi Jasa Usaha	633.793.300,00	470.434.925,00	74,22	670.272.437,00	(199.837.512,00)	(29,81)
Retribusi Perizinan Tertentu	10.500.000.000,00	12.655.718.886,00	120,53	10.207.076.302,00	2.448.642.584,00	23,99

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha dan perizinan tertentu.

Penjelasan lebih lanjut mengenai rincian realisasi per jenis pelayanan Retribusi Daerah TA 2025 adalah sebagai berikut:

1. Retribusi Jasa Umum

   Subyek Retribusi Jasa Umum adalah retribusi yang dikenakan pada orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum. Adapun objeknya adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. TA 2025 Pendapatan BLUD dialihkan dari Lain-lain PAD yang Sah ke Retribusi Jasa Umum sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

   Realisasi Retribusi Jasa Umum sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp205.433.658.855,00 atau 96,21% dari target sebesar Rp213.515.125.359,00, dengan demikian realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum melebihi realisasi tahun 2024 sebesar Rp19.843.025.627,00 atau 10,69% apabila realisasi Retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Umum TA 2024 yang jumlahnya tercatat Rp185.590.633.228,00. Berikut disajikan rincian realisasi pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.5

Rincian Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Retribusi Jasa Umum	**213.515.125.359,00**	**205.433.658.855,00**	**96,21**	**185.590.633.228,00**	**19.843.025.627,00**	**10,69**
Retribusi Pelayanan Kesehatan	208.131.984.759,00	202.354.820.584,00	97,22	182.042.372.364,00	20.312.448.220,00	11,16
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	4.200.000.000,00	2.040.318.975,00	48,57	2.617.423.200,00	(577.104.225,00)	(22,05)
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	800.000.000,00	694.267.296,00	86,78	553.225.664,00	141.041.632,00	25,49
Retribusi Pelayanan Pasar	383.140.600,00	344.252.000,00	89,85	377.612.000,00	(33.360.000,00)	(8,83)

a) Retribusi Pelayanan Kesehatan

Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan jenis pelayanan kesehatan hewan pada Dinas Perikanan dan Peternakan dan pelayanan kesehatan BLUD pada Dinas Kesehatan.

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp208.131.984.759,00 terealisasi sebesar Rp202.354.820.584,00 atau sebesar 97,22%, terjadi kenaikan yang signifikan sebesar Rp20.312.448.220,00 atau 11,16% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang mencapai Rp182.042.372.364,00.

b) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan merupakan retribusi atas pelayanan kebersihan lingkungan yang diukur berdasarkan luas bangunan, volume sampah, dan jangka waktu pelayanan meliputi pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara, pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah, dan penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah dengan memperhatikan biaya pengumpulan sampah, biaya pengangkutan sampah, biaya penampungan sampah, biaya pemusnahan/pengolahan sampah, biaya penyediaan lokasi tempat pembuangan akhir, biaya operasional dan perawatan, kemampuan masyarakat serta aspek keadilan. Pengelolaan atas retribusi ini dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup.

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp4.200.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.040.318.975,00 atau 48,57% terjadi penurunan sebesar Rp577.104.225,00 atau 22,05% dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang mencapai sebesar Rp2.617.423.200,00.

c) Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp800.000.000,00 terealisasi sebesar Rp694.267.296,00 atau 86,78%, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan sebesar Rp141.041.632,00 atau 25,49% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp553.225.664,00.

d) Retribusi Pelayanan Pasar

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp383.140.600,00 terealisasi sebesar Rp344.252.000,00 atau 89,85%, terjadi penurunan sebesar Rp33.360.000,00 atau 8,83% dibandingkan realisasi TA 2024 sebesar Rp377.612.000,00.

2. Retribusi Jasa Usaha

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha, sedangkan yang menjadi objeknya adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial meliputi pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

Retribusi Jasa Usaha TA 2025 ditetapkan sebesar Rp633.793.300,00 dalam anggaran perubahan, Realisasi sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp470.434.925,00 atau 74,22%. Apabila realisasi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Jasa Usaha pada TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp670.272.437,00. terlihat realisasi retribusi ini di TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp199.837.512,00 atau 29,81%,

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Usaha TA 2025 antara lain sebagai berikut:

Tabel 5.6

Rincian Realisasi Retribusi Jasa Usaha Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Retribusi Jasa Usaha	**633.793.300,00**	**470.434.925,00**	**74,22**	**670.272.437,00**	**(199.837.512,00)**	**(29,81)**
Retribusi Pemakaian	70.000.000,00	46.250.000,00	66,07	70.250.000,00	(24.000.000,00)	(34,16)

Uraian	TA 2025			Realisasi TA2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Kekayaan Daerah						
Retribusi Pasar Grosir dan,atau Pertokoan	131.793.300,00	108.808.925,00	82,56	144.370.437,00	(35.561.512,00)	(24,63)
Retribusi Rumah Potong Hewan	240.000.000,00	172.275.000,00	71,78	337.535.000,00	(165.260.000,00)	(48,96)
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	132.000.000,00	77 271 000,00	58,53	55 567 000,00	21 704 000,00	39,06
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	60.000.000,00	65.830.000,00	109,71	62.550.000,00	3.280.000,00	5,24

a) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagaimana dimaksud adalah pemakaian kekayaan daerah.

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp70,000,000.00 terealisasi sebesar Rp46.250.000,00 atau sebesar 66,07%, Dibandingkan dengan TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp24.000.000,00 atau 34,16%.

b) Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp131.793.300,00 terealisasi sebesar Rp108.808.925,00 atau sebesar 82,56%. Dibandingkan dengan TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp35.561.512,00 atau 24,63%.

c) Retribusi Rumah Potong Hewan

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp240.000.000,00 terealisasi sebesar Rp172.275.000,00 atau sebesar 71,78%. Dibandingkan dengan TA 2024 terjadi penurunan sebesar Rp165.260.000,00 atau 48,96%.

d) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp132.000.000,00 terealisasi sebesar Rp77.271.000,00 atau sebesar 58,53%. Dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp21.704.000,00 atau 39,06%.

e) Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp60.000.000,00 terealisasi sebesar Rp65.830.000,00 atau sebesar 109,71%. Dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp3.280.000,00 atau 5,24%.

3. Retribusi Perizinan Tertentu

Subjek Retribusi Perizinan Tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari Pemerintah Daerah. Sedangkan objeknya adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Retribusi Perizinan Tertentu TA 2025 ditargetkan sebesar Rp10.500.000.000,00 dalam anggaran perubahan, Realisasi sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp12.655.718.886,00 atau 120,53%. Apabila realisasi retribusi tersebut dibandingkan dengan realisasi Retribusi Perizinan Tertentu TA 2024 yang tercatat sebesar Rp10.207.076.302,00 maka realisasi retribusi di TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.448.642.584,00 atau 23,99%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi penerimaan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu TA 2025 dijelaskan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.7

Rincian Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Retribusi Perizinan Tertentu	**10.500.000.000,00**	**12.655.718.886,00**	**120,53**	**10.207.076.302,00**	**2.448.642.584,00**	**23,99**
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	8.000.000.000,00	10.566.344.886,00	132,07	8.608.020.802,00	1.958.324.084,00	22,75
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)	2.500.000.000,00	2.089.374.000,00	83,57	1.599.055.500,00	490.318.500,00	30,66

a) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp8.000.000.000,00 terealisasi sebesar Rp10.566.344.886,00 atau 132,07%, dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp1.958.324.084,00 atau 22,75%.

b) Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA).

Dari target yang ditetapkan pada TA 2025 sebesar Rp2.500.000.000,00 terealisasi sebesar Rp2.089.374.000,00 atau 83,57%, dibandingkan dengan TA 2024 terjadi kenaikan sebesar Rp490.318.500,00 atau 30,66 %.

5.1.2.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp1.256.835.358,00 atau 100,30% dari target penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.253.070.525,00, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp49.403.654,00 atau 3,78% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.8
Rincian Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	**1.253.070.525,00**	**1.256.835.358,00**	**100,30**	**1.306.239.012,00**	**(49.403.654,00)**	**(3,78)**
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	1.253.070.525,00	1.077.835.358,00	86,01	1.201.739.012,00	(123.903.654,00)	(10,31)
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen)	0,00	179.000.000,00	0,00	104.500.000,00	74.500.000,00	71,29

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)						

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Berdasarkan hasil RUPS Tahunan Tahun Buku 2024 yang telah diselenggarakan pada tanggal 16 April 2025, menetapkan jumlah saham yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat di Bank BJB adalah sebesar 12.643.230 lembar saham, sehingga dividen tunai yang akan diterima adalah sebesar Rp1.077.835.358,00. Bank BJB telah mentransfer pembayaran dividen tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah pada tanggal 16 Mei 2025.

Pada TA 2025, Perumda Wibawa Mukti melakukan pembayaran dividen kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebesar Rp179.000.000,00.

5.1.2.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp17.918.045.037,00 atau 122,36% dari target penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp14.642.836.786,00 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah yang Dipisahkan TA 2025 tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp6.014.932.010,03 atau 50,53% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.9
Rincian Realisasi Lain-lain PAD yang sah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+,(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Lain-lain PAD yang Sah	14.642.836.786,00	17.918.045.037,00	122,36	11.903.113.026,97	6.014.932.010,03	50,53

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+,(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	179.641.500,00	0,00	0,00	179.641.500,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	5.942.836.786,00	3.350.170.374,00	56,37	3.913.569.826,00	(563.399.452,00)	(14,40)
Jasa Giro	5.000.000.000,00	8.370.515.040,00	167,41	3.238.048.161,97	5.132.466.878,03	158,50
Pendapatan Bunga	1.200.000.000,00	22.525.802,00	1,87	333.254.941,00	(310.729.139,00)	(93,24)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	0,00	128.604.000,00	0,00	63.624.735,00	64.979.265,00	102,13
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	0,00	114.935.783,00	0,00	23.309.235,00	91.626.548,00	393,09
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	145.180.879,00	0,00	276.385.250,00	(131.204.371,00)	(47,47)
Pendapatan Denda Pajak Daerah	2.500.000.000,00	1.620.191.257,00	64,80	2.617.359.016,00	(997.167.759,00)	(38,10)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	10.803.811,00	0,00	6.000.000,00	4.803.811,00	80,06
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	3.975.476.591,00	0	1.431.561.862,00	2.543.914.729,00	177,70

Informasi lebih lanjut mengenai rincian pendapatan Lain-lain PAD yang Sah untuk TA 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 1e** sebagai bagian dari CaLK.

5.1.2.1.2. Pendapatan Transfer - LRA

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2025 adalah sebesar Rp2.413.370.020.493,00 atau 99,23% dari target penerimaan Pendapatan Transfer yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.432.027.447.733,00

Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp197.188.841.564,00 atau 7,55% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.10
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
PENDAPATAN TRANSFER	**2.432.027.447.733,00**	**2.413.370.020.493,00**	**99,23**	**2.610.558.862.057,00**	**(197.188.841.564,00)**	**(7,55)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.204.854.414.000,00	2.193.985.867.415,00	99,51	2.222.223.055.903,00	(28.237.188.488,00)	(1,27)
Pendapatan Transfer Antar Daerah	227.173.033.733,00	219.384.153.078,00	96,57	388.335.806.154,00	(168.951.653.076,00)	(43,51)

5.1.2.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp2.193.985.867.415,00 atau 99,51% dari target penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.204.854.414.000,00. Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.237.188.488,00 atau 1,27% jika dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	**2.204.854.414.000,00**	**2.193.985.867.415,00**	**99,51**	**2.222.223.055.903,00**	**(28.237.188.488,00)**	**(1,27)**
Dana Perimbangan	0,00	0,00	0,00	1.975.238.434.053,00	(1.975.238.434.053,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)	105.826.344.000,00	110.897.808.500,00	104,79	0,00	110.897.808.500,00	100,00
Dana Alokasi Umum (DAU)	1.301.427.209.000,00	1.301.028.239.493,00	99,96	0,00	1.301.028.239.493,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)	544.378.222.000,00	539.491.505.002,00	99,10	0,00	539.491.505.002,00	100,00
Dana Desa	245.021.177.000,00	234.366.852.420,00	95,65	246.984.621.850,00	(12.617.769.430,00)	(5,11)
Insentif Fiskal	8.201.462.000,00	8.201.462.000,00	100,00	0,00	8.201.462.000,00	100,00

1. Dana Perimbangan

   Realisasi dana perimbangan TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp0,00. Realisasi dana perimbangan tersebut mengalami penurunan sebesar

Rp1.975.238.434.053,00 atau 100,00% dari realisasi penerimaan dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp1.975.238.434.053,00.

2. Dana Bagi Hasil (DBH)

   Realisasi Dana Bagi Hasil TA 2025 adalah sebesar Rp110.897.808.500,00 atau 99,96% dari anggaran sebesar Rp105.826.344.000,00. Realisasi Dana Bagi Hasil tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp110.897.808.500,00 atau 100,00% dari realisasi penerimaan dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp0,00.

3. Dana Alokasi Umum (DAU)

   Realisasi Dana Alokasi Umum TA 2025 adalah sebesar Rp1.301.028.239.493,00 atau 104,79% dari anggaran sebesar Rp1.301.427.209.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.301.028.239.493,00 atau 100,00% dari realisasi penerimaan dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp0,00.

4. Dana Alokasi Khusus (DAK)

   Realisasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 adalah sebesar Rp539.491.505.002,00 atau 99,10% dari anggaran sebesar Rp544.378.222.000,00. Realisasi Dana Alokasi Umum tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp539.491.505.002,00 atau 100,00% dari realisasi penerimaan dana perimbangan TA 2024 sebesar Rp0,00.

5. Dana Desa

   Realisasi Dana Desa TA 2025 adalah sebesar Rp234.366.852.420,00 atau 95,65% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp245.021.177.000,00. Realisasi Dana Desa tersebut mengalami penurunan sebesar Rp12.617.769.430,00 atau 5,11% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp246.984.621.850,00. Adapun dana tersebut telah disalurkan seluruhnya ke masing-masing rekening penerima seluruh pemerintah desa yang berjumlah 165 desa. Mekanisme penyaluran dana desa bersifat langsung dari rekening kas negara ke masing-masing rekening desa tanpa melalui rekening kas daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

6. Insentif Fiskal

   Realisasi untuk penerimaan Insentif Fiskal TA 2025 adalah sebesar Rp8.201.462.000,00 atau 100,00% dari anggaran setelah perubahan yang ditetapkan sebesar Rp8.201.462.000,00. Insentif fiskal TA 2024 tidak terdapat realisasi, sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp8.201.462.000,00 atau 100,00%.

5.1.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp219.384.153.078,00 atau 96,57% dari target penerimaan

Transfer Antar Daerah yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp227.173.033.733,00. Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp168.951.653.076,00 atau 43,51% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah TA 2024 sebesar Rp388.335.806.154,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.12
Rincian Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Transfer Antar Daerah	**227.173.033.733,00**	**219.384.153.078,00**	**96,57**	**388.335.806.154,00**	**(168.951.653.076,00)**	**(43,51)**
Pendapatan Bagi Hasil	207.516.033.733,00	202.681.629.872,00	97,67	297.088.000.558,00	(94.406.370.686,00)	(31,78)
Bantuan Keuangan	19.657.000.000,00	16.702.523.206,00	84,96	91.247.805.596,00	(74.545.282.390,00)	(81,70)

1. Pendapatan Bagi Hasil

Realisasi bagi hasil TA 2025 adalah sebesar Rp202.681.629.872,00 atau 97,67% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp207.516.033.733,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp94.406.370.686,00 atau 31,78% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp297.088.000.558,00.

Pendapatan Bagi hasil merupakan pendapatan bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

Tabel 5.13
Rincian Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Pendapatan Bagi Hasil	**207.516.033.733,00**	**202.681.629.872,00**	**97,67**	**297.088.000.558,00**	**(94.406.370.686,00)**	**(31,78)**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	207.516.033.733,00	202.681.629.872,00	97,67	297.088.000.558,00	(94.406.370.686,00)	(31,78)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	4.162.898.820,00	11.145.638.519,00	267,73	83.116.471.170,00	(71.970.832.651,00)	(86,59)
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	4.020.369.450,00	4.020.369.450,00	100,00	51.576.082.950,00	(47.555.713.500,00)	(92,20)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar	86.312.075.615,00	78.096.263.395,00	90,48	61.908.610.642,00	16.187.652.753,00	26,15

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Kendaraan Bermotor						
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	4.009.614.507,00	3.972.804.356,00	99,08	3.229.143.200,00	743.661.156,00	23,03
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	109.011.075.341,00	105.446.554.152,00	96,73	97.257.692.596,00	8.188.861.556,00	8,42

2. Bantuan Keuangan

Realisasi bantuan keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp16.702.523.206,00 atau 84,96% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp19.657.000.000,00. Realisasi penerimaan tersebut mengalami penurunan sebesar Rp74.545.282.390,00 atau 81,70% dibandingkan penerimaan TA 2024 sebesar Rp91.247.805.596,00.

Pendapatan bantuan keuangan terdiri dari pendapatan bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan bantuan keuangan umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota. Rincian mengenai pendapatan bantuan keuangan dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 5.14

Rincian Realisasi Pendapatan Bantuan Keuangan TA 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Bantuan Keuangan	**19.657.000.000,00**	**16.702.523.206,00**	**84,96**	**91.247.805.596,00**	**(74.545.282.390,00)**	**(81,70)**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	12.907.000.000,00	11.907.000.000,00	92,25	85.964.339.906,00	(74.057.339.906,00)	(86,15)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	6.750.000.000,00	4.795.523.206,00	71,04	5.283.465.690,00	(487.942.484,00)	(9,24

a) Bantuan keuangan khusus dari Pemerintah Provinsi merupakan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 serta Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 34 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025. Rincian anggaran dan realisasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.15
Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2025

No	Nama Kegiatan	Realisasi dari RKUD Provinsi 2025 (Rp)	Perangkat Daerah Penanggungjawab
1	2	3	4
1	Jaminan Kesehatan Bagi PBPU dan BP yang Didaftarkan oleh Pemerintah Daerah	11.907.000.000,00	Dinas Kesehatan
JUMLAH		**11.907.000.000,00**	

b) Bantuan keuangan umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota merupakan penerimaan dari Kompensasi Dampak Negatif Persampahan penggunaan TPA Sarimukti dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.16
Data Realisasi Penerimaan Bantuan Keuangan Kab/Kota Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Kab/Kota	Kewajiban 2025 (Rp)	Pembayaran		Total Pembayaran 2025 (Rp)
			2024 (Rp)	2025 (Rp)	
1	Kota Cimahi	469.110.525,00	37.745.970,00	430.317.795,00	468.063.765,00
2	Kota Bandung	3.400.994.446,00	255.650.880,00	3.133.619.236,00	3.389.270.116,00
3	Kab. Bandung	1.017.048.705,00	92.759.250,00	845.430.075,00	938.189.325,00
	Jumlah	**4.887.153.676,00**	**386.156.100,00**	**4.409.367.106,00**	**4.795.523.206,00**

5.1.2.2. Belanja Daerah

Belanja Daerah dan Transfer meliputi semua pengeluaran daerah dari rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas dan mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Termasuk dalam Belanja Daerah adalah Belanja Operasional BLUD/BOS yang dikeluarkan dari rekening kas BLUD/BOS yang bersumber dari Pendapatan Operasional BLUD/BOS. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya (*performance-based budgeting*), yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Belanja Daerah dan Transfer yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dijabarkan menurut klasifikasi ekonomi sesuai penyajian pada Laporan Realisasi Anggaran, sedangkan penyajian Belanja Daerah sesuai dokumen APBD adalah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah Nomor 90 Tahun 2019 dan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dijabarkan menurut kodefikasi, klasifikasi yang telah ditetapkan.

Pengeluaran Belanja Daerah diklasifikasikan berdasarkan Jenis Belanja sebagai berikut:

1. Belanja operasi, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi antara lain meliputi:
   a. Belanja Pegawai;
   b. Belanja Barang dan Jasa;
   c. Belanja Bunga;
   d. Hibah; dan
   e. Bantuan Sosial.
2. Belanja modal, yaitu pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain:
   a. Belanja Modal Pengadaan Tanah;
   b. Belanja Modal Pengadaan Peralatan dan Mesin;
   c. Belanja Modal Pengadaan Gedung dan Bangunan;
   d. Belanja Modal Pengadaan Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
   e. Belanja Modal Pengadaan Aset Tetap Lainnya; dan
   f. Belanja Modal Pengadaan Aset Lainnya (Aset Tak Berwujud).
3. Belanja tidak terduga, yaitu pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah pusat/daerah.
4. Transfer, yaitu penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

Berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk TA 2025, total realisasi Belanja Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah sebesar Rp3.267.407.817.371,00 atau mencapai 92,77% dari total anggaran Belanja Daerah yang telah ditetapkan setelah APBD Perubahan sebesar Rp3.521.890.135.318,00. Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.219.291.937,00 atau 0,25% dibandingkan total realisasi

anggaran Belanja Daerah TA 2024. Rincian anggaran dan realisasi Belanja dan Transfer dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.17
Rincian Belanja Daerah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA DAERAH	**3.521.890.135.318,00**	**3.267.407.817.371,00**	**92,77**	**3.259.188.525.434,00**	**8.219.291.937,00**	**0,25**
BELANJA OPERASI	2.635.474.825.626,33	2.475.804.994.111,00	93,94	2.406.129.792.315,70	69.675.201.795,30	2,90
BELANJA MODAL	328.656.247.026,67	301.416.412.683,00	91,71	401.734.675.346,30	(100.318.262.663,30)	(24,97)
BELANJA TIDAK TERDUGA	42.993.129.198,00	0,00	0,00	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)
BELANJA TRANSFER	514.765.933.467,00	490.186.410.577,00	95,23	447.574.839.818,00	42.611.570.759,00	9,52

5.1.2.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi adalah pengeluaran pemerintah daerah untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial.

Realisasi Belanja Operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp2.475.804.994.111,00 atau 93,94% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp2.635.474.825.626,33. Realisasi Belanja Operasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp69.675.201.795,30 atau 2,90% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Operasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18
Rincian Realisasi Belanja Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA OPERASI	**2.635.474.825.626,33**	**2.475.804.994.111,00**	**93,94**	**2.406.129.792.315,70**	**69.675.201.795,30**	**2,90**
Belanja Pegawai	1.377.097.770.000,60	1.293.542.540.191,00	93,93	1.243.654.808.162,00	49.887.732.029,00	4,01
Belanja Barang dan Jasa	1.182.427.995.625,73	1.106.680.765.952,00	93,59	1.032.553.814.067,70	74.126.951.884,30	7,18
Belanja Bunga	0,00	0,00	0,00	3.212.359.686,00	(3.212.359.686,00)	(100,00)
Belanja Hibah	70.294.060.000,00	69.926.687.968,00	99,48	123.753.810.400,00	(53.827.122.432,00)	(43,50)
Belanja Bantuan Sosial	5.655.000.000,00	5.655.000.000,00	100,00	2.955.000.000,00	2.700.000.000,00	91,37

5.1.2.2.1.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Realisasi Belanja Pegawai Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp1.293.542.540.191,00 atau 93,93% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.377.097.770.000,60. Realisasi Belanja Pegawai TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.887.732.029,00 atau 4,01% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.19
Rincian Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA PEGAWAI	**1.377.097.770.000,60**	**1.293.542.540.191,00**	**93,93**	**1.243.654.808.162,00**	**49.887.732.029,00**	**4,01**
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	634.133.750.813,60	598.364.502.169,00	94,35	625.465.572.999,00	(27.101.070.830,00)	(4,33)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	599.539.457.906,00	558.358.311.917,00	93,13	322.815.189.633,00	235.543.122.284,00	72,97
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	197.929.808.382,00	(197.929.808.382,00)	(100,00)
Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	51.209.689.540,00	50.867.179.470,00	99,33	50.325.113.474,00	542.065.996,00	1,08
Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	2.471.514.291,00	1.317.727.817,00	53,31	796.660.780,00	521.067.037,00	65,41
Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.823.120.000,00	1.821.152.568,00	99,89	1.493.119.992,00	328.032.576,00	21,97
Belanja Pegawai BLUD	87.920.237.450,00	82.813.666.250,00	94,19	44.829.342.902,00	37.984.323.348,00	84,73

5.1.2.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp1.106.680.765.952,00 atau 93,59% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.182.427.995.625,73. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp74.126.951.884,30 atau 7,18% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.20

Rincian Realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA BARANG DAN JASA	**1.182.427.995.625,73**	**1.106.680.765.952,00**	**93,59**	**1.032.553.814.067,70**	**74.126.951.884,30**	**7,18**
Belanja Barang	**211.732.638.139,33**	**199.500.569.013,00**	**94,22**	**185.209.993.761,70**	**14.290.575.251,30**	**7,72**
Belanja Barang Pakai Habis	211.446.809.989,33	199.215.873.028,00	94,21	184.586.545.961,70	14.629.327.066,30	7,93
Belanja Barang Tak Habis Pakai	285.828.150,00	284.695.985,00	99,60	623.447.800,00	(338.751.815,00)	(54,34)
Belanja Jasa	**511.276.776.060,40**	**472.858.540.266,00**	**92,48**	**374.081.300.023,00**	**98.777.240.243,00**	**26,41**
Belanja Jasa Kantor	209.634.097.214,00	187.399.209.510,26	89,39	168.123.266.716,00	19.275.942.794,26	11,47
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	157.878.306.523,00	153.514.115.897,00	97,23	94.006.180.748,00	59.507.935.149,00	63,30
Belanja Sewa Tanah	63.000.000,00	53.500.000,00	84,92	54.400.000,00	(900.000,00)	(1,65)
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	9.121.838.880,00	6.970.410.224,00	76,41	6.180.710.054,00	789.700.170,00	12,78
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	55.562.468.840,00	53.344.281.420,00	96,00	43.756.447.655,00	9.587.833.765,00	21,91
Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	235.050.000,00	234.100.000,00	99,59	513.524.000,00	(279.424.000,00)	(54,41)
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	21.295.091.791,40	18.524.326.942,00	86,98	18.414.224.490,00	110.102.452,00	0,60
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	14.021.276.467,00	12.860.727.326,74	91,72	9.085.994.487,00	3.774.732.839,74	41,54
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	43.350.737.185,00	39.853.247.756,00	91,93	33.920.550.873,00	5.932.696.883,00	17,49
Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00	26.001.000,00	(26.001.000,00)	(100,00)

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	114.909.160,00	104.621.190,00	91,04	0,00	104.621.190,00	100,00
Belanja Pemeliharaan	**32.681.307.790,00**	**30.363.826.382,00**	**92,90**	**60.922.581.381,00**	**(30.558.754.999,00)**	**(50,16)**
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	14.882.439.750,00	13.661.862.492,00	91,79	10.579.056.143,00	3.082.806.349,00	29,14
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	10.830.704.968,00	9.767.649.883,00	90,18	42.710.448.155,00	(32.942.798.272,00)	(77,13)
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.968.163.072,00	6.934.314.007,00	99,51	7.633.077.083,00	(698.763.076,00)	(9,15)
Belanja Perjalanan Dinas	**62.881.640.690,00**	**57.400.954.255,00**	**91,28**	**59.113.065.700,00**	**(1.712.111.445,00)**	**(2,90)**
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	62.818.640.690,00	57.337.954.255,00	91,27	59.113.065.700,00	(1.775.111.445,00)	(3,00)
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	0,00	63.000.000,00	100,00
Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	**30.226.624.600,00**	**28.854.577.443,00**	**95,46**	**39.187.743.600,00**	**(10.333.166.157,00)**	**(26,37)**
Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	10.346.875.000,00	9.141.452.800,00	88,34	19.884.875.000,00	(10.743.422.200,00)	(54,03)
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	19.879.749.600,00	19.713.124.643,00	99,16	19.302.868.600,00	410.256.043,00	2,13
Belanja Barang dan Jasa BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**165.991.909.691,00**	**(165.991.909.691,00)**	**(100,00)**
Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	0,00	0,00	165.991.909.691,00	(165.991.909.691,00)	(100,00)
Belanja Barang dan Jasa BOSP	**192.029.567.255,00**	**191.999.139.755,00**	**99,98**	**0,00**	**191.999.139.755,00**	**100,00**
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOS	160.378.877.255,00	160.373.696.555,00	99,99	0,00	160.373.696.555,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	21.506.640.000,00	21.497.331.000,00	99,95	0,00	21.497.331.000,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	10.144.050.000,00	10.128.112.200,00	99,84	0,00	10.128.112.200,00	100,00
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	**19.032.300.645,00**	**14.311.007.975,00**	**75,19**	**17.262.598.680,00**	**(2.951.590.705,00)**	**(17,10)**
Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas	19.032.300.645,00	14.311.007.975,00	75,19	17.262.598.680,00	(2.951.590.705,00)	(17,10)

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.567.140.446,00	111.392.150.863,00	90,88	130.784.621.231,00	(19.392.470.368,00)	(14,83)
Belanja Barang dan Jasa BLUD	122.567.140.446,00	111.392.150.863,00	90,88	130.784.621.231,00	(19.392.470.368,00)	(14,83)

5.1.2.2.1.3. Belanja Bunga

Realisasi Belanja Bunga Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp0,00 Realisasi Belanja Bunga TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.212.359.686,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bunga TA 2024, hal ini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sudah tidak mempunyai lagi pinjaman daerah dan sudah terlunasi di TA.2024, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.21
Rincian Realisasi Belanja Bunga Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Menengah	0,00	0,00	0,00	3.212.359.686,00	(3.212.359.686,00)	(100,00)

5.1.2.2.1.4. Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp69.926.687.968,00 atau 99,48% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp70.294.060.000,00. Realisasi Belanja Hibah TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp53.827.122.432,00 atau 43,50% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.22
Rincian Realisasi Belanja Hibah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA HIBAH	**70.294.060.000,00**	**69.926.687.968,00**	**99,48**	**123.753.810.400,00**	**(53.827.122.432,00)**	**(43,50)**
Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	29.065.000.000,00	28.740.000.000,00	98,88	59.595.185.426,00	(30.855.185.426,00)	(51,77)
Belanja Hibah Dana BOS	36.953.880.000,00	36.911.507.968,00	99,88	34.697.676.174,00	2.213.831.794,00	6,38
Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	4.275.180.000,00	4.275.180.000,00	100,00	1.425.060.000,00	2.850.120.000,00	200,00
Belanja Hibah Dana BOSP	0,00	0,00	0,00	28.035.888.800,00	(28.035.888.800,00)	(100,00)

5.1.2.2.1.5. Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp5.655.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp5.655.000.000,00. Realisasi Belanja Bantuan Sosial pada TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 91,37% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.23
Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA BANTUAN SOSIAL	**5.655.000.000,00**	**5.655.000.000,00**	**100,00**	**2.955.000.000,00**	**2.700.000.000,00**	**91,37**
Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	115.000.000,00	115.000.000,00	100,00	0,00	115.000.000,00	100,00

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	5.540.000.000,00	5.540.000.000,00	100,00	2.955.000.000,00	2.585.000.000,00	87,48

5.1.2.3. Belanja Modal

Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal merupakan pengeluaran pemerintah untuk memperoleh Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu tahun untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan: seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, serta Aset Tetap Lainnya.

Realisasi Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp301.416.412.683,00 atau 91,71% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp328.656.247.026,67. Realisasi Belanja Modal TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp100.318.262.663,30 atau 24,97% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.24
Rincian Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA MODAL	328.656.247.026,67	301.416.412.683,00	91,71	401.734.675.346,30	(100.318.262.663,30)	(24,97)
Belanja Modal Tanah	12.946.113.825,00	3.180.185.537,00	24,56	0,00	3.180.185.537,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.303.548.092,00	129.103.772.848,00	94,03	206.530.329.113,30	(77.426.556.265,30)	(37,49)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	74.099.889.035,67	66.613.132.281,00	90,17	57.500.309.714,00	9.312.822.567,00	16,20
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	79.770.264.700,00	78.032.212.447,00	97,82	123.152.366.703,00	(45.120.154.256,00)	(36,64)

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22.692.940.410,00	22.692.669.310,00	100,00	14.355.008.616,00	8.337.660.694,00	58,08
Belanja Modal Aset Lainnya	1.843.490.964,00	1.594.440.260,00	86,49	196.661.200,00	1.397.779.060,00	710,75

5.1.2.3.1. Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp3.180.185.537,00 atau 24,56% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp12.946.113.825,00. Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp3.180.185.537,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.25
Rincian Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Tanah	**12.946.113.825,00**	**3.180.185.537,00**	**24,56**	**0,00**	**3.180.185.537,00**	**100,00**
Belanja Modal Tanah Persil	12.946.113.825,00	3.180.185.537,00	24,56	0,00	3.180.185.537,00	100,00

5.1.2.3.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2025 adalah sebesar Rp129.103.772.848,00 atau 94,03% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp137.303.548.092,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp77.426.556.265,30 atau 37,49% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.26
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BEALNJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	**137.303.548.092,00**	**129.103.772.848,00**	**94,03**	**206.530.329.113,30**	**(77.426.556.265,30)**	**(37,49)**
Belanja Modal Alat Besar	**3.789.189.060,00**	**1.857.632.435,00**	**49,02**	**6.182.073.500,00**	**(4.324.441.065,00)**	**(69,95)**
Belanja Modal Alat Besar Darat	2.509.528.000,00	597.081.210,00	23,79	4.363.525.000,00	(3.766.443.790,00)	(86,32)
Belanja Modal Alat Bantu	1.279.661.060,00	1.260.551.225,00	98,50	1.818.548.500,00	(557.997.275,00)	(30,68)
Belanja Modal Alat Angkutan	**11.884.839.834,00**	**10.749.809.380,00**	**90,44**	**3.445.413.800,00**	**7.304.395.580,00**	**212,00**
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	11.403.893.634,00	10.273.730.380,00	90,08	3.119.649.000,00	7.154.081.380,00	229,32
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	480.946.200,00	476.079.000,00	98,98	325.764.800,00	150.314.200,00	46,14
Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	**306.510.962,00**	**295.169.112,00**	**96,29**	**469.844.600,00**	**(174.675.488,00)**	**(37,18)**
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	174.807.150,00	168.796.600,00	96,56	99.560.500,00	69.236.100,00	69,54
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	30.801.500,00	26.529.950,00	86,13	7.970.300,00	18.559.650,00	232,86
Belanja Modal Alat Ukur	100.902.312,00	99.842.562,00	98,94	362.313.800,00	(262.471.238,00)	(72,44)
Belanja Modal Alat Pertanian	**1.330.619.200,00**	**1.316.771.480,00**	**98,95**	**1.787.996.642,48**	**(471.225.162,48)**	**(26,35)**
Belanja Modal Alat Pengolahan	1.330.619.200,00	1.316.771.480,00	98,95	1.787.996.642,48	(471.225.162,48)	(26,35)
Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	**58.019.507.572,00**	**56.413.108.721,00**	**97,23**	**78.300.328.776,01**	**(21.887.220.055,01)**	**(27,95)**
Belanja Modal Alat Kantor	9.445.654.553,00	9.118.098.803,00	96,53	28.674.197.511,87	(19.556.098.708,87)	(68,20)
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	46.526.910.164,00	45.348.502.978,00	97,46	49.566.535.464,14	(4.218.032.486,14)	(8,51)
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	2.046.942.855,00	1.946.506.940,00	95,09	59.595.800,00	1.886.911.140,00	3.166,18
Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	**4.229.622.903,00**	**4.083.494.973,00**	**96,54**	**2.046.261.831,00**	**2.037.233.142,00**	**99,56**
Belanja Modal Alat Studio	2.139.278.099,00	2.102.920.854,00	98,30	1.289.191.000,00	813.729.854,00	63,12

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Alat Komunikasi	1.409.950.004,00	1.362.028.839,00	96,60	377.492.400,00	984.536.439,00	260,81
Belanja Modal Peralatan Pemancar	680.394.800,00	618.545.280,00	90,90	379.578.431,00	238.966.849,00	62,96
Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	**17.008.681.749,00**	**16.783.556.343,00**	**98,67**	**21.416.249.187,00**	**(4.632.692.844,00)**	**(21,63)**
Belanja Modal Alat Kedokteran	16.996.985.349,00	16.778.331.119,00	98,71	21.416.249.187,00	(4.637.918.068,00)	(21,66)
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	11.696.400,00	5.225.224,00	44,67	0,00	5.225.224,00	100,00
Belanja Modal Alat Laboratorium	**6.313.148.100,00**	**6.260.199.160,00**	**99,16**	**64.686.878.000,00**	**(58.426.678.840,00)**	**(90,32)**
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	911.731.000,00	875.046.439,00	95,97	1.718.072.000,00	(843.025.561,00)	(49,07)
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	5.401.417.100,00	5.385.152.721,00	99,69	62.968.806.000,00	(57.583.653.279,00)	(91,45)
Belanja Modal Komputer	**17.924.992.323,00**	**17.323.516.835,00**	**96,64**	**5.812.622.901,00**	**11.510.893.934,00**	**198,03**
Belanja Modal Komputer Unit	12.167.484.053,00	11.877.065.431,00	97,61	3.811.319.361,00	8.065.746.070,00	211,63
Belanja Modal Peralatan Komputer	5.757.508.270,00	5.446.451.404,00	94,59	2.001.303.540,00	3.445.147.864,00	172,15
Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	**192.463.000,00**	**191.999.999,00**	**99,75**	**169.664.763,00**	**22.335.236,00**	**13,16**
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	129.984.763,00	(129.984.763,00)	(100,00)
Belanja Modal Alat SAR	192.463.000,00	191.999.999,00	99,75	39.680.000,00	152.319.999,00	383,87
Belanja Modal Alat Peraga	**1.985.200,00**	**1.985.200,00**	**100,00**	**7.868.103.491,81**	**(7.866.118.291,81)**	**(99,97)**
Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan	1.985.200,00	1.985.200,00	100,00	7.868.103.491,81	(7.866.118.291,81)	(99,97)
Belanja Modal Rambu-Rambu	**474.322.000,00**	**402.707.200,00**	**84,90**	**676.854.250,00**	**(274.147.050,00)**	**(40,50)**
Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	474.322.000,00	402.707.200,00	84,90	676.854.250,00	(274.147.050,00)	(40,50)
Belanja Modal Peralatan Olahraga	**27.018.399,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Belanja Modal Peralatan Olahraga	27.018.399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.460.051.268,00**	**(9.460.051.268,00)**	**(100,00)**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	0,00	0,00	0,00	9.460.051.268,00	(9.460.051.268,00)	(100,00)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	**8.325.190.435,00**	**8.325.190.435,00**	**100,00**	**0,00**	**8.325.190.435,00**	**21,17**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP-BOS	8.325.190.435,00	8.325.190.435,00	100,00	0,00	8.325.190.435,00	100,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	**7.475.457.355,00**	**5.098.631.575,00**	**68,20**	**4.207.986.103,00**	**890.645.472,00**	**21,17**
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	7.475.457.355,00	5.098.631.575,00	68,20	4.207.986.103,00	890.645.472,00	21,17

5.1.2.3.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp66.813.132.281,00 atau 90,17% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp74.099.889.035,67. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp9.312.822.567,00 atau 16,20% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	**74.099.889.035,67**	**66.813.132.281,00**	**90,17**	**57.500.309.714,00**	**9.312.822.567,00**	**16,20**
Belanja Modal Bangunan Gedung	**72.002.425.755,67**	**65.556.269.786,00**	**91,04**	**55.592.562.033,00**	**9.963.707.753,00**	**17,92**
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	72.002.425.755,67	65.556.269.786,00	91,04	55.592.562.033,00	9.963.707.753,00	17,92

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Bangunan Menara	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**133.984.000,00**	**(133.984.000,00)**	**(100,00)**
Belanja Modal Bangunan Menara Perambuan	0,00	0,00	0,00	133.984.000,00	(133.984.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	**297.563.280,00**	**295.465.239,00**	**99,29**	**223.396.513,00**	**72.068.726,00**	**32,26**
Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	297.563.280,00	295.465.239,00	99,29	223.396.513,00	72.068.726,00	32,26
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	**1.799.900.000,00**	**961.397.256,00**	**53,41**	**1.550.367.168,00**	**(588.969.912,00)**	**(37,99)**
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.799.900.000,00	961.397.256,00	53,41	1.550.367.168,00	(588.969.912,00)	(37,99)

5.1.2.3.4. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp78.032.212.447,00 atau 97,82% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp79.770.264.700,00. Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp45.120.154.256,00 atau 36,64% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.28

Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA MODAL JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI	**79.770.264.700,00**	**78.032.212.447,00**	**97,82**	**123.152.366.703,00**	**(45.120.154.256,00)**	**(36,64)**
Belanja Modal Jalan dan Jembatan	**70.049.848.676,00**	**69.102.048.566,00**	**98,64**	**88.649.369.557,00**	**(19.547.320.991,00)**	**(22,05)**
Belanja Modal Jalan	69.640.172.096,00	68.702.966.352,00	98,65	88.450.343.222,00	(19.747.376.870,00)	(22,33)
Belanja Modal Jembatan	409.676.580,00	399.082.214,00	97,41	199.026.335,00	200.055.879,00	100,52

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Bangunan Air	**5.115.789.022,00**	**5.066.604.632,00**	**99,03**	**5.078.539.864,00**	**(11.935.232,00)**	**(0,24)**
Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	4.135.692.281,00	4.092.521.288,00	98,95	2.155.097.061,00	1.937.424.227,00	89,90
Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	980.096.741,00	974.083.344,00	99,38	2.923.442.803,00	(1.949.359.459,00)	(66,68)
Belanja Modal Instalasi	**3.604.627.002,00**	**3.201.755.330,00**	**88,82**	**3.592.540.282,00**	**(390.784.952,00)**	**(10,88)**
Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	408.548.602,00	405.849.254,00	99,33	397.960.735,00	7.888.519,00	1,98
Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah	60.000.000,00	59.531.076,00	99,21	199.539.200,00	(140.008.124,00)	(70,17)
Belanja Modal Instalasi Lain	3.136.078.400,00	2.736.375.000,00	87,25	2.995.040.347,00	(258.665.347,00)	(8,64)
Belanja Modal Jaringan	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.831.917.000,00**	**(25.831.917.000,00)**	**(100,00)**
Belanja Modal Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00	25.831.917.000,00	(25.831.917.000,00)	(100,00)
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	**1.000.000.000,00**	**661.803.919,00**	**66,18**	**0,00**	**661.803.919,00**	**100,00**
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.000.000.000,00	661.803.919,00	66,18	0,00	661.803.919,00	100,00

5.1.2.3.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada TA 2025 adalah sebesar Rp22.692.669.310,00 atau 99,99% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp22.692.940.410,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp8.337.660.694,00 atau 58,08% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA MODAL ASET TETAP LAINNYA	**22.692.940.410,00**	**22.692.669.310,00**	**99,99**	**14.355.008.616,00**	**8.337.660.694,00**	**58,08**

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Bahan Perpustakaan	**232.218.100,00**	**231.947.000,00**	**99,88**	**139.365.600,00**	**92.581.400,00**	**66,43**
Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	232.218.100,00	231.947.000,00	99,88	139.365.600,00	92.581.400,00	66,43
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**14.182.995.030,00**	**(14.182.995.030,00)**	**(100,00)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	0,00	0,00	0,00	14.182.995.030,00	(14.182.995.030,00)	(100,00)
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	**22.460.722.310,00**	**22.460.722.310,00**	**100,00**	**0,00**	**22.460.722.310,00**	**100,00**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP-BOS	22.460.722.310,00	22.460.722.310,00	100,00	0,00	22.460.722.310,00	100,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**32.647.986,00**	**(32.647.986,00)**	**(100,00)**
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	0,00	0,00	0,00	32.647.986,00	(32.647.986,00)	(100,00)

5.1.2.3.6. Belanja Modal Aset Lainnya

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp1.594.440.260,00 atau 86,49% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp1.843.490.964,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.397.779.060,00 atau 710,75% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.30
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA MODAL ASET LAINNYA	**1.843.490.964,00**	**1.594.440.260,00**	**86,49**	**196.661.200,00**	**1.397.779.060,00**	**710,75**
Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	**1.489.862.964,00**	**1.462.440.260,00**	**98,15**	**196.661.200,00**	**1.265.779.060,00**	**643,63**

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.489.862.964,00	1.462.440.260,00	98,15	196.661.200,00	1.265.779.060,00	643,63
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	**353.628.000,00**	**132.000.000,00**	**37,32**	**0,00**	**132.000.000,00**	**100,00**
Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	353.628.000,00	132.000.000,00	37,32	0,00	132.000.000,00	100,00

5.1.2.4. Belanja Tak Terduga

Realisasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp42.993.129.198,00. Realisasi TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.749.217.954,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan realisasi TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31
Rincian Realisasi Belanja Tak Terduga Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TAK TERDUGA	**42.993.129.198,00**	**0,00**	**0,00**	**3.749.217.954,00**	**(3.749.217.954,00)**	**(100,00)**
Belanja Tak Terduga	42.993.129.198,00	0,00	0,00	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)

5.1.2.5. Belanja Transfer

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 adalah sebesar Rp490.186.410.577,00 atau 95,23% dari anggaran yang telah ditetapkan dalam APBD Perubahan sebesar Rp514.765.933.467,00. Realisasi Belanja Transfer TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp42.611.570.759,00 atau 9,52% jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Transfer TA 2024 sebesar Rp447.574.839.818,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32

Rincian Realisasi Belanja Transfer Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025			Realisasi TA 2024 (Rp)	+/(-) Realisasi TA 2025 Terhadap Realisasi TA 2024	
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		Rp	%
1	2	3	4	5	6	7
BELANJA TRANSFER	**514.765.933.467,00**	**490.186.410.577,00**	**95,23**	**447.574.839.818,00**	**42.611.570.759,00**	**9,52**
Belanja Bagi Hasil	**84.422.871.559,00**	**75.182.319.761,00**	**89,05**	**55.239.082.625,00**	**19.943.237.136,00**	**36,10**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	**80.393.326.475,00**	**71.588.741.051,00**	**89,04**	**53.916.548.836,00**	**17.672.192.215,00**	**32,78**
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	80.393.326.475,00	71.588.741.051,00	89,04	53.916.548.836,00	17.672.192.215,00	32,78
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	**4.029.545.084,00**	**3.593.578.710,00**	**89,18**	**1.322.533.789,00**	**2.271.044.921,00**	**171,72**
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	4.029.545.084,00	3.593.578.710,00	89,18	1.322.533.789,00	2.271.044.921,00	171,72
Belanja Bantuan Keuangan	**430.343.061.908,00**	**415.004.090.816,00**	**96,44**	**392.335.757.193,00**	**22.668.333.623,00**	**5,78**
Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	**430.343.061.908,00**	**415.004.090.816,00**	**96,44**	**392.335.757.193,00**	**22.668.333.623,00**	**5,78**
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	0,00	0,00	377.322.788.993,00	(377.322.788.993,00)	(100,00)
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	430.343.061.908,00	415.004.090.816,00	96,43	15.012.968.200,00	399.991.122.616,00	2.664,30

Belanja Transfer TA 2025 berupa Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil

Realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2025 sebesar Rp75.182.319.761,00 atau 89,05% dari anggaran Belanja Bagi Hasil sebesar Rp84.422.871.559,00. Realisasi belanja tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp19.943.237.136,00 atau 36,10% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp55.239.082.625,00. Terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp71.588.741.051,00 atau 89,04% dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.593.578.710,00 atau 89,18%.

Transfer Bagi Hasil Pendapatan terdiri dari Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah dan Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk 165 Pemerintah Desa se-Kabupaten Bandung Barat.

b. Belanja Bantuan Keuangan

Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2025 adalah sebesar Rp415.004.090.816,00 atau mencapai 96,44% dari anggaran Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp430.343.061.908,00. Realisasi transfer tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp22.668.333.623,00 atau 5,78% dari realisasi TA 2024 sebesar Rp392.335.757.193,00.

Belanja Bantuan Keuangan tersebut dikategorikan ke dalam kelompok penggunaannya terdiri dari: 1) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp36.187.942.550,00; 2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Dana Desa sebesar Rp235.601.052.420,00; dan 3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota kepada Desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa sebesar Rp143.215.095.846,00.

5.1.2.6. Surplus/(Defisit)

Surplus/(Defisit) adalah selisih lebih/kurang antara Pendapatan, Belanja dan Transfer dalam satu Tahun Anggaran. Pada TA 2025, surplus/(defisit) dianggarkan sebesar (Rp78.230.964.440,00) dan direalisasikan sebesar Rp127.445.662.109,00.

5.1.2.7. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan/atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat meliputi semua penerimaan kas yang antara lain berasal dari Sisa Lebih Pembiayaaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dicatat berdasarkan asas bruto. Pembiayaan *netto* adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Realisasi Pembiayaan Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah TA 2025 adalah sebesar Rp78.230.964.440,00 yang merupakan Penggunaan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumya (TA 2024) sebesar Rp78.230.964.440,00.

Sedangkan Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama TA 2025 adalah sebesar Rp0,00 sehingga realisasi pembiayaan neto TA 2025 adalah sebesar Rp78.230.964.440,00.

5.1.2.8. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) adalah selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan-LRA dan Belanja, serta penerimaan dan pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan. SiLPA Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2025 adalah sebesar Rp205.676.626.549,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.33
Rincian SiLPA Tahun 2025 dan Tahun 2024

NO	URAIAN	REALISASI TA 2025 (Rp)	REALISASI TA 2024 (Rp)
1	PENDAPATAN DAERAH – LRA	3.394.853.479.480,00	3.410.490.980.435,97
2	BELANJA DAERAH – LRA	3.267.407.817.371,00	3.259.188.525.434,00
3	**SURPLUS/DEFISIT -LRA (1-2)**	**127.445.662.109,00**	**151.302.455.001,97**
4	PEMBIAYAAN NETO	78.230.964.440,00	(73.071.490.561,97)
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA) (3+4)		**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**
1	Kas di Kas Daerah	188.923.080.748,00	62.162.729.892,00
2	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.267.800,00	0,00
4	Kas di BLUD	14.250.419.213,00	13.256.878.492,00
5	Kas Dana BOS	13.450.700,00	15.334.411,00
6	Kas Dana BOP	0,00	0,00
7	Setara Kas	55.457.861,00	0,00
8	Kas Dana BOK	2.431.950.227,00	2.796.021.645,00
9	Kas Lainnya	34.000,00	16.490.004,00
SALDO AKHIR KAS PEMKAB BANDUNG BARAT PER 31 DESEMBER 2025		**205.676.660.549,00**	**78.247.454.444,00**
SELISIH SILPA DENGAN SALDO AKHIR KAS		**(34.000,00)**	**(16.490.004,00)**

Setara Kas adalah penerimaan atas Pokok dan Denda PBB-P2 yang diterima tanggal 31 Desember 2025 dan disetorkan ke Kas Daerah per tanggal 2 Januari 2026 yang tertuang dalam Berita Acara Pelimpahan Nomor: 007/BA/PAD/2026. Terdapat selisih sebesar

(Rp34.000,00) merupakan pajak utang PFK dari sekolah-sekolah dimana pajak tahun 2024 masih ada sisa yang belum disetorkan di Tahun 2025.

5.2. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan SAL

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Laporan Anggaran Lebih (SAL) merupakan jumlah akumulasi SiLPA sampai dengan tanggal pelaporan dan dihasilkan dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Penyajian Laporan Saldo Anggaran Lebih mencakup Saldo Anggaran Lebih tahun sebelumnya, penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) tahun berjalan, dan penyesuaian lain yang diperkenankan.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 5.34
Penjelasan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Tahun 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
3	**Subtotal (1-2)**	**0,00**	**0,00**
4	SURPLUS/(DEFISIT)	127.445.662.109,00	151.302.455.001,97
5	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	78.230.964.440,00	26.071.448.838,03
6	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	(99.142.939.400,00)
7	**Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) (4+5+6+7+8+9+10)**	**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**
8	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	0,00	0,00
9	Lain-lain	0,00	0,00
10	**Saldo Anggaran Lebih Akhir (11+12+13)**	**205.676.626.549,00**	**78.230.964.440,00**

5.3 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana pada tanggal tertentu. Neraca disajikan dengan menggunakan Basis Akrual. Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut.

Ikhtisar penyajian Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.35
Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	2	4	5
1	**ASET**	**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**
2	ASET LANCAR	469.004.434.712,74	363.034.293.211,50
3	INVESTASI JANGKA PANJANG	54.435.826.535,00	54.258.204.546,00
4	ASET TETAP	4.406.242.448.758,74	4.338.244.561.427,25
5	ASET LAINNYA	129.358.624.903,14	149.668.006.074,63
6	**JUMLAH ASET**	**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**
7	**KEWAJIBAN**	**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**
8	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	25.314.304.636,69	28.251.953.445,24
9	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
10	**JUMLAH KEWAJIBAN**	**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**
11	**EKUITAS**	**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**
12	JUMLAH EKUITAS DANA	5.033.727.030.272,93	4.876.953.111.814,14
13	**JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA**	**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**

Berdasarkan tabel diatas posisi Total Aset, dan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan dengan posisi Total Aset, dan Ekuitas akhir TA 2024, dengan rincian sebagai berikut:

1. Nilai Total Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.059.041.334.909,62 Jumlah tersebut naik sebesar Rp153.836.269.650,25 atau 3,14% dibandingkan dengan posisi total nilai aset per 31 Desember 2024 yang mencapai sebesar Rp4.905.205.065.259,38. Seluruh posisi komponen aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada akhir TA 2025 mengalami peningkatan dibandingkan akhir TA 2024, kecuali untuk Aset Lainnya.
2. Nilai Total Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp25.314.304.636,69 turun sebesar Rp2.937.648.808,55 atau 10,40% dibandingkan dengan total nilai kewajiban akhir TA 2024 sebesar Rp28.251.953.445,24.
3. Nilai Total Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp5.033.727.030.272,93. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp156.773.918.458,79 atau mencapai 3,21% dari total ekuitas akhir TA 2024 sebesar Rp4.876.953.111.814,14.

5.3.1 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta

dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Adapun rincian dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

Tabel 5.36
Neraca Aset Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
1	2	4	5
1	ASET LANCAR	469.004.434.712,74	363.034.293.211,50
2	INVESTASI JANGKA PANJANG	54.435.826.535,00	54.258.204.546,00
3	ASET TETAP	4.406.242.448.758,74	4.338.244.561.427,25
4	ASET LAINNYA	129.358.624.903,14	149.668.006.074,63
5	**JUMLAH ASET**	**5.059.041.334.909,62**	**4.905.205.065.259,38**

5.3.1.1 Aset Lancar

Aset Lancar adalah kas dan setara kas serta sumber daya lainnya yang diharapkan dapat segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan, rincian, dan saldo aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

Tabel 5.37
Neraca Aset Lancar Kabupaten Bandung Barat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**ASET LANCAR**	**469.004.434.712,74**	**363.034.293.211,50**	**105.970.141.501,24**	**29,19**
2	Kas dan Setara Kas	205.676.660.549,00	78.247.454.444,00	127.429.206.105,00	162,85
3	Piutang Pajak Daerah	406.915.946.608,65	416.376.018.292,65	(9.460.071.684,00)	(2,27)
4	Piutang Retribusi Daerah	14.872.957.705,00	11.042.692.939,00	3.830.264.766,00	34,69
5	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	351.896.968,84	530.896.968,84	(179.000.000,00)	(33,72)
6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	43.588.327.118,59	45.131.686.792,67	(1.543.359.674,08)	(3,42)
7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Piutang Transfer Antar Daerah	2.109.618.363,00	12.918.103.288,00	(10.808.484.925,00)	(83,67)
9	Piutang Lainnya	87.548.295.752,00	90.048.865.226,00	(2.500.569.474,00)	(2,78)
10	Penyisihan Piutang	(346.322.524.614,58)	(343.602.926.224,21)	(2.719.598.390,37)	0,79
11	Beban Dibayar Dimuka	1.408.331.704,88	638.466.007,54	769.865.697,34	120,58
12	Persediaan	52.854.924.557,36	51.703.035.477,01	1.151.889.080,35	2,23

5.3.1.1.1 Kas dan Setara Kas

Saldo tersebut merupakan saldo Kas dan Setara Kas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per tanggal,neraca, yang terdiri dari:

Tabel 5.38
Neraca Kas dan Setara Kas Kabupaten Bandung Barat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**Kas dan Setara Kas**	**205.676.660.549,00**	**78.247.454.444,00**	127.429.206.105,00	162,85
2	Kas di Kas Daerah	188.923.080.748,00	62.162.729.892,00	126.760.350.856,00	203,92
3	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara Pengeluaran	2.267.800,00	0,00	2.267.800,00	0,00
5	Kas di BLUD	14.250.419.213,00	13.256.878.492,00	993.540.721,00	7,49
6	Kas Dana BOS	13.450.700,00	15.334.411,00	(1.883.711,00)	(12,28)
7	Kas Dana BOP	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kas Dana BOK	2.431.950.227,00	2.796.021.645,00	(364.071.418,00)	(13,02)
9	Setara Kas	55.457.861,00	0,00	55.457.861,00	0,00
10	Kas Lainnya	34.000,00	16.490.004,00	(16.456.004,00)	(99,79)

Saldo masing-masing Kas Setara Kas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dapat dijelaskan berikut ini.

a. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah, berada di bawah penguasaan Bendahara Umum Daerah (BUD) yang disimpan pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) yang ditujukan untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan dan ditunjuk oleh Bupati Bandung Barat. Setara kas yang dikuasai dan di bawah tanggung jawab BUD, antara lain berupa surat utang negara (SUN)/obligasi dan deposito kurang dari 3 bulan, yang dikelola oleh BUD.

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai pemerintahan. Kas di Kas Daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan menjadi tanggung jawab BUD. Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah rekening pada Bank BJB Cabang Padalarang nomor 000.314.814.9002 yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 100.3.2/Kep.710-BKAD/2024 tentang Penetapan Nama dan Nomor Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bandung Barat TA 2025.

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp188.923.080.748,00 sedangkan per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp62.162.729.892,00. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp126.760.350.856,00 atau 203,92%.

Rincian Saldo Kas Daerah sebesar Rp188.923.080.748,00 terdiri dari saldo kas yang sudah ditentukan peruntukannya sebesar Rp30.646.558.352,00 dan saldo dari PAD sebesar Rp158.276.522.396,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.39
Rincian Kas Daerah per 31 Desember 2025

Jenis Dana Transfer	Saldo Awal (Rp)	Penerimaan Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
DAU Spesific Grant	11.071.502.873	205.757.312.631	210.046.208.925	6.782.606.579
DBH Sawit	3.294.893.000	0,00	0,00	3.294.893.000
Kompensasi Dampak Negatif	1.031.519.695	4.795.523.206	4.847.479.313	979.563.588
DID	1.713.844.089	0,00	0,00	1.713.844.089
Dana Insentif Fiskal	0,00	8.201.462.000	8.084.703.550	116.758.450
Bankeu Provinsi	0,00	11.907.000.000	11.907.000.000	0,00
DAK Non Fisik	7.380.386.239	31.832.087.509	30.161.137.039	9.051.336.709
DAK Fisik	7.635.083.512	12.014.160.081	12.006.721.867	7.642.521.726
DBHCHT	1.872.848.077,00	9.913.622.000,00	10.721.435.866,00	1.065.034.211,00
Dana Transfer	34.000.077.485,00	284.421.167.427,00	287.774.686.560,00	30.646.558.352,00
Pendapatan Asli Daerah				158.276.522.396,00
Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025				**188.923.080.748,00**

Rincian Kas Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode TA 2025 disajikan dalam **Lampiran 2a.**

b. Kas di Bendahara Penerimaan

Tabel 5.40
Rincian Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
JUMLAH	0,00	0,00	0,00	0,00

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Penerimaan. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (Nihil).

c. **Kas di Bendahara Pengeluaran**

Tabel 5.41
Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tanggal Penyetoran ke Kasda	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
Kecamatan Batujajar	7 Januari 2026	317.800,00	0,00	317.800,00	100,00
Kecamatan Ngamprah	9 Januari 2026	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	100,00
JUMLAH		**2.267.800,00**	**0,00**	**2.267.800,00**	**100,00**

Kas di Bendahara Pengeluaran adalah kas yang masih dikelola oleh Bendahara Pengeluaran setiap SKPD yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke Kas Daerah pada tanggal 31 Desember 2025. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.267.800,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.267.800,00 atau 100,00% dibandingkan saldo kas per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp0,00.

d. **Kas di BLUD**

Saldo kas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan bagian dari pemerintah dan kekayaan Negara yang tidak dipisahkan. Pembentukan BLUD tidak bertujuan untuk mencari laba namun untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan. Yang membedakan BLUD dengan instansi pemerintah lainnya adalah BLUD dikelola secara otonom dengan prinsip efisiensi dan produktivitas seperti korporasi dan penerimaan baik pendapatan maupun sumbangan yang diperoleh BLUD dapat digunakan secara langsung untuk membiayai operasional sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pola pengelolaan keuangan BLUD memberi keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Aset dikelola BLUD merupakan bagian dari kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. Oleh karena itu, walaupun pengelolaan keuangan dilakukan secara mandiri, rencana kerja, anggaran dan pertanggungjawaban keuangan BLUD dikonsolidasikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan pada laporan pertanggungjawaban keuangan pemerintah daerah. Kas pada BLUD merupakan bagian dari Kas pada pemerintah daerah.

Pada tahun 2022 pemerintah Kabupaten Bandung Barat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Badung Barat Nomor:188.45/Kep.766-Dinkes/2021 tentang Penetapan Penerapan Badan Layanan Umum Daerah Pada Pusat Kesehatan Masyarakat dan Unit Pelaksanaan Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah Bandung Barat tanggal 31 Desember 2022

menetapkan untuk 26 Puskesmas dan 1 Labkesda berstatus BLUD yang diterapkan di Tahun 2022.

Kas BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo kas pada rekening Bank yang terdiri dari 3 (tiga) BLUD RSUD, 32 (tiga puluh dua) BLUD Puskesmas yang berasal dari pengelolaan dana fungsional (Non-APBD) dan 1 (satu) BLUD Labkesda.

Saldo Kas BLUD pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp14.250.419.213,00 jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp993.540.721,00 atau 7,49% dibandingkan dengan saldo Kas BLUD per 31 Desember 2024 dengan nilai total Rp13.256.878.492,00, adapun rincian saldo Kas di BLUD sebagai berikut:

Tabel 5.42
Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Kas di BLUD RS	5.267.642.349,00	6.135.271.449,00	(867.629.100,00)	(14,14)
Kas di BLUD PKM	7.207.593.499,00	6.847.044.727,00	360.548.772,00	5,27
Kas di BLUD LABKESDA	1.775.183.365,00	274.562.316,00	1.500.621.049,00	546,55
JUMLAH	**14.250.419.213,00**	**13.256.878.492,00**	**993.540.721,00**	**7,49**

Rincian rekening kas di BLUD terdapat pada **Lampiran 2b** dan 2c.

e. Kas Dana BOS

Tabel 5.43
Rincian Kas Dana BOS per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
- Dinas Pendidikan	13.450.700,00	15.334.411,00	(1.883.711,00)	(12,28)

Kas dana BOS merupakan saldo kas yang ada di masing-masing Bendahara bantuan operasional satuan pendidikan, yang terdiri dari 633 Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan 67 Sekolah Menengah pertama Negeri (SMPN).

Penyaluran Dana BOS ini dilakukan oleh Pemerintah Pusat melalui transfer langsung ke rekening kas masing-masing satuan pendidikan. Penyaluran tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Dinas Pendidikan mengajukan Surat permintaan Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP3B) ke

Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai dasar penerbitan Surat Pengesahan Pendapatan dan Belanja (SP2B) atas dana BOS.

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2025 sebesar Rp13.450.700,00 terdiri dari Kas di Bendahara BOS SDN sebesar Rp13.290.700,00 dan Kas di Bendahara BOS SMPN Rp160.000,00 dengan rincian perhitungan saldo kas BOS dan posisi sisa dana Kas di Bendahara BOS diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.44
Rincian perhitungan Saldo Kas BOS SDN Tahun 2025

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2025			Jumlah (Rp)
1.	**Saldo Rekening Bank**		**8.734.411,00**
	a.	SILPA BOS REGULER	7.034.411,00
	b.	SILPA BOS AFIRMASI	0,00
	c.	SILPA BOS KINERJA	1.700.000,00
2.	**Saldo Kas Tunai**		**6.570.000,00**
	a.	SILPA BOS REGULER	0,00
	b.	SILPA BOS AFIRMASI	0,00
	c.	SILPA BOS KINERJA	6.570.000,00
	Jumlah saldo dana BOS		**15.304.411,00**
MUTASI DANA BOS TAHUN 2025			
A	**Mutasi Penambahan**		
	1	Alokasi Dana BOS REGULER	138.530.565.589,00
	2	Alokasi Dana BOS AFIRMASI	0,00
	3	Alokasi Dana BOS KINERJA	2.638.250.000,00
	4	Bunga Bank/Jasa Giro	0,00
	5	Potongan dan Pungutan Pajak	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan		**141.168.815.589,00**
B	**Mutasi Pengurangan**		
	1	**Belanja Pegawai**	0,00
		a. BOS REGULER	0,00
	2	**Belanja Operasi**	**117.847.959.390,00**
		a. BOS REGULER	115.589.047.490,00
		b. BOS AFIRMASI	0,00
		c. BOS KINERJA	2.258.911.900,00
	3	**Belanja Modal**	**23.318.069.910,00**
		a. BOS REGULER	22.930.461.810,00
		b. BOS AFIRMASI	0,00
		c. BOS KINERJA	387.608.100,00
	4	**Setor Saldo Kas Karena Sekolah Tutup**	**4.800.000,00**
	Jumlah Mutasi Pengurangan		**141.170.829.300,00**
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2025			
1.	**Saldo Rekening Bank**		**13.290.700,00**

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2025		Jumlah (Rp)
2.	Saldo Kas Tunai	0,00
	Jumlah Saldo Akhir	13.290.700,00

Tabel 5.45
Rincian perhitungan Saldo Kas BOS SMPN Tahun 2025

SALDO AWAL DANA BOS TAHUN 2025			Jumlah (Rp)
1.	Saldo Rekening Bank		30.000,00
	a.	SILPA BOS REGULER	30.000,00
	b.	SILPA BOS AFIRMASI	0,00
	c.	SILPA BOS KINERJA	0,00
2.	Saldo Kas Tunai		0,00
	a.	SILPA BOS REGULER	0,00
	b.	SILPA BOS AFIRMASI	0,00
	c.	SILPA BOS KINERJA	0,00
	Jumlah saldo dana BOS		30.000,00
MUTASI DANA BOS TAHUN 2025			
A	Mutasi Penambahan		
	1	Alokasi Dana BOS REGULER	49.433.710.000,00
	2	Alokasi Dana BOS AFIRMASI	0,00
	3	Alokasi Dana BOS KINERJA	560.000.000,00
	4	Bunga Bank/Jasa Giro	0,00
	5	Potongan dan Pungutan Pajak	0,00
	Jumlah Mutasi Penambahan		49.993.710.000,00
B	Mutasi Pengurangan		
	1	Belanja Pegawai	0,00
		a. BOS REGULER	0,00
	2	Belanja Operasi	42.525.737.165,00
		a. BOS REGULER	42.060.370.765,00
		c. BOS KINERJA	465.366.400,00
	3	Belanja Modal	7.467.842.835,00
		a. BOS REGULER	7.373.209.235,00
		b. BOS AFIRMASI	0,00
		c. BOS KINERJA	94.633.600,00
	4	Setoran Pajak	0,00
	5	Pemindahbukuan Bunga Bank	0,00
	Jumlah Mutasi Pengurangan		49.993.580.000,00
SALDO AKHIR DANA BOS TAHUN 2025			
1.	Saldo Rekening Bank		160.000,00
2.	Saldo Kas Tunai		0,00
	Jumlah Saldo Akhir		160.000,00

Saldo Kas BOS masing-masing Sekolah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama periode TA 2025 disajikan dalam **Lampiran 2d**, dan **2e**.

f. Kas Dana Bantuan Operasional Pendidikan (BOP)

Kas di Bendahara BOP merupakan saldo kas bantuan operasional pendidikan yang ada di masing-masing bendahara satuan pendidikan anak usia dini dan kesetaraan. Saldo kas dana BOP per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp0,00, tidak ada perubahan dibandingkan saldo kas per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp0,00.

Tabel 5.46
Rincian Kas Dana BOP per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Sanggar Kegiatan Belajar	0,00	0,00	0,00	0,00

g. Kas Dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)

Kas Dana BOK merupakan bantuan operasional kesehatan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada satuan kesehatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat. Kas dana BOK tersebut ialah saldo kas yang ada di bendahara masing-masing satuan kesehatan. Adapun jumlah institusi negeri yang menerima dana tersebut ialah 32 BLUD Puskesmas. Saldo kas dana BOK per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.431.950.227,00, menurun sebesar Rp364.071.418,00 atau 13,02% dibandingkan saldo kas per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp2.796.021.645,00.

Tabel 5.47
Rincian Kas Dana BOK per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Kas Dana BOK	2.431.950.227,00	2.796.021.645,00	(364.071.418,00)	(13,02)

Adapun rincian saldo Kas Dana BOK adalah sebagai berikut:

Tabel 5.48
Rincian Kas Dana BOK per BLUD 31 Desember 2025

NO	PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)
1	BLUD RAJAMANDALA	44.013.897,00
2	BLUD JAYAGIRI	99.927.409,00
3	BLUD GUNUNGHALU	9.022.880,00
4	BLUD CILILIN	32.222.900,00
5	BLUD CIKALONGWETAN	138.212.210,00
6	BLUD SAGULING	63.109.443,00

NO	PUSKESMAS	JUMLAH (Rp)
7	BLUD PARONGPONG	25.800.355,00
8	BLUD CIWARUGA	137.553.367,00
9	BLUD CIHAMPELAS	56.098.784,00
10	BLUD MUKAPAYUNG	95.841.086,00
11	BLUD SINDANGKERTA	26.522.739,00
12	BLUD CICANGKANGGIRANG	34.881.010,00
13	BLUD CIPATAT	47.692.494,00
14	BLUD SUMURBANDUNG	17.836.927,00
15	BLUD RONGGA	65.890.491,00
16	BLUD JAYAMEKAR	116.249.748,00
17	BLUD CIPEUNDEUY	10.897.395,00
18	BLUD CITALEM	132.510.642,00
19	BLUD CIPONGKOR	164.162.163,00
20	BLUD CIMAREME	146.139.488,00
21	BLUD NGAMPRAH	129.390.177,00
22	BLUD BATUJAJAR	59.980.020,00
23	BLUD CIBODAS	21.263.105,00
24	BLUD CIKOLE	46.423.835,00
25	BLUD LEMBANG	59.896.885,00
26	BLUD PASIRLANGU	75.376.959,00
27	BLUD RENDE	48.322.913,00
28	BLUD CIRATA	148.749.224,00
29	BLUD CISARUA	58.533.138,00
30	BLUD TAGOG APU	154.664.916,00
31	BLUD PADALARANG	20.980.940,00
32	BLUD PATARUMAN	143.782.687,00
Jumlah		**2.431.950.227,00**

h. Setara Kas

Saldo Setara Kas merupakan kas yang seharusnya masuk ke kas daerah namun masih berada pada rekening perantara Bank BJB. Hal tersebut terjadi karena Bank BJB tidak melimpahkan penerimaan yang seharusnya disetor ke kas daerah sampai dengan tanggal 31 Desember 2025. Adapun pelimpahan dilakukan oleh Bank BJB pada tanggal 2 Januari 2026, atau lewat tahun buku 2025. Saldo Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp55.457.861,00 mengalami kenaikan sebesar Rp55.457.861,00 atau 100,00% dari saldo Setara Kas per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp0,00.

i. Kas Lainnya

Saldo Kas Lainnya merupakan penerimaan tertentu lainnya yang diterima dalam penyelenggaraan pemerintahan. Saldo Kas Lainnya pada Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat merupakan saldo Kas selain Kas dalam pengelolaan BUD pada akhir tahun

anggaran yaitu berupa setoran pajak tahun 2025 dari sekolah-sekolah yang belum disetor. Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp16.456.004,00 atau 99,79% dari saldo kas lainnya per 31 Desember 2024 dengan nilai Rp16.490.004,00.

1. Saldo Kas Lainnya merupakan pajak tahun 2025 yang belum disetor dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.49

Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Dinas Pendidikan	34.000,00	16.490.004,00	(16.456.004,00)	(99,79)

2. Rincian Saldo Kas Lainnya berupa pajak tahun 2025 yang disetorkan oleh SDN Jati sebesar Rp34.000,00 pada tanggal 3 Februari 2026 dengan rincian pada **lampiran 2f**.

5.3.1.1.2 Piutang Pajak Daerah

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang juga merupakan hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Tabel 5.50

Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
				Rp	%
1	2	3	4	5	6
1	**Piutang Pajak Daerah**	**406.915.946.608,65**	**416.376.018.292,65**	(9.460.071.684,00)	(2,27)
2	Piutang Pajak Hotel	4.596.617.420,23	3.220.970.636,23	1.375.646.784,00	42,71
3	Piutang Pajak Restoran	6.917.442.986,42	6.596.828.028,42	320.614.958,00	4,86
4	Piutang Pajak Hiburan	2.002.570.507,00	927.065.088,00	1.075.505.419,00	116,01
5	Piutang Pajak Reklame	491.677.131,00	488.113.048,00	3.564.083,00	0,73
6	Piutang Pajak Penerangan Jalan	13.622,00	13.622,00	0,00	0,00
7	Piutang Pajak Parkir	257.293.179,00	248.481.413,00	8.811.766,00	3,55
8	Piutang Pajak Air Tanah	5.028.847.575,00	4.984.172.459,00	44.675.116,00	0,90
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	841.789.617,00	885.534.282,00	(43.744.665,00)	(4,94)

Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp406.915.946.608,65 dan Rp416.376.018.292,65. Piutang Pajak Daerah Tahun Anggaran 2025 mengalami penurunan sebesar Rp9.460.071.684,00 atau 2,27% dengan rincian mutasi pada **Lampiran 3** dan **Lampiran 4**.

Piutang Pajak Daerah adalah hasil gabungan seluruh piutang yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang terdiri dari 9 objek Pajak Daerah. Rincian mutasi piutang Pajak PBB-P2 pada **Lampiran 4** dan rincian mutasi piutang Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB-P2) pada **Lampiran 5**.

Tahun 2025, Badan Pendapatan Daerah telah menerbitkan Surat Ketetapan untuk Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB-P2) sebesar Rp246.507.193.964,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.51
Rekapitulasi Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Daerah Lainnya (Non-BPHTB dan PBB-P2)
Tahun Anggaran 2025

NO	JENIS PAJAK	SPTPD (Rp)	SKPD OFFICIAL (Rp)	SKPDJ (Rp)	SKPDKB (Rp)	SKPDKBT (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	HOTEL	33.041.871.652,00	0,00	563.085.073,00	179.689.801,00	0,00	33.784.646.526,00
2	RESTORAN	67.634.237.944,00	0,00	478.052.440,00	672.033.657,00	50.219.190,00	68.834.543.231,00
3	HIBURAN	18.892.278.853,00	0,00	1.034.705.084,00	0,00	0,00	19.926.983.937,00
4	PARKIR	1.293.484.580,00	0,00	23.667.781,00	0,00	0,00	1.317.152.361,00
5	REKLAME	0,00	5.212.715.447,00	0,00	0,00	0,00	5.212.715.447,00
6	MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	3.017.021.152,00	0,00	12.669.120,00	0,00	0,00	3.029.690.272,00
7	AIR TANAH	0,00	36.220.112.987,00	0,00	0,00	0,00	36.220.112.987,00
8	PENERANGAN JALAN	78.181.349.203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.181.349.203,00
JUMLAH		**202.060.243.384,00**	**41.432.828.434,00**	**2.112.179.498,00**	**851.723.458,00**	**50.219.190,00**	**246.507.193.964,00**

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuan (*write-down*). Hapus tagih yang berkaitan dengan perdata dan hapus buku yang berkaitan dengan akuntansi untuk piutang, merupakan dua hal yang harus diperlakukan secara terpisah. Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi untuk pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Tujuan hapus buku adalah menampilkan aset yang lebih realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

realistis dan ekuitas yang lebih tepat. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang.

a. Mutasi Piutang Pajak Hotel

Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp4.596.617.420,23 dan Rp3.220.970.636,23 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.52
Mutasi Piutang Pajak Hotel Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Hotel		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	**3.220.970.636,23**
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(457.781.933,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**2.763.188.703,23**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	33.784.646.526,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(31.951.217.809,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**1.833.428.717,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**4.596.617.420,23**

b. Mutasi Piutang Pajak Restoran

Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp6.917.442.986,42 dan Rp6.596.828.028,42 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.53
Mutasi Piutang Pajak Restoran Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Restoran		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	6.596.828.028,42
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(1.548.724.906,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	5.307.460,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**5.053.410.582,42**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	68.834.543.231,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(66.970.510.827,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**1.864.032.404,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**6.917.442.986,42**

c. Mutasi Piutang Pajak Hiburan

Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp2.002.570.507,00 dan Rp927.065.088,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.54
Mutasi Piutang Pajak Hiburan Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Hiburan		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	927.065.088,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(169.234.894,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**757.830.194,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	19.926.983.937,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(18.682.243.624,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**1.244.740.313,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**2.002.570.507,00**

d. Mutasi Piutang Pajak Reklame

Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp491.677.131,00 dan Rp488.113.048,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.55
Mutasi Piutang Pajak Reklame Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Reklame		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	488.113.048,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(150.447.763,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**337.665.285,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	5.212.715.447,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(5.058.703.601,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**154.011.846,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**491.677.131,00**

e. Mutasi Piutang Penerangan Jalan

Piutang Penerangan Jalan Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp13.622,00 dan Rp13.622,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.56
Mutasi Piutang Pajak Penerangan Jalan Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Penerangan Jalan		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	13.622,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	0,00
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**13.622,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	78.181.349.203,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(78.181.349.203,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**0,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**13.622,00**

f. Mutasi Piutang Pajak Parkir

Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp257.293.179,00 dan Rp248.481.413,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.57
Mutasi Piutang Pajak Parkir Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Parkir		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	248.481.413,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(26.077.724,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**222.403.689,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	1.317.152.361,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(1.282.262.871,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**34.889.490,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**257.293.179,00**

g. Mutasi Piutang Pajak Air Tanah

Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp5.028.847.575,00 dan Rp4.984.172.459,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.58
Mutasi Piutang Pajak Air Tanah Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Air Tanah		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	4.984.172.459,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(518.318.962,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	273.360,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**4.466.126.857,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	36.220.112.987,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(35.657.392.269,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**562.720.718,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**5.028.847.575,00**

h. Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp841.789.617,00 dan Rp885.534.282,00 dengan rincian mutasi piutang sebagai berikut:

Tabel 5.59
Mutasi Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
A	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang per 31 Desember 2024	885.534.282,00
	Penerimaan Pembayaran s.d 31 Desember 2025	(104.397.465,00)
	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak 2024	0,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024	**781.136.817,00**
B	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	3.029.690.272,00
	Penerimaan Pembayaran Tahun Berjalan (Januari-Desember 2025)	(2.969.037.472,00)
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**60.652.800,00**
C	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**841.789.617,00**

i. Mutasi Piutang PBB-P2

Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp386.779.694.571,00 dan Rp399.024.839.716,00 dengan rincian sebagai berikut:

a. Saldo Awal Piutang PBB-P2 per 31 Desember 2024 sebesar Rp489.073.704.942,00;
b. Penambahan pada TA 2025 sebesar Rp164.790.176.127, berupa:
   1) DHKP buku I s/d buku V sebesar Rp137.419.563.230,00, dan Obyek Pajak Khusus sebesar Rp19.290.328.874,00;
   2) Ketetapan baru selama 2025 buku I s/d V sebesar Rp8.072.887.704,00; dan
   3) Kelebihan pembayaran piutang sebesar Rp7.396.319,00.
c. Pengurangan pada TA 2025 sebesar Rp267.084.186.498,00, berupa:
   1) Koreksi pencatatan saldo awal sebesar Rp31,00;
   2) Realisasi dari piutang sebesar Rp16.092.259.595,00;
   3) Realisasi dari tahun berjalan Rp111.493.281.203,00;
   4) Perubahan ketetapan dan kompensasi sebesar Rp13.746.826,00;
   5) Koreksi pencatatan atas bukti pembayaran sebesar Rp9.135.589,00;
   6) Perubahan DHKP sebesar Rp659.147.361,00;
   7) Pembatalan sebesar Rp292.505.229,00;
   8) Pengurangan piutang 100% sebesar Rp50.975.814.912,00. Pengurangan berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/Kep.285-Bapenda/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penetapan Pemberian Pengurangan Terhadap Tunggakan Pokok dan Sanksi Administratif PBB-P2. Pengurangan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
      a) Wajib Pajak Pribadi;
      b) Tunggakan pokok dan sanksi administratif Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024; dan
      c) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun 2025 pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan tercatat lunas pada sistem perbankan.
   9) Piutang dari nop verval yang dicatat pada piutang lainnya Rp87.548.295.752,00.

Mutasi Piutang PBB-P2 dijelaskan pada **lampiran 4.**

5.3.1.1.3. Piutang Retribusi Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, jenis retribusi daerah berdasarkan objeknya terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi perizinan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.60
Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Retribusi Jasa Umum	14.604.523.595,00	10.864.077.424,00	3.740.446.171,00	34,43
Piutang Retribusi perizinan Tertentu	268.434.110,00	178.615.515,00	89.818.595,00	50,29
Jumlah	**14.872.957.705,00**	**11.042.692.939,00**	**3.830.264.766,00**	**34,69**

Piutang Retribusi per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp14.872.957.705,00 dan Rp11.042.692.939,00 merupakan Piutang Pelayanan Kesehatan BLUD sebesar Rp14.604.523.595,00, Piutang Izin Mendirikan Bangunan sebesar Rp129.863.500,00, dan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp138.570.610,00. Piutang Retribusi Daerah TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.830.264.766,00 atau mencapai 34,69% dengan rincian mutasi pada **Lampiran 6, 6a,** dan 7.

Adapun mutasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.61
Mutasi Piutang Retribusi Daerah Tahun 2025

dalam rupiah

Piutang Retribusi Daerah		
a	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh s.d Tahun 2024**	
	Piutang BLUD per 31 Desember 2024	10.864.077.424,00
	Piutang IMB per 31 Desember 2024	129.863.500,00
	Piutang PBG per 31 Desember 2024	48.752.015,00
	Penghapusan karena Pembatalan PBG	0,00
	Pembayaran Piutang 2025	(15.752.647,00)
	Saldo atas Piutang yang Diperoleh s.d 2025	**11.026.940.292,00**
b	**Mutasi atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025**	
	Penambahan Piutang Tahun Berjalan	3.846.017.413,00
	Saldo atas Piutang yang diperoleh pada Tahun 2025	**3.846.017.413,00**
c	**Piutang per 31 Desember 2025 (a+b)**	**14.872.957.705,00**

5.3.1.1.4. Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Tabel 5.62
Rincian Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	351.896.968,84	530.896.968,84	(179.000.000,00)	(33,72)

Merujuk kepada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut, Pemerintah Daerah melalui peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 membentuk Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang merupakan pemisahan unit usaha air minum (*spin-off*) dari Badan Usaha Milik Daerah PT. Perdana Multiguna Sarana (PMgS). Pemisahan unit usaha air minum menyebabkan seluruh hak dan kewajiban termasuk hubungan hukum serta perizinan PT. PMgS terkait dengan bidang usaha pengelolaan dan penyelenggaraan system penyediaan air minum beralih kepada Perumda Tirta Wibawa Mukti.

Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Piutang bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti yang belum di setor ke Kas Daerah sebesar Rp530.896.968,84 yang tercatat dalam laporan keuangan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti Tahun 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.63
RUPS Pembagian Dividen PT. Tirta Wibawa Mukti Tahun 2025

NO	TANGGAL RUPS	TAHUN BUKU	LABA BERSIH (Rp)	KEWAJIBAN DIVIDEN	DIVIDEN (Rp)	PEMBAGIAN DIVDEN			
						%	PEMDA (Rp)	%	KOPERASI (Rp)
1	21/02/2018	2016	299.010.881,00	45%	134.554.897,00	99,84	134.338.222,00	0,16	216.675,00
2	28/02/2018	2017	0,00	45%	0,00		0,00		0,00
3	14/02/2019	2018	267.178.105,00	45%	120.230.147,00	99,86	120.058.635,00	0,14	171.512,00
4	1/7/2021	2019	721.100.456,00	45%	324.495.205,00	99,86	324.032.302,00	0,14	462.903,00
5	6/9/2022	2022	460.573.269,00	45%	207.257.971,00	99,86	206.967.810,84	0,14	290.161,00
	JUMLAH (a)		1.747.862.711,00	45%	786.538.220,00		785.396.969,84		1.141.251,00
	Realisasi Pembayaran Dividen sampai dengan Tahun 2024 (b)						254.500.001,00		
	Realisasi Pembayaran Dividen Tahun 2025 (c)						179.000.000,00		
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan (d=a-b-c)						351.896.968,84		

Dengan rincian penerimaan dividen TA 2025, sebagai berikut:

Tabel 5.64
Penerimaan Dividen PT. Tirta Wibawa Mukti Tahun 2025

No.	Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp)
1	20/01/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	12.000.000

No.	Tanggal	Keterangan	Nilai (Rp)
2	18/02/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	12.000.000
3	19/03/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
4	17/04/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
5	20/05/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	20.000.000
6	20/06/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
7	24/07/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
8	03/09/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
9	26/09/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
10	22/10/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
11	26/11/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
12	17/12/2025	Dividen Perumdam Tirta Wibawa Mukti	15.000.000
TOTAL			**179.000.000**

5.3.1.1.5. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Tabel 5.65

Rincian Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**33.678.798.780,00**	**37.156.844.534,00**	**(3.478.045.754,00)**	**(9,36)**
Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah	33.678.798.780,00	37.156.844.534,00	(3.478.045.754,00)	(9,36)
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	**9.344.357.651,00**	**7.732.487.762,00**	**1.611.869.889,00**	**20,85**
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hotel	2.520.178.516,00	2.142.628.792,00	377.549.724,00	17,62
Piutang Pendapatan Denda Pajak Restoran	3.846.410.875,00	3.363.636.500,00	482.774.375,00	14,35
Piutang Pendapatan Denda Pajak Hiburan	1.118.292.627,00	490.508.953,00	627.783.674,00	127,99
Piutang Pendapatan Denda Pajak Reklame	61.232.202,00	43.359.731,00	17.872.471,00	41,22
Piutang Pendapatan Denda Pajak Penerangan Jalan	209.821,00	209.821,00	0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda Pajak Parkir	141.471.639,00	125.096.347,00	16.375.292,00	13,09
Piutang Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	1.425.061.552,00	1.346.514.684,00	78.546.868,00	5,83
Piutang Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	231.500.419,00	220.532.934,00	10.967.485,00	4,97
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	**143.708.608,92**	**135.499.163,00**	**8.209.445,92**	**6,06**
Piutang Pendapatan Denda Retribusi perizininan Tertentu	143.708.608,92	135.499.163,00	8.209.445,92	6,06
Piutang Pendapatan dari Pengembalian	**343.106.745,00**	**23.000.000,00**	**320.106.745,00**	**1.391,77**

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	18.200.000,00	23.000.000,00	(4.800.000,00)	(20,87)
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	296.453.968,30	0,00	296.453.968,30	100,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	28.452.776,70	0,00	28.452.776,70	100,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	**78.355.333,67**	**83.855.333,67**	**(5.500.000,00)**	**(6,56)**
Piutang Pendapatan Denda Pengakhiran Sewa BMD	78.355.333,67	83.855.333,67	(5.500.000,00)	(6,56)
Jumlah	**43.588.327.118,59**	**45.131.686.792,67**	**(1.543.359.674,08)**	**(3,42)**

Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp43.588.327.118,59 dan Rp45.131.686.792,67. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.543.359.674,08 atau 3,42%. Adapun penjelasan atas rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah adalah:

a. Saldo Piutang Hasil dari Bangun Guna Serah sebesar Rp33.678.798.780,00 merupakan Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah merupakan piutang yang timbul atas perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki, yang tertera pada **Lampiran 8.** Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa kerja sama Pemerintah Daerah dengan:
   1) PT. Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 - 28 April 2043);
   2) PT. Bangun Bina persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar dengan jangka waktu selama 20 Tahun (4 November 2013 - 4 November 2033) dan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 - 15 Juli 2031);
   3) PT. Bangun Bina persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Panorama Lembang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (15 Juli 2016 -15 Juli 2031); dan

4) PT. Bangun Bina persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang dengan jangka waktu selama 15 Tahun (20 Mei 2020 - 20 Mei 2035).

b. Saldo Piutang Denda Pajak sebesar Rp9.344.357.651,00 merupakan Piutang Denda Pajak Lainnya (Non PBB-P2) yang timbul atas sanksi yang berikan kepada wajib pajak atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak tepat waktu. Adapun rincian atas Piutang Denda Pajak Lainnya (Non PBB-P2) tersaji pada **Lampiran 9a**;

c. Saldo Piutang Pendapatan Denda retribusi Daerah sebesar Rp143.708.608,92 terdiri dari Piutang Denda Izin Mendirikan Bangunan dan Piutang Persetujuan Bangunan Gedung. Piutang Denda Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebesar Rp123.489.300,00 timbul atas sanksi yang diberikan kepada wajib retribusi atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 9b**. Saldo Piutang Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp20.219.308,92 merupakan Piutang Denda Penerbitan PBG atas keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar retribusi tepat waktu, dengan rincian pada **Lampiran 7**;

d. Saldo Piutang dari Pengembalian sebesar Rp343.106.745,00 terdiri dari piutang yang timbul dari perhitungan kelebihan pemotongan iuran Taspen sehingga ada pengembalian ke Kas Daerah dengan cara dicicil sebesar Rp18.200.000,00 dengan rincian pada **Lampiran 9c**. Kemudian terdapat piutang bagi hasil pajak daerah ke desa sebesar Rp296.453.968,30 serta piutang bagi hasil retribusi daerah ke desa sebesar Rp28.452.776,70 dengan rincian pada **Lampiran 9d** dan **9e**; dan

e. Denda Keterlambatan Pembayaran Piutang Kemitraan dengan PT. Akurasi Kuatnega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya dengan jangka waktu selama 30 Tahun (29 April 2013 – 28 April 2043) sampai dengan TA 2025 sebesar Rp78.355.333,67 dengan rincian pada **Lampiran 9f**.

5.3.1.1.6. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Saldo Piutang Transfer Pemerintah Pusat pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 masing - masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00

5.3.1.1.7. Piutang Transfer Antar Daerah

Tabel 5.66

Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Bagi Hasil	**1.619.379.963,00**	**10.797.824.986,00**	**(9.178.445.023,00)**	**(85,00)**
Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	827.587.590,00	4.162.898.820,00	(3.335.311.230,00)	(80,12)
Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	239.620.200,00	4.020.369.450,00	(3.780.749.250,00)	(94,04)
Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	2.816.338,00	11.357.352,00	(8.541.014,00)	(75,20)
Piutang Bagi Hasil Pajak Air permukaan	549.355.835,00	593.681.700,00	(44.325.865,00)	(7,47)
Piutang Bagi Hasil Pajak Rokok	0,00	2.009.517.664,00	(2.009.517.664,00)	(100,00)
Piutang Bantuan Keuangan	**490.238.400,00**	**2.120.278.302,00**	**(1.630.039.902,00)**	**(76,88)**
Piutang Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	490.238.400,00	2.120.278.302,00	(1.630.039.902,00)	(76,88)
JUMLAH	**2.109.618.363,00**	**12.918.103.288,00**	**(10.808.484.925,00)**	**(83,67)**

Saldo Piutang Transfer antar Daerah pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.109.618.363,00 terdiri dari:

a. Piutang Bagi Hasil Piutang Bagi Hasil merupakan Piutang yang berasal dari Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat TA 2025 adalah sebesar Rp1.619.379.963,00, terdiri dari:
   1) Piutang Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp827.587.590,00;
   2) Piutang Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp239.620.200,00;
   3) Piutang Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp2.816.338,00; dan
   4) Piutang Bagi Hasil Pajak Air Permukaan sebesar Rp549.355.835,00.

   Rincian dapat dilihat pada **Lampiran 11.**
b. Piutang Bantuan Keuangan terdiri dari Piutang yang berasal dari Kompensasi Dampak Negatif TA 2025 adalah sebesar Rp490.238.400,00. Perhitungan Kompensasi Dampak Negatif pengelolaan persampahan TPA Sarimukti terdiri dari:
   1) Kota Bandung sebesar Rp279.827.040,00;
   2) Kabupaten Bandung sebesar Rp171.618.630,00; dan
   3) Kota Cimahi sebesar Rp38.792.730,00.

   Rincian mutasi Piutang Hasil dari Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur terdapat pada **Lampiran 10** dengan rekapan sebagai berikut:

Tabel 5.67

perhitungan Piutang Kompensasi Dampak Negatif persampahan TPA Sarimukti per 31 Desember 2025

Nomor	Uraian Rincian Piutang Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Kewajiban (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Piutang (Rp)
I	Kota Cimahi	2015	33.124.840,00	33.124.840,00	0,00
	Kota Bandung		408.998.895,00	396.547.065,00	12.451.830,00
	Jumlah		**442.123.735,00**	**429.671.905,00**	**12.451.830,00**
II	Kota Cimahi	2025	469.110.525,00	430.317.795,00	38.792.730,00
	Kota Bandung		3.400.994.446,00	3.133.619.236,00	267.375.210,00
	Kab. Bandung		1.017.048.705,00	845.430.075,00	171.618.630,00
	Jumlah		**4.887.153.676,00**	**4.409.367.106,00**	**477.786.570,00**
I + II	Kota Cimahi	2015 & 2025	502.235.365,00	463.442.635,00	38.792.730,00
	Kota Bandung		3.809.993.341,00	3.530.166.301,00	279.827.040,00
	Kab. Bandung		1.017.048.705,00	845.430.075,00	171.618.630,00
Jumlah			**5.329.277.411,00**	**4.839.039.011,00**	**490.238.400,00**

5.3.1.1.8. Piutang Lainnya

Tabel 5.68

Rincian Piutang Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Piutang Lainnya	87.548.295.752,00	90.048.865.226,00	(2.500.569.474,00)	(2,78)

Saldo Piutang Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 sebesar Rp87.548.295.752,00 merupakan:

a. Saldo piutang pajak PBB-P2 per 31 Desember 2025 dalam proses pembatalan (penghapusan) hasil dari verifikasi dan validasi yang dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi dan Validasi Pajak Daerah Lainnya Nomor 973/360/BA.Verpal/Bapenda/2022 tanggal 30 September 2022 sebesar Rp92.875.317.697,00 (data laporan keuangan audited tahun 2022).

b. Tahun 2022 terdapat koreksi lebih catat sebesar Rp1.332.710.917,00.

c. Tahun 2024 terdapat mutasi masuk sebesar Rp430.330.744,00. Kemudian terdapat mutasi keluar karena pembayaran setelah dilakukan verifikasi dan validasi sebesar Rp1.140.112.374,00 dan sebesar Rp783.959.924,00 karena pengaktifan kembali NOP PBB-P2.

d. Tahun 2025 ada penambahan ketetapan sebesar Rp1.132.642.911,00, terdapat pembayaran setelah dilakukan verifikasi dan validasi sebesar Rp582.104.843,00, pembatalan dari NOP Verval sebesar Rp4.099.431,00, penghapusan Piutang 100% sebesar Rp1.572.514.780,00, dan piutang dari NOP Verval yang direklas ke Piutang PBB-P2 sebesar Rp1.474.493.331,00.

5.3.1.1.9. Penyisihan Piutang

Tabel 5.69

Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Penyisihan Piutang Pendapatan	(262.353.182.533,08)	(262.138.311.972,51)	(214.870.560,57)	0,08
Penyisihan Piutang Lainnya	(83.969.342.081,50)	(81.464.614.251,70)	(2.504.727.829,80)	3,07
JUMLAH	**(346.322.524.614,58)**	**(343.602.926.224,21)**	**(2.719.598.390,37)**	**0,79**

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 merupakan jumlah Penyisihan Piutang tak Tertagih dengan klasifikasi tarif penyisihan piutang berdasarkan peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2024 tentang perubahan atas peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 50 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. perhitungan Penyisihan Piutang merupakan akumulasi Penyisihan Piutang dari Tahun 2008 sampai dengan Tahun 2024, yang dihitung berdasarkan kualitas piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi empat dengan klasifikasi sebagai berikut:

a. Kualitas Piutang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 0,5%;

b. Kualitas Piutang Kurang Lancar dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 10%;

c. Kualitas Piutang Diragukan dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 50%; dan

d. Kualitas Piutang Macet dengan taksiran Piutang Tak Tertagih 100%.

Saldo Piutang Neto pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah taksiran/perkiraan nilai realisasi bersih/*Net Realizable Value* (NRV) dari seluruh nilai nominal Piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diperkirakan dapat direalisasikan.

Saldo Penyisihan Piutang TA 2025 terbentuk dari transaksi sebagai berikut:

a. Penambahan sebesar Rp6.779.027.028,30 merupakan Beban Penyisihan Piutang-LO akibat kenaikan nilai pada Akumulasi Penyisihan Piutang TA 2025; dan

b. Pengurangan sebesar Rp4.059.428.637,93 merupakan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO akibat nilai Akumulasi Penyisihan Piutang TA 2025 menurun dibandingkan TA 2024 dengan rincian sebagai berikut:

1) Piutang Persetujuan Bangunan Gedung dan Piutang Denda Persetujuan Bangunan Gedung pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp1.295.129,55;

2) Piutang Bangun Guna Serah dan Piutang Denda Bangun Guna Serah dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan sebesar Rp4.552.154,37;

3) Piutang Bangun Guna Serah dan Piutang Denda Bangun Guna Serah dari Kemitraan Dengan Pihak Ketiga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp15.588.074,40;

4) Piutang Taspen pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp4.800.000,00;

5) Piutang Bagi Hasil Provinsi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp53.989.124,93;

6) Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp3.894.179.776,39;

7) Piutang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp7.041.500,82;

8) Piutang BLUD pada Dinas Kesehatan sebesar Rp1.648.275,75; dan

9) Piutang Pajak Daerah Lainnya pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp76.334.601,72.

Informasi lebih lanjut mengenai rincian perhitungan daftar umur piutang (*aging schedule*) dan penyisihan piutang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat akhir Tahun Anggaran 2025 disajikan dalam **Lampiran 11.**

5.3.1.1.10. Beban Dibayar Dimuka

Tabel 5.70

Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Dibayar Dimuka	1.408.331.704,88	638.466.007,54	769.865.697,34	120,58

Saldo Beban Dibayar Dimuka merupakan bagian dari pembayaran beban atau pengeluaran belanja yang masa manfaatnya melebihi tanggal Neraca. Pada tanggal Neraca masa manfaat

tersebut belum dinikmati atau digunakan. Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.71
Rincian Beban Dibayar Dimuka per SKPD Tahun 2025

NO.	PERANGKAT DAERAH	BEBAN SEWA DIBAYAR MUKA (Rp)
1	Badan Pendapatan Daerah	135.123.287,68
2	Badan perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	25.068.493,15
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	70.286.542,22
4	Dinas Sosial	11.506.849,32
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	54.625.384,62
6	Dinas Tenaga Kerja	82.582.417,58
7	Dinas perindustrian dan perdagangan	32.745.515,78
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	13.384.615,38
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.178.082,19
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.917.808,22
11	Kecamatan Cipongkor	8.104.395,60
12	Sekretariat Daerah	967.808.313,14
	JUMLAH	**1.408.331.704,88**

perhitungan Beban Dibayar Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 disajikan dalam **Lampiran 12.**

5.3.1.2.0 Persediaan

Tabel 5.72
Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Barang Pakai Habis	52.836.861.638,36	51.703.035.477,01	1.133.826.161,35	2,19
Barang Tidak Pakai Habis	18.062.919,00	0,00	18.062.919,00	100,00
JUMLAH	**52.854.924.557,36**	**51.703.035.477,01**	**1.151.889.080,35**	**2,23**

Saldo Persediaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp52.854.924.557,36 dan Rp51.703.035.477,01. Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp1.151.889.080,35 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase peningkatan sebesar 2,23%.

Dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan pada TA 2025 sebesar Rp584.476.279.469,51 berupa:
   1) Realisasi Belanja Barang yang menambah persediaan selama Tahun 2025 adalah sebesar Rp517.202.867.606,00;

2) Reklas sebesar Rp164.592.519,90; yaitu penambahan yang disebabkan dari transaksi reklas akibat perbedaan rekening belanja dengan rekening barang yang dicatat pada sistem aplikasi persediaan;
3) Utang sebesar Rp3.686.746.180,00, yaitu penambahan yang berasal utang BLUD;
4) Reklas dari Aset Tetap ke Ektrakomptabel sebesar Rp23.511.710.687,88 dikarenakan nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi aset tetap terdiri dari:
   a) Berasal dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.896.015.314,88;
   b) Berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp9.425.053,00; dan
   c) Berasal dari Aset Tetap Aset Tetap Lainnya sebesar Rp21.606.270.320,00.
5) Penerimaan Hibah sebesar Rp39.256.418.405,94 berupa:
   a) Penerimaan Hibah persediaan medis dan obat pada Dinas Kesehatan sebesar Rp34.983.131.285,94;
   b) Penerimaan Hibah persediaan blangko e-ktp pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebesar Rp1.628.039.880,00; dan
   c) Penerimaan Hibah persediaan alat kontrasepsi dan kelengkapan pendukungnya pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebesar Rp2.645.247.240,00.
6) Penambahan persediaan berasal dari kelahiran hewan ternak sapi pada Dinas Perikanan dan Peternakan sebesar Rp143.316.650,00; dan
7) Koreksi Saldo Awal sebesar Rp510.627.419,79, yaitu perbedaan pengakuan saldo awal persediaan antara neraca dengan yang tercatat pada sistem aplikasi persediaan.

b. Pengurangan pada TA 2025 sebesar Rp583.324.390.389,16 berupa:
   1) Beban persediaan selama Tahun 2025 karena penggunaan barang persediaan sebesar Rp582.312.307.649,47;
   2) Reklas sebesar Rp164.592.519,90; yaitu pengurangan yang disebabkan dari transaksi reklas akibat perbedaan rekening belanja dengan rekening barang yang dicatat pada sistem aplikasi persediaan;
   3) Reklas dari Persediaan ke Aset Tetap sebesar Rp336.862.800,00 terdiri dari:
      a) Realisasi belanja barang pakai habis yang dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp3.862.800,00 berupa belanja tabung gas pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
      b) Realisasi belanja barang pakai habis yang dicatat sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp333.000.000,00 berupa baju anti panas pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.

4) Koreksi Saldo Awal sebesar Rp510.627.419,79, yaitu perbedaan pengakuan saldo awal persediaan antara neraca dengan yang tercatat pada sistem aplikasi persediaan.

Berikut rincian persediaan per SKPD pada Kabupaten Bandung Barat tahun 2025:

Tabel 5.73
Rincian Persediaan per SKPD Tahun 2025

NO.	SKPD	Barang Pakai Habis (Rp)	Barang Tidak Pakai Habis (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Dinas Pendidikan	160.799.666,75		160.799.666,75
2	Dinas Kesehatan	42.656.939.177,53		42.656.939.177,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	25.641.100,00		25.641.100,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	525.000,00		525.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	1.958.925,87		1.958.925,87
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	146.875.200,00		146.875.200,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	18.434.800,00		18.434.800,00
8	Dinas Sosial	5.068.000,00		5.068.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	26.955.000,00		26.955.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	318.163.975,00		318.163.975,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	131.195.850,00		131.195.850,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	5.957.600,00		5.957.600,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	6.069.183.510,00		6.069.183.510,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.740.629,00		4.740.629,00
15	Dinas Perhubungan	1.390.372.375,00	18.062.919,00	1.408.435.294,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.517.000,00		1.517.000,00
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	405.100,00		405.100,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.904.000,00		2.904.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.808.400,00		1.808.400,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	22.934.068,00		22.934.068,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	688.059.626,00		688.059.626,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	754.000,00		754.000,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	64.846.900,00		64.846.900,00
24	Sekretariat Daerah	25.910.800,00		25.910.800,00
25	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	585.391.851,21		585.391.851,21
26	Badan Perencanaan, Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	2.653.700,00		2.653.700,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	22.216.450,00		22.216.450,00
28	Badan Pendapatan Daerah	415.017.813,00		415.017.813,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.309.121,00		1.309.121,00
30	Inspektorat Daerah	0,00		0,00
31	Kecamatan Batujajar	2.850.800,00		2.850.800,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	130.700,00		130.700,00

NO.	SKPD	Barang Pakai Habis (Rp)	Barang Tidak Pakai Habis (Rp)	Jumlah (Rp)
33	Kecamatan Gununghalu	193.600,00		193.600,00
34	Kecamatan Padalarang	630.000,00		630.000,00
35	Kecamatan Lembang	0,00		0,00
36	Kecamatan Sindangkerta	1.020.100,00		1.020.100,00
37	Kecamatan Cisarua	389.600,00		389.600,00
38	Kecamatan Ngamprah	0,00		0,00
39	Kecamatan Cikalong Wetan	466.700,00		466.700,00
40	Kecamatan Cipongkor	1.796.700,00		1.796.700,00
41	Kecamatan Saguling	0,00		0,00
42	Kecamatan Cililin	78.200,00		78.200,00
43	Kecamatan Parongpong	386.700,00		386.700,00
44	Kecamatan Cipatat	11.913.800,00		11.913.800,00
45	Kecamatan Cihampelas	472.600,00		472.600,00
46	Kecamatan Rongga	116.400,00		116.400,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	17.876.100,00		17.876.100,00
Jumlah		**52.836.061.638,36**	**18.062.919,00**	**52.854.924.657,36**

Penilaian saldo akhir persediaan menggunakan Metode *Perpetual* yaitu pencatatan dilakukan setiap ada persediaan yang masuk dan keluar, sehingga nilai/jumlah persediaan selalu ter-*update*. Metode Perpetual digunakan untuk mencatat jenis persediaan yang berkaitan dengan operasional utama SKPD dan sifatnya terus-menerus serta membutuhkan kontrol yang besar, seperti: obat-obatan di RSUD dan pupuk di Dinas Pertanian (Metode *Perpetual*) serta Penilaian persediaan menggunakan metode FIFO (*First In First Out*).

Informasi lebih lanjut mengenai rincian Saldo Persediaan TA 2025 berdasarkan SKPD pengelola pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat disajikan dalam **Lampiran 13**.

Terdapat persediaan yang telah kadaluarsa namun belum dimusnahkan sebesar Rp16.445.944,00 dengan rincian:

a. Dinas Kesehatan berupa obat dan bahan medis habis pakai sebesar Rp8.060.944,00 pada Puskesmas Lembang; dan
b. Dinas Perindustrian dan Perdagangan berupa karcis sebesar Rp8.385.000,00.

Adapun rincian barang dijabarkan pada **Lampiran 13a**.

5.3.1.2.1. Investasi Jangka Panjang permanen

Tabel 5.74
Rincian Investasi Jangka Panjang permanen per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Penyertaan Modal	54.435.826.535,00	54.258.204.546,00	177.621.989,00	0,33

Saldo Investasi Jangka Panjang permanen per 31 Desember 2025 sebesar Rp54.435.826.535,00 terdiri dari Penyertaan Modal perumda sebesar Rp34.435.829.320,00 dan Penyertaan Modal ke BJB sebesar Rp19.999.997.215,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

a. PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (PMgS) adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pertama di Kabupaten Bandung Barat yang didirikan pada tahun 2009 berdasarkan perda No. 21 Tahun 2009.perusahaan didirikan berdasarkan Akta Notaris Surjadi Jasin SH No.56 tanggal 8 November 2010. Akta pendirian tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan Surat Keputusan No. AHU-58074.AH.01.01 Tahun 2010 tentang Pengesahan Badan Hukum perseroan. Sesuai dengan pasal 3 Anggaran Dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan perusahaan adalah dalam bidang jasa. Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, perusahaan menjalankan sejumlah kegiatan yang meliputi:
   1) Mengadakan dan mengelola serta mengembangkan agrobisnis (*off farm*) dan kepariwisataan;
   2) Mengadakan dan mengelola, memproduksi, memelihara, mendistribusikan, menyalurkan, dan memperjualbelikan air bersih/air baku dan air minum; dan
   3) Mengadakan dan mengelola jasa penyediaan sarana dan prasarana PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat didirikan dengan jumlah modal disetor sebesar Rp5.050.000.000,00 terdiri atas saham:
      a) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat:10.000 saham dengan nilai Rp5.000.000.000,00,
      b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Bandung Barat "Wibawa Mukti Kerta Raharja": 100 saham dengan nilai Rp50.000.000,00.

   Sesuai dengan Akta Notaris DR. Ely Baharini, S.H., M.H., Sp.N. Nomor 155 tanggal 16 Mei 2014 tentang pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat, pemegang saham menyetujui penambahan modal Dasar perseroan menjadi Rp35.000.000.000,00 terdiri atas 70.000 saham, dengan nominal per lembar sebesar Rp500.000,00 terdiri atas saham:

a) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat: 70.000 saham dengan nilai Rp35.000.000.000,00; dan

b) Koperasi Pegawai Republik Indonesia Pemerintah Kabupaten Bandung Barat "Wibawa Mukti Kerta Raharja": 100 saham dengan nilai Rp50.000.000,00.

Penyetoran modal dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.75
Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

No	Tanggal	Jumlah (Rp)
1	2	3
1	17 November 2011	5.000.000.000,00
2	01 Maret 2013	5.000.000.000,00
3	21 November 2014	1.000.000.000,00
4	7 April 2015	5.400.000.000,00
5	10 Agustus 2015	3.600.000.000,00
6	22 Desember 2015	2.000.000.000,00
7	Maret 2016	5.000.000.000,00
8	Desember 2016	4.000.000.000,00
9	April 2017	4.000.000.000,00
Jumlah		**35.000.000.000,00**

Bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah, penyelenggaraan air minum yang selama ini dilakukan oleh PT. Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan sehingga perlu didirikan Perusahaan Umum Daerah Air Minum sesuai dengan peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Merujuk kepada PP No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD tersebut, Pemerintah Daerah melalui peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat No. 9 Tahun 2022 tanggal 8 Agustus 2022 membentuk **PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA WIBAWA MUKTI** (Perumdam Tirta Wibawa Mukti) yang merupakan pemisahan unit usaha air minum (*spin-off*) dari Badan Usaha Milik Daerah PT. PMgS. Pemisahan unit usaha air minum menyebabkan seluruh hak dan kewajiban termasuk hubungan hukum serta perizinan PT. PMgS terkait dengan bidang usaha pengelolaan dan penyelenggaraan sistem penyediaan air minum beralih kepada perumda Tirta Wibawa Mukti.

Investasi pada perumda Tirta Wibawa Mukti dinilai berdasarkan Metode Ekuitas untuk Investasi pada seluruh BUMD (tingkat kepemilikan lebih dari 50%) yaitu dengan

memperhitungkan kondisi/nilai hasil usaha dari Investasi (Laba/Rugi, perubahan ekuitas investasi dan setoran Dividen (Bagian Laba Pemda). Rincian perhitungan nilai Investasi/Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung Barat pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Wibawa Mukti per 31 Desember 2025, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.76
Investasi/Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Uraian perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada perumda Tirta Wibawa Mukti Bandung Barat	2025 (Audited) (Rp)
PENYERTAAN MODAL PEMDA	
Jumlah Modal yang telah disetor s.d. 31 Des 2025	35.000.000.000,00
Jumlah Tambahan Modal disetor s.d. 31 Des 2025	0,00
Jumlah Modal yg telah disetor s.d. 31 Des 2025	**35.000.000.000,00**
Laba Ditahan :	
Dividen Tahun Berjalan	(179.000.000,00)
Reklasifikasi	
Laba/(Rugi) tahun Berjalan	356.621.989,00
Laba/(Rugi) tahun lalu	(741.792.669,00)
Dividen tahun lalu	
Nilai Investasi TA 2025	**34.435.829.320,00**
Nilai Investasi TA 2024	**34.258.207.331,00**
Tambahan nilai Investasi TA 2025	177.621.989,00
Tambahan Modal Disetor TA 2025	0,00
Kenaikan/Penurunan nilai Investasi (koreksi ekuitas)	**177.621.989,00**

b. Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri A pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 5.263.157 lembar dengan harga penerbitan saham senilai Rp1.900,00 sehingga nilai total yang diinvestasi jangka pendek adalah sebesar Rp9.999.998.300,00. Pembelian saham tersebut telah ditetapkan dengan surat Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor: 900/Kep.662-Bag Ekon/2018 tentang Penyertaan Modal Daerah Kabupaten Bandung Barat ke Dalam Modal Saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat telah menerbitkan peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 6 Tahun 2015 tentang penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Saham perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk.

Dalam peraturan Daerah tersebut di atas terdapat perubahan yang memutuskan bahwa penambahan penyertaan modal saham PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk ditetapkan sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) sesuai dengan analisis penyertaan modal/investasi pemerintah daerah.

Pada TA 2022 pemerintah Kabupaten Bandung Barat melakukan Penambahan Modal Tanpa memberi Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMT HMETD) atas saham Seri B pada Bank BJB dengan jumlah saham yang beli sebanyak 7.380.073 lembar dengan nilai investasi sebesar Rp9.999.998.915,00.

Dengan penambahan tersebut di atas maka total saham Pemerintah Bandung Barat pada PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk terdiri dari Saham Seri A sebanyak 5.263.157 lembar dan Saham Seri B sebanyak 7.380.073 lembar dengan total keseluruhan nilai investasi Rp19.999.997.215,00.

5.3.1.3 Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu TA dan digunakan untuk penyelenggaraan kegiatan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dan pelayanan masyarakat. Aset Tetap diakui sebesar Harga Perolehannya.

Saldo Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp4.406.242.448.758,74 dan Rp4.338.244.561.427,25 jika dibandingkan dengan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp67.997.887.331,49 atau 1,57%, dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.77
Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Tanah	1.589.369.468.656,55	1.508.698.868.872,00	80.670.599.784,55	5,35
Peralatan dan Mesin	1.607.756.374.507,03	1.568.627.766.495,27	39.128.608.011,76	2,49
Gedung dan Bangunan	2.135.911.493.583,68	2.076.266.396.458,64	59.645.097.125,04	2,87
Jalan, Irigasi dan Jaringan	1.839.900.501.044,17	1.748.837.089.653,67	91.063.411.390,50	5,21
Aset Tetap Lainnya	121.189.585.921,23	119.291.118.897,23	1.898.467.024,00	1,59
Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.934.472.727,00	32.811.825.381,00	(3.877.352.654,00)	(11,82)
Akumulasi Penyusutan	(2.916.819.447.680,92)	(2.716.288.504.330,56)	(200.530.943.350,36)	7,38
JUMLAH	**4.406.242.448.758,74**	**4.338.244.561.427,25**	**67.997.887.331,49**	**1,57**

Rekapitulasi mutasi Aset Tetap sampai dengan 31 Desember 2025 per SKPD dan rekapan mutasi per Pemerintah Daerah pada dalam **Lampiran 14**.

5.3.1.3.1. Tanah

Tabel 5.78
Rincian Tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Tanah	1.589.369.468.656,55	1.508.698.868.872,00	80.670.599.784,55	5,35

Saldo Tanah Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.589.369.468.656,55 dan Rp1.508.698.868.872,00. Saldo Aset Tetap-Tanah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp80.670.599.784,55 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase peningkatan sebesar 5,35%.

Dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Penambahan pada TA 2025 sebesar Rp293.598.012.522,00 berupa:

a. Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp3.180.185.537,00;

b. Penerimaan Hibah sebesar Rp106.104.490.220,00 berupa:

1. Hibah Tanah TPU Perumahan Pangauban Silih Asih berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.03-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp55.424.000,00;
2. Hibah Tanah TPU Perumahang-Land Savona Hill berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.09-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp17.000.000,00;
3. Hibah Tanah TPU Perumahan G-Land Belinzona Residence berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.05-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp19.000.000,00;
4. Hibah Tanah TPU Perumahan Taman Sejuk Lestari berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.08-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp30.000.000,00;
5. Hibah Tanah TPU Perumahan Cluster Kalimaya berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.07-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp40.000.000,00;
6. Hibah Tanah TPU Perumahan Cluster Everton berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.06-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp78.000.000,00;

7. Hibah Tanah TPU Perumahan Bumi Wangsa berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.13-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp416.208.000,00;
8. Hibah Tanah TPU Perumahan Arcadia Town House berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.04-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp30.000.000,00;
9. Hibah Tanah TPU Perumahan Montana Cipageran Living berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.10-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp30.000.000,00;
10. Hibah Tanah TPU Perumahan Villa Taman Bunga berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.17-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp42.000.000,00;
11. Hibah Tanah TPU Perumahan The Valley City berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.16-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp126.000.000,00;
12. Hibah Tanah TPU Perumahanthe Emeralda Resort berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.14-Disperkim/202 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp150.000.000,00;
13. Hibah Tanah TPU Perumahan Rumah Malaya berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.12-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp70.000.000,00;
14. Hibah Tanah TPU Perumahan Royal Parahyangan berdasarkan BAST nomor 600.2/BAAST.11-Disperkim/2025 tanggal 18 Februari 2025 sebesar Rp19.000.000,00;
15. Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp13.726.920.000,00;
16. Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp9.463.080.000,00;
17. Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp42.551.913.600,00;

18. Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp33.626.544,00; dan
19. Hibah Tanah PSU Perumahan Taman Firdaus Indah berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.60/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp5.613.400.620,00;

c. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp14.248.683.037,00;
d. Reklas antar Kartu Inventaris Barang (KIB) sebesar Rp6.400.257.500,00 berasal dari reklas dari Konstruksi Dalam Pengerjaan ke Aset tetap Tanah berupa tanah untuk *fly over* Cimareme;
e. Koreksi Pencatatan sebesar Rp11.993.700.728,00 terdiri dari:
   1) Koreksi nilai PSU Perumahan Setiabudi Regency sebesar Rp7.141.000.000,00;
   2) Koreksi bertambah atas nilai atas penilaian appraisal atas serah terima tanah yang belum dilengkapi nilai perolehan sebesar Rp4.802.700.728,00; dan
   3) Koreksi bertambah atas pencatatan atas tanah berupa tanah yang berasal dari hibah pada tahun 2013 dan dicatat pada tahun 2025 sebesar Rp50.000.000,00;
g. Koreksi Pencatatan Penggabungan sebesar Rp2.195.500.000,00 atas koreksi tanah PSU Perumahan Setiabudi Regency; dan
h. Koreksi Pencatatan Pecah Data sebesar Rp149.475.195.500,00 atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2024 yaitu enam ruas jalan tercatat pada KIB A belum mencerminkan kondisi sebenarnya yang dicatat gabungan seharusnya dicatat masing-masing bidang tanah.

1.2 Pengurangan pada TA 2025 sebesar Rp212.927.412.737,45 berupa:
a. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp14.248.683.037,00;
b. Reklasifikasi masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp550.000,00 ke Konstruksi Dalam Pengerjaan;
c. Reklas Aset sebesar Rp40.825.833.900,45 terdiri dari:
   1) Reklas dari aset tetap tanah berupa barang milik daerah pada Dinas Pendidikan dalam proses pemindahtanganan (*Ruislagh*) berdasarkan perjanian nomor: 000.2.3.2/BPTM.39-BKAD/2025 dan 201/JMF/05-25 tanggal 19 mei 2025 berupa 1 bidang tanah senilai Rp75.264.000,00;
   2) Reklas ke aset lain-lain berupa sebagian tanah yang terdampak tukar menukar dengan KCIC sebesar Rp822.069.900,45; dan

3) Reklas ke Aset Lainnya (aset lain-lain) berupa Tanah Lapangan Pacuan Kuda sedang dalam proses Hibah ke Kejaksaan Republik Indonesia sebesar Rp39.928.500.000,00.

d. Koreksi Pencatatan sebesar Rp6.181.650.300,00 terdiri dari:

1) Koreksi berkurang sebesar Rp49.650.300,00 merupakan Belanja Modal Aset Tetap tanah berupa pekerjaan Jasa Konsultansi Appraisal Tanah untuk pengadaan lahan SDN Babakan Talang 1 Kecamatan Rongga, namun tidak dicatat sebagai Aset Tetap Tanah dikarenakan pembelian tanah tidak jadi dilaksanakan akibat tidak tercapainya kesepakatan harga antara hasil penilaian tim appraisal dengan harga yang ditawarkan oleh warga selaku pemilik tanah; dan

2) Koreksi berkurang atas nilai dari Aset Tetap Tanah PSU Perumahan Setiabudi Regency sebesar Rp6.132.000.000,00;

e. Koreksi Pencatatan Penggabungan sebesar Rp2.195.500.000,00 atas koreksi tanah PSU Perumahan Setiabudi Regency; dan

f. Koreksi Pencatatan Pecah Data sebesar Rp149.475.195.500,00 atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2024 yaitu enam ruas jalan tercatat pada KIB A belum mencerminkan kondisi sebenarnya yang dicatat gabungan seharusnya dicatat masing-masing bidang tanah.

1.3 Data Sertifikat Tanah

Jumlah bidang tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sebanyak 3.776, terdiri dari:

a. Bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan TA 2025 sebanyak 1.789 bidang; dan

b. Bidang tanah belum bersertifikat 1.987 bidang

- Bidang tanah yang sudah proses pengukuran 397 bidang; dan
- Bidang tanah yang belum proses pengukuran 1.590 bidang.

1.4 Tanah Bersengketa

Dari total Aset Tetap-Tanah tersebut di atas terdapat beberapa bidang tanah yang menjadi sengketa. Dengan rincian perkembangan perkara sebagai berikut:

Tabel 5.79
Daftar Kasus Sengketa Tanah pada Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

No	Pemda	Nilai (Rp)	Permasalahan	Sudah/ Belum ada SK Kejaksaan	Progres Penyelesaian
1	Tanah lapang Sepak bola	28.173.000.000,00	Bahwa Gunung Sahari/ Lapangan Sepak Bola Kabupaten Bandung Barat sesuai SK Bupati Bandung Nomor : 030/Kep. 555-	Putusan Kasasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Perkara Nomor : 2540 K/ Pdt/ 2019	Bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat sedang berproses menempuh Novum (bukti)baru untuk pelaksanaan proses sidang kembali

No	Pemda	Nilai (Rp)	Permasalahan	Sudah/ Belum ada SK Kejaksaan	Progres Penyelesaian
			Aset/2022 Tanggal 19 Desember 2012 tetapi dalam perjalananya pada tahun 2012 telah terbit sertifikat nomor 4359 atas nama Iwan Santoso Hartono dan IMB Nomor : 6442/128/176/BPMPPT atas nama Iwan Santoso Hartono dan Rekan		
2	Tanah Pasar Panorama	29.911.000.000,00	Bahwa Pasar Panorama Kabupaten Bandung Barat sesuai SK Bupati Bandung Nomor : 030/Kep. 555-Aset/2022 Tanggal 19 Desember 2012 tetapi dalam perjalananya pada tahun 2016 diajukan gugatan oleh ahli waris Adi warta (H. Rudi Alamsyah)	Pengadilan Negeri Bale Endah dan telah diputus hingga Putusan PK oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan No. Perkara Perdata : 155/Pdt/G/2016/PN.Blb Jo. 365/Pdt/2017/PT.Bdg Jo. 2429 K/Pdt/2019 Jo. 446 PK/Pdt/2020 Jo. 871 PK/Pdt/2021	Bahwa berdasarkan hasil pembahasan-pembahasan tersebut sebagai upaya hukum dalam mempertahankan Aset Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan Objek Pasar Panorama Lembang yang telah dikalahkan dengan Putusan PK Nomor 446 PK/Pdt/2020, maka terhadap dokumen yang diduga Palsu Keterangannya/penggunaan dokumen yang bukan seharusnya dllakukan upaya hukum Pidana dengan cara melaporkan hal tersebut kepada Pihak Kepolisian Republik Indonesia, yang kemudian apabila terbukti terhadap putusan pidana tersebut akan dijadikan sebagai dasar dalam melakukan upaya hukum keperdataan kembali.

1.5 Kewajiban Kontinjensi

Bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat memiliki aset tetap berupa tanah seluas 24.926 m² yang sampai saat ini dipergunakan untuk Pasar Panorama Lembang. Adapun dasar kepemilikan atas tanah tersebut adalah sebagai berikut:

1. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-ASET/2010 tanggal 17 Juni 2010 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2010;
2. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.553-ASET/2012 tanggal 19 Desember 2012 tentang Tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Mencabut Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.229-ASET/2010);
3. Surat Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.581-ASET/2013 tanggal 16 Desember 2013 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bandung Nomor 030/Kep.553-ASET/2012 tentang Penghapusan Barang Milik Pemerintah

Kabupaten Bandung yang diserahkan dari Pemerintah Kabupaten Bandung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;

4. Berita Acara Serah Terima Pemindahtanganan Aset Nomor: 030/912/Aset tanggal 1 Juli 2010 antara Bupati Kabupaten Bandung dan Bupati Kabupaten Bandung Barat (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat); dan
5. Tercatat dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Bahwa terhadap aset tanah sebagaimana tersebut diatas, muncul gugatan yang diajukan oleh Ahli Waris Adiwarta yaitu Sdr. H. Rudy Alamsjah Cs. dengan nomor perkara gugatan 155/Pdt.G/2016/PN.Blb dan Ahli Waris Ny. Soepiah alias Mafalda merupakan Anak Angkat Sah secara hukum dari pasangan suami istri Pietro Antonio Ursune dengan Oerki yaitu Ronnie Noma dengan nomor perkara gugatan 248/Pdt.G/2018. Adapun putusan sebagaimana dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 155/Pdt.G/2016/PN.Blb Tanggal Putusan 5 april 2017 dengan amar putusan: Gugatan Penggugat (Drs. H. Rudy Alamsjah) ditolak (Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Pihak yang dimenangkan dalam Gugatan);
2. Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/Pdt./2017/PT.Bdg Tanggal Putusan 25 Oktober 2017 dengan amar putusan: Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 155/Pdt.G/2016/PN.Blb (Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Pihak yang dikalahkan dalam Gugatan);
3. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 2429 K/Pdt/2018 Tanggal Putusan 30 Oktober 2018 dengan amar putusan: mengabulkan kasasi dari Bupati Kabupaten Bandung Barat dan membatalkan Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 365/Pdt./2017/PT.Bdg yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung No. 155/Pdt.G/2016/PN.Blb (Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Pihak yang dimenangkan dalam Gugatan);
4. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 446 PK/Pdt/2020, pemohon Drs. H. Rudy Alamsjah Tanggal Putusan 8 Juli 2020 dengan amar putusan: mengabulkan gugatan penggugat a.n Drs. H. Rudy Alamsjah dan menyatakan sebidang tanah Persil 74, D.III, Kohir/C Nomor 46, seluas 23.370 m², terletak di blok pasar Desa Lembang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Pihak yang dikalahkan dalam Gugatan); dan

5. Putusan Peninjauan Kembali II Mahkamah Agung Nomor 871 PK/Pdt/2021 Tanggal Putusan 20 desember 2021 dengan amar putusan: Niet Ontvankelijke (NO) (Pihak Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai Pihak yang dikalahkan dalam Gugatan).

Sehubungan dengan hal tersebut terdapat kewajiban kontijensi yang timbul berkaitan dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 446 PK/Pdt/2020, pemohon Drs. H. Rudy Alamsjah Tanggal Putusan 8 Juli 2020 yaitu menyerahkan aset tanah tersebut kepada penggugat a.n. Drs. H. Rudy Alamsjah atau mengganti rugi sebesar Rp116.185.000.000,00 (seratus enam belas miliar seratus delapan puluh lima juta rupiah). Namun Pemerintah Kabupaten Bandung Barat sebagai pihak yang dikalahkan, pada saat ini berupaya melakukan upaya hukum luar biasa, yaitu melalui upaya hukum Peninjauan kembali yang dikecualikan dengan melakukan upaya hukum pidana terlebih dahulu untuk dapat membuktikan adanya tindak pidana pada saat penyampaian novum yang diajukan oleh Ahli Waris, yaitu berupa Surat Keterangan Kepala Desa Lembang yang sudah dicabut/tidak berlaku. Selanjutnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat melaporkan dugaan tindak pidana sumpah palsu/keterangan palsu. Dokumen pendukungnya disampaikan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan keterangan dari Pemerintah Desa Lembang Nomor: 593/PATED-02/I/2021 telah mencabut keterangan tanah dengan Register Nomor: 593/172/Pem tanggal 17 Desember 2012 tentang persil 74 D. III C. 46 Desa Lembang seluas 23.370 M² atas nama Adiwarta alias Adi dan Register Nomor: 593/06/Pem tanggal 15 April 2013 tentang persil 74 D.III C 46 seluas 23.370 M² atas nama Adiwarta alias Adi dengan lokasi Blok Pasar Lembang dengan pemohon Drs. H. Rudy Alamsjah, surat pencabutan sebagaimana tercantum dalam buku register Desa Lembang Nomor 593/25/Pem tanggal 25 April 2013 pencabutan tersebut dilakukan karena terjadi kesalahan keterangan dimana keterangan yang benar adalah Persil 74. DIII C 46 seluas 23.370 M² atas nama Adiwarta alias Adi tidak teretak di Blok Pasar Lembang/Pasar Panorama Lembang;
2. Surat Kepala Desa Lembang Nomor: 141.1/05/Pem tanggal 25 Januari 2021 perihal Surat Balasan bahwa menindak lanjuti surat dari Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat Nomor: 141.1/183/Baghuk/2021 tentang penjelasan keterangan Kepala Desa Lembang Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, perihal Kepala Desa Lembang telah mencabut keterangan tanah, dengan Register Nomor: 593/172/Pem Tanggal 17 Desember 2012 tentang persil 74 D.III C 46 seluas 23.370 M² atas nama Adiwarta alias Adi dengan lokasi Blok Pasar Lembang dengan pemohon Drs. H.

Rudy Alamsjah, surat pencabutan sebagaimana tercantum dalam buku register Desa Lembang Nomor 593/25/Pem tanggal 25 April 2013. pencabutan tersebut dilakukan karena terjadi kesalahan keterangan dimana keterangan yang benar adalah Persil 74. DIII C 46 seluas 23.370 M^2 atas nama Adiwarta alias Adi tidak teretak di Blok Pasar Lembang/Pasar Panorama Lembang.

Keterangan ini dibuat berdasarkan:

a. Surat Keterangan Kepala Desa Lembang tanggal 18 April 2021 nomor 593/97/Pem dan Register Camat Lembang Nomor: 593.3/05/Pem tanggal 25 Mei 2001 berdasarkan surat Direktorat Agraria tanggal 2 Agustus 1985 nomor: 593.01/704/Ditag/1985, bahwa tanah yang dipergunakan Pasar Lembang tidak bersengketa dan belum bersertifikat; dan
b. Berdasarkan Peta Tanah yang Berada di Desa Lembang bahwa Pasar Lembang berdiri diatas RVE 673 Blok Cijeruk.

3. Laporan/Pengaduan dari Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ke Polres Cimahi tentang Dugaan Tindak Pidana Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu. Bukti permulaan adanya indikasi tindak pidana sumpah palsu dan keterangan palsu yang diketahui pada tanggal 25 Januari 2021 di Kantor Pemda Kab. Bandung Barat Jl. Kecamatan Ngamprah Kabupaten Bandung Barat, awal mula kejadian dengan cara terlapor mengajukan proses PK ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan Negeri Bale Bandung dan terlapor menyampaikan dan disumpah memberikan keterangan dengan dasar Surat Leter C Desa Kohir No. 46 Persil 74 D.III, Desa Lembang an. ADIWARTA alias ADI, bahwa lokasi Blok Pasar Panorama Lembang, namun sebenarnya lokasi Blok Pasar Panorama adalah berdiri diatas tanah RVE 673 Blk Cijeruk, sedangkan C Desa Kohir No. 46 Persil 74 D.III, Desa Lembang an. ADIWARTA Alias ADI, berada di seberang selatan pasar, berdasarkan surat keterangan Desa Lembang tgl 25 Januari 2021, sehingga atas kejadian tersebut pihak Pemda Kab. Bandung Barat merasa dirugikan.

1.6 Informasi Tambahan

1. Terdapat *Ruislagh* antara Dinas Pendidikan dengan Jamavac tetapi belum dicatat pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2025 belum ada Berita Acara Serah Terima antara Jamavac dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat; dan
2. Terdapat *Ruislagh* antara Dinas Perikanan dan Peternakan dengan KCIC tetapi belum dicatat pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat

dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2025 SK Penghapusan masih dalam proses dan akan dicatat pada TA 2026.

Adapun rincian Aset Tanah TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 15**.

5.3.1.3.2. Peralatan dan Mesin

Tabel 5.80

Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Alat Besar	40.417.259.961,00	37.128.254.251,00	3.289.005.710,00	8,86
Alat Angkutan	147.838.036.455,44	137.663.083.824,44	10.174.952.631,00	7,39
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	11.901.077.120,96	11.721.611.011,96	179.466.109,00	1,53
Alat Pertanian	16.529.382.237,29	22.119.182.282,01	(5.589.800.044,72)	(25,27)
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	522.184.923.903,06	459.163.516.912,27	63.001.406.990,79	13,72
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	72.020.364.563,88	62.096.282.647,96	9.924.081.915,92	15,98
Alat Kedokteran Dan Kesehatan	310.291.739.099,44	293.097.814.654,78	17.193.924.444,66	5,87
Alat Laboratorium	181.808.827.733,37	176.829.803.067,37	4.979.024.666,00	2,82
Alat Persenjataan	1.197.765.654,81	5.873.384.805,85	(4.675.619.151,04)	(79,61)
Komputer	221.116.903.002,74	282.711.260.049,59	(61.594.357.046,85)	(21,79)
Alat Eksplorasi	52.075.000,00	99.362.817,00	(47.287.817,00)	(47,59)
Alat Pengeboran	15.910.900,00	18.410.900,00	(2.500.000,00)	(13,58)
Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	568.015.526,00	537.575.926,00	30.439.600,00	5,66
Alat Bantu Eksplorasi	0,00	5.500.000,00	(5.500.000,00)	(100,00)
Alat Keselamatan Kerja	13.094.954.549,87	12.231.199.631,87	863.754.918,00	7,06
Alat Peraga	27.095.139.515,14	27.093.154.315,14	1.985.200,00	0,01
Peralatan Proses/Produksi	2.014.760.700,32	995.174.714,32	1.019.585.986,00	102,45
Rambu - Rambu	31.995.195.057,26	31.635.611.357,26	359.583.700,00	1,14
Peralatan Olah Raga	7.634.043.526,45	7.607.583.326,45	26.460.200,00	0,35
JUMLAH	**1.607.756.374.507,03**	**1.568.627.766.495,27**	**39.128.608.011,76**	**2,49**

Saldo Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.607.756.374.507,03 dan Rp1.568.627.766.495,27. Saldo Aset Tetap-Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp39.128.608.011,76 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase bertambah sebesar 2,49%, dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Penambahan pada TA 2025 sebesar Rp172.659.939.655,84 berupa:

1. Realisasi Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp129.103.772.848,00 terdiri dari:
   a. Realisasi Belanja Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025 sebesar Rp128.565.070.832,00; dan
   b. Pembayaran Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun 2024 sebesar Rp538.702.016,00.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dicatat sebagai Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.063.050.734,00 (dipastikan untuk workstation nilai pemeliharaan rutin dikeluarkan);
3. Penerimaan Barang dari Hutang Belanja Modal TA 2025 sebesar Rp108.733.362,00;
4. Reklasifikasi masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp6.174.485.113,00 terdiri dari:
   a. Dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.195.263.913,00;
   b. Dari Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.791.617.600,00; dan
   c. Dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp187.603.600,00.
5. Penerimaan Hibah sebesar Rp3.783.103.635,00 terdiri dari:
   a. Penerimaan Hibah pada Kementerian Kesehatan sebesar sebesar Rp74.657.635,00 berupa:
      1) Hibah Coolbox dari Kemenkes berdasarkan BAST nomor KN.01.08/C.IV/2354/2025 tanggal 15 Agustus 2025 sebesar Rp3.658.635,00;
      2) Hibah Dental Unit dari Kemenkes berdasarkan BAST nomor 53/DC/VIII/2025 tanggal 19 Agustus sebesar Rp60.639.000,00; dan
      3) Hibah Tensimeter dari Kemenkes berdasarkan BAST nomor – tanggal 2 Desember sebesar Rp10.360.000,00.
   b. Hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat sebesar Rp3.708.446.000,00 berupa:
      1) Lemari Besi (Kolecer) sebanyak 4 unit senilai Rp29.146.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 38/KU.03.11.02/BPKAD dan 000.2.3.2/BAST.50/BKAD/2025 tanggal 30 April 2025;
      2) Bus (Penumpang 30 Orang Keatas) sebanyak 1 unit senilai Rp1.265.000.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 38/KU.03.11.02/BPKAD dan 000.2.3.2/BAST.50/BKAD/2025 tanggal 30 April 2025; dan
      3) Micro Bus (Penumpang 15 S/D 29 Orang) sebanyak 2 unit senilai Rp2.414.300.000,00 berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor:

38/KU.03.11.02/BPKAD dan 000.2.3.2/BAST.50/BKAD/2025 tanggal 30 April 2025.

6. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp25.315.914.000,00;
7. Reklas Aset sebesar Rp136.500.000,00 berupa koreksi reklas dikarenakan kesalahan pada saat usulan pemindahtanganan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berupa kendaraan dinas roda empat dengan nomor polisi D 8215 U yaitu koreksi reklas dikarenakan kesalahan usulan pemindahtanganan yang seharusnya nopol D 8216 U; dan
8. Reklas Perubahan Kode Barang sebesar Rp6.999.036.963,84 merupakan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang berupa:
   a. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang TA 2025 sebesar Rp6.575.736.963,84; dan
   b. Tindak Lanjut Hasil Inevntarisasi Perubahan Kode Barang TA 2024 yang baru ditindaklanjuti di TA 2025 sebesar Rp423.300.000,00.

1.2 Pengurangan pada TA 2025 sebesar Rp133.531.331.644,08 berupa:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp25.315.914.000,00;
2. Reklasifikasi keluar akibat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp1.949.250.108,00 dengan rincian:
   a. Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp456.991.808,00;
   b. Ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp1.049.758.300,00; dan
   c. Ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp442.500.000,00.
3. Reklas Aset sebesar Rp96.682.263.241,36 terdiri dari:
   a. Berdasarkan hasil Inventarisasi sebesar Rp87.584.514.334,55 berupa:
      1) Laporan Hasil Inventarisasi Hilang Kecurian TA 2025 sebesar Rp116.556.800,00;
      2) Laporan Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan sebesar Rp46.518.883.781,05 terdiri dari:
         a) Hasil Inventarisasi TA 2025 sebesar Rp46.320.707.776,05; dan
         b) Hasil Inventarisasi TA 2024 yang baru ditindaklanjuti di TA 2025 sebesar Rp198.176.005,00.
      3) Laporan Hasil Inventarisasi Perubahan Fisik Barang TA 2025 sebesar Rp40.850.277.903,50; dan
      4) Laporan Hasil Inventarisasi Tercatat Ganda TA 2025 sebesar Rp98.795.850,00.

b. Proses Pemusnahan/Pemindahtanganan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp9.097.748.906,81 berupa:
   1) Proses Pemindahtanganan/Pemusnahan sebesar Rp8.770.408.906,81; dan
   2) Proses Tuntutan ganti Rugi sebesar Rp327.340.000,00.

4. Reklas Perubahan Kode Barang sebesar Rp6.999.036.963,84 merupakan Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang berupa:
   a. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang TA 2025 sebesar Rp6.575.736.963,84; dan
   b. Tindak Lanjut Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang TA 2024 namun baru ditindaklanjuti di TA 2025 sebesar Rp423.300.000,00.
5. Koreksi Pencatatan sebesar Rp174.807.000,00 merupakan koreksi pencatatan kendaraan *double* catat;
6. Reklas ke Ektrakomptabel sebesar Rp1.896.015.314,88 dikarenakan nilai perolehan di bawah batas kapitalisasi Aset Tetap; dan
7. Pembayaran Hutang Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2024 sebesar sebesar Rp538.702.016,00.

1.3 Informasi Tambahan

Terdapat *Ruislagh* antara Dinas Perikanan dan Peternakan dengan KCIC tetapi belum dicatat pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2025 SK Penghapusan masih dalam proses dan akan dicatat pada TA 2026.

Adapun rincian Aset Tetap Peralatan dan Mesin TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 16.**

5.3.1.3.3. Gedung dan Bangunan

Tabel 5.81

Rincian Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Bangunan Gedung	2.085.470.962.968,52	2.030.861.443.327,98	54.609.519.640,54	2,69
Monumen	762.985.500,00	762.985.500,00	0,00	0,00
Bangunan Menara	161.385.571,00	161.385.571,00	0,00	0,00
Tugu Titik Kontrol/Pasti	49.516.159.544,16	44.460.582.059,66	5.035.577.484,50	11,32
JUMLAH	**2.135.911.493.583,68**	**2.076.266.396.458,64**	**59.645.097.125,04**	**2,87**

Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp2.135.911.493.583,68 dan Rp2.076.266.396.458,64. Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp59.645.097.125,04 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase bertambah sebesar 2,87%.

1.1 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp98.867.211.799,54 berasal dari:

1. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp66.813.132.281,00 terdiri dari:
   a. Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025 sebesar Rp66.530.362.011,00 ; dan
   b. Pembayaran Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp282.770.270,00.
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dicatat sebagai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.078.036.701,54;
3. Penerimaan Barang dari Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2025 sebesar Rp20.104.730,00;
4. Reklasifikasi Belanja masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp1.236.223.511,00 terdiri dari:
   a) Dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp456.991.808,00; dan
   b) Dari Belanja Modal Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp779.231.703,00.
5. Penerimaan Hibah sebesar Rp7.498.200.032,00 terdiri dari:
   a) Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp86.400.000,00;
   b) Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp1.003.200.032,00;
   c) Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp3.581.200.000,00;
   d) Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp1.694.900.000,00; dan

e) Hibah Tanah PSU Perumahan Taman Firdaus Indah berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.60/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp1.132.500.000,00.

6. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp19.038.744.274,00; dan
7. Koreksi Pencatatan sebesar Rp182.770.270,00 berasal dari pencatatan Aset Tetap Gedung Bangunan dari Hutang Belanja TA 2024 yang belum tercatat di Kartu Inventaris Barang.

1.2 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada TA 2025 sebesar Rp39.222.114.674,50 berupa:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp19.038.744.274,00;
2. Reklasifikasi Belanja keluar akibat kesalahan klasifikasi belanja sebesar Rp9.702.870.376,50 terdiri dari:
   a. Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.195.263.913,00;
   b. Ke Aset Tetap Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp4.401.200.358,50; dan
   c. Ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp2.106.406.105,00.
3. Reklas Aset sebesar Rp10.188.304.701,00 dikarenakan dalam proses pemindahtanganan;
4. Reklas ke Ekstrakomptabel sebesar Rp9.425.053,00 dikarenakan nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi Aset Tetap; dan
5. Pembayaran Hutang Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp282.770.270,00.

1.3 Informasi Tambahan

Terdapat *Ruislagh* antara Dinas Perikanan dan Peternakan dengan KCIC tetapi belum dicatat pada Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dikarenakan sampai dengan 31 Desember 2025 SK Penghapusan masih dalam proses dan akan dicatat pada TA 2026.

Adapun rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 17**.

Terdapat pula penerimaan uang untuk perbaikan gedung dan bangunan yang berasal dari dana revitalisasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebesar Rp13.290.916.941,00 namun belum terdapat Berita Acara Serah Terima (BAST) Aset dari Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dan Tim Teknis ke Dinas Pendidikan dengan rincian pada **Lampiran 17a** dan **17b**.

5.3.1.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Tabel 5.82

Rincian Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Jalan Dan Jembatan	1.411.617.115.590,67	1.338.683.091.444,17	72.934.024.146,50	5,45
Bangunan Air	390.368.982.248,54	373.297.825.413,54	17.071.156.835,00	4,57
Instalasi	23.107.474.828,96	22.288.994.419,96	818.480.409,00	3,67
Jaringan	14.806.928.376,00	14.567.178.376,00	239.750.000,00	1,65
JUMLAH	**1.839.900.501.044,17**	**1.748.837.089.653,67**	**91.063.411.390,50**	**5,21**

Saldo Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp1.839.900.501.044,17 dan Rp1.748.837.089.653,67. Saldo Aset Tetap-Jalan Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp91.063.411.390,50 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase bertambah sebesar 5,21 % dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp117.627.928.455,50 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan TA 2025 sebesar Rp78.032.212.447,00;
2. Realisasi Belanja Barang dan Jasa yang dicatat sebagai Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan di TA 2025 sebesar Rp341.560.119,00;
3. Penerimaan Hibah sebesar Rp16.012.094.894,00 terdiri dari:
   a) Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp1.878.532.750,00;
   b) Hibah Tanah PSU Perumahan Awani Residence II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.64/DISPERKIM/2025 tanggal 11 Agustus 2025 sebesar Rp2.274.582.000,00;
   c) Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency I berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp3.343.800.000,00;
   d) Hibah Tanah PSU Perumahan Batujajar Regency II berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.62/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp1.561.200.000,00;

e) Hibah Tanah PSU Perumahan Taman Firdaus Indah berdasarkan BAST nomor 600.2/BAST.60/Disperkim/2025 tanggal 07 Juli 2025 sebesar Rp927.629.000,00; dan

f) Hibah Kementerian PU berupa Jembatan Penyebrangan Orang (Jembatan gantung Pejalan Kaki Cintakarya) yang terletak di Desa Cintakarya Kecamatan Sindangkerta berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Nomor: 59.1/BAST-BMN/Bb6.10/2025 tanggal 28 Februari 2025 sebesar Rp6.026.351.144,00.

4. Reklasifikasi masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja Rp4.401.200.358,50 berasal dari Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
5. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp1.710.950.637,00; dan
6. Koreksi Pencatatan sebesar Rp17.129.910.000,00 atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2024 yaitu enam ruas jalan tercatat pada KIB D belum mencerminkan kondisi sebenarnya yang dicatat gabungan seharusnya dicatat masing-masing ruas Jalan Jaringan Irigasi.

1.2 Pengurangan pada tahun 2025 sebesar Rp26.564.517.065,00 terdiri dari:

1. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp1.710.950.637,00
2. Reklasifikasi keluar akibat kesalahan klasifikasi belanja Rp3.570.849.303,00 terdiri dari:
   a. Ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.791.617.600,00; dan
   b. Ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp779.231.703,00.
3. Reklas Aset sebesar Rp4.152.807.125,00 dalam proses pemindahtanganan berupa jalan,jaringan dan irigasi yang terdampak tukar menukar barang milik daerah antara Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat dengan PT. Kereta Cepat Indonesia China dan PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia; dan
4. Koreksi Pencatatan sebesar 17.129.910.000,00 atas tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan TA 2024 yaitu enam ruas jalan tercatat pada KIB D belum mencerminkan kondisi sebenarnya yang dicatat gabungan seharusnya dicatat masing-masing ruas Jalan Jaringan Irigasi.

Adapun rincian Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 18**.

5.3.1.3.5. Aset Tetap Lainnya

Tabel 5.83

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Bahan Perpustakaan	105.954.087.195,05	104.967.916.605,05	986.170.590,00	0,94
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	11.948.789.134,96	10.986.406.034,96	962.383.100,00	8,76
Hewan	155.276.665,00	205.363.331,00	(50.086.666,00)	(24,39)
Tanaman	2.064.266.245,22	2.064.266.245,22	0,00	0,00
Aset Tetap Dalam Renovasi	1.067.166.681,00	1.067.166.681,00	0,00	0,00
JUMLAH	**121.189.585.921,23**	**119.291.118.897,23**	**1.898.467.024,00**	**1,59**

Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp121.189.585.921,23 dan Rp119.291.118.897,23 Saldo Aset Tetap-Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 bertambah sebesar Rp1.898.467.024,00 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase berkurang sebesar 1,59 %.

1.1 Penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp23.717.770.610,00 terdiri dari:

1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2025 sebesar Rp22.692.669.310,00; dan
2. Reklasifikasi masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja Rp1.049.758.300,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

1.2 Pengurangan pada tahun 2025 sebesar Rp21.819.303.586,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi keluar akibat kesalahan klasifikasi belanja Rp187.603.600,00 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
2. Reklas Aset sebesar Rp50.086.666,00 merupakan proses penghapusan atas hewan Sapi yang mati; dan
3. Kapitalisasi berupa reklas ke ektrakomptabel sebesar Rp21.606.270.320,00 dikarenakan nilai perolehan dibawah batas kapitalisasi Aset Tetap.

Adapun rincian Aset Tetap Lainnya TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 19**.

5.3.1.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Tabel 5.84
Rincian Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Konstruksi Dalam Pengerjaan	28.934.472.727,00	32.811.825.381,00	(3.877.352.654,00)	(11,82)

Saldo Aset Tetap – Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp28.934.472.727,00 dan Rp32.811.825.381,00. Saldo Aset Tetap--Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 terjadi penurunan sebesar Rp3.877.352.654,00 dibanding saldo per 31 Desember 2024 dengan persentase berkurang sebesar 11,82%.

1.1 Penambahan TA 2025 sebesar Rp2.605.154.846,00 berupa:

1. Berasal dari reklasifikasi masuk karena Belanja Barang dan Jasa belum selesai pengerjaannya Rp498.198.741,00; dan
2. Reklasifikasi masuk akibat kesalahan klasifikasi belanja Rp2.106.956.105,00 berasal dari:
   a. Belanja Modal Tanah sebesar Rp550.000,00; dan
   b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp2.106.406.405,00.

1.2 Pengurangan TA 2025 sebesar Rp6.482.507.500,00 terdiri dari:

1. Reklas dikarenakan sudah selesai pekerjaan sebesar Rp6.400.257.500,00; dan
2. Reklas ke Aset Lain-lain dikarenakan pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan sebesar Rp82.250.000,00.

Adapun rincian nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan pada masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 20.**

5.3.1.3.7. Akumulasi Penyusutan

Tabel 5.85
Rincian Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(1.308.461.997.092,32)	(1.257.928.829.869,43)	(50.533.167.222,89)	4,02
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(543.555.626.080,92)	(488.623.847.727,52)	(54.931.778.353,40)	11,24
Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	(1.064.801.824.507,68)	(969.735.826.733,61)	(95.065.997.774,07)	9,80

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
JUMLAH	(2.916.819.447.680,92)	(2.716.288.504.330,56)	(200.530.943.350,36)	7,38

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aset yang bersangkutan.

Adapun rincian Mutasi Akumulasi Penyusutan TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 21.**

Dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Penambahan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp327.120.261.365,37 berupa:

a. Beban Akumulasi Penyusutan sebesar Rp299.062.951.736,71 terdiri dari:
   1) Beban Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp142.012.970.443,85;
   2) Beban Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.402.168.342,88; dan
   3) Beban Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp98.647.812.949,98.
b. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp11.757.334.120,00 terdiri dari:
   1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.802.271.000,00; dan
   2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp8.955.063.120,00.
c. Mutasi Akumulasi Penyusutan antar Perangkat Daerah sebesar Rp10.344.556.377,63 terdiri dari:
   1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.470.908.672,60; dan
   2) Akumulasi Penyusutan gedung dan Bangunan sebesar Rp873.647.705,03.
d. Reklas Akumulasi Penyusutan antar KIB sebesar Rp5.832.569.131,03 berasal dari akumulasi penyusutan Peralan dan Mesin; dan
e. Reklas Akumulasi Penyusutan dari Aset Lainnya sebesar Rp122.850.000,00 berasal dari akumulasi penyusutan Peralan dan Mesin.

1.2 Pengurangan Akumulasi Penyusutan sebesar Rp126.589.318.015,01 berupa:

a. Mutasi Akumulasi Penyusutan antar Perangkat Daerah sebesar Rp10.344.556.377,63 terdiri dari:
   1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp9.470.908.672,60; dan
   2) Akumulasi Penyusutan gedung dan Bangunan sebesar Rp873.647.705,03.
b. Reklas Akumulasi Penyusutan antar KIB sebesar Rp5.933.868.649,00 berasal dari Akumulasi Penyusutan Peralan dan Mesin;
c. Reklas Akumulasi Penyusutan ke Aset Lainnya sebesar Rp99.855.864.888,38 terdiri dari:
   1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp94.126.542.602,99;
   2) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.470.389.989,48; dan
   3) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp2.258.932.295,91.
d. Koreksi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp10.455.028.100,00 terdiri dari:
   1) Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp177.082.100,00; dan
   2) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp10.277.946.000,00.

5.3.1.4 Aset Lainnya

Tabel 5.86
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	16.038.262.419,95	17.766.282.718,05	(1.728.020.298,10)	(9,73)
Kemitraan Dengan Pihak Tiga	53.999.373.530,00	53.999.373.530,00	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	19.876.091.108,00	17.978.579.548,00	1.897.511.560,00	10,55
Aset Lain – Lain	195.079.056.019,55	72.211.983.210,98	122.867.072.808,57	170,15
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(17.172.319.518,00)	(14.036.135.932,40)	(3.136.183.585,60)	22,34
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(138.461.838.656,36)	0,00	(138.461.838.656,36)	100,00
Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	0,00	1.747.923.000,00	(1.747.923.000,00)	(100,00)
JUMLAH	**129.358.624.903,14**	**149.668.006.074,63**	**(20.309.381.171,49)**	**(13,57)**

Jumlah tersebut pada tanggal Neraca merupakan nilai total saldo Aset Lainnya pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari:

a. Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp16.038.262.419,95 dan Rp17.766.282.718,05. Saldo TGR per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.728.020.298,10 atau 9,73%. Pengurangan TGR

tersebut berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II TA 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

b. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Bentuk kemitraan tersebut antara lain berupa:

- Bangun Guna Serah (BGS) atau *Built Operation Transfer* (BOT);
- Bangun Serah Guna (BSG) atau *Built Transfer Operation* (BTO)

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp53.999.373.530,00 dan Rp53.999.373.530,00. saldo tersebut tidak mengalami penambahan dari saldo sebelumnya.

Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut merupakan kerja sama dalam bentuk *Built Operation Transfer* (BOT) atau Bangun Guna Serah (BGS) pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat kami lampirkan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.87
Kemitraan dengan Pihak Ketiga Pada Pemerintah
Kabupaten Bandung Barat Per 31 Desember 2025

No.	Perjanjian Bangun Guna Serah	Jangka Waktu Kerjasama	Nilai (Rp)
1	Akta Notaris Dewi Fortuna Limurti, S.H., M.Kn. Nomor 12 Tanggal 29 April 2013 dengan PT. Akurasi Kuatmega Indonesia tentang Pembangunan dan Pengelolaan Objek Daya Tarik Wisata Maribaya	30 Tahun (29 April 2013 - 28 April 2043)	15.228.241.452,00
2	Nomor: 510/Perj.05-Disperindkop&UMKM/2013 dan Nomor: 058/BBP-Bd.Br/XI/2013 tanggal 4 November 2013 dengan PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Batujajar Kabupaten Bandung Barat	20 Tahun (4 November 2013 - 4 November 2033)	1.938.390.028,00
3	Perjanjian Kerjasama Pembangunan Pengelolaan dan Penyerahan (BGS) Pasar Panorama Lembang tanggal 15 Juli 2016	15 Tahun (15 Juli 2016 - 15 Juli 2031)	29.911.000.000,00
4	PT. Bangun Bina Persada tentang Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang Nomor 032/P.BGS.04-Disperindag/2020; Nomor012/BP.Pst.Tgg/PKS/V/2020 Tanggal 20 Mei 2020	15 Tahun (20 Mei 2020 – 20 Mei 2035)	6.921.742.050,00
Jumlah			**53.999.373.530,00**

c. Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. ATB meliputi merek, sertifikat ISO, detail desain, *software computer*, lisensi dan *franchise*,

hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya, hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang.

Saldo ATB Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp19.876.091.108,00 dan Rp17.978.579.548,00 saldo tersebut mengalami penambahan sebesar Rp1.897.511.560,00 atau 10,55% dari nilai ATB Tahun 2024, rincian nilai ATB pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 22a**. dengan rincian:

1.1 Penambahan pada tahun 2025 sebesar Rp2.036.940.260,00 terdiri dari:

a. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya sebesar Rp1.594.440.260,00; dan
b. Reklasifikasi Belanja Barang Jasa yang dicatat sebagai Aset Tidak Berwujud sebesar Rp442.500.000,00 berasal dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin.

1.2 Pengurangan pada tahun 2025 sebesar Rp139.428.700,00 berasal dari reklas Aset Tidak Berwujud sudah tidak digunakan lagi dan sudah dilakukan penghapusan.

d. Aset Lain-Lain

Aset Lain-lain dalam Aset Lainnya merupakan aset yang tidak dapat dikategorikan ke dalam Tagihan Piutang Penjualan Angsuran, Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Aset Tidak Berwujud. Aset Lain-Lain dapat berupa Aset Tetap Pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah dan dalam kondisi rusak berat yang belum dihapuskan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

Saldo Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp195.079.056.019,55 dan Rp72.211.983.210,98. Terdapat perbedaan pengakuan saldo Aset Lain-lain antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2024 saldo aset lain-lain ialah merupakan saldo nilai buku yaitu angka harga perolehan setelah dikurangi nilai akumulasi penyusutan. Sedangkan pada tahun 2025 saldo aset lain-lain ialah nilai harga perolehan. Perbedaan tersebut diakibatkan belum mendukungnya sistem aplikasi SIPD pada tahun 2024 dengan tidak adanya kode rekening akumulasi penyusutan aset lain-lain. Sedangkan pada tahun 2025, kode rekening tersebut telah tersedia. Nilai perolehan tahun 2024 ialah sebesar Rp114.791.286.051,86 dan nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain tahun 2024 sebesar Rp42.579.302.840,88. Maka nilai buku yang tercatat pada neraca ialah sebesar Rp72.211.983.210,98. Adapun saldo tahun 2025 mengalami penambahan sebesar Rp152.402.195.663,21 atau mencapai 69,94%. dengan rincian sebagai berikut:

a. Penambahan tahun 2025 sebesar Rp152.402.195.663,21, yang terdiri dari:
    1. Pindah antar Perangkat Daerah sebesar Rp186.060.000,00;

2. Reklas Aset sebesar Rp152.120.974.333,81 terdiri dari:
   a) Merupakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi sebesar Rp87.584.514.334,55 berupa:
      1) Laporan Hasil Inventarisasi Hilang Kecurian TA 2025 sebesar Rp116.556.800,00; dan
      2) Laporan Hasil Inventarisasi Barang Tidak Ditemukan sebesar Rp46.518.883.781,05 terdiri dari:
         (a) Hasil Inventarisasi TA 2025 sebesar Rp46.320.707.776,05; dan
         (b) Hasil Inventarisasi TA 2024 yang baru ditindaklanjuti di TA 2025 sebesar Rp198.176.005,00.
      3) Laporan Hasil Inventarisasi Perubahan Fisik Barang TA 2025 sebesar Rp40.850.277.903,50; dan
      4) Laporan Hasil Inventarisasi Tercatat Ganda TA 2025 sebesar Rp98.795.850,00.
   b) Merupakan Proses Pemindahtanganan/Pemusnahan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp64.536.459.999,26 terdiri dari:
      1) Reklas dari Aset Tetap Tanah sebesar Rp40.825.833.900,45 dikarenakan proses pemindahtanganan;
      2) Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berasal dari proses Pemusnahan/Pemindahtanganan/Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp9.097.748.906,81 berupa:
         (a) Proses Pemindahtanganan atau Pemusnahan ialah sebesar Rp8.770.408.906,81; dan
         (b) Proses Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp327.340.000,00.
      3) Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp10.188.304.701,00 dikarenakan dalam proses pemindahtanganan;
      4) Reklas dari Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan sebesar Rp4.152.807.125,00 dikarenakan dalam proses pemindahtanganan;
      5) Reklas dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp50.086.666,00 merupakan proses penghapusan atas hewan Sapi yang mati;
      6) Reklas dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp82.250.000,00 dikarenakan pekerjaan tersebut tidak dilanjutkan; dan
      7) Reklas dari Aset Tidak Berwujud sebesar Rp139.428.700,00 berasal dari reklas Aset Tidak Berwujud dikarenakan sudah tidak digunakan lagi.

3. Koreksi Reklas Kode Barang Rp95.161.329,40 merupakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang.

b. Pengurangan tahun 2025 sebesar Rp72.114.425.695,52 terdiri dari:
   1. Pindah antar SKPD sebesar Rp186.060.000,00;
   2. Penghapusan sebesar Rp71.696.704.366,12 terdiri dari:
      a) Hibah ke Koramil berupa Kendaraan Dinas berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.53-BKAD/2024 tanggal 15 November 2024 sebesar Rp116.500.000,00;
      b) Hibah ke kejari berupa Tanah Lapangan Pacuan Kuda berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.216-BKAD/2025 tanggal 01 December 2025 sebesar Rp39.928.500.000,00;
      c) Pemindahtanganan berupa Tugu Batas berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5//Kep.218-BKAD-2025 tanggal 01 December 2025 sebesar Rp89.499.000,00;
      d) Penghapusan BMD Berupa Barang Hilang Kecurian berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025 tanggal 01 December 2025 sebesar Rp317.730.576,00;
      e) Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bandung Barat berupa Berupa Mebelair dan Penunjang lainnya yang Telah Dimusnahkan berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025 tanggal 24 November 2025 sebesar Rp1.126.998.352,68;
      f) Penghapusan berupa Aset Tidak Berwujud yang sudah tidak digunakan/kadaluarsa berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025 tanggal 24 November 2025 sebesar Rp28.755.218.703,45;
      g) Penghapusan BMD melalui penjualan lelang online berupa Kendaraan Dinas berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025 tanggal 24 November 2025 sebesar Rp170.750.000,00;
      h) Penghapusan karena Pemusnahan berupa Aset Tetap Lainnya berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025 tanggal 26 June 2025 sebesar Rp106.996.714,99;
      i) Hibah Ke Yayasan Permata Nabila Balqis berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan SK, Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025 tanggal 26 June 2025 sebesar Rp342.932.690,00;

j) Hibah ke Yayasan Permata Nabila Balqis berupa Peralatan dan Mesin berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025 tanggal 26 June 2025 sebesar Rp221.562.900,00;

k) Penghapusan BMD berupa peralatan dan perlengkapan kantor berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025 tanggal 07 May 2025 sebesar Rp263.335.429,00; dan

l) Hibah ke Yayasan Nurul Fatah Annasabiyah berupa Mobil Ambulance berdasarkan SK Penghapusan nomor 100.3.3.5/Kep.42-BKAD/2025 tanggal 17 May 2025 sebesar Rp256.680.000,00.

3. Reklas Aset sebesar Rp136.500.000,00 berupa koreksi reklas dikarenakan kesalahan pada saat usulan pemindahtanganan; dan
4. Reklas Kode Barang sebesar Rp95.161.329,40 merupakan Tindak Lanjut Laporan Hasil Inventarisasi Perubahan Kode Barang.

Rincian aset lain-lain tahun 2024, tahun 2025 serta mutasi aset lain-lain TA 2025disajikan dalam lampiran neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 pada Lampiran **22b**, **22c**, dan **22d**.

e. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud merupakan kumpulan dari beban amortisasi periodik. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi amortisasi adalah sama dengan besarnya beban amortisasi selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi amortisasi merupakan penjumlahan antara besarnya beban amortisasi untuk tahun pertama pemakaian dengan beban amortisasi untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi amortisasi merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aset yang bersangkutan. Akumulasi Amortisasi Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp17.172.319.518,00 dan Rp14.036.135.932,40. Pada tahun 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.136.183.585,60 atau 22,34% berasal dari Beban Amortisasi pada TA 2025. Adapun rincian Mutasi Akumulasi Amortisasi TA 2025 disajikan dalam Lampiran Neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025, terdapat pada **Lampiran 21.**

Penambahan Amortisasi sebesar Rp3.136.183.585,60 merupakan nilai dari Beban Amortisasi.

f. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kumpulan dari beban penyusutan periodik aset lain-lain. Pada akhir tahun pertama aset dimanfaatkan, besarnya akumulasi penyusutan adalah sama dengan besarnya beban penyusutan selama tahun pertama pemakaian aset tersebut. Pada akhir tahun kedua, besarnya akumulasi penyusutan merupakan penjumlahan antara besarnya beban penyusutan untuk tahun pertama pemakaian dengan beban penyusutan untuk tahun kedua pemakaian, dan seterusnya. Akun akumulasi penyusutan merupakan akun pengurang (*contra account*) dari akun aset lain-lain. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebesar Rp138.461.838.656,36 dan Rp0,00 sehingga mengalami kenaikan sebesar Rp138.461.838.656,36 atau 100,00%. Kenaikan 100% tersebut dikarenakan perbedaan pengakuan pencatatan akumulasi penyusutan aset lain-lain antara tahun 2025 dengan tahun 2024. Pada tahun 2024, akumulasi penyusutan aset lain-lain tidak dicatat pada neraca dikarenakan tidak tersedianya kode rekening akumulasinya pada aplikasi SIPD RI. Pada neraca nilai aset lain-lain dicatat menggunakan nilai buku, yaitu nilai dari harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutannya. Pada tahun 2025, kode rekening akumulasi penyusutan aset lain-lain telah tersedia pada aplikasi SIPD RI, sehingga akumulasi penyusutan aset lain-lain dicatat pada neraca. Adapun pada tahun 2024 nilai akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp42.579.302.840,88.

Mutasi akumulasi penyusutan aset lain-lain TA 2025 disajikan dalam lampiran neraca sebagai bagian dari CaLK atas Neraca Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 pada **Lampiran 21.**

Dengan rincian sebagai berikut:

1.1 Penambahan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp100.137.086.217,78 terdiri dari:
   a. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp186.060.000,00;
   b. Reklas antar Aset Lain-lain sebesar Rp95.161.329,40; dan
   c. Reklas dari Aset Tetap sebesar Rp99.855.864.888,38.

1.2 Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar Rp4.254.550.402,30 terdiri dari:
   a. Mutasi antar Perangkat Daerah sebesar Rp186.060.000,00;
   b. Reklas antar Aset Lain-lain sebesar Rp95.161.329,40;
   c. Reklas ke Aset Tetap sebesar Rp122.850.000,00; dan
   d. Penghapusan sebesar Rp3.850.479.072,90.

g. **Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF)**

Dana Bagi Hasil *Treasury Deposit Facility* (TDF) dalam Aset Lainnya. Saldo pada rekening TDF atas nama Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp00,00 pada kantor Pusat Bank Indonesia dengan Nomor Rekening 519000331980 An. Rek Lain TDF Kabupaten Bandung Barat.

5.3.2. Kewajiban

Tabel 5.88
Rincian Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Kewajiban	25.314.304.636,69	28.251.953.445,24	(2.937.648.808,55)	(10,40)

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Rincian Kewajiban Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024.

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp25.314.304.636,69 dan Rp28.251.953.445,24 saldo tahun 2025 tersebut mengalami penuunan sebesar Rp2.937.648.808,55 atau mencapai 10,40%.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Tabel 5.89
Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2		4	5
Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	34.000,00	16.490.004,00	(16.456.004,00)	(99,79)
Utang Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	3.170.788.815,09	3.492.065.534,64	(321.276.719,55)	(9,20)
Utang Belanja	22.143.481.821,60	24.743.397.906,60	(2.599.916.085,00)	(10,51)
JUMLAH	**25.314.304.636,69**	**28.251.953.445,24**	**(2.937.648.808,55)**	**(10,40)**

Kewajiban Jangka Pendek merupakan bagian utang jangka pendek yang akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan. Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp25.314.304.636,69 dan Rp28.251.953.445,24, saldo per 31 Desember 2025 tersebut

mengalami penurunan sebesar Rp2.937.648.808,55 atau 10,40%, adapun rincian kewajiban jangka pendek tahun anggaran 2025 sebagai berikut:

1) Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK)

Utang perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp34.000,00 merupakan Pajak Tahun 2025 yang disetorkan oleh SD pada tahun 2026. Adapun utang tersebut tersaji pada neraca Dinas Pendidikan.

2) Utang Bunga

Utang Bunga kepada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00.

3) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali Bagian Lancar Utang Jangka Panjang yang akan didanai kembali.

Saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masiing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

4) Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka adalah penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa oleh pemerintah kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 sebesar Rp3.170.788.815,09 dan Rp3.492.065.534,64.

Tabel 5.90
Pendapatan Diterima di Muka SKPD
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO.	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
	Pendapatan Diterima di Muka	**3.170.788.815,09**	**3.492.065.534,64**
1	Pajak Reklame	1.678.714.010,85	1.856.828.997,84
2	Retributsi Pengelolaan Tenaga Kerja Asing	775.338.257,96	944.904.422,11
3	Sewa ATM oleh Bank BJB	716.736.546,28	690.332.114,69

Informasi lebih lanjut mengenai rincian Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dilihat pada **Lampiran 23a**, **23b**, dan **23c**.

5) **Utang Belanja**

Saldo Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp22.143.481.821,60 dan Rp24.743.397.906,60. Utang Belanja per 31 Desember 2025 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.91
Rincian Utang Beban/Belanja Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Utang Belanja Pegawai	2.493.662.681,00	2.764.389.414,00	(270.726.733,00)	(9,79)
Utang Belanja Barang dan Jasa	16.881.781.787,00	13.283.341.055,00	3.598.440.732,00	27,09
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	108.733.362,00	538.702.016,00	(429.968.654,00)	(79,82)
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	69.834.730,00	149.730.000,00	(79.895.270,00)	(53,36)
Utang Belanja Bagi Hasil	1.909.827.093,60	7.367.242.548,60	(5.457.415.455,00)	(74,08)
Utang Belanja Bantuan Keuangan	679.642.168,00	639.992.873,00	39.649.295,00	6,20
JUMLAH	**22.143.481.821,60**	**24.743.397.906,60**	**(2.599.916.085,00)**	(10,51)

a) Utang Belanja Pegawai

Saldo Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.493.662.681,00 merupakan utang BPJS dan Jaspel PNS dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92
Rincian Utang Belanja Pegawai pada BLUD Tahun 2025

NOMOR	BLUD	JASPEL (Rp)
1	2	3
1	RSUD CILILIN	2.130.107.915,00
2	PKM GUNUNGHALU	2.410.758,00
3	PKM CILILIN	146.096.893,00
4	PKM PARONGPONG	81.993.602,00
5	PKM CIWARUGA	1.777.247,00
6	PKM RONGGA	98.218.847,00
8	PKM CISARUA	29.805.007,00
9	BKAD	3.252.412,00
TOTAL		**2.493.662.681,00**

Informasi mengenai rincian untuk utang belanja tersaji pada **Lampiran 24.**

b) Utang Belanja barang jasa

Saldo Utang Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp16.881.781.787,00 merupakan utang tagihan Listrik sebesar Rp1.382.529.667,00; Telepon sebesar Rp7.839.562,00; Air sebesar

Rp14.694.200,00; Internet sebesar Rp7.184.629,00; BPJS Non ASN di BKAD sebesar Rp29.108.215,00; utang Kompensasi Jasa Persampahan sebesar Rp786.808.300,00 di DLH; dan utang barang dan jasa BLUD sebesar Rp14.653.617.214,00. Rincian utang tersebut dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 5.93
Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa per SKPD Tahun 2025

No.	PERANGKAT DAERAH	JUMLAH TAGIHAN (Rp)
1	BKPSDM	63.936,00
2	DISPARBUD	152.140,00
3	BAPPELITBANGDA	2.238.000,00
4	DISDIK	5.163.629,00
5	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	20.859.250,00
6	DKPP	1.087.287,00
7	KECAMATAN CIJAMPELAS	60.860,00
8	BKAD	1.411.322.601,00
9	DLH	786.808.300,00
10	RSUD CILILIN	8.894.421.641,00
11	RSUD LEMBANG	3.495.985.694,00
12	RSUD CIKALONGWETAN	888.100.003,00
14	BLUD PKM CILILIN	89.312.865,00
15	BLUD PKM SAGULING	490.000,00
16	BLUD PKM PARONGPONG	19.027.523,00
17	BLUD PKM RONGGA	50.913.165,00
18	BLUD PKM CISARUA	13.902.193,00
19	UPT LABKESDA	1.201.464.130,00
20	DINKES	408.570,00
	JUMLAH	**16.881.781.787,00**

Informasi mengenai rincian untuk utang belanja barang dan jasa tersaji pada **Lampiran 24, 26,** dan **27.**

c) Utang Belanja Modal peralatan dan Mesin sebesar Rp108.733.362,00 merupakan utang pada SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.94
Rincian Utang Belanja Modal peralatan dan Mesin pada BLUD Tahun 2025

No.	Utang Belanja Modal peralatan dan Mesin	Nilai Utang (Rp)
1	RSUD LEMBANG	15.624.360,00
2	RSUD CIKALONGWETAN	93.109.002,00
Total		**108.733.362,00**

Rincian utang tersaji pada **Lampiran 24.**

d) Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp69.834.730,00 merupakan utang tahun lalu Dinas Pendidikan sebesar Rp49.730.000,00 dan utang belanja modal gedung dan bangunan pada RSUD Cikalongwetan sebesar Rp20.104.730,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.95
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD Tahun 2025

No.	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan		Nilai Utang (Rp)
1	DISDIK	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	49.730.000,00
2	DINKES	BLUD RSUD CIKALONGWETAN	20.104.730,00
Total			**69.834.730,00**

Rincian utang tersaji pada **Lampiran 24** dan **25.**

e) Utang Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa Rp1.909.827.093,60 terdiri dari Utang Bagi Hasil Pajak ke Desa sebesar Rp1.555.186.789,60 dan utang bagi hasil retribusi sebesar Rp354.640.304,00 yang tersaji pada neraca BKAD. Informasi mengenai rincian utang bagi hasil terasji pada **Lampiran 28a** dan **28b.**

f) Utang Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi kepada Kabupaten/Kota adalah Rp679.642.168,00 merupakan utang tahun 2015 kompensasi persampahan sebesar Rp52.425.540,00 dan utang alokasi dana desa sebesar Rp627.216.628,00 yang tersaji pada neraca BKAD. Informasi mengenai rincian utang bagi hasil terasji pada **Lampiran 28c.**

5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp00,00 dan Rp0,00.

5.3.3. Ekuitas

Tabel 5.96
Rincian Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Ekuitas	**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**	**156.773.918.458,79**	**3,21**

Saldo tersebut merupakan saldo Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan perubahan Ekuitas.

Saldo Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp5.033.727.030.272,93 dan Rp4.876.953.111.814,14. Saldo Ekuitas Tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar Rp156.773.918.458,79 atau mencapai 3,21%.

5.4 Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam Pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

Ikhtisar penyajian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 5.97
Ikhtisar Laporan Operasional Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan	3.598.340.916.770,41	3.641.969.156.042,83	(43.628.239.272,42)	(1,20)
Beban	3.328.138.063.518,20	3.183.642.287.202,54	144.495.776.315,66	4,54
Surplus/Defisit Dari Operasi	**270.202.853.252,21**	**458.326.868.840,29**	**(188.124.015.588,08)**	**(41,05)**
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	**4.202.745.287,93**	0,00	**4.202.745.287,93**	**100,00**
Surplus/Defisit-Lo	**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**	**(183.921.270.300,15)**	**(40,13)**

5.4.1. Pendapatan Daerah - LO

Tabel 5.98
Rincian Pendapatan-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

URAIAN	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	1.023.151.326.643,47	847.915.654.753,90	175.235.671.889,57	20,67
PENDAPATAN TRANSFER-LO	2.402.535.282.940,00	2.582.722.585.855,00	(180.187.302.915,00)	(6,98)
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	172.654.307.186,94	211.330.915.433,93	(38.676.608.246,99)	(18,30)
JUMLAH	**3.598.340.916.770,41**	**3.641.969.156.042,83**	**(43.628.239.272,42)**	**(1,20)**

Pendapatan Daerah-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Daerah-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non-operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah Daerah.

Jumlah Pendapatan Daerah-LO yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bandung Barat periode TA 2025 dan 2024 adalah sebesar Rp3.598.340.916.770,41 dan Rp3.641.969.156.042,83. Saldo TA 2025 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp43.628.239.272,42 atau 1,20% dibandingkan nilai Pendapatan Daerah-LO yang dicapai periode TA 2024, dengan uraian sebagai berikut:

5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) - LO

Tabel 5.99
Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Pajak Daerah	783.250.046.022,99	626.322.235.167,45	156.927.810.855,54	25,06
Pendapatan Retribusi Daerah	222.420.978.114,66	201.457.279.733,35	20.963.698.381,31	10,41
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.077.835.358,00	1.201.739.012,00	(123.903.654,00)	(10,31)
Pendapatan Asli Daerah Lainnya	16.402.467.147,82	18.934.400.841,10	(2.531.933.693,28)	(13,37)

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
JUMLAH	1.023.151.326.643,47	847.915.654.753,90	175.235.671.889,57	20,67

Saldo tersebut adalah pengakuan Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama melakukan kegiatan operasional di TA 2025 dan 2024 sebesar Rp1.023.151.326.643,47 dan Rp847.915.654.753,90. Saldo TA 2025 tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp175.235.671.889,57 atau 20,67% dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO yang dicapai periode TA 2024.

5.4.1.1.1. Pajak Daerah – LO

Penerimaan pendapatan Pajak Daerah-LO TA 2025 sebesar Rp783.250.046.022,99. Nilai tersebut berasal dari pendapatan pajak daerah yang diterima tahun 2025 yang dilaporkan di Laporan Realisasi Anggaran dengan memperhitungkan saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2025 dan 2024 serta Pendapatan Pajak Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 2024. Penerimaan Pajak Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.927.810.855,54 atau mencapai 25,06% apabila dibandingkan dengan penerimaan Pajak Daerah – LO TA 2024 sebesar Rp626.322.235.167,45.

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sebesar Rp783.250.046.022,99, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.100
Mutasi Pajak Daerah – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah-LRA Tahun 2025		743.748.765.926,00
Sub-Jumlah		**743.748.765.926,00**
Mutasi Tambah		
1	Pengakuan Pendapatan Reklame dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	1.856.828.997,84
2	Penambahan Piutang PJDL Bapenda Tahun 2025	2.785.073.461,00
3	Penambahan Piutang PBBP2 akibat Terbitnya Ketetapan di Tahun 2025	51.497.708.333,00
4	Penambahan Piutang Lainnya yang belum verifikasi dan validasi pada Tahun 2025	1.132.642.911,00
Sub-Jumlah		**57.272.253.702,84**
Mutasi Kurang		
1	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Pajak Reklame Tahun 2025	(1.678.714.010,85)
2	Pengurangan Piutang PBBP2 akibat Pembayaran pada Tahun 2025	(15.510.154.752,00)

Uraian		Nominal (Rp)
3	Pengurangan Piutang Lainnya yang belum verifikasi dan validasi akibat Pembayaran pada Tahun 2025	(582.104.843,00)
	Sub-Jumlah	**(17.770.973.605,85)**
Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2025		**783.250.046.022,99**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.101

Rincian Pajak Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pajak Hotel-LO	0,00	34.246.408.546,00	(34.246.408.546,00)	(100,00)
Pajak Restoran-LO	0,00	66.327.980.744,00	(66.327.980.744,00)	(100,00)
Pajak Hiburan-LO	0,00	15.400.256.495,00	(15.400.256.495,00)	(100,00)
Pajak Reklame-LO	5.390.830.433,99	4.812.084.793,16	578.745.640,83	12,03
Pajak Penerangan Jalan-LO	0,00	78.154.354.613,29	(78.154.354.613,29)	(100,00)
Pajak Parkir-LO	0,00	1.357.315.607,00	(1.357.315.607,00)	(100,00)
Pajak Air Tanah-LO	36.220.386.347,00	39.535.697.999,00	(3.315.311.652,00)	(8,39)
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-LO	3.029.690.272,00	2.122.386.582,00	907.303.690,00	42,75
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	164.123.632.447,00	158.521.950.424,00	5.601.682.023,00	3,53
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	209.774.231.505,00	224.459.477.510,00	(14.685.246.005,00)	(6,54)
Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)-LO	202.049.982.718,00	1.384.321.854,00	200.665.660.864,00	14.495,59
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)-LO	107.574.612.400,00	0,00	107.574.612.400,00	100,00
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)-LO	55.086.679.900,00	0,00	55.086.679.900,00	100,00
JUMLAH	**783.250.046.022,99**	**626.322.235.167,45**	**156.927.810.855,54**	**25,06**

5.4.1.1.2. Retribusi Daerah – LO

Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan baik yang bersifat pelayanan jasa umum, pelayanan jasa usaha, dan perizinan tertentu yang menambah ekuitas.

Retribusi Daerah-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp222.420.978.114,66, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar

Rp201.457.279.733,35. Terlihat pendapatan Retribusi Daerah-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp20.963.698.381,31 atau 10,41%.

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO sebesar Rp222.420.978.114,66, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.102
Mutasi Retribusi Daerah-LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2025		218.559.812.666,00
Sub-Jumlah		**218.559.812.666,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Piutang Pokok PBG dan Denda PBG Tahun 2025	105.571.242,00
2	Penambahan Piutang BLUD Tahun 2025	3.740.446.171,00
3	Pengakuan Pendapatan Izin TKA dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	944.904.422,11
4	Pengakuan Pendapatan Sewa ATM dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	32.674.791,21
Sub-Jumlah		**4.823.696.626,32**
Mutasi Kurang		
1	Pembayaran Piutang Pokok dan Denda PBG Tahun 2025	(15.752.647,00)
2	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Izin TKA Tahun 2025	(775.338.257,96)
3	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa ATM pada BLUD Tahun 2025	(47.573.204,22)
4	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa ATM pada RSUD Cikalongwetan, RSUD Lembang, dan RSUD Cililin yang Belum Tercatat pada LK Unaudited TA 2025	(123.767.068,48)
Sub-Jumlah		**(962.431.177,66)**
Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2025		**222.420.978.114,66**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.103
Rincian Retribusi Daerah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Retribusi Jasa Umum-LO	**209.035.439.544,51**	**191.554.554.477,46**	**17.480.885.067,05**	**9,13**
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas-LO	82.814.513.697,00	78.224.390.703,00	4.590.122.994,00	5,87
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah-LO	118.820.474.827,51	107.688.932.323,79	11.131.542.503,72	10,34
Retribusi Pelayanan Kesehatan di Tempat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis-LO	4.321.612.749,00	1.703.458.920,00	2.618.153.829,00	153,70

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan -LO	2.040.318.975,00	2.617.423.200,00	(577.104.225,00)	(22,05)
Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	694.267.296,00	553.225.664,00	141.041.632,00	25,49
Retribusi Los-LO	142.424.000,00	150.622.000,00	(8.198.000,00)	(5,44)
Retribusi Kios-LO	201.828.090,00	226.990.000,00	(25.162.000,00)	(11,09)
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	-	389.511.666,67	(389.511.666,67)	(100,00)
Retribusi Jasa Usaha-LO	**470.434.925,00**	**670.272.437,00**	**(199.837.512,00)**	**(29,81)**
Retribusi Pemakaian Alat-LO	46.250.000,00	70.250.000,00	(24.000.000,00)	(34,16)
Retribusi Penyediaan Fasilitas Pasar/Pertokoan yang Dikontrakkan-LO	108.808.925,00	144.370.437,00	(35.561.512,00)	(24,63)
Retribusi Pelayanan Rumah Potong Hewan-LO	172.275.000,00	337.535.000,00	(165.260.000,00)	(48,96)
Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	77.271.000,00	55.567.000,00	21.704.000,00	39,06
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit Ternak-LO	34.000.000,00	32.500.000,00	1.500.000,00	4,62
Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan-LO	31.830.000,00	30.050.000,00	1.780.000,00	5,92
Retribusi Perizinan Tertentu-LO	**12.915.103.645,15**	**9.232.452.818,89**	**3.682.650.826,26**	**39,89**
Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	10.656.163.481,00	8.578.301.741,00	2.077.861.740,00	24,22
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	2.258.940.164,15	654.151.077,89	1.604.789.086,26	245,32
JUMLAH	**222.420.978.114,66**	**201.457.279.733,35**	**20.963.698.381,31**	**10,41**

5.4.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Penerimaan pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp1.077.835.358,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.201.739.012,00. Terlihat pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO TA 2025 turun sebesar Rp123.903.654,00 atau 10,31%.

Realisasi Pendapatan merupakan Hasil Pengelolaan Pendapatan atas Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO sebesar Rp1.077.835.358,00, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.104
Mutasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA Tahun 2025		1.256.835.358,00
Sub-Jumlah		**1.256.835.358,00**
Mutasi Tambah		
Sub-Jumlah		0,00
Mutasi Kurang		
1	Pengurangan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas Pembayaran Dividen oleh BUMD Tahun 2025	(179.000.000,00)
Sub-Jumlah		**(179.000.000,00)**
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO Tahun 2025		**1.077.835.358,00**

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.105
Rincian Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)-LO	1.077.835.358,00	1.201.739.012,00	(123.903.654,00)	(10,31)

5.4.1.1.4. Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Penerimaan Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp16.402.467.147,82, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp18.934.400.841,10. Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp2.531.933.693,28 atau 13,37%.

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO sebesar Rp16.402.467.147,82, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.106

Mutasi Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah-LRA Tahun 2025		17.918.045.037,00
Sub-Jumlah		**17.918.045.037,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Piutang PBG pada Tahun 2025	13.513.256,92
2	Pengakuan Pendapatan Sewa ATM BJB dari Pendapatan Diterima Dimuka Tahun 2024	657.657.323,48
3	Penambahan Piutang Denda PJDL pada Tahun 2025	1.611.869.889,00
Sub-Jumlah		**2.283.040.469,40**
Mutasi Kurang		
1	Penerimaan Pembayaran Piutang Taspen BKAD pada tahun 2025	(4.800.000,00)
2	Pengakuan Pendapatan Diterima Dimuka atas Sewa BMD untuk Sewa ATM BJB Tahun 2025	(545.396.273,58)
3	Pembayaran Piutang Denda Kontribusi Maribaya Disparbud pada tahun 2025	(5.500.000,00)
4	Pengurangan Piutang Bangun Guna Serah pada tahun 2025	(3.237.618.274,00)
5	Pembayaran Piutang Pokok dan Denda PBG Tahun 2025	(5.303.811,00)
Sub-Jumlah		**(3.798.618.358,58)**
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025		**16.402.467.147,82**

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.107

Rincian Lain-lain PAD yang Sah-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	179.641.500,00	0,00	179.641.500,00	100,00
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	224.813.149,90	1.946.168.053,13	(1.721.354.903,23)	(88,45)
Jasa Giro-LO	8.370.515.040,00	3.238.048.161,97	5.132.466.878,03	158,50
Pendapatan Bunga-LO	22.525.802,00	333.254.941,00	(310.729.139,00)	(93,24)
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	128.604.000,00	63.624.735,00	64.979.265,00	102,13
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain-LO	114.935.783,00	23.309.235,00	91.626.548,00	393,09
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	145.180.879,00	276.385.250,00	(131.204.371,00)	(47,47)
Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	3.232.061.146,00	3.701.448.740,00	(469.387.594,00)	(12,68)
Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	13.513.256,92	12.009.863,00	1.503.393,92	12,52

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan dari Pengembalian-LO	3.970.676.591,00	1.426.761.862,00	2.543.914.729,00	178,30
Pendapatan Hasil Pelaksanaan Perjanjian/Kontrak-LO	0,00	7.913.390.000,00	(7.913.390.000,00)	(100,00)
JUMLAH	**16.402.467.147,82**	**18.934.400.841,10**	**(2.531.933.693,28)**	**(13,37)**

5.4.2.1 Pendapatan Transfer – LO

Penerimaan Pendapatan Transfer-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp2.402.535.282.940,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.582.722.585.855,00. Terlihat Pendapatan Transfer LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp180.187.302.915,00 atau 6,98% dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.108
Rincian Pendapatan Transfer – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	2.192.237.944.415,00	2.193.678.191.903,00	(1.440.247.488,00)	(0,07)
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	210.297.338.525,00	389.044.393.952,00	(178.747.055.427,00)	(45,95)
JUMLAH	**2.402.535.282.940,00**	**2.582.722.585.855,00**	**(180.187.302.915,00)**	**(6,98)**

5.4.2.1.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Penerimaan Transfer Pemerintah Pusat – LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp2.192.237.944.415,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.193.678.191.903,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.440.247.488,00 atau 0,07%.

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO sebesar Rp2.192.237.944.415,00, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.109
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2025

Uraian	Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA Tahun 2025	2.193.989.125.215,00
Sub-Jumlah	**2.193.989.125.215,00**

Uraian		Nominal (Rp)
Mutasi Tambah		
	Sub-Jumlah	0,00
Mutasi Kurang		
1	Penerimaan Pendapatan DBH atas Penempatan TDF Kabupaten Bandung Barat Tahun 2024 yang Sudah Masuk Rekening Kas Daerah	(1.747.923.000,00)
2	Koreksi Kelebihan Pencatatan atas Penerimaan Salur BOP Kesetaraan Reguler pada LO di LK Unaudited TA 2025	(3.257.800,00)
	Sub-Jumlah	**(1.751.180.800,00)**
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025		**2.192.237.944.415,00**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.110

Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Dana Perimbangan – LO	**0,00**	**1.946.693.570.053,00**	**(1.946.693.570.053,00)**	**(100,00)**
Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	0,00	88.991.642.000,00	(88.991.642.000,00)	(100,00)
Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	0,00	1.222.075.022.945,00	(1.222.075.022.945,00)	(100,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	0,00	157.126.319.747,00	(157.126.319.747,00)	(100,00)
Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	0,00	478.500.585.361,00	(478.500.585.361,00)	(100,00)
Dana Bagi Hasil (DBH)-LO	**109.149.885.500,00**	**0,00**	**109.149.885.500,00**	**100,00**
DBH Pajak-LO	79.287.372.500,00	0,00	79.287.372.500,00	100,00
DBH Sumber Daya Alam (SDA)-LO	29.862.513.000,00	0,00	29.862.513.000,00	100,00
DAU-LO	**1.301.028.239.493,00**	0,00	**1.301.028.239.493,00**	**100,00**
DAU yang Tidak Ditentukan Penggunaannya-LO	1.095.270.926.862,00	0,00	1.095.270.926.862,00	100,00
DAU yang Ditentukan Penggunaannya-LO	205.757.312.631,00	0,00	205.757.312.631,00	100,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	**539.491.505.002,00**	0,00	**539.491.505.002,00**	**100,00**
DAK Fisik-LO	12.014.160.081,00	0,00	12.014.160.081,00	100,00
DAK Non Fisik-LO	527.477.344.921,00	0,00	527.477.344.921,00	100,00
Dana Desa-LO	**234.366.852.420,00**	**246.984.621.850,00**	**(12.617.769.430,00)**	**(5,11)**
Dana Desa-LO	234.366.852.420,00	246.984.621.850,00	(12.617.769.430,00)	(5,11)
Insentif Fiskal-LO	**8.201.462.000,00**	**0,00**	**8.201.462.000,00**	**100,00**

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Insentif Fiskal Untuk Penghargaan Kinerja Tahun Sebelumnya-LO	8.201.462.000,00	0,00	8.201.462.000,00	100,00
JUMLAH	**2.192.237.944.415,00**	**2.193.678.191.903,00**	**(1.440.247.488,00)**	**(0,07)**

5.4.2.1.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah – LO

Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp210.297.338.525,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp389.044.393.952,00. Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO TA 2024 mengalami penurunan sebesar Rp178.747.055.427,00 atau 45,95%.

Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah-LO sebesar Rp210.297.338.525,00, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.111
Mutasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah-LRA Tahun 2025		219.384.153.078,00
	Sub-Jumlah	**219.384.153.078,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Piutang Kompensasi dampak Negatif pada Tahun 2025	91.630.470,00
2	Pengakuan Piutang Bagi Hasil dari Provinsi Jawa Barat yang Belum Tercatat pada LK Unaudited TA 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 719/ KU.03.02 / Renbang tanggal 6 Maret 2026	1.619.379.963,00
	Sub-Jumlah	**1.711.010.433,00**
Mutasi Kurang		
1	Penerimaan Pembayaran Piutang Bagi Hasil Provinsi pada Tahun 2025	(10.797.824.986,00)
	Sub-Jumlah	**(10.797.824.986,00)**
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO Tahun 2025		**210.297.338.525,00**

Realisasi Pendapatan Transfer antar Daerah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.112
Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil-LO	**193.503.184.849,00**	**297.865.106.436,00**	**(104.361.921.587,00)**	**(35,04)**
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor-LO	827.587.590,00	84.521.689.350,00	(83.694.101.760,00)	(99,02)

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor-LO	239.620.200,00	53.384.152.800,00	(53.144.532.600,00)	(99,55)
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor-LO	85.070.462.080,00	57.278.461.476,00	27.792.000.604,00	48,52
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan-LO	3.928.478.491,00	3.413.592.550,00	514.885.941,00	15,08
Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok-LO	103.437.036.488,00	99.267.210.260,00	4.169.826.228,00	4,20
Bantuan Keuangan	**16.794.153.676,00**	**91.179.287.516,00**	**(74.385.133.840,00)**	**(81,58)**
Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	11.907.000.000,00	85.964.339.906,00	(74.057.339.906,00)	(86,15)
Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Kabupaten/Kota	4.887.153.676,00	5.214.947.610,00	(327.793.934,00)	(6,29)
JUMLAH	**210.297.338.525,00**	**389.044.393.952,00**	**(178.747.055.427,00)**	**(45,95)**

5.4.2.1.3. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO

Penerimaan pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp172.654.307.186,94 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp211.330.915.433,93 terlihat pendapatan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp38.676.608.246,99 atau (18,30%).

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO sebesar Rp172.654.307.186,94, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.113
Mutasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LRA Tahun 2025		0,00
	Sub-Jumlah	0,00
Mutasi Tambah		
1	Pendapatan Hibah yang Berasal dari Penerimaan Persediaan Tahun 2025	39.256.418.405,94
2	Pendapatan Hibah yang Berasal dari Penerimaan Aset Tetap Tahun 2025	133.397.888.781,00
	Sub-Jumlah	**172.654.307.186,94**
Mutasi Kurang		
	Sub-Jumlah	0,00
Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Tahun 2025		**172.654.307.186,94**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.114

Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat-LO	40.582.298.680,50	5.900.176.850,00	34.682.121.830,50	587,81
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah-LO	8.483.574.504,44	44.042.824.937,93	(35.559.250.433,49)	(80,74)
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri-LO	123.588.434.002,00	161.387.913.646,00	(37.799.479.644,00)	(23,42)
JUMLAH	**172.654.307.186,94**	**211.330.915.433,93**	**(38.676.608.246,99)**	**(18,30)**

5.4.3. Beban Operasi -LO

Realisasi Beban Operasi-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp3.328.138.063.518,20 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang tercatat sebesar Rp3.183.642.287.202,54. Beban Operasi-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp144.495.776.315,66 atau 4,54%. Adapun rincian untuk beban operasi dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.115

Rincian Beban Operasi – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Pegawai-LO	1.293.271.813.458,00	1.230.274.183.419,00	62.997.630.039,00	5,12
Beban Persediaan-LO	582.312.307.649,47	534.536.192.431,36	47.776.115.218,11	8,94
Beban Jasa dan Sewa-LO	470.259.699.664,66	353.308.537.635,74	116.951.162.028,92	33,10
Beban Pemeliharaan-LO	26.710.216.312,46	18.137.000.185,42	8.573.216.127,04	47,27
Beban Perjalanan Dinas-LO	57.400.954.255,00	59.113.065.700,00	(1.712.111.445,00)	(2,90)
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat - LO	28.854.577.443,00	25.212.368.600,00	3.642.208.843,00	14,45
Beban Hibah-LO	69.926.687.968,00	123.753.810.400,00	(53.827.122.432,00)	(43,50)
Beban Bantuan Sosial-LO	5.655.000.000,00	2.955.000.000,00	2.700.000.000,00	91,37
Beban Penyisihan Piutang -LO	6.779.027.028,30	25.977.878.151,91	(19.198.851.123,62)	(73,90)
Beban Penyusutan-LO	299.062.951.736,71	350.605.967.133,91	(51.543.015.397,20)	(14,70)
Beban Amortisasi-LO	3.136.183.585,60	3.187.256.043,60	(51.072.458,00)	(1,60)
Beban Transfer-LO	484.768.644.417,00	452.831.809.547,60	31.936.834.869,40	7,05
Beban Tak Terduga-LO	-	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)
JUMLAH	**3.328.138.063.518,20**	**3.183.642.287.202,54**	**144.495.776.315,66**	**4,54**

5.4.3.1 Beban Pegawai -LO

Realisasi Beban Pegawai-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp1.293.271.813.458,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp1.230.274.183.419,00. Terlihat Beban Pegawai-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp62.997.630.039,00 atau 5,12%.

Realisasi Beban Pegawai-LO sebesar Rp1.293.271.813.458,00, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.116
Mutasi Beban Pegawai– LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Belanja Pegawai-LRA Tahun 2025		1.293.542.540.191,00
	Sub-Jumlah	**1.293.542.540.191,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Utang BPJS ASN pada Tahun 2025	3.252.412,00
	Sub-Jumlah	**3.252.412,00**
Mutasi Kurang		
1	Pengurangan Utang BLUD pada Tahun 2025	(273.979.145,00)
	Sub-Jumlah	**(273.979.145,00)**
Beban Pegawai-LO Tahun 2025		**1.293.271.813.458,00**

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.117
Rincian Beban Pegawai – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	598.367.754.581,00	615.331.436.579,00	(16.963.681.998,00)	(2,76)
Beban Tambahan Penghasilan ASN	558.358.311.917,00	322.815.189.633,00	235.543.122.284,00	72,97
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	-	196.164.952.582,00	(196.164.952.582,00)	(100,00)
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	50.867.179.470,00	50.325.113.474,00	542.065.996,00	1,08
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	1.317.727.817,00	796.660.780,00	521.067.037,00	65,41
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.821.152.568,00	1.493.119.992,00	328.032.576,00	21,97
Beban Pegawai BLUD	82.539.687.105,00	43.347.710.379,00	39.191.976.726,00	90,41
JUMLAH	**1.293.271.813.458,00**	**1.230.274.183.419,00**	**62.997.630.039,00**	**5,12**

5.4.3.2 Beban Persediaan – LO

Realisasi Beban Persediaan-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp582.312.307.649,47 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp534.536.192.431,36. Terlihat Beban Persediaan–LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp47.776.115.218,11 atau 8,94%.

Realisasi Beban Persediaan-LO sebesar Rp582.312.307.649,47, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.118
Mutasi Beban Persediaan – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Belanja Barang-LRA Tahun 2025		517.206.125.406,00
	Sub-Jumlah	**517.206.125.406,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Beban Persediaan akibat Pengurangan Aset Tetap dengan Nilai di bawah Kapitalisasi pada Tahun 2025	23.511.710.687,88
2	Penambahan Beban Persediaan akibat Pemakaian Persediaan Tahun 2024	51.695.357.477,01
3	Penambahan Utang BLUD pada Tahun 2025	3.686.746.180,00
4	Koreksi Kelebihan Pencatatan Persediaan Puskesmas Cikalongwetan pada LK Unaudited TA 2025	12.658.830,00
5	Koreksi Kelebihan Pencatatan Persediaan RSUD Lembang pada LK Unaudited TA 2025	116.021.048,16
6	Koreksi Kelebihan Pencatatan Persediaan Setwan pada LK Unaudited TA 2025	162.000,00
	Sub-Jumlah	**79.022.656.223,05**
Mutasi Kurang		
1	Pengurangan Beban Persediaan akibat Penambahan Persediaan Tahun 2025	(13.543.931.083,48)
2	Pengurangan Beban Persediaan akibat Penambahan Aset Tetap yang Dikapitalisasi pada tahun 2025	(336.862.800,00)
3	Koreksi Kelebihan Pencatatan atas Pengeluaran Salur BOP Kesetaraan Reguler di LK Unaudited TA 2025	(3.257.800,00)
4	Koreksi Kekurangan Pencatatan Persediaan Disdukcapil pada LK Unaudited TA 2025	(3.796.200,00)
5	Koreksi Kekurangan Pencatatan Persediaan Disperindag Karena Barang Sudah Kadaluarsa Namun Belum Dihapuskan pada Tahun 2025	(8.385.000,00)
6	Koreksi Kekurangan Pencatatan Persediaan Setwan pada LK Unaudited TA 2025	(12.180.152,10)
7	Koreksi Kekurangan Pencatatan Persediaan Puskesmas Lembang Karena Barang Sudah Kadaluarsa Namun Belum Dihapuskan pada Tahun 2025	(8.060.944,00)
	Sub-Jumlah	**(13.916.473.979,58)**
Beban Persediaan-LO Tahun 2025		**582.312.307.649,47**

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.119
Rincian Beban Persediaan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Barang Pakai Habis	237.156.628.187,49	216.029.440.562,82	21.127.187.624,67	9,78
Beban Barang Tak Habis Pakai	266.633.066,00	512.897.800,00	(246.264.734,00)	(48,01)
Beban Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi	23.511.710.687,88	0,00	23.511.710.687,88	100,00
Beban Barang dan Jasa BOS	0,00	165.988.065.791,00	(165.988.065.791,00)	(100,00)
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOS	160.369.651.555,00	0,00	160.369.651.555,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP PAUD	21.497.331.000,00	0,00	21.497.331.000,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOSP-BOP Kesetaraan	10.128.112.200,00	0,00	10.128.112.200,00	100,00
Beban Barang dan Jasa BOK Puskesmas	14.311.007.975,00	17.262.598.680,00	(2.951.590.705,00)	(17,10)
Beban Barang dan Jasa BLUD	115.071.232.978,10	134.743.189.597,54	(19.671.956.619,44)	(14,60)
JUMLAH	**582.312.307.649,47**	**534.536.192.431,36**	**47.776.115.218,11**	**8,94**

Berikut disajikan rincian perhitungan data Beban Persediaan – LO TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.120
Penjelasan Perhitungan Beban Persediaan-LO Tahun 2025

No	Keterangan	Beban Persediaan – LO (Rp)
1	Realisasi Belanja LRA Persediaan	517.202.867.606,00
2	Penambahan Utang	3.686.746.180,00
3	Reklasifikasi Dari Aset Tetap Ke Persediaan	23.174.847.887,88
4	Penerimaan Hibah Barang	39.256.418.405,94
5	Penambahan Persediaan akibat Persediaan Ternak yang Berkembang Biak	143.316.650,00
6	Persediaan Barang Tahun Berjalan (Neraca)	(52.854.924.557,36)
7	Persediaan Barang Tahun 2024 (Neraca)	51.703.035.477,01
	Jumlah Beban Persediaan-LO TA 2025	**582.312.307.649,47**

Rincian perhitungan beban yang menambah persediaan TA 2025 terdapat pada Mutasi Persediaan TA 2025 **lampiran 29.**

5.4.3.3 Beban Jasa dan Sewa - LO

Realisasi Beban Jasa dan Sewa-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp470.259.699.664,66 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp353.308.537.635,74. Terlihat Beban Jasa dan Sewa-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp116.951.162.028,92 atau 33,10%.

Realisasi Beban Jasa dan Sewa-LO sebesar Rp470.259.699.664,66, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.121
Mutasi Beban Jasa dan Sewa – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Belanja Jasa-LRA Tahun 2025		472.858.540.266,00
Sub-Jumlah		**472.858.540.266,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Utang Belanja Jasa pada Tahun 2025	2.196.348.928,00
2	Pembebanan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2024	638.466.007,54
3	Penambahan Beban Jasa akibat Reklasifikasi Aset Tetap	49.650.300,00
Sub-Jumlah		**2.884.465.235,54**
Mutasi Kurang		
1	Pembayaran Utang Belanja Jasa tahun 2024	(2.084.600.706,00)
2	Pengakuan Beban Dibayar Dimuka Tahun 2025	(1.408.331.704,88)
3	Pengurangan Beban Jasa akibat Penambahan Aset Tetap yang Dikapitalisasi pada tahun 2025	(1.990.373.426,00)
Sub-Jumlah		**(5.483.305.836,88)**
Beban Jasa dan Sewa-LO Tahun 2025		**470.259.699.664,66**

Realisasi Beban Jasa dan Sewa-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.122
Rincian Beban Jasa dan Sewa – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Jasa Kantor	187.281.346.394,26	160.453.743.960,00	26.827.602.434,26	16,72
Beban Iuran Jaminan/Asuransi	153.514.115.897,00	87.032.120.284,00	66.481.995.613,00	76,39
Beban Sewa Tanah	53.500.000,00	54.400.000,00	(900.000,00)	(1,65)
Beban Sewa Peralatan dan Mesin	6.970.410.224,00	5.444.710.054,00	1.525.700.170,00	28,02
Beban Sewa Gedung dan Bangunan	52.598.175.722,66	43.950.096.337,74	8.648.079.384,92	19,68
Beban Sewa Aset Tetap Lainnya	234.100.000,00	513.524.000,00	(279.424.000,00)	(54,41)
Beban Sewa Aset Tidak Berwujud	103.279.200,00	0,00	103.279.200,00	100,00

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	16.983.721.354,00	15.891.521.952,00	1.092.199.402,00	6,87
Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	12.666.461.126,74	6.021.869.175,00	6.644.591.951,74	110,34
Beban Beasiswa Pendidikan PNS	0,00	100.250.000,00	(100.250.000,00)	(100,00)
Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	39.853.247.756,00	33.820.300.873,00	6.032.946.883,00	17,84
Beban Jasa Insentif Pemungutan Pajak Daerah bagi Pegawai Non ASN	0,00	26.001.000,00	(26.001.000,00)	(100,00)
Beban Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi	1.341.990,00	0,00	1.341.990,00	100,00
JUMLAH	**470.259.699.664,66**	**353.308.537.635,74**	**116.951.162.028,92**	**33,10**

5.4.3.4 Beban Pemeliharaan - LO

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp26.710.216.312,46 bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp18.137.000.185,42. Terlihat Beban Pemeliharaan-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp8.573.216.127,04 atau 47,27%.

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO sebesar Rp26.710.216.312,46, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.123

Mutasi Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA Tahun 2025		30.363.826.382,00
	Sub-Jumlah	**30.363.826.382,00**
Mutasi Tambah		
	Sub-Jumlah	0,00
Mutasi Kurang		
1	Pengurangan Beban Pemeliharaan akibat Penambahan Aset Tetap yang Dikapitalisasi pada tahun 2025	(3.653.610.069,54)
	Sub-Jumlah	**(3.653.610.069,54)**
Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2025		**26.710.216.312,46**

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.124

Rincian Beban Pemeliharaan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	13.661.862.492,00	10.421.578.223,00	3.240.284.269,00	31,09

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	6.518.620.104,46	4.578.316.979,42	1.940.303.125,04	42,38
Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	6.529.733.716,00	3.137.104.983,00	3.392.628.733,00	108,15
JUMLAH	**26.710.216.312,46**	**18.137.000.185,42**	**8.573.216.127,04**	**47,27**

5.4.3.5 Beban Perjalanan Dinas - LO

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp57.400.954.255,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp59.113.065.700,00, terlihat Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp1.712.111.445,00 atau 2,90%. Adapun Beban Perjalanan Dinas-LO TA 2025 sama dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA sebesar Rp57.400.954.255,00.

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.125

Rincian Beban Perjalanan Dinas – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Perjalanan Dinas Biasa	41.910.238.436,00	37.299.615.500,00	4.610.622.936,00	12,36
Beban Perjalanan Dinas Tetap	0,00	4.544.100.000,00	(4.544.100.000,00)	(100,00)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	12.432.145.819,00	15.469.820.200,00	(3.037.674.381,00)	(19,64)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.949.070.000,00	1.799.530.000,00	1.149.540.000,00	63,88
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	46.500.000,00	0,00	46.500.000,00	100,00
Beban Perjalanan Dinas Biasa–Luar Negeri	63.000.000,00	0,00	63.000.000,00	100,00
JUMLAH	**57.400.954.255,00**	**59.113.065.700,00**	**(1.712.111.445,00)**	**(2,90)**

5.4.3.6 Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp28.854.577.443,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp25.212.368.600,00. Terlihat Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp3.642.208.843,00 atau 14,45%. Adapun Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO sama dengan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LRA sebesar Rp28.854.577.443,00.

Realisasi Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.126
Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan
kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Hadiah yang Bersifat Perlombaan	346.195.000,00	271.500.000,00	74.695.000,00	27,51
Beban Penghargaan atas Suatu Prestasi	6.702.207.800,00	463.900.000,00	6.238.307.800,00	1.344,75
Beban Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	2.093.050.000,00	870.100.000,00	1.222.950.000,00	140,55
Beban Transfer Keuangan Daerah dan Desa (TKDD)	0,00	4.304.000.000,00	(4.304.000.000,00)	(100,00)
Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.185.073.943,00	769.516.500,00	415.557.443,00	54,00
Beban Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	18.528.050.700,00	18.533.352.100,00	(5.301.400,00)	(0,03)
JUMLAH	**28.854.577.443,00**	**25.212.368.600,00**	**3.642.208.843,00**	**14,45**

5.4.3.7 Beban Bunga - LO

Realisasi Beban Bunga-LO sampai dengan akhir TA 2025 dan 2024 ialah Rp0,00 (nihil).

5.4.3.8 Beban Subsidi - LO

Realisasi Beban Subsidi-LO sampai dengan akhir TA 2025 dan 2024 ialah Rp0,00 (nihil).

5.4.3.9 Beban Hibah - LO

Realisasi Beban Hibah-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp69.926.687.968,00, bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp123.753.810.400,00. Terlihat Hibah TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp53.827.122.432,00 atau 43,50%. Adapun Beban Hibah-LO sama dengan realisasi Belanja Hibah-LRA sebesar Rp69.926.687.968,00.

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.127

Rincian Beban Hibah – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	28.740.000.000,00	59.595.185.426,00	(30.855.185.426,00)	(51,77)
Beban Hibah Dana BOS	36.911.507.968,00	34.697.676.174,00	2.213.831.794,00	6,38
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	4.275.180.000,00	1.425.060.000,00	2.850.120.000,00	200,00
Beban Hibah Dana BOSP	-	28.035.888.800,00	(28.035.888.800,00)	(100,00)
JUMLAH	**69.926.687.968,00**	**123.753.810.400,00**	**(53.827.122.432,00)**	**(43,50)**

5.4.3.10 Beban Bantuan Sosial - LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp5.655.000.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp2.955.000.000,00. Beban Bantuan Sosial TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 91,37%. Adapun Beban Bantuan Sosial-LO sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA sebesar Rp5.655.000.000,00.

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.128

Rincian Beban Bantuan Sosial – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Individu	115.000.000,00	0,00	115.000.000,00	100,00
Beban Bantuan Sosial Uang kepada Kelompok Masyarakat	5.540.000.000,00	2.955.000.000,00	2.585.000.000,00	87,48
JUMLAH	**5.655.000.000,00**	**2.955.000.000,00**	**2.700.000.000,00**	**91,37**

5.4.3.11 Beban Penyisihan Piutang - LO

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp6.779.027.028,30 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp25.977.878.151,91. Terlihat Beban Penyisihan Piutang-LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp19.198.851.123,61 atau 73,90%.

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.129

Rincian Beban Penyisihan Piutang – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Penyisihan Piutang Pajak Hotel	95.665.636,74	196.879.303,72	(101.213.666,98)	(51,41)
Beban Penyisihan Pajak Restoran	1.390.889.570,75	66.994.050,29	1.323.895.520,46	1.976,14
Beban Penyisihan Pajak Hiburan	19.846,75	10.038.872,05	(10.019.025,30)	(99,80)
Beban Penyisihan Pajak Reklame	26.545.889,64	24.044.285,83	2.501.603,81	10,40
Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	122,09	4.833,85	(4.711,76)	(97,47)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Parkir	36.954.445,71	21.084.957,52	15.869.488,19	75,26
Beban Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	1.024.414.191,23	132.319.885,16	892.094.306,07	674,20
Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	66.424.104,07	56.585.588,60	9.838.515,47	17,39
Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	0,00	24.960.743.352,87	(24.960.743.352,87)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	20.350.506,61	54.320.387,12	(33.969.880,51)	(62,54)
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Perizinan Tertentu	23.072.856,21	42.658,75	23.030.197,46	53.987,04
Beban Penyisihan Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	248.413.063,42	0,00	248.413.063,42	100,00
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	185.784.222,67	(185.784.222,67)	(100,00)
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	1.318.314.764,15	206.438.276,69	1.111.876.487,46	538,60
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	14.621.466,28	0,00	14.621.466,28	100,00
Beban Penyisihan Piutang Pendapatan dari Pengembalian	57.682,68	0,00	57.682,68	100,00
Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	8.096.899,82	53.989.124,93	(45.892.225,11)	(85,00)
Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	458.152,35	8.608.351,86	(8.150.199,51)	(94,68)
Beban Penyisihan Uang Muka	2.504.727.829,80	0,00	2.504.727.829,80	100,00
JUMLAH	**6.779.027.028,30**	**25.977.878.151,91**	**(19.198.851.123,61)**	**(73,90)**

5.4.3.12 Beban Penyusutan–LO

Beban Penyusutan–LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp299.062.951.736,71 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp350.605.967.133,91. Terlihat Beban Penyusutan–LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.543.015.397,20 atau 14,70%.

Realisasi Beban Penyusutan-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.130

Rincian Beban Penyusutan – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	**142.012.970.443,85**	**156.869.053.723,06**	**(14.856.083.279,21)**	**(9,47)**
Beban Penyusutan Alat Besar	1.914.889.700,21	2.073.900.028,84	(159.010.328,63)	(7,67)
Beban Penyusutan Alat Angkutan	6.805.098.774,82	5.975.873.953,80	829.224.821,02	13,88
Beban Penyusutan Alat Bengkel dan Alat Ukur	182.689.067,55	643.633.436,58	(460.944.369,03)	(71,62)
Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.350.271.714,20	1.516.797.450,49	(166.525.736,29)	(10,98)
Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	57.861.777.562,30	61.877.776.880,35	(4.015.999.318,05)	(6,49)
Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	5.887.574.012,87	6.061.561.508,21	(173.987.495,34)	(2,87)
Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	21.433.040.284,16	24.522.694.590,06	(3.089.654.305,90)	(12,60)
Beban Penyusutan Alat Laboratorium	14.542.403.553,98	14.318.300.578,67	224.102.975,31	1,57
Beban Penyusutan	104.792.625,62	418.645.983,18	(313.853.357,56)	(74,97)
Beban Penyusutan Komputer	27.412.353.605,85	34.900.194.078,61	(7.487.840.472,76)	(21,46)
Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	5.207.500,00	660.000,00	4.547.500,00	689,02
Beban Penyusutan Alat Pengeboran	1.591.090,00	1.841.090,00	(250.000,00)	(13,58)
Beban Penyusutan Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	51.917.552,60	53.757.592,60	(1.840.040,00)	(3,42)
Beban Penyusutan Alat Bantu Eksplorasi	0,00	250.000,00	(250.000,00)	(100,00)
Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	874.936.768,90	659.512.752,80	215.424.016,10	32,66
Beban Penyusutan Alat Peraga	1.708.100.220,00	1.994.807.818,00	(286.707.598,00)	(14,37)
Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	192.476.070,03	90.721.471,43	101.754.598,60	112,16
Beban Penyusutan Rambu-Rambu	1.601.292.812,61	1.583.313.626,09	17.979.186,52	1,14
Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	82.557.528,15	174.810.883,35	(92.253.355,20)	(52,77)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	**58.402.168.342,88**	**57.169.194.655,93**	**1.232.973.686,95**	**2,16**
Beban Penyusutan Bangunan Gedung	55.926.655.742,28	54.936.481.803,41	990.173.938,87	1,80
Beban Penyusutan Monumen	21.729.370,84	21.729.370,84	0,00	0,00

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Penyusutan Bangunan Menara	8.069.278,55	8.069.278,55	0,00	0,00
Beban Penyusutan Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.445.713.951,21	2.202.914.203,13	242.799.748,08	11,02
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	**98.647.812.949,98**	**136.567.718.754,92**	**(37.919.905.804,94)**	**(27,77)**
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	84.123.562.811,36	122.738.687.216,09	(38.615.124.404,73)	(31,46)
Beban Penyusutan Bangunan Air	12.953.776.482,15	12.301.890.992,75	651.885.489,40	5,30
Beban Penyusutan Instalasi	882.133.434,41	849.150.324,03	32.983.110,38	3,88
Beban Penyusutan Jaringan	688.340.222,06	677.990.222,05	10.350.000,01	1,53
JUMLAH	**299.062.951.736,71**	**350.605.967.133,91**	**(51.543.015.397,20)**	**(14,70)**

5.4.3.13 Beban Amortisasi - LO

Beban Amortisasi-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp3.136.183.585,60 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.187.256.043,60. Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp51.072.458,00 atau 1,60%.

Realisasi Beban Amortisasi-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.131

Rincian Beban Amortisasi – LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Software	827.970.944,00	711.750.322,00	116.220.622,00	16,33
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud-Kajian	2.308.212.641,60	2.475.505.721,60	(167.293.080,00)	(6,76)
JUMLAH	**3.136.183.585,60**	**3.187.256.043,60**	**(51.072.458,00)**	**(1,60)**

5.4.3.14 Beban Transfer-LO

Realisasi Beban Transfer-LO sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp484.768.644.417,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp452.831.809.547,60. Terlihat Beban Transfer-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp31.930.320.269,40 atau 7,05%.

Realisasi Beban Transfer-LO sebesar Rp484.768.644.417,00, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.132

Mutasi Beban Transfer – LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Belanja Transfer-LRA Tahun 2025		490.186.410.577,00
	Sub-Jumlah	**490.186.410.577,00**
Mutasi Tambah		
1	Penambahan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa Tahun 2025	1.555.186.789,60
2	Penambahan Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa Tahun 2025	270.477.103,70
3	Penambahan Utang Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa ke Desa Tahun 2025	39.649.295,00
4	Koreksi Kesalahan Pencatatan Piutang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa serta Kesalahan Pencatatan Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa pada LK Unaudited TA 2025	6.514.600,00
	Sub-Jumlah	**1.871.827.788,30**
Mutasi Kurang		
1	Pengurangan Utang Bagi Hasil Pajak Daerah ke Desa dengan Kompensasi Penyaluran Bagi Hasil Tahun 2025	(4.989.390.854,30)
2	Pengurangan Utang Bagi Hasil Retribusi Daerah ke Desa dengan Kompensasi Penyaluran Bagi Hasil Tahun 2025	(2.300.203.094,00)
	Sub-Jumlah	**(7.289.593.948,30)**
Beban Transfer-LO Tahun 2025		**484.768.644.417,00**

Realisasi Beban Transfer-LO per 31 Desember 2025 terdiri dari:

Tabel 5.133

Rincian Beban Transfer-LO Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			Rp	%
1	2	3	4	5
Beban Bagi Hasil	**69.724.904.306,00**	**60.495.608.897,60**	**9.229.295.408,40**	**15,25**
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	68.154.536.986,30	59.025.478.437,30	9.129.058.549,00	15,47
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.570.367.319,70	1.470.130.460,30	100.236.859,40	6,82
Beban Bantuan Keuangan	**415.043.740.111,00**	**392.336.200.650,00**	**22.707.539.461,00**	**5,79**
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	415.043.740.111,00	392.336.200.650,00	22.707.539.461,00	5,79
JUMLAH	**484.768.644.417,00**	**452.831.809.547,60**	**31.936.834.869,40**	**7,05**

5.4.3.15 Beban Tak Terduga - LO

Realisasi Beban Tak Terduga-LO sampai dengan akhir TA 2025 sebesar Rp0,00 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp3.749.217.954,00.

Beban Tak Terduga-LO TA 2025 mengalami penurunan sebesar Rp3.749.217.954,00 atau 100,00%.

5.4.3.16 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sampai dengan akhir TA 2025 ialah sebesar Rp4.202.745.287,93 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp0,00. Terlihat Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp4.202.745.287,93 atau 100,00%.

Realisasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp4.202.745.287,93, dipengaruhi oleh beberapa transaksi keuangan dengan rincian mutasi sebagai berikut:

Tabel 5.134
Mutasi Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO Tahun 2025

Uraian		Nominal (Rp)
Realisasi Penerimaan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LRA Tahun 2025		0,00
	Sub-Jumlah	0,00
Mutasi Tambah		
1	Pendapatan dari Pengurangan Penyisihan Piutang akibat Pembayaran pada Tahun 2025	4.059.428.637,93
2	Penambahan Persediaan Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan akibat Kelahiran Ternak dan Ikan pada Tahun 2025	143.316.650,00
	Sub-Jumlah	**4.202.745.287,93**
Mutasi Kurang		
	Sub-Jumlah	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO Tahun 2025		**4.202.745.287,93**

5.4.4. Surplus/Defisit - LO

Tabel 5.135
Rincian Surplus/Defisit – LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun	
	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Pendapatan	3.598.340.916.770,41	3.641.969.156.042,83
Beban	3.328.138.063.518,20	3.183.642.287.202,54
Surplus/Defisit Dari Operasi	**270.202.853.252,21**	**458.326.868.840,29**
Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	4.202.745.287,93	0,00
Pos Luar Biasa	0,00	0,00
Surplus/Defisit Setelah Pos Luar Biasa	**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**
Surplus/Defisit – LO	**274.405.598.540,14**	**458.326.868.840,29**

5.5. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Laporan Arus Kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non-keuangan, pembiayaan, dan non-anggaran (transitoris). Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 sudah termasuk arus kas masuk dan keluar dari aktivitas BLUD, Dana BOK Pusat, Bantuan Operasional untuk PAUD dan Kesetaraan serta Dana BOS Pusat sebesar ketetapan pendapatan dan belanja yang disahkan atas transaksi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Cililin, BLUD RSUD Cikalongwetan, BLUD RSUD Lembang, 32 BLUD Puskesmas, 1 BLUD Labkesda, Dana BOP dan Dana BOS Pusat yang dikelola di luar mekanisme APBD.

5.5.1. Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Nilai arus kas dari aktivitas operasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2025 dan 2024 masing-masing sebesar Rp428.682.433.292,00 dan Rp553.037.130.348,27 jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas operasi yaitu arus kas masuk sebesar Rp3.394.673.837.980,00 dari aktivitas operasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas operasi sebesar Rp2.965.991.404.688,00. Arus Kas Aktivitas Operasi terdiri atas (1) Arus Kas Masuk yaitu dari: Penerimaan Pajak Daerah, Penerimaan Retribusi Daerah, Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah, dan Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah (2) Arus Kas Keluar yaitu untuk: Pembayaran Pegawai, Pembayaran Barang dan Jasa, Pembayaran Bunga, Pembayaran Hibah, Pembayaran Bantuan Sosial, Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah, Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa. Rincian nilai rupiah Arus Kas Aktivitas Operasi per 31 Desember 2025 dan 2024 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.136
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah	743.748.765.926,00	590.254.784.373,00	153.493.981.553,00	26,00

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah	218.559.812.666,00	14.701.304.603,00	203.858.508.063,00	1.386,67
Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.256.835.358,00	1.306.239.012,00	(49.403.654,00)	(3,78)
Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah	17.738.403.537,00	193.669.790.390,97	(175.931.386.853,97)	(90,84)
Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.193.985.867.415,00	2.222.223.055.903,00	(28.237.188.488,00)	(1,27)
Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah	219.384.153.078,00	388.335.806.154,00	(168.951.653.076,00)	(43,51)
Jumlah Arus Masuk Kas	**3.394.673.837.980,00**	**3.410.490.980.435,97**	**(15.817.142.455,97)**	**(0,46)**
Pembayaran Pegawai	1.293.542.540.191,00	1.243.654.808.162,00	49.887.732.029,00	4,01
Pembayaran Barang dan Jasa	1.106.680.765.952,00	1.032.553.814.067,70	74.126.951.884,30	7,18
Belanja Bunga	0,00	3.212.359.686,00	(3.212.359.686,00)	(100,00)
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Hibah	69.926.687.968,00	123.753.810.400,00	(53.827.122.432,00)	(43,50)
Pembayaran Bantuan Sosial	5.655.000.000,00	2.955.000.000,00	2.700.000.000,00	91,37
Pembayaran Tak Terduga	0,00	3.749.217.954,00	(3.749.217.954,00)	(100,00)
Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah	71.588.741.051,00	53.916.548.836,00	17.672.192.215,00	32,78
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah	3.593.576.710,00	1.322.533.789,00	2.271.044.921,00	171,72
Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa	415.004.090.816,00	392.335.757.193,00	22.668.333.623,00	5,78
Jumlah Arus Keluar Kas	**2.965.991.404.688,00**	**2.857.453.850.067,70**	**108.537.554.600,30**	**3,79**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	**428.682.433.292,00**	**553.037.130.348,27**	**(124.354.697.056,27)**	**(22,49)**

a. Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi

Arus masuk kas dari aktivitas operasi pemerintahan adalah penerimaan uang tunai selama satu periode yang berasal dari kegiatan utama pemerintah untuk menjalankan fungsi pelayanan publik, seperti pajak dan retribusi. Arus ini mencerminkan kemampuan pemerintah menghasilkan kas untuk mendanai operasional tanpa bergantung pada pinjaman. Arus Masuk kas dari aktivitas operasi TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

1) Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah

Arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp743.748.765.926,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan

sebesar Rp153.493.981.553,00 atau 26,00% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp590.254.784.373,00. Rincian penerimaan Pajak Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.1.

2) **Penerimaan Pendapatan Retribusi Daerah**

Arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp218.559.812.666,00. Arus kas masuk tersebut mengalami peningkatan sebesar Rp203.858.508.063,00 atau 1.386,67% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp14.701.304.603,00. Rincian penerimaan Retribusi Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.2. Terdapat perbedaan saldo awal Retribusi Daerah dengan LRA dikarenakan pada LAK Pendapatan BLUD masih terdapat pada Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp181.766.677.364,00.

3) **Penerimaan Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.256.835.358,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp49.403.654,00 atau 3,78% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.306.239.012,00. Rincian penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.3.

4) **Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah**

Arus kas masuk dari Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp17.738.403.537,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp175.931.386.853,97 atau 90,84% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Lain-lain PAD Yang Sah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp193.669.790.390,97. Rincian penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.1.4. Terdapat perbedaan saldo awal Lain-lain PAD yang Sah dengan LRA dikarenakan pada LAK Pendapatan BLUD belum direklasifikasi ke Retribusi Daerah sebesar Rp181.766.677.364,00.

5) **Penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

Arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp2.193.985.867.415,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp28.237.188.488,00 atau 1,27% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat untuk periode yang

berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.222.223.055.903,00. Rincian penerimaan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.2.1.

6) Penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah

Arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp219.384.153.078,00. Arus kas masuk tersebut mengalami penurunan sebesar Rp168.951.653.076,00 atau 43,51% jika dibandingkan dengan arus kas masuk dari Pendapatan Transfer Antar Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp388.335.806.154,00. Rincian penerimaan Pendapatan Transfer Antar Daerah disajikan pada CaLK nomor 5.1.2.1.2.2.

b. Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi

Arus keluar kas dari aktivitas operasi pemerintahan adalah pengeluaran uang dari Kas Negara/Daerah untuk mendanai kegiatan operasional harian, layanan publik, dan operasional rutin pemerintahan dalam satu periode. Pengeluaran ini utamanya mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, bunga, dan subsidi. Arus keluar kas dari aktivitas operasi TA 2025 dan 2024 terdiri dari:

1) Pembayaran Pegawai

Pembayaran Pegawai ini menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat untuk membiayai belanja pegawai pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus kas keluar Pembayaran Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.293.542.540.191,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp49.887.732.029,00 atau 4,01% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.243.654.808.162,00.

2) Pembayaran Barang dan Jasa

Pembayaran Barang adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah. Arus kas keluar Pembayaran Barang untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp1.106.680.765.952,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp74.126.951.884,30 atau 7,18% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.032.553.814.067,70.

3) Belanja Bunga

Pembayaran Bunga merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk pembayaran bunga utang pinjaman. Arus kas keluar Pembayaran Bunga untuk periode

yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.212.359.686,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bunga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.212.359.686,00.

4) **Belanja Subsidi**

Pembayaran Subsidi merupakan pembayaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau oleh masyarakat. Arus kas keluar Pembayaran Subsidi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00 (Nihil).

5) **Pembayaran Hibah**

Pembayaran Hibah merupakan jumlah pengeluaran kas yang dikeluarkan sebagai bantuan kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Arus kas keluar Pembayaran Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp69.926.687.968,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp53.827.122.432,00 atau 43,50% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Hibah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp123.753.810.400,00.

6) **Pembayaran Bantuan Sosial**

Pembayaran Bantuan Sosial menunjukkan nilai rupiah pengeluaran kas yang dikeluarkan untuk memberikan bantuan sosial atau sejenisnya kepada pihak ketiga pada periode yang berakhir 31 Desember 2025. Arus kas keluar Pembayaran Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp5.655.000.000,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.700.000.000,00 atau 91,37% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Sosial untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp2.955.000.000,00.

7) **Pembayaran Tak Terduga**

Pembayaran Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp0,00. Arus kas keluar tersebut mengalami penurunan sebesar Rp3.749.217.954,00 atau 100% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Tak Terduga untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp3.749.217.954,00.

8) **Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah**

Pembayaran Bagi Hasil Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp71.588.741.051,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp17.672.192.215,00 atau 32,78% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja

Bagi Hasil Pajak Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp53.916.548.836,00.

9) **Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah**

Pembayaran Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp3.593.578.710,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp2.271.044.921,00 atau 171,72% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp1.322.533.789,00.

10) **Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa**

Pembayaran Bantuan Keuangan Ke Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp415.004.090.816,00. Arus kas keluar tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp22.668.333.623,00 atau 5,78% jika dibandingkan dengan arus kas keluar Belanja Bantuan Keuangan Ke Desa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp392.335.757.193,00.

5.5.2. Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Nilai arus kas dari aktivitas investasi Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2025 dan 2024, yaitu masing-masing sebesar (Rp301.236.771.183,00) dan (Rp401.734.675.346,30) jumlah tersebut merupakan arus kas bersih dari aktivitas investasi yaitu arus kas masuk dari aktivitas investasi dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Rincian arus kas dari aktivitas investasi sebagai berikut:

Tabel 5.137
Arus Kas dari Aktivitas Non Keuangan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin-LRA	119.641.500,00	0,00	119.641.500,00	100,00
Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan-LRA	60.000.000,00	0,00	60.000.000,00	100,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**179.641.500,00**	**0,00**	**179.641.500,00**	**100,00**
Perolehan Tanah	3.180.185.537,00	0,00	3.180.185.537,00	100,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	129.103.772.848,00	206.530.329.113,30	(77.426.556.265,30)	(37,49)
Perolehan Gedung dan Bangunan	66.813.132.281,00	57.500.309.714,00	9.312.822.567,00	16,20

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.032.212.447,00	123.152.366.703,00	(45.120.154.256,00)	(36,64)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	22.692.669.310,00	14.355.008.616,00	8.337.660.694,00	58,08
Perolehan Aset Lainnya	1.594.440.260,00	196.661.200,00	1.397.779.060,00	710,75
Jumlah Arus Keluar Kas	**301.416.412.683,00**	**401.734.675.346,30**	**(100.318.262.663,30)**	**(24,97)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**(301.236.771.183,00)**	**(401.734.675.346,30)**	**100.497.904.163,30**	**(25,02)**

a. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus Kas Masuk berasal dari aktivitas investasi asset non keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 sebesar Rp179.641.500,00. Arus kas masuk tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp179.641.500,00 atau 100,00% jika dibandingkan dengan arus kas masuk untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp0,00.

b. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

1) Perolehan Aset Tetap

Perolehan Aset Tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset tetap dan akan menambah aset tetap Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memperoleh aset tetap yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp299.821.972.423,00. Arus kas atas perolehan Aset tetap pemerintah tersebut mengalami penurunan sebesar Rp101.716.041.723,30 atau 25,33% dibandingkan dengan perolehan aset tetap pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp401.538.014.146,30. Dijelaskan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.138
Rincian Perolehan Aset Tetap Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Perolehan Tanah	3.180.185.537,00	0,00	3.180.185.537,00	100,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	129.103.772.848,00	206.530.329.113,30	(77.426.556.265,30)	(37,49)
Perolehan Gedung dan Bangunan	66.813.132.281,00	57.500.309.714,00	9.312.822.567,00	16,20
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	78.032.212.447,00	123.152.366.703,00	(45.120.154.256,00)	(36,64)
Perolehan Aset Tetap Lainnya	22.692.669.310,00	14.355.008.616,00	8.337.660.694,00	58,08
Perolehan Aset Tetap	**299.821.972.423,00**	**401.538.014.146,30**	**(101.716.041.723,30)**	**(25,33)**

2) Perolehan Aset Lainnya

Perolehan Aset Lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat digunakan untuk membiayai belanja aktivitas fisik yang bersifat menambah aset lainnya dan akan menambah aset lainnya Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat. Selama periode yang berakhir 31 Desember 2025 Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat memperoleh aset lainnya yang mengakibatkan adanya arus kas keluar sebesar Rp1.594.440.260,00. Arus kas atas perolehan Aset lainnya pemerintah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp1.397.779.060,00 atau 710,75% dibandingkan dengan perolehan aset lainnya pemerintah untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 sebesar Rp196.661.200,00.

5.5.3. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto sehubungan dengan pembiayaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Nilai Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan Pemerintah selama TA 2025 dan 2024 yaitu masing-masing sebesar Rp0,00 dan (Rp99.142.939.400,00) merupakan arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan yaitu arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan. Rincian arus kas dari aktivitas pembiayaan pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 5.139
Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pokok Pinjaman dari Lembaga Non Bank (BUMN)	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Arus Masuk Kas	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	0,00	99.142.939.400,00	(99.142.939.400,00)	(100,00)
Jumlah Arus Keluar Kas	**0,00**	**99.142.939.400,00**	**(99.142.939.400,00)**	**(100,00)**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	**0,00**	**(99.142.939.400,00)**	**99.142.939.400,00**	**100,00**

a. Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan

Selama periode yang berakhir 31 Desember 2025 arus kas keluar dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp0,00 (Nihil) dibandingkan dengan 31 Desember 2024 sebesar Rp99.142.939.400,00 mengalami penurunan sebesar Rp99.142.939.400,00 atau 100%.

5.5.4. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. Nilai arus kas dari aktivitas transitoris Pemerintah Kabupaten Bandung Barat selama TA 2025 dan 2024 yaitu masing-masing sebesar (Rp16.456.004,00) dan Rp16.490.004,00 yang merupakan arus kas masuk dari aktivitas transitoris dikurangi dengan arus kas keluar dari aktivitas transitoris yang merupakan Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Rincian arus kas dari aktivitas transitoris sebagai berikut:

Tabel 5.140
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2025 dan Tahun 2024

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	322.442.348.789,00	159.014.476.884,00	163.427.871.905,00	102,78
Jumlah Arus Masuk Kas	**322.442.348.789,00**	**159.014.476.884,00**	**163.427.871.905,00**	**102,78**
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	322.458.804.793,00	158.997.986.880,00	163.460.817.913,00	102,81
Jumlah Arus Keluar Kas	**322.458.804.793,00**	**158.997.986.880,00**	**163.460.817.913,00**	**102,81**

Uraian	TA 2025 (Rp)	TA 2024 (Rp)	Kenaikan / (Penurunan)	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	(16.456.004,00)	16.490.004,00	(32.946.008,00)	(199,79)

5.5.5. Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat

Berdasarkan perhitungan arus kas bersih pada aktivitas operasi, investasi, pembiayaan, transitoris, maka terdapat kenaikan kas bersih sebesar Rp127.429.206.105,00 untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025. Saldo awal Kas Setara Kas tahun 2025 adalah sebesar Rp78.247.454.444,00 dan saldo akhir Kas Setara Kas per 31 Desember 2025 sebesar Rp205.676.660.549,00. Penjelasan lebih lanjut terkait kas tersebut disajikan pada CaLK nomor 5.3.1.1.1 dengan rincian kas per 31 Desember 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.141
Rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat
per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	2025 (Rp)	2024 (Rp)
Kas dan Setara Kas	**205.676.660.549,00**	**78.247.454.444,00**
Kas di Kas Daerah	188.923.080.748,00	62.162.729.892,00
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	2.267.800,00	0,00
Kas di BLUD	14.250.419.213,00	13.256.878.492,00
Kas Dana BOS	13.450.700,00	15.334.411,00
Kas Dana BOP	0,00	0,00
Kas Dana BOK	2.431.950.227,00	2.796.021.645,00
Kas in Transit	55.457.861,00	0,00
Kas Lainnya	34.000,00	16.490.004,00

5.6. Rincian dari Penjelasan Masing-masing Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, koreksi ekuitas, surplus/defisit-LO, dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada periode tahun 2025. Berikut adalah Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 sebagai berikut:

Tabel 5.142

Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4
1	Ekuitas Awal	4.876.953.111.814,14	4.611.572.184.162,15
2	Surplus/Defisit - LO	274.405.598.540,14	458.326.868.840,29
3	Koreksi Ekuitas	(117.809.302.070,35)	(56.974.135.807,22)
4	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	177.621.989,00	(135.971.805.381,08)
	Jumlah Ekuitas Akhir	**5.033.727.030.272,93**	**4.876.953.111.814,14**

Realisasi Ekuitas sampai dengan akhir TA 2025 mencapai Rp5.033.727.030.272,93 bila dibandingkan dengan realisasi TA 2024 yang jumlahnya tercatat sebesar Rp4.876.953.111.814,14. Realisasi ekuitas akhir TA 2025 mengalami kenaikan sebesar Rp156.773.918.458,79 atau 3,21%.

5.6.1. Ekuitas Awal

Tabel 5.143

Rincian Ekuitas Awal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Awal	4.876.953.111.814,14	4.611.572.184.162,15

Saldo tersebut di atas merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Ekuitas Awal dalam Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025, yaitu saldo ekuitas akhir *audited* per 31 Desember 2024.

5.6.2. Surplus/Defisit - LO

Tabel 5.144

Rincian Surplus/Defisit-LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	274.405.598.540,14	458.326.868.840,29

Saldo tersebut merupakan Surplus/Defisit-LO dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025, dimana Saldo Surplus/Defisit-LO dihasilkan pada periode TA 2025 (untuk tahun yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025) setelah *closing entry*.

5.6.3. Koreksi Ekuitas

Saldo tersebut merupakan Koreksi Ekuitas dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan saldo koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun berjalan dengan rincian pada tabel berikut ini:

Tabel 5.145

Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2025 dan Tahun 2024

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4
1	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG	(240.427.480,00)	0,00
2	KOREKSI PENCATATAN PIUTANG	(52.680.569.895,00)	(1.490.853.807,00)
3	KOREKSI NILAI PENYISIHAN PIUTANG	0,00	(85.485.130.542,93)
4	KOREKSI NILAI PERSEDIAAN	0,00	20.072.148,01
5	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH	5.861.700.728,00	14.439.125.412,00
6	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	(174.807.000,00)	(256.478.400,00)
7	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN	182.770.270,00	181.339.088,41
8	KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	0,00	28.175.561.026,00
9	KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR	(1.728.020.298,10)	188.000.000,00
10	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN	(2.523.889.382,03)	(619.766.599,60)
11	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN GEDUNG DAN BANGUNAN	0,00	(3.834.035.414,90)
12	KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	1.322.882.880,00	(8.662.900.084,03)
13	KOREKSI PENCATATAN PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN	(67.846.225.293,22)	(251.276.666,00)
14	KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG	17.283.400,00	622.208.032,82
	JUMLAH	**(117.809.302.070,35)**	**(56.974.135.807,22)**

Penjelasan lebih rinci untuk koreksi ekuitas per perangkat daerah TA 2025 kami sajikan dalam **lampiran 30.**

1. KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG

Koreksi Ekuitas atas Saldo Awal Pencatatan Piutang tahun 2025 merupakan pengurangan piutang sebesar Rp240.427.480,00 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan atas piutang kemitraan dengan pihak ketiga (bangun guna serah). Koreksi dilakukan atas piutang bangun guna serah dikarenakan nilai sisa piutang sampai dengan tahun 2024 sebesar Rp240.427.480,00 sudah dilakukan pembayaran, namun piutang masih tercatat pada neraca.

2. KOREKSI PENCATATAN PIUTANG

Koreksi Ekuitas atas Piutang sebesar Rp52.680.569.895,00 merupakan koreksi yang tercatat pada SKPD sebagai berikut:

a). Koreksi pada Badan Keuangan dan Aset Daerah sebesar Rp1.396.763.627,00 atas transaksi sebagai berikut:

1) Pengurangan piutang karena reklasifikasi saldo awal 2025 piutang bagi hasil pajak daerah dari piutang bantuan keuangan sebesar Rp1.704.754.132,00;
2) Pengurangan piutang karena reklasifikasi saldo awal 2025 piutang bagi hasil retribusi daerah dari piutang bantuan keuangan sebesar Rp16.916.240,00;
3) Penambahan piutang bagi hasil pajak daerah pada tahun 2025 sebesar Rp296.453.968,30; dan
4) Penambahan piutang bagi hasil retribusi daerah pada tahun 2025 sebesar Rp28.452.776,70.

b). Koreksi atas Piutang PBB-P2 pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp51.283.806.268,00 atas transaksi sebagai berikut:
1) Pengurangan piutang karena koreksi pencatatan saldo awal Buku I sampai dengan V sebesar Rp31;
2) Pengurangan piutang dikarenakan perubahan ketetapan dan kompensasi sebesar Rp13.746.826,00;
3) Pengurangan piutang dikarenakan koreksi pencatatan atas bukti pembayaran sebesar Rp9.135.589,00;
4) Pengurangan piutang karena pembatalan sebesar Rp292.505.229,00;
5) Penambahan piutang dikarenakan kelebihan pembayaran sebesar Rp7.396.319,00; dan
6) Pengurangan piutang 100% yaitu penghapusan piutang untuk masyarakat dikarenakan program dari Bupati sebesar Rp50.975.814.912,00. Pengurangan berdasarkan SK Bupati No. 100.3.3.2/Kep.285-Bapenda/2025 tanggal 19 Agustus 2025 tentang Penetapan Pemberian Pengurangan Terhadap Tunggakan Pokok dan Sanksi Administratif PBB-P2. Pengurangan diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
   (a) Wajib Pajak Pribadi;
   (b) Tunggakan pokok dan sanksi administratif Tahun 1994 sampai dengan Tahun 2024; dan
   (c) Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran PBB-P2 Tahun 2025 pada tanggal 19 Agustus 2025 sampai dengan 31 Desember 2025 dan tercatat lunas pada sistem perbankan.

3. KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Aset Tetap - Tanah tahun 2025 sebesar Rp5.861.700.728,00 merupakan koreksi yang tercatat pada SKPD sebagai berikut:

a). Koreksi pada Dinas Pendidikan sebesar Rp50.000.000,00 berasal dari koreksi pencatatan tanah untuk bangunan tempat kerja dari hibah tahun 2013 tetapi baru dicatat pada tahun 2025; dan

b). Koreksi pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp5.811.700.728,00 atas transaksi sebagai berikut:

1) Penambahan tanah berupa koreksi berdasarkan surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor Rp.600.2/1057/Disperkim tanggal 24 September 2025 pada Perumahan Setia Budi Regency sebesar Rp140.495.000.000,00;
2) Penambahan tanah karena koreksi harga berdasarkan surat nomor 400.11.3.2/2200.2/Disperkim tanggal 04 Desember 2025 sebesar Rp4.802.700.728,00 merupakan hasil penilaian appraisal atas serah terima tanah yang belum dilengkapi nilai perolehan;
3) Penambahan tanah berupa pecah data berdasarkan surat nomor 600.2/1754/Disperkim tanggal 03 Oktober 2025 sebesar Rp10.441.088.000,00 pada Perumahan Alam Sanggar Indah;
4) Pengurangan tanah karena koreksi berdasarkan surat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman nomor Rp600.2/1057/Disperkim tanggal 24 September 2025 pada Perumahan Setia Budi Regency sebesar Rp139.486.000.000,00; dan
5) Pengurangan tanah berupa data gabungan berdasarkan surat nomor 600.2/1754/Disperkim tanggal 03 Oktober 2025 sebesar Rp10.441.088.000,00 pada Perumahan Alam Sanggar Indah.

4. KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin sebesar Rp174.807.000,00 merupakan koreksi akun aset tetap peralatan dan mesin pada:

a) Sekretariat Daerah sebesar berupa pengurangan peralatan dan mesin berupa koreksi *double* catat berdasarkan surat pernyataan Sekretaris Daerah nomor 700.1/3077/Bag.Um tanggal 17 Juli 2025 sebesar Rp144.927.500,00; dan
b) Badan Keuangan dan Aset Daerah berupa koreksi terhadap kendaraan yang tercatat ganda sebesar Rp29.879.500,00.

5. KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Aset Tetap - Gedung dan Bangunan sebesar Rp182.770.270,00 merupakan penambahan aset pada Dinas Kesehatan dikarenakan perolehan Gedung dan bangunan berasal dari utang belanja modal RSUD Cikalongwetan

belum diakui pada tahun sebelumnya, sehingga aset gedung dan bangunannya belum tercatat pada neraca.

6. **KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR**

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Aset Lainnya - TGR sebesar Rp1.728.020.298,10 merupakan pengurangan akun aset lainnya – TGR berdasarkan Laporan Hasil Pemantauan BPK RI atas Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II TA 2025 pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibandingkan saldo tahun 2024.

7. **KOREKSI PENCATATAN AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN**

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin sebesar Rp2.523.889.382,03 merupakan koreksi pada akun akumulasi penyusutan peralatan dan mesin pada:

a) Dinas Pendidikan berkurang sebesar Rp2.913.800,00;
b) Dinas Kesehatan bertambah sebesar Rp56.355.983,80;
c) Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang berkurang sebesar Rp13.650.000,00;
d) Satuan Polisi Pamong Praja berkurang sebesar Rp1.687.500,00;
e) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan berkurang sebesar Rp175.400,00;
f) Dinas Tenaga Kerja berkurang sebesar Rp949.619.720,00;
g) Dinas Lingkungan Hidup bertambah sebesar Rp6.116.666,67;
h) Dinas Perhubungan berkurang sebesar Rp1.808.642.520,00;
i) Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik bertambah sebesar Rp39.327.000,00;
j) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu bertambah sebesar Rp1.894.500,00;
k) Dinas Pemuda dan Olahraga bertambah sebesar Rp2.045.200,00;
l) Dinas arsip dan Perpustakaan berkurang sebesar Rp29.146.000,00;
m) Dinas Perikanan dan Peternakan bertambah sebesar Rp214.507,50;
n) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan berkurang sebesar Rp1.072.800,00;
o) Sekretariat Daerah bertambah sebesar Rp144.927.500,00;
p) Badan Keuangan dan Aset Daerah bertambah sebesar Rp29.879.500,00;
q) Kecamatan Padalarang bertambah sebesar Rp1.800.000,00; dan
r) Kecamatan Cisarua bertambah sebesar Rp457.500,00.

Adapun rincian barang untuk koreksi penghapusan aset lain-lain disajikan dalam **Lampiran 31**.

8. KOREKSI PENCATATAN AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Akumulasi Jalan Jaringan, dan Irigasi merupakan pengurangan bangunan air kotor lainnya sebesar Rp1.322.882.880,00 karena kesalahan pencatatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Adapun rincian barang untuk koreksi akumulasi penyusutan jalan, jaringan, dan irigasi disajikan dalam **Lampiran 32.**

9. KOREKSI PENCATATAN PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN

Koreksi ekuitas atas pencatatan penghapusan aset lain-lain sebesar Rp67.846.225.293,22 merupakan penghapusan barang rusak berat sebagaimana dijabarkan pada tabel berikut:

Tabel 5.146
Rincian SKPD yang Mengalami Koreksi Penghapusan Aset Lain-lain Tahun 2025

NO	SKPD	Nilai Koreksi (Rp)
1	Dinas Pendidikan	(12.834.966.263,22)
2	Dinas Kesehatan	(810.461.650,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	(1.199.150,00)
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(77.750.000,00)
5	Dinas Sosial	(34.650.000,00)
6	Dinas Tenaga Kerja	(265.982.000,00)
7	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	(1.247.882.900,00)
8	Dinas Lingkungan Hidup	(2.594.051.300,00)
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(1.737.363.100,00)
10	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	(429.119.200,00)
11	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(673.495.500,00)
12	Dinas Pemuda dan Olahraga	(64.696.100,00)
13	Dinas arsip dan Perpustakaan	(96.900.000,00)
14	Dinas Perikanan dan Peternakan	(49.439.800,00)
15	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	(1.446.318.800,00)
16	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	(1.134.040.070,00)
17	Sekretariat Daerah	(17.899.800,00)
18	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	(4.266.237.420,00)
19	Badan Keuangan dan Aset Daerah	(39.995.155.600,00)
20	Badan Pendapatan Daerah	(55.459.200,00)
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	(10.319.200,00)
22	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(2.838.240,00)
	JUMLAH	**(67.846.225.293,22)**

Adapun rincian barang untuk koreksi penghapusan aset lain-lain disajikan dalam **Lampiran 33.**

10. KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG

Koreksi Ekuitas atas Pencatatan Utang sebesar Rp17.283.400,00 merupakan penghapusan utang belanja pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penghapusan dilakukan setelah pihak penerima utang sepakat untuk melakukan hapus hutang bayar dengan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat, dalam hal ini diwakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang. Penghapusan utang tersebut terdiri dari:

a). Utang milik PT. Selaras Cakra Utama sebesar Rp7.814.000,00 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Belanja Nomor 2686/BA/PBPPBK/DPUTR/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025; dan

b). Utang milik PT. Selaras Cakra Utama sebesar Rp9.469.400,00 berdasarkan Berita Acara Penghapusan Belanja Nomor 2687/BA/PBPPBK/DPUTR/XII/2025 tanggal 29 Desember 2025.

5.6.4. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Saldo Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan dan Koreksi Kesalahan Mendasar dalam Laporan Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan saldo koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas dengan rincian:

Tabel 5.147
Rincian Tabel Dampak Kumulatif
Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar Tahun 2025

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4
	PENURUNAN PENYISIHAN PIUTANG	**0,00**	**750.870.288,76**
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	341.445,00
2	BADAN PENDAPATAN DAERAH	0,00	750.528.843,76
	DAMPAK PERUBAHAN KEBIJAKAN ASET TETAP	**0,00**	**(136.767.392.398,84)**
1	DINAS PENDIDIKAN	0,00	(133.594.947.174,35)
2	DINAS KESEHATAN	0,00	(70.854.834,00)
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	0,00	(10.285.500,00)
4	DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN	0,00	(34.063.942,59)
5	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	0,00	(199.600,00)
6	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	0,00	(2.999.700,00)
7	DINAS TENAGA KERJA	0,00	(574.000,00)

NO	URAIAN	2025 (Rp)	2024 (Rp)
1	2	3	4
8	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN	0,00	(1.828.600,00)
9	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	0,00	(1.250.000,00)
10	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	0,00	(40.528.000,00)
11	DINAS PERHUBUNGAN	0,00	(3.000.000,00)
12	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIKA	0,00	(1.089.000,00)
13	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	0,00	(7.195.000,00)
14	DINAS ARSIP DAN PERPUSTAKAAN	0,00	(2.890.816.137,90)
15	DINAS PERIKANAN DAN PETERNAKAN	0,00	(5.408.500,00)
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	0,00	(5.975.000,00)
17	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	0,00	(1.600.000,00)
18	SEKRETARIAT DAERAH	0,00	(783.700,00)
19	SEKRETARIAT DPRD	0,00	(84.317.910,00)
20	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	0,00	(3.120.800,00)
21	INSPEKTORAT DAERAH	0,00	(4.275.000,00)
22	KECAMATAN CISARUA	0,00	(500.000,00)
23	KECAMATAN SAGULING	0,00	(1.000.000,00)
24	KECAMATAN PARONGPONG	0,00	(200.000,00)
25	KECAMATAN CIHAMPELAS	0,00	(180.000,00)
26	KECAMATAN RONGGA	0,00	(400.000,00)
	PENURUNAN NILAI INVESTASI JANGKA PANJANG	**177.621.989,00**	**44.716.729,00**
1	BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	177.621.989,00	44.716.729,00
	JUMLAH	**177.621.989,00**	**(135.971.805.381,08)**

Nilai Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebesar Rp177.621.989,00 merupakan penurunan nilai investasi jangka panjang pada Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dengan perhitungan sebagai berikut:

Tabel 5.148
Investasi/Penyertaan Modal
Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025

Uraian perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada perumda Tirta Wibawa Mukti Bandung Barat	2025 (Audited) (Rp)
PENYERTAAN MODAL PEMDA	
Jumlah Modal yang telah disetor s.d. 31 Des 2025	35.000.000.000,00
Jumlah Tambahan Modal disetor s.d. 31 Des 2025	0,00
Jumlah Modal yg telah disetor s.d. 31 Des 2025	**35.000.000.000,00**
Laba Ditahan :	
Dividen Tahun Berjalan	(179.000.000,00)
Reklasifikasi	
Laba/(Rugi) tahun Berjalan	356.621.989,00

Uraian perubahan Nilai Investasi / Penyertaan Modal Pemda Pada perumda Tirta Wibawa Mukti Bandung Barat	2025 (Audited) (Rp)
Laba/(Rugi) tahun lalu	(741.792.669,00)
Dividen tahun lalu	
Nilai Investasi TA 2025	**34.435.829.320,00**
Nilai Investasi TA 2024	**34.258.207.331,00**
Tambahan nilai Investasi TA 2025	177.621.989,00
Tambahan Modal Disetor TA 2025	0,00
Kenaikan/Penurunan nilai Investasi (koreksi ekuitas)	**177.621.989,00**

5.6.5. Ekuitas Akhir

Tabel 5.149

Rincian Ekuitas Akhir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2024 (Rp)
Ekuitas Akhir	5.033.727.030.272,93	4.876.953.111.814,14

Saldo tersebut di atas merupakan Ekuitas Akhir dalam Laporan Perubahan Ekuitas, merupakan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat per 31 Desember 2025.

BAB VI
PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NONKEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 2007. Kabupaten Bandung Barat terpisah secara administratif dari Kabupaten Bandung mulai Bulan Oktober 2007 dengan mempunyai APBD sendiri (APBD mini). Kabupaten Bandung Barat memiliki luas wilayah lebih kurang 130.577,40 km^2 dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Subang dan Purwakarta;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kota Cimahi dan Kota Bandung;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Cianjur; dan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bandung.

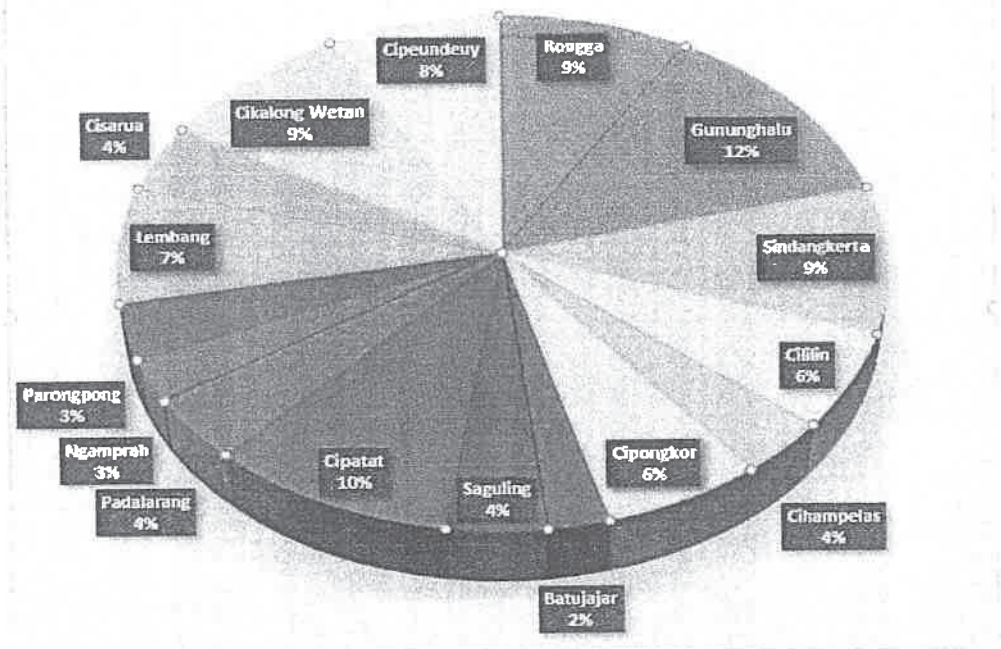
Secara astronomis, Kabupaten Bandung Barat terletak antara 60,373' sampai dengan 70,131' Lintang Selatan dan 1070 ,110' sampai dengan 10701440' 06" Bujur Timur.



Gambar 6.1
Peta Wilayah Kabupaten Bandung Barat

Secara administratif Kabupaten Bandung Barat mencakup enam belas kecamatan yang meliputi 165 desa. Enam belas kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Kecamatan Ngamprah;
2. Kecamatan Cipatat;
3. Kecamatan Batujajar;
4. Kecamatan Padalarang;
5. Kecamatan Sindangkerta;
6. Kecamatan Cipongkor;
7. Kecamatan Gununghalu;
8. Kecamatan Rongga;
9. Kecamatan Cililin;
10. Kecamatan Cikalongwetan;
11. Kecamatan Cipeundeuy;
12. Kecamatan Parongpong;
13. Kecamatan Cisarua;
14. Kecamatan Lembang;
15. Kecamatan Cihampelas; dan
16. Kecamatan Saguling.



Gambar 6.2
Luas Daerah menurut Kecamatan (%)



Gambar 6.3
Persentase Luas Kecamatan

Wilayah kecamatan tersebut terdiri dari pemerintahan desa. Nama-nama desa di wilayah Kabupaten Bandung Barat adalah:

Kecamatan Rongga

1 Cicadas;
2 Cibedug;
3 Sukamanah;
4 Bojong;
5 Bojongsalam;
6 Cinengah;
7 Sukaresmi;
8 Cibitung.

Kecamatan Gununghalu

9 Cilangari;
10 Sindangjaya;
11 Bunijaya;
12 Sirnajaya;
13 Gununghalu;
14 Celak;
15 Wargasaluyu;
16 Sukasari;
17 Tamanjaya;

Kecamatan Sindangkerta

18 Mekarwangi;
19 Weninggalih;
20 Wangunsari;
21 Buninagara;
22 Cikadu;
23 Rancasenggang;
24 Cintakarya;
25 Cicangkanggirang;
26 Puncaksari;
27 Pasirpogor;
28 Sindangkerta;

Kecamatan Cipongkor

57 Cintaasih;
58 Karangsari;
59 Neglasari;
60 Girimukti;
61 Cijenuk;
62 Cicangkanghilir;
63 Sukamulya;
64 Citalem;
65 Mekarsari;

Kecamatan Cililin

29 Karyamukti;
30 Nanggerang;
31 Mukapayung;
32 RancaPanggung;
33 Bongas;
34 Batulayang;
35 Cililin;
36 Karangtanjung;
37 KidangPananjung;
38 Budiharja;
39 Karanganyar;

Kecamatan Cihampelas

40 Singajaya;
41 Tanjungwangi;
42 Situwangi;
43 Pataruman;
44 Cipatik;
45 Citapen;
46 Cihampelas;
47 Mekarmukti;
48 Tanjungjaya;
49 Mekarjaya;

Kecamatan Batujajar

50 Selacau;
51 Batujajar Barat;
52 Batujajar Timur;
53 Giriasih;
54 Galanggang;
55 Pangauban;
56 Cangkorah;

Kecamatan Padalarang

89 Laksanamekar;
90 Cimerang;
91 Cipeundeuy;
92 Kertajaya;
93 Jayamekar;
94 Padalarang;
95 Kertamulya;
96 Ciburuy;
97 Tagogapu;

66 Sarinagen;
67 Cibenda;
68 Cijambu;
69 Simagalih;
70 Baranangsiang;

Kecamatan Saguling

71 Bojonghaleuang;
72 Cikande;
73 Girimukti;
74 Cipangeran;
75 Jati;
76 Saguling;

Kecamatan Cipatat

77 Rajamandala Kulon;
78 Ciptaharja;
79 Cipatat;
80 Citatah;
81 Gunungmasigit;
82 Cirawamekar;
83 Nyalindung;
84 Sumur Bandung;
85 Kertamukti;
86 Sarimukti;
87 Mandalasari;
88 Mandalawangi;

Kecamatan Lembang

117 Gudang Kahuripan;
118 Wangunsari;
119 Pagerwangi;
120 Mekarwangi;
121 Langensari;
122 Kayuambon;
123 Lembang;
124 Cikahuripan;
125 Sukajaya;
126 Jayagiri;
127 Cibogo;
128 Cikole;
129 Cikidang;
130 Wangunharja;
131 Cibodas;
132 Suntenjaya;

Kecamatan Cisarua

133 Pasirhalang;
98 Campakamekar;

Kecamatan Ngamprah

99 Cimareme;
100 Gadobangkong;
101 Tanimulya;
102 Pakuhaji;
103 Cilame;
104 Margajaya;
105 Mekarsari;
106 Ngamprah;
107 Sukatani;
108 Cimanggu;
109 Bojongkoneng;

Kecamatan Parongpong

110 Ciwaruga;
111 Cihideung;
112 Cigugurgirang;
113 Sariwangi;
114 Cihanjuang;
115 Cihanjuang Rahayu;
116 Karyawangi;

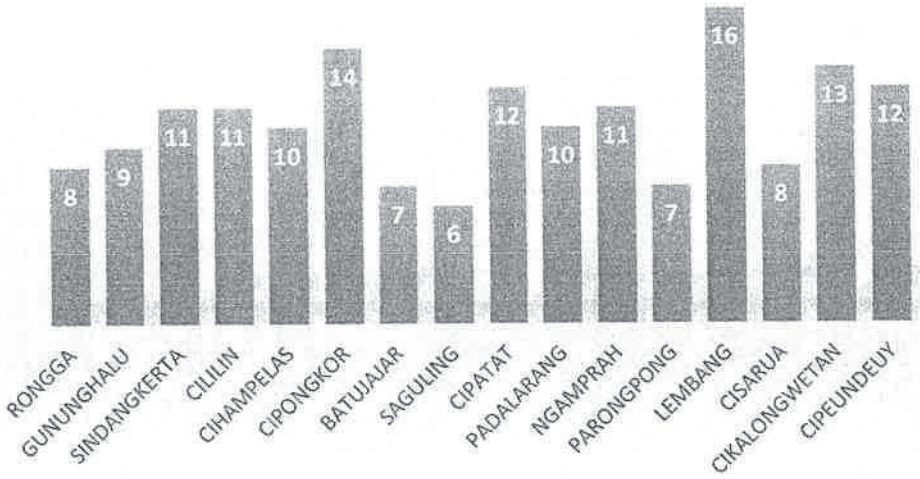
Kecamatan Cikalongwetan

141 Kanangasari;
142 Mandalasari;
143 Mekarjaya;
144 Cipada;
145 Ganjarsari;
146 Mandalamukti;
147 Ciptagumati;
148 Cikalong;
149 Rende;
150 Puteran;
151 Tenjolaut;
152 Cisomang Barat;
153 Wangunjaya;

Kecamatan Cipeundeuy

154 Margaluyu;
155 Nanggeleng;
156 Simaraja;
157 Jatimekar;

134 Jambudipa;
135 Padaasih;
136 Kertawangi;
137 Tugumukti;
138 Pasirlangu;
139 Cipada;
140 Sadangmekar;
158 Bojongmekar;
159 Nyenang;
160 Cipeundeuy;
161 Margalaksana;
162 Sukahaji;
163 Ciharashas;
164 Sirnagalih; dan
165 Ciroyom.



Gambar 6.4
Jumlah Desa Menurut Kecamatan di Kabupaten Bandung Barat 2025

Pada saat terbentuknya Kabupaten Bandung Barat, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Bandung Barat terdiri dari:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat DPRD;
3. Inspektorat;
4. Dinas Daerah, sebanyak 12 SKPD;
5. Badan, sebanyak 4 SKPD;
6. Kantor, sebanyak 6 SKPD; dan
7. Kecamatan, sebanyak 16 SKPD, yaitu:
   a. Kecamatan Ngamprah;
   b. Kecamatan Cipatat;
   c. Kecamatan Batujajar;
   d. Kecamatan Padalarang;

e. Kecamatan Sindangkerta;
f. Kecamatan Cipongkor;
g. Kecamatan Gununghalu;
h. Kecamatan Rongga;
i. Kecamatan Cililin;
j. Kecamatan Cikalongwetan;
k. Kecamatan Cipeundeuy;
l. Kecamatan Parongpong;
m. Kecamatan Cisarua;
n. Kecamatan Lembang; dan
o. Kecamatan Cihampelas.

Tahun 2009 ditetapkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dan susunan SKPD sebagai berikut:

1. Pembentukan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 8 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
2. Pembentukan Dinas Daerah berjumlah 12 (dua belas) dinas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
3. Pembentukan Lembaga Teknis Daerah berjumlah 9 (sembilan) buah, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 10 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
4. Pembentukan Inspektorat, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 11 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
5. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 12 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.
6. Pembentukan Kecamatan, sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, susunan selengkapnya dari SKPD Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah;
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Inspektorat;
4. Dinas Pendidikan;
5. Dinas Kesehatan;
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

7. Dinas Perumahan dan Permukiman;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
9. Dinas Sosial;
10. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
12. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
13. Dinas Lingkungan Hidup;
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
15. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
16. Dinas Perhubungan;
17. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
18. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
19. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
20. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
21. Dinas Kepemudaan dan Olahraga;
22. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
23. Dinas Perikanan dan Peternakan;
24. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
25. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
26. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah; dan
27. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Selain itu, terdapat lembaga lain setingkat SKPD yang pembentukannya tidak berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah:

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan;
2. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pada Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat, terdapat penambahan SKPD dari pemecahan SKPD yang ada di tahun 2020 antara lain BPKAD dan SATPOLDAMKAR menjadi adalah:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menjadi:
    a. Badan Keuangan dan Aset Daerah; dan

b. Badan Pendapatan Daerah.

2. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran menjadi:

   a. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan; dan

   b. Satuan Polisi Pamong Praja.

3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik menjadi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Masa Jabatan 2024-2029, susunan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.1
Susunan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Bandung Barat
Masa Jabatan Tahun 2024-2029

Pimpinan DPRD

PIMPINAN DPRD			
NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	ASEP DEDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA

Badan Musyawarah DPRD

BADAN MUSYAWARAH			
NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
1	H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	ASEP DEDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA
5	H. RISMANTO, S.Pd., M.I.Kom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	ADNAN RUSTANDI, SH.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
10	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
11	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
12	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
14	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
15	SANDI SUPYANDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
17	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA

BADAN MUSYAWARAH			
NO.	NAMA	FRAKSI	JABATAN
18	LIWA ULHAMDI, S.Pd., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
19	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
20	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
21	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
22	ALI RAPLI RAPSANJANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
23	KAMILIA, S.Sos	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
24	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
25	BINTANG PAMUNGKAS	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Anggaran DPRD

BADAN ANGGARAN			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
2	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
3	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	ASEP DEDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	WAKIL KETUA
5	H. RISMANTO, S.Pd., M.I.Kom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	Hj. NUR DJULAEHA, SIP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	Ir. JAJANG SUKMAHARI, S.Pt., M.A.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
8	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
10	AHMAD SOLEH	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
11	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
12	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
13	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
14	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
15	SANDI SUPYANDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
16	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
17	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
18	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
19	DR. H. RM. IMAM I. TUNGGARA, M.PD	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
20	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
21	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
22	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
23	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
24	KAMILIA, S.Sos	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
25	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD

BADAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	ENDANG AL HAETAMI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KETUA
2	RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H., S.E., M.H.	PARTAI DEMOKRAT	WAKIL KETUA
3	AHMAD FAUZI, S.Ag	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	ADNAN RUSTANDI, S.H.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
5	PIPIT PUSPITA AHDIANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
6	LILI SUHAELI B., S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
7	DEDI HERNAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	FIKRI ZAMZAM NOOR, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	H. BUNBUN RISNANDAR, S.Ag., M.Si	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
11	CACA HERDIANA, S.E.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
12	NOVIA LISNAWATI, S.IP.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
13	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Badan Kehormatan DPRD

BADAN KEHORMATAN			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	K. WAHYU	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
2	HR. A KOSWARA, S.IP., M.M.	PARTAI AMANAT NASIONAL	WAKIL KETUA
3	KESHA NURLATIFAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
4	SYIFA PURNAMA DEWI, SE.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
5	TRIANA KUSMAN	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA

Komisi I DPRD

KOMISI 1			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	H. MUHAMMAD MAHDI, S.Pd	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KOORDINATOR
2	SANDI SUPYANDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KETUA
3	AHMAD FAUZI, S.Ag	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	WAKIL KETUA
4	KAMILIA, S.Sos	PARTAI NASDEM	SEKRETARIS
5	H. RISMANTO, S.Pd., M.I.Kom	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	LILI SUHAELI B., S.IP	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
7	HR. A KOSWARA, S.IP., M.M.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	ENDANG AL HAETAMI	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
9	LIWA ULHAMDI, S.Pd., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
10	DONA AHMAD MUHARAM	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA

Komisi II DPRD

KOMISI 2			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	Hj. PIPIH SUPRIATI, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KOORDINATOR
2	AMUNG MA'MUR, S.Ag., M.H.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	KETUA
3	SYIFA PURNAMA DEWI, SE.	PARTAI GOLONGAN KARYA	WAKIL KETUA
4	ASEP MUSLIM SUGILAR, S.Ag.	PARTAI AMANAT NASIONAL	SEKRETARIS
5	ADNAN RUSTANDI, S.H.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	PIPIT PUSPITA AHDIANI	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
7	DEDI HERNAWAN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
8	H. BUNBUN RISNANDAR, S.Ag., M.Si	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
9	TRIANA KUSMAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN PERSATUAN PEMBANGUNAN	ANGGOTA
10	ASEP SOFYAN, ZA, S.Pd.I.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
11	RM. HASBI PRATAMA ARYA AGUNG, S.H., S.E., M.H.	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
12	BINTANG PAMUNGKAS	PARTAI NASDEM	ANGGOTA
13	METTI MELANI	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Komisi III DPRD

KOMISI 3			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	ASEP DEDI	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	KOORDINATOR
2	PITHER TJUANDYS, S.I.P., M.M.	PARTAI DEMOKRAT	KETUA
3	DENI SETIAWAN	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	WAKIL KETUA
4	ALI RAPLI RAPSANJANI	PARTAI AMANAT NASIONAL	SEKRETARIS
5	HELY NARNI	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	KESHA NURLATIFAH	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
7	H. AGUS MAHDAR HILMI, S.E.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8	H. AYI SUDRAJAT, S.IP.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
9	APENDI SUPRIADI	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
10	DARJAT SAEPUDIN	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
11	ASEP SUDRAJAT, S.Kom., M.M.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
12	H. ADE WAWAN, S.Pd.I.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
13	NOVIA LISNAWATI, S.IP.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Komisi IV DPRD

KOMISI 4			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
1	DADAN SUPARDAN, S.Psi. I	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	KOORDINATOR

KOMISI 4			
NO.	NAMA	FRAKSI	KETERANGAN
2	Hj. NUR DJULAEHA, SIP.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	KETUA
3	H. MU'MIN DARJATULLOH, S.Pd., M.Pd.I	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	WAKIL KETUA
4	IWAN RIDWAN SETIAWAN, BE	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	SEKRETARIS
5	Ir. JAJANG SUKMAHARI, S.Pt., M.A.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	ANGGOTA
6	CECEP SUDRAJAT, S.H.	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
7	AHMAD SOLEH	PARTAI GOLONGAN KARYA	ANGGOTA
8	FIKRI ZAMZAM NOOR, S.E.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA	ANGGOTA
9	WENDI SUKMAWIJAYA, S.Ag.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	ANGGOTA
10	Hj. IDA WIDANINGSIH, S.IP.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN	ANGGOTA
11	DR. H. RM. IMAM I. TUNGGARA, M.PD	PARTAI DEMOKRAT	ANGGOTA
12	K. WAHYU	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
13	CACA HERDIANA, S.E.	PARTAI AMANAT NASIONAL	ANGGOTA
14	H. DIDIN RACHMAT, S.K.M, M.M.Kes.	PARTAI NASDEM	ANGGOTA

Sedangkan susunan perangkat Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat adalah sebagai berikut:

Tabel 6.2
Nama-nama Pejabat Kabupaten Bandung Barat

No.	Jabatan	Tahun 2025	Tahun 2024
1	Bupati	Jeje Ritchie Ismail	Ade Zakir Hasim, ST
2	Wakil Bupati	H. Asep Ismail	-
3	Sekretaris Daerah	Ade Zakir Hasim, ST	R. Eriska Hendrayana, S.IP., MM
4	Asisten Pemerintahan	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M	Drs. Asep Sehabudin
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	Ahmad Fauzan Azima,.A.Md LLAJ.,S.Sos.,M.H	Drs. Asep Wahyu, S.IP., MM
6	Asisten Administrasi Umum	Rini Sartika, S.Sos.,M.Si.	Avira Nurvasihah, SH
7	Staf Ahli Bidang Hukum , Politik dan Pemerintahan	Drs. Meidi,M.Si	Ir .Maman Suryaman Effendy
8	Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	DR.dr.H.Ridwan Abdullah Putra, SPOG(K-FM),CH	dr. Eisenhower Sitanggang, Sp.O.G.
9	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan	Drs. Hasanudin, M.Si	Rini Sartika, S.Sos.,M.Si.
10	Kepala Dinas Pendidikan	-	H. Asep Dendih, S.Pd, MM
11	Kepala Dinas Kesehatan	-	DR.dr.H.Ridwan Abdullah Putra, SPOG(K-FM),CH
12	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Anni Roslianti,ST.,MM	Anni Roslianti,ST.,MM
13	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Moch. Ridwan Evi, BE, S.Sos., MM	Moch. Ridwan Evi, BE, S.Sos., MM
14	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Daerah	R. Eriska Hendrayana, S.IP., MM	Dra. Hj. Rina Marlina
15	Kepala Dinas Perhubungan	Ahmad Fauzan Azima,.A.Md LLAJ.,S.Sos.,M.H	Ahmad Fauzan Azima,.A.Md LLAJ.,S.Sos.,M.H
16	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Ibrahim Aji, SE., MM	Ibrahim Aji, SE., MM
17	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si	Drs. H. Hendra Trismayadi, M.Si
18	Kepala Dinas P2KBP3A	Akhmad Panji Hernawan, SH. M.Si	Avira Nurvasihah, SH
19	Kepala Dinas Sosial	Dr. Idad Saadudin, AMKL., S.Sos., M.Kes	Drs. Asep Sehabudin

No.	Jabatan	Tahun 2025	Tahun 2024
20	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	Drs. Tony Prihantoro, MT
21	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	H. Asep Dendih, S.Pd, MM	Akhmad Panji Hernawan, SH. M.Si
22	Kepala Dadan Kesatuan Bangsa dan Politik	Weda Wardiman.,S.STP.,M.Si	Weda Wardiman.,S.STP.,M.Si
23	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Ludi Awaludin, S.IP	Ludi Awaludin, S.IP
24	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Drs. Asep Sehabudin	Drs. Meidi,M.Si
25	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd.	Dra. Siti Aminah Anshoriah, M.Pd.
26	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Ricky Riyadi, S.Sos	Drs. Rony Rudyana
27	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah	H. Heru Budi Purnomo, S.Sos,. M.Si	H. Heru Budi Purnomo, S.Sos,. M.Si
28	Kepala Badan Pendapatan Daerah	-	H. Duddy Prabowo, S.Sos., M.M
29	Inspektur Kabupaten Bandung Barat	Drs. Yadi Azhar, M.Si	Drs. Yadi Azhar, M.Si
30	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Rega Wiguna, S.STP, M.IP	Drs. Asep Wahyu, S.IP., MM.,M.IP
31	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dudi Supriadi, S.Sos	Dudi Supriadi, S.Sos
32	Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan	Heri Partomo, S.IP	Heri Partomo, S.IP
33	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	H.M. Lukmanul Hakim, S.Sos, M.Si	H.M. Lukmanul Hakim, S.Sos, M.Si
34	Kepala Dinas Perikanan dan Peternakan	drh. Wiwin Aprianti,M.Si	drh. Wiwin Aprianti,M.Si
35	Kepala Dinas Koperasi, Usaha, Kecil, dan Menengah	Dra. Sri Dustirawati, M.Si	Dra. Sri Dustirawati, M.Si
36	Kepala Dinas Tenaga Kerja	Yoppie Indrawan Iskandar, SE	Drs. Hasanudin, M.Si
37	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	drs. Rony Rudyana	Yoppie Indrawan Iskandar, SE
38	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Drs. Tony Prihantoro, MT	Ricky Riyadi, S.Sos
39	Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga	Drs. Imam Santoso Mulyo R, M.MPd	Drs. Imam Santoso Mulyo R, M.MPd
40	Camat Ngamprah	Agnes Virganty, S.STP, M.Si	Agnes Virganty, S.STP, M.Si
41	Camat Cipatat	Drs. Sulaena Faisal	Drs. Sulaena Faisal
42	Camat Batujajar	-	Deden Mulyadi, S.Sos
43	Camat Padalarang	Agus Achmad Setiawan, SE, S.IP. M.M	Agus Achmad Setiawan, SE, S.IP. M.M
44	Camat Sindangkerta	-	Rega Wiguna, S.STP, M.IP
45	Camat Cipongkor	-	Rega Wiguna, S.STP, M.IP
46	Camat Gununghalu	Hari Mustika Jachja, S.Sos	Hari Mustika Jachja, S.Sos
47	Camat Rongga	Ilman Suherlan, S.Sos., M.Si	Ilman Suherlan, S.Sos., M.Si
48	Camat Cililin	Opa Mustopa, SH	Opa Mustopa, SH
49	Camat Cikalongwetan	H. Dadang A. Sapardan, S.Pd	H. Dadang A. Sapardan, S.Pd
50	Camat Cipeundeuy	Drs. Agus Ganjar Hidayat, M.Si	Drs. Agus Ganjar Hidayat, M.Si
51	Camat Parongpong	H. Herman Permadi, AP	H. Herman Permadi, AP
52	Camat Cisarua	-	Drs. Taufik Firmansyah, M.Si
53	Camat Lembang	Drs. Bambang Eko Setyo Wahjudi	Drs. Bambang Eko Setyo Wahjudi
54	Camat Cihampelas	Agus Rudianto,S.Sos	Agus Rudianto,S.Sos
55	Camat Saguling	Bambang Wijanarko Ischan, S.STP.,M.Si	Bambang Wijanarko Ischan, S.STP.,M.Si

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.3
Rekapitulasi PNS Berdasarkan Golongan dan PPPK
di Lingkungan Kabupaten Bandung Barat

GOLONGAN/RUANG		ESELON						NON ESELON								JUMLAH
								PNS				PPPK PENUH WAKTU			PPPK PARUH WAKTU	
		I	II	III	IV	V	JUMLAH	Struktural	Pelaksana	Fungsional	JUMLAH	PPPK Pelaksana	PPPK Fungsional	JUMLAH		
Golongan IV/e	IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1					1
Golongan IV/d	IV/d	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1					2
Golongan IV/c	IV/c	-	22	1	-	-	23	23	-	185	208					231
Golongan IV/b	IV/b	-	10	36	-	-	46	46	2	761	809					855
Golongan IV/a	IV/a	-	-	76	30	-	106	106	11	373	490					596
JUMLAH GOLONGAN IV		-	33	113	30	-	176	176	13	1.320	1.509					1.685
																-
Golongan III/d	III/d	-	-	29	117	-	146	146	67	1.175	1.388					1.534
Golongan III/c	III/c	-	-	-	49	-	49	49	85	404	538					587
Golongan III/b	III/b	-	-	-	14	-	14	14	179	641	834					848
Golongan III/a	III/a	-	-	-	-	-	-	-	86	158	244					244
JUMLAH GOLONGAN III		-	-	29	180	-	209	209	417	2.378	3.004					3.213
																-
Golongan II/d	II/d	-	-	-	-	-	-	-	65	116	181					181
Golongan II/c	II/c	-	-	-	-	-	-	-	58	48	106					106

GOLONGAN/RUANG		ESELON						NON ESELON								JUMLAH
								PNS				PPPK PENUH WAKTU			PPPK PARUH WAKTU	
		I	II	III	IV	V	JUMLAH	Struktural	Pelaksana	Fungsional	JUMLAH	PPPK Pelaksana	PPPK Fungsional	JUMLAH		
Golongan II/b	II/b	-	-	-	-	-	-	-	25	4	29					29
Golongan II/a	II/a	-	-	-	-	-	-	-	27	43	70					70
JUMLAH GOLONGAN II		-	-	-	-	-	-	-	**175**	**211**	**386**					**386**
																-
Golongan I/d	I/d	-	-	-	-	-	-	-	10	-	10					10
Golongan I/c	I/c	-	-	-	-	-	-	-	4	-	4					4
Golongan I/b	I/b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
Golongan I/a	I/a	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-
JUMLAH GOLONGAN I		-	-	-	-	-	-	-	**14**	-	**14**					**14**
																-
Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK)	**PPPK FULL**											244	3.082	3.326		3.326
PPPK Paruh Waktu															5.812	5.812
TOTAL		-	33	142	210	-	385	385	619	3.909	4.913	244	3.082	3.326	5.812	14.436

Sistem Informasi Keuangan Daerah

Pengelolaan Keuangan di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat mulai dari penganggaran, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban disusun dengan sistem berbasis Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI). Perangkat lunak/sistem aplikasi dalam pengelolaan keuangan tersebut disediakan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pedoman dalam pengelolaan keuangan di Kabupaten Bandung Barat mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah *juncto* Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Keluaran yang dihasilkan oleh sistem tersebut, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, kemudian dikonversi ke dalam sistem akuntansi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB VII
PENUTUP

Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah Kabupaten Bandung Barat menyusun Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Agar Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat dapat dipahami dan untuk menghindari kesalahpahaman pengguna dalam membaca Laporan Keuangan, maka diperlukan Catatan atas Laporan Keuangan yang berisikan informasi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas. Dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat TA 2025 dapat kami sajikan atas dukungan semua pihak baik dari jajaran eksekutif maupun legislatif, terutama dalam rangka mendapatkan kembali opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun agar dapat menjelaskan secara lengkap pos-pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat.

BUPATI BANDUNG BARAT,



JEJE RITCHIE ISMAIL

LAMPIRAN

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
1	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	213.707.600,00	213.366.255,00	341.345,00
2	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	47.548.000,00	47.548.000,00	-
3	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.746.505.892,00	1.522.332.258,00	224.173.634,00
4	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	121.516.000,00	116.859.715,00	4.656.285,00
5	Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	161.428.000,00	159.628.000,00	1.800.000,00
6	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	334.310.000,00	332.820.000,00	1.490.000,00
7	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	3.870.302.200,00	3.755.215.096,00	115.087.104,00
8	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	13.910.010.460,00	13.015.664.675,00	894.345.785,00
9	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	141.254.175.252,00	138.727.878.188,00	2.526.297.064,00
10	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	80.988.393,00	72.579.300,00	8.409.093,00
11	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000,00	99.985.000,00	15.000,00
12	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	62.373.000,00	53.133.000,00	9.240.000,00
13	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	4.540.000.000,00	4.582.573.637,00	57.426.363,00
14	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	90.350.698,00	82.207.334,00	8.143.364,00
15	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.733.008,00	63.352.318,00	380.690,00
16	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	967.760.502,00	765.812.157,00	201.948.345,00
17	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	412.499.668,00	311.567.890,00	100.931.778,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
18	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	177.459.500,00	174.659.500,00	2.800.000,00
19	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	421.783.000,00	234.460.250,00	187.322.750,00
20	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	152.667.500,00	121.787.500,00	30.880.000,00
21	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	793.140.000,00	301.270.000,00	491.870.000,00
22	Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	678.269.000,00	678.244.000,00	25.000,00
23	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	96.000.000,00	95.838.754,00	161.246,00
24	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.999.957,00	100.755.205,00	244.752,00
25	Puskesmas Batujajar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	225.485.000,00	225.485.000,00	-
26	Puskesmas Batujajar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	27.300.000,00	27.300.000,00	-
27	Puskesmas Batujajar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.352.000,00	300.000,00	3.052.000,00
28	Puskesmas Cibodas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	211.048.000,00	211.048.000,00	-
29	Puskesmas Cibodas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	53.820.000,00	53.820.000,00	-
30	Puskesmas Cibodas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	396.000,00	-	396.000,00
31	Puskesmas Cicangkanggirang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	188.783.000,00	180.325.300,00	8.457.700,00
32	Puskesmas Cicangkanggirang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.710.000,00	44.710.000,00	-
33	Puskesmas Cicangkanggirang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.010.000,00	1.110.000,00	900.000,00
34	Puskesmas Cikampelas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	172.124.000,00	169.123.000,00	3.001.000,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
35	Puskesmas Cihampelas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	96.090.000,00	96.090.000,00	-
36	Puskesmas Cihampelas	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	900.000,00	-
37	Puskesmas Cikole	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	222.346.000,00	195.017.200,00	27.328.800,00
38	Puskesmas Cikole	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	31.500.000,00	31.500.000,00	-
39	Puskesmas Cikole	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	600.000,00	600.000,00	-
40	Puskesmas Cimareme	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	200.637.000,00	192.383.700,00	8.253.300,00
41	Puskesmas Cimareme	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	65.520.000,00	65.520.000,00	-
42	Puskesmas Cipatat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	175.633.000,00	153.568.000,00	22.065.000,00
43	Puskesmas Cipatat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	32.760.000,00	32.760.000,00	-
44	Puskesmas Cipatat	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.953.000,00	-	1.953.000,00
45	Puskesmas Cipeundeuy	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	182.755.000,00	182.752.200,00	2.800,00
46	Puskesmas Cipeundeuy	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	49.670.000,00	49.670.000,00	-
47	Puskesmas Cipeundeuy	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.846.000,00	1.096.000,00	750.000,00
48	Puskesmas Cipongkor	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	104.592.000,00	77.742.000,00	26.850.000,00
49	Puskesmas Cipongkor	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	38.220.000,00	38.220.000,00	-
50	Puskesmas Cipongkor	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.575.000,00	600.000,00	975.000,00
51	Puskesmas Cirata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	170.014.000,00	162.052.400,00	7.961.600,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
52	Puskesmas Cirata	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.416.000,00	13.800.000,00	30.616.000,00
53	Puskesmas Cisarua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	145.932.000,00	143.797.600,00	2.134.400,00
54	Puskesmas Cisarua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	46.560.000,00	46.560.000,00	-
55	Puskesmas Cisarua	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	9.078.000,00	9.000.000,00	78.000,00
56	Puskesmas Citalem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	77.920.000,00	77.463.600,00	456.400,00
57	Puskesmas Citalem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	98.280.000,00	98.280.000,00	-
58	Puskesmas Citalem	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	388.000,00	-	388.000,00
59	Puskesmas Ciwaruga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	186.657.000,00	114.783.600,00	71.873.400,00
60	Puskesmas Ciwaruga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56.160.000,00	56.160.000,00	-
61	Puskesmas Ciwaruga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	988.000,00	838.000,00	150.000,00
62	Puskesmas DTP Gununghalu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	132.284.000,00	132.284.000,00	-
63	Puskesmas DTP Gununghalu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	88.290.000,00	88.290.000,00	-
64	Puskesmas DTP Cikalongwetan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	204.049.000,00	111.349.000,00	92.700.000,00
65	Puskesmas DTP Cikalongwetan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	78.840.000,00	78.840.000,00	-
66	Puskesmas DTP Cililin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	152.182.000,00	137.157.100,00	15.024.900,00
67	Puskesmas DTP Cililin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	56.160.000,00	56.160.000,00	-
68	Puskesmas DTP Cililin	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	900.000,00	-

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
69	Puskesmas DTP Jayagiri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.952.000,00	110.352.000,00	39.600.000,00
70	Puskesmas DTP Jayagiri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	87.480.000,00	87.480.000,00	-
71	Puskesmas DTP Jayagiri	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	1.650.000,00	150.000,00
72	Puskesmas DTP Rajamandala	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	116.693.000,00	114.408.000,00	2.285.000,00
73	Puskesmas DTP Rajamandala	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	44.640.000,00	38.760.000,00	5.880.000,00
74	Puskesmas DTP Rajamandala	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	600.000,00	1.200.000,00
75	Puskesmas DTP Saguling	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	186.177.000,00	129.416.400,00	56.760.600,00
76	Puskesmas DTP Saguling	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100.890.000,00	100.890.000,00	-
77	Puskesmas DTP Saguling	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	900.000,00	-
78	Puskesmas Jayamekar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	161.825.000,00	161.825.000,00	-
79	Puskesmas Jayamekar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	57.960.000,00	57.960.000,00	-
80	Puskesmas Jayamekar	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	2.700.000,00	1.350.000,00	1.350.000,00
81	Puskesmas Lembang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	235.666.000,00	235.666.000,00	-
82	Puskesmas Lembang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	29.925.000,00	29.925.000,00	-
83	Puskesmas Lembang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.650.000,00	450.000,00	1.200.000,00
84	Puskesmas Mukapayung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	185.296.000,00	185.265.800,00	30.200,00
85	Puskesmas Mukapayung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	94.860.000,00	94.860.000,00	-

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
86	Puskesmas Mukapayung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	953.000,00	150.000,00	803.000,00
87	Puskesmas Ngamprah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.975.000,00	119.862.000,00	37.113.000,00
88	Puskesmas Ngamprah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.250.000,00	83.250.000,00	-
89	Puskesmas Ngamprah	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	675.000,00	225.000,00
90	Puskesmas Padalarang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	240.070.000,00	239.618.200,00	451.800,00
91	Puskesmas Padalarang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	37.680.000,00	37.680.000,00	-
92	Puskesmas Padalarang	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	900.000,00	150.000,00	750.000,00
93	Puskesmas Parongpong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	183.335.000,00	183.327.600,00	11.400,00
94	Puskesmas Parongpong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	66.080.000,00	66.080.000,00	-
95	Puskesmas Parongpong	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	3.682.000,00	3.683.000,00	-
96	Puskesmas Pasirlangu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	255.227.000,00	255.227.000,00	-
97	Puskesmas Pasirlangu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	25.200.000,00	25.200.000,00	-
98	Puskesmas Pasirlangu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	104.564.702,00	-	104.564.702,00
99	Puskesmas Cataruman	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	209.430.000,00	171.638.500,00	37.791.500,00
100	Puskesmas Cataruman	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	23.600.000,00	23.600.000,00	-
101	Puskesmas Cataruman	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	33.300.000,00	9.450.000,00	23.850.000,00
102	Puskesmas Rende	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	241.261.000,00	208.250.000,00	33.011.000,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
103	Puskesmas Rende	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	15.750.000,00	15.750.000,00	-
104	Puskesmas Rende	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.800.000,00	675.000,00	1.125.000,00
105	Puskesmas Rongga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	174.003.000,00	174.003.000,00	-
106	Puskesmas Rongga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	43.680.000,00	43.680.000,00	-
107	Puskesmas Rongga	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	1.200.000,00	1.200.000,00	-
108	Puskesmas Sindangkerta	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	149.023.000,00	148.331.600,00	691.400,00
109	Puskesmas Sindangkerta	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	48.300.000,00	48.300.000,00	-
110	Puskesmas Sindangkerta	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	780.000,00	150.000,00	630.000,00
111	Puskesmas Sumurbandung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	205.424.000,00	204.942.000,00	482.000,00
112	Puskesmas Sumurbandung	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	34.500.000,00	34.500.000,00	-
113	Puskesmas Tagogapu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	156.983.000,00	134.233.575,00	22.749.425,00
114	Puskesmas Tagogapu	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	24.840.000,00	24.840.000,00	-
115	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	441.191.528,00	441.017.528,00	174.000,00
116	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.048.105.864,00	1.048.041.064,00	64.800,00
117	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB	Fasilitasi Pengelolaan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	1.087.500.000,00	1.087.500.000,00	-
118	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	56.350.000,00	56.350.000,00	-

LAMPIRAN CaLK 1

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
119	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Ketertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.926.564,00	42.845.564,00	81.000,00
120	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga	216.600.000,00	216.600.000,00	-
121	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)	4.147.705.000,00	4.147.705.000,00	-
122	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)	156.590.000,00	155.840.004,00	749.996,00
123	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	4.122.974.292,00	4.081.401.292,00	41.573.000,00
124	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	483.732.764,00	480.059.984,00	3.672.780,00
125	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengamekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1.113.183.764,00	1.106.243.431,00	6.940.333,00
126	Dinas Perikanan dan Peternakan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	9.100.000,00	5.200.000,00	3.900.000,00
127	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman	100.000.000,00	99.856.000,00	144.000,00
128	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan	7.058.616.837,00	6.645.193.020,00	413.423.817,00
129	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	180.000.000,00	169.502.500,00	10.497.500,00
130	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	3.842.010.656,00	3.799.182.910,00	42.827.746,00
131	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	10.783.000,00	9.075.000,00	1.708.000,00
132	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	95.632.500,00	66.680.000,00	28.952.500,00
133	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	2.391.080.950,00	2.322.986.100,00	68.094.850,00
134	Dinas Sosial	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	396.317.000,00	394.174.000,00	2.143.000,00
135	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	181.770.000,00	177.870.000,00	3.900.000,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
136	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1.108.382.935,00	108.279.000,00	1.000.103.935,00
137	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	495.188.200,00	471.993.540,00	23.194.660,00
138	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	3.161.540.200,00	2.699.842.330,00	461.697.870,00
139	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	4.327.518.920,00	3.921.256.571,00	406.262.349,00
140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	481.473.292,00	471.261.000,00	10.212.292,00
141	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	183.419.644,83	181.916.938,00	1.502.706,83
142	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	929.182.000,00	599.081.640,00	330.100.360,00
143	Dinas Pendidikan	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	75.000.000,00	74.448.000,00	552.000,00
144	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	187.471.800,00	186.682.600,00	789.200,00
145	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	156.956.000,00	141.032.000,00	15.924.000,00
146	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	46.468.500,00	46.468.500,00	-
147	Kecamatan Batujajar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.191.740.400,00	1.129.593.000,00	62.147.400,00
148	Kecamatan Batujajar	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	280.984.000,00	278.714.000,00	2.270.000,00
149	Kecamatan Cihampelas	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.579.008.800,00	1.129.593.000,00	449.415.800,00
150	Kecamatan Cikalongwetan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.003.760.800,00	1.955.782.000,00	47.978.800,00
151	Kecamatan Cililin	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.741.701.400,00	1.729.003.700,00	12.697.700,00
152	Kecamatan Cililin	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	235.434.600,00	235.072.304,00	362.296,00
153	Kecamatan Cipatat	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.200.532.600,00	2.105.072.300,00	95.460.300,00

Anggaran dan Realisasi Percepatan Penurunan Stunting
Kabupaten Bandung Barat
Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

No.	PD/Sub Unit PD	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)
154	Kecamatan Cipeundeuy	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	51.868.800,00	51.868.800,00	-
155	Kecamatan Cipeundeuy	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	327.327.500,00	327.246.500,00	81.000,00
156	Kecamatan Cipongkor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.141.893.600,00	1.139.820.000,00	2.073.600,00
157	Kecamatan Cipongkor	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	230.263.400,00	230.263.400,00	-
158	Kecamatan Cisarua	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.276.344.600,00	1.242.677.000,00	33.667.600,00
159	Kecamatan Gununghalu	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.740.409.100,00	1.708.853.300,00	31.555.800,00
160	Kecamatan Lembang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.095.829.800,00	2.087.989.000,00	7.840.800,00
161	Kecamatan Lembang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	171.674.200,00	171.674.200,00	-
162	Kecamatan Ngamprah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.000.882.000,00	2.000.882.000,00	-
163	Kecamatan Ngamprah	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	3.651.400,00	3.651.400,00	-
164	Kecamatan Padalarang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.014.220.800,00	1.999.754.800,00	14.466.000,00
165	Kecamatan Padalarang	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	124.125.000,00	124.125.000,00	-
166	Kecamatan Parongpong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	988.320.000,00	988.320.000,00	-
167	Kecamatan Parongpong	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	211.876.300,00	211.876.300,00	-
168	Kecamatan Rongga	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.562.767.300,00	1.560.761.100,00	2.006.200,00
169	Kecamatan Saguling	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	585.685.000,00	585.685.000,00	-
170	Kecamatan Sindangkerta	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1.449.422.400,00	1.441.767.900,00	7.654.500,00
	JUMLAH				241.709.656.342,83	232.494.729.927,00	9.214.926.415,83

LAMPIRAN Cal.K ta

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Pendidikan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	Uraian		Anggaran	Keterangan	Realisasi			Total Realisasi 2025	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan			Tahap I	Tahap II	Tahap III			Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	309.767.800	Dinas Tenaga Kerja		33.744.800	362.062.300	309.767.800	0	Pelatihan	64	Orang
2	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja Kabupaten/Kota	26.923.800	Dinas Tenaga Kerja		3.950.700	22.973.100	26.923.800	0	Peralatan Pelatihan	23	Unit
3	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	104.432.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		66.858.800	37.508.800	104.358.800	97.500	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	5	Objek
4	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Kebudayaan	87.037.200	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		87.037.200		87.037.200	0	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga dan Prasana Kebudayaan	53	Orang
5	Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	306.471.800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		237.237.800	38.304.000	305.666.800	810.000	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilindungi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	3	Objek
6	Pelestarian Kearifan Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berperanan dan Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Potensi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	140.980.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		329.500	137.151.080	137.480.580	33.500.000	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Merekat yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	10	Sertifikat
7	Pemberdayaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Adat	124.998.564	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		105.316.610	318.000	105.634.610	19.413.954	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Prasana Adat yang Dibina	60	Orang
8	Pemberdayaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pendaftaran Objek Dikaga Cagar Budaya	111.651.126	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			82.265.650	82.265.650	29.385.476	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	20	Objek
9	Pemberdayaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya	160.999.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			133.649.300	133.649.300	26.950.300	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	4	Objek
10	Pemberdayaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelindungan Cagar Budaya	80.103.300	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			65.163.300	65.163.300	14.939.936	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	8	Objek
11	Pemberdayaan Lembaga Adat yang Pengaturnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Cagar Budaya	156.914.800	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan			147.164.800	147.164.800	9.750.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Dimanfaatkan/Dikembangkan	2	Objek
12	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/Kota	706.106.593	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		411.696.316	293.750.080	705.446.216	700.724	Terbinanya Unit Wirausaha Kepemudaan	100	Orang
13	Penyediaan, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepeloporan pemuda tingkat kabupaten/kota	107.410.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		97.310.000		97.310.000	10.100.000	Pelaksana Kepemudaan Pengelolaan Ruang-ruang Ini Perlindungan Bahaya Destruktif bagi Generasi Muda di dan Pelatihan Kepemimpinan Bagi Kaum Remaja Untuk Mewujudkan Pemuda Sehat, Bhinneka Tunggal	2	Kegiatan
14	Penyelenggaraan Keharan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Kelancaran segala kentingan kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		750.000.000		750.000.000	0	Berpartisipasinya dalam kejuaraan event olahraga tkat provinsi	2	Kegiatan
15	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi kabupaten/kota	365.479.328	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		224.326.800		224.326.000	141.153.328	Terlaksananya Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah	75	Orang
16	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui pemeliharaan, pengadaan, pemanfaatan, pendidikan, pengembangan, dan pengawasan	750.000.000	Dinas Kepemudaan dan Olahraga		654.748.200	95.791.800	750.000.000	0	Terselenggaranya Gerak Olahraga Kelinganan dan Olahraga rekreasi	453	Buah/set
17	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	98.896.500	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		58.836.600	40.654.000	99.490.600	306.500	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	75	Perpustakaan
18	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	1,737,180,000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			1.562.628.930	1.562.628.930	174.551.050	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dibantu Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	85	Perpustakaan
19	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	831.446.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		122.750.600	691.987.250	814.737.850	2.182.450	Jumlah tenaga perpustakaan yang ditingkatkan kapasitasnya dan memiliki sertifikat Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100	orang
20	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Perpustakaan	249.722.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		234.867.800	3.820.000	242.668.800	7.054.800	Jumlah Bahan Perpustakaan yang diolah dan ditambahkan untuk Memenuhi Ketersediaan Koleksi Perpustakaan 2	1472	dikelolah
21	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengumpulan Data dan Informasi Perpustakaan	83.530.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			78.535.000	78.535.000	2.995.000	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan	1	dokumen
22	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	42.382.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		18.350.800	21.124.000	39.484.800	2.798.000	Jumlah Lokasi Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat	6	lokasi
23	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Taman-Taman Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	629.388.680	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		452.685.390	178.817.600	607.701.190	21.687.490	Jumlah sarana Perpustakaan yang Dibangun dan dipelihara di Taman-Taman Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan
24	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pembinaan Pengharpan Gerakan Budaya Gemar Membaca	24.845.000	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		23.995.800	850.000	24.845.800	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten/Kota	3	orang
25	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Literasi Berbasis Minat Sosial	203.785.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		90.275.000	149.575.000	199.490.800	2.295.000	Jumlah layanan perpustakaan berbasis minat sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan	90	Perpustakaan
26	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	43.900.800	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan			43.900.000	43.900.800	0	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dipilih dan dikukuhkan/dilantik	3	orang
27	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	3.394.089.787	Dinas Pendidikan		139.155.836	3.341.373.731	3.369.329.387	33.760.681	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	48	Unit
28	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	344.805.371	Dinas Pendidikan			341.367.125	342.367.125	2.295.146	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	9	Ruang
29	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	393.696.800	Dinas Pendidikan			386.690.960	386.690.960	7.005.930	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	13	Ruang
30	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	468.814.615	Dinas Pendidikan			439.408.739	466.408.739	1.875.876	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	10	Ruang
31	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	11.039.730.703	Dinas Pendidikan	11.039.730.703	0	0	11.039.730.703	0	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	20	Paket
32	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	295.228.700	Dinas Pendidikan			291.939.000	291.939.000	3.289.700	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	7	Paket
33	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	509.100.800	Dinas Pendidikan			494.778.000	494.778.800	5.322.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	123	Peserta Didik
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	528.089.800	Dinas Pendidikan		326.701.940	18.288.000	326.961.940	1.091.060	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pensiun Prasiun, Pembinaan Kompetensi dan Fungsional	300	Orang
35	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembinaan Kebutuhgaan dan Manajemen Sekolah	790 131 840	Dinas Pendidikan		657.908.940	25.494.900	683 403 840	74 647 950	Jumlah Sekolah Dasar yang Dikenakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	530	Satuan Pendidikan
36	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pelaksanaan Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	108 560 000	Dinas Pendidikan		108.160.000		108.160.000	206.000	Jumlah Tenaga Pendidik yang Mengikuti Kegiatannya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	100	Orang
37	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pembangunan Ruang Kelas Baru	460.888.743	Dinas Pendidikan		49.850.300	408.631.309	458.281.809	2.606.934	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Berstandar	4	Ruang

LAMPIRAN CKLK 1a

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Pendidikan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	Urusan		Anggaran	Keterangan	Realisasi			Total Realisasi 2025	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan			Tahap I	Tahap II	Tahap III			Uraian	Jumlah	Satuan
34	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	929.472.177	Dinas Pendidikan			525.564.404	525.564.404	3.908.595	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	14	Unit
39	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	100.850.000	Dinas Pendidikan		100.750.000		100.750.000	100.000	Jumlah Siswa Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	209	Siswa Pendidikan
40	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	10.033.979.146	Dinas Pendidikan		96.04.1.000	9.871.508.103	9.967.525.103	65.456.044	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	80	Ruang
41	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.254.222.400	Dinas Pendidikan			2.249.080.117	2.249.080.117	5.142.283	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	8	Paket
42	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Laboratorium	350.000.000	Dinas Pendidikan		159.609.825	13.921.775	213.541.842	6.458.588	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	5	Ruang
43	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.562.853.000	Dinas Pendidikan		2.304.193.342	1.130.799.364	3.434.992.814	9.963.250	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	37	Unit
44	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.980.908.602	Dinas Pendidikan			1.791.816.364	1.791.816.364	189.064.834	Jumlah Ruang Kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang
45	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	268.719.640	Dinas Pendidikan			265.741.370	265.741.370	978.267	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Ruang
46	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium	250.000.000	Dinas Pendidikan			248.609.287	248.609.287	1.390.713	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang
47	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	350.000.000	Dinas Pendidikan			348.842.645	348.842.645	1.157.355	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4	Unit
48	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Mebel Sekolah	12.391.060.300	Dinas Pendidikan		6.193.091.481	5.947.582.304	12.140.673.785	30.386.515	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	345	Paket
49	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	516.904.947	Dinas Pendidikan			514.396.000	514.396.000	1.508.947	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	3	Paket
50	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.030.006.000	Dinas Pendidikan		980.547.000	39.000.000	847.547.000	193.459.000	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	900	Peserta Didik
51	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	246.180.000	Dinas Pendidikan		243.603.000		243.600.000	908.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pensiunan Promosi, Pengakuan Kompetensi dan Kualifikasi	250	Orang
52	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	1.002.289.084	Dinas Pendidikan		645.409.849	311.473.393	956.879.439	75.329.645	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dikembinakan Pembinaan	100	Satuan Pendidikan
53	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	310.850.000	Dinas Pendidikan		117.972.000		117.970.000	210.000	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	115	Orang
54	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengembangan konten digital untuk pendidikan	50.000.000	Dinas Pendidikan			36.619.800	36.619.800	13.381.200	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	1	Konten Digital
55	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	282.000.000	Dinas Pendidikan		281.889.000		281.889.000	231.000	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang difasilitasi	210	Orang
56	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	322.800.800	Dinas Pendidikan		119.920.000		319.920.800	2.880.000	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang pendidikan yang dilaksanakan	2	Dokumen
57	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	537.000.000	Dinas Pendidikan		136.917.000	327.870.000	452.840.000	83.820.000	Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar	205	Satuan Pendidikan
58	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	998.908.242	Dinas Pendidikan			993.999.871	993.999.871	4.908.371	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	11	Ruang
59	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	2.290.280.000	Dinas Pendidikan			2.340.277.264	2.340.277.264	10.002.736	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	12	Paket
60	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	183.419.649	Dinas Pendidikan			181.916.904	181.916.904	1.502.745	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun	3	Unit
61	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Mebel PAUD	1.000.216.300	Dinas Pendidikan			992.633.568	992.633.568	7.582.732	Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia	61	Paket
61	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	75.080.000	Dinas Pendidikan		74.448.000		74.448.000	632.000	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pensiunan Promosi, Pengakuan Kompetensi dan Kualifikasi	140	Orang
63	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	929.181.080	Dinas Pendidikan		422.642.820	179.441.820	599.081.640	330.308.200	Jumlah PAUD yang Dibinakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	250	Satuan Pendidikan
64	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD	75.080.000	Dinas Pendidikan		74.927.500		74.927.500	72.500	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD	145	Orang
65	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	177.395.300	Dinas Pendidikan		172.902.000		172.308.000	3.393.300	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen
66	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Ruang Kelas Baru	582.573.276	Dinas Pendidikan			580.634.348	580.634.348	1.937.928	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Terbentuk	5	Ruang
67	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	349.008.000	Dinas Pendidikan			228.876.300	228.876.300	1.325.895	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1	Unit
68	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD	1.624.838.800	Dinas Pendidikan			1.614.471.627	1.614.471.627	10.478.173	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia	63	Paket
69	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	308.808.800	Dinas Pendidikan			99.802.660	99.802.660	867.340	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1	Ruang
70	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	606.412.864	Dinas Pendidikan			603.500.818	603.500.818	2.911.446	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	3	Ruang
71	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	136.500.000	Dinas Pendidikan			136.500.000	136.500.000	0	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pensiunan Promosi, Pengakuan Kompetensi dan Kualifikasi	95	Orang
72	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	50.000.000	Dinas Pendidikan		43.312.500		43.312.500	6.787.500	Jumlah Tenaga yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	96	Orang
73	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	275.080.080	Dinas Pendidikan		99.480.000	173.306.480	272.789.400	2.290.680	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	1	Dokumen
74	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	50.080.080	Dinas Pendidikan		38.767.500		38.787.500	11.312.500	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	75	Peserta Didik
75	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	200.321.643	Dinas Pendidikan			197.910.796	197.910.796	2.411.640	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2	Ruang
76	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pembinaan dan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7.506.099.865	Dinas Pendidikan		7.506.099.865		7.506.099.865	0	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan PendidikanDasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Dokumen
77	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.341.408.544	Dinas Pendidikan		369.316.230	964.391.910	1.333.908.140	5.530.304	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	7	Laporan
78	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	20.248.439.600	Dinas Pendidikan	20.248.439.600			20.248.439.600	0	Jumlah Orang yang Mendatkan Gaji dan Tunjangan ASN	2230	Orang
		Jumlah	101.243.192.881		20.248.439.600,00	56.735.194.147	42.556.150.905	99.519.956.252	1.723.236.749			

LAMPIRAN CaLK 1a

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi Sisa DAU Mandatory (Spesific Grant) Bidang Pendidikan
Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian		Sisa Anggaran	Keterangan	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Pengadaan Mebel Sekolah	3.104.081.295	Dinas Pendidikan	2.916.308.463	187.772.832	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	40	Paket
2	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	2.497.036.791	Dinas Pendidikan	2.494.881.055	2.155.736	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4	Dokumen
Jumlah			5.601.118.086		5.411.189.518	189.928.568			

LAMPIRAN CMLK Ib

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Kesehatan
Tahun 2025

(ribuan rupiah)

NO	Urusan		Anggaran	Keterangan	Realisasi			Total Realisasi 2025	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan			Tahap I	Tahap II	Tahap III			Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Puskesmas	9.527.536.160	Dinas Kesehatan		106.408.350	1.918.587.735	2.104.996.085	1.422.540.161	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun	1	Unit
2	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya	3.257.200.000	Dinas Kesehatan		425.776.000	2.110.258.590	2.536.034.676	861.463.324	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun	1	Unit
3	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	7.264.610.707	Dinas Kesehatan		35.941.000	6.489.393.361	6.525.335.161	629.283.546	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	31	Unit
4	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	1.782.364.300	Dinas Kesehatan			1.782.364.300	1.782.364.300	0	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	59	Unit
5	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	154.255.500	Dinas Kesehatan			109.281.684	109.281.684	4.973.816	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	419	Unit
6	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	152.343.777	Dinas Kesehatan		160.988.700	22.434.000	183.422.700	8.921.077	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	744	Unit
7	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Rumah Sakit	9.321.787.920	Dinas Kesehatan		791.490.000	7.098.020.100	7.889.218.100	232.469.812	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM nya sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan area dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	2	Unit
8	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	2.937.014.440	Dinas Kesehatan		667.674.720	1.971.640.433	2.639.315.153	297.721.307	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai,, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	3	Paket
9	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	494.902.400	Dinas Kesehatan		196.139.300	256.250.219	452.389.419	42.510.981	Jumlah distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	6	Paket
10	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	63.793.000	Dinas Kesehatan		61.353.310		61.353.310	380.690	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10555	Orang
11	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	84.339.690	Dinas Kesehatan		72.539.500	9.667.834	82.207.334	2.132.364	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	27677	Orang
12	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100.000.000	Dinas Kesehatan		99.985.000		99.985.000	15.000	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	28488	Orang
13	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	84.968.393	Dinas Kesehatan		68.379.300	4.000.000	72.379.300	9.489.093	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101689	Orang
14	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	313.456.680	Dinas Kesehatan		114.324.480	197.443.410	311.767.890	500.501.770	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	764370	Orang
15	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	177.435.300	Dinas Kesehatan		174.639.300		174.639.300	2.800.000	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	674463	Orang
16	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	183.641.963	Dinas Kesehatan		90.466.300		90.466.300	175.663	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	139913	Orang
17	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	69.531.000	Dinas Kesehatan		106.723.000		106.723.000	2.800.000	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	101779	Orang
18	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	83.141.000	Dinas Kesehatan		78.040.000		78.040.000	2.100.000	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	20376	Orang
19	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	28.350.000	Dinas Kesehatan		28.350.000		28.350.000	0	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	4314	Orang
20	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	730.864.000	Dinas Kesehatan			674.277.597	674.277.597	56.209.303	Jumlah Orang Terduga Mendapat Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	13473	Orang
21	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	339.107.000	Dinas Kesehatan		175.474.500	163.632.500	339.107.000	0	Jumlah Orang Terduga Mendapat HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	26076	Orang
22	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	299.866.000	Dinas Kesehatan		121.558.000	14.130.000	135.688.000	164.120.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar	12	Dokumen
23	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	6.063.800.000	Dinas Kesehatan		1.270.892.160	3.311.741.477	4.582.575.637	57.426.363	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1	Dokumen
24	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	73.000.000	Dinas Kesehatan		69.962.900		69.962.900	37.100	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	8	Dokumen
25	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	967.760.507	Dinas Kesehatan		216.692.607	549.159.590	765.912.137	201.948.345	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	16	Dokumen
26	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	43.242.500	Dinas Kesehatan		33.642.500		33.642.500	4.600.000	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	52	Dokumen
27	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	38.877.500	Dinas Kesehatan		38.377.500		38.377.500	1.400.000	Jumlah Orang dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	77517	Orang
28	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Napza dan NAPZA	25.000.200	Dinas Kesehatan		16.006.200		16.006.200	0	Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan	1149	Orang
29	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	1.736.582.892	Dinas Kesehatan		559.311.000	963.028.250	1.522.339.250	224.173.634	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	97	Dokumen
30	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	23.768.547.200	Dinas Kesehatan		22.559.848.900	1.210.907.280	23.769.547.180	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	6	Dokumen
31	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah	48.982.200	Dinas Kesehatan			48.982.200	48.982.200	0	Jumlah Orang yang Menerima Layanan Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) dan Sekolah	900	Orang
32	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional	68.904.000	Dinas Kesehatan		48.834.000	15.630.000	64.384.000	0	Jumlah Spesimen Penyakit Potensial Kejadian Luar Biasa (KLB) ke Laboratorium Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	229	Paket
33	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	400.000.000	Dinas Kesehatan		298.708.891	36.569.900	335.278.391	64.727.609	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	9	Dokumen
34	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	356.579.000	Dinas Kesehatan			340.257.973	340.257.973	16.321.428	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	5	Dokumen
35	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	47.548.000	Dinas Kesehatan		47.548.000		47.548.000	0	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	10	Laporan

LAMPIRAN.CaLK 1b

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Aktivasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Kesehatan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	Uraian		Anggaran	Keterangan	Realisasi			Total Realisasi 2025	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan			Tahap I	Tahap II	Tahap III			Uraian	Jumlah	Satuan
36	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1.691.763.700	Dinas Kesehatan		690.697.200	337.951.200	1.017.840.400	34.911.300	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Terbentuk, Terbaikan dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Wilayah Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	1	Unit
37	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	223.083.206	Dinas Kesehatan		172.496.000	48.466.000	220.962.000	58.206	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	9639	Orang
38	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	170.899.000	Dinas Kesehatan		33.814.500	63.078.500	100.893.000	0	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	420	Orang
39	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria	11.513.200	Dinas Kesehatan		10.437.200	1.073.000	11.513.200	0	Jumlah orang yang diobservasi pengawasan kesehatan malaria	594	Orang
40	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	169.911.046	Dinas Kesehatan			169.911.046	169.911.046	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem informasi Kesehatan	3	Dokumen
41	Peneribitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	97.343.580	Dinas Kesehatan		67.633.000	20.944.634	88.639.634	8.650.846	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	202	Unit
42	Peneribitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	238.965.900	Dinas Kesehatan		169.331.917	65.205.000	234.536.917	24.332.049	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dibantu Pengukuran Indikator Mutunya (Kota (RS) Pelayanan Kesehatan	105	Unit
43	Penberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	38.103.840	Dinas Kesehatan		3.536.800	36.760.000	40.296.800	7.089.040	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	37	Dokumen
44	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	16.760.000	Dinas Kesehatan		14.160.000	2.600.000	16.760.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1	Dokumen
45	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	181.428.000	Dinas Kesehatan		38.780.000	101.648.000	139.628.000	1.800.000	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Puskesmas)	37	Orang
46	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	677.281.673	Dinas Kesehatan		633.068.673	13.901.127	637.370.000	39.911.673	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	99	Orang
47	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	60.206.000	Dinas Kesehatan		60.206.000		60.206.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	122	Dokumen
48	Pemberian Sertifikat Produksi untuk Bersan Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	18.760.000	Dinas Kesehatan		18.760.000		18.760.000	0	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	30	Dokumen
49	Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	192.570.000	Dinas Kesehatan		192.570.000		192.570.000	0	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	3	Dokumen
50	Penerbitan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	120.410.000	Dinas Kesehatan		118.400.000	2.000.000	120.400.000	0	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Diawasi Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan	30	Unit
51	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	96.850.000	Dinas Kesehatan		62.722.530	33.116.224	95.838.754	151.246	Jumlah Pelayanan Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	2	Dokumen
52	Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promosi Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	100.959.957	Dinas Kesehatan		100.755.203		100.755.203	344.753	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat	2	Dokumen
53	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	153.671.600	Dinas Kesehatan			152.100.255	152.100.255	344.345	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	1	Dokumen
54	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyelenggaraan Gaji dan Tunjangan ASN	19.713.888.000	Dinas Kesehatan	19.013.888.000,00			19.013.888.000	0	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	14700	Orang
55	Penyimpanan sementara Limbah B3	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	207.216.300	Dinas Lingkungan Hidup		107.263.000	34.989.900	142.252.900	65.023.300	Jumlah Fasilitasi Perseetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	51	dokumen
56	Penyimpanan sementara Limbah B3	Verifikasi Lapangan untuk Pemenuhan Persyaratan Penyerahan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	201.861.000	Dinas Lingkungan Hidup		79.708.000	65.213.500	144.921.500	60.939.500	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	51	laporan
57	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	737.252.700	Dinas Lingkungan Hidup		233.700.000	144.935.469	378.635.469	70.057.231	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	3	Dokumen
58	Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	153.317.000	Dinas Lingkungan Hidup		18.873.000	121.746.810	140.619.810	12.717.990	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	Dokumen
59	Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Lokal	Pengendalian Program KKBPK	33.515.000	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)			39.503.000	39.503.000	0	Jumlah Laporan Hasil Pengadaan Program KKBPK	1	Laporan
60	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Penggas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	1.848.185.864	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)			1.848.041.864	1.848.041.864	64.800	Jumlah Laporan Hasil Pengantan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan , Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)	12	Laporan
61	Pengadaan dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Barang Pendukung Pelayanan KB	136.489.520	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)			136.349.320	136.349.320	141.200	Jumlah Dokumen Penyediaan Pengadaan Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) dan Barang Pendukung Pelayanan KB	1	Dokumen

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Kesehatan
Tahun 2025

(dalam rupiah)

NO	Uraian		Anggaran	Keterangan	Realisasi			Total Realisasi 2025	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan			Tahap I	Tahap II	Tahap III			Uraian	Jumlah	Satuan
62	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Pembinaan Terpadu Kampung KB	42.925.564	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPA)			42.845.564	42.845.564	81.000	Jumlah Laporan: Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB	1	Laporan
63	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitasi Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	179.091.000	Dinas Sosial			178.848.000	178.848.000	243.000	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	120	orang
64	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Pemberian Layanan Rujukan	81.123.200	Dinas Sosial			35.828.000	35.828.000	45.256.400	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota Bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	20	orang
65	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	168.832.380	Dinas Sosial			166.454.125	166.454.125	2.378.373	Jumlah orang yang menerima bantuan makanan	50	Orang
66	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Sandang	349.263.100	Dinas Sosial			347.951.398	347.951.398	315.702	jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya	130	orang
67	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	7.352.085.072	Sekretariat Daerah		6.496.830.780	2.853.234.292	7.352.085.072	0	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	3	Dokumen
		Jumlah	95.079.440.000		19.819.988.000,00	56.904.346.245	35.477.209.476	90.450.843.721	4.591.396.279			

Alokasi Anggaran dan Realisasi Dak DAU Mandatory (Specific Grant) Bidang Kesehatan
Tahun 2024

(dalam rupiah)

NO	Uraian		Sisa Anggaran	Keterangan	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	196.316.973	DP2KBP3A	196.316.973	0	Jumlah Layanan Terduk Lanjut Perempuan yang	1	Layanan
2	Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Remaja/Balita)	34.200.000	DP2KBP3A	0	34.200.000	Jumlah Organisasi yang Mengelola Bina dan		Organisasi
3	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	25.400.080	DP2KBP3A	25.400.080	0	Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode	5	Orang
4	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kompetensi Tenaga Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi	66.600.000	DP2KBP3A	0	66.600.000	Jumlah Tenaga Pelayanan yang Memiliki Kompetensi		Orang
5	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Dukungan Operasional Pelayanan KB Bergerak	93.316.000	DP2KBP3A	93.316.000	0	Jumlah Laporan Dukungan Operasional Pelayanan KB	16	Laporan
6	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Kesertaan KB Pria	29.097.600	DP2KBP3A	29.097.600	0	Jumlah Aktivitas yang Mendapat Peningkatan Kesertaan KB Pria	50	Orang
7	Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Promosi dan Konseling KB Pasca Persalinan	168.000.000	DP2KBP3A	0	168.000.000	Jumlah Orang yang Mengikuti Promosi dan Konseling KB Pasca		Orang
		Jumlah	594.930.573		336.130.573	268.800.000			

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Alokasi Anggaran dan Realisasi Sisa DAU Mandatory (Spesific Grant) Bidang Pekerjaan Umum
Tahun 2025

(dalam rupiah)

No	Uraian		Sisa Anggaran	Keterangan	Realisasi	Sisa Pagu	Keluaran		
	Kegiatan	Subkegiatan					Uraian	Jumlah	Satuan
1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	101.936.084	DPUTR	92.160.600	9.775.484	Pembangunan MCK Pesantren Singajaya RT 01 RW 05 Desa Singajaya Kecamatan Cihampelas	15	Rumah Tangga
2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100.000.000	DPUTR	89.786.100	10.213.900	Pembangunan MCK Desa Rajamandala Kulon Kecamatan Cipatat	15	Rumah Tangga
3	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat	100.000.000	DPUTR	99.719.400	280.600	Pembangunan MCK Masjid Kp. Cipare Desa Cipada Kecamatan Cikalongwetan	15	Rumah Tangga
		Jumlah	301.936.084		281.666.100	20.269.984			

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Pajak Daerah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4	PENDAPATAN DAERAH	3.443.659.170.878,00	3.394.855.737.280,00	98,58	3.410.490.980.435,97	(15.634.243.155,97)	(0,46)
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.011.631.723.145,00	981.483.458.987,00	97,01	799.932.118.378,97	181.551.340.608,03	22,70
4.1.01	Pajak Daerah	771.086.897.175,00	743.743.765.926,00	96,45	590.254.784.373,00	153.493.981.553,00	26,00
4.1.01.06	Pajak Hotel	-	-	-	33.817.742.351,00	(33.817.742.351,00)	(100,00)
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	-	-	-	30.682.278.404,00	(30.682.278.404,00)	(100,00)
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	-	-	-	30.682.278.404,00	(30.682.278.404,00)	(100,00)
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	-	-	-	336.095.904,00	(336.095.904,00)	(100,00)
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	-	-	-	336.095.904,00	(336.095.904,00)	(100,00)
4.1.01.06.07	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	2.799.368.043,00	(2.799.368.043,00)	(100,00)
4.1.01.06.07.0001	Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	2.799.368.043,00	(2.799.368.043,00)	(100,00)
4.1.01.07	Pajak Restoran	-	-	-	66.160.630.903,00	(66.160.630.903,00)	(100,00)
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	54.194.023.191,00	(54.194.023.191,00)	(100,00)
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	-	-	54.194.023.191,00	(54.194.023.191,00)	(100,00)
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3.517.376.765,00	(3.517.376.765,00)	(100,00)
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	3.517.376.765,00	(3.517.376.765,00)	(100,00)
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	8.449.230.947,00	(8.449.230.947,00)	(100,00)
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	8.449.230.947,00	(8.449.230.947,00)	(100,00)
4.1.01.08	Pajak Hiburan	-	-	-	15.044.356.033,00	(15.044.356.033,00)	(100,00)
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	228.326.933,00	(228.326.933,00)	(100,00)
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	-	-	-	228.326.933,00	(228.326.933,00)	(100,00)
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	-	-	-	30.579.000,00	(30.579.000,00)	(100,00)
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	-	-	-	30.579.000,00	(30.579.000,00)	(100,00)
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	7.496.920,00	(7.496.920,00)	(100,00)
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	-	-	-	7.496.920,00	(7.496.920,00)	(100,00)
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	14.141.381.279,00	(14.141.381.279,00)	(100,00)
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	-	-	14.141.381.279,00	(14.141.381.279,00)	(100,00)
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	636.571.901,00	(636.571.901,00)	(100,00)
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	636.571.901,00	(636.571.901,00)	(100,00)
4.1.01.09	Pajak Reklame	5.000.000.000,00	5.209.151.364,00	104,18	4.915.273.173,00	293.878.191,00	5,98
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.700.940.000,00	4.122.627.345,00	87,69	3.782.594.316,00	340.033.029,00	8,99
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	4.700.940.000,00	4.122.627.345,00	87,69	3.782.594.316,00	340.033.029,00	8,99

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Pajak Daerah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	191.060.000,00	983.064.891,00	514,53	885.245.614,00	97.819.277,00	11,05
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	191.060.000,00	983.064.891,00	514,53	885.245.614,00	97.819.277,00	11,05
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	108.000.000,00	103.459.128,00	95,79	247.433.243,00	(143.974.115,00)	(58,19)
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	108.000.000,00	103.459.128,00	95,79	247.433.243,00	(143.974.115,00)	(58,19)
4.1.01.10	**Pajak Penerangan Jalan**	-	-	-	**78.154.354.611,00**	**(78.154.354.611,00)**	**(100,00)**
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	-	-	78.154.354.611,00	(78.154.354.611,00)	(100,00)
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	-	-	-	78.154.354.611,00	(78.154.354.611,00)	(100,00)
4.1.01.11	**Pajak Parkir**	-	-	-	**1.348.930.067,00**	**(1.348.930.067,00)**	**(100,00)**
4.1.01.11.01	Pajak Parkir	-	-	-	1.348.930.067,00	(1.348.930.067,00)	(100,00)
4.1.01.11.01.0001	Pajak Parkir	-	-	-	1.348.930.067,00	(1.348.930.067,00)	(100,00)
4.1.01.12	**Pajak Air Tanah**	**42.000.000.000,00**	**36.175.711.231,00**	**86,13**	**39.560.139.537,00**	**(3.384.428.306,00)**	**(8,56)**
4.1.01.12.01	Pajak Air Tanah	42.000.000.000,00	36.175.711.231,00	86,13	39.560.139.537,00	(3.384.428.306,00)	(8,56)
4.1.01.12.01.0001	Pajak Air Tanah	42.000.000.000,00	36.175.711.231,00	86,13	39.560.139.537,00	(3.384.428.306,00)	(8,56)
4.1.01.14	**Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan**	**2.800.000.000,00**	**3.073.434.937,00**	**109,76**	**2.054.143.562,00**	**1.019.291.375,00**	**49,62**
4.1.01.14.04	Pajak Batu Kapur	2.100.000.000,00	1.797.030.797,00	85,57	1.056.024.472,00	741.006.325,00	70,17
4.1.01.14.04.0001	Pajak Batu Kapur	2.100.000.000,00	1.797.030.797,00	85,57	1.056.024.472,00	741.006.325,00	70,17
4.1.01.14.12	Pajak Granit/Andesit	454.500.000,00	1.172.065.470,00	257,88	822.581.780,00	349.483.690,00	42,49
4.1.01.14.12.0001	Pajak Granit/Andesit	454.500.000,00	1.172.065.470,00	257,88	822.581.780,00	349.483.690,00	42,49
4.1.01.14.19	Pajak Marmer	60.000.000,00	50.104.370,00	83,50	66.709.170,00	(16.604.800,00)	(24,89)
4.1.01.14.19.0001	Pajak Marmer	60.000.000,00	50.104.370,00	83,50	66.709.170,00	(16.604.800,00)	(24,89)
4.1.01.14.23	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	36.707.900,00	(36.707.900,00)	(100,00)
4.1.01.14.23.0001	Pajak Pasir dan Kerikil	-	-	-	36.707.900,00	(36.707.900,00)	(100,00)
4.1.01.14.30	Pajak Tanah Liat	-	-	-	18.127.600,00	(18.127.600,00)	(100,00)
4.1.01.14.30.0001	Pajak Tanah Liat	-	-	-	18.127.600,00	(18.127.600,00)	(100,00)
4.1.01.14.37	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185.500.000,00	54.234.300,00	29,23	53.992.640,00	241.660,00	0,45
4.1.01.14.37.0001	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	185.500.000,00	54.234.300,00	29,23	53.992.640,00	241.660,00	0,45
4.1.01.15	**Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)**	**122.000.000.000,00**	**127.585.540.798,00**	**104,57**	**123.355.414.772,00**	**4.230.126.026,00**	**3,43**
4.1.01.15.01	PBBP2	122.000.000.000,00	127.585.540.798,00	104,57	123.355.414.772,00	4.230.126.026,00	3,43
4.1.01.15.01.0001	PBBP2	122.000.000.000,00	127.585.540.798,00	104,57	123.355.414.772,00	4.230.126.026,00	3,43
4.1.01.16	**Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**204.500.000.000,00**	**209.774.231.505,00**	**102,57**	**224.459.477.510,00**	**(14.685.246.005,00)**	**(6,54)**
4.1.01.16.01	BPHTB-Pemindahan Hak	204.500.000.000,00	209.774.231.505,00	102,57	223.864.648.656,00	(14.090.417.151,00)	(6,29)
4.1.01.16.01.0001	BPHTB-Pemindahan Hak	204.500.000.000,00	209.774.231.505,00	102,57	223.864.648.656,00	(14.090.417.151,00)	(6,29)
4.1.01.16.02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	594.828.854,00	(594.828.854,00)	(100,00)
4.1.01.16.02.0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	-	-	-	594.828.854,00	(594.828.854,00)	(100,00)

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Pajak Daerah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.01.19	**Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)**	**204.700.000.000,00**	**199.269.403.791,00**	**97,34**	**1.384.321.854,00**	**197.885.081.937,00**	**14.294,73**
4.1.01.19.01	PBJT-Makanan dan/atau Minuman	67.000.000.000,00	68.519.235.733,00	102,26	-	68.519 235.733,00	-
4.1.01.19.01.0001	PBJT-Restoran	66.976.000.000,00	68.519.235.733,00	102,30	-	68.519 235.733,00	-
4.1.01.19.01.0002	PBJT-Penyedia Jasa Boga atau Katering	24.000.000,00	-	-	-	-	-
4.1.01.19.02	PBJT-Tenaga Listrik	75.000.000.000,00	78.181.349.203,00	104,24	-	78.181 349.203,00	-
4.1.01.19.02.0002	PBJT-Konsumsi Tenaga Listrik yang Dihasilkan Sendiri	75.000.000.000,00	78.181.349.203,00	104,24	-	78.181 349.203,00	-
4.1.01.19.03	PBJT-Jasa Perhotelan	37.500.000.000,00	32.408.999.742,00	86,42	-	32.408 999.742,00	-
4.1.01.19.03.0001	PBJT-Hotel	32.880.000.000,00	27.548.804.007,00	83,78	-	27.548.804.007,00	-
4.1.01.19.03.0003	PBJT-Vila	4.620.000.000,00	4.860.195.735,00	105,19	-	4.860.195.735,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**14.642.836.786,00**	**17.918.045.037,00**	**122,36**	**11.903.113.026,97**	**6.014.932.010,03**	**50,53**
4.1.04.01	**Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan**	-	**179.641.500,00**	-	-	**179.641.500,00**	-
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	-	119.641.500,00	-	-	119.641.500,00	-
4.1.04.01.02.0055	Hasil Penjualan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	-	119.641.500,00	-	-	119.641.500,00	-
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-
4.1.04.01.03.0005	Hasil Penjualan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	-
4.1.04.03	**Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan**	**5.942.836.786,00**	**3.350.170.374,00**	**56,37**	**3.913.569.826,00**	**(563.399.452,00)**	**(14,40)**
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	-	-	-	736.972.500,00	(736.972.500,00)	(100,00)
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	-	-	-	736.972.500,00	(736.972.500,00)	(100,00)
4.1.04.03.02	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.839.861.312,00	112.552.100,00	3,96	-	112.552.100,00	-
4.1.04.03.02.0001	Hasil Kerja Sama Pemanfaatan BMD	2.839.861.312,00	112.552.100,00	3,96	-	112.552.100,00	-
4.1.04.03.03	Hasil dari Bangun Guna Serah	3.102.975.474,00	3.237.618.274,00	104,33	3.176.597.326,00	61.020.948,00	1,92
4.1.04.03.03.0001	Hasil dari Bangun Guna Serah	3.102.975.474,00	3.237.618.274,00	104,33	3.176.597.326,00	61.020.948,00	1,92
4.1.04.05	**Jasa Giro**	**5.000.000.000,00**	**8.370.515.040,00**	**167,41**	**3.238.048.161,97**	**5.132.466.878,03**	**158,50**
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	8.189.600.270,00	163,79	3.058.539.647,00	5.131.060.623,00	167,76
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	5.000.000.000,00	8.189.600.270,00	163,79	3.058.539.647,00	5.131.060.623,00	167,76
4.1.04.05.02	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	180.914.770,00	-	179.508.514,97	1.406.255,03	0,78
4.1.04.05.02.0001	Jasa Giro pada Kas di Bendahara	-	180.914.770,00	-	179.508.514,97	1.406.255,03	0,78
4.1.04.07	**Pendapatan Bunga**	**1.200.000.000,00**	**22.525.802,00**	**1,87**	**333.254.941,00**	**(310.729.139,00)**	**(93,24)**
4.1.04.07.01	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000,00	22.525.802,00	1,87	333.254.941,00	(310.729.139,00)	(93,24)
4.1.04.07.01.0001	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah	1.200.000.000,00	22.525.802,00	1,87	333.254.941,00	(310.729.139,00)	(93,24)
4.1.04.08	**Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah**	-	**128.604.000,00**	-	**63.624.735,00**	**64.979.265,00**	**102,13**
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	128.604.000,00	-	63.624.735,00	64.979.265,00	102,13
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	-	128.604.000,00	-	63.624.735,00	64.979.265,00	102,13
4.1.04.09	**Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain**	-	**114.935.783,00**	-	**23.309.235,00**	**91.626.548,00**	**393,09**
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	114.935.783,00	-	23.309.235,00	91.626.548,00	393,09
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	114.935.783,00	-	23.309.235,00	91.626.548,00	393,09
4.1.04.11	**Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**	-	**145.180.879,00**	-	**276.385.250,00**	**(131.204.371,00)**	**(47,47)**
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	145.180.879,00	-	276.385.250,00	(131.204.371,00)	(47,47)
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	145.180.879,00	-	276.385.250,00	(131.204.371,00)	(47,47)
4.1.04.12	**Pendapatan Denda Pajak Daerah**	**2.500.000.000,00**	**1.620.191.257,00**	**64,80**	**2.617.359.016,00**	**(997.167.759,00)**	**(38,10)**
4.1.04.12.06	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	23.196.076,00	-	13.824.441,00	9.371.635,00	67,79
4.1.04.12.06.0001	Pendapatan Denda Pajak Hotel	-	23.196.076,00	-	8.194.460,00	15.001.616,00	183,07

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.04.12.06.0003	Pendapatan Denda Pajak Losmen	-	-	-	72.000,00	(72.000,00)	(100,00)
4.1.04.12.06.0007	Pendapatan Denda Pajak Rumah Penginapan dan Sejenisnya	-	-	-	5.557.981,00	(5.557.981,00)	(100,00)
4.1.04.12.07	Pendapatan Denda Pajak Restoran	-	123 295.070,00	-	63.861.917,00	59.433.153,00	93,07
4.1.04.12.07.0001	Pendapatan Denda Pajak Restoran dan Sejenisnya	-	123 295.070,00	-	47.543.254,00	75.751.816,00	159,33
4.1.04.12.07.0002	Pendapatan Denda Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	-	-	-	2.685.852,00	(2.685.852,00)	(100,00)
4.1.04.12.07.0003	Pendapatan Denda Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	-	-	-	13.632.811,00	(13.632.811,00)	(100,00)
4.1.04.12.08	Pendapatan Denda Pajak Hiburan	-	22 791.347,00	-	6.432.043,00	16.359.804,00	254,35
4.1.04.12.08.0008	Pendapatan Denda Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	-	22 791.347,00	-	6.429.367,00	16.362.480,00	254,50
4.1.04.12.08.0009	Pendapatan Denda Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa, dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	-	-	-	2.676,00	(2.676,00)	(100,00)
4.1.04.12.09	Pendapatan Denda Pajak Reklame	-	6 131.225,00	-	5.646.294,00	484.931,00	8,59
4.1.04.12.09.0001	Pendapatan Denda Pajak Reklame Papan/ Billboard/Videotron/Megatron	-	6 131.225,00	-	5.528.743,00	602.482,00	10,90
4.1.04.12.09.0002	Pendapatan Denda Pajak Reklame Kain	-	-	-	117.551,00	(117.551,00)	(100,00)
4.1.04.12.11	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2 692.297,00	-	2.027.510,00	664.787,00	32,79
4.1.04.12.11.0001	Pendapatan Denda Pajak Parkir	-	2.692.297,00	-	2.027.510,00	664.787,00	32,79
4.1.04.12.12	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	31.310.037,00	-	43.517.671,00	(12.207.634,00)	(28,05)
4.1.04.12.12.0001	Pendapatan Denda Pajak Air Tanah	-	31 310.037,00	-	43.517.671,00	(12.207.634,00)	(28,05)
4.1.04.12.14	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	3 877.564,00	-	7.712.146,00	(3.834.482,00)	(49,72)
4.1.04.12.14.0004	Pendapatan Denda Pajak Batu Kapur	-	-	-	813.271,00	(813.271,00)	(100,00)
4.1.04.12.14.0012	Pendapatan Denda Pajak Granit/Andesit	-	-	-	3.856.032,00	(3.856.032,00)	(100,00)
4.1.04.12.14.0019	Pendapatan Denda Pajak Marmer	-	-	-	414.407,00	(414.407,00)	(100,00)
4.1.04.12.14.0037	Pendapatan Denda Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	-	3.877.564,00	-	2.628.436,00	1.249.228,00	47,53
4.1.04.12.15	Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	2.500.000.000,00	1.349.897.041,00	53,99	2.215.931.728,00	(865.034.687,00)	(39,03)
4.1.04.12.15.0001	Pendapatan Denda PBBP2	2.500.000.000,00	1.349.897.041,00	53,99	2.215.931.728,00	(865.034.687,00)	(39,03)
4.1.04.12.16	Pendapatan Denda Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	-	57.000.000,00	-	258.405.266,00	(201.405.266,00)	(77,94)
4.1.04.12.16.0001	Pendapatan Denda BPHTB-Pemindahan Hak	-	57.000.000,00	-	258.405.266,00	(201.405.266,00)	(77,94)
4.1.04.13	**Pendapatan Denda Retribusi Daerah**	-	**10.803.811,00**	-	**6.000.000,00**	**4.803.811,00**	**80,06**
4.1.04.13.02	Pendapatan Denda Retribusi Jasa Usaha	-	5.500.000,00	-	6.000.000,00	(500.000,00)	(8,33)
4.1.04.13.02.0009	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	-	-	6.000.000,00	(6.000.000,00)	(100,00)
4.1.04.13.02.0030	Pendapatan Denda Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga	-	5.500.000,00	-	-	5.500.000,00	-
4.1.04.13.03	Pendapatan Denda Retribusi Perizinan Tertentu	-	5.303.811,00	-	-	5.303.811,00	-
4.1.04.13.03.0016	Pendapatan Denda Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-Persetujuan Bangunan Gedung	-	5.303.811,00	-	-	5.303.811,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.04.15	**Pendapatan dari Pengembalian**	**-**	**3.975.476.591,00**	**-**	**1.431.561.862,00**	**2.543.914.729,00**	**177,70**
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	-	54.148.275,00	(54.148.275,00)	(100,00)
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	-	-	-	54.148.275,00	(54.148.275,00)	(100,00)
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	-	29.994.100,00	-	-	29.994.100,00	-
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Biasa	-	24.404.100,00	-	-	24.404.100,00	-
4.1.04.15.04.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri- Perjalanan Dinas Dalam Kota	-	5.590.000,00	-	-	5.590.000,00	-
4.1.04.15.08	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	-	354.017.569,00	-	193.011.986,00	161.005.583,00	83,42
4.1.04.15.08.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Gaji Pokok ASN-Gaji Pokok PNS	-	110.933.327,00	-	193.011.986,00	(82.078.659,00)	(42,53)
4.1.04.15.08.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Keluarga ASN-Tunjangan Keluarga PNS	-	109.542.424,00	-	-	109.542.424,00	-
4.1.04.15.08.0005	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Jabatan ASN-Tunjangan Jabatan PNS	-	3.285.000,00	-	-	3.285.000,00	-
4.1.04.15.08.0007	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tunjangan Fungsional ASN-Tunjangan Fungsional PNS	-	15.697.070,00	-	-	15.697.070,00	-
4.1.04.15.08.0025	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jaminan Hari Tua ASN-Jaminan Hari Tua PNS	-	114.559.748,00	-	-	114.559.748,00	-
4.1.04.15.09	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan ASN	-	179.435.549,00	-	-	179.435.549,00	-
4.1.04.15.09.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	-	142.627.221,00	-	-	142.627.221,00	-
4.1.04.15.09.0009	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	-	5.000.000,00	-	-	5.000.000,00	-
4.1.04.15.09.0074	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN-Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	-	31.808.328,00	-	-	31.808.328,00	-
4.1.04.15.15	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang	-	1.625.000,00	-	-	1.625.000,00	-
4.1.04.15.15.0052	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang Pakai Habis-Makanan dan Minuman Rapat	-	1.625.000,00	-	-	1.625.000,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.04.15.16	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa	-	464.608.148,00	-	-	464.608.148,00	-
4.1.04.15.16.0003	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	-	64.090.000,00	-	-	64.090.000,00	-
4.1.04.15.16.0061	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik	-	7.975.000,00	-	-	7.975.000,00	-
4.1.04.15.16.0905	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi-Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	-	80.898.000,00	-	-	80.898.000,00	-
4.1.04.15.16.0944	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Pengembangan Pertanian dan Perdesaan	-	49.588.398,00	-	-	49.588.398,00	-
4.1.04.15.16.0956	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi-Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	-	113.636.250,00	-	-	113.636.250,00	-
4.1.04.15.16.0989	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan-Sosialisasi	-	14.742.500,00	-	-	14.742.500,00	-
4.1.04.15.16.1064	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Jasa Kantor-Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	-	133.678.000,00	-	-	133.678.000,00	-
4.1.04.15.17	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan	-	2.530.688.131,00	-	1.184.401.601,00	1.346.286.530,00	113,67
4.1.04.15.17.0545	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan-Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	-	72.608.338,00	-	1.184.401.601,00	(1.111.793.263,00)	(93,87)
4.1.04.15.17.0611	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi-Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten	-	2.458.079.793,00	-	-	2.458.079.793,00	-
4.1.04.15.31	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	222.116.121,00	-	-	222.116.121,00	-
4.1.04.15.31.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	222.116.121,00	-	-	222.116.121,00	-
4.1.04.15.61	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	-	148.268.273,00	-	-	148.268.273,00	-
4.1.04.15.61.0010	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	-	57.313.978,00	-	-	57.313.978,00	-

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah per SubRincian Objek Tahun Anggaran 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2025	%	REALISASI 2024	Kenaikan / (Penurunan)	
						Rp	(%)
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6	7	8
4.1.04.15.61.0032	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum	-	90.954.295,00	-	-	90.954.295,00	-
4.1.04.15.79	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	5.569.300,00	-	-	5.569.300,00	-
4.1.04.15.79.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	-	5.569.300,00	-	-	5.569.300,00	-
4.1.04.15.87	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP	-	36.694.400,00	-	-	36.694.400,00	-
4.1.04.15.87.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Hibah Dana BOSP-BOP PAUD	-	36.694.400,00	-	-	36.694.400,00	-
4.1.04.15.88	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Pegawai BOS, Belanja Barang dan Jasa BOS, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS, serta Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	2.460.000,00	-	-	2.460.000,00	-
4.1.04.15.88.0002	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS	-	2.460.000,00	-	-	2.460.000,00	-

Rincian Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2025

(dalam rupiah)

Jenis Dana Transfer	OPD	Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
DAU (SPESIFIC GRANT)	PENGGAJIAN PPPK	4.573.518.131,00	9.435.674.631,00	14.009.192.762,00	-
	BIDANG KESEHATAN	594.930.572,00	95.079.440.000,00	90.824.174.293,00	4.850.196.279,00
	BIDANG PENDIDIKAN	5.601.118.086,00	101.242.198.000,00	104.931.175.770,00	1.912.140.316,00
	BIDANG PEKERJAAN UMUM	301.936.084,00	-	281.666.100,00	20.269.984,00
TOTAL DAU SPESIFIC GRANT		11.071.502.873,00	205.757.312.631,00	210.046.208.925,00	6.782.606.579,00
DBH SAWIT		3.294.893.000,00			3.294.893.000,00
TOTAL DBH SAWIT		3.294.893.000,00			3.294.893.000,00
TOTAL DID		1.713.844.089,42	-	-	1.713.844.089,42
DANA INSENTIF FISKAL			8.201.462.000,00	8.085.216.050,00	116.245.950,00
TOTAL DANA INSENTIF FISKAL		-	8.201.462.000,00	8.085.216.050,00	116.245.950,00
OPSEN PKB - BBNKB			162.661.292.300,00	162.661.292.300,00	-
TOTAL OPSEN PKB - BBNKB		-	162.661.292.300,00	162.661.292.300,00	-
BANKEU PROVINSI	DINKES - PBI	-	11.907.000.000,00	11.907.000.000,00	-
TOTAL BANKEU PROVINSI		-	11.907.000.000,00	11.907.000.000,00	-
DAK NON FISIK	DISDIK - TPG	5.556.969.800,00		133.364.700,00	5.423.605.100,00
	DISDIK - TAMSIL	1.319.750.000,00		249.000.000,00	1.070.750.000,00
	DINKES - BOK	484.094.301,00	14.850.623.509,00	12.913.871.480,00	2.420.846.330,00
	DINKES - BOK POM	-	699.609.000,00	698.094.000,00	1.515.000,00
	DPPKBP3A - BOKB	11.800.000,00	15.926.175.000,00	15.822.167.321,00	115.807.679,00
	DPPKBP3A - Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	2.925.000,00		2.925.000,00	-
	DISKOP UKM	572.600,00			572.600,00
	DPMPTSP - FPM	4.274.538,00		4.274.538,00	-
	DKPP - KPP	-	355.680.000,00	337.440.000,00	18.240.000,00
TOTAL DAK NON FISIK		7.380.386.239,00	31.832.087.509,00	30.161.137.039,00	9.051.336.709,00
DAK FISIK	Pendidikan	482.577.195,00	1.376.957.181,00	1.376.957.181,00	482.577.195,00
	Kesehatan	4.812.310.873,00	2.552.553.600,00	2.545.115.386,00	4.819.749.087,00
	Keluarga Berencana	430.704,00	794.190.000,00	794.190.000,00	430.704,00
	Jalan	634.493.900,00	-	-	634.493.900,00
	Irigasi	18.672.001,00	-	-	18.672.001,00
	Air Minum	142.352.600,00	4.494.729.300,00	4.494.729.300,00	142.352.600,00
	Sanitasi	-	2.795.730.000,00	2.795.730.000,00	-
	Pertanian	523.093.263,00	-	-	523.093.263,00
	Kelautan dan Perikanan	82.602.475,00	-	-	82.602.475,00
	Perumahan dan Permukiman	649.687.500,00	-	-	649.687.500,00
	Pasar	18.550.000,00	-	-	18.550.000,00
	Air Minum - Cadangan	21.800.000,00	-	-	21.800.000,00
	Irigasi - Cadangan	1,00	-	-	1,00
	Pertanian - Cadangan	246.900.000,00	-	-	246.900.000,00
	Kelautan dan Perikanan - Cadangan	1.613.000,00	-	-	1.613.000,00
TOTAL DAK FISIK		7.635.083.512,00	12.014.160.081,00	12.006.721.867,00	7.642.521.726,00
DBHCHT		1.872.848.077,00	9.913.622.000,00	10.721.435.866,00	1.065.034.211,00
TOTAL DBHCHT		1.872.848.077,00	9.913.622.000,00	10.721.435.866,00	1.065.034.211,00
TOTAL DANA TRANSFER		34.000.077.485,42	447.082.459.727,00	450.436.491.360,00	30.646.045.852,42
PAD					158.277.034.895,58
SALDO KAS DI KAS DAERAH PER 31 DESEMBER 2025					188.923.080.748,00

LAMPIRAN CaLK 2b

Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2025
Kabupaten Bandung Barat

(dalam rupiah)

No.	RSUD/PKM	RC KAS BLUD	Kas di Bend. Penerimaan BLUD	Kas di Bend. Pengeluaran BLUD	Kas BLUD	No Rek kas blud
1	2	3	4	5	6	7
1	BLUD RSUD CILILIN	3.821.452.763,00	1.819.600,00		3.823.272.363,00	4545454545001
2	BLUD RSUD CIKALONGWETAN	304.336.863,00	4.931.750,00		309.268.613,00	0090375911001
3	BLUD RSUD LEMBANG	1.129.684.073,00	5.417.300,00		1.135.101.373,00	0091559064100
4	BLUD RAJAMANDALA	352.477.778,00	420.000,00		352.897.778,00	0059411187100
5	BLUD JAYAGIRI	232.421.586,00	-		232.421.586,00	0059410342100
6	BLUD GUNUNGHALU	194.723.432,00	690.000,00	7.000,00	195.420.432,00	0059427644100
7	BLUD CILILIN	451.734.663,00	-		451.734.663,00	0059423053100
8	BLUD CIKALONGWETAN	802.924.999,00	490.000,00		803.414.999,00	0059429396100
9	BLUD SAGULING	151.908.486,00	-		151.908.486,00	0059429019100
10	BLUD PARONGPONG	348.467.141,00	-		348.467.141,00	0059430981100
11	BLUD CIWARUGA	49.062.614,00	-		49.062.614,00	0059423282100
12	BLUD CIHAMPELAS	355.023.641,00	-		355.023.641,00	0059421697100
13	BLUD MUKAPAYUNG	221.750.269,00	-		221.750.269,00	0059411128100
14	BLUD SINDANGKERTA	499.150.953,00	-		499.150.953,00	0059434519100
15	BLUD CICANGKANGGIRANG	322.900.881,00	-		322.900.881,00	0059422928100
16	BLUD CIPATAT	93.686.980,00	-		93.686.980,00	0059423584100
17	BLUD SUMURBANDUNG	145.707.956,00	-		145.707.956,00	0059406736100
18	BLUD RONGGA	398.608.011,00	-		398.608.011,00	0059427105100
19	BLUD JAYAMEKAR	17.650.771,00	-		17.650.771,00	0059424076100
20	BLUD CIPEUNDEUY	145.517.315,00	-		145.517.315,00	0059401599100
21	BLUD CITALEM	20.759.814,00	-		20.759.814,00	0059425153100
22	BLUD CIPONGKOR	133.081.732,00	-		133.081.732,00	0059434659100
23	BLUD CIMAREME	207.561.354,00			207.561.354,00	0059435485100
24	BLUD NGAMPRAH	427.505.228,00	-		427.505.228,00	0059422782100
25	BLUD BATUJAJAR	17.815.925,00	95.000,00		17.910.925,00	0059425129100
26	BLUD CIBODAS	113.515.880,00	-		113.515.880,00	0059422235100
27	BLUD CIKOLE	41.494.508,00	-		41.494.508,00	0059426540100
28	BLUD LEMBANG	83.743.753,00	-		83.743.753,00	0059425722100
29	BLUD PASIRLANGU	123.035.897,00	-		123.035.897,00	0059429914100
30	BLUD RENDE	386.414.587,00	-		386.414.587,00	0059433857100
31	BLUD CIRATA	81.127.036,00	-		81.127.036,00	0059424556100
32	BLUD CISARUA	320.467.147,00	-		320.467.147,00	0059431110100
33	BLUD TAGOG APU	84.335.827,00	-		84.335.827,00	0059399276100
34	BLUD PADALARANG	239.672.783,00	-		239.672.783,00	0059427441100
35	BLUD PATARUMAN	141.642.552,00	-		141.642.552,00	0059427172100
36	LABKESDA	1.775.183.365,00	-		1.775.183.365,00	0124637228100
JUMLAH		**14.236.548.563,00**	**13.863.650,00**	**7.000,00**	**14.250.419.213,00**	

LAMPIRAN CaLK 2c

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	RSUD/PKM	Saldo Awal 2025 BLUD	Saldo Awal 2025 BOK	Penerimaan Tahun 2025 BLUD	Penerimaan Tahun 2025 BOK	Penerimaan Blud dan BOK 2025	Belanja Pegawai BOK	Belanja Pegawai BLUD
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	BLUD RSUD CILILIN	3.268.535.767,00		57.760.529.231,00		57.760.529.231,00		17.727.721.104,00
2	BLUD RSUD CIKALONGWETAN	148.704.840,00		26.524.733.957,00		26.524.733.957,00		10.448.246.390,00
3	BLUD RSUD LEMBANG	2.718.030.842,00		30.667.308.700,00		30.667.008.700,00		11.054.248.181,00
4	BLUD RAJAMANDALA	329.563.519,00	166.370.456,00	3.006.285.792,00	328.643.544,00	3.334.929.336,00	61.887.103,00	1.373.449.182,00
5	BLUD JAYAGIRI	215.065.892,00	150.494.100,00	2.667.733.431,00	375.072.900,00	3.042.806.331,00	48.922.591,00	1.504.385.154,00
6	BLUD GUNUNGHALU	241.350.378,00	20.862.592,00	3.917.508.249,00	528.098.408,00	4.445.606.657,00	72.700.120,00	1.728.403.228,00
7	BLUD CILILIN	188.534.306,00	53.347.300,00	3.514.363.172,00	503.233.700,00	4.018.196.872,00	76.919.000,00	1.606.263.262,00
8	BLUD CIKALONGWETAN	960.844.419,00	63.135.317,00	5.427.554.521,00	559.998.683,00	5.987.653.204,00	49.972.790,00	2.071.800.769,00
9	BLUD SAGULING	83.805.187,00	43.672.000,00	2.746.705.958,00	604.491.000,00	3.351.196.958,00	89.247.157,00	1.197.157.398,00
10	BLUD PARONGPONG	285.803.530,00	50.684.000,00	1.844.895.235,00	546.726.000,00	2.391.621.235,00	56.829.045,00	1.003.572.897,00
11	BLUD CIWARUGA	76.479.115,00	49.110.070,00	1.366.368.227,00	628.637.930,00	1.995.006.157,00	51.290.033,00	764.103.997,00
12	BLUD CIHAMPELAS	315.598.384,00	11.215.600,00	3.551.423.562,00	547.934.400,00	4.099.357.962,00	69.953.216,00	1.985.914.840,00
13	BLUD MUKAPAYUNG	101.763.767,00	72.038.200,00	2.168.658.538,00	518.852.800,00	2.687.511.338,00	62.681.114,00	1.246.585.042,00
14	BLUD SINDANGKERTA	219.331.472,00	226.000,00	2.038.596.815,00	537.640.000,00	2.556.536.815,00	70.149.661,00	1.085.388.546,00
15	BLUD CICANGKANGGIRANG	237.769.391,00	47.260.400,00	2.195.763.526,00	529.838.600,00	2.723.602.126,00	72.547.690,00	1.205.635.375,00
16	BLUD CIPATAT	389.747.552,00	70.361.100,00	3.047.636.28..,00	467.706.900,00	3.515.343.181,00	66.812.506,00	1.797.443.306,00
17	BLUD SUMURBANDUNG	236.516.500,00	89.478.946,00	1.526.677,95..,00	483.990.054,00	2.010.668.005,00	68.170.073,00	935.492.158,00
18	BLUD RONGGA	285.104.185,00	104.874.540,00	3.095.595.399,00	448.339.460,00	3.544.334.859,00	57.558.509,00	1.424.330.900,00
19	BLUD JAYAMEKAR	13.050.510,00	126.085.604,00	1.848.809.112,00	429.640.396,00	2.278.449.508,00	43.238.952,00	1.048.437.683,00
20	BLUD CIPEUNDEUY	190.363.069,00	32.907.900,00	2.972.342.344,00	533.302.100,00	3.505.644.444,00	70.340.405,00	1.479.752.777,00
21	BLUD CITALEM	33.688.149,00	130.598.202,00	2.106.576.263,00	400.166.798,00	2.507.043.061,00	48.990.758,00	1.034.710.051,00
22	BLUD CIPONGKOR	74.465.078,00	79.677.600,00	3.295.175.226,00	424.476.400,00	3.719.651.626,00	42.909.837,00	1.480.183.290,00
23	BLUD CIMAREME	208.187.538,00	151.822.345,00	3.207.590.911,00	596.401.655,00	3.804.392.566,00	81.455.812,00	1.877.807.725,00
24	BLUD NGAMPRAH	311.459.516,00	98.910.961,00	2.599.505.682,00	493.804.039,00	3.093.309.721,00	59.827.823,00	1.445.652.141,00
25	BLUD BATUJAJAR	227.577.592,00	41.983.000,00	4.569.235.828,00	659.489.000,00	5.228.824.828,00	85.560.780,00	2.052.621.285,00
26	BLUD CIBODAS	114.896.486,00	54.083.500,00	1.545.555.495,00	494.324.500,00	2.040.179.995,00	66.129.295,00	779.964.879,00
27	BLUD CIKOLE	43.061.822,00	111.646.300,00	1.453.567.974,00	486.345.700,00	1.940.313.674,00	69.545.965,00	844.620.018,00
28	BLUD LEMBANG	186.672.745,00	117.954.684,00	2.523.128.029,00	499.239.316,00	3.022.357.345,00	70.293.615,00	1.472.081.266,00
29	BLUD PASIRLANGU	46.164.442,00	104.243.702,00	1.526.536.919,00	471.027.298,00	1.997.364.217,00	72.144.541,00	862.260.552,00
30	BLUD RENDE	380.553.696,00	237.207.480,00	2.255.182.106,00	361.918.520,00	2.617.100.626,00	79.198.087,00	1.157.144.825,00
31	BLUD CIRATA	117.225.044,00	121.961.779,00	1.776.250.824,00	467.392.221,00	2.243.643.045,00	59.965.876,00	907.900.353,00
32	BLUD CISARUA	151.124.398,00	71.157.800,00	2.332.951.217,00	534.713.200,00	2.867.664.417,00	65.840.262,00	1.262.172.188,00
33	BLUD TAGOG APU	266.373.061,00	139.895.054,00	1.763.583.122,00	498.236.946,00	2.261.820.068,00	54.595.509,00	1.050.164.702,00
34	BLUD PADALARANG	131.986.254,00	16.304.200,00	2.463.862.849,00	656.159.800,00	3.119.962.649,00	83.974.860,00	1.398.640.524,00
35	BLUD PATARUMAN	182.912.730,00	164.450.913,00	2.807.708.289,00	428.091.087,00	3.235.799.376,00	67.345.813,00	1.475.348.769,00
36	LABKESDA	274.562.316,00		3.956.749.849,00[illegible]		3.956.749.849,00		1.024.061.493,00
	Jumlah	13.256.878.492,00	2.796.021.645,00	202.053.196.584,00	16.043.935.355,00	218.097.125.939,00	2.096.998.798,00	82.813.666.250,00

LAMPIRAN CaLK 1c

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	RSUD/PKM	Belanja Pegawai BLUD dan BOK	Belanja Barjas BOK	Belanja Barjas BLUD	Belanja Barjas BLUD dan BOK	BM Peralatan dan Mesin BLUD	BM Gedung dan Bangunan BLUD	BM Jalan, Jaringan dan	BM Aset Tetap Lainnya BLUD
1	2	10	11	12	13	14	15	16	17
1	BLUD RSUD CILILIN	17.727.721.104,00		36.994.053.206,00	36.994.053.206,00	1.209.054.777,00	481.159.629,00	661.803.919,00	
2	BLUD RSUD CIKALONGWETAN	10.448.246.390,00		15.292.610.614,00	15.292.610.614,00	440.542.910,00	182.770.270,00		
3	BLUD RSUD LEMBANG	19.054.248.181,00		20.803.696.746,00	20.803.696.746,00	291.993.242,00	100.000.000,00		
4	BLUD RAJAMANDALA	1.435.336.285,00	389.113.000,00	1.566.611.951,00	1.955.724.951,00	42.890.400,00			
5	BLUD JAYAGIRI	1.553.307.745,00	376.717.000,00	1.095.992.583,00	1.472.709.583,00	50.000.000,00			
6	BLUD GUNUNGHALU	1.801.103.348,00	467.238.000,00	2.124.556.467,00	2.591.794.467,00	110.478.500,00			
7	BLUD CILILIN	1.683.182.262,00	447.439.100,00	1.595.786.803,00	2.043.225.903,00	49.712.750,00			
8	BLUD CIKALONGWETAN	2.121.773.559,00	434.949.000,00	3.115.169.539,00	3.550.118.539,00	398.113.633,00			
9	BLUD SAGULING	1.286.404.555,00	495.806.400,00	1.381.838.081,00	1.877.644.481,00	99.607.180,00			
10	BLUD PARONGPONG	1.060.401.942,00	514.780.600,00	667.892.253,00	1.182.672.853,00	110.766.474,00			
11	BLUD CIWARUGA	815.394.030,00	488.904.600,00	531.650.874,00	1.020.555.474,00	98.429.857,00			
12	BLUD CIHAMPELAS	2.055.868.056,00	433.098.000,00	1.394.350.288,00	1.827.448.288,00	131.733.177,00			
13	BLUD MUKAPAYUNG	1.309.266.156,00	432.368.800,00	766.474.844,00	1.198.843.644,00	35.612.150,00			
14	BLUD SINDANGKERTA	1.155.538.207,00	441.193.600,00	635.928.788,00	1.077.122.388,00	17.760.000,00			
15	BLUD CICANGKANGGIRANG	1.278.183.065,00	469.670.340,00	843.776.605,00	1.313.446.905,00	59.220.056,00			
16	BLUD CIPATAT	1.864.255.812,00	423.563.000,00	1.261.324.590,00	1.684.887.590,00	186.554.200,00	98.374.757,00		
17	BLUD SUMURBANDUNG	1.003.662.231,00	487.462.000,00	625.236.837,00	1.112.698.837,00	56.757.500,00			
18	BLUD RONGGA	1.481.889.409,00	429.765.000,00	1.403.900.179,00	1.833.665.179,00	154.260.494,00			
19	BLUD JAYAMEKAR	1.091.676.635,00	396.237.300,00	734.291.238,00	1.130.528.538,00	61.479.930,00			
20	BLUD CIPEUNDEUY	1.550.093.182,00	484.972.200,00	1.396.221.921,00	1.881.194.121,00	141.213.400,00			
21	BLUD CITALEM	1.083.700.809,00	349.263.600,00	1.054.299.360,00	1.403.562.960,00	36.795.187,00			
22	BLUD CIPONGKOR	1.523.093.127,00	297.082.000,00	1.667.208.825,00	1.964.290.825,00	89.166.457,00			
23	BLUD CIMAREME	1.959.263.537,00	520.628.700,00	1.230.844.522,00	1.751.473.222,00	99.964.848,00			
24	BLUD NGAMPRAH	1.505.479.964,00	403.497.000,00	1.004.712.129,00	1.408.209.129,00	33.095.700,00			
25	BLUD BATUJAJAR	2.138.182.065,00	555.931.200,00	2.454.645.355,00	3.010.576.555,00	271.735.855,00			
26	BLUD CIBODAS	846.094.174,00	461.015.600,00	717.342.645,00	1.178.358.245,00	49.928.577,00			
27	BLUD CIKOLE	914.165.983,00	484.022.200,00	540.023.170,00	1.024.045.370,00	70.892.100,00			
28	BLUD LEMBANG	1.542.374.881,00	487.003.500,00	998.298.607,00	1.485.302.107,00	155.677.148,00			
29	BLUD PASIRLANGU	934.405.093,00	427.749.500,00	550.994.538,00	978.744.038,00	36.210.374,00			
30	BLUD RENDE	1.236.342.912,00	471.605.000,00	905.941.490,00	1.377.546.490,00	87.142.300,00	99.092.600,00		
31	BLUD CIRATA	967.866.229,00	380.638.900,00	758.190.480,00	1.138.829.380,00	146.257.999,00			
32	BLUD CISARUA	1.328.012.450,00	481.497.600,00	875.368.161,00	1.356.865.761,00	26.068.119,00			
33	BLUD TAGOG APU	1.104.760.211,00	428.873.575,00	792.559.554,00	1.221.433.129,00	102.701.100,00			
34	BLUD PADALARANG	1.482.615.384,00	567.508.200,00	899.313.524,00	1.466.821.724,00	58.162.272,00			
35	BLUD PATARUMAN	1.542.694.582,00	381.413.500,00	1.336.509.698,00	1.717.923.198,00	37.120.000,00			
36	LABKESDA	1.024.061.493,00		1.374.534.398,00	1.374.534.398,00	57.532.909,00			
	Jumlah	84.910.665.048,00	14.311.007.975,00	111.392.150.863,00	125.703.158.838,00	5.098.631.575,00	961.397.256,00	661.803.919,00	-

LAMPIRAN CaLK 2c

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
REALISASI PENDAPATAN DAN BELANJA BLUD
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	RSUD/PKM	BM Aset Lainnya BLUD	Total Belanja Tahun BLUD dan BOK 2025	Saldo Akhir BLUD dan BOK 2025	RC KAS BLUD	KAS BOK	Kas di Bend. Penerimaan	Kas di Bend. Pengeluaran	Selisih
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25
1	BLUD RSUD CILILIN	132.000.000,00	57.235.792.635,00	3.823.272.363,00	3.821.452.763,00	-	1.819.600,00		-
2	BLUD RSUD CIKALONGWETAN		26.354.170.184,00	309.268.613,00	304.336.863,00	-	4.931.750,00		-
3	BLUD RSUD LEMBANG		32.249.938.169,00	1.135.101.373,00	1.129.684.073,00	-	5.417.300,00		-
4	BLUD RAJAMANDALA		3.433.951.636,00	396.911.675,00	352.477.778,00	44.013.897,00	420.000,00		-
5	BLUD JAYAGIRI		3.076.017.328,00	332.348.995,00	232.421.586,00	99.927.409,00	-		-
6	BLUD GUNUNGHALU		4.533.376.315,00	204.443.312,00	194.723.432,00	9.022.880,00	690.000,00	7.000,00	-
7	BLUD CILILIN		3.776.120.915,00	483.957.563,00	451.734.663,00	32.222.900,00	-		-
8	BLUD CIKALONGWETAN		6.070.005.731,00	941.627.209,00	802.924.999,00	138.212.210,00	490.000,00		-
9	BLUD SAGULING		3.253.656.216,00	215.017.929,00	151.908.486,00	63.109.443,00	-		-
10	BLUD PARONGPONG		2.353.841.269,00	374.267.496,00	348.467.141,00	25.800.355,00	-		-
11	BLUD CIWARUGA		1.934.379.361,00	186.615.981,00	49.062.614,00	137.553.367,00	-		-
12	BLUD CIHAMPELAS		4.015.049.521,00	411.122.425,00	355.023.641,00	56.098.784,00	-		-
13	BLUD MUKAPAYUNG		2.543.721.950,00	317.591.355,00	221.750.269,00	95.841.086,00	-		-
14	BLUD SINDANGKERTA		2.250.420.595,00	525.673.692,00	499.150.953,00	26.522.739,00	-		-
15	BLUD CICANGKANGGIRANG		2.650.850.026,00	357.781.891,00	322.900.881,00	34.881.010,00	-		-
16	BLUD CIPATAT		3.834.072.359,00	141.379.474,00	93.686.980,00	47.692.494,00	-		-
17	BLUD SUMURBANDUNG		2.173.118.568,00	163.544.883,00	145.707.956,00	17.836.927,00	-		-
18	BLUD RONGGA		3.469.815.082,00	464.498.502,00	398.608.011,00	65.890.491,00	-		-
19	BLUD JAYAMEKAR		2.283.685.103,00	133.900.519,00	17.650.771,00	116.249.748,00	-		-
20	BLUD CIPEUNDEUY		3.572.500.703,00	156.414.710,00	145.517.315,00	10.897.395,00	-		-
21	BLUD CITALEM		2.518.058.956,00	153.270.456,00	20.759.814,00	132.510.642,00	-		-
22	BLUD CIPONGKOR		3.576.550.409,00	297.243.895,00	133.081.732,00	164.162.163,00	-		-
23	BLUD CIMAREME		3.810.701.607,00	353.700.842,00	207.561.354,00	146.139.488,00			-
24	BLUD NGAMPRAH		2.946.784.793,00	556.895.405,00	427.505.228,00	129.390.177,00	-		-
25	BLUD BATUJAJAR		5.420.494.475,00	77.890.945,00	17.815.925,00	59.980.020,00	95.000,00		-
26	BLUD CIBODAS		2.074.380.996,00	134.778.985,00	113.515.880,00	21.263.105,00	-		-
27	BLUD CIKOLE		2.009.103.453,00	87.918.343,00	41.494.508,00	46.423.835,00	-		-
28	BLUD LEMBANG		3.183.354.136,00	143.640.638,00	83.743.753,00	59.896.885,00	-		-
29	BLUD PASIRLANGU		1.949.359.505,00	198.412.856,00	123.035.897,00	75.376.959,00	-		-
30	BLUD RENDE		2.800.124.302,00	434.737.500,00	386.414.587,00	48.322.913,00	-		-
31	BLUD CIRATA		2.252.953.608,00	229.876.260,00	81.127.036,00	148.749.224,00	-		-
32	BLUD CISARUA		2.710.946.330,00	379.000.285,00	320.467.147,00	58.533.138,00	-		-
33	BLUD TAGOG APU		2.428.894.440,00	239.000.743,00	84.335.827,00	154.664.916,00	-		-
34	BLUD PADALARANG		3.007.599.380,00	260.653.723,00	239.672.783,00	20.980.940,00	-		-
35	BLUD PATARUMAN		3.297.737.780,00	285.425.239,00	141.642.552,00	143.782.687,00	-		-
36	LABKESDA		2.456.128.800,00	1.775.183.365,00	1.775.183.365,00	-	-		-
	Jumlah	132.000.000,00	217.467.656.636,00	16.682.369.440,00	14.236.548.563,00	2.431.950.227,00	13.863.650,01	7.000,00	-

LAMPIRAN CaLK 2d

REKAPITULASI SISA DANA BOS PER SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

SKPD DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN BANDUNG BARAT

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nomor Rekening	Nama Sekolah	Kecamatan	Sisa Kas Tunai	Sisa Kas Bank	Jumlah Sisa Dana (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	2E+07	0120021214100	SD NEGERI 3 CIPONGKOR	Kec. Cipongkor	-	14.000,00	14.000,00
2	2E+07	0120021567100	SD NEGERI 1 CILANGARI	Kec. Gununghalu	-	4.000,00	4.000,00
3	2E+07	0120021869100	SD NEGERI TANGSI JAYA	Kec. Gununghalu	-	82.500,00	82.500,00
4	2E+07	0120014961100	SD NEGERI 3 WANGUNSARI	Kec. Lembang	-	3.961.100,00	3.961.100,00
5	2E+07	0120015001100	SD NEGERI 6 CIBOGO	Kec. Lembang	-	8.814.400,00	8.814.400,00
6	2E+07	0120015451100	SD NEGERI SUKAMULYA	Kec. Parongpong	-	414.700,00	414.700,00
				TOTAL	-	**13.290.700,00**	**13.290.700,00**

LAMPIRAN CaLK 2e

REKAPITULASI SISA DANA BOS PER SEKOLAH
JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) NEGERI
PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025

SKPD DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG BARAT

(dalam rupiah)

No	NPSN	Nomor Rekening	Nama Sekolah	Kecamatan	Sisa Kas Tunai	Sisa Kas Bank	Jumlah Sisa Dana (Rp)
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	60726182	0120018523100	SMP NEGERI SATU ATAP LEMBANG CILILIN	Kec. Cililin	-	160.000,00	160.000,00
				TOTAL	-	**160.000,00**	**160.000,00**

LAMPIRAN CmLK.2F

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
Rincian Kas Lainnya Tahun 2025 SD

(Rupiah)

NO	Nama Sekolah	Jenjang	JUMLAH JENIS SETORAN PAJAK			Total	TANGGAL BAYAR	TANGGAL NTPN	NTPN	NOMOR BUKTI BELANJA	KETERANGAN
			PPh 21	PPh 23	PPN						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	SDN Jati	SD	-	34.000		34.000	03-Feb-26	03-Feb-26	3AB951Q0VSJJ2TO2	041789455365634	
Total			-	34.000	-	34.000					

LAMPIRAN CALK 3

REKAP KESELURUHAN PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG 2024(AUDITED)	KOREKSI SALDO AWAL	TOTAL KETETAPAN 2025	PENGURANGAN												TOTAL REALISASI PEMBAYARAN	PEMBULATAN SISTEM TAHUN 2019	SISA PIUTANG PER 31 DES 2025
					REALISASI PEMBAYARAN														
					JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	HOTEL	7.330.978.636,23		32.784.646.528,00	6.291.254.100,00	3.167.107.300,00	2.911.766.811,03	927.230.643	2.975.390.861	2.770.041.489	2.827.232.147	2.927.291.325	2.392.653.193	2.363.913.649	2.260.057.706	2.013.169.467	32.408.999.742		4.506.617.420,23
2	RESTORAN	6.396.828.028,42	3.207.410,00	68.896.347.331,00	6.791.542.799,00	6.890.353.769,00	6.707.448.171,62	2.700.230.690	3.736.847.135	5.323.725.592	6.228.358.876	5.680.360.701	3.973.349.339	5.371.934.879	5.258.904.690	6.820.680.874	68.519.289.733		6.917.442.906,42
3	HIBURAN	927.863.088,00		19.925.983.937,00	1.998.790.330,00	2.003.099.461,00	1.167.958.314,02	619.635,00	2.439.790.976	1.345.917.636	2.006.163.525	1.503.929.997	1.302.906.136	1.141.092.831	963.990.006	1.378.179.701	18.851.478.510		2.002.370.507,00
4	PARKIR	248.001.413,00		1.317.152.261,00	341.861.936,00	130.500.763,00	65.486.473,00	63.136.647	146.263.895	120.793.702	134.776.962	96.438.418	105.932.961	106.305.906,00	93.094.982	91 001.906	1.300.360.293		257.289 179,00
5	REKLAME	486.113.048,00		5.213.715.447,00	541.919.507,00	437.569.091,00	464.491.464,00	306.914.577	313.579.374	263.008.777	488.419 351	464.600.893	254.299.648	326.976.987	400.154.300	491.374.613,00	5.209.153.564		491 677 131,00
6	MINERAL	903.534.291,00		3.023.690.272	264.008.430,00	239.442.814,00	232.440.974,00	240.936.708	244.477.368,00	297.320.017	365.174 362	102.701.461	209.608.842	287.190.300	279.753 395	229 047.454	3.072.434.827		841.709 647,00
7	AIR TANAH	4.904.172.459,00	273.310,00	36.230.132.907,00	3.859.251.400,00	2.181.316.923,00	2.917.630.973,80	2.875.457,678	2.368 517.703	3.845.217.908	3.726.512 129	3.067.307.563	3.113.490.283	2.283.357.820,00	3.085.941.700	3.302 660.620	36.175.731.531		5.028.847 575,00
8	PBJ	13.612,00		78.101.349.203,00	6.709.341.919,00	6.661.046.061,00	5.982 918.960,00	5.398.059,478	6.047.196.097	6.231.823.009	6.721.141 311	4.353.422.024	6.903.617.802	6.795 338.160	7.036.433.900	7.161 351.072	78.101.349.208		13 612,00
JUMLAH		17.351.178.574,65	3.480.720,00	246.567.855.964	25.013.971.625	23.413.536.631	18.929.529.099	14.009.482.531	20.931.945.207	19.663.040.232	21.970.814.305	20.544.942.860	20.404.190.004	20.008.809.332	19.369.400.043	22.349.328.327	243.727.788.525	-	50.824.263.057,68

LAMPIRAN C.LK 4

REKONSTRUKSI PIUTANG PAJAK BRUTO DAN SANGGAHAN

PER TAHUN PAJAK

PER 31 DESEMBER TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	TAHUN PAJAK	PIUTANG PER 31 DESEMBER N-1/N	DKPP 2025		KETETAPAN BARU SELAMA 2025 TERKAIT TAHUN N	KOREKSI PENCATATAN SALDO AWAL		REALISASI		PENGHAPUSAN KETETAPAN DAN KOMPENSASI	KOREKSI PENCATATAN ATAS BUKU PENGAWASAN	PENGHAPUSAN PIUTANG	PEMBATALAN	KEBIJAKAN PEMBAYARAN PIUTANG	PENGURANGAN PIUTANG 100%	SISA NILAI PIUTANG PER 31 DESEMBER 2025	VERIFIKASI DAN VALIDASI			SISA NILAI PIUTANG PER 31 DESEMBER PLS SETELAH VERVAL	LAMPIRAN PER WP PER WP
			BERKAS DIGITAL V	OBJEK PAJAK KHUSUS		OBJEK PAJAK	BUKU I SD V	REALISASI DARI PIUTANG	REALISASI DARI TAHUN BERJALAN									PIUTANG DARI WP VERVAL YANG TELAH RECLASS	PIUTANG DARI WP VERVAL YANG BELUM RECLASS			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				19	20
1	1994	13.395			-			-		-	-		-	-	-	13.395	-	-	-		13.395	Terlampir
2	1995	777.925.544			-			19.326.452		-	-		493.271	-	89.783.881	638.218.940	138.903.832	1.418.928	137.897.373		638.218.940	Terlampir
3	1996	986.307.511			-			14.498.207		-	36.220		462.791	-	134.416.816	849.893.508	137.861.533	9.326.868	193.527.347		665.040.161	Terlampir
4	1997	2.966.181.771			-			32.077.320		-	14.228		190.905	58.265	192.831.305	1.840.234.153	484.678.351	8.173.771	450.244.580		1.341.309.580	Terlampir
5	1998	3.452.386.871			-			41.481.250		-	197.346		514.825	-	555.986.653	2.197.800.597	456.934.478	3.416.875	486.611.784		1.701.036.935	Terlampir
6	1999	3.752.998.282			4.859.963			52.781.472		-	178.446		645.431	-	390.931.056	3.313.899.999	783.618.686	13.178.796	580.649.306		2.719.072.907	Terlampir
7	2000	4.365.848.227			5.863.001			74.793.758		-	1.046.218		1.630.584	-	515.598.085	3.772.789.343	934.112.634	1.618.245	532.497.454		3.241.113.209	Terlampir
8	2001	4.814.917.272			9.821.778			98.537.478		-	871.231		1.497.433	9.714	643.237.441	4.060.237.817	1.248.813.874	28.540.719	1.184.272.155		4.005.420.819	Terlampir
9	2002	5.051.891.653			15.166.381			89.454.458		-	15.236		1.376.857	-	550.991.739	5.412.333.681	1.449.510.586	29.540.442	1.420.344.102		4.962.448.479	Terlampir
10	2003	4.715.011.095			15.764.700			142.339.460		-	2.301.270		2.230.564	-	648.229.213	5.043.436.761	1.459.629.545	49.516.879	1.463.112.666		4.580.324.786	Terlampir
11	2004	5.391.134.395			19.653.730			169.080.165		-	1.268.451		2.173.586	-	693.999.416	6.307.863.008	1.667.473.819	38.985.654	1.628.777.350		4.640.831.588	Terlampir
12	2005	4.767.490.202			20.889.039		21	86.452.964		-	131.431		1.189.481	-	606.366.145	6.068.993.833	1.558.945.165	39.775.616	1.527.879.296		4.440.881.756	Terlampir
13	2006	4.754.956.477			24.333.365			104.717.139		-	183.237		1.325.336	-	563.216.954	6.149.947.423	1.768.267.279	29.081.288	1.739.186.091		4.410.829.249	Terlampir
14	2007	5.121.428.921			25.263.345			107.110.158		-	261.132		2.581.393	-	602.585.078	7.429.393.766	2.173.683.947	31.388.444	2.142.295.498		5.287.098.270	Terlampir
15	2008	10.474.284.439			36.928.816			141.940.982		-	457.520		2.841.431	-	845.151.398	9.868.598.918	2.798.838.193	34.986.905	2.763.851.288		8.744.339.749	Terlampir
16	2009	11.867.044.616			40.824.866			130.563.341		-	654.478		3.379.665	-	832.631.579	10.880.400.865	3.131.998.296	36.089.218	3.095.908.348		8.993.993.139	Terlampir
17	2010	12.365.207.473			50.183.994			161.230.439		-	826.204		3.413.645	-	999.798.773	11.893.978.307	3.693.565.157	41.689.016	3.651.876.141		8.200.833.234	Terlampir
18	2011	14.794.986.658			57.189.909			188.049.488		-	1.072.203		4.421.800	-	1.164.779.818	13.806.670.408	4.251.943.944	46.850.992	4.205.091.962		9.554.670.448	Terlampir
19	2012	15.405.394.956			61.896.695			187.449.752	6.109.540	50.920			4.441.904		1.169.335.456	14.109.087.677	4.899.851.092	50.785.586	4.789.065.507		9.319.043.940	Terlampir
20	2013	14.795.139.734			71.237.849			195.068.209		-			4.907.053		1.175.090.467	13.489.139.854	4.932.196.393	57.201.151	4.875.055.982		8.556.883.901	Terlampir
21	2014	14.004.839.954			76.302.125			211.913.238		10.269			5.318.208		1.268.889.725	14.879.439.881	5.243.816.322	57.222.947	5.186.593.375		9.692.846.506	Terlampir
22	2015	13.115.368.927			106.476.123			291.336.429		13.202			7.418.999		1.796.179.317	20.178.347.197	6.720.477.411	73.816.640	6.646.660.772		13.529.686.564	Terlampir
23	2016	13.127.808.442			104.454.365			364.995.179		13.202	396.524		5.140.160	5.273	1.937.414.539	21.963.040.306	8.775.704.468	74.204.693	8.701.499.774		14.188.109.415	Terlampir
24	2017	25.894.221.853			137.490.408			366.107.778		276.696	996.854		5.529.395	6.273	2.077.630.335	23.963.040.306	7.198.961.208	77.204.693	7.121.756.515		16.687.854.054	Terlampir
25	2018	24.7[illegible] 9.885.358			142.965.189			366.092.981		276.696			6.119.351	-	2.179.986.961	24.918.956.966	8.015.426.675	74.796.193	7.940.630.482		16.978.330.484	Terlampir
26	2019	27.562.150.036			304.428.365			396.505.479		302.771	-		6.991.916	-	2.479.589.648	31.814.328.783	8.775.077.618	84.456.635	8.690.620.983		23.139.250.800	Terlampir
27	2020	27.374.710.358			304.731.530			981.726.289		87.530	-		4.163.894	24.967	4.043.201.953	31.640.309.892	8.397.479.958	82.705.316	8.314.774.642		23.242.829.950	Terlampir
28	2021	21.368.011.513			646.661.750			1.370.957.216		179.530	-		17.713.985	48.605	8.132.375.952	30.681.796.089	5.600.207.533	95.796.396	5.504.469.137		25.177.326.693	Terlampir
29	2022	27.646.562.513			691.039.055			1.458.967.782		1.438.330	-		20.998.766	9.132.201	9.161.986.530	34.793.360.095	5.896.336.372	86.736.698	2.867.497.716		25.839.007.208	Terlampir
30	2023	41.666.368.256			872.242.451			2.155.932.479		435.934	-		49.966.195	108.188	9.887.724.438	54.436.797.435	82.405.295	92.405.295	-		54.266.787.045	Terlampir
31	2024	36.605.187.653			1.870.366.413			5.733.520.26[illegible]		1.692.893	-		89.484.959	-	8.970.945.449	38.978.917.781	106.134.969	106.736.305	-		38.978.917.781	Terlampir
32	2025		173.419.503.206	19.290.350.874	2.261.600.405					-	-	136.147.863				45.944.604.555	105.172.430	101.775.450	-		45.839.604.555	Terlampir
	JUMLAH	488.073.764.043,0	167.419.503.330,00	19.290.350.874,00	8.871.887.704,00	-	26,00	16.097.299.805,00	113.493.231.201,00	(13.766.824,00)	9.137,50	(6.9[illegible]3.43,00)	297.306.230,00	7.994.359,00	50.979.864.932,00	470.347.999.535,00	89.803.707.093,00	1.814.493.931,00	87.548.305.793,00		380.579.694.571,30	-

RINCIAN MUTASI PIUTANG PAJAK DAERAH LAINNYA (Non-BPHTB dan PBB P2)

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 1994 S.D 2010			TAHUN 2012			TAHUN 2013							
		PIUTANG	REALISASI 2022	SISA	PIUTANG	REALISASI 2022	SISA	PIUTANG	REALISASI 2025	SISA					PIUTANG
1	HOTEL			-	-		-			-					
2	RESTORAN			-			-			-					
3	HIBURAN			-			-			-					
4	PARKIR			-			-			-					
5	REKLAME			-			-			-					
6	MINERAL BUKAN LOGAM			-			-			-					
7	AIR TANAH			-			-			-					
8	PPJ			-			-			-					
	JUMLAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-					-

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2016				TAHUN 2017				TAHUN 2018					
		PIUTANG	MUTASI TAMBAH KETETAPAN	REALISASI 2025	SISA	PIUTANG	SK PEMBATALAN	REALISASI 2025	SISA	PIUTANG	SK PEMBATALAN	REALISASI 2025	SISA	PIUTANG	MUTASI TAMBAH
1	HOTEL	235.054.398,00			235.054.398,00	432.741.550,00			432.741.550,00	442.198.102,00			442.198.102,00	363.811.362,00	
2	RESTORAN	218.488.921,00			218.488.921,00	166.996.986,00			166.996.986,00	116.723.368,35			116.723.368,35	262.092.307,50	
3	HIBURAN	199.076.225,00			199.076.225,00	46.309.550,00			46.309.550,00	-		-	-	59.450,00	
4	PARKIR	12.496.500,00			12.496.500,00	8.518.200,00			8.518.200,00	8.605.770,00			8.605.770,00	5.947.236,00	
5	REKLAME	11.361.500,00			11.361.500,00	12.881.250,00			12.881.250,00	21.096.826,00		Rp 1.440.624,00	19.656.202,00	12.073.325,00	
6	MINERAL BUKAN LOGAM	68.700.435,00			68.700.435,00	32.345.110,00			32.345.110,00	26.908.200,00			26.908.200,00	11,00	
7	AIR TANAH	507.779.604,00			507.779.604,00	86.077.126,00			86.077.126,00	96.509.500,00			96.509.500,00	184.032.399,00	
8	PPJ	-			-	-			-	-		-	-	(1,29)	
	JUMLAH	1.252.957.583,00	-	-	1.252.957.583,00	783.949.772,00	-	-	783.949.772,00	712.041.766,35	-	1.440.624,00	718.601.142,35	850.917.477,21	-

NO	JENIS PAJAK	TAHUN 2024					TAHUN 2025					TAHUN 2026			
		PIUTANG	REALISASI 2025	SK PEMBATALAN	KOREKSI PENCATATAN SALDO AWAL	SISA	PIUTANG	MUTASI TAMBAH	REALISASI 2025	PEMBATALAN	SISA	PIUTANG	REALISASI 2025	PEMBATALAN	SISA
1	HOTEL	37.162.460,00	43.980.676,00			(146.143.136,00)	115.123.354,00		868.912,00		114.238.442,00	374.821.421,00	71.055.161,00		303.766.260,00
2	RESTORAN	247.245.541,00	28.578.900,00	-		218.666.641,00	2.761.843.165,00	397.466,00	18.621.713,00		2.743.618.892,00	305.832.247,57	43.160.471,00		262.676.776,57
3	HIBURAN	10.973.453,00	6.441.527,00			4.531.926,00	42.430.557,00		14.308.852,00		28.071.705,00	162.102.396,00	12.839.614,00		149.262.682,00
4	PARKIR	36.635.502,00				36.635.502,00	104.605.197,00		12.162.764,00		92.442.433,00	46.904.137,00	8.595.402,00		38.308.735,00
5	REKLAME	20.358.478,00				20.358.478,00	22.547.812,00				22.547.812,00	82.124.793,00	31.678.500,00		50.446.293,00
6	MINERAL BUKAN LOGAM	12.155.000,00				12.155.000,00	1.152.480,00				1.152.480,00	8.333.480,00			8.333.480,00
7	AIR TANAH	35.631.343,00	87.450.669,00			48.180.674,00	249.057.807,00		5.976.088,00		243.081.519,00	92.124.211,00	41.235.573,00		50.788.638,00
8	PPJ	12.083,00				12.083,00	-				-	-			-
	JUMLAH	360.848.860,00	166.651.772,00	-	-	194.197.168,00	3.296.280.892,00	397.466,00	51.944.349,00	-	3.245.653.283,00	1.072.147.505,57	208.564.721,00	-	863.582.784,57

LAMPIRAN CaLK 5

(dalam rupiah)

TAHUN 2014			TAHUN 2015					JUMLAH < 2015		
	REALISASI 2022	SISA	PIUTANG	MUTASI TAMBAH KETETAPAN 2023	REALISASI 2025	SISA		PIUTANG	REALISASI 2025	SISA
			173.409.375,23			173.409.375,23		173.409.375,23		173.409.375,23
		-	103.897.797,00			103.897.797,00		103.897.797,00		103.897.797,00
		-	45.175.000,00			45.175.000,00		45.175.000,00	-	45.175.000,00
		-	-			-		-	-	-
		-	Rp 14.379.439,00			14.379.439,00		14.379.439,00	-	14.379.439,00
		-	544.442.518,00			544.442.518,00		544.442.518,00	-	544.442.518,00
		-	653.918.111,00			653.918.111,00		653.918.111,00	-	653.918.111,00
		-	-			-		-	-	-
	-	-	1.535.222.250,23	-	-	1.535.222.250,23		1.535.222.250,23	-	1.535.222.250,23

TAHUN 2019			TAHUN 2020		
KOREKSI PENCATATAN SALDO AWAL	REALISASI 2025	SISA	PIUTANG	REALISASI 2025	SISA
		363.811.062,00	116.066.988,00	2.895.100,00	113.171.880,00
		264.093.007,50	508.007.601,00	12.310.266,00	585.697.333,00
		50.850,00	27.520.531,00	17.767.785,00	9.752.746,00
		5.947.236,00	1.983.264,00	828.288,00	1.154.976,00
		12.073.325,00	15.940.337,00		15.940.337,00
		(1,00)	10.301.000,00		10.301.000,00
	273.360,00	183.759.639,00	1.921.098.577,00	55.020.536,00	1.866.038.041,00
	-	(1,29)	1.538,00		1.538,00
-	273.360,00	850.644.117,21	2.690.879.820,00	88.821.977,00	2.602.057.851,00

KOREKSI SALDO AWAL PIUTANG PBDL 2023	TAHUN 2024					PEMBULATAN SISTEM TAHUN 2019	KOREKSI SALDO AWAL	SISA SALDO PIUTANG TAHUN 2024	TAHUN 2025					SISA SALDO PIUTANG TAHUN 2025
	PIUTANG	MUTASI TAMBAH	REALISASI 2025	PEMBATALAN	SISA				REALISASI PIUTANG > sd 2025	SISA	KETETAPAN	REALISASI	SISA	
241.663,00	1.069.665.187,00		389.466.864,00		738.199.103,00			3.228.970.635,23	457.781.933,00	2.763.188.703,23	33.786.646.526,00	31.951.217.809,00	1.833.428.717,00	4.596.617.420,23
6.360.180,00	1.785.925.234,00		1.445.853.554,00		340.071.680,00		5.307.460,00	6.596.828.023,42	1.548.724.906,00	5.053.410.562,42	68.834.543.251,00	66.930.510.827,00	1.863.032.406,00	8.917.442.986,42
10.853.600,00	382.444.626,00		117.787.116,00		264.657.510,00			927.065.083,00	169.234.894,00	757.830.194,00	19.926.983.937,00	18.682.243.824,00	1.244.740.313,00	2.002.570.507,00
-	22.785.607,00		4.491.250,00		18.294.357,00			248.481.413,00	26.077.324,00	222.403.089,00	1.317.152.361,00	1.282.762.871,00	34.389.490,00	257.293.179,00
-	275.349.258,00		117.328.639,00		158.020.619,00			488.113.045,00	150.447.763,00	337.665.285,00	5.212.715.647,00	5.058.703.601,00	154.011.846,00	491.677.131,00
50.568.000,00	130.636.219,00		104.397.465,00		26.238.754,00	1,00		885.534.392,00	104.397.465,00	781.136.817,00	3.029.690.272,00	2.969.837.472,00	60.652.800,00	841.789.617,00
65.055.376,00	1.015.028.005,00		328.362.736,00		686.665.269,00		273.360,00	4.904.172.459,00	518.318.962,00	4.466.126.857,00	36.220.112.987,00	35.657.592.269,00	562.720.718,00	5.028.847.575,00
	1,00				1,00	1,29		13.622,00	-	13.622,00	78.161.340.203,00	78.161.340.203,00	-	13.622,00
113.579.223,00	4.681.834.137,00		2.457.686.814,00	-	2.224.147.293,00	2,29	5.580.828,00	17.351.176.575,65	2.974.983.647,00	14.381.775.749,65	246.507.193.964,00	240.752.717.676,00	5.754.476.288,00	20.136.252.037,65

Piutang BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	PIUTANG										
		KLAIM BPJS RAWAT INAP	KLAIM MASKIN	KLAIM RJTP	KLAIM RITP	KLAIM PROLANIS	BPJS FARMASI	KLAIM KEG. KELOMPOK	PROFIT PARKIR	KERJA SAMA PROGRAM PENDIDIKAN	KLAIM KLB	JUMLAH
1	RSUD CILILIN				10.093.145.505,00		672.976.440,00		4.830.000,00	83.202.900,00		10.854.154.845,00
2	RSUD LEMBANG				3.152.082.000,00	19.000.000,00	3.332.500,00			2.400.000,00		3.176.814.500,00
3	RSUD CIKALONGWETAN											-
4	BLUD PKM RAJAMANDALA			10.360.000,00	88.000.000,00	1.818.000,00						100.178.000,00
5	BLUD PKM JAYAGIRI			14.385.000,00	27.000.000,00	6.444.000,00						47.829.000,00
6	BLUD PKM GUNUNGHALU											-
7	BLUD PKM CILILIN					4.380.000,00						4.380.000,00
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN											-
9	BLUD PKM SAGULING					1.480.000,00						1.480.000,00
10	BLUD PKM PARONGPONG			2.625.000,00		2.266.000,00						4.891.000,00
11	BLUD PKM CIWARUGA			1.525.000,00		5.011.000,00						6.536.000,00
12	BLUDPKM CIHAMPELAS											-
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG			7.600.000,00		2.346.000,00						9.946.000,00
14	BLUD PKM SINDANGKERTA											-
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG			5.205.000,00	10.400.000,00	4.360.000,00						19.965.000,00
16	BLUD PKM CIPATAT			10.895.000,00		3.354.000,00						14.249.000,00
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG			2.195.000,00								2.195.000,00
18	BLUD PKM RONGGA											-
19	BLUD PKM JAYAMEKAR					1.415.000,00						1.415.000,00
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY											-
21	BLUD PKM CITALUM			7.980.000,00				4.094.000,00				12.074.000,00
22	BLUD PKM CIPONGKOR			600.000,00	8.800.000,00			4.282.000,00			71.356.150,00	85.038.150,00
23	BLUD PKM CIMARIME			4.595.000,00		6.227.000,00						10.822.000,00
24	BLUD PKM NGAMPRAH			9.185.000,00	13.600.000,00							22.785.000,00
25	BLUD PKM BATUJAJAR					2.925.000,00						2.925.000,00
26	BLUD PKM CIBODAS											-
27	BLUD PKM CIKOLE											-
28	BLUD PKM LEMBANG			6.870.000,00								6.870.000,00
29	BLUD PKM PASIRLANGU					2.005.000,00						2.005.000,00
30	BLUD PKM RENDE					3.231.000,00						3.231.000,00
31	BLUD PKM CIRATA											-
32	BLUD PKM CISARUA			3.555.000,00		5.848.000,00						9.403.000,00
33	BLUD PKM TAGOG APU			2.677.100,00								2.677.100,00
34	BLUD PKM PADALARANG			5.260.000,00								5.260.000,00
35	BLUD PKM PATARUMAN											-
36	LABKESDA					197.400.000,00						197.400.000,00
JUMLAH		-	-	95.512.100,00	13.393.027.505,00	269.518.000,00	676.308.940,00	8.376.000,00	4.830.000,00	85.602.900,00	71.356.150,00	14.684.523.595,00

LAMPIRAN CaLK 6a

REKAP PIUTANG IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN TAHUN 2025

(dalam rupiah)

NO	Piutang IMB							Total Piutang	Pembayaran	Saldo Piutang
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021		Piutang IMB 2021	IMB 2021
1	1.472.000,00	3.132.000,00	36.744.000,00	6.380.500,00	8.331.000,00	4.482.000,00	11.234.500,00	71.776.000,00	-	71.776.000,00
2		2.542.500,00	2.731.000,00	710.500,00	3.836.500,00	2.725.000,00	1.603.000,00	14.148.500,00	-	14.148.500,00
3		3.078.500,00				22.307.000,00		25.385.500,00	-	25.385.500,00
4		2.977.500,00				3.309.000,00		6.286.500,00	-	6.286.500,00
5						3.306.500,00		3.306.500,00	-	3.306.500,00
6						2.036.500,00		2.036.500,00	-	2.036.500,00
7						6.924.000,00		6.924.000,00	-	6.924.000,00
8						1.567.000,00		1.567.000,00	1.567.000,00	-
9						1.386.500,00		1.386.500,00	1.386.500,00	-
10						40.400.000,00		40.400.000,00	40.400.000,00	-
11						1.495.500,00		1.495.500,00	1.495.500,00	-
12						18.775.500,00		18.775.500,00	18.775.500,00	-
13						741.500,00		741.500,00	741.500,00	-
14						6.044.500,00		6.044.500,00	6.044.500,00	-
15						2.819.500,00		2.819.500,00	2.819.500,00	-
Jml	**1.472.000,00**	**11.730.500,00**	**39.475.000,00**	**7.091.000,00**	**12.167.500,00**	**118.320.000,00**	**12.837.500,00**	**203.093.500,00**	**73.230.000,00**	**129.863.500,00**

LAMPIRAN CaLK 7

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PBG TAHUN 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penggung Anggaran : Drs. TONY PRIHANTORO,MT
Bendahara : IJUS NURJAYATI, SE

(dalam rupiah)

No. Urut	Tanggal SKRD	No. SKRD	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Alamat Pemilik Bangunan	Alamat Lokasi Bangunan	Jumlah Retribusi (Rp)	Masa Berlaku SKRD	Denda PBG	Pembayaran Piutang 2024			Pembebahan Piutang			Sisa Piutang 2025		Keterangan
										Tanggal	Pokok	Denda	Masa Berlaku	Pokok	Denda	Pokok	Denda	
1	12/26/2023	F3.2/014/059.B/PBG/2023	LF-321707-26122023-(	Mitsuh Chunc q q PT. CHUNUR BUANA INDAH	JL. Raya Cikamber No. 299 RT 001 Rw 006, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi Jawa Barat	Kp. Cibeurial RT 004 RW 020, Desa Rajamandala Kulon Kec. Cipatat, Kab. Bandung Barat	5.220.897,00	1/26/2025	1.323.831,00	5/14/2025	7.220.897,00	2.045.921,00	5/26/2025		722.090,00	-	-	Dibayar 14 Mei 2025
2	12/20/2023	F3.6/183/554/PBG/2023	PBG-321707-24082023-01	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK95+520, Desa Sumurbandung Kec. Cipatat Kab. Bandung Barat	-	12/20/2024	75.573,00	18/06/2025		66.292,00	12/20/2025		10.023,36	-	19.304,36	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
3	12/21/2023	F3.6/016/589/PBG/2023	PBG-321709-24082023-07	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK96+700, Desa Mandalasari Kec.Cikalong Wetan Kab. Bandung Barat	-	12/20/2024	724.731,00	18/06/2025		635.729,00	12/20/2025		96.122,22	-	185.124,22	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
4	12/21/2023	F3.6/019/599/PBG/2023	BG-321709-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK 105+370, DesaTagogapu Kec.Padalarang Kab. Bandung Barat	-	12/20/2024	225.082,00	18/06/2025		197.440,00	12/20/2025		29.852,98	-	57.494,58	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
5	12/21/2023	F3.2/189/581/PBG/2023	PBG-321711-02102023-01	Sharia Novelia Turya	Kp. Sar Ocanpong RT. 004 RW. 008 . Kec. CililinKAB. BANDUNG BARAT, Jawa Barat	JL Sar Kanagunjung, Desa Karangunjung, Kec. Cililin, Kab. Kabupaten Bandung Barat	25.273.000,00	12/20/2024	5.960.068,00		-	-	1/20/2026		6.570.980,00	25.273.000,00	12.331.040,10	Belum Bayar
6	12/21/2023	K1.2/012/594/PBG/2023	BG-321706-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK113+180, Desa Gadobangkong, Kec. Ngamprah, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	482.711,00	18/06/2025		423.431,00	12/20/2025		64.022,73	-	123.302,73	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
7	12/21/2023	K1.2/011/593/PBG/2023	BG-321708-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK105+370, Desa Tagogapu, Kec. Padalarang, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	482.711,00	18/06/2025		423.431,00	12/20/2025		64.022,73	-	123.302,73	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
8	12/21/2023	K1.2/010/592/PBG/2023	BG-321707-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK101+900, Desa Nyalindung, Kec. Cipatat, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	482.711,00	18/06/2025		423.431,00	12/20/2025		64.022,73	-	123.302,73	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
9	12/21/2023	K1.2/009/589/PBG/2023	BG-321704-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK96+700, Desa Mandalasari, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	482.711,00	18/06/2025		423.431,00	12/20/2025		64.022,73	-	123.302,73	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
10	12/21/2023	F3.6/018/591/PBG/2023	BG-321707-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK104+000, Desa Nyalindung, Kec. Cipatat, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	75.573,00	18/06/2025		66.292,00	12/20/2025		10.023,36	-	19.304,36	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
11	12/21/2023	F3.6/017/590/PBG/2023	BG-321704-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK97+480, Desa Mandalasari, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	73.573,00	18/06/2025		66.292,00	12/20/2025		10.023,36	-	19.304,36	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
12	12/20/2023	F3.6/015/587/PBG/2023	BG-321704-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK96+120, Desa Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	73.573,00	18/06/2025		66.292,00	12/20/2025		10.023,36	-	19.304,36	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
13	12/21/2023	F3.6/014/586/PBG/2023	BG-321704-24082023-(	Dwiyana Sumet Riyadi an. PT. Kereta Cepat Indonesia China	Jalan Tol Jakarta- Cikampek KM0+800, Kec. Makasar Kota ADM Jakarta Timur DKI Jakarta	DK97+900, Desa Cikalong, Kec. Cikalong Wetan, Kab. Kabupaten Bandung Barat	-	12/20/2024	75.573,00	18/06/2025		66.292,00	12/20/2025		10.023,36	-	19.304,36	Kurang Bayar Denda, Dibayar Pokoknya saja
14	12/29/2023	F1.1/292/483.B/PBG/2023	PBG-321710-20032023-01	Muhammad Dolpan	Kp. Jaya Mekar, Kec. Cihampelas KAB. BANDUNG BARAT, Jawa Barat	Jalan Raya Cipatik-Saranag RT. 005 RW. 002, Desa Cipatik, Kec. Cihampelas, Kab. Kabupaten Bandung Barat	3.403.745,80	1/28/2025	953.049,00				1/29/2026		816.899,00	3.403.745,00	1.769.948,10	Belum Bayar
15	12/29/2023	F3.2/163/496.B/PBG/2023	SLF-321714-15102022-01	DINI SEPTIANI a.n CV. ADITYASTA PERKASA	Kp. Bojong Asih RT. 007 RW. 001 , Kec. SindangkertaKAB. BANDUNG BARAT, Jawa Barat	Kp. Bojong Asih RT. 007 RW. 001, Desa Wangunsari, Kec. Sindangkerta, Kab. Kabupaten Bandung Barat.	4.322.623,00	1/28/2025	914.401,00				1/28/2026		1.153.703,00	4.322.623,00	2.078.184,30	Belum Bayar
16	12/3/2024	F4.3/001.B/107/PBG/2024	BG-321701-28112023-(	Dandi Ali Akbar	Kampung Sukasari, CIKOLE, LEMBANG	Kampung Sukasari, CIKOLE, LEMBANG	5.995.805,00	1/2/2025	-	4/21/2025	5.995.805,00	310.127,00	4/30/2025		310.127,00	-	-	Dibayar 21 April 2025
17	12/13/2024	F1.2/007/014/PBG/2022	BG-321701-22032022-(	JEPRY	KP. CISINTOK NO. 8, CIHANJUANG, PARONGPONG	KP. CISINTOK NO. 8, CIHANJUANG, PARONGPONG	645.540,00	1/13/2025	-	5/7/2025	645.540,00	32.277,00	5/13/2025		32.277,00	-	-	Dibayar 07 Mei 2025
18	12/30/2024	F1.1/165/397.B/PBG/2024	BG-321702-15122023-(	Kelly Dendrawijs	JL. Sariwangi Asri XII, SARIWANGI, PARONGPONG	JL. Sariwangi Asri XII, SARIWANGI, PARONGPONG	998.193,00	1/29/2025	-	3/19/2025	998.193,00	20.576,00	3/30/2025		18.427,00	-	2.149,00	Dibayar 19 Maret 2025 & Lebih bayar

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PIUTANG RETRIBUSI PBG TAHUN 2025

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Penggunaan Anggaran : Drs. TONY PRIHANTORO,MT
Pendahara : LILIS MURHAYATI, SE

(dalam rupiah)

No. Urut	Tanggal SKRD	No. SKRD	No. Pendaftaran	Nama Pemohon	Alamat Pemilik Bangunan	Alamat Lokasi Bangunan	Jumlah Retribusi (Rp)	Masa Berlaku SKRD	Denda PBG	Pembayaran Piutang 2024			Pengurangan Piutang			Sisa Piutang 2025		Keterangan
										Tanggal	Pokok	Denda	Masa Berlaku	Pokok	Denda	Pokok	Denda	
19	12/30/2024	P3.1/161/395.A/PBG/2024	BG-321702-15122023-4	Kelly Darshandja	Jl. Sariwangi Asri XII, SARIWANGI, PARONGPONG	Jl. Sariwangi Asri XII, SARIWANGI, PARONGPONG	932.212,00	1/29/2025	-	3/19/2025	932.212,00	36.557,00	3/30/2025		36.557,00	-	-	Dibayar 19 Maret 2025
20	2/20/2025	P3.1/011/013.j/PBG/2025	BG-321716-01072024-4	FANI ASTRIANI	PARAHYANGAN TATAR SEMANDANA JL. SEMALITA NO. 12	JL. TARUMADYA NO. 19 - KOTA BARU PARAHYANGAN							1/19/2026	1.000.250,00	200.050,00	1.000.250,00	200.050,00	Belum Bayar
21	2/20/2025	P3.1/017/020.j/PBG/2025	BG-321716-10102024-4	EPY YUUNINGSIH HASTUTI	Jg. Polisi No. 43/3A RT. 008 RW. 0	JL. TARUPADMA NO. 1							1/19/2026	830.875,00	166.175,00	830.875,00	166.175,00	Belum Bayar
22	10/8/2025	P3.2/163/570.b/PBG/2025	321712-22052025-003	Ajat Sudrajat a.n. BUM Desa BANGKU	Kampeng Pasir Pecis	Cipongkor, Cirakan, Varia Hill							1/7/2026	68.574.560,00	2.742.982,00	68.574.560,00	2.742.982,00	Belum Bayar
23	10-12-2025	K3.2/024/684/PBG/2025	321703-25112025-002	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT.27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52, ,	Jl. Kolonel Masturi RT. 003 RW. 004, JAMBUDIPA, CISARUA							1/10/2026	9.300.000,00		9.300.000,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
24	10-12-2025	K1.2/023/683/PBG/2025	321709-25112025-001	PT. DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI	GEDUNG TELKOM LANDMARK TOWER (TOWER 2) LT.27, JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV. 52, ,	Jalan Batujajar RT. 003 RW. 009, CIRIASIH, BATUJAJAR							1/10/2026	11.150.000,00		11.150.000,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
25	29-12-2025	P1.1/454/399.b/PBG/2025	321707-14072025-002	MUDJARI HADIPRASETYO	Kp. Pabuaran RT. 001 RW. 015	Jl. Rajamandala Kaum, MANDALAWANGI, CIPATAT							1/29/2026	7.518.177,00	300.727,00	7.518.177,00	300.727,00	Belum Bayar
26	30-12-2025	P1.1/507/723/PBG/2025	321703-29112025-004	Neneng	Kp. Cipeusing RT. 001 RW. 005	Jl. Cipeusing Blok Bunaki No. 10 RT. 002 RW. 005, KERTAWANGI, CISARUA							1/30/2026	681.768,00		681.768,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
27	30-12-2025	P1.1/508/724/PBG/2025	321703-29112025-005	Angga Rama Nur Ariyanto	Perumn Cangkong Permata C7/14 RT. 003 RW. 006	Jl. Cipeusing Blok Bunaki No. 11 RT. 002 RW. 005, KERTAWANGI, CISARUA							1/30/2026	710.468,00		710.468,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
28	30-12-2025	P1.1/506/722/PBG/2025	321703-29112025-003	Taufik Nurdiana Ramadhan	Kp. Pangalaran RT. 002 RW. 014	Jl. Cipeusing Blok Bunaki No. 12 RT. 002 RW. 005, KERTAWANGI, CISARUA							1/30/2026	710.468,00		710.468,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
29	30-12-2025	P1.1/505/721/PBG/2025	321703-29112025-002	Zurisini, S.ST.	Jl. Sahara Raya Komp. Alamanda Indah Blok C-29	Jl. Cipeusing Blok Bunaki No. 9 RT. 002 RW. 005, JAMBUDIPA, CISARUA							1/30/2026	710.468,00		710.468,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
30	30-12-2025	P1.1/504/720/PBG/2025	321703-29112025-001	Nurhayati	Kp. Cibedak RT. 002 RW. 002	Jl. Cipeusing Blok Bunaki No 8 RT. 002 RW. 005, KERTAWANGI, CISARUA							1/30/2026	710.468,00		710.468,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
31	31-12-2025	P3.2/219/726/PBG/2025	321714-08122025-002	Fety Fatimah a.n CV. Cicangkang Girang	Jalan Raya Cicangkang Girang	Jalan Raya Cicangkang Girang RT. 002 RW. 001, CICANGKANG GIRANG, SINDANGKERTA							1/31/2026	3.673.740,00		3.673.740,00	-	Dibayar 05 Januari 2026
TOTAL							48.752.915,00		12.049.863,00		15.752.647,00	5.209.813,00		105.571.242,00	13.513.256,92	138.570.610,00	26.219.308,92	

PIUTANG KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor MOU	Tgl Ketetapan	Tahun ke	Besar Kontribusi	Penambahan Kontribusi	Realisasi	Piutang
1	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KBB dengan PT. Bangunbina Persada ttg Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Banjaran	507/MoU/05-Dagprindagkop&UMKM/2013 Nomor : 031/BBP/IV/2013	11/4/2013	2013	70.098.000,00		70.098.000,00	-
				2014	335.688.800,00		335.688.800,00	-
				2015	365.459.100,00		365.459.100,00	-
				2016	448.416.000,00		448.416.000,00	-
				2017	459.363.200,00		459.363.200,00	-
				2018	474.310.400,00		474.310.400,00	-
				2019	489.257.600,00		489.257.600,00	-
				2020	504.204.800,00		504.204.800,00	-
				2021	519.152.000,00		519.152.000,00	-
				2022	534.099.200,00		534.099.200,00	-
				2023	549.046.400,00		549.046.400,00	-
				2024	559.993.600,00		559.993.600,00	-
				2025	578.940.800,00		578.940.800,00	-
				2026	593.888.000,00			593.888.000,00
				2027	608.835.200,00			608.835.200,00
				2028	623.760.000,00			623.760.000,00
				2029	624.782.400,00			624.782.400,00
				2030	626.710.500,00			626.710.500,00
				2031	629.729.600,00			629.729.600,00
				2032	631.642.400,00			631.642.400,00
					10.227.378.000,00		**5.888.029.900,00**	**4.339.348.100,00**
2	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KBB dengan PT. Bangunbina Persada ttg Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Panorama Lembang	Nomor : 3 Tanggal 15 Juli 2016	7/15/2016	2016	296.460.000,00		296.460.000,00	-
				2017	711.504.000,00		711.504.000,00	-
				2018	1.036.407.600,00		1.036.407.600,00	-
				2019	1.080.131.760,00		1.080.131.760,00	-
				2020	1.143.162.000,00		1.143.162.000,00	-
				2021	1.196.539.200,00		1.196.539.200,00	-
				2022	1.249.916.400,00		1.249.916.400,00	-
				2023	1.303.293.600,00		1.303.293.600,00	-
				2024	1.356.670.800,00		1.356.670.800,00	-
				2025	1.361.782.800,00		1.361.782.800,00	-
				2026	1.366.894.800,00			1.366.894.800,00
				2027	1.398.757.680,00			1.398.757.680,00
				2028	1.424.447.280,00			1.424.447.280,00
				2029	1.429.585.200,00			1.429.585.200,00
				2030	1.433.695.536,00			1.433.695.536,00
				2031	839.319.516,00			839.319.516,00
					18.628.568.172,00		**10.735.868.160,00**	**7.892.700.012,00**
3	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KBB dengan PT. Akurasi Kualnega Indonesia ttg Pembangunan dan Pengelolaan Obyek dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Maribaya	050.12/MoU/36-Dishubpar/2012 Nomor : 501/2 KIV/2012	5/4/2012	2013	189.870.488,00		189.870.488,00	-

LAMPIRAN CaLK 8

PIUTANG KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor MOU	Tgl. Ketetapan	Tahun ke	Besar Kontribusi	Penambahan Kontribusi	Realisasi	Piutang
				2014	189.870.488,00		189.870.488,00	-
				2015	201.262.717,00		201.262.717,00	-
				2016	213.338.480,00		213.338.480,00	-
				2017	226.138.789,00		226.138.789,00	-
				2018	239.707.116,00		239.707.116,00	-
				2019	254.089.543,00		254.089.543,00	-
				2020	269.334.916,00		269.334.916,00	-
				2021	285.495.011,00		285.495.011,00	-
				2022	302.624.712,00		302.624.712,00	-
				2023	320.782.194,00		320.782.194,00	-
				2024	340.029.126,00		340.029.126,00	-
				2025	360.430.874,00		360.430.874,00	-
				2026	382.056.726,00			382.056.726,00
				2027	404.980.130,00			404.980.130,00
				2028	433.328.739,00			433.328.739,00
				2029	463.661.750,00			463.661.750,00
				2030	496.118.073,00			496.118.073,00
				2031	530.846.338,00			530.846.338,00
				2032	568.005.582,00			568.005.582,00
				2033	607.765.972,00			607.765.972,00
				2034	650.309.590,00			650.309.590,00
				2035	695.831.262,00			695.831.262,00
				2036	744.539.450,00			744.539.450,00
				2037	796.657.212,00			796.657.212,00
				2038	852.423.216,00			852.423.216,00
				2039	912.092.842,00			912.092.842,00
				2040	975.939.341,00			975.939.341,00
				2041	1.044.255.094,00			1.044.255.094,00
				2042	1.117.352.951,00			1.117.352.951,00
					15.869.138.722,00		3.392.974.454,00	11.676.164.268,00
4	Kesepakatan Bersama antara Pemerintah KBB dengan PT. Bangunbina Pertiwi tg Pembangunan dan Pengelolaan Pasar Tagog Padalarang	032.12/P.BG5.04-Disperindag/2020 Nomor : 012/BP.Pst/Per.TGG/PKS/V/2020	5/19/2020	2020	350.000.000,00		350.000.000,00	-
				2021	450.000.000,00		450.000.000,00	-
				2022	753.221.000,00		753.221.000,00	-
				2023	765.980.000,00		765.980.000,00	-
				2024	785.261.000,00	134.642.800,00	785.251.000,00	-
				2025	801.821.000,00	134.642.800,00	936.463.800,00	-
				2026	827.086.000,00	134.642.800,00		961.728.800,00
				2027	839.844.000,00	134.642.800,00		974.486.800,00
				2028	846.080.000,00	134.642.800,00		980.722.800,00
				2029	852.315.000,00	134.642.800,00		986.957.800,00
				2030	871.308.000,00	148.928.500,00		1.020.236.500,00

LAMPIRAN CaLK 8

PIUTANG KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Nomor MOU	Tgl. Ketetapan	Tahun ke	Besar Kontribusi	Penambahan Kontribusi	Realisasi	Piutang
				2031	877.544.000,00	15~.242.800,00		1.031.786.800,00
				2032	890.014.000,00	159.642.800,00		1.049.656.800,00
				2033	902.484.000,00	16~.642.800,00		1.067.126.800,00
				2034	918.216.000,00	169.642.500,00		1.087.858.500,00
				2035	468.826.000,00	141.198.800,00		610.024.800,00
					12.209.000.000,00	1.746.155.400,00	4.040.925.800,00	9.770.566.400,01
JUMLAH								33.679.758.780,01

Lampiran CaLK 9a

REKAP PIUTANG DENDA PAJAK 2025

(dalam rupiah)

JENIS PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2024	KETETAPAN SANKSI DENDA 2025				STPD		SANKSI (SKPD)		SKPDKB	Lebih Setor	JUMLAH REALISASI DENDA 2025	SISA PIUTANG 2025	MUTASI KURANG	SALDO PIUTANG DENDA s.D 2025	SALDO AKHIR PIUTANG DENDA PER 31 DESEMBER 2025
		STPD	SKPD	SKPDKB	JUMLAH KETETAPAN 2025	2025 s.d 2024	2025	2025 s.d 2024	2025	2025						
PBJT PERHOTELAN	2.143.628.792,00	59.072.108,00	310.480.322,00	31.193.370,00	400.745.800,00	730.235,00	10.109.603,00	2.513.040,00	9.841.218,00	-	-	19.950.821,00	380.794.979,00		2.139.383.537,00	2.520.178.516,00
PBJT MAKANAN MINUMAN	3.363.696.500,00	266.227.791,00	260.500.870,00	71.333.666,00	598.068.645,00	6.316.567,00	44.007.699,00	3.463.2..9,00	49.123.233,00	20.894.333,00	-	22.391.013,00	491.354.161,00		490.008.119,00	1.116.292.627,00
PBJT KESENIAN DAN HIBUR/	498.508.953,00	79.061.868,00	378.633.681,00	-	456.575.521,00	6.774,00	5.692.464,00	494.140,00	36.598.227,00	-	-	2.892.229,00	16.375.360,00		125.096.278,00	141.471.639,00
PBJT PARKIR	123.094.367,00	6.078.858,00	12.897.339,00	-	19.067.589,00	60,00	1.892.562,00	-	1.399.717,00	-	-	2.827.664,00	11.017.483,00		220.482.934,04	231.500.419,00
PAJAK MINERAL	220.771.934,00	10.329.670,00	4.313.479,00	-	14.845.149,00	50.000,00	3.827.664,00	-	-	-	-	6.131.223,00	17.872.691,00		43.359.731,04	61.232.202,00
PAJAK REKLAME	43.359.731,00	26.003.696,00	-	-	26.003.696,00	-	6.131.223,00	-	-	-	-	13.007.959,00	96.798.915,00		1.328.272.635,04	1.425.071.552,00
PAJAK AIR TANAH	1.346.514.684,00	109.856.905,00	-	-	109.856.905,00	18.342.649,00	12.067.900,00	-	-	-	-	-	-		209.821,04	209.821,00
PBJT TENAGA LISTRIK	209.821,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		7.701.869.770,04	8.344.357.651,00
	7.932.407.363,00	555.881.976,00	1.166.933.899,00	102.427.036,00	1.825.164.105,00	25.345.675,00	84.619.177,00	6.492.319,00	97.362.714,00	20.894.333,00	-	182.476.224,00	1.642.607.881,00	-		

Piutang Pendapatan Denda Retribusi Izin Mendirikan Bangunan 2025

(dalam rupiah)

NO	SERD			NAMA & ALAMAT	PERUNTUKAN	2021		TAHUN 2022			
						RETRIBUSI (Rp)	PIUTANG DENDA (Rp)	RETRIBUSI (Rp)	PENAMBAHAN DENDA	PENGURANGAN DENDA	PIUTANG DENDA (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	644/032/296/IMB	Thursday, November 26, 2015	Tuesday, December 31, 2019	Santosa Tie	Bangunan	1.472.000,00	2.149.120,00		353.280,00		2.502.400,00
2	642.2/030/218/IMB	Monday, September 19, 2016	Tuesday, December 31, 2019	Deni Kusnadi	Bangunan	3.132.000,00	3.946.320,00		751.680,00		4.698.000,00
3	648.12/104/263/IMB	Thursday, October 13, 2016	Tuesday, December 31, 2019	Joko Setiono	Bangunan	2.542.500,00	3.203.550,00		610.200,00		3.813.750,00
4	648.12/121/290/IMB	Thursday, November 10, 2016	Tuesday, December 31, 2019	Ringgayani Teguh Santosa	Bangunan	3.078.500,00	3.817.340,00		738.840,00		4.556.180,00
5	648.12/149/358/IMB	Thursday, December 22, 2016	Tuesday, December 31, 2019	Aris Indra Laksana	Bangunan	2.977.500,00	3.573.000,00		714.600,00		4.287.600,00
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2016						**13.202.500,00**	**16.689.330,00**	-	**3.168.600,00**		**19.857.930,00**
1	644/004/057/IMB	6-Aug-17	Tuesday, December 31, 2019	Ahmad Sholeh	Bangunan	36.744.000,00	41.888.160,00		8.818.560,00		50.706.720,00
2	644.2/070/316/IMB	28-Dec-17	Tuesday, December 31, 2019	Ade Wowon	Bangunan	2.731.000,00	2.621.760,00		655.440,00		3.277.200,00
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2017						**39.475.000,00**	**44.509.920,00**	-	**9.474.000,00**		**53.983.920,00**
1	644.2/017/070/IMB	12-Mar-18	Tuesday, December 31, 2019	H. Ahmad Daudi	Bangunan	6.350.500,00	5.870.060,00		1.531.320,00		7.401.380,00
2	648.12/040/100/IMB	10-Apr-18	Tuesday, December 31, 2019	Neng Siska Kartika	Bangunan	710.500,00	639.450,00		170.520,00		809.970,00
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2018						**7.061.000,00**	**6.509.510,00**	-	**1.701.840,00**		**8.211.350,00**
1	644.2/074/248/IMB	23-Oct-19	Tuesday, December 31, 2019	Didin/Sulyana	Rumah Tinggal	3.331.000,00	4.332.120,00		1.999.440,00		6.331.560,00
				Perumahan Cileme Indah Blok B Rt.007/Rw 020	Rumah Tinggal	3.836.500,00	1.994.980,00		920.760,00		2.915.740,00
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2019						**12.167.500,00**	**6.327.100,00**	-	**2.920.200,00**		**9.247.300,00**
1	644.2/017/048/IMB	5-Feb-20	Thursday, December 31, 2020	Beni Kustiwa	Rumah Tinggal/Kantor	4.482.000,00	2.061.720,00		1.075.680,00		3.137.400,00
2	644.2/030/079/IMB	30-Mar-20	Thursday, December 31, 2020	Setyo Budi. Cv Budikarya	Bangunan Kantor	2.725.000,00	1.144.500,00		654.000,00		1.798.500,00
3	644.2/031/081/IMB	14-Apr-20	Thursday, December 31, 2020	Hendrik Budianto	Bangunan Gudang Makanan	22.307.000,00	9.368.940,00		5.353.680,00		14.722.620,00
4	644.2/034/098/IMB	14-Apr-20	Thursday, December 31, 2020	Asep Vizay	Bangunan Kantor	3.309.000,00	1.389.780,00		794.160,00		2.183.940,00
5	644.2/035/099/IMB	14-Apr-20	Thursday, December 31, 2020	Asep Vizay	Bangunan Kantor	3.306.500,00	1.388.730,00		793.560,00		2.182.290,00
6	644.2/060/149/IMB	14-Apr-20	Thursday, December 31, 2020	Asep Supciadi Cv. Ameeta Mega	Bangunan Kantor	2.036.500,00	855.330,00		488.760,00		1.344.090,00
7	644.2/081/221/IMB	7-Oct-20	Thursday, December 31, 2020	Irwan Sihar Marpaung	Rumah Dan Toko	6.924.000,00	2.077.200,00		1.661.760,00		3.738.960,00
8	644.12/081/221/IMB	Sunday, November 22, 2020	Thursday, December 31, 2020	Agus Setiawan	Rumah Tinggal Bertingkat		-	-		-	-
9	648.12/093/285/IMB	Tuesday, December 22, 2020	Thursday, December 31, 2020	Soetarmin Ichsan	Rumah Tinggal Bertingkat			-			
10	644.2/099/292/IMB	Wednesday, December 30, 2020	Thursday, December 31, 2020	I Made Dharma Wijaya	Gudang Kantor			-			
11	644.2/098/290/IMB	Wednesday, December 30, 2020	Thursday, December 31, 2020	Lukarlim	Klinik			-			
12	648.11/039/291/IMB	Wednesday, December 30, 2020	Thursday, December 31, 2020	Supriyanto	Rumah Tinggal Perumahan			-			
13	648.12/093/279/IMB	Friday, December 18, 2020	Thursday, December 31, 2020	Ryan Chandra	Rumah Tinggal Bertingkat			-			
14	642.2/001/293/IMB	Wednesday, December 30, 2020	Thursday, December 31, 2020	Rendra Purwanto	Sekolah Smp Islam			-			
15	648.12/099/294/IMB	Wednesday, December 30, 2020	Thursday, December 31, 2020	Surjanto	Rumah Tinggal			-			
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2020						**45.090.000,00**	**18.286.208,00**	-	**10.921.680,00**	-	**29.107.800,00**
1	644.2/067/164/IMB	28-May-21	Jumat 31 Desember 2021	Tuti Turicnayanti	Rukan	11.234.500,00			2.696.280,00		2.696.280,00
2	644.2/085/1259/IMB	13-Sep-21	Jumat 31 Desember 2021	Rizki Akbar,S.Ked.Dr	Rukan	1.603.000,00			384.720,00		384.720,00
JUMLAH PIUTANG TAHUN 2021						**12.837.500,00**	-	-	**3.081.000,00**	-	**3.081.000,00**
JUMLAH PIUTANG SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021						**129.863.500,00**	**92.322.068,00**	-	**31.167.240,00**	-	**123.489.308,00**

LAMPIRAN CaLK 9c

PIUTANG TASPEN TA. 2025

(dalam rupiah)

Tanggal	Uraian	Debet	Kredit	Saldo
1/1/2025	**Saldo Awal**	**23.000.000,00**		**23.000.000,00**
07/01/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	22.600.000,00
06/02/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	22.200.000,00
3/6/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	21.800.000,00
4/9/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	21.400.000,00
5/9/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	21.000.000,00
6/10/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	20.600.000,00
7/10/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	20.200.000,00
8/1/8205	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	19.800.000,00
9/8/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	19.400.000,00
10/7/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspeu)		400.000,00	19.000.000,00
11/6/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	18.600.000,00
12/9/2025	Potongan Kasda Dapem Induk (Taspen)		400.000,00	18.200.000,00
JUMLAH		**23.000.000,00**	**4.800.000,00**	**18.200.000,00**

LAMPIRAN CaLK 9d

REKONSILIASI RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL LEBIH SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	BATUJAJAR TIMUR-BATUJAJAR	2.285.200,00	Lebih Salur
2	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS-CIHAMPELAS	194.500,00	Lebih Salur
3	CIHAMPELAS	PATARUMAN	PATARUMAN-CIHAMPELAS	1.893.000,00	Lebih Salur
4	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	TANJUNGWANGI-CIHAMPELAS	4.406.600,00	Lebih Salur
5	CIKALONG WETAN	MANDALASARI	MANDALASARI-CIKALONG WETAN	608.300,00	Lebih Salur
6	CIKALONG WETAN	MEKARJAYA	MEKARJAYA-CIKALONG WETAN	7.255.500,00	Lebih Salur
7	CIKALONG WETAN	PUTERAN	PUTERAN-CIKALONG WETAN	421.700,00	Lebih Salur
8	CIKALONG WETAN	RENDE	RENDE-CIKALONG WETAN	2.614.300,00	Lebih Salur
9	CIKALONG WETAN	WANGUNJAYA	WANGUNJAYA-CIKALONG WETAN	61.100,00	Lebih Salur
10	CILILIN	BUDIHARJA	BUDIHARJA-CILILIN	542.000,00	Lebih Salur
11	CILILIN	CILILIN	CILILIN-CILILIN	1.309.800,00	Lebih Salur
12	CILILIN	KARANGTANJUNG	KARANGTANJUNG-CILILIN	1.013.700,00	Lebih Salur
13	CILILIN	MUKAPAYUNG	MUKAPAYUNG-CILILIN	540.000,00	Lebih Salur
14	CIPATAT	MANDALASARI	MANDALASARI-CIPATAT	246.600,00	Lebih Salur
15	CIPATAT	MANDALAWANGI	MANDALAWANGI-CIPATAT	87.900,00	Lebih Salur
16	CIPATAT	NYALINDUNG	NYALINDUNG-CIPATAT	255.500,00	Lebih Salur
17	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	CIHARASHAS-CIPEUNDEUY	1.105.500,00	Lebih Salur
18	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	JATIMEKAR-CIPEUNDEUY	616.300,00	Lebih Salur
19	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	MARGALAKSANA-CIPEUNDEUY	2.657.500,00	Lebih Salur
20	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	MARGALUYU-CIPEUNDEUY	28.800,00	Lebih Salur
21	CIPEUNDEUY	NYENANG	NYENANG-CIPEUNDEUY	1.183.900,00	Lebih Salur
22	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	SIRNARAJA-CIPEUNDEUY	290.200,00	Lebih Salur

LAMPIRAN CaLK 9d

REKONSILIASI RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL LEBIH SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
23	CIPONGKOR	CICANGKANG HILIR	CICANGKANG HILIR-CIPONGKOR	84.400,00	Lebih Salur
24	CIPONGKOR	CINTAASIH	CINTAASIH-CIPONGKOR	570.400,00	Lebih Salur
25	CIPONGKOR	MEKARSARI	MEKARSARI-CIPONGKOR	97.600,00	Lebih Salur
26	CIPONGKOR	NEGLASARI	NEGLASARI-CIPONGKOR	242.600,00	Lebih Salur
27	CIPONGKOR	SARINAGEN	SARINAGEN-CIPONGKOR	284.900,00	Lebih Salur
28	CISARUA	KERTAWANGI	KERTAWANGI-CISARUA	52.823.700,00	Lebih Salur
29	CISARUA	PASIRHALANG	PASIRHALANG-CISARUA	2.186.300,00	Lebih Salur
30	GUNUNGHALU	CILANGARI	CILANGARI-GUNUNGHALU	231.700,00	Lebih Salur
31	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	SINDANGJAYA-GUNUNGHALU	226.300,00	Lebih Salur
32	GUNUNGHALU	SUKASARI	SUKASARI-GUNUNGHALU	912.300,00	Lebih Salur
33	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	TAMANJAYA-GUNUNGHALU	248.000,00	Lebih Salur
34	LEMBANG	CIBODAS	CIBODAS-LEMBANG	3.718.700,00	Lebih Salur
35	LEMBANG	CIBOGO	CIBOGO-LEMBANG	456.900,00	Lebih Salur
36	LEMBANG	CIKIDANG	CIKIDANG-LEMBANG	664.200,00	Lebih Salur
37	LEMBANG	KAYUAMBON	KAYUAMBON-LEMBANG	845.900,00	Lebih Salur
38	LEMBANG	SUNTENJAYA	SUNTENJAYA-LEMBANG	1.040.600,00	Lebih Salur
39	LEMBANG	WANGUNHARJA	WANGUNHARJA-LEMBANG	1.011.900,00	Lebih Salur
40	NGAMPRAH	MEKARSARI	MEKARSARI-NGAMPRAH	2.180.100,00	Lebih Salur
41	NGAMPRAH	PAKUHAJI	PAKUHAJI-NGAMPRAH	297.600,00	Lebih Salur
42	NGAMPRAH	SUKATANI	SUKATANI-NGAMPRAH	74.800,00	Lebih Salur
43	PADALARANG	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY-PADALARANG	74.687.200,00	Lebih Salur
44	PADALARANG	KERTAJAYA	KERTAJAYA-PADALARANG	119.670.700,00	Lebih Salur
45	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	CIGUGURGIRANG-PARONGPONG	2.273.578,00	Lebih Salur
46	PARONGPONG	CIHANJUANG RAHAYU	CIHANJUANG RAHAYU-PARONGPONG	93.000,00	Lebih Salur

LAMPIRAN CaLK 9d

REKONSILIASI RINCIAN BAGI HASIL PAJAK DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL LEBIH SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
47	PARONGPONG	SARIWANGI	SARIWANGI-PARONGPONG	170.800,30	Lebih Salur
48	RONGGA	BOJONG	BOJONG-RONGGA	97.300,00	Lebih Salur
49	RONGGA	BOJONG SALAM	BOJONG SALAM-RONGGA	892.300,00	Lebih Salur
50	RONGGA	CIBITUNG	CIBITUNG-RONGGA	3.000,00	Lebih Salur
51	RONGGA	CICADAS	CICADAS-RONGGA	289.300,00	Lebih Salur
52	SAGULING	JATI	JATI-SAGULING	38.700,00	Lebih Salur
53	SINDANGKERTA	CIKADU	CIKADU-SINDANGKERTA	397.041,00	Lebih Salur
54	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	WENINGGALIH-SINDANGKERTA	24.249,00	Lebih Salur
Total				**296.453.968,30**	

LAMPIRAN CaLK 9e

REKONSILIASI RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL LEBIH SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
1	BATUJAJAR	GALANGGANG	GALANGGANG-BATUJAJAR	18.100,00	Lebih Salur
2	BATUJAJAR	PANGAUBAN	PANGAUBAN-BATUJAJAR	51.200,00	Lebih Salur
3	CIHAMPELAS	CIPATIK	CIPATIK-CIHAMPELAS	606.100,00	Lebih Salur
4	CIHAMPELAS	PATARUMAN	PATARUMAN-CIHAMPELAS	1.024.800,00	Lebih Salur
5	CIHAMPELAS	SITUWANGI	SITUWANGI-CIHAMPELAS	600,00	Lebih Salur
6	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	CIPTAGUMATI-CIKALONGWETAN	129.300,00	Lebih Salur
7	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	MANDALASARI-CIKALONGWETAN	75.200,00	Lebih Salur
8	CILILIN	CILILIN	CILILIN-CILILIN	673.400,00	Lebih Salur
9	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	GUNUNGMASIGIT-CIPATAT	13.700,00	Lebih Salur
10	CIPATAT	NYALINDUNG	NYALINDUNG-CIPATAT	432.500,00	Lebih Salur
11	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY-CIPEUNDEUY	48.600,00	Lebih Salur
12	CIPEUNDEUY	CIROYOM	CIROYOM-CIPEUNDEUY	150.300,00	Lebih Salur
13	CISARUA	KERTAWANGI	KERTAWANGI-CISARUA	11.200,00	Lebih Salur
14	CISARUA	PASIRHALANG	PASIRHALANG-CISARUA	1.187.200,00	Lebih Salur
15	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	SINDANGJAYA-GUNUNGHALU	100,00	Lebih Salur
16	LEMBANG	JAYAGIRI	JAYAGIRI-LEMBANG	164.400,00	Lebih Salur
17	LEMBANG	KAYUAMBON	KAYUAMBON-LEMBANG	156.200,00	Lebih Salur
18	LEMBANG	LEMBANG	LEMBANG-LEMBANG	5.698.538,00	Lebih Salur
19	LEMBANG	SUKAJAYA	SUKAJAYA-LEMBANG	290.500,00	Lebih Salur
20	NGAMPRAH	MARGAJAYA	MARGAJAYA-NGAMPRAH	114.200,00	Lebih Salur
21	NGAMPRAH	NGAMPRAH	NGAMPRAH-NGAMPRAH	264.300,00	Lebih Salur
22	NGAMPRAH	SUKATANI	SUKATANI-NGAMPRAH	116.000,00	Lebih Salur
23	NGAMPRAH	TANIMULYA	TANIMULYA-NGAMPRAH	921.800,00	Lebih Salur
24	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	CIGUGURGIRANG-PARONGPONG	107.000,00	Lebih Salur

LAMPIRAN CaLK 9e

REKONSILIASI RINCIAN BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH SETIAP DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL LEBIH SALUR	KET
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
25	PARONGPONG	CIHANJUANG	CIHANJUANG-PARONGPONG	1.120.200,00	Lebih Salur
26	PARONGPONG	CIHIDEUNG	CIHIDEUNG-PARONGPONG	908.300,00	Lebih Salur
27	PARONGPONG	KARYAWANGI	KARYAWANGI-PARONGPONG	296.300,00	Lebih Salur
28	PARONGPONG	SARIWANGI	SARIWANGI-PARONGPONG	501.600,00	Lebih Salur
29	RONGGA	CICADAS	CICADAS-RONGGA	381.200,00	Lebih Salur
30	SAGULING	BOJONGHALEUANG	BOJONGHALEUANG-SAGULING	12.961.281,00	Lebih Salur
31	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	CINTAKARYA-SINDANGKERTA	18.500,00	Lebih Salur
32	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	WANGUNSARI-SINDANGKERTA	5.500,70	Lebih Salur
33	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	WENINGGALIH-SINDANGKERTA	4.657,00	Lebih Salur
Total				**28.452.776,70**	

LAMPIRAN CaLK 9f

REKAP PIUTANG ATAS CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

TANGGAL	KETERANGAN	JUMLAH		
		Debet	Kredit	Saldo
01/01/2025	**Saldo Awal**	**83.855.333,67**		83.855.333,67
04/02/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	83.355.333,67
27/02/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	82.855.333,67
27/03/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	82.355.333,67
30/04/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	81.855.333,67
28/05/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	81.355.333,67
26/06/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	80.855.333,67
01/08/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	80.355.333,67
03/09/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	79.855.333,67
03/10/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	79.355.333,67
30/10/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	78.855.333,67
25/11/2025	CICILAN DENDA KONTRIBUSI MARIBAYA TAHUN KE-10, DISPARBUD		500.000,00	78.355.333,67
TOTAL		**83.855.333,67**	**5.500.000,00**	**78.355.333,67**

LAMPIRAN CaLK 10

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

Perhitungan Piutang Kompensasi Dampak Negatif Persampahan TPA Sarimukti

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

Nomor	Uraian Rincian Piutang Kabupaten/Kota	Tahun Anggaran	Kewajiban (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa Piutang (Rp)
I	Kota Cimahi	2015	33.124.840,00	33.124.840,00	-
	Kota Bandung		408.998.895,00	396.547.065,00	12.451.830,00
	Jumlah		**442.123.735,00**	**429.671.905,00**	**12.451.830,00**
II	Kota Cimahi	2025	469.110.525,00	430.317.795,00	38.792.730,00
	Kota Bandung		3.400.994.446,00	3.133.619.236,00	267.375.210,00
	Kab. Bandung		1.017.048.705,00	845.430.075,00	171.618.630,00
	Jumlah		**4.887.153.676,00**	**4.409.367.106,00**	**477.786.570,00**
I + II	Kota Cimahi	2015 & 2025	502.235.365,00	463.442.635,00	38.792.730,00
	Kota Bandung		3.809.993.341,00	3.530.166.301,00	279.827.040,00
	Kab. Bandung		1.017.048.705,00	845.430.075,00	171.618.630,00
Jumlah			**5.329.277.411,00**	**4.839.039.011,00**	**490.238.400,00**

LAMPIRAN CATATAN 14

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
REKAPITULASI DATA PENYIDIKAN PIUTANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
PER 31 DESEMBER 2020

NO	URAIAN	TAHUN 1994 s.d 2012		TAHUN 2013		TAHUN 2014		TAHUN 2015		TAHUN 2016		TAHUN 2017		TAHUN 2018		TAHUN 2019	
		PIUTANG	Penyelesaian Piutang Murni (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Murni (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)	PIUTANG	Penyelesaian Piutang Diragukan (100%)
1	HOTEL	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	RESTORAN	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
3	HIBURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
4	PARKIR	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
5	REKLAME	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
6	MINERAL BUKAN LOGAM	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-
7	AIR TANAH	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PBB	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
10	DENDA HOTEL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
11	DENDA RESTORAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
12	DENDA HIBURAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
13	DENDA PARKIR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
14	DENDA REKLAME	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
15	DENDA MINERAL BUKAN LOGAM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
16	DENDA AIR TANAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
17	DENDA PPJ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	DENDA PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	KANTOR WAJIB SAMSAT PROVINSI	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-
20	BADAN USAHA MILIK NEGARA	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	PERSEDIAAN (BARANG/JASA/DEPOSITO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	UNGRADED (BARANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
23	BARANG QUASI SEKURITAS (DEPOSITO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PIUTANG KEPADA PEGAWAI (DEPOSITO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	TAGIHAN	18.208.000,00	18.208.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	BANTUAN KEUANGAN DIPEMBAGI HASIL PAJAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	BANTUAN KEUANGAN UMUM BAGI HASIL PAJAK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	DANA PENGAMPATAN UMUM YANG DIPERUNTUKAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	DENDA KEDALUWARSA PIUTANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	DENDA PBB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	JUMLAH	37.033.908.794,00	37.033.908.794,00	4.897.053.017,00	4.897.053.017,00	5.197.908.165,00	5.197.908.165,00	6.640.609.263,00	6.640.609.263,00	6.698.421.436,00	6.698.421.436,00	5.722.116.346,00	5.722.116.346,00	4.840.658.457,00	4.840.658.457,00	6.470.632.991,00	6.470.632.991,00
32	PENERIMAAN PELAYANAN RSUD/RSUD PENGELOLA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN PADA RSUD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PENERIMAAN PELAYANAN KESEHATAN DI TEMPAT PRAKTEK KESEHATAN LAINNYA YANG DIMILIKI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	DENDA KETERLAMBATAN	-	-	-	-	-	-	-	-	19.857.920,00	19.857.920,00	53.313.720,00	53.313.720,00	8.711.760,00	8.711.760,00	5.747.280,00	5.747.280,00
36	BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	BAGI HASIL PAJAK DARI PROVINSI KEPADA PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	BAGI HASIL PAJAK KEPADA PEMERINTAH DAERAH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH	114.796.799.811,00	114.796.799.811,00	15.698.417.934,00	15.698.417.934,00	14.802.861.271,00	14.802.861.271,00	21.776.254.920,23	21.776.254.920,23	21.019.891.579,00	21.019.891.579,00	24.169.261.687,00	24.169.261.687,00	23.321.467.853,15	23.321.467.853,15	36.356.881.219,84	36.356.881.219,84

LAMPIRAN CARA II

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
REKAPITULASI DATA PENYISIHAN PIUTANG KABUPATEN BANDUNG BARAT
PER 31 DESEMBER 2025

NO	URAIAN	TAHUN 2020		TAHUN 2021		TAHUN 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		JUMLAH 1999 s.d. 2025		NILAI BERSIH PIUTANG
		PIUTANG	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih (100%)	PIUTANG	Penyisihan Piutang Kurang Lancar (50%)	PIUTANG	Penyisihan Piutang Kurang Lancar (50%)	PIUTANG	Penyisihan Piutang Lancar (5%)	PIUTANG	Penyisihan Piutang Lancar (10%)	PIUTANG	Penyisihan Piutang Lancar (5,5%)	PIUTANG WP YB	Penyisihan Piutang 1999 s.d. 2025	
1	HOTEL	189 142 270,00	189 142 270,00	55 561 671,00	27 780 835,50	40 252 750,00	20 126 375,00	581 463 824,00	58 146 382,40	468 208 272,00	46 854 727,00	1 813 426 717,00	99 738 269,44	4 990 887 408,00	4 570 855 909,34	2 837 663 830,00
2	RESTORAN	970 422 719,00	970 422 719,00	366 690 313,00	183 345 156,50	1 533 630 662,00	766 815 331,00	962 676 736,00	96 267 673,60	543 963 000,00	54 396 300,00	1 966 632 466,00	108 164 784,63	6 343 945 966,00	2 969 338 961,03	3 555 606 935,29
3	HIBURAN	9 795 200,00	9 795 200,00	85 000 417,00	27 092 208,50	37 020 000,00	18 510 000,00	156 334 900,00	15 667 490,00	242 703 000,00	24 270 300,00	1 566 299 917,00	8 223 864,53	2 096 545 917,00	924 170 964,03	1 172 374 952,97
4	P WAKIR	1 194 000,00	1 194 000,00	58 729 887,00	29 364 943,50	92 442 000,00	46 221 000,00	38 886 555,00	3 888 655,50	38 790 357,00	3 879 035,70	229 048 799,00	12 597 683,95	560 091 598,00	296 146 322,65	263 945 275,35
5	HIBURAN	13 676 912,00	13 676 912,00	28 354 678,00	10 177 339,00	23 547 432,00	11 773 716,00	58 148 293,00	5 814 829,30	158 020 439,00	15 802 043,90	294 697 488,00	16 208 361,84	576 445 232,00	273 775 042,04	302 670 189,96
6	HIBURAN "BUKAN LOKSAM"	8 734 000,00	8 734 000,00	15 195 000,00	6 597 500,00	1 852 000,00	926 000,00	11 132 000,00	1 069 200,00	10 033 000,00	1 003 300,00	45 763 524,00	2 516 993,82	92 709 524,00	21 252 493,82	71 456 030,18
7	AIR TAWAR	1 005 566 571,00	1 005 566 571,00	422 809 361,00	211 404 680,50	283 001 219,00	141 500 609,50	93 169 879,00	9 316 987,90	466 885 209,00	46 688 520,90	342 730 530,00	18 850 179,15	2 514 102 169,00	1 027 760 977,45	1 486 341 193,55
8	PPJ	244,00	244,00	13 872,00	6 936,00	-	-	-	-	1,00	0,10	-	-	13 872,00	6 936,10	6 935,90
9	PBB	28 378 224 109,00	28 378 224 109,00	25 127 326 660,00	12 563 663 330,00	29 870 007 354,00	14 935 003 677,00	34 666 599 629,00	3 466 659 962,90	38 099 617 711,00	3 809 961 771,10	28 913 986 355,00	1 590 269 249,53	186 779 804 571,00	74 865 496 874,53	111 914 307 696,47
10	PAJAK HOTEL	189 142 270,00	189 142 270,00	401 825 161,00	200 912 580,50	717 528 500,00	358 764 250,00	249 135 272,00	24 944 527,20	147 820 529,00	14 782 052,90	189 794 479,00	10 438 671,85	2 520 178 511,00	1 010 163 050,45	1 510 015 460,55
11	PAJAK RESTORAN	10 918 046,00	10 918 046,00	141 705 349,00	70 852 674,50	1 800 512,00	900 256,00	269 493 606,00	26 949 360,60	367 834 154,00	36 783 415,40	481 854 307,00	26 501 986,89	1 032 606 874,00	1 032 907 135,81	2 633 624 838,19
12	PAJAK HIBURAN	2 945 954,00	2 945 954,00	5 515 229,00	2 757 614,50	26 198 000,00	13 099 000,00	22 873 672,00	2 287 367,20	238 595 350,00	23 859 535,00	628 224 504,00	34 552 347,72	3 141 452,00	1 110 292,42	955 305 606,16
13	PAJAK PARKIR	34 000,00	34 000,00	17 847 268,00	8 923 634,00	45 510 512,00	22 639 456,00	15 899 323,00	1 589 932,30	9 721 297,00	972 129,70	16 375 300,00	900 651,50	141 471 100,00	37 429 809,50	65 041 290,50
14	PAJAK AIR TANAH	82 224,00	82 224,00	4 943 377,00	2 471 688,50	93 387 172,00	2 799 236,00	3 349 617,00	300 265,50	13 011 640,00	1 301 164,00	17 872 247,00	982 973,59	121 217 267,00	47 815 973,36	82 401 317,74
15	PAJAK SARANG BURUNG WALET	89 210 487,00	89 210 487,00	13 289 295,00	6 644 647,00	10 295 815,00	4 147 907,50	23 931 495,00	2 393 149,50	33 468 230,00	3 346 823,00	11 867 435,00	652 708,93	231 560 439,00	119 621 493,93	55 479 932,07
16	PBB-P2	1	1	98 889 398,00	49 444 699,00	158 724 450,00	10 436 225,00	178 851 273,00	17 885 127,30	293 380 847,00	29 338 084,70	96 709 317,00	5 319 012,44	1 629 061 592,00	747 930 762,96	707 122 709,04
17	PAJAK AIR TANAH	107,00	107,00	458,00	229,00	-	-	-	-	-	-	-	-	565	282,50	282,50
18	PAJAK LAIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PAJAK PENERANGAN JALAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	673 196 717,00	37 025 781,94	1 911 258 810,00	1 048 192 281,00	863 066 528,94
20	PAJAK PENGAMBILAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN	47 000 307,00	47 000 307,00	17 817 500,00	8 908 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	179 661 500,00	121 304 750,00	58 356 750,00
21	PENGALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN	-	-	-	-	-	-	33 444 300,00	3 344 430,00	-	-	109 911 747,00	6 045 146,11	143 356 047,00	9 389 576,11	133 966 470,89
22	PENGEMBANGAN JALAN	-	-	-	-	200 863 910,00	100 431 955,00	-	-	-	-	-	-	200 863 910,00	100 431 955,00	100 431 955,00
23	PENGUSAHAAN GAMBAR BERGERAK (FILM)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 076 166 200,00	56 569 021,20	11 076 166 200,00	56 569 021,20	11 019 597 178,80
24	PENGUSAHAAN KARAOKE, BILIK REKAMAN, DAN SEJENISNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 802 858 913,00	1 309 157 390,22	12 063 634 512,00	1 169 833 172,56	11 893 801 339,44
25	PENGUSAHAAN DISKOTIK, KARAOKE, KLUB MALAM, DAN SEJENISNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 700 000,00	14 700 000,00	-
26	PENGUSAHAAN KEBUN BUNGA DAN TAMAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	396 471 900,00	21 805 954,50	396 471 900,00	21 805 954,50	374 665 945,50
27	PENGUSAHAAN PERJUDIAN DAN/ATAU KETANGKASAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 492 376,00	1 567 480,68	28 492 376,00	1 567 480,68	26 924 895,32
28	PENGUSAHAAN PERMAINAN KETANGKASAN DAN PERMAINAN LAINNYA	-	-	78 305 233,00	39 197 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-	78 305 233,00	39 197 664,00	39 107 569,00
29	PENGUSAHAAN PERMAINAN KETANGKASAN	-	-	-	-	-	-	8 766 457,00	876 645,70	-	-	18 913 758,00	1 040 256,69	27 680 215,00	1 916 902,39	25 763 312,61
30	PENGUSAHAAN PIJAT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	JUMLAH	42 201 166 542,00	42 201 166 542,00	27 318 469 627,00	13 617 234 813,00	33 643 811 314,00	15 613 218 457,00	-	-	-	-	-	-	97 163 447 483,00	45 360 344 983,10	51 803 101 558,90
32	PENGUSAHAAN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN (SELAIN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	376 194 500,00	1 488 971,75	776 134 500,00	1 866 971,75	774 267 528,25
33	PENGUSAHAAN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN (SELAIN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 019 999 345,00	50 151 666,73	64 911 969 345,00	70 155 166,73	13 360 214 478,27
34	PENGUSAHAAN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN (SELAIN PERJUDIAN DAN KETANGKASAN YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG) PERUSAHAAN PENYELENGGARA YANG BERUPA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	197 000 000,00	487 000,00	197 000 000,00	487 000,00	196 513 000,00
35	PENGUSAHAAN PIJAT	26 117 000,00	26 117 000,00	3 041 000,00	1 520 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	171 464 000,00	171 464 000,00	1 520 500,00
36	PENGUSAHAAN PIJAT (SELAIN PENGUSAHAAN PIJAT YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	427 543 500,00	4 187 957,95	427 543 500,00	4 187 957,95	423 355 542,05
37	PENGUSAHAAN PIJAT BERUPA PENGUSAHAAN PIJAT YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	279 820 500,00	3 199 101,00	279 820 500,00	3 199 101,00	276 621 399,00
38	PENGUSAHAAN PIJAT (SELAIN PENGUSAHAAN PIJAT YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 914 233,00	14 001,59	2 086 500,00	14 001,59	2 072 498,41
39	PENGUSAHAAN PIJAT (SELAIN PENGUSAHAAN PIJAT YANG DIATUR DENGAN UNDANG-UNDANG)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	584 179 417,00	2 990 779,10	589 179 417,00	2 990 779,10	586 188 637,90
	JUMLAH	35 661 481 369,00	35 661 482 369,00	30 753 796 963,67	14 177 009 881,84	33 836 986 338,83	15 836 218 168,43	36 377 439 681,83	5 353 005 000,66	48 851 852 895,00	4 753 183 702,75	186 063 619 869,33	930 518 399,39	991 307 863 514,66	346 307 454 614,98	309 864 919 001,01

LAMPIRAN Cat.K 12

DAFTAR BEBAN SEWA DIBAYAR DIMUKA TA. 2025

(dalam rupiah)

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS	NOMOR	MITRA	PERIODE SEWA		NILAI KONTRAK	TGL CUT OFF	LAMA SEWA	PERIODE BEBAN	PERIODE BSDM	BEBAN/HARI	BEBAN SEWA	S SEWA D MUKA	KODE REKENING	URAIAN
					MULAI	BERAKHIR										
1	Badan Pendapatan Daerah	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	600.1.3/3960/BAPPENDA	Dra. Sri Sudarmawati, M. Si	12/16/2025	12/16/2026	60.000.000,00	12/31/2025	365,00	15,00	350,00	164.383,56	2.465.753,42	57.534.246,58	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	Dewiki Syarif	4/17/2025	4/17/2026	40.000.000,00	12/31/2025	365,00	258,00	107,00	164.383,56	42.410.958,90	17.589.041,10	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	600.1.3/3959/BAPPENDA	Hj. Ai Hayati	12/31/2025	12/31/2026	60.000.000,00	12/31/2025	365,00	-	365,00	164.383,56	-	60.000.000,00	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
2	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Belanja Sewa Bangunan Gedung	050.1.3/Bapelitbangda 2025	Neng Sumiati	11/1/2025	11/1/2026	30.000.000,00	12/31/2025	365,00	60,00	305,00	82.191,78	4.931.506,85	25.068.493,15	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	H. Apen Supendi	04/12/2025	04/12/2026	35.000.000,00	12/31/2025	365,00	27,00	338,00	95.890,41	2.589.041,10	32.410.958,90	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
		Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	H. Apen Supendi	17/03/2025	3/17/2026	35.000.000,00	12/31/2025	365,00	289,00	76,00	95.890,41	27.712.328,77	7.287.671,23	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	Oka Astuti	03/03/2025	02/03/2026	40.000.000,00	12/31/2025	364,00	303,00	61,00	124.615,38	40.738.461,54	8.211.538,46	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	Dewiki Syarif	01/07/2025	30/06/2026	15.000.000,00	12/31/2025	364,00	185,00	181,00	123.626,37	22.873.626,37	22.376.373,63	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
4	Dinas Sosial	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	Dwi Teti Heryati	30/01/2025	30/01/2026	35.000.000,00	12/31/2025	365,00	345,00	120,00	95.890,41	33.095.150,68	11.506.849,32	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	Ahmad Furqon	18/11/2025	17/11/2026	35.000.000,00	12/31/2025	361,00	43,00	321,00	96.153,85	4.134.615,38	30.865.384,62	5.1.02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
		Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	-	Mile Network	01/01/2026	31/12/2026	23.750.000,00	12/31/2025	364,00	-	365,00	-	-	23.760.000,00	5.1.02.02.01.0003	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan
6	Dinas Tenaga Kerja	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	Drs. H. Maman Abdurrahman	01/12/2025	30/11/2026	90.000.000,00	12/31/2025	364,00	30,00	334,00	247.252,75	7.417.582,42	82.582.417,58	5.1.02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
7	Dinas Perhubungan dan Perdagangan	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	Yeyen Risyani	03/03/2025	28/02/2026	35.000.000,00	12/31/2025	362,00	303,00	59,00	96.685,08	29.295.580,11	5.704.419,89	5.1.02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
		Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	-	Ricky Fiyadi	21/05/2025	21/05/2026	70.000.000,00	12/31/2025	365,00	224,00	141,00	191.780,82	42.958.904,11	27.041.095,89	5. .02.02.05.0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor
8	Dinas Pemuda dan Olahraga	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	Rera Elsa Riviana	18/06/2025	17/06/2026	29.000.000,00	12/31/2025	364,00	96,00	168,00	79.670,33	15.613.384,62	13.384.615,38	5. .02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
9	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	Suhermadi	04/03/2025	04/03/2026	30.000.000,00	12/31/2025	365,00	302,00	63,00	82.191,78	24.821.917,81	5.178.082,19	5. .02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
10	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	Belanja Sewa Bangunan Gedung	-	Sahmah	14/01/2025	14/01/2026	50.000.000,00	12/31/2025	365,00	351,00	14,00	136.986,30	48.082.191,78	1.917.808,22	5. .02.02.05.0002	Belanja Sewa Bangunan Gedung
11	Kecamatan Cipongkor	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	-	Asep Hidayatin	01/03/2025	28/02/2026	50.000.000,00	12/31/2025	364,00	305,00	59,00	137.362,64	41.895.604,40	8.104.395,60	5. .02.02.05.0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya
12	Sekretariat Daerah	Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	-	Cho Chuan Jung	27/12/2025	27/12/2027	400.000.000,00	12/31/2025	730,00	4,00	726,00	547.945,21	2.191.780,82	397.808.219,18	5.1.02.02.05.0038	Sewa Rumah Dinas Bupati
		Belanja Sewa Rumah Negara Golongan II	-	Fem	01/10/2025	30/09/2027	400.000.000,00	12/31/2025	729,00	91,00	638,00	548.696,84	49.931.412,89	350.068.587,11	5. .02.02.05.0039	Sewa Rumah Dinas Setda
		Belanja Sewa Rumah Negara Golongan I	-	Lois Setiawan	09/05/2025	09/05/2027	225.000.000,00	12/31/2025	730,00	236,00	494,00	445.205,48	105.068.493,15	219.931.506,85	5.1.02.02.05.0038	Sewa Rumah Dinas Wakil Bupati
JUMLAH														1.408.331.704,89		

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	BAHAN BANGUNAN DAN KONSTRUKSI	BAHAN KIMIA	BAHAN BAKAR DAN PELUMAS	BAHAN BAKU	BAHAN/BIBIT TANAMAN	ISI TABUNG PEMADAM	ISI TABUNG GAS	BAHAN/BIBIT TERNAK/BIBIT IKAN	BAHAN LAINNYA
1	Dinas Pendidikan	940.100,00	137.000,00		337.500,00			465.000,00		500.600,00
2	Dinas Kesehatan	324.500,00	1.245.274.461,50	259.000,00	392.500,00		3.785.000,00	4.961.756,00		12.980.427.342,31
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang									
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman									
5	Satuan Polisi Pamong Praja									
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah									
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan									
8	Dinas Sosial									228.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja									23.328.200,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		3.829.500,00			125.020.000,00				
12	Dinas Lingkungan Hidup									
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil									
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa									
15	Dinas Perhubungan									
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik									
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah									
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu									
19	Dinas Pemuda dan Olahraga									
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan									
21	Dinas Perikanan dan Peternakan								250.554.500,00	
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan									
24	Sekretariat Daerah									
25	Sekretariat DPRD									
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah									
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah									
28	Badan Pendapatan Daerah									
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia									
30	Inspektorat Daerah									
31	Kecamatan Batujajar									
32	Kecamatan Cipeundeuy									
33	Kecamatan Gununghalu									
34	Kecamatan Padalarang									
35	Kecamatan Lembang									
36	Kecamatan Sindangkerta									
37	Kecamatan Cipatat									
38	Kecamatan Ngamprah									
39	Kecamatan Cikalongwetan									
40	Kecamatan Cipongkor									
41	Kecamatan Saguling									
42	Kecamatan Cikalin									
43	Kecamatan Parongpong									
44	Kecamatan Cipatat									
45	Kecamatan Cihampelas									
46	Kecamatan Rongga									
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik									
JUMLAH		1.264.600,00	1.249.240.961,50	259.000,00	729.500,00	125.020.000,00	3.785.000,00	5.426.756,00	250.554.500,00	12.984.484.142,31

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	SUKU CADANG ALAT ANGKUTAN	SUKU CADANG ALAT KEDOKTERAN	SUKU CADANG ALAT LABORATORIUM	SUKU CADANG ALAT STUDIO DAN KOMUNIKASI	SUKU CADANG LAINNYA	ALAT TULIS KANTOR	KERTAS DAN COVER	BAHAN CETAK	BENDA POS
1	Dinas Pendidikan						69.729.721,50	38.862.245,25	7.620.600,00	2.919.500,00
2	Dinas Kesehatan	3.250.000,00	468.390.243,17	75.036,00	630.000,00		873.416.078,67	86.498.898,00	34.594.561,00	5.088.950,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang						4.424.500,00	860.500,00		
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman						525.000,00			
5	Satuan Polisi Pamong Praja						706.706,80	858.512,51	393.706,56	
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah						354.910,00	840.005,00		
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan						915.800,00	7.277.600,00		
8	Dinas Sosial						2.875.400,00	2.192.600,00		
9	Dinas Tenaga Kerja						14.272.000,00	2.059.300,00		1.200.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak									
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian							262.500,00		
12	Dinas Lingkungan Hidup						366.800,00	5.015.600,00		50.000,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil						761.855.570,00	3.173.500,00	967.602.824,00	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa						823.593,00	3.191.096,00		
15	Dinas Perhubungan						2.085.500,00	2.325.100,00		3.600.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik							466.600,00		
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						169.300,00	117.400,00		
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu							2.904.000,00		
19	Dinas Pemuda dan Olahraga						579.800,00	1.128.600,00		100.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan						2.605.100,00	226.535,00		
21	Dinas Perikanan dan Peternakan							1.275.000,00		
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan									
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan						57.957.600,00	3.662.100,00		
24	Sekretariat Daerah						25.910.800,00			
25	Sekretariat DPRD						150.009.520,70	24.999.240,00		
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah						504.400,00	1.754.400,00		
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah							9.042.450,00		13.174.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah						244.817.983,00	20.301.850,00		
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia						200.918,00	1.018.203,00		
30	Inspektorat Daerah									
31	Kecamatan Batujajar						2.146.800,00	637.100,00	66.900,00	
32	Kecamatan Cipeundeuy						130.700,00			
33	Kecamatan Gununghalu						78.200,00	115.400,00		
34	Kecamatan Padalarang							630.000,00		
35	Kecamatan Lembang									
36	Kecamatan Sindangkerta							760.100,00		
37	Kecamatan Cisarua						356.600,00			
38	Kecamatan Ngamprah									
39	Kecamatan Cikalongwetan						203.100,00	263.600,00		
40	Kecamatan Cipongkor							1.796.700,00		
41	Kecamatan Saguling									
42	Kecamatan Cihampelas						78.200,00			
43	Kecamatan Parongpong						131.300,00	255.400,00		
44	Kecamatan Cipatat						1.844.600,00	733.200,00		120.000,00
45	Kecamatan Cihampelas							210.000,00		
46	Kecamatan Rongga						57.700,00	58.700,00		
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik						15.828.200,00	997.500,00		
	JUMLAH	3.250.000,00	468.390.243,17	75.036,00	630.000,00	0,00	2.236.052.401,67	226.771.534,76	1.010.278.591,56	26.252.450,00

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	BAHAN KOMPUTER	PERABOT KANTOR	ALAT LISTRIK	PERLENGKAPAN DINAS	PERLENGKAPAN PENDUKUNG OLAHRAGA	SUVENIR/CENDERA MATA	ALAT/BAHAN UNTUK KEGIATAN KANTOR LAINNYA	OBAT
1	Dinas Pendidikan	1.665.000,00	20.532.100,00	1.962.200,00	62.600,00	3.570.000,00	7.722.000,00	547.400,30	926.000,00
2	Dinas Kesehatan	96.579.249,72	316.864.312,18	177.253.624,21	77.577.6 0,00	2.563.327,95		35.399.520,32	11.848.643.687,07
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10.660.000,00	10.100,00				9.686.000,00		
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
5	Satuan Polisi Pamong Praja								
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.457.430,00							
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	10.241.400,00							
8	Dinas Sosial								
9	Dinas Tenaga Kerja		6.850.700,00						
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								294.835.775,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	656.500,00							
12	Dinas Lingkungan Hidup	525.200,00							
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.336.551.616,00							
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	725.940,00							
15	Dinas Perhubungan			1.376.746.875,00				5.538.900,30	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik	1.050.400,00							
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		118.400,00						
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
19	Dinas Pemuda dan Olahraga								
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.654.233,00					18.448.200,00		
21	Dinas Perikanan dan Peternakan								
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		754.000,00						
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.227.200,00							
24	Sekretariat Daerah								
25	Sekretariat DPRD	33.557.260,00	252.183.205,51				116.398.485,00	8.244.140,00	
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		394.900,00						
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah								
28	Badan Pendapatan Daerah	149.112.080,00		785.900,00					
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
30	Inspektorat Daerah								
31	Kecamatan Batujajar								
32	Kecamatan Cipeundeuy								
33	Kecamatan Gununghalu								
34	Kecamatan Padalarang								
35	Kecamatan Lembang								
36	Kecamatan Sindangkerta	260.000,00							
37	Kecamatan Cisarua		33.000,00						
38	Kecamatan Ngamprah								
39	Kecamatan Cikalongwetan								
40	Kecamatan Cipongkor								
41	Kecamatan Saguling								
42	Kecamatan Cililin								
43	Kecamatan Parongpong								
44	Kecamatan Cipatat	1.766.000,00							
45	Kecamatan Cihampelas	262.600,00							
46	Kecamatan Rongga								
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.050.400,00							
JUMLAH		4.651.002.478,72	597.740.717,69	1.556.748.599,21	77.940.210,00	6.133.327,95	152.254.685,00	49.729.960,92	12.144.405.462,07

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DAFTAR PERSEDIAAN
TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	SKPD	OBAT-OBATAN LAINNYA	DIJUAL/DISERAHKAN KEPADA	PERSEDIAAN UNTUK DIJUAL/DISERAHKAN LAINNYA	PERSEDIAAN UNTUK TUJUAN STRATEGIS/BERJAGA-JAGA	ALAT KESEHATAN	BAHAN KIMIA LABORATORIUM	NATURA	PAKAN
1	Dinas Pendidikan	252.000,00	105.000,00	1.943.100,30					
2	Dinas Kesehatan	11.806.331.991,52	71.802.195,00	23.243.959,60	7.607.610,00	1.995.065.481,23	257.440.071,48	252.898.740,00	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang								
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman								
5	Satuan Polisi Pamong Praja								
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		25.892.970,00	118.329.885,00					
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan								
8	Dinas Sosial								
9	Dinas Tenaga Kerja				2.345.000,00				
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak								
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian			427.350,00				1.000.000,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup								
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil								
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa								
15	Dinas Perhubungan		76.000,30						
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik								
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu								
19	Dinas Pemuda dan Olahraga								
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan								
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		111.950.000,00	288.300.126,00					36.000.000,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan								
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan								
24	Sekretariat Daerah								
25	Sekretariat DPRD								
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah								
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah								
28	Badan Pendapatan Daerah								
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia								
30	Inspektorat Daerah								
31	Kecamatan Batujajar								
32	Kecamatan Cipeundeuy								
33	Kecamatan Gununghalu								
34	Kecamatan Padalarang								
35	Kecamatan Lembang								
36	Kecamatan Sindangkerta								
37	Kecamatan Cisarua								
38	Kecamatan Ngamprah								
39	Kecamatan Cikalongwetan								
40	Kecamatan Cipongkor								
41	Kecamatan Saguling								
42	Kecamatan Cililin								
43	Kecamatan Parongpong								
44	Kecamatan Cipatat		7.450.000,00						
45	Kecamatan Cihampelas								
46	Kecamatan Rongga								
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik								
	JUMLAH	11.806.583.991,52	217.256.165,00	432.244.420,60	9.952.610,00	1.995.065.481,23	257.440.071,48	253.898.740,00	36.000.000,00

LAMPIRAN CaLK 13

(dalam rupiah)

NO.	SKPD	KOMPONEN RAMBU-RAMBU	JUMLAH
1	Dinas Pendidikan		160.799.666,75
2	Dinas Kesehatan		42.656.939.177,53
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang		25.641.100,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		525.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja		1.958.925,87
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah		146.875.200,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan		18.494.900,00
8	Dinas Sosial		5.068.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja		26.955.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		318.163.975,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian		131.195.850,00
12	Dinas Lingkungan Hidup		5.957.600,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		6.069.183.510,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa		4.740.629,00
15	Dinas Perhubungan	18.062.919,00	1.408.435.294,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik		1.517.000,00
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		405.100,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		2.904.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga		1.808.600,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan		22.934.068,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan		688.059.626,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan		754.030,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan		64.846.920,00
24	Sekretariat Daerah		25.910.800,00
25	Sekretariat DPRD		585.391.851,21
26	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah		2.653.700,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah		22.216.450,00
28	Badan Pendapatan Daerah		415.017.813,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.309.121,00
30	Inspektorat Daerah		0,00
31	Kecamatan Batujajar		2.850.800,00
32	Kecamatan Cipeundeuy		130.700,00
33	Kecamatan Gununghuku		193.600,00
34	Kecamatan Padalarang		630.000,00
35	Kecamatan Lembang		0,00
36	Kecamatan Sindangkerta		1.020.100,00
37	Kecamatan Cisarua		389.600,00
38	Kecamatan Ngamprah		0,00
39	Kecamatan Cikalongwetan		466.700,00
40	Kecamatan Cipongkor		1.796.700,00
41	Kecamatan Saguling		0,00
42	Kecamatan Cililin		78.200,00
43	Kecamatan Parongpong		386.700,00
44	Kecamatan Cipatat		11.913.800,00
45	Kecamatan Cihampelas		472.600,00
46	Kecamatan Rongga		116.400,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		17.876.100,00
JUMLAH		18.062.919,00	52.854.924.557,36

LAMPIRAN CaLK 13a

BARANG PERSEDIAAN KADALUARSA
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No.	Nama Barang	Jumlah	Harga Satuan	Nilai Total	Perangkat Daerah
1	Albendazol 400 mg — Tablet	3.300	457,00	1.508.100,00	PKM Lembang
2	Ferro Sulfat — Tablet	9.600	220,00	2.112.000,00	PKM Lembang
3	TPT 3 HR — Tablet	1.092	847,00	924.924,00	PKM Lembang
4	Primaquin — Tablet	3	360,00	1.080,00	PKM Lembang
5	DHP — Tablet	3	2.851,00	8.553,00	PKM Lembang
6	Cotrimoxazole — Sirup	149	3.078,00	458.622,00	PKM Lembang
7	Virocheck HBsAg — Pcs	300	3.190,28	957.084,00	PKM Lembang
8	Trepocheck syphilis — Pcs	125	4.385,00	548.125,00	PKM Lembang
9	Virocheck HIV 1V2 — Pcs	200	4.500,00	900.000,00	PKM Lembang
10	Virocheck HIV 1V2 — Pcs	100	6.424,56	642.456,00	PKM Lembang
11	Karcis : Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Nominal Rp. 2000	188	7.800,00	1.466.400,00	Disperindag
12	Karcis : Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Nominal Rp. 1000	375	7.800,00	2.925.000,00	Disperindag
13	Karcis : Karcis Retribusi Pelayanan Pasar Nominal Rp. 500	512	7.800,00	3.993.600,00	Disperindag
	Total	15.947	49.712,84	**16.445.944,00**	

LAMPIRAN CaLK 14

NERACA PER 31 JANUARI 2025
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA AKUN	Saldo Per 01 Januari 2025	Realisasi Belanja Modul LRA		Reklasifikasi Jenis Belanja Modul Aset	Hapus Aset	Mutasi Aset	Mutasi dari/(ke) Lain	Penyesuaian Neraca SIPD	Neraca Awal		Neraca Penyesuaian				Total Penyesuaian	Saldo 2025
		Nilai Perolehan	Belanja Modal yang mempengaruhi pembentukan aset 2025	Belanja Modal yang dipotokan ke akun, tetapi tidak memenuhi syarat kapitalisasi aset 2025					Saldo Hasil Penyesuaian	Saldo Hasil Penyesuaian	Saldo Hasil Penyesuaian	Koreksi Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Koreksi Penyusutan		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
A	**Aset Pemerintah**																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Tagihan Jangka Panjang																	
	- Kemitraan Jangka Panjang																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Tetap Lain																	
	- Tagihan Penjualan Angsuran																	
	- Kemitraan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
B	**Aset Pemerintah**																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Tagihan Jangka Panjang																	
	- Kemitraan Jangka Panjang																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Tetap Lain																	
	- Tagihan Penjualan Angsuran																	
	- Kemitraan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	

LAMPIRAN CoLK ...

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA BIDANG	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025															
			Berdasarkan Belanja Modal LRA							Penambahan Berdasarkan Belanja NON	Berdasarkan Aset		Berdasarkan Pembukuan				Total Penambahan	
		Harga Perolehan	Realisasi belanja modal yang merupakan penambahan aset 2025	Realisasi belanja modal yang dikapitalisasi sebagai aset tetap pada Barang Aset 2025	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Hibah Barang	Belanja Pemeliharaan Belanja	Hibah	Mutasi (Mutasi Masuk/Mutasi Keluar)	(Belanja Modal Lainnya Aset)	Hasil Kerja sama Aset	Belanja Aset Tidak Berwujud	Belanja Barang	Koreksi Pembukuan	Kapitalisasi (Penggabungan)	Hasil Hibah	Harga Perolehan	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP			-	-	-				-	-	-	-					
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Gedung Kesenian Bersejarah																	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Barang Kepurbakalaan, Kesenian																	
	- Pemeliharaan																	
	- Perawatan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA			-	-	-				-	-	-	-					
	TOTAL ASET			-	-	-				-	-	-	-					
4	Dinas Pemukiman Perumahan Rakyat																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP			-	-	-				-	-	-	-					
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Gedung Kesenian Bersejarah																	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Barang Kepurbakalaan, Kesenian																	
	- Pemeliharaan																	
	- Perawatan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA			-	-	-				-	-	-	-					
	TOTAL ASET			-	-	-				-	-	-	-					
4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP			-	-	-				-	-	-	-					
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Gedung Kesenian Bersejarah																	
	- Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Barang Kepurbakalaan, Kesenian																	
	- Pemeliharaan																	
	- Perawatan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA			-	-	-				-	-	-	-					
	TOTAL ASET			-	-	-				-	-	-	-					

LAMPIRAN CXXIII

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN GANDING BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Realisasi Belanja Modal LRA		Koreksi/Penyesuaian Neraca				Mutasi Aset (SKPD Lain)	Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025							
			Nilai Belanja Modal yang dicatatkan pada Neraca per 31 Desember 2024	Belanja dari Belanja Modal yang dicatatkan pada Neraca per 31 Desember 2024	Koreksi/Lainnya dari Belanja Barang Aset	Hibah	Dalam Proses Pembangunan	Hibah		Perolehan Aset							
		Harga Perolehan								Nilai Perolehan Per 31 Desember 2025	Mutasi Penambahan	Mutasi Pengurangan	Koreksi Nilai Barang	Koreksi Penilaian	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Total Perolehan Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.1	Dinas Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata																	
	- Tanah	[illegible]																
	- Peralatan dan Mesin	177.641.760.211,97	1.129.923.500,00															
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi		174.648.374,00															
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Akumulasi Penyusutan																	
	JUMLAH ASET TETAP	30.000.000.186,97	1.497.861.800,00	-	343.000.000,00	-	-	-	88.192.724.480,00	-	-	-	22.119.500,00	-	-	-	-	19.900.611.871,00
	- Aset Lainnya																	
	- Bangunan Gedung Tempat Usaha																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	- Aset Tetap Renovasi											2.111.871.111,00						237.459.110,00
	- Aset Lain-Lain	661.512.650,00																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	666.914.000,00	-	-	-	-	-	-	48.127.734.480,00	-	-	293.925.149,00	-	-	-	-	-	263.925.149,00
	TOTAL ASET	31.811.566.614,97	1.497.861.800,00	-	343.000.000,00	-	-	-		-	-	293.925.149,00	-	22.119.500,00	-	-	-	20.164.145.974,00
1.2	Dinas Sosial																	
	- Tanah	870.765.420,06																
	- Peralatan dan Mesin	3.886.204.466,00	284.164.100,00															
	- Gedung dan Bangunan	477.834.200,00	369.455.100,00															
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP	5.234.803.886,06	653.619.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852.779.200,00
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman Aset Tetap Renovasi																	
	- Konstruksi dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tetap Renovasi											579.729.814,47						674.374.414,47
	- Aset Lain-Lain	211.187.800,00																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	930.476.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	678.724.800,47	-	-	-	-	-	877.736.414,47
	TOTAL ASET	6.125.295.886,06	653.619.200,00	-	-	-	-	-		-	-	678.724.800,47	-	-	-	-	-	1.865.894.612,47
1.3	Dinas Tenaga Kerja																	
	- Tanah	3.[illegible]																
	- Peralatan dan Mesin	25.[illegible]	249.415.000,00						1.268.881.000,00									
	- Gedung dan Bangunan	1.[illegible]																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	[illegible]																
	- Aset Tetap Lainnya	[illegible]																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	99.[illegible]			8.991.000,00													
	JUMLAH ASET TETAP	30.933.418.963,11	249.415.000,00	-	8.991.000,00	-	-	-	1.268.881.000,00	-	-	-	-	18.699.500,00	-	-	-	2.439.181.000,00
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman Aset Tetap Renovasi																	
	- Konstruksi dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tetap Renovasi											896.779.801,43	160.971.357,40	11.226.687,40				1.069.778.726,23
	- Aset Lain-Lain	900.813.[illegible]																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	900.813.[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	896.779.801,43	160.971.357,40	11.226.687,40	-	-	-	1.069.778.726,23
	TOTAL ASET	31.834.232.867,00	249.415.000,00	-	8.991.000,00	-	-	-	1.268.881.000,00	-	-	896.779.801,43	160.971.357,40	29.926.187,40	-	-	-	3.508.959.726,23
1.4	Dinas Perpustakaan Pendaftaran Kearsipan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPKPPPA)																	
	- Tanah	[illegible]																
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]																
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]			[illegible]													
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]			[illegible]													
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman Aset Tetap Renovasi																	
	- Konstruksi dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tetap Renovasi											[illegible]	[illegible]					
	- Aset Lain-Lain	[illegible]																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]																
	TOTAL ASET	[illegible]			[illegible]													
1.5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]																
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]																
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]																
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman Aset Tetap Renovasi																	
	- Konstruksi dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tetap Renovasi	[illegible]										[illegible]						
	- Aset Lain-Lain	[illegible]																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]																
	TOTAL ASET	[illegible]			[illegible]													
1.6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kependudukan																	
	- Tanah	[illegible]																
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]																
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]																
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]																
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman Aset Tetap Renovasi																	
	- Konstruksi dengan Pihak Ketiga																	
	- Aset Tetap Renovasi	[illegible]										[illegible]						
	- Aset Lain-Lain	[illegible]																
	- Tanaman Produksi Sempurna																	
	- Properti Investasi																	
	- Persediaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]																
	TOTAL ASET	[illegible]			[illegible]													
1.7	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	- Tanah																	

LAMPIRAN CXLII

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN TRANSMIGRASI
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 31 Januari 2025	Penambahan								Pada 2025							Total Penambahan
			Realisasi Belanja Modal LRA								Belum KIB	Belum Aset		Koreksi Penambahan				
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang direalisasikan pada tahun 2025	Belum dari Belanja Modal yang dipindahkan setelah melewati batang 2025	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Utang Belanja	Belum Penyusutan Belanja	Hibah	Materiel dari SKPD Lain	Bukan Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Belum Jasa Hasil Belanja	Koreksi Penyusutan	Kapitalisasi/Pengurangan	Pos-B Data	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	• Tanah dan Mesin	3.1xx.xx7.xxx.xx	1.039.739.253.00											267.639.000,00				1.101.515.753.00
	• Gedung dan Bangunan																	-
	• Jalan Irigasi dan Jaring																	-
	• Aset Tetap Lainnya	1.000.000,00																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	17.980.443.346,31	1.039.739.253,00	-	-	-	-	-	-	-	-			295.639.000,00	-	-	-	1.343.433.253,00
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	566.467.187,00	254.067.600,00															254.067.600,00
	• Aset Lain - Lain	1.247.360.162,31									3.764.xxx.xxx,00							3.764.xxx.xxx,00
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	• Perbatasan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.813.827.349,31	254.067.600,00	-	-	-	-	-	-	-	3.764.399.832,00	-	-	-	-	-	-	4.018.467.432,00
	TOTAL ASET	19.814.270.695,62	1.293.806.853,00	-	-	-	-	-	-	-	3.764.399.832,00	-	-	295.639.000,00	-	-	-	5.353.722.467,00
11	Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah																	
	• Tanah																	-
	• Peralatan dan Mesin	6.497.327.747,20	176.063.775,00											23.943.200,00				200.007.075,00
	• Gedung dan Bangunan																	-
	• Jalan Irigasi dan Jaring																	-
	• Aset Tetap Lainnya	14.595.000,00																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	4.917.515.543,20	176.063.775,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.943.200,00	-	-	-	352.147.875,00
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	674.805.200,00																-
	• Aset Lain - Lain	3.459.836.670,00									319.139.474,34							319.139.474,34
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	• Perbatasan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.134.641.870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	419.139.474,34	-	-	-	-	-	-	419.139.474,34
	TOTAL ASET	9.132.063.763,00	176.063.775,00	-	-	-	-	-	-	-	419.139.474,34	-	-	23.943.200,00	-	-	-	638.707.854,84
12	Dinas Perhubungan																	
	• Tanah	77.047.356.132,52																-
	• Peralatan dan Mesin	6.xx3.xx.xx.xx7	3.791.783.xx.xx						2.811.730.xxx,00					46.xxx.xxx,00				3.xxx.xx.xx.xx
	• Gedung dan Bangunan	109.396.017.xx.xx	4.xxx.xx.xx.xx		[illegible]													1.xxx.xx.xx.xx
	• Jalan Irigasi dan Jaring	9.xxx.xx.xx.xx																-
	• Aset Tetap Lainnya	xx.xxx.xxx,xx																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan	2.xx.xxx.xx.xx																-
	JUMLAH ASET TETAP	192.591.571.xx.xx	3.xxx.xx.xx.xx	-	xxx.xx.xx.xx	-	-	-	2.811.730.xxx,00	-	-	-	-	46.xxx.xxx,00	-	-	-	10.xxx.xx.xx.xx
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	2.xx.xx.xx.xx																-
	• Aset Lain - Lain	3.xx.xx.xx.xx									1.691.xx.xx.xx							1.691.xx.xx.xx
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.892.xx.xx.xx	-	-	-	-	-	-	-	-	1.691.xx.xx.xx	-	-	-	-	-	-	1.691.xx.xx.xx
	TOTAL ASET	197.xxx.xx.xx.xx	3.xxx.xx.xx.xx	-	xxx.xx.xx.xx	-	-	-	-	-	1.691.xx.xx.xx	-	-	46.xxx.xxx,00	-	-	-	12.xxx.xx.xx.xx
13	Dinas Kependudukan, Informatika dan Statistik																	
	• Tanah																	-
	• Peralatan dan Mesin	9.xx.xx.xx.xx	x.xx3.xx.xx.xx						21.xxx.xxx,00					563.xxx.xxx,xx				1.xx.xx.xx.xx
	• Gedung dan Bangunan	3.xx.xx.xx.xx																-
	• Jalan Irigasi dan Jaring	x.xx.xx.xx.xx																-
	• Aset Tetap Lainnya	3.xx.xx.xx.xx																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	17.83x.xx.xx.xx	x.xx3.xx.xx.xx	-	-	-	-	-	21.xxx.xxx,00	-	-	-	-	563.xxx.xxx,xx	-	-	-	18.xx.xx.xx.xx
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	406.xxx.xxx,00	147.xxx.xx.xx,xx				xx2.xxx.xxx,00											549.xxx.xxx,00
	• Aset Lain - Lain	1.xx.xxx.xx.xx									468.xxx.xxx,xx	5xx.xxx.xxx,xx						1.xx.xxx.xxx,xx
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	• Perbatasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.xx5.xxx.xxx,xx	147.xxx.xx.xx,xx	-	-	-	xx2.xxx.xxx,00	-	-	-	xxx.xxx.xxx,xx	xxx.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	x.xxx.xxx.xxx,xx
	TOTAL ASET	19.0x7.xxx.xxx,xx	18.1xx.xxx.xxx,xx	-	-	-	xx2.xxx.xxx,00	-	-	-	xxx.xxx.xxx,xx	xxx.xxx.xxx,xx	-	xxx.xxx.xxx,xx	-	-	-	23.xxx.xxx.xxx,xx
14	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah																	
	• Tanah																	-
	• Peralatan dan Mesin	3.xxx.xxx.xxx,xx	2x3.xxx.xxx,xx															2x3.xxx.xxx,xx
	• Gedung dan Bangunan																	-
	• Jalan Irigasi dan Jaring																	-
	• Aset Tetap Lainnya	29.xxx.xxx,xx																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3.xxx.xxx.xxx,00	2x3.xxx.xxx,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2x3.xxx.xxx,00
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	113.xx7.xxx,xx																-
	• Aset Lain - Lain	29.xxx.xxx,xx									2x1.xx7.xxx,xx							2x1.xx7.xxx,xx
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	• Perbatasan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	142.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	-	-	2x1.xx7.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	2x1.xx7.xxx,xx
	TOTAL ASET	3.1x9.xxx.xxx,xx	2x3.xxx.xxx,00	-	-	-	-	-	-	-	2x1.xx7.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	4x5.xxx.xxx,xx
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu																	
	• Tanah																	-
	• Peralatan dan Mesin	6.xx.xxx.xxx,xx	112.xxx.xxx,xx											113.xxx.xxx,xx				225.xxx.xxx,xx
	• Gedung dan Bangunan																	-
	• Jalan Irigasi dan Jaring																	-
	• Aset Tetap Lainnya	x.xx3.xxx,xx																-
	• Konstruksi Dalam Pengerjaan	x3.xxx.xxx,xx																-
	JUMLAH ASET TETAP	6.xxx.xxx.xxx,xx	112.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113.xxx.xxx,xx	-	-	-	225.xxx.xxx,xx
	• Aset Lainnya																	-
	• Tanaman Garis Konservasi Hewan																	-
	• Kemitraan Jangka Pilak Tan																	-
	• Aset Tidak Berwujud	47.xxx.xxx,xx																-
	• Aset Lain - Lain	3.xxx.xxx.xxx,xx									x67.x17.xxx,xx	x7.xx1.xxx,xx						7xx.xx7.xx3,xx
	• Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	• Penyelesaian																	-
	• Perbatasan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	3.xxx.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	-	-	x67.x17.xxx,xx	x7.xx1.xxx,xx	-	-	-	-	-	7xx.xx7.xx3,xx
	TOTAL ASET	9.xxx.xxx.xxx,xx	112.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	-	x67.x17.xxx,xx	x7.xx1.xxx,xx	-	113.xxx.xxx,xx	-	-	-	9xx.xx2.xxx,xx
16	Dinas Pemuda dan Olahraga																	
	• Tanah	3.xx7.xxx.xxx,xx																-
	• Peralatan dan Mesin	3.xx.xxx.xx3,xx	x3.xxx.xxx,xx											xxx.xx3.xxx,xx				xx3.xxx.xxx,xx
	• Gedung dan Bangunan	x.xxx.xxx.xxx,xx																-

LAMPIRAN CALK 11

No	NAMA Sekolah	Saldo Per 01 Januari 2016	Penambah							Pengurang								Total Penambahan
			Realisasi Belanja Modal (LRA)							Beban (LO)	Beban Aset			Beban Penyusutan				
		Harga Perolehan	Perolehan Aset yang sesuai dengan peraturan saat ini 2015	Perolehan dari Belanja Modal yang dikelola oleh satuan kerja yang lain tahun 2015	Koreksi saldo Belanja Modal	Cadang Belanja	Reklas Penambah Belanja	Hibah	Mutasi dari KEPB Lain	Bagian Aset Lancar	Hasil Investasi	Beban Hasil Operasional	Beban Aset Barang	Beban Penyusutan Gedung	Beban Penyusutan Peralatan	Beban Penyusutan Jalan	Beban Penyusutan Aset	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Koleksi Hasil Kesenian Daerah																	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Koleksi Perpustakaan/Buku Sastra																	
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan																	
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
20	Hibah Aset dan Kerjasama																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Barang Cagar Budaya/Hewan																	
	- Koleksi Kesenian/Buku Sastra																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan																	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
21	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Barang Cagar Budaya/Hewan																	
	- Koleksi Kesenian/Buku Sastra																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
22	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Barang Cagar Budaya/Hewan																	
	- Koleksi Kesenian/Buku Sastra																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
23	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP																	
	- Aset Lainnya																	
	- Barang Cagar Budaya/Hewan																	
	- Koleksi Kesenian/Buku Sastra																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Konstruksi dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
24	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
25	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	
26	Hibah Pembelian dan Pengadaan																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA																	
	TOTAL ASET																	

LAMPIRAN PERKADA

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Tahun 2025																	
			Berdasarkan Barang Milik Daerah							Pengurangan									Total Pengurangan
											Berkait BTB			Berkait Aset					
		Harga Perolehan	Bertujuan Untuk Diserahkan kepada Masyarakat	Hapus dari Barang Milik Daerah yang dikuasai pengguna barang	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Lain-lain Belanja	Gabung Perolehan Belanja	Hibah	Mutasi Masuk OPD - Lain	Mutasi Keluar OPD - Lain	Belanja Hasil Pengadaan	Non-Pengadaan	Hutang Hasil Pengadaan	Berkait Aset Barang	Berkait Aset Pemerintah	Berkait Aset Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah Lain	Berkait Aset Pemerintah Desa/Masyarakat	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Kendaraan Dinas Operasional								25.125.610.787,00					132.165.000,00				47.725.661.873,00
	JUMLAH ASET TETAP	869.444.956.154,00	16.987.329.873,00	-	3.862.200,00	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	- Aset Lainnya																	
	- Bangunan Gedung Negara																	
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Dalam Renovasi																	
	- Aset Lain - Lain																	
	- Aset Tetap Dalam Renovasi																	
	- Aset Tidak Berwujud																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.725.386.819,00	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	TOTAL ASET	871.170.342.973,00	16.987.329.873,00	-	3.862.200,00	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
24	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan																	
	- Tanah	6.865.150.967,00	857.941.600,00						220.626.700,00					19.315.000,00				
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan								218.878.206,00					19.315.000,00				
	JUMLAH ASET TETAP	6.865.150.967,00	101.593.600,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Ternak Kerbau dan Sejenisnya																	
	- Kendaraan Bermotor Roda Tiga																	
	- Aset Tetap Renovasi	2.230.256.400,00	200.347.000,00								1.600.754.933,00	90.153.706,00						
	- Aset Lain - Lain	2.230.256.400,00																
	- Peralatan dan Mesin lainnya																	
	- Bangunan Gedung																	
	- Perangkat/Alat	7.096.318.229,00	200.347.000,00	-	-	-	-	-		-	1.600.754.933,00	90.153.706,00		70.943.000,00	-	-	-	
	JUMLAH ASET LAINNYA	16.756.275.896,00	400.694.000,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	TOTAL ASET	7.096.318.229,00	200.347.000,00	-	-	-	-	-		-	1.600.754.933,00	90.153.706,00		70.943.000,00	-	-	-	
27	Dinas Komunikasi dan Informatika																	
	- Tanah								1.971.004.198,00									
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Renovasi																	
	- Aset Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	53.419.043.343,72	2.076.662.250,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	TOTAL ASET	200.699.456.751,00																
28	Dinas Perpustakaan Daerah																	
	- Tanah																	
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan																	
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	
	JUMLAH ASET TETAP	11.181.434.951,00	1.341.723.130,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Ternak, Kerbau dan Sejenisnya																	
	- Kendaraan Bermotor Roda Tiga																	
	- Aset Tetap Renovasi	1.203.201.555,00	700.500.000								1.200.672.764,76							
	- Aset Lain - Lain	467.877.931,61																
	- Bangunan Gedung Negara																	
	- Peralatan dan Mesin lainnya																	
	- Perangkat/Alat																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.401.784.555,61	700.500.000,00	-	-	-	-	-		-	1.200.672.764,76	-	-	21.450.750,00	-	-	-	
	TOTAL ASET	83.919.474.048,83	2.200.223.130,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
29	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																	
	- Tanah	3.147.900.000,00																
	- Peralatan dan Mesin	761.166.400,00	364.990.875,00															
	- Gedung dan Bangunan	7.413.866.671,00																
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	344.133.000,00																
	- Aset Tetap Lainnya	62.260.000,00																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan													116.000.000,00				
	JUMLAH ASET TETAP	11.999.626.071,00	364.990.875,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Ternak Kerbau dan Sejenisnya																	
	- Kendaraan Bermotor Roda Tiga																	
	- Aset Tetap Renovasi	137.047.279,00									849.664.873,00	321.020.279,00						
	- Aset Lain - Lain	703.893.417,00																
	- Bangunan Gedung Negara																	
	- Peralatan dan Mesin lainnya																	
	- Perangkat/Alat																	
	JUMLAH ASET LAINNYA	499.829.417,00	-	-	-	-	-	-		-	819.648.815,00	321.020.279,00	-	128.400.000,00	-	-	-	
	TOTAL ASET	12.445.998.110,00	364.990.875,00	-	-	-	-	-		-	819.648.815,00	321.020.279,00	-		-	-	-	
30	Dinas Sosial Daerah																	
	- Tanah	8.195.869.393,00	658.316.175,00											16.000.000,00				
	- Peralatan dan Mesin																	
	- Gedung dan Bangunan																	
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	19.277.000,00																
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan													17.000.000,00				
	JUMLAH ASET TETAP	8.215.736.393,00	658.316.175,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
	- Aset Lainnya																	
	- Tanaman, Ternak Kerbau dan Sejenisnya																	
	- Kendaraan Bermotor Roda Tiga																	
	- Aset Tetap Renovasi										720.000.000,00							
	- Aset Lain - Lain	240.835.000,00																
	- Bangunan Gedung Negara																	
	- Peralatan dan Mesin lainnya																	
	- Perangkat/Alat										716.640.000,00							
	JUMLAH ASET LAINNYA	240.835.000,00	-	-	-	-	-	-		-	716.640.000,00	-	-	15.000.000,00	-	-	-	
	TOTAL ASET	8.456.571.393,00	658.316.175,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	
31	Kecamatan Padalarang																	
	- Tanah	767.000.000,00																
	- Peralatan dan Mesin	1.177.850.000,00	43.870.000,00															
	- Gedung dan Bangunan	84.625.000,00																
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.000,00																
	- Aset Tetap Lainnya																	
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan													16.875.000,00				
	JUMLAH ASET TETAP	2.029.824.000,00	43.870.000,00	-	-	-	-	-		-	-	-	-		-	-	-	

LAMPIRAN COCK 11

NERACA ASET/KEKAYAAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Tahun 2025															
			Penambahan															
			Koreksi/Selisih Nilai							Mutasi			Koreksi/Penilaian					Total Penambahan
		Harga Perolehan	Berbagai Sebab Nilai Aset Berubah Menjadi Lebih Kecil dari Harga Perolehan Sebelumnya	Berbagai Sebab Nilai Aset Berubah Menjadi Lebih Besar dari Harga Perolehan Sebelumnya	Kapitalisasi dari Belanja Modal Aset	Hasil Pengembangan	Perbaikan Peningkatan Kapasitas	Hibah	Adanya dari KDP/Lain-Lain	Bertambah Nilai	Berkurang Nilai	Mutasi Masuk Barang	Berkurang Nilai Barang	Koreksi Penemuan	Kapitalisasi Pengembangan	Penilaian	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Jalan Lainnya																	-
	- Jembatan Lainnya Kabupaten/Kota																	-
	- Bangunan Air Irigasi Pintu Air																	-
	- Jalan Irigasi Permanen											264.964.911.000						264.964.911.000
	- Jalan Lain - Lain	2.540.000.000																-
	- Instalasi Pengolahan Air/Limbah																	-
	- Pipanisasi/Jaringan																	-
	- Prasasti/Lain																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	16.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.964.911.000	-	-	-	-	-	264.964.911.000
	TOTAL ASET	2.884.527.762.000	14.998.600.000	-	-	-	-	-	-	-	-	264.964.911.000	-	14.899.000.000	-	-	-	279.863.911.000
73	Konstruksi Dalam Pengerjaan	73.440.000.000																279.863.911.000
	- Tanah	2.473.874.700.000	50.146.350.000						264.964.911.000									14.899.000.000
	- Peralatan dan Mesin	1.171.164.900.000																-
	- Gedung dan Bangunan																	-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3.884.183.600.000	49.896.900.000	-	-	-	-	-	264.964.911.000	-	-	-	-	-	-	-	-	264.964.911.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya Lainnya																	-
	- Kompensasi Aset Pihak Ke Tiga																	-
	- Aset Tidak Berwujud																	-
	- ASET SEWA	29.447.600.000										167.412.800.000						167.412.800.000
	- Tanah Sewa																	-
	- Peralatan Sewa																	-
	- Gedung dan Bangunan Sewa																	-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi Sewa																	-
	- Aset Tetap Lainnya Sewa																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan Sewa																	-
	JUMLAH ASET SEWA	29.447.600.000	38.456.800.000	-	-	-	-	-	-	-	-	167.412.800.000	-	-	-	-	-	167.412.800.000
	TOTAL ASET	3.913.631.200.000	88.353.700.000	-	-	-	-	-	264.964.911.000	-	-	167.412.800.000	-	14.899.000.000	-	-	-	447.276.711.000
75	Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	- Tanah	47.500.000.000																-
	- Peralatan dan Mesin	1.760.000.000.000	57.500.000.000															-
	- Gedung dan Bangunan	1.370.000.000.000																-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3.180.500.000.000	57.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57.500.000.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya (Candi)																	-
	- Kompensasi Aset Pihak Ke Tiga																	-
	- Aset Tidak Berwujud																	-
	- Aset Lain - Lain	63.500.000.000										210.250.950.000						210.250.950.000
	- Tanaman Perkebunan Tahunan																	-
	- Hewan Ternak/Lainnya																	-
	- Perpustakaan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	63.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	210.250.950.000	-	-	-	-	-	210.250.950.000
	TOTAL ASET	3.243.972.871.000	57.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	210.250.950.000	-	-	-	-	-	267.750.950.000
76	Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	- Tanah	2.276.500.000.000	70.220.000.000															-
	- Peralatan dan Mesin	270.000.000.000																-
	- Gedung dan Bangunan																	-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	2.546.500.000.000	70.220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70.220.000.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya (Candi)																	-
	- Kompensasi Aset Pihak Ke Tiga																	-
	- Aset Tidak Berwujud																	-
	- Aset Lain - Lain											209.750.200.000						209.750.200.000
	- Tanaman Perkebunan Tahunan																	-
	- Hewan Ternak/Lainnya																	-
	- Perpustakaan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	209.750.200.000	-	-	-	-	-	209.750.200.000
	TOTAL ASET	6.010.700.000.000	70.220.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	209.750.200.000	-	9.000.000.000	-	-	-	288.970.200.000
77	Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	- Tanah	21.750.000.000.000																-
	- Peralatan dan Mesin	1.997.750.000.000	149.841.300.000						17.871.000.000									167.712.300.000
	- Gedung dan Bangunan	7.000.000.000.000																-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	31.377.991.884.000	149.841.300.000	-	-	-	-	-	17.871.000.000	-	-	-	-	9.000.000.000	-	-	-	176.841.300.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya (Candi)																	-
	- Kompensasi Aset Pihak Lain																	-
	- Aset Tidak Berwujud																	-
	- Aset Lain - Lain	30.184.500.000										351.418.500.000						351.418.500.000
	- Tanaman Perkebunan Tahunan																	-
	- Hewan Ternak/Lainnya																	-
	- Perpustakaan																	-
	- Prasasti/Lain																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	630.500.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	351.418.500.000	-	-	-	-	-	351.418.500.000
	TOTAL ASET	31.519.373.884.000	149.841.300.000	-	-	-	-	-	-	-	-	351.418.500.000	-	9.000.000.000	-	-	-	528.259.800.000
78	Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	- Tanah	276.500.000.000																-
	- Peralatan dan Mesin	1.222.000.000.000	35.000.000.000															-
	- Gedung dan Bangunan	1.422.000.000.000																-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3.134.500.000.000	35.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35.000.000.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya (Candi)																	-
	- Kompensasi Aset Pihak Ke Tiga																	-
	- Aset Tidak Berwujud																	-
	- ASET SEWA	66.927.700.000										101.643.600.000						101.643.600.000
	- Tanaman Perkebunan Tahunan																	-
	- Hewan Ternak/Lainnya																	-
	- Perpustakaan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	66.927.700.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101.643.600.000	-	-	-	-	-	101.643.600.000
	TOTAL ASET	3.419.965.438.000	35.000.000.000	-	-	-	-	-	-	-	-	101.643.600.000	-	-	-	-	-	136.643.600.000
79	Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	- Tanah	71.100.000.000																-
	- Peralatan dan Mesin	1.700.000.000.000	63.850.350.000															-
	- Gedung dan Bangunan	2.150.000.000.000																-
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	- Aset Tetap Lainnya																	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3.215.965.472.000	63.850.350.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.000.000.000	-	-	-	67.124.350.000
	- ASET LAINNYA																	-
	- Bangunan Cagar Budaya (Candi)																	-

LAMPIRAN II.LHP.14

REKAPITULASI
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2024

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2024	Realisasi Belanja Periode LRA		Koreksi/Jurnal Belanja Barang Jasa	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain	Mutasi dari SKPD Lain	Penambahan Reklas ATB	Reklas Aset		Koreksi Pembukuan					Total Penambahan
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang dicatatkan pencatatan tahun 2024	Belanja Modal yang dicatatkan pencatatan tahun 2024					Jurnal Reklas Barang	Reklas Aset Tetap	Jurnal Reklas Barang	Reklas Aset - Barang	Koreksi Pembukuan	Kapitalisasi Pengeluaran	Perubahan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	+ Akumulasi Aset Tetap Lain																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	77,471,747.00										93,851,000.00						93,851,000.00
	+ Aset Tetap Rusak Berat																	-
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	77,471,747.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,851,000.00	-	-	-	-	-	93,851,000.00
	TOTAL ASET	2,190,976,737.00	44,276,396.00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,851,000.00	-	3,000,000.00	-	-	-	136,851,000.00
39	Kecamatan Cipeundeuy																	
	+ Tanah	71,000,000.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	1,486,000,000.00	15,713,000.00															15,713,000.00
	+ Gedung dan Bangunan	1,427,577,237.00																-
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	2,984,733,841.00	15,713,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,713,000.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	86,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,871,000.00	-	-	-	-	-	120,871,000.00
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	86,320,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120,871,000.00	-	-	-	-	-	120,871,000.00
	TOTAL ASET	3,044,968,751.00	15,713,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	120,871,000.00	-	-	-	-	-	136,584,000.00
39	Kecamatan Cihampelas																	
	+ Tanah	360,000,000.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	1,626,203,772.00	75,000,000.00															75,000,000.00
	+ Gedung dan Bangunan	870,000,000.00	81,067,671.00				90,114,000.00											171,181,671.00
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi		132,966,746.00															132,966,746.00
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	2,869,203,772.00	771,192,987.00	-	-	-	90,114,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	354,308,587.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	42,718,936.00										97,476,000.00						97,476,000.00
	+ Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	42,718,936.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,956,000.00	-	-	-	-	-	82,956,000.00
	TOTAL ASET	2,911,922,708.00	771,192,987.00	-	-	-	90,114,000.00	-	-	-	-	82,956,000.00	-	-	-	-	-	437,264,587.00
40	Kecamatan Cikalongwetan																	
	+ Tanah	84,012,500.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	771,649,674.00	53,000,000.00															53,000,000.00
	+ Gedung dan Bangunan	3,975,350,000.00																-
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	3,760,872,963.00	84,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	84,000,000.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	126,147,237.00										93,525,700.00	3,000,000.00					96,525,700.00
	+ Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	126,147,237.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93,525,700.00	3,000,000.00	-	-	-	-	96,525,700.00
	TOTAL ASET	4,016,395,600.00	84,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	93,525,700.00	3,000,000.00	-	-	-	-	213,274,600.00
41	Kecamatan Rongga																	
	+ Tanah	1,960,547,700.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	1,760,573,230.00	72,412,000.00															72,412,000.00
	+ Gedung dan Bangunan	2,614,177,237.00																-
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi	72,000,000.00																-
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	5,336,311,260.00	72,412,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72,412,000.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	93,893,437.00										163,450,000.00						163,450,000.00
	+ Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	93,893,437.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	163,450,000.00	-	-	-	-	-	163,450,000.00
	TOTAL ASET	5,430,204,697.00	72,412,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	163,450,000.00	-	-	-	-	-	174,962,000.00
42	Kecamatan Batujajar																	
	+ Tanah	1,154,000,000.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	1,468,160,979.00	31,946,400.00					17,310,000.00										49,256,400.00
	+ Gedung dan Bangunan	12,278,744,185.00	160,621,954.00															160,621,954.00
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi																	-
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	27,404,244,775.00	221,467,954.00	-	-	-	-	17,310,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226,767,954.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-
	+ Aset Lain-Lain	5,400,000.00										167,325,641.00						167,325,641.00
	+ Tagihan Penjualan Angsuran																	-
	+ Penyusutan																	-
	+ Penyisihan																	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	5,400,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	167,325,641.00	-	-	-	-	-	167,325,641.00
	TOTAL ASET	27,409,644,775.00	221,467,954.00	-	-	-	-	17,310,000.00	-	-	-	167,325,641.00	-	-	-	-	-	394,093,595.00
43	Kecamatan Parongpong																	
	+ Tanah	2,464,000,000.00																-
	+ Peralatan dan Mesin	1,567,773,141.00	81,799,600.00															81,799,600.00
	+ Gedung dan Bangunan	1,615,500,000.00																-
	+ Jalan Jaringan dan Irigasi	1,000,000,000.00																-
	+ Aset Tetap Lainnya																	-
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																	-
	JUMLAH ASET TETAP	6,647,273,141.00	81,799,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,799,600.00
	+ Aset Lainnya																	-
	+ Tagihan Gugatan Perbendaharaan																	-
	+ Kemitraan dengan Pihak Ketiga																	-
	+ Aset Tetap Renovasi																	-

LAMPIRAN C4/LK 11

NERACA ASET/ KAP
KABUPATEN KAPUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Penambah							Pengurangan							Total Perubahan
			Realisasi Belanja Modal LRA							Koreksi SDB	Koreksi Aset		Koreksi Pembukuan				
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang diterima/diserahkan tahun 2025	Belanja dari Belanja Modal yang dipertanggungjawabkan tahun 2025	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Hutang	Rekles Pemerintah Belanja	Hibah	Aset Lainnya (KDP) Lain	Bukan Hasil Pembelanjaan	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Koreksi Saldo Barang	Koreksi Harga	Kapitalisasi Pengadaan	Pindah Data	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	- Jasa Lainnya	46.000.547.00									771.005.192.00						
	- Jaminan Pemeliharaan Bangunan																
	- Pemeliharaan																
	- Pemasaran																
	JUMLAH ASET LAINNYA	46.000.547.00	-	-	-	-	-	-	-	-	771.005.192.00	-	-	-	-	-	
	JUMLAH ASET	8.835.748.423.00	83.799.600.00	-	-	-	-	-	-	-	771.005.192.00	-	-	-	-	-	
44	Dinas Lingkungan Hidup																
	- Tanah	678.911.000.00															
	- Peralatan dan Mesin	7.991.200.112.00	39.700.000.00														
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	2.221.117.000.00															
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	4.839.648.151.00	39.700.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Lainnya																
	- Tagihan - tagihan Pihak Ke																
	- Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	- Aset Tidak Berwujud										317.355.670.00						
	- Aset Lain - Lain	67.827.885.00															
	- Tagihan Penjualan Angsuran																
	- Persediaan																
	- Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	67.827.885.00	-	-	-	-	-	-	-	-	317.355.670.00	-	-	-	-	-	
	TOTAL ASET	4.907.383.036.00	39.700.000.00	-	-	-	-	-	-	-	317.355.670.00	-	-	-	-	-	
45	Sekretariat Dewan																
	- Tanah	367.911.000.00															
	- Peralatan dan Mesin	1.774.535.553.00	100.500.000.00														
	- Gedung dan Bangunan	1.454.554.871.00															
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	3.597.001.424.00	100.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Lainnya																
	- Tagihan - tagihan Penjualan Angsuran																
	- Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	- Aset Tidak Berwujud										213.447.410.00						
	- Aset Lain - Lain	1.710.000.00															
	- Tagihan Penjualan Angsuran																
	- Persediaan																
	- Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.254.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	213.447.410.00	-	-	-	-	-	
	TOTAL ASET	3.371.000.424.00	100.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	213.447.410.00	-	-	-	-	-	
46	Sekretariat Daerah																
	- Tanah	74.000.000.00															
	- Peralatan dan Mesin	7.746.500.360.00	127.787.000.00														
	- Gedung dan Bangunan	2.993.830.000.00															
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	2.731.331.000.00	127.787.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Lainnya																
	- Tagihan - tagihan Penjualan																
	- Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	- Aset Tidak Berwujud										79.355.767.00						
	- Aset Lain - Lain	100.727.000.00															
	- Tagihan Penjualan Angsuran																
	- Persediaan																
	- Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	100.727.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	79.355.767.00	-	-	-	-	-	
	TOTAL ASET	2.831.058.000.00	127.787.000.00	-	-	-	-	-	-	-	79.355.767.00	-	-	-	-	-	
47	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin	7.971.000.767.00	40.000.451.00														
	- Gedung dan Bangunan																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	2.428.990.167.00	40.000.451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Aset Lainnya																
	- Tagihan - tagihan Penjualan Angsuran																
	- Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	- Aset Tidak Berwujud																
	- Aset Lain - Lain	100.727.000.00															
	- Tagihan Penjualan Angsuran																
	- Persediaan																
	- Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	395.233.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	TOTAL ASET	2.971.233.167.00	40.000.451.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	- Tanah	2.508.600.865.972.00	2.100.185.775.00	-	-	-	-	198.104.000.220.00	24.210.483.577.00	6.000.737.000.00	-	-	-	33.363.706.778.00	2.695.521.000.00	104.478.105.500.00	293.598.812.452.00
	- Peralatan dan Mesin	2.065.615.756.649.27	139.765.050.532.00	258.562.850.00	1.064.994.734.00	198.733.362.00	6.151.483.137.00	3.791.103.457.00	28.719.914.000.00	-	-	-	6.000.476.367.64	-	-	-	171.644.596.655.64
	- Gedung dan Bangunan	2.874.266.276.158.61	66.570.262.112.00	212.770.270.00	6.478.026.741.74	30.101.736.00	1.276.123.138.00	7.458.000.812.00	19.030.740.274.00	-	-	-	-	182.773.170.00	-	-	59.867.714.799.74
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	1.543.637.009.657.87	76.012.212.427.00	-	345.268.178.64	-	4.401.200.306.98	18.012.041.094.00	1.710.989.237.00	-	-	-	-	-	-	23.159.919.000.00	117.627.726.427.50
	- Aset Tetap Lainnya	178.731.118.697.73	21.647.668.700.00	-	-	-	1.016.576.702.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.721.427.418.00
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	33.811.829.581.00	-	-	491.798.749.60	-	3.196.956.109.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.648.754.858.60
	JUMLAH ASET TETAP	7.454.555.865.727.81	299.800.500.127.00	257.479.206.00	8.088.448.704.74	228.834.098.00	44.941.833.347.98	135.349.864.586.00	30.713.287.048.00	6.000.737.000.00	-	-	6.000.476.367.64	33.176.479.948.00	2.695.521.000.00	104.478.105.500.00	706.179.731.844.00
	- Aset Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tagihan - tagihan Penjualan Angsuran	46.647.300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Kemitraan dengan Pihak Tiga	53.994.273.730.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Aset Tidak Berwujud	17.979.879.560.00	1.500.000.000.00	-	-	-	412.500.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.116.500.000.00
	- Aset Lain - Lain	154.791.200.000.00	-	-	-	-	-	-	100.000.000.00	-	97.562.814.333.55	43.236.479.999.76	99.861.329.00	-	-	-	182.661.99.663.31
	- Tagihan Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Persediaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Penyusutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	227.213.361.290.00	1.500.000.000.00	-	-	-	412.500.000.00	-	100.000.000.00	-	97.562.814.333.55	43.236.479.999.76	99.861.329.00	-	-	-	184.658.99.663.31
	TOTAL ASET	7.241.769.867.187.67	300.964.858.767.00	257.479.206.00	8.088.448.704.74	228.834.098.00	45.354.333.347.98	135.349.864.586.00	30.813.287.048.00	6.000.737.000.00	97.562.814.333.55	43.236.479.999.76	6.100.337.696.64	33.176.479.948.00	2.695.521.000.00	104.478.105.500.00	890.838.495.507.31

LAMPIRAN Col K.14

RENCANA UMUM PENGADAAN
PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA OPD	Pada Per 31 Januari 2025	Tahun 2025 Pengadaan													Pada Per 31 Desember 2025
						Belum ADB	Belum Ayat		Kontrak Pembiayaan						Total Pengadaan	
		Harga Perolehan	Melalui Sistem Lain	Pengadaan	Belum Pengadaan (Sisa)	Belum Ada Jaminan Awal	Belum Ada Jaminan Awal	Belum Ada Jaminan Awal	Belum Kontrak	Kontrak Pembiayaan	Kapitalisasi Pengadaan	Pihak Ketiga	Belum ke Tahun Anggaran	Realisasi Pada Awal s.d Januari Tahun 2025	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	19	21	22	28	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38
1	Dinas Pendidikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tanah	[illegible]						[illegible]		[illegible]					[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]			[illegible]				[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Jalan, Irigasi dan Jaringan	[illegible]	[illegible]		[illegible]			[illegible]					[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya	[illegible]			[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]			[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]			[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-	-
	- Tanaman Garis Konservasi Hutan														-	-	-
	- Akumulasi Amortisasi Aset Tak														-	-	-
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]													[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lain-Lain	[illegible]		[illegible]											-	-	-
	- Tagihan Penjualan Angsuran														-	-	-
	- Piutang Lainnya														-	-	-
	- Penyusutan	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
2	Dinas Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Lahan	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]		[illegible]		[illegible]	[illegible]	[illegible]						[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]			[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Jalan, Jaringan dan Instalasi	[illegible]			[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya	[illegible]			[illegible]										[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Sewa Lainnya	[illegible]													-	-	-
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-	-
	- Tanaman Garis Konservasi Hutan														-	-	-
	- Konstruksi dalam Pengerjaan														-	-	-
	- Aset Tetap Dalam Renovasi	[illegible]		[illegible]											[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lain-Lain	[illegible]													-	-	-
	- Tagihan Penjualan Angsuran														-	-	-
	- Penyusutan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN CoLK14

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Nilai Per 31 Januari 2025	Mutasi 2025														Nilai Per 31 Desember 2025
			Penambah			Pengurang									Total Penambahan		
		Harga Perolehan	Mutasi dr SKPD Lain	Pembangunan	Reklas Perolehan Belanja	Reklas Rekap (koreksi lebih)	Reklas Aset (hasil koreksi lebih)	Reklas Aset (koreksi kurang)	Reklas Rekap (koreksi kurang)	Koreksi Perolehan	Koreksi Pengurangan	Penjualan	Penyusutan	Reklas Pengurang	Koreksi Nilai Aset (penambah aset lebih NLR)	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	29	31	33	35	36	37	38	39	40	41	42	43	45	46	47
A	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Jaringan																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Aset Lainnya																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman (yang Kompleks, Hewan)																
	- Kontribusi Jangka Pjg Lain																
	- Aset Tetap Renovasi																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tagihan Pengelola Anggaran																
	- Pendapatan yang																
	- Pemanfaatan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
B	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Jaringan																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman (yang Kompleks, Hewan)																
	- Kontribusi Jangka Pjg Lain																
	- Aset Tetap Renovasi																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tagihan Pengelola Anggaran																
	- Pendapatan yang																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																

LAMPIRAN CALK 14

BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025 Penambahan													Saldo Per 31 Desember 2025
						Koreksi Nilai	Nilai Aset		Koreksi Pembukuan						Total Penambahan	
		Harga Perolehan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan	Nilai Penyusutan Belanja	Selisih Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Tahun Hasil Inventarisasi	Nilai Aset Hasil Inventarisasi	Koreksi Penyusutan	Kapitalisasi Pengadaan Aset	Mutasi Aset	Nilai Aset Hasil Inventarisasi	Koreksi Nilai Aset Awal dari perubahan tahun 2024	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
B	Barang Dipergunakan Perangkat Daerah																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Gedung dan Bangunan																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman dan Koleksi Perpustakaan																
	- Aset dengan Hak Pakai Pihak Lain																
	- Aset Tidak Berwujud																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tanaman Penggunaan Asuransi																
	- Penyusutkan/amortisasi																
	- Pemindahan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	JUMLAH ASET																
C	Bidang Pemukiman Kabupaten dan Perangkatnya																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Gedung dan Bangunan																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman Cagar Kolektif Hewani																
	- Kontrak dengan Pihak Lain																
	- Aset Tidak Berwujud																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tanaman Penggunaan Asuransi																
	- Penyusutkan/amortisasi																
	- Pemindahan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	JUMLAH ASET																
D	Bidang Perumahan																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Gedung dan Bangunan																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman Cagar Kolektif Hewani																
	- Kontrak dengan Pihak Lain																
	- Aset Tidak Berwujud																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tanaman Penggunaan Asuransi																
	- Penyusutkan/amortisasi																
	- Pemindahan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	JUMLAH ASET																
E	Bidang Penataan Ruang																
	- Tanah																
	- Peralatan dan Mesin																
	- Gedung dan Bangunan																
	- Jalan Jaringan dan Irigasi																
	- Aset Tetap Lainnya																
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	- Aset Lainnya																
	- Tanaman Cagar Kolektif Hewani																
	- Kontrak dengan Pihak Lain																
	- Aset Tidak Berwujud																
	- Aset Lain - Lain																
	- Tanaman Penggunaan Asuransi																
	- Penyusutkan/amortisasi																
	- Pemindahan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	JUMLAH ASET																
F	Bidang Lingkungan Hidup																
	- Tanah																

LAMPIRAN CARK 14

NERACA (NON AUDITED)
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2021

No	URAIAN	Saldo Per 31 Januari 2021	Mutasi			Saldo Per 31 Desember 2021											
			Bertambah	Berkurang	Bertambah Setelah Berkurang	Reklas ADD	Reklas Aset		Koreksi Pembukuan				Reklas ke Ekstrakomptabel	Koreksi Nilai Aset yang berkaitan dengan Aset Tetap	Total Perpindahan	
		Nilai Buku				Reklas Aset (Penambah)	Reklas Aset (Pengurang)	Reklas Aset Intrakomptabel	Reklas Nilai Buku	Reklas Penyusutan	Reklas Penyusutan yang	Lain-lain				Nilai Buku
1	2	3	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
15	Dinas Perhubungan																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																
	+ Jalan, Jaringan dan Irigasi																
	+ Aset Tetap Lainnya																
	+ Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP																
	+ Aset Lainnya																
	+ Tanaman Case, Kumpulan Ternak																
	+ Kontribusi yang Belum Tetap																
	+ Aset Tidak Berwujud																
	+ Aset Lain - Lain																
	+ Akumulasi Penyusutan Aset Tetap																
	+ Penyusutan																
	JUMLAH ASET LAINNYA																
	TOTAL ASET																
18	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung Barat																
	+ Tanah																
	+ Peralatan dan Mesin																
	+ Gedung dan Bangunan																

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2023

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2023 – Harga Perolehan	Mutasi Ke SKPD Lain	Pengadaan	Hibah	Reklas KIB – Barang Hasil Inventarisasi	Reklas Aset – Reklasifikasi	Reklas Aset – Barang Hasil Inventarisasi	Reklas Dari Barang	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi Pengadaan	Penjualan	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi Saldo Awal	Total Penambahan – Harga Perolehan	Saldo Per 31 Desember 2023 – Harga Perolehan
1	2	3	10	11	13	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
22	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
23	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
24	Sekretariat Daerah	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN C4.IX.14

PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
LAMPIRAN XXX

No	NAMA SKPD	Saldo Per 31 Januari 2025	Mutasi 2025 Penggunaan												Saldo Per 31 Desember 2025
						Koreksi Saldo Awal		Koreksi Transaksi						Total Penggunaan	
		Harga Perolehan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan	Koreksi Penambahan Nilai	Koreksi Nilai (pengurang)	Nilai Aset Tetap	Koreksi Nilai (penambah)	Koreksi Nilai Barang	Koreksi Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Koreksi Nilai	Koreksi Saldo Awal tahun sebelumnya		Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
	a. Jembatan																
	JUMLAH ASET TETAP	6.98.871.379.600,00	2.309.364.479,00	-	-	-	9.867.788.768,34	1.874.562.875,00	17.566.889,18	664.937.500,00	-	-	2.192.000,00	-	13.718.964.445,52	6.98.871.379.600,00
	a. Jembatan																
	a. Jembatan Lantai Kendaraan Rangka																
	a. Jembatan Lantai Kendaraan Pelat Tipe																
	a. Aset Tidak Berwujud	7.866.366.918,00															7.866.366.918,00
	a. Aset Lain - Lain	3.7.9.207.0.0,-	11.000.000,00	132.976.000,00											177.976.000,00		89.207.024.000,00
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Bangunan	8.004.013.000,00	78.000.000,00	321.876.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	199.876.000,00		19.804.170.871,00
	JUMLAH ASET LAINNYA	139.126.191.891,11	1.211.013.000,00	142.876.000,00	-	-	9.867.788.768,34	1.874.562.875,00	17.566.889,18	664.937.500,00	-	-	2.192.000,00	-	13.918.964.445,52		118.790.847.211,11
	TOTAL ASET	139.126.191.891,11	1.211.013.000,00	142.876.000,00	-	-	9.867.788.768,34	1.874.562.875,00	17.566.889,18	664.937.500,00	-	-	2.192.000,00	-	13.918.964.445,52		118.790.847.211,11
28	Bangunan BPBD																
	a. Tanah	2.276.000.000,00															2.276.000.000,00
	a. Peralatan dan Mesin	17.726.447.774,00	31.000.000,00				523.468.000,00		132.893.000,00						734.361.000,00		89.763.875.000,00
	a. Gedung dan Bangunan	19.1.04.000.077,00															19.1.04.000.077,00
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi	64.871.218,34															1.810.877.000,00
	a. Aset Tetap Lainnya	270.470.000,00															270.470.000,00
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	139.431.950.124,00	31.000.000,00	-	-	-	877.861.000,00	-	132.893.000,00	-	-	-	-	-	734.361.000,00		313.000.967.000,00
	a. Aset Lainnya																
	a. Tanaman Untuk Koleksi Dikelola																
	a. Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	a. Aset Tidak Berwujud	502.804.000,00															502.804.000,00
	a. Aset Lain - Lain	8.271.982.811,11		108.439.000,00											1.494.039.000		1.994.878.000,00
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Perpustakaan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	1.725.886.811,00	-	109.439.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	109.439.000,00		2.949.349.811,00
	TOTAL ASET	171.170.836.935,00	31.000.000,00	109.439.000,00	-	-	877.861.000,00	-	132.893.000,00	-	-	-	-	-	843.800.000,00		315.950.316.811,00
29	Badan Penanggulan Pendanaan Pelaksanaan dan Pengendalian Daerah																
	a. Tanah																
	a. Peralatan dan Mesin	6.80.1.870.260,00					1.000.754.855,00	88.553.500,00	20.993.400,00						8.189.301.855,00		8.189.301.855,00
	a. Gedung dan Bangunan																
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi																
	a. Aset Tetap Lainnya																
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	8.861.870.260,00	-	-	-	-	1.000.754.855,00	88.553.500,00	20.993.400,00	-	-	-	-	-	8.189.301.855,00		8.189.301.855,00
	a. Aset Lainnya																
	a. Tanaman Untuk Koleksi Dikelola																
	a. Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	a. Aset Tidak Berwujud	7.000.000.000,00															7.000.000.000,00
	a. Aset Lain - Lain	8.398.787.772,00		4.841.976.000,00											4.841.976.000,00		1.953.700.000,00
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Perpustakaan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	7.398.787.772,00	-	4.841.976.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.841.976.000,00		8.953.700.000,00
	TOTAL ASET	24.258.177.492,00	-	4.841.976.000,00	-	-	1.000.754.855,00	88.553.500,00	19.993.400,00	-	-	-	-	-	3.349.277.855,00		17.143.001.855,00
27	Badan kesatuan bangsa dan Politik																
	a. Tanah	2.1.2.0.1.2.9.2.7.0,00	366.500.000,00					39.929.700.000,00									1.868.453.000.000,00
	a. Peralatan dan Mesin	21.004.607.881,11	4.568.870.918,00				724.833.781,00	3.961.711.450,00	120.712.785,28	79.829.000,00					9.818.915.736,28		11.185.691.881,11
	a. Gedung dan Bangunan																2.0.0.0.1.0.0.0.0,00
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi	60.720.527,00															60.720.527,00
	a. Aset Tetap Lainnya	13.105.847,00															13.105.847,00
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	237.200.061.362,11	4.935.370.918,00	-	-	-	724.833.781,00	43.891.411.450,00	120.712.785,28	79.829.000,00	-	-	-	-	69.713.675.736,28		287.231.871.062,83
	a. Aset Lainnya																
	a. Tanaman Untuk Koleksi Dikelola	402.162.500,00															402.162.500,00
	a. Kemitraan dengan Pihak Tiga	47.077.681.000,00															47.077.681.000,00
	a. Aset Tidak Berwujud																
	a. Aset Lain - Lain	3.477.032.565,27		81.346.000,00					81.313.047,21						81.313.047,21		3.395.719.518,06
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Perpustakaan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	15.4.9.8.1.7.7.4.5,27	-	81.346.000,00	-	-	-	-	81.313.047,21	-	-	-	-	-	81.313.047,21		15.4.9.8.1.7.7.4.5,27
	TOTAL ASET	252.680.836.728,00	4.935.370.918,00	81.346.000,00	-	-	724.833.781,00	43.891.411.450,00	201.247.832,49	79.829.000,00	-	-	-	-	69.795.021.783,49		302.631.716.940,83
28	Badan Penanggulan Bencana																
	a. Tanah																
	a. Peralatan dan Mesin	71.707.8.1.0.1.0,00	78.063.000,00				1.160.87.3.0.4,26		71.641.249,21						1.238.914.253,47		71.632.300.746,53
	a. Gedung dan Bangunan																
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi																
	a. Aset Tetap Lainnya																
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	71.707.8.1.0.1.0,00	78.063.000,00	-	-	-	1.160.87.3.0.4,26	-	71.641.249,21	-	-	-	-	-	1.238.914.253,47		77.632.300.746,53
	a. Aset Lainnya																
	a. Tanaman Untuk Koleksi Dikelola																
	a. Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	a. Aset Tidak Berwujud	1.7.4.4.6.0.7.0.0,00															1.7.4.4.6.0.7.0.0,00
	a. Aset Lain - Lain	9.0.7.7.2.7.4.1,81		324.439.879,00											1.4.7.8.4.7.9,00		9.1.8.4.3.7.4.7.7,81
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Perpustakaan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	2.4.8.1.7.6.0.1.3.5,81	-	324.439.879,00	-	-	-	-	25.5.4.7.0.0,00	-	-	-	-	-	1.4.7.8.4.7.9,00		2.4.4.0.0.0.0.0.1.3.5,81
	TOTAL ASET	12.8.9.5.4.1.5.0.4,81	78.063.000,00	324.439.879,00	-	-	1.160.87.3.0.4,26	-	71.896.249,21	-	-	-	-	-	1.253.762.253,47		12.0.0.0.0.0.0.0.4,81
24	Badan kesatuan bangsa dan Perlindungan Sosial Pada Masyarakat																
	a. Tanah	3.7.3.7.0.0.0.0.0,00															3.7.3.7.0.0.0.0.0,00
	a. Peralatan dan Mesin	3.2.0.7.1.4.0.4.0,00					8.1.8.9.9.4.1.1.0,00	8.1.6.0.7.2.7.0,00	1.1.5.4.9.9.0.9.0,00						1.2.8.1.3.5.2.0.9.0,00		9.2.0.7.2.1.0.0.0,00
	a. Gedung dan Bangunan	1.2.2.0.0.0.0.1.2.0,00															1.2.2.0.0.0.0.1.2.0,00
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi	8.4.2.1.1.0.0.0.0,00															8.4.2.1.1.0.0.0.0,00
	a. Aset Tetap Lainnya	4.7.0.0.1.0.0.0.0,00															4.7.0.0.1.0.0.0.0,00
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	31.5.4.4.4.0.1.3.3,00	-	-	-	-	8.1.8.9.9.4.1.1.0,00	8.1.6.0.7.2.7.0,00	1.1.5.4.9.9.0.9.0,00	-	-	-	-	-	1.2.8.1.3.5.2.0.9.0,00		1.3.8.9.2.7.7.0.0.0,00
	a. Aset Lainnya																
	a. Tanaman Untuk Koleksi Dikelola																
	a. Kemitraan dengan Pihak Tiga																
	a. Aset Tidak Berwujud	3.3.4.6.7.1.7.0.0,00															1.3.7.3.1.7.0.0,00
	a. Aset Lain - Lain	7.5.1.4.6.7.7.7.0,00		332.752.979,00											8.7.7.1.7.9.0.0,00		1.1.8.3.1.6.7.4.9.0,00
	a. Tanaman Perpustakaan Asesoris																
	a. Peralat Mesin Lain																
	a. Perpustakaan																
	JUMLAH ASET LAINNYA	4.9.9.8.2.6.4.7.7,00	-	332.752.979,00	-	-	8.1.9.9.0.8.0.1.9,00	8.1.3.8.7.2.7.7,00	1.1.6.4.0.0.0.1.8,00	-	-	-	-	-	1.2.8.1.3.5.2.0.9.0,00		1.2.0.7.5.4.1.7.1.6,00
	JUMLAH ASET TETAP	12.4.0.7.4.0.7.4.9,00	-	332.752.979,00	-	-	8.1.9.9.0.8.0.1.9,00	8.1.3.8.7.2.7.7,00	1.1.6.4.0.0.0.1.8,00	-	-	-	-	-	1.2.8.1.3.5.2.0.9.0,00		1.2.0.7.5.4.1.7.1.6,00
30	Inspektorat Daerah																
	a. Tanah																
	a. Peralatan dan Mesin	2.1.4.6.3.7.4.1,00	58.000.000,00				7.1.8.0.0.0.0.1.0,00		1.2.3.0.9.1.0.0.1,0						1.6.5.9.0.0.0.1.0,00		1.4.0.3.3.7.7.4.1.0,00
	a. Gedung dan Bangunan																
	a. Jalan Jaringan dan Irigasi																
	a. Aset Tetap Lainnya	3.4.7.4.1.0.0.1,00															1.4.7.7.1.0.0.1,00
	a. Konstruksi Dalam Pengerjaan																
	JUMLAH ASET TETAP	5.2.1.9.7.8.2.9.1,00	58.000.000,00	-	-	-	7.1.8.0.0.0.0.1.0,00	-	1.2.3.0.9.1.0.0.1,0	-	-	-	-	-	1.6.5.9.0.0.0.1.0,00		1.8.1.3.7.7.4.1.0,00

LAMPIRAN CALK 14

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN PROVINSI
TAHUN 2025

No	Nama Akun	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi Penambah			Mutasi Pengurang								Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi Penambah Lain	Penyelesaian	Reklas Perolehan Belanja	Reklas ke KDP	Reklas Aset		Koreksi Pembukuan				Total Pengurangan	
		Harga Perolehan				Reklas Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Reklas Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Koreksi Pembukuan	Kapitalisasi Pengadaan	Reklas Rusak	Reklas ke Ekstrakomptabel	Koreksi Saldo Awal atas penerimaan per tahun 2024	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	30	31	32	25	26	27	28	29	30	31	33	34	36	37
	- Aset Lainnya														-	-
	- Tanaman Dan Koleksi Hewan														-	-
	- Konstruksi dalam Pekerjaan														-	-
	- Aset Tidak Berwujud														-	-
	- Aset Lain - Lain	[illegible]		[illegible]											[illegible]	[illegible]
	- Tanah Peruntukan Konstruksi														-	-
	- Persediaan														-	-
	- Penyusutan														-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
31	Kemungkinan Pemilikan														-	-
	- Tanah	[illegible]					[illegible]		[illegible]						[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]					[illegible]		[illegible]						[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]					[illegible]								-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	-
	- Aset Tetap Lainnya														-	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-
	- Tanaman Dan Koleksi Hewan														-	-
	- Konstruksi dalam Pekerjaan														-	-
	- Aset Tidak Berwujud														-	-
	- Aset Lain - Lain	[illegible]													-	[illegible]
	- Tanaman Pemukiman Asrama														-	-
	- Persediaan Management														-	-
	- Penyusutan														-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
32	Kemungkinan Jaminan														-	-
	- Tanah	[illegible]	[illegible]	[illegible]											[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]													[illegible]	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	-
	- Aset Tetap Lainnya														-	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-
	- Tanaman Dan Koleksi Hewan														-	-
	- Konstruksi dalam Pekerjaan														-	-
	- Aset Tidak Berwujud														-	-
	- Aset Lain - Lain	[illegible]		[illegible]											[illegible]	[illegible]
	- Tanaman Pemukiman Asrama														-	-
	- Persediaan Management														-	-
	- Penyusutan														-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
33	Kemungkinan Gabungan														-	-
	- Tanah	[illegible]													-	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]					[illegible]		[illegible]				[illegible]		[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	-
	- Aset Tetap Lainnya														-	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]					[illegible]						[illegible]		[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-
	- Tanaman Dan Koleksi Hewan														-	-
	- Konstruksi dalam Pekerjaan														-	-
	- Aset Tidak Berwujud														-	-
	- Aset Lain - Lain	[illegible]													-	[illegible]
	- Tanaman Pemukiman Asrama														-	-
	- Persediaan Management														-	-
	- Penyusutan														-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	-	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
34	Kemungkinan Gabungan														-	-
	- Tanah	[illegible]													-	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]													-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	-
	- Aset Tetap Lainnya														-	-
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	-
	- Tanaman Dan Koleksi Hewan														-	-

LAMPIRAN CALK II

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2023

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2023	Mutasi 2023 – Pengurangan												Total Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
		Harga Perolehan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan	Reklas Pemindahan Belanja	Reklas KIB: [illegible]	Reklas Aset: [illegible]	Reklas Aset: [illegible]	Koreksi Pembukuan: Reklas Kode Barang	Koreksi Pembukuan: [illegible]	Koreksi Pembukuan: [illegible]	Koreksi Pembukuan: [illegible]	Reklas ke Ekstrakomptabel	Koreksi Saldo Awal atas pencatatan aset tahun 2023	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

LAMPIRAN PERDA

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Saldo Per 31 Desember 2025	
			Penambah			Berkurang			Koreksi Pembukuan					Total Penambahan		
		Harga Perolehan	Mutasi dr SKPD Lain	Pengadaan	Reklas Penambah (Tidak)	Selisih Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Hibah Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Koreksi Penambah	Koreksi Pengurang	Aset Hilang	Reklas ke Aset Lainnya	Koreksi Saldo Awal tahun berikutnya 2026	Harga Perolehan	Harga Perolehan
		6	20	21	22	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	2	[illegible]													-	[illegible]
	- Tanah	[illegible]													-	[illegible]
	- Tanah Peruntuk Bangunan														-	
	- Peralatan dan Mesin														-	[illegible]
	- Bangunan														-	[illegible]
	JUMLAH ASET LANCARNYA	7.xxx.xxx.xx	-	-	-	-	663.539.683,00	-	-	-	-	-	20.xxx.xxx,xx	-	213.xxx.xxx,xx	25.xxx.xxx.xxx,xx
	TOTAL ASET	30.xx.xx.xxx.xxx,xx	-	-	-	-		-	-	-	-	-		-		[illegible]
43	Kecamatan Parongpong															[illegible]
	- Tanah	[illegible]					371.xxx.xxx,xx								211.xxx.xxx,xx	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]													-	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]													-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	[illegible]													-	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya														-	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan														771.xxx.xxx,xx	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	731.xxx.xxx,xx	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	[illegible]
	- Tanaman Lain Kecuali Hutan														-	[illegible]
	- Kontruksi dalam Pkrjn Tan														-	[illegible]
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]		[illegible]											2.xxx.xxx,xx	[illegible]
	- Aset Lain - Lain														-	[illegible]
	- Hasil Pengadaan														-	[illegible]
	- Pemerintah														-	[illegible]
	- Pemerintah	[illegible]		[illegible]											1.xxx.xxx,xx	[illegible]
	JUMLAH ASET LANCARNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	185.xxx.xxx,xx	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	-	[illegible]	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
45	Kecamatan Cikalongwetan	[illegible]													[illegible]	[illegible]
	- Tanah	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]													-	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]													-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya														[illegible]	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]					[illegible]								-	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	[illegible]
	- Tanaman Lain Kecuali Hutan														-	[illegible]
	- Kontruksi dalam Pkrjn Tan														-	[illegible]
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]													-	[illegible]
	- Aset Lain - Lain														-	[illegible]
	- Hasil Pengadaan														-	[illegible]
	- Pemerintah														-	[illegible]
	- Pemerintah	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LANCARNYA	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
46	Kecamatan Ngamprah	[illegible]													[illegible]	[illegible]
	- Tanah	[illegible]					[illegible]								[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]												-	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]													-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya														[illegible]	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]	[illegible]				[illegible]								-	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	[illegible]
	- Tanaman Lain Kecuali Hutan														-	[illegible]
	- Kontruksi dalam Pkrjn Tan														-	[illegible]
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]													-	[illegible]
	- Aset Lain - Lain														-	[illegible]
	- Hasil Pengadaan														-	[illegible]
	- Pemerintah	[illegible]	[illegible]				[illegible]								[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LANCARNYA	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	[illegible]	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
47	Dinas Kesehatan Pangan dan Gizi															[illegible]
	- Tanah	[illegible]							[illegible]						[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]													-	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan														-	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi														-	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya														-	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan								[illegible]						[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya														-	[illegible]
	- Tanaman Lain Kecuali Hutan														-	[illegible]
	- Kontruksi dalam Pkrjn Tan														-	[illegible]
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]		[illegible]											[illegible]	[illegible]
	- Aset Lain - Lain														-	[illegible]
	- Hasil Pengadaan														-	[illegible]
	- Pemerintah														[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET LANCARNYA	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	TOTAL ASET	[illegible]	-	[illegible]	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Tanah	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Peralatan dan Mesin	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Gedung dan Bangunan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Jalan Jaringan dan Irigasi	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Tetap Lainnya	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Konstruksi Dalam Pengerjaan	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	JUMLAH ASET TETAP	[illegible]	[illegible]	-	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Aset Lainnya	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Tanaman Lain Kecuali Hutan	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]
	- Kontruksi dalam Pkrjn Tan	[illegible]	-	-	-	-	-	[illegible]	-	-	-	-	-	-	[illegible]	[illegible]
	- Aset Tidak Berwujud	[illegible]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	[illegible]

LAMPIRAN C dan E

REKAP ASET TETAP
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

No	NAMA SKPD	Saldo Per 31 Desember 2024	Mutasi/Penyesuaian												Saldo Per 31 Desember 2025
			Tambah			Kurang			Koreksi Pembukuan					Total Penambahan	
		Nilai Perolehan	Mutasi Antar Unit	Penyelesaian	Reklas Aset	Mutasi Antar Unit	Hapus Aset (penghapusan)	Reklas Aset (penghapusan)	Reklas Aset Tetap - Tanah	Koreksi Perolehan	Koreksi Penyusutan/ Penghapusan	Koreksi Nilai	Reklas ke Aset Non-Produktif	Koreksi Nilai Aset tahun sebelumnya yang baru diketahui pada tahun 2025	Nilai Perolehan	Nilai Perolehan
1	2	3	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
	- Tanah Lain - Lain	114.791.286.043,86	184.860.000,00	71.696.764.268,12	-	-	-	-	110.580.000,00	95.161.229,38	-	-	-	-	72.114.475.041,62	186.979.862.610,55
	- Tanah Kategori Sumber	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Tanah Bangunan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Peralatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH ASET LAINNYA	187.233.581.428,86	184.860.000,00	71.696.764.268,12	-	-	-	275.978.700,00	95.161.229,38	-	-	-	-	-	72.212.852.395,62	259.418.862.957,50
	TOTAL ASET	7.141.766.647.197,87	40.909.311.940,00	71.696.764.268,12	15.411.112.367,50	6.401.257.990,00	87.934.514.324,57	44.672.559.956,24	7.861.196.793,24	6.956.497.302,00	3.199.000.000,00	184.035.104.900,00	22.411.710.687,00	921.472.286,00	812.840.369.603,44	7.995.488.199.397,31

LAMPIRAN C=LK 18

ASET TETAP - TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							
			Penambahan							
			Realisasi Belanja Modal LRA	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain	Reklas KIB	Koreksi Pembukuan			Total Penambahan
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang memenuhi pencatuan aset 2025			Bukan Hasil Inventarisasi	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Pecah Data	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	137.737.996.266,00	40.630.300,00	-	-	-	50.000.000,00	-	-	90.630.300,00
2	Dinas Kesehatan	4.894.598.282,94	-	-	973.440.000,00	-	-	-	-	973.440.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	193.185.190.416,90	-	-	-	6.400.257.500,00	-	-	6.400.257.504,00	12.800.515.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	874.856.885.732,00	3.130.535.217,00	106.104.490.220,00	1.038.000.000,00	-	11.943.700.728,00	2.195.500.000,00	141.599.588.000,00	266.031.814.185,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	296.369.000,00	-	-	8.429.685.037,00	-	-	-	-	8.429.685.037,00
8	Dinas Sosial	823.248.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	3.521.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.491.721.338,00	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	10.007.356.172,52	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.103.479.806,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	8.152.021.780,00	-	-	-	-	-	-	1.475.350.000,00	1.475.350.000,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	824.739.088,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	33.566.439.601,54	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	2.229.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	317.207.125.567,00	-	-	3.521.000.000,00	-	-	-	-	3.521.000.000,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.342.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	367.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN Cat.K 15

ASET TETAP - TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							Saldo Per 31 Desember 2025
			Penguranga			Koreksi Pembukuan			Total Penguranga	
			Mutasi ke SKPD Lain	Reklas Pencatatan Belanja	Reklas Aset Belum Hasil Inventarisasi	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Pecah Data	Harga Perolehan	Harga Perolehan
		Harga Perolehan								
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan	137.757.596.266,00	-	-	75.264.000,00	49.450.300,00	-	-	124.914.300,00	137.732.732.266,00
2	Dinas Kesehatan	4.894.598.282,94	1.058.000.000,00	-	-	-	-	-	1.058.000.000,00	4.810.036.282,94
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	193.183.130.416,00	-	-	-	-	-	6.400.257.500,00	6.400.257.500,00	199.583.387.916,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	874.956.889.752,00	9.089.682.417,00	550.000,00	-	6.132.000.000,00	2.195.500.000,00	141.399.388.000,00	159.317.521.037,00	901.371.376.900,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	296.569.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.726.052.037,00
8	Dinas Sosial	825.248.900,00	-	-	-	-	-	-	-	825.248.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	3.521.000.000,00	3.521.000.000,00	-	-	-	-	-	3.521.000.000,00	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	7.491.721.338,00	-	-	-	-	-	-	-	7.491.721.338,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	10.007.356.172,52	-	-	-	-	-	-	-	10.007.356.172,52
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.103.479.808,00	-	-	-	-	-	-	-	2.103.479.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	8.132.821.780,80	-	-	822.069.990,45	-	-	1.475.330.000,00	2.297.419.990,45	7.310.751.879,53
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	924.739.088,00	-	-	-	-	-	-	-	924.739.088,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	32.566.438.601,54	-	-	-	-	-	-	-	32.566.438.601,54
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	2.228.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.228.000.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	217.207.123.567,00	266.363.000,00	-	39.938.500.000,00	-	-	-	40.193.060.000,00	180.553.065.567,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3.342.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.342.000.000,00
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Banjejaw	367.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	367.000.000,00

ASET TETAP - TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

LAMPIRAN CaLK 1f

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							
			Penambahan							
			Realisasi Belanja Modal LRA	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain	Pelabel KIB	Koreksi Pembukuan			Total Penambahan
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025			Belum Hasil Inventarisasi	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Pecah Data	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Kecamatan Cipeundeuy	13.440.000,00	-	-	266.560.000,00	-	-	-	-	266.560.000,00
33	Kecamatan Cununghalu	41.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	2.170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	279.899.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	771.013.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	71.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Cihampelas	208.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	1.004.147.188,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cilili	1.176.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	2.400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	625.631.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cikalongkulon	307.833.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.908.498.868.872,00	2.190.185.527,00	106.104.450.230,00	142.48.483.357,00	6.490.257.500,00	11.993.700.720,00	2.195.500.000,00	149.475.195.500,00	293.598.812.522,00

LAMPIRAN CaLK 15

ASET TETAP - TANAH
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							Saldo Per 31 Desember 2025
			Penguranga							
			Mutasi ke SKPD Lain	Koreksi Penyusutan Belanja	Koreksi Aset	Koreksi Pembukuan			Total Pengurangan	
		Harga Perolehan			Bukan Hasil Inventarisasi	Koreksi Penyusutan	Kapitalisasi/Penggabungan	Pecah Data	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
32	Kecamatan Cipatujah	13.440.000,00	13.440.000,00	-	-	-	-	-	13.440.000,00	266.560.000,00
33	Kecamatan Cikalong	41.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	41.000.000,00
34	Kecamatan Pancatengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lumbung	2.170.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.170.000.000,00
36	Kecamatan Sukahurip	279.898.500,00	-	-	-	-	-	-	-	279.898.500,00
37	Kecamatan Cigalontang	771.013.600,00	-	-	-	-	-	-	-	771.013.600,00
38	Kecamatan Leuwisari	71.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	71.000.000,00
39	Kecamatan Salawu	208.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	208.000.000,00
40	Kecamatan Puspahiang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Tanjungjaya	1.004.147.388,00	-	-	-	-	-	-	-	1.004.147.388,00
42	Kecamatan Sukaraja	1.176.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.176.000.000,00
43	Kecamatan Salopa	2.400.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	2.400.000.000,00
44	Kecamatan Jatiwaras	625.631.000,00	-	-	-	-	-	-	-	625.631.000,00
45	Kecamatan Cibalong	307.831.100,00	-	-	-	-	-	-	-	307.831.100,00
46	Kecamatan Bantarkalong	23.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	23.000.000,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.549.698.868.872,00	14.241.683.037,00	550.000,00	49.025.833.908,45	6.181.650.300,00	2.195.580.000,00	149.475.195.500,00	212.927.412.737,45	1.589.369.463.656,55

LAMPIRAN CaLK 16

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 31 Januari 2025	Mutasi 2025						
			Penambahan						
			Realisasi Belanja Modal LRA		Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Utang Belanja	Reklas Pencatatan Belanja	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025	Bagian dari Belanja Modal yang digunakan untuk membayar hutang 2024					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	586.924.480.671,43	41.728.940.529,00	-	-	-	187.603.600,00	-	477.293.030,00
2	Dinas Kesehatan	491.043.275.863,92	32.037.000.335,00	538.702.016,00	66.891.375,00	108.733.362,00	2.791.617.600,00	74.657.635,00	296.290.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	46.118.596.495,16	1.925.418.183,00	-	-	-	2.192.067.227,00	-	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.887.476.543,38	527.875.103,00	-	-	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.239.447.129,20	451.106.287,00	-	-	-	98.440.849,00	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.567.233,20	372.088.936,00	-	398.490.729,00	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.743.766.033,57	1.328.321.054,00	-	333.000.000,00	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	3.800.705.866,20	466.664.000,00	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	15.819.923.502,11	146.413.400,00	-	-	-	-	-	1.265.000.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	14.667.802.799,00	525.707.015,00	-	-	-	-	-	541.750.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.517.549.856,55	2.799.440.062,00	-	233.949.380,00	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	30.519.889.222,00	3.537.265.849,00	-	-	-	386.461.296,00	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.976.352.546,21	1.075.739.253,00	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.492.925.743,40	178.085.175,00	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	70.493.026.820,62	2.791.284.447,00	-	-	-	-	-	2.813.230.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.786.354.966,53	9.982.064.166,00	-	-	-	-	-	23.600.000,00
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	2.946.096.949,00	243.344.509,00	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	6.141.529.568,00	112.060.000,00	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.243.096.271,00	654.781.210,00	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.835.739.808,00	880.771.472,30	-	-	-	-	-	92.492.500,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	13.900.802.367,00	2.945.152.415,30	-	26.856.430,00	-	331.646.800,00	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.478.982.532,00	330.739.000,20	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.215.879.638,86	310.590.400,20	-	-	-	166.647.741,00	-	44.899.000,00
24	Sekretariat Daerah	56.584.611.235,46	1.518.754.308,20	-	-	-	-	-	679.139.167,00
25	Sekretariat DPRD	12.726.442.224,00	16.141.901.634,20	-	3.862.800,00	-	-	-	17.792.682.737,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.861.639.265,00	151.581.600,00	-	-	-	-	-	210.578.300,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.005.952.881,37	2.039.552.530,00	-	-	-	-	3.708.446.000,00	1.051.401.266,00
28	Badan Pendapatan Daerah	11.101.634.051,01	1.327.723.130,00	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.267.148.410,00	264.770.076,00	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	6.199.963.293,00	625.310.175,00	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	1.313.618.802,00	14.978.600,00	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.477.556.290,03	18.656.300,00	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	1.289.546.111,00	37.606.560,00	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	1.579.868.549,00	20.220.900,00	-	-	-	-	-	12.474.900,00
35	Kecamatan Lembang	1.607.287.882,03	149.141.300,00	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	1.222.086.759,00	35.030.300,00	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	1.296.433.562,00	64.070.350,00	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	1.449.059.609,00	15.715.800,00	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Cikalongwetan	1.626.208.772,00	75.686.800,00	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	1.220.448.474,00	54.950.900,00	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	1.568.032.020,00	72.412.000,00	-	-	-	-	-	15.100.000,00
42	Kecamatan Cililin	1.468.660.578,00	71.846.400,00	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	1.567.755.181,00	81.759.600,00	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	1.591.700.162,03	78.204.300,00	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	1.529.323.752,00	105.500.000,00	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	1.346.509.391,20	127.797.900,00	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.526.990.742,20	66.046.400,00	-	-	-	-	-	-
	Total	1.568.627.766.495,27	128.565.870.532,08	538.702.016,00	1.063.050.734,00	108.733.362,00	6.174.485.113,00	3.783.103.635,00	25.315.914.800,00

LAMPIRAN CaLK 16

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025								
			Penambahan								
			Reklas KIB		Reklas Aset		Koreksi Pembukuan		Koreksi Pembukuan		Total Penambahan
		Harga Perolehan	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Pecah Data	Harga Perolehan
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan	586.924.480.671,43	-	-	-	-	548.836.142,00	-	-	-	42.942.677.291,00
2	Dinas Kesehatan	491.049.275.863,02	-	-	-	-	3.854.992.524,00	-	-	-	39.768.884.847,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	46.118.596.495,16	-	-	-	136.500.000,00	-	-	-	-	4.254.985.410,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.887.476.543,38	-	-	-	-	154.627.871,62	-	-	-	682.502.974,62
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.239.447.129,00	-	-	-	-	25.413.000,00	-	-	-	574.960.136,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.567.233,00	-	-	-	-	106.600.000,00	-	-	-	877.179.665,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.743.766.033,97	-	-	-	-	22.115.500,00	-	-	-	1.683.436.594,00
8	Dinas Sosial	3.800.705.866,00	-	-	-	-	-	-	-	-	466.664.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja	15.819.923.502,11	-	-	-	-	18.697.200,00	-	-	-	1.430.110.600,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	14.667.802.793,00	-	-	-	-	20.750.000,00	-	-	-	1.038.207.015,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.517.549.856,65	-	-	-	-	-	-	-	-	3.033.389.440,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	30.519.889.222,00	-	-	-	-	36.700.000,00	-	-	-	3.960.427.145,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.976.352.546,31	-	-	-	-	267.674.000,00	-	-	-	1.343.413.253,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.492.925.743,50	-	-	-	-	23.082.800,00	-	-	-	201.167.975,00
15	Dinas Perhubungan	70.493.026.820,62	-	-	-	-	46.324.800,00	-	-	-	5.650.839.247,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.786.354.966,33	-	-	-	-	745.070.899,22	-	-	-	10.750.735.065,22
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	2.946.096.949,00	-	-	-	-	-	-	-	-	243.344.500,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	6.141.529.568,00	-	-	-	-	113.925.000,00	-	-	-	225.985.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.243.096.271,00	-	-	-	-	186.901.250,00	-	-	-	841.682.500,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.835.759.808,00	-	-	-	-	106.850.000,00	-	-	-	1.080.113.972,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	13.900.802.367,00	-	-	-	-	95.206.054,00	-	-	-	3.418.861.759,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.478.987.522,00	-	-	-	-	43.588.680,00	-	-	-	374.327.680,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.215.879.638,86	-	-	-	-	86.877.700,00	-	-	-	609.014.841,00
24	Sekretariat Daerah	56.584.611.235,46	-	-	-	-	17.500.000,00	-	-	-	2.215.373.535,00
25	Sekretariat DPRD	12.726.442.224,00	-	-	-	-	132.883.000,00	-	-	-	34.071.330.231,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.861.639.265,00	-	-	-	-	19.393.000,00	-	-	-	381.552.900,00
27	Bagian Keuangan dan Aset Daerah	20.003.952.881,37	-	-	-	-	124.312.745,00	-	-	-	6.923.712.541,00
28	Badan Pendapatan Daerah	11.101.634.051,01	-	-	-	-	23.444.798,00	-	-	-	1.351.167.928,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.267.148.410,00	-	-	-	-	110.400.000,00	-	-	-	375.170.076,00
30	Inspektorat Daerah	6.199.963.293,00	-	-	-	-	17.500.000,00	-	-	-	642.810.175,00
31	Kecamatan Batujajar	1.313.618.802,00	-	-	-	-	16.875.000,00	-	-	-	31.853.600,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.477.556.290,03	-	-	-	-	-	-	-	-	18.656.300,00
33	Kecamatan Gununghalu	1.289.546.111,00	-	-	-	-	-	-	-	-	37.606.500,00
34	Kecamatan Padalarang	1.579.868.549,00	-	-	-	-	9.000.000,00	-	-	-	79.220.900,00
35	Kecamatan Lembang	1.607.287.882,03	-	-	-	-	5.000.000,00	-	-	-	166.615.300,00
36	Kecamatan Sindangkerta	1.222.086.759,00	-	-	-	-	-	-	-	-	35.030.300,00
37	Kecamatan Cisarua	1.296.433.562,00	-	-	-	-	3.050.000,00	-	-	-	67.120.350,00
38	Kecamatan Ngamprah	1.449.039.699,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.715.800,00
39	Kecamatan Cikalongwetan	1.626.208.772,00	-	-	-	-	-	-	-	-	75.686.800,00
40	Kecamatan Cipongkor	1.220.448.474,00	-	-	-	-	-	-	-	-	54.950.900,00
41	Kecamatan Saguling	1.568.032.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.412.800,00
42	Kecamatan Cililin	1.468.660.578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	86.946.400,00
43	Kecamatan Parongpong	1.567.755.181,00	-	-	-	-	-	-	-	-	81.759.600,00
44	Kecamatan Cipatat	1.591.700.162,03	-	-	-	-	-	-	-	-	78.204.300,00
45	Kecamatan Cihampelas	1.529.323.752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	109.500.000,00
46	Kecamatan Rongga	1.346.509.391,00	-	-	-	-	-	-	-	-	127.797.900,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.526.990.742,00	-	-	-	-	15.445.000,00	-	-	-	81.491.401,00
	Total	1.568.627.766.495,27	-	-	-	136.500.000,00	6.999.036.963,84	-	-	-	172.684.596.655,84

LAMPIRAN CaLK 16

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025								
			Pengurangan								
							Reklas KIB		Reklas Aset		Koreksi Pembukuan
		Harga Perolehan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan	Hibah	Reklas Pencatatan Belanja	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	Dinas Pendidikan	586.924.480.671,43	700.218.800,00	-	-	1.069.758.300,00	-	-	37.094.388.741,35	-	548.836.142,00
2	Dinas Kesehatan	491.043.275.863,02	434.766.657,00	-	-	456.991.808,00	-	-	9.336.556.886,08	749.164.356,00	3.854.992.524,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	46.118.596.495,16	17.712.524.927,00	-	-	-	-	-	2.100.488.898,33	136.500.000,00	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	8.887.476.543,38	-	-	-	-	-	-	1.086.865.409,63	-	154.627.871,62
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.239.447.129,00	-	-	-	-	-	-	75.863.949,00	-	25.413.000,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.567.233,00	-	-	-	-	-	-	438.079.000,00	-	106.600.000,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17.743.766.033,97	-	-	-	-	-	-	203.525.145,00	-	22.115.500,00
8	Dinas Sosial	3.800.705.866,00	-	-	-	-	-	-	628.724.848,97	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	15.819.923.502,11	-	-	-	-	-	-	856.578.801,43	160.971.237,40	18.697.200,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	14.667.802.793,00	750.415.666,00	-	-	-	-	-	2.095.016.886,00	118.120.000,00	20.750.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.517.549.856,65	-	-	-	-	-	-	2.076.300.868,78	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	30.519.889.222,00	-	-	-	-	-	-	2.569.973.013,50	-	36.700.000,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.976.352.546,31	-	-	-	-	-	-	3.765.106.614,05	-	267.674.000,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.492.925.743,50	-	-	-	-	-	-	419.139.459,34	-	23.082.800,00
15	Dinas Perhubungan	70.493.026.820,62	-	-	-	-	-	-	1.681.256.670,59	-	46.324.800,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.786.354.966,33	88.544.500,00	-	-	442.500.000,00	-	-	604.101.820,85	367.396.072,47	745.070.899,22
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	2.946.096.949,00	-	-	-	-	-	-	251.857.067,00	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	6.141.529.568,00	44.899.000,00	-	-	-	-	-	682.417.930,49	-	113.925.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.243.096.271,00	-	-	-	-	-	-	-	342.932.690,00	186.901.250,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.835.759.808,00	-	-	-	-	-	-	2.701.976.533,51	-	106.850.000,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	13.900.802.367,00	-	-	-	-	-	-	1.076.816.894,00	1.062.075.400,00	95.206.054,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.478.982.522,00	-	-	-	-	-	-	307.157.550,00	-	43.588.680,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.215.879.638,86	-	-	-	-	-	-	1.102.582.678,95	-	86.877.700,00
24	Sekretariat Daerah	56.584.611.235,46	773.587.030,00	-	-	-	-	-	9.067.200.760,35	1.785.003.975,00	17.500.000,00
25	Sekretariat DPRD	12.726.442.224,00	23.600.000,00	-	-	-	-	-	577.661.400,00	-	132.883.000,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.861.639.265,00	-	-	-	-	-	-	1.009.754.933,00	89.353.500,00	19.393.000,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.005.952.881,37	4.566.878.510,00	-	-	-	-	-	336.133.181,00	3.961.711.450,94	124.312.745,00
28	Badan Pendapatan Daerah	11.101.634.051,01	28.083.000,00	-	-	-	-	-	1.269.073.264,26	-	23.444.798,00
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.267.148.470,00	-	-	-	-	-	-	819.698.015,00	321.020.225,00	110.400.000,00
30	Inspektorat Daerah	6.199.963.293,00	54.895.500,00	-	-	-	-	-	716.400.460,00	-	17.500.000,00
31	Kecamatan Batujajar	1.313.618.802,00	-	-	-	-	-	-	264.964.510,00	-	16.875.000,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.477.556.290,03	-	-	-	-	-	-	167.412.880,03	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	1.289.546.111,00	-	-	-	-	-	-	119.294.950,00	-	-
34	Kecamatan Padalarang	1.579.868.549,00	-	-	-	-	-	-	200.756.200,00	-	9.000.000,00
35	Kecamatan Lembang	1.607.287.882,03	-	-	-	-	-	-	351.444.280,03	-	5.000.000,00
36	Kecamatan Sindangkerta	1.222.086.759,00	-	-	-	-	-	-	101.643.600,00	-	-
37	Kecamatan Cisarua	1.296.433.562,00	-	-	-	-	-	-	98.881.000,00	-	3.050.000,00
38	Kecamatan Ngamprah	1.449.059.699,00	-	-	-	-	-	-	120.876.000,00	-	-
39	Kecamatan Cikalongwatan	1.626.208.772,00	-	-	-	-	-	-	82.926.600,00	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	1.220.448.474,00	-	-	-	-	-	-	55.325.700,00	3.500.000,00	-
41	Kecamatan Saguling	1.568.032.020,00	-	-	-	-	-	-	102.540.000,00	-	-
42	Kecamatan Cililin	1.468.660.578,00	-	-	-	-	-	-	167.525.641,00	-	-
43	Kecamatan Parongpong	1.567.755.131,00	-	-	-	-	-	-	271.461.164,00	-	-
44	Kecamatan Cipatat	1.591.700.152,03	-	-	-	-	-	-	215.816.979,03	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	1.529.323.752,00	-	-	-	-	-	-	233.547.450,00	-	-
46	Kecamatan Rongga	1.346.509.391,00	137.500.000,00	-	-	-	-	-	79.399.700,00	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.526.990.742,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15.445.000,00
	Total	1.568.627.766.495,27	25.315.914.000,00	-	-	1.949.250.108,00	-	-	87.584.514.334,55	9.097.748.906,81	6.999.036.963,84

LAMPIRAN CaLK 16

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025						Saldo Per 31 Desember 2025
			Pengurangan					Total Pengurangan	
		Harga Perolehan	Koreksi Pembukuan: Koreksi Pencatatan	Koreksi Pembukuan: Kapitalisasi/ Penggabungan	Pecah Data	Reklas ke Ekstrakomptabel	Koreksi Saldo Awal atas perolehan aset tahun 2024	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	29	30	31	32	33	34	35
1	Dinas Pendidikan	586.924.480.671,43	-	-	-	1.238.172.235,00	-	40.731.374.218,35	589.135.783.744,08
2	Dinas Kesehatan	491.043.275.863,02	-	-	-	246.808.179,88	538.702.016,00	15.617.982.436,96	515.194.178.273,06
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	46.118.596.495,16	-	-	-	-	-	19.949.513.825,33	30.424.068.079,83
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	8.887.476.543,38	-	-	-	-	-	1.241.493.281,25	8.328.486.236,75
5	Satuan Polisi Pamong Praja	5.239.447.129,00	-	-	-	561.100,00	-	101.838.049,00	5.712.569.216,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	10.405.567.233,00	-	-	-	-	-	544.679.000,00	10.738.067.898,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	12.743.766.033,97	-	-	-	2.468.200,00	-	228.108.845,00	19.199.093.782,97
8	Dinas Sosial	3.800.705.866,00	-	-	-	-	-	628.724.848,97	3.638.645.017,03
9	Dinas Tenaga Kerja	15.819.923.502,11	-	-	-	944.600,00	-	1.037.191.838,83	16.212.842.263,28
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	14.667.802.793,00	-	-	-	11.479.300,00	-	2.995.781.852,00	12.760.227.956,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	28.517.549.856,65	-	-	-	21.822.500,00	-	2.098.123.368,78	29.452.815.927,87
12	Dinas Lingkungan Hidup	30.519.889.222,00	-	-	-	-	-	2.606.673.013,50	31.873.643.353,50
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	17.976.352.546,31	-	-	-	-	-	4.032.780.614,05	15.286.985.185,26
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.492.925.743,50	-	-	-	-	-	442.222.259,34	4.251.871.459,16
15	Dinas Perhubungan	70.493.026.820,62	-	-	-	44.215.800,00	-	1.771.797.270,59	74.372.068.797,03
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	15.786.354.966,33	-	-	-	2.497.500,00	-	2.250.110.792,54	24.286.979.239,01
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	2.946.096.949,00	-	-	-	-	-	251.857.067,00	2.937.584.391,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	6.141.529.568,00	-	-	-	-	-	841.241.930,49	5.526.272.637,51
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	3.243.096.271,00	-	-	-	-	-	529.833.940,00	3.554.944.831,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	9.835.759.808,00	-	-	-	-	-	2.808.826.533,51	8.107.047.246,49
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	13.900.802.367,00	-	-	-	147.385.800,00	-	2.981.484.148,00	14.938.179.978,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	6.478.982.522,00	-	-	-	311.400,00	-	351.057.630,00	6.502.252.572,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	9.215.879.638,86	-	-	-	-	-	1.189.460.378,95	8.635.434.100,91
24	Sekretariat Daerah	56.584.611.235,46	144.927.500,00	-	-	2.192.000,00	-	11.790.411.265,35	47.009.573.505,11
25	Sekretariat DPRD	12.726.442.224,00	-	-	-	-	-	734.144.400,00	46.063.628.055,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.861.639.265,00	-	-	-	-	-	1.118.501.433,00	8.124.690.732,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	20.005.952.881,37	29.879.500,00	-	-	-	-	9.018.915.786,94	17.910.749.635,43
28	Badan Pendapatan Daerah	11.101.634.051,01	-	-	-	-	-	1.320.601.062,26	11.132.200.916,75
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7.267.148.410,00	-	-	-	-	-	1.251.118.240,00	6.391.200.246,00
30	Inspektorat Daerah	6.199.963.293,00	-	-	-	-	-	788.795.960,00	6.053.977.508,00
31	Kecamatan Batujajar	1.313.618.802,00	-	-	-	-	-	281.839.510,00	1.063.632.892,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.477.556.290,03	-	-	-	-	-	167.412.880,03	1.328.799.710,00
33	Kecamatan Gununghalu	1.289.546.111,00	-	-	-	2.548.500,00	-	121.843.450,00	1.205.309.161,00
34	Kecamatan Padalarang	1.579.868.549,00	-	-	-	-	-	209.756.200,00	1.449.333.249,00
35	Kecamatan Lembang	1.607.287.882,03	-	-	-	28.543.200,00	-	384.987.480,03	1.388.915.702,00
36	Kecamatan Sindangkerta	1.222.086.759,00	-	-	-	-	-	101.643.600,00	1.155.473.459,30
37	Kecamatan Cisarua	1.296.433.562,00	-	-	-	-	-	101.931.000,00	1.261.622.912,30
38	Kecamatan Ngamprah	1.449.059.699,00	-	-	-	-	-	120.876.000,00	1.343.899.499,30
39	Kecamatan Cikalongwetan	1.626.208.772,00	-	-	-	-	-	82.926.600,00	1.618.968.972,00
40	Kecamatan Cipongkor	1.220.448.474,00	-	-	-	-	-	58.825.700,00	1.216.573.674,00
41	Kecamatan Saguling	1.568.032.020,00	-	-	-	-	-	102.540.000,00	1.537.904.020,00
42	Kecamatan Cililin	1.468.660.578,00	-	-	-	46.065.006,00	-	213.590.641,00	1.342.016.337,00
43	Kecamatan Parongpong	1.567.755.181,00	-	-	-	-	-	271.461.164,00	1.378.053.617,00
44	Kecamatan Cipatat	1.591.700.162,03	-	-	-	-	-	215.816.979,03	1.454.087.483,00
45	Kecamatan Cihampelas	1.529.323.752,00	-	-	-	-	-	233.547.450,00	1.405.276.302,00
46	Kecamatan Rongga	1.346.509.391,00	-	-	-	-	-	216.899.700,00	1.257.407.591,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.526.990.742,00	-	-	-	-	-	15.445.000,00	2.593.037.143,00
	Total	1.568.627.766.495,27	174.807.000,00	-	-	1.576.016.314,88	538.702.016,00	133.555.988.644,08	1.607.766.374.507,03

LAMPIRAN CaLK 17

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025						
			Penambahan						
			Realisasi Belanja Modal LRA						
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025	Bagian dari Belanja Modal yang digunakan untuk membayar hutang 2024	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Utang Belanja	Reklas Pencatatan Belanja	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	952.148.698.337,68	23.005.352.884,00	-	-	-	-	-	-
2	Dinas Kesehatan	333.238.334.664,80	11.996.152.536,00	282.770.270,00	3.419.958.238,54	20.104.730,00	456.991.808,00	-	-
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.686.484.428,61	20.280.569.096,00	-	-	-	-	-	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.932.529.533,72	1.593.571.875,00	-	-	-	699.117.103,00	7.498.200.032,00	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	388.912.200,00	172.229.943,00	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.620.718.133,00	-	-	-	-	-	-	9.723.041.446,00
8	Dinas Sosial	977.854.000,00	388.115.189,00	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	1.324.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.921.961.988,00	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.334.798.745,75	332.372.480,00	-	-	-	-	-	199.539.200,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.601.795.639,00	581.851.246,00	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	103.399.411.301,66	4.998.112.157,00	-	101.770.926,00	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.729.361.341,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.398.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.684.650.693,00	652.991.559,00	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	29.532.208.411,76	1.475.368.598,00	-	407.956.490,00	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.708.537.752,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.970.061.693,00	166.647.741,00	-	148.351.047,00	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	73.551.975.345,00	-	-	-	-	-	-	6.431.603.228,00
25	Sekretariat DPRD	154.195.966.053,66	655.892.202,00	-	-	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	2.684.560.400,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.244.686.622,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	887.445.960,00	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.373.166.850,00	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gunung Halu	1.779.026.860,00	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	238.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	7.600.664.802,00	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	1.632.603.601,00	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	1.150.516.310,00	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	1.471.677.893,00	-	-	-	-	80.114.600,00	-	-
39	Kecamatan Cihaleugeun	830.816.660,00	81.102.621,00	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	2.570.359.469,00	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	4.540.133.560,00	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cililin	22.819.584.145,00	149.321.594,00	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	1.523.568.300,00	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	2.223.117.989,00	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	1.430.534.673,00	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	1.401.812.503,00	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2.076.266.396.458,64	66.530.362.811,00	282.770.270,00	4.078.036.701,54	20.104.730,00	1.236.223.511,00	7.498.200.032,00	19.038.744.274,00

LAMPIRAN CaLK 17

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025								
			Penambahan								
			Reklas KIB		Reklas Aset		Koreksi Pembukuan				Total Penambahan
		Harga Perolehan	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Perolehan Data	Harga Perolehan
1	2	3	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Dinas Pendidikan	952.148.698.337,68	-	-	-	-	-	-	-	-	23.005.352.884,00
2	Dinas Kesehatan	333.238.334.664,80	-	-	-	-	-	182.770.270,00	-	-	16.358.747.852,54
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.686.484.428,61	-	-	-	-	-	-	-	-	20.280.969.086,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	29.932.529.533,72	-	-	-	-	-	-	-	-	9.790.589.010,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	388.912.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	122.229.943,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.620.718.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-	9.723.041.446,00
8	Dinas Sosial	977.854.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	388.115.189,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.324.761.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.921.961.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.334.798.745,75	-	-	-	-	-	-	-	-	332.372.480,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.601.795.639,00	-	-	-	-	-	-	-	-	781.400.446,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	103.399.411.301,66	-	-	-	-	-	-	-	-	5.099.883.083,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.729.361.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.398.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	652.991.859,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.684.650.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.883.524.988,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	29.532.208.411,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.708.537.752,00	-	-	-	-	-	-	-	-	314.998.788,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.970.061.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	73.551.975.345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	7.087.495.530,00
25	Sekretariat DPRD	154.195.966.053,66	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.560.400,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.244.686.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	887.445.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.373.166.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	1.779.026.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	238.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	7.600.664.802,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	1.832.603.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	1.150.516.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	1.471.677.893,00	-	-	-	-	-	-	-	-	161.117.221,00
39	Kecamatan Cikalongwetan	830.816.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	2.570.359.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	4.540.133.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-	149.821.594,00
42	Kecamatan Cililin	22.819.584.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	1.523.568.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	2.223.117.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	1.430.534.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	1.401.812.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2.076.266.396.458,64	-	-	-	-	-	182.770.270,00	-	-	98.867.211.799,54

LAMPIRAN CaLK 17

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							
			Pengurangan				Reklas KIB		Reklas Aset	
		Harga Perolehan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan	Hibah	Reklas Pencatatan Belanja	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi
1	2	3	20	21	22	23	24	25	26	27
1	Dinas Pendidikan	952.148.698.337,68	-	-	-	1.320.097.755,00	-	-	-	246.036.543,00
2	Dinas Kesehatan	333.238.334.664,80	-	-	-	2.007.804.805,00	-	-	-	3.445.446.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.686.484.428,61	16.354.183.874,00	-	-	4.126.224.412,00	-	-	-	-
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	29.932.529.533,72	-	-	-	1.245.446.718,50	-	-	-	-
5	Satuan Polisi Pamong Praja	388.912.200,00	-	-	-	98.440.849,00	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.620.718.133,00	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	977.854.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	1.324.761.000,00	1.248.886.000,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBPPA)	5.921.961.988,00	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.334.798.745,75	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.601.795.639,00	-	-	-	386.461.296,00	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	103.399.411.301,66	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.729.361.341,00	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.308.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.684.650.693,00	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	29.532.208.411,76	-	-	-	351.646.800,00	-	-	-	6.407.323.158,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.708.537.752,00	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.970.061.693,00	-	-	-	166.647.741,00	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	73.551.975.345,00	1.435.674.400,00	-	-	-	-	-	-	89.499.000,00
25	Sekretariat DPRD	154.193.966.053,66	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.244.686.622,00	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Banjaran	887.445.960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.373.166.850,00	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	1.779.026.860,00	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	238.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	7.600.664.802,00	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	1.832.603.601,00	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	1.150.516.310,00	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	1.471.677.893,00	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Cikalongwetan	830.816.660,00	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	2.570.359.469,00	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	4.540.133.560,00	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cililin	22.819.584.145,00	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	1.523.568.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	2.223.117.989,00	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	1.430.534.673,00	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	1.401.812.503,00	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2.076.266.396.458,64	19.038.744.274,00	-	-	9.702.870.376,50	-	-	-	10.188.304.701,00

LAMPIRAN CaLK 17

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 31 Januari 2025	Mutasi 2025							Saldo Per 31 Desember 2025
			Pengurangan							
			Koreksi Pembukuan							
		Harga Perolehan	Reklas Kode Barang	Koreksi Pencatatan	Kapitalisasi/Penggabungan	Perubahan Data	Reklas ke Ekstrakomptabel	Koreksi Saldo Awal atas perolehan aset tahun 2024	Total Pengurangan Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	28	29	30	31	32	33	34	35
1	Dinas Pendidikan	952.148.608.337,68	-	-	-	-	-	-	1.566.134.208,00	973.587.916.923,58
2	Dinas Kesehatan	333.238.334.664,90	-	-	-	-	-	282.770.270,00	5.736.021.075,00	343.861.061.482,34
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	271.686.484.428,61	-	-	-	-	-	-	20.480.508.286,00	271.486.945.228,51
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	29.932.529.533,72	-	-	-	-	9.425.053,00	-	1.254.871.771,50	38.468.246.772,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja	388.912.200,00	-	-	-	-	-	-	98.440.849,00	462.701.294,50
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	2.620.718.133,00	-	-	-	-	-	-	-	12.343.759.579,00
8	Dinas Sosial	977.854.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.365.969.189,00
9	Dinas Tenaga Kerja	1.324.761.000,00	-	-	-	-	-	-	1.248.886.000,00	75.875.000,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	5.921.961.988,00	-	-	-	-	-	-	-	5.921.961.988,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	17.334.798.745,75	-	-	-	-	-	-	-	17.667.171.225,75
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.601.795.639,00	-	-	-	-	-	-	386.461.296,00	3.996.734.789,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	103.399.411.301,66	-	-	-	-	-	-	-	108.499.294.384,66
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.729.361.341,00	-	-	-	-	-	-	-	1.729.361.341,00
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	4.398.759.000,00	-	-	-	-	-	-	-	4.398.759.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	5.684.650.693,00	-	-	-	-	-	-	-	6.337.642.552,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	28.532.208.411,76	-	-	-	-	-	-	6.758.969.958,00	24.656.763.441,76
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.708.537.752,00	-	-	-	-	-	-	-	1.708.537.752,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	27.970.061.693,00	-	-	-	-	-	-	166.647.741,00	28.118.412.740,00
24	Sekretariat Daerah	73.551.975.345,00	-	-	-	-	-	-	1.525.173.400,00	72.026.801.945,00
25	Sekretariat DPRD	154.195.966.053,66	-	-	-	-	-	-	-	161.283.461.583,66
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	2.684.560.400,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.244.686.622,00	-	-	-	-	-	-	-	1.244.686.622,00
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Banjarsari	887.445.960,00	-	-	-	-	-	-	-	887.445.960,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	1.373.166.850,00	-	-	-	-	-	-	-	1.373.166.850,00
33	Kecamatan Gununghaliu	1.779.026.860,00	-	-	-	-	-	-	-	1.779.026.860,00
34	Kecamatan Padalarang	238.900.000,00	-	-	-	-	-	-	-	238.900.000,00
35	Kecamatan Lembang	7.600.664.802,00	-	-	-	-	-	-	-	7.600.664.802,00
36	Kecamatan Sindangkerta	1.832.603.601,00	-	-	-	-	-	-	-	1.832.603.601,00
37	Kecamatan Cisarua	1.150.516.310,00	-	-	-	-	-	-	-	1.150.516.310,00
38	Kecamatan Ngamprah	1.471.677.893,00	-	-	-	-	-	-	-	1.471.677.893,00
39	Kecamatan Cikalongwetan	830.816.660,00	-	-	-	-	-	-	-	991.933.881,00
40	Kecamatan Cipongkor	2.570.359.469,00	-	-	-	-	-	-	-	2.570.359.469,00
41	Kecamatan Saguling	4.540.133.560,00	-	-	-	-	-	-	-	4.540.133.560,00
42	Kecamatan Cililin	22.819.584.145,00	-	-	-	-	-	-	-	22.969.405.739,00
43	Kecamatan Parongpong	1.523.568.300,00	-	-	-	-	-	-	-	1.523.568.300,00
44	Kecamatan Cipatat	2.223.117.989,00	-	-	-	-	-	-	-	2.223.117.989,00
45	Kecamatan Cihampelas	1.430.534.673,00	-	-	-	-	-	-	-	1.430.534.673,00
46	Kecamatan Rongga	1.401.812.503,00	-	-	-	-	-	-	-	1.401.812.503,00
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	2.076.266.396.458,64	-	-	-	-	9.425.053,00	282.770.270,00	39.222.114.674,50	2.135.911.493.583,69

LAMPIRAN CaLK 17a

REKAPITULASI REVITALISASI SATUAN PENDIDIKAN DASAR
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	MENU	VOL	NOMINAL	JUMLAH
1	SD AMAL KELUARGA	20267606	REHAB KELAS	2	117.113.677	187.816.451,00
			REHAB PERPUSTAKAAN	1	70.702.774	
	TOTAL SD SWASTA					187.816.451,00
2	SDN 1 CILANGARI	20208103	REHAB KELAS	6	810.504.714	830.433.007,00
			REHAB TOILET	1	19.928.293	
3	SDN 1 CIPADANGMANAH	20207594	REHAB KELAS	3	44.436.927	469.668.027,00
			PEMB. RKB	2	192.086.900	
			MEBELEUR	1	233.144.200	
4	SDN 1 GUNUNGHALU	20205546	REHAB KELAS	2	279.640.000	671.546.368,00
			REHAB R ADMINISTRASI	2	244.693.344	
			PEMB. UKS	1	138.886.524	
			MEBELEUR	1	8.326.500	
5	SDN 4 RAJAMANDALA WETAN	20206261	REHAB RUANG KELAS	4	512.761.068	581.117.368,00
			REHAB TOILET	2	68.356.300	
6	SDN CIPICUNG	20207515	REHAB KELAS	3	444.435.441	730.565.441,00
			REHAB UKS	1	66.090.000	
			REHAB ADMINSTRRASI	1	144.000.000	
			REHAB TOILET	4	76.040.000	
7	SDN CISARUA	20227527	PEMBANGUNAN UKS	1	138.886.524	147.213.024,00
			MEBELEUR	1	8.326.500	
8	SDN HARAPAN MEKAR	20205568	REHAB KELAS	4	592.582.500	938.047.946,00
			REHAB TOILET	3	49.174.194	
			REHAB PERPUSTAKAAN	1	148.145.626	
			REHAB R. ADMINISTRASI	1	148.145.626	
9	SDN HEGARMANAH	20205524	REHAB RUANG KELAS	5	586.860.000	714.307.656,00
			PEMBANGUNAN TOILET	1	127.447.656	
10	SDN PARATAG	20205236	REHAB KELAS	2	214.646.684	770.060.746,00
			REHAB PERPUSTAKAAN	1	137.987.154	
			PEMB. RKB	1	246.909.404	
			PEMB. UKS	1	138.876.804	
			MEBELEUR	1	31.640.700	
11	SDN PASIRUNCANG	20227553	Rehab Ruang Kelas	2	204.559.992	475.592.050,00
			Rehab Perpustakaan	1	107.019.968	
			Rehab Toilet	1	36.564.462	
			Pembangunan Toilet	1	127.447.628	
12	SDN PASIRSEREH	20206339	REHAB PERPUSTAKAAN	1	103.969.984	497.539.586,00
			PEMBANGUNAN TOILET	2	254.754.754	
			PEMBANGUNAN UKS	1	138.814.848	
13	SDN SASAK SENG	20206533	REHAB KELAS	3	444.436.926	520.930.107,00
			REHAB TOILET	1	76.493.181	
14	SDN SINDANGSARI	20206582	Rehab Perpustakaan	1	97.230.000	502.525.000,00
			Rehab R. Admin	1	116.110.000	
			Rehab. R. Kelas	2	289.185.000	
15	SDN SUDIMAMPIR	20206428	REHAB KELAS	4	489.380.000	823.466.500,00
			REHAB TOILET	1	72.190.000	
			REHAB R ADMINISTRASI	1	114.690.000	
			PEMB. UKS	1	138.880.000	
			MEBELEUR	1	8.326.500	
	TOTAL SD NEGERI					8.673.012.826,00
	TOTAL SD					8.860.829.277,00

REKAP

SD NEGERI	8.673.012.826,00
SD SWASTA	187.816.451,00
	8.860.829.277,00

SD NEGERI	8.673.012.826,00
SMP NEGERI	4.617.904.115,00
TOTAL DANA REVITALISASI YANG DITERIMA SEKOLAH NEGERI	**13.290.916.941,00**

SD SWASTA	187.816.451,00
SMP SWASTA	19.004.507.624,00
TOTAL KESELURUHAN DANA REVITALISASI	**32.483.241.016,00**

LAMPIRAN CaLK 17b

REKAPITULASI REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	MENU	VOL	NOMINAL	JUMLAH
1	SMP Muslimin Cililin	20227701	Rehabilitasi ruang administrasi	1	250.900.000	**2.755.491.362,00**
			Rehabilitasi ruang kelas	11	2.199.529.371	
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	250.061.000	
			Rehab toilet	1	55.000.991	
2	SMP PGRI 231 Cipatat	20227718	Rehabilitasi ruang administrasi	1	345.868.676	**1.666.109.849,00**
			Rehabilitasi ruang kelas	4	778.349.414	
			Rehabilitasi ruang Laboratorium	1	279.019.377	
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	262.872.378	
3	SMP Raksanagara	20227751	Pembangunan ruang perpustakaan	1	344.108.756	**1.382.096.434,00**
			Pembangunan ruang uks	1	194.302.710	
			Pembangunan toilet	1	190.094.267	
			Rehabilitasi ruang kelas	4	653.590.701	
4	SMP YPII Cililin	20227786	Rehabilitasi ruang administrasi	1	365.117.422	**2.430.196.773,00**
			Rehabilitasi ruang kelas	10	1.539.404.008	
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	479.650.928	
			Rehab toilet	1	46.024.415	
5	SMP Madya Bakti	20267619	Pembangunan ruang administrasi	1	677.698.000	**1.723.006.966,00**
			Pembangunan ruang laboratorium	1	482.800.000	
			Pembangunan ruang UKS	1	195.439.000	
			Pembangunan toilet	1	243.143.000	
			Rehabilitasi ruang kelas	1	123.926.966,0	
6	SMP Bingkai Cendikia Cililin	69973545	Pembangunan ruang administrasi	1	643.000.000	**3.662.000.000,00**
			Pembangunan ruang kelas (RKB)	3	910.000.000	
			Pembangunan ruang laboratorium	1	591.000.000	
			Pembangunan ruang UKS	1	168.000.000	
			Pembangunan toilet	2	272.000.000	
			Rehabilitasi ruang administrasi	1	251.000.000	
			Rehabilitasi ruang kelas	1	175.000.000	
			Rehabilitasi ruang Laboratorium	1	306.000.000	
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	251.000.000	
			Rehab toilet	1	95.000.000	
7	SMP Madinatul Ulum Al-Fatah	70026772	Pembangunan ruang administrasi	1	656.930.000	**2.968.665.000,00**
			Pembangunan ruang kelas (RKB)	4	1.125.690.000	
			Pembangunan ruang laboratorium	1	397.910.000	
			Pembangunan ruang perpustakaan	1	337.895.000	
			Pembangunan ruang UKS	1	190.668.000	
			Pembangunan toilet	1	259.572.000	
8	SMP Muslimin Rongga	20227703	Rehabilitasi ruang kelas	1	204.900.000	**409.800.000,00**
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	204.900.000	
9	SMP PGRISindangkerta	20227733	Rehabilitasi ruang kelas	1	189.716.352	**633.141.240,00**
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	230.072.967	
			Rehabilitasi ruang Laboratorium	1	213.351.921	
10	SMP Al Barokah Sindangkerta	69950749	Pembangunan ruang laboratorium	1	382.000.000	**1.374.000.000,00**
			Pembangunan ruang kelas (RKB)	2	520.000.000	
			Pembangunan ruang perpustakaan	1	270.000.000	
	TOTAL SMP SWASTA					**19.004.507.624,00**

LAMPIRAN CaLK 17b

REKAPITULASI REVITALISASI SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

NO	NAMA SEKOLAH	NPSN	MENU	VOL	NOMINAL	JUMLAH
11	SMP Negeri 3 Cipongkor	20267626	Pembangunan ruang laboratorium	1	422.286.000	
			Pembangunan ruang UKS	1	142.861.000	
			Pembangunan toilet	2	285.402.000	**1.758.863.000,00**
			Rehabilitasi ruang kelas	4	565665000	
			Rehabilitasi ruang perpustakaan	1	235.311.000	
			Rehab toilet	1	107.338.000	
12	SMP Negeri 2 Parongpong	20279863	Pembangunan ruang kelas (RKB)	4	1.381.760.790	
			Pembangunan ruang UKS	1	180.868.892	**2.859.041.115,00**
			Pembangunan toilet	2	347.977.064	
			Rehabilitasi ruang kelas	5	948.434.369	
	TOTAL SMP NEGERI					**4.617.904.115,00**
	TOTAL SMP					**23.622.411.739,00**

LAMPIRAN CaLK 18

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025						
			Penambahan					Koreksi Pembukuan	Total Penambahan
		Harga Perolehan	Realisasi Belanja Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025	Kapitalisasi dari Belanja Barang Jasa	Koreksi Pencatatan Belanja	Hibah	Mutasi dari SKPD Lain	Pecah Data	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Dinas Pendidikan	19.713.254.462,00	-	-	1.320.097.755,00	-	-	-	1.320.097.755,00
2	Dinas Kesehatan	16.223.234.991,00	3.453.421.519,00	-	-	-	-	-	3.453.421.519,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.585.674.200.444,00	71.876.585.859,00	-	1.835.655.885,00	-	-	-	73.712.241.744,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	82.587.640.365,84	2.174.638.703,00	-	1.245.446.718,50	9.985.743.750,00	-	17.129.910.000,00	30.535.739.171,50
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.154.820,00	-	-	-	-	-	-	-
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	124.480.754,00	-	-	-	-	-	124.480.754,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	3.492.500,00	-	-	-	-	-	-	-
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.777.364.887,63	-	-	-	-	-	-	-
12	Dinas Lingkungan Hidup	891.350.054,00	225.790.000,00	-	-	-	199.625.900,00	-	425.615.900,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	8.030.451.498,62	-	-	-	-	-	-	-
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	319.697.000,00	-	-	-	-	-	-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.661.265.326,00	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	217.410.000,00	-	-	-	-	-	-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	10.231.211.437,24	-	341.560.119,00	-	-	-	-	341.560.119,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.182.506.196,00	-	-	-	-	-	-	-
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.810.657.002,00	-	-	-	-	-	-	-
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	64.071.236,34	59.531.076,00	-	-	-	1.511.324.737,00	-	1.570.855.813,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44.739.133,00	-	-	-	6.026.351.144,00	-	-	6.026.351.144,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.511.000,00	-	-	-	-	-	-	-
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	1.459.000,00	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Cipongkolu	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	-	117.564.536,00	-	-	-	-	-	117.564.536,00
39	Kecamatan Cihalongwetan	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Seguling	223.998.300,00	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cililin	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	116.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.748.837.989.653,67	78.032.212.447,00	341.560.119,00	4.401.200.359,50	16.012.094.894,00	1.710.950.637,00	17.129.910.000,00	117.627.928.455,50

LAMPIRAN CaLK 15

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025					Saldo Per 31 Desember 2025
			Pengurangan					
			Mutasi ke SKPD Lain	Reklas Pencatatan Belanja	Reklas Aset	Koreksi Pembukuan	Total Pengurangan	
		Harga Perolehan			Bukan Hasil Inventarisasi	Pecah Data	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	11	12	13	14	16	16
1	Dinas Pendidikan	19.713.254.462,00	-	-	-	-	-	21.033.352.217,00
2	Dinas Kesehatan	16.223.234.991,00	-	2.791.617.600,00	-	-	2.791.617.600,00	16.885.038.910,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.585.674.200.444,00	1.710.950.637,00	-	-	-	1.710.950.637,00	1.657.675.491.551,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	82.587.640.365,84	-	699.117.103,00	-	17.129.910.000,00	17.829.027.103,00	95.294.352.434,34
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	5.154.820,00	-	-	-	-	-	5.154.820,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	124.480.754,00
8	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	3.492.500,00	-	-	-	-	-	3.492.500,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	9.777.364.887,63	-	-	-	-	-	9.777.364.887,63
12	Dinas Lingkungan Hidup	891.350.054,00	-	-	-	-	-	1.316.965.954,00
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	-	-	-	-	-	-	-
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	-	-	-	-
15	Dinas Perhubungan	8.030.451.498,62	-	-	-	-	-	8.030.451.498,62
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	317.697.000,00	-	-	-	-	-	317.697.000,00
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	-	-	-	-	-	-	-
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	-	-	-	-	-	-	-
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	1.661.265.326,00	-	-	-	-	-	1.661.265.326,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	217.410.000,00	-	-	-	-	-	217.410.000,00
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	10.231.211.437,24	-	-	4.152.807.125,00	-	4.152.807.125,00	6.419.964.431,24
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	1.182.506.196,00	-	-	-	-	-	1.182.506.196,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	11.810.657.002,00	-	-	-	-	-	11.810.657.002,00
24	Sekretariat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
25	Sekretariat DPRD	64.071.236,34	-	-	-	-	-	1.634.927.049,34
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	44.739.133,00	-	-	-	-	-	6.071.090.277,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	59.511.000,00	-	-	-	-	-	59.511.000,00
30	Inspektorat Daerah	-	-	-	-	-	-	-
31	Kecamatan Batujajar	1.459.000,00	-	-	-	-	-	1.459.000,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Sindangkerta	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	-	-	80.114.600,00	-	-	80.114.600,00	37.449.936,00
39	Kecamatan Cikalongwetan	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipeagkor	-	-	-	-	-	-	223.998.300,00
41	Kecamatan Saguling	223.998.300,00	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cilili	-	-	-	-	-	-	116.420.000,00
43	Kecamatan Parongpong	116.420.000,00	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-
	Total	1.748.837.089.653,67	1.710.950.637,00	3.570.849.303,00	4.152.807.125,00	17.129.910.000,00	26.564.517.065,00	1.839.900.501.044,17

LAMPIRAN CaLK 19

ASET TETAP - ASET TETAP LAINNYA

TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025							Saldo Per 31 Desember 2025
			Penambahan			Pengurangan				
			Realisasi Belanja		Total Penambahan		Reklas Aset		Total Pengurangan	
		Harga Perolehan	Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025	Reklas Pencatatan Belanja	Harga Perolehan	Reklas Pencatatan Belanja	Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas ke Ekstrakomptabel	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dinas Pendidikan	112.784.006.985,91	22.460.722.310,00	1.049.758.300,00	23.510.480.610,00	187.603.600,00	-	21.376.177.320,00	21.563.780.920,00	114.730.706.675,91
2	Dinas Kesehatan	388.921.685,00	-	-	-	-	-	-	-	388.921.685,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	275.231.000,00	-	-	-	-	-	-	-	275.231.000,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	2.126.100.086,22	-	-	-	-	-	-	-	2.126.100.086,22
5	Satuan Polisi Pamong Praja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	249.567.200,00	-	-	-	-	-	-	-	249.567.200,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Dinas Sosial	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Dinas Tenaga Kerja	214.145.961,00	-	-	-	-	-	-	-	214.145.961,00
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	136.632.744,00	-	-	-	-	-	-	-	136.632.744,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	4.089.800,00	-	-	-	-	-	-	-	4.089.800,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	14.592.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.592.000,00
15	Dinas Perhubungan	384.420.000,00	-	-	-	-	-	-	-	384.420.000,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	3.200.000,00	-	-	-	-	-	-	-	3.200.000,00
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	20.800.000,00	-	-	-	-	-	-	-	20.800.000,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	5.425.000,00	-	-	-	-	-	-	-	5.425.000,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	1.314.202.757,10	231.947.300,00	-	231.947.000,00	-	-	230.093.000,00	230.093.000,00	1.316.056.757,10
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	208.738.331,00	-	-	-	-	50.086.666,00	-	50.086.666,00	158.651.665,00
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	513.657.000,00	-	-	-	-	-	-	-	513.657.000,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	48.115.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.115.000,00
24	Sekretariat Daerah	294.791.900,00	-	-	-	-	-	-	-	294.791.900,00
25	Sekretariat DPRD	230.450.640,00	-	-	-	-	-	-	-	230.450.640,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	12.165.807,00	-	-	-	-	-	-	-	12.165.807,00
28	Badan Pendapatan Daerah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	42.080.000,00	-	-	-	-	-	-	-	42.080.000,00
30	Inspektorat Daerah	19.775.000,00	-	-	-	-	-	-	-	19.775.000,00
31	Kecamatan Batujajar	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Kecamatan Cipeundeuy	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	Kecamatan Gununghalu	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Kecamatan Padalarang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Kecamatan Lembang	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Kecamatan Jindaglkerta	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Kecamatan Cisarua	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Kecamatan Ngamprah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	Kecamatan Cihalongwetan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Kecamatan Cipongkor	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	Kecamatan Saguling	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Kecamatan Cililin	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Kecamatan Parongpong	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	Kecamatan Cipatat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Kecamatan Cihampelas	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	Kecamatan Rongga	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Total	119.291.118.997,23	22.692.669.310,00	1.049.758.300,00	23.742.427.610,00	187.603.600,00	50.086.666,00	21.606.270.320,00	21.843.960.586,00	121.189.585.921,23

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

No.	Kode Barang/ ID Barang/ Reg. Lama	Nama Barang	Tahun Pembelian	Sumber/APBD	Konstruksi Bangunan: Bertingkat/ Tidak	Konstruksi Bangunan: Beton/ Tidak	Luas (m²)	Lokasi / Alamat	Dokumen: Tanggal	Dokumen: Nomor	Tanggal Mulai	Status Tanah	Kode Usulan	Cara Perolehan / Sumber Dana / Asset Barang / Kondisi / Penggunaan	Harga Kontrak (Rupiah)	Tgl. Buku/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Pemilik/ Status Aset	Ket
1	1 3 6 5 01 01 01 0038 2686539 2686597	0004	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2018	Tidak	Tidak	0,00	desa Cikadong Kecamatan Cimaung Kec. Pabuaran Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterima Atau Dipindah Atau Belum Aplikf - Pemerintah Baik/ -	62 996 806,00	01-01-2018V / 01-01-2018 / Aset Tetap	Nama Lokasi Pembangunan Aset/Barang Tidak Bergerak Dalam Pengerjaan SKPD : 1 URUSAN PILIHAN TANAH WARIS YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 01 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	1 3 6 01 01 01 0039 1598870 1598879	0005	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2015	Permanen	Tidak	Beton	0,00	Desa Lebak Gilahgowan Cimaung Mekaran Pertahanan Kec. Cimaungwan Kab. Bandung Barat	31/7/2015	DPP: MODNOK T/2015 DAN HPP: MODNOK T/2015	-	-	Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf - Pemerintah Baik/ -	887.250.000	20-06-2015V / 20-06-2015 / Aset Tetap	Nama Lokasi Pembangunan Aset/Barang Tidak Bergerak SKPD : 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
3	1 3 6 04 01 01 0059 1634686 1634684	0013	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2015	Permanen	Tidak	Beton	0,00	- Kec. Parongpong Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	Pemerintah Daerah	Aset Tetap (Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf) - Pemerintah Baik/ -	21 709 406,00	31-12-2015V / 31-12-2015 / Aset Tetap	pembangunan prasana sarana rehabilitasi gedung kantor dan aula kecamatan Parongpong + Biaya Umum sebesar 187.500Rp. 1932210290101290017 Rachman Hadi Nugraha, ST SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
4	1 3 6 01 01 01 0058 1634689 1634682	0014	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2015	Permanen	Tidak	Beton	0,00	- Kec. Batujajar Kab. Bandung Barat	5/28/2015	641/2005/KPBD-BNG/DBM-BM/2015	-	-	Pemerintah Daerah	Aset Tetap (Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf) - Pemerintah Baik/ -	30 580 306,00	31-12-2015V / 31-12-2015 / Aset Tetap	Pekerjaan pembangunan rehabilitasi gedung kantor dan aula kecamatan Batujajar Kabupaten + Biaya umum sebesar 187,500Rp. 1932210290101290017 Rachman Hadi Nugraha, ST SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
5	1 3 6 01 01 01 0059 1634729 1634726	0015	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2018	-	-	-	Belanja Jasa Konsultan Pengawasan DED Gerai Alun Barat dan Lab.uji semen Jalur.	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	99 605 000,00	28-12-2018V 01130920 053 648 ASTPBM/KEC/2018 28-12-2018 17920 Aset Tetap	belanja jasa mange SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
6	1 3 6 01 01 01 0038 2681957 3925853	0031	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Aset Tetap (Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	13 335 516 047,00	31-12-2018V / 31-12-2018 / Aset Tetap	-BAST PEKLAT , (31-12-2018) SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
7	1 3 6 01 01 01 0039 2682250 2682256	0032	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2019	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	722 479 000,00	26-10-2019V 1634/PBM 19 03/BAST/PBM/X/2019 26-09-2019 27625 Aset Tetap	Bidang Bina Marga 15 05 Bid 6 894 000 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
8	1 3 6 01 01 01 0040 2682260 2682266	0033	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2019	-	-	-	DED jembatan cipeuh ujc	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	62 891 360,00	16-05-2019V 126/PBM 15 05/BAST/PBM/V/2019 16-05-2019 20479 Aset Tetap	Bidang Bina Marga 15 05 Bid 6 894 000 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
9	1 3 6 01 01 01 0041 2682270 2682268	0034	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2019	-	-	-	Jasa Konsultan Perencanaan Pasar ujc Lokasi Cipeuh dan Pasar Pangalengan	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	272 401 250,00	21-12-2020 120/BAST/PBC-PLSM/XII/2020 21-12-2020 41687 Aset Tetap	Bidang TR OPSI 34 001 Nilai Kontrak 272 027 750 + Ba 2 373 500 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
10	1 3 6 01 01 01 0035 2678332 2678332	0025	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	Jasa Konsultan Perencanaan Pengawasan Tervasi Kecamatan gunungha	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	473 040 000,00	21-12-2020 2150/BAST/PBC-KEC-GHS/PUP/XII/20 21-12-2020 40447 Aset Tetap	Bidang TR OPSI 34 001 Nilai Kontrak 470 642 500 + Ba 2 373 500 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
11	1 3 6 01 01 01 0036 2678284 2678284	0026	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	Jasa Konsultan Pengawasan Pasar Porta dan Pasar Lembang	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	854 454 250,00	21-12-2020 2150/BAST/PBC-KLBR/DPUPR/XII/2020 21-12-2020 41469 Aset Tetap	Bidang TR OPSI 34 001 Nilai Kontrak 472 077 250 + Ba 2 373 500 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
12	1 3 6 01 01 01 0037 2678253 2678255	0035	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	Jasa Pengawasan Pembangunan Perbaikan ruc Kawasan Terpadu Perkotaan Ujc-cimahre Sindangkerta	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	850 454 500,00	15-12-2020 2153/BAST/PBC-KEC-SDK/DPUPR/XII/20 15-12-2020 41465 Aset Tetap	Bidang TR OPSI 34 001 Nilai Kontrak 847 077 500 + Ba 2 377 500 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
13	1 3 6 01 01 01 0040 2679280 2679286	0001	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	DED Nanggeleng - Sirnaraja	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	336 915 500,00	19-12-2020V 1148/BM 13 04/BAST/PBC/2020 19-12-2020 41863 Aset Tetap	Bidang Bina Marga 15 001 Nilai Kontrak 334 537 500 + Ba 2 378 000 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
14	1 3 6 01 01 01 0040 2679047 2679049	0002	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	DED R Ranc engging - Cipeuh	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Diterik Atau Dipindah Atau Belum Aplikf APBD Operasional Baik/ -	336 373 000,00	19-12-2020 1120/PBM 13 08/BAST/PBC/2020 19-12-2020 41856 Aset Tetap	Bidang Bina Marga 12 01 Nilai Kontrak 328 221 000 + Ba 1 845 000 SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

No.	Nomor: Kode Barang / ID Barang / No. Aset	Reg.	Nama Barang	Tahun Pembelian	Berdasarkan (P,HP,D)	Konstruksi Bangunan: Bertingkat / Lantai	Konstruksi Bangunan: Beton / Tidak	Luas (m²)	Lokasi / Alamat	Dokumen: Tanggal	Dokumen: Nomor	Tanggal Mulai	Status Tanah	Kode Tanah	Cara Perolehan / Sumber Data / Status Barang / Kondisi / Penggunaan	Harga Konstruksi (Rekening)	Tgl. Entry / No. BAST / Tgl. BAST / ID Pemakai dan Buana Aset	Ket
15	1.3.6.01.01.01.0047 0672093/ 0672161	0093	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pengerasan Penggilasan Jalan Paket I		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.374.800,00	19-08-2020/ 0240/PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.01.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 07 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
16	1.3.6.01.01.01.0048 0672094/ 0672094	0094	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pemeliharaan Penanganan Jalan Paket II		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.695.000,00	19-08-2020/ 1320PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.06.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 07 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
17	1.3.6.01.01.01.0049 0672095/ 0672095	0095	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pemeliharaan Rehab/Pemel. Jembatan Paket I		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.434.500,00	19-08-2020/ 0255/PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.05.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 07 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
18	1.3.6.01.01.01.0050 0672096/ 0672096	0096	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	DED Cipedo (Lanjutan) - Cimanggu		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.413.300,00	19-08-2020/ 0260/PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.07.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 007 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
19	1.3.6.01.01.01.0051 0672097/ 0672097	0097	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	DED - Cimanggi - Wadas		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.449.400,00	19-08-2020/ 0258/PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.17.01. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 001 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
20	1.3.6.01.01.01.0052 0672098/ 0672098	0098	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	DED Jembatan S. Cimuak - Jamanges (Lanjutan)		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.522.500,00	19-08-2020/ 0259/PBM 15 07/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.17.01. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 005 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
21	1.3.6.01.01.01.0053 0672099/ 0672099	0099	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	PS Jalan Cilawarna (Cibodas) Hot Rehabilitasi		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	51.629.600,00	04-08-2020/ 2009/PBM 15 08/BAST/VIII/2020/ 04-08-2020/ 3.04.02. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 01 Nilai Kontrak 49.775.000 + PPN 1.848.000 - SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
22	1.3.6.01.01.01.0054 0672100/ 0672100	0100	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	DED Mayburi Parakgadung (Lanjutan)		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	51.262.000,00	04-08-2020/ 3749/PBM 15 08/BAST/VIII/2020/ 04-08-2020/ 3.04.01. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 01 Nilai Kontrak 49.726.000 + PPN 1.848.000 - SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
23	1.3.6.01.01.01.0055 0672101/ 0672101	0101	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	DED Sukatani Lagadar		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	101.368.000,00	19-08-2020/ 2060/PBM 15 08/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.17.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 15 001 Nilai Kontrak 99.400.000 + PPN 1.968.000 - SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
24	1.3.6.01.01.01.0056 0672102/ 0672102	0102	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pemeliharaan Rehab/Pemel. Jembatan Paket II		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	99.220.000,00	19-08-2020/ 0259/PBM 15 08/BAST/VIII/2020/ 19-08-2020/ 3.51.1. Aset Tetap	Sedang Rsa Mnga 18 52 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
25	1.3.6.01.01.01.0057 0672103/ 0672103	0103	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pengerasan Tubuh Penebangan Jalan prog Jalan (Perbatasan Kab Wilayah Kabupaten Bandung Barat		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	101.412.000,00	13-08-2020/ 602.3/1324/Rsa-STP/VIII/2020/ 13-08-2020/ 3.04.1. Aset Tetap	Sedang RSA 24 03 2020 Nilai Kontrak 99.682.00 + PPN 1.730.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PENGENTARAAN BIDANG PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
26	1.3.6.01.01.01.0058 0672104/ 0672104	0104	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Pemeliharaan Tubuh Penebangan Jaringan Jalan (Tapal Batas D) Wilayah Kabupaten Bandung Barat		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	101.151.000,00	13-08-2020/ 602.3/1325/Rsa-STP/VIII/2020/ 13-08-2020/ 3.05.1. Aset Tetap	Sedang RSA 24 03 Nilai Kontrak 99 671.000 + PPN 1.480.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
27	1.3.6.01.01.01.0059 0672105/ 0672105	0105	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Pekerjaan Kantor Kecamatan Ciwaruga		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	49.378.000,00	10-08-2020/ 604/BAPDMD.C PTP/BJP/VIII/2020/ 10-08-2020/ 3.07.01. Aset Tetap	Sedang TPDDK 34 002 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PENGENTARAAN BIDANG PERUMAHAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
28	1.3.6.01.01.01.0060 0672106/ 0672106	0106	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Tersebar di wilayah kab. bandung barat		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	100.377.300,00	18-08-2020/ 607.2/1318/Rsa-STP/VIII/2020/ 18-08-2020/ 3.16.02. Aset Tetap	Sedang RSA 24 001 Nilai Kontrak 99 467.300 + PPN 1.430.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
29	1.3.6.01.01.01.0061 0672107/ 0672107	0107	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2020	-	-	-	-	Tersebar di wilayah kab. bandung barat		-		-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	97.225.000,00	13-08-2020/ 602.3/1319/Rsa-STP/VIII/2020/ 13-08-2020/ 3.04.02. Aset Tetap	Sedang RSA 24 001 Nilai Kontrak 99 337.000 + PPN 1.430.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

LAMPIRAN Col.K 20

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nomor		Nama Barang	Tanda Pendaftaran	Bangunan(P,SP,D)	Konstruksi Bangunan		Luas (m²)	Letak / Alamat	Dokumen		Tanggal Pasti	Harga Perolehan	Kode Tanah	Cara Perolehan / Sumber Dana / Status Barang / Kondisi / Penggunaan	Harga Konstruksi (Rp/satuan)	Tgl. Sah/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Pengadaan/ Paket Awal	Ket
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Aset	Reg.			Bertingkat/ Beton	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor							
30	1.3.5.01.01.01.0007 / 8672294 / 8672294	0030	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2023	-	-	-	Perwakilan wilayah Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	30.000.000,00	16-06-2020/ 600.2/151/BPKAD-STPW.BDA/VI/2020/ 19-06-2020/ 26487/ Jasa Tetap	Bidang SDA 24.001 Nilai Kontrak 30.818.500 + PPN 3.420.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Jalanpasir Umum dan Tata Ruang
31	1.3.5.01.01.01.0007 / 8672295 / 8672295	0031	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2023	-	-	-	Perwakilan wilayah Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	900.917.000,00	13-06-2020/ 602.2/151/BPKAD-STPW.BDA/VI/2020/ 13-06-2020/ 26487/ Jasa Tetap	Bidang SDA 24.007 Nilai Kontrak 99.667.500 + PPN 3.420.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Jalanpasir Umum dan Tata Ruang
32	1.3.5.01.01.01.0008 / 8672296 / 8672296	0032	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2020	-	-	-	Perwakilan wilayah Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	884.318.000,00	13-06-2020/ 602.2/151/BPKAD-STPW.BDA/VI/2020/ 13-06-2020/ 26487/ Jasa Tetap	Bidang SDA 24.01 Nilai Kontrak 99.758.000 + PPN 3.420.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Jalanpasir Umum dan Tata Ruang
33	1.3.5.01.01.01.0009 / 8672297 / 8672297	0033	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2020	-	-	-	Perwakilan wilayah Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	103.265.500,00	13-06-2020/ 602.2/151/BPKAD-STPW.BDA/VI/2020/ 17-06-2020/ 26487/ Jasa Tetap	Bidang SDA 24.11 Nilai Kontrak 99.775.500 + PPN 3.420.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Jalanpasir Umum dan Tata Ruang
34	1.3.5.01.01.01.0010 / 8672298 / 8672298	0034	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2021	-	-	-	Perwakilan wilayah Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	101.000.000,00	13-06-2020/ 602.2/151/BPKAD-STPW.BDA/VI/2020/ 17-06-2020/ 26487/ Jasa Tetap	Bidang SDA 24.61 Jln. Kamojo 99.660.000 + PPN 3.420.000 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Jalanpasir Umum dan Tata Ruang
35	1.3.6.01.01.01.0001 / 8672670 / 8672670	0040	Jaringan Telepon Lainnya Instalasi Pengerjaan	2021	Permanen	Tidak	Tidak	0.00	Jalan Kemerdekaan Permanen Pada Kecamatan Desa/Kel. Wates Tengah Kampung/Kmp. Cimanuk Wates Tengah Kel/Desa. Batujajar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian/ Pembuatan Sendiri/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	371.911.940,82	03-07-2021/ 27/PANITIA/PPK-PANITIA/PK/BPKAD/VII/2021/ 05-07-2021/ 7832/ Jasa Tetap	Terdaftar lengkap LHP: LHP: BI tgl 2020 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
36	1.3.6.01.01.01.0002 / 8672671 / 8672671	0041	Jaringan Telepon Lainnya Instalasi Pengerjaan	2020	Permanen	Tidak	Tidak	0.00	Jalan Kemerdekaan Permanen Pada Kecamatan Desa/Kel. Wates Tengah Kampung/Kmp. Cimanuk Wates Tengah Kel/Desa. Batujajar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian/ Pembuatan Sendiri/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	354.972.298,00	05-07-2021/ 27/PANITIA/PPK-PANITIA/PK/BPKAD/VII/2021/ 11-09-2020/ 8901/ Jasa Tetap	Terdaftar lengkap LHP: LHP: BI tgl 2020 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
37	1.3.6.01.01.01.0003 / 8672672 / 8672672	0042	Jaringan Telepon Lainnya Instalasi Pengerjaan	2021	Permanen	Beton	Tidak	0.00	Jalan Kemerdekaan Permanen Pada Kecamatan Desa/Kel. Wates Tengah Kampung/Kmp. Wates Tengah Kel/Desa. Batujajar Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian/ Pembuatan Sendiri/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	518.840.000,00	05-07-2021/ 27/PANITIA/PPK-PANITIA/PK/BPKAD/VII/2021/ 11-09-2020/ 8901/ Jasa Tetap	Terdaftar lengkap LHP: LHP: BI tgl 2020 SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
38	1.3.5.01.01.01.0021 / 8673135 / 8673135	0091	Bangunan Air Lainnya di Cidahu Pengerjaan	2021	Permanen	Tidak	Beton	0.00	DPD Cidahu Cimahi Cabang RINGAN Kampung/Kmp. Mekarsa Kel/Desa. Mekarsari Kec. Cigugur Kab. Cimahi Kota			-	-	-	Hibah/ Sumbangan Atau Yang Sejenis/ BANPROV/ Gubernur/ Bpkb/ -	4.964.497.500,00	27-07-2021/ 24/PANITIA/PPK-PANITIA/PK/BPKAD/VII/2021/ 27-07-2021/ 7839/ Jasa Tetap	BAST Hibah Provinsi: Detail Engineering Design (DED) Pasarwesok Provinsi Jawa Barat Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat SKPD: 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 15. URUSAN PENUNJANG - 01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 001. Dinas Perumahan dan Permukiman
39	1.3.5.01.01.01.0022 / 8673136 / 8673136	0092	Bangunan dan Pengerjaan Dalam Pengerjaan	2021	Permanen	Tidak	Beton	0.00	Jalan Pembukaan Perpustakaan DPC Pemuda Cilimg Agung Kampung/Kmp. Cilimg Agung Pt Mekarsa Kel/Desa. Pasirmukti Pelabuhan			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	99.740.000,00	22-12-2021/ 027/09.2/PPK/BAST/ LEMBONG CIMAHI-PASIRMUKTI/XII/2021/ 22-12-2021/ 47040/ Jasa Tetap	SKPD 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 15. URUSAN PENUNJANG - 01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 001. Dinas Perhubungan
40	1.3.5.01.01.01.0023 / 8673137 / 8673137	0093	Bangunan dan Pengerjaan Dalam Pengerjaan	2021	Permanen	Tidak	Beton	0.00	Jalan Pembukaan Perpustakaan DPC Pemuda Cilimg Agung Kampung/Kmp. Cilimg Agung Pt Mekarsa Kel/Desa. Pasirmukti Pelabuhan			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	99.740.000,00	22-12-2021/ 027/09.2/PPK/BAST/ LEMBONG CIMAHI-PASIRMUKTI/XII/2021/ 22-12-2021/ 47040/ Jasa Tetap	SKPD 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 15. URUSAN PENUNJANG - 01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 001. Dinas Perhubungan
41	1.3.5.01.01.01.0024 / 8673138 / 8673138	0094	Bangunan dan Pengerjaan Dalam Pengerjaan	2021	Permanen	Tidak	Tidak	0.00	Terminal Air Kawasan Kel/Desa. Kertamukti Cilils			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	94.778.000,00	02-12-2021/ 027/09.2/PPK-SUKADAMUKTI/ 02-12-2021/ 47040/ Jasa Tetap	SKPD 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 15. URUSAN PENUNJANG - 01. Dinas Perhubungan - 001. Dinas Perhubungan
42	1.3.7.01.01.01.0001 / 8673139 / 8673139	0095	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2021	-	-	-	Kawasan pemerintahan perkantoran gedung baru Pemerintah Kab. Bandung Barat Kel/Desa. Kabupaten Bandung Barat Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	84.000.000,00	08-11-2021/ 027/09.2/PPK-ACT/XI/2021/ 08-11-2021/ 12570/ Jasa Tetap	Bidang Tata Ruang SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
43	1.3.7.01.01.01.0002 / 8673140 / 8673140	0096	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Jalan Pengerjaan	2021	-	-	-	Kawasan pemerintahan perkantoran gedung baru Pemerintah Kab. Bandung Barat Kel/Desa. Kabupaten Bandung Barat Kec. Cipeundeuy Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	99.148.500,00	08-11-2021/ 027/09.2/PPK-ACT/XI/2021/ 08-11-2021/ 12570/ Jasa Tetap	Bidang Tata Ruang SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
44	1.3.7.01.01.01.0003 / 8673141 / 8673141	0097	Jalan, Irigasi, dan Jaringan Pelaksanaan Pengerjaan	2021	-	-	-	Kawasan pemerintahan perkantoran KBB Jl Gatot Subroto Kel/Desa. Kabupaten Bandung Barat Kec. Kab. Bandung Barat			-	-	-	Pembelian Dalam Rka (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atas Dipercaya Atas Beban Apbd)/ APBD/ Gubernur/ Bpkb/ -	99.148.500,00	08-11-2021/ 027/09.2/PPK-ACT/XI/2021/ 08-11-2021/ 12570/ Jasa Tetap	Bidang Tata Ruang SKPD: 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Desa Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

LAMPIRAN Cek.19

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nomor		Nama Barang	Tahun Perolehan	Bangunan/IPAL/Dll	Konstruksi Bertingkat		Luas (m²)	Lokasi / Alamat	Dokumen		Tanggal Mulai	Status Tanah	Kode Tanah	Cara Perolehan / Sumber: Beli / Hibah / Sitaan Negara / Kondisi / Penggunaan	Harga Kontrak (Rupiah)	Tgl. Buku/ No. BAST/ Tgl. BAST/ ID Pengerjaan/ Status Aset	Ket
No.	Kode Barang/ ID Barang/ ID Aset	Reg.			Bertingkat/ Tidak	Beton/ Tidak			Tanggal	Nomor							
45	1.3.6.9.01.01.01.0004 9521682 9521682	0004	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Kawasan pemerintahan terpadu KBD Blok - Legoleg Kel/Desa. Legoleg Kec. Legoleg Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	92.187.500,00	08-11-2021/ bast 844-68 DWBASTP/XI/2021/ 08-11-2021/ 12537/ Aset Tetap	Subbag Tata Muda SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
46	1.3.6.9.01.01.01.0006 9521896 9521896	0006	Jalan, Irigasi dan Jaringan Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Jalan Poros Kolonel Lembong (Kawasan) Kel/Desa. KAB. BANDUNG BARAT Kec. Kab. Bandung Barat Kec. KAB. BANDUNG BARAT Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	97.200.000,00	21-12-2021/ 170/WASTPPC-PELAP/XII/2021/ 21-12-2021/ 12170/ Aset Tetap	- SKPD 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
47	1.3.6.9.01.01.01.0007 9521950 9521950	0007	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Pekerjaan Jasa Konsultansi Pengawasan Gedung C Lanud (Jasa Pelayanan) Kel/Desa. Kabupaten Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	83.703.000,00	03-12-2021/ 166/WASTPPC/GD-C/DPUTR/2021/ 03-12-2021/ 12156/ Aset Tetap	- SKPD 1 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
48	1.3.6.9.01.01.01.0008 9521958 9521958	0008	Tanah Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl. Cimareme - Padalarang Kel/Desa. Tagogapu Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh dari Sebab Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	8.859.500,00	29-12-2021/ 4309/PJB-01/DBASTP/XII/2021/ 29-12-2021/ 11176/ Aset Tetap	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl.Cimare-Padalarang SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
49	1.3.7.9.01.01.01.0010 9521952 9521952	0010	Tanah Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl. Cimare-Padalarang Kel/Desa. Tagogapu Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	8.809.900,00	29-12-2021/ 4309/PJB-01/DBASTP/XII/2021/ 29-12-2021/ 11164/ Aset Tetap	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl.Cimare-Padalarang SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
50	1.3.6.9.01.01.01.0011 9521680 9521680	0011	Tanah Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl. Cimare-Padalarang Kel/Desa. Tagogapu Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	8.859.900,00	29-12-2021/ 4309/PJB-01/DBASTP/XII/2021/ 29-12-2021/ 11164/ Aset Tetap	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl.Cimare-Padalarang SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
51	1.3.6.9.01.01.01.0012 9521687 9521687	0012	Tanah Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl. Cimare-Padalarang Kel/Desa. Tagogapu Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	8.809.900,00	29-12-2021/ 4309/PJB-01/DBASTP/XII/2021/ 29-12-2021/ 11164/ Aset Tetap	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl.Cimare-Padalarang SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
52	1.3.7.9.01.01.01.0013 9521693 9521693	0013	Tanah Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl. Cimare-Padalarang Kel/Desa. Tagogapu Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	8.809.900,00	29-12-2021/ 4309/PJB-01/DBASTP/XII/2021/ 29-12-2021/ 11164/ Aset Tetap	Biaya Apraisal Pembebasan Lahan Ruas Jl.Cimare-Padalarang SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
53	1.3.6.9.01.01.01.0014 9521795 9521795	0014	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2021	-	-	0,00	Jasa Konsultansi Pengawasan Pembebasan Kawasan Kolonel Lembong (Kawasan) Kel/Desa. KAB. BANDUNG BARAT Kec. Kab. Bandung Barat Kec. KAB. BANDUNG BARAT Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	789.225.900,00	08-12-2021/ 167/WASTPPC-C/DPUTR/XII/2021/ 08-12-2021/ 12498/ Aset Tetap	- SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
54	1.3.5.9.01.01.01.0008 2135/SIG 2135/SIG	0008	Jalan, Irigasi, dan jaringan Dalam Pengerjaan	2022	-	-	0,00	Jasa konsultansi pengawasan peningkatan Kawasan Cimahi Kel/Desa. Cimareme Kec. Cimareme Kec. Cimareme Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	99.209.500,00	27-06-2022/ 180/WASTPPC-C/DPUTR/VI/2022/ 27-06-2022/ 13311/ Aset Tetap	- SKPD 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001 Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
55	1.3.5.9.01.01.01.0009 2135/SIG 2135/SIG	0009	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2022	Permanen	Bertingkat	Beton	0,00	Kota Baru Parahyangan Desa Cipeundeuy Kecamatan Padalarang	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Operasional Baik/ -	8.958.429.397,00	05-12-2022/ 002.3.SOL.BBAPA/Deposit/2022/ 30-11-2022/ 13727/ Aset Tetap	- SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 08 URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 01 Dinas Pemuda dan Olahraga - 0001 Dinas Pemuda dan Olahraga - 001. Dinas Pemuda dan Olahraga
56	1.3.6.9.01.01.01.0010 2135/SIG 2135/SIG	0010	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2022	Permanen	Bertingkat	Beton	0,00	JASA KONSULTANSI PENGENDALIAN KEBAKARAN/EVALUASI BALAI PENYULUHAN KB Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd/ APBD Operasional Baik/ -	2.482.870,00	30-11-2022/ 004/BAST-BP/XI/2022/ 30-11-2022/ 13420/ Aset Tetap	- SKPD 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 08 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA - 01 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 0001 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 001 Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA)
57	1.3.6.9.01.01.01.0011 2135/SIG 2135/SIG	0011	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2022	-	-	-	0,00	FEASIBILITY STUDY UPTD PLK Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	89.171.000,00	19-12-2022/ 600/3421/BATTP/DPMPTSP/XII/2022/ 01-12-2022/ 13132/ Aset Tetap	- SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - 01 Dinas Tenaga Kerja - 0001 Dinas Tenaga Kerja - 001. Dinas Tenaga Kerja
58	1.3.6.9.01.01.01.0012 2135/SIG 2135/SIG	0012	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan	2022	-	-	-	0,00	DED UPTD PLK Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-	-	-	-	Pembelian Bukan Ins (Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd) APBD Operasional Baik/ -	8.911.200,00	16-05-2022/ 004.3.SOL.BBAPA/DED-PERKEMAKES/ 05-05-2022/ 2/XI/ Aset Tetap	- SKPD 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 07 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA - 01 Dinas Tenaga Kerja - 0001 Dinas Tenaga Kerja - 001. Dinas Tenaga Kerja

LAMPIRAN Cat.K 28

KARTU INVENTARIS BARANG (KIB) F
KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

Nomor			Nama Barang	Tahun Perolehan	Bangunan/KDP	Konstruksi Bangunan		Luas (m²)	Lokasi / Alamat	Dokumen		Tanggal Mulai	Status Tanah	Kode Tanah	Cara Perolehan / Sumber Dana / Status Barang / Kondisi / Penggunaan	Harga Konstruksi (Rupiah)	Tgl. Faktur / No. BAST / Tgl. SAST / ID Pemerintah / Status Aset	Ket
No.	Kode Barang / ID Barang / No. Aset	Reg.				Bertingkat / Tidak	Beton / Tidak			Tanggal	Nomor							
58	1.3.5.01.01.01.0001 2340391N 2340391N	0000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	-	-	-	0,00	DED Gedung WTC PPPA Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pembelian Bukan Tanah Dan Pengerjaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	32.227.347,00	12-08-2025/ 609/2.25/DPKBP/BAT/2025/ 12-08-2025/ 3135/ Aset Tetap	- DKPD. 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PELAYANAN UMUM - 01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 0001. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 001. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA)
60	1.3.5.01.51.01.0001 2340392N 2340392N	0000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	-	-	-	0,00	DED Gedung Bunda Asuh Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pembelian Bukan Tanah Dan Pengerjaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	38.447.947,00	11-09-2025/ 849/2.25/DPKBP/BPPA/2025/ 11-09-2025/ 3812/ Aset Tetap	- DKPD. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAN PELINDUNGAN ANAK - 01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 0001. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 001. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA)
61	1.3.5.01.99.01.0001 2340742U 2340742U	0000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	-	-	-	0,00	DED Gedung PUSPAGA Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pembelian Bukan Tanah Dan Pengerjaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	59.276.847,00	18-09-2025/ 989/2.25/DPKBP/BPPA/ 18-09-2025/ 3938/ Aset Tetap	DED Gedung PUSPAGA DKPD. 2. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 08. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK - 01. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 0001. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA) - 001. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPKBPPPA)
62	1.3.5.01.01.01.0001 2340743U 2340743U	0000	Gedung dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	-	-	-	0,00	Ang Kesehatan Perawatan Pembangunan Gedung Kecamatan Sadangserang Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	92.605.300,00	24-12-2025/ 2634/SARTIPC-[illegible]/2025/ 24-12-2025/ 3952/ Aset Tetap	- DKPD. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG - 01. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 0001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang - 001. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
63	1.3.5.01.01.01.0001 2340285U 2340285U	0000	Tanah Dalam Pengerjaan		2025	-	-	-	0,00	-,- Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	250.000,00	28-08-2025/ 12.1306.040/2025/Bappeda/ 04.2.10.0.00.01.0000/p.2025/ 2025/ 28-08-2025/ 3617/ Aset Tetap	- DKPD. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 04. URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN - 01. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 0001. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman - 001. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
64	1.3.5.03.01.03.0001 2340125U 2340125U	0000	Bidang dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	Permanen	Bertingkat	Beton	0,00	Indoor PPC Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pembelian Bukan Tanah Dan Pengerjaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	37.089.500,00	18-12-2025/ 05/PPPSC/BAST/XII/[illegible]/2025/ 18-12-2025/ 3868/ Aset Tetap	- Lantai 1/ DKPD. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN KESEHATAN - 01. Dinas Kesehatan - 0001. Dinas Kesehatan - 001. Dinas Kesehatan
65	1.3.5.03.01.01.0001 2340175U 2340175U	0000	Bidang dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	Permanen	Bertingkat	Lokasi	0,00	Ruptur Penlengkapan Lokal-wall Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pembelian Bukan Tanah Dan Pengerjaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	37.174.700,00	12-12-2025/ 09/PP Lokasi/BAST/XII/[illegible]/2025/ 12-12-2025/ 3768/ Aset Tetap	- Lantai 1/ DKPD. 3. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN KESEHATAN - 01. Dinas Kesehatan - 0001. Dinas Kesehatan - 001. Dinas Kesehatan
66	1.3.5.01.01.01.0001 2340391U 2340391U	0000	Bidang dan Bangunan Dalam Pengerjaan		2025	Permanen	Tidak	Beton	0,00	Pembangunan Puskesmas Cimenyan Tahap 1 Tahun 2025 Kec. Kab. Bandung Barat Kab. Bandung Barat	-	-			-	Pengadaan Barang Yang Dibeli Atau Diperoleh Atas Beban Apbd APBD Operasional Baik/ -	2.407.804.895,00	29-12-2025/ 008/KONTRAK-003/XII/[illegible]/2025/ 29-12-2025/ 3954/ Aset Tetap	- DKPD. 1. URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR - 03. URUSAN KESEHATAN - 01. Dinas Kesehatan - 0001. Dinas Kesehatan - 001. Dinas Kesehatan
Jumlah Harga								0,00								28.934.473.747,00		

LAMPIRAN Cat.K 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2025

dalam rupiah

No	Nama SKPD	Keadaan per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Keadaan per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penambahan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Pengurangan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	**Dinas Pendidikan**													36.665.817.312,57	471.571.632.476,50
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	245.896.139.663,81	61.561.379.474,06		472.797.030,00	305.319.942,00		62.745.496.395,06	350.109.400,00	302.406.142,00	36.016.396.979,57			90.867.459,29	262.539.151.816,37
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	259.659.464.340,42	23.580.424.915,21					23.580.424.915,21			90.867.459,29			-	4.661.997.119,12
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	3.761.163.330,10	607.743.720,93					607.743.720,93						-	-
	- Akmi Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP		85.839.548.089,23	-	472.797.030,00	305.319.942,00	-	86.622.215.061,23	350.109.400,00	302.406.142,00	36.107.264.438,86	-	-	36.759.779.981,86	738.512.672.482,99
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	840.777.700,00	10.920.140,00				36.097.104.409,86	10.920.140,00						-	555.909.840,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	103.339.972,72						36.097.104.409,86				84.391.658,00		84.391.658,00	36.202.552.752,58
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	1.014.319.672,72	10.920.140,00	-	-	-	36.097.104.409,86	36.108.024.549,86	-	-	-	84.391.658,00	-	84.391.658,00	37.957.952.560,58
	JUMLAH	1.014.319.672,72	85.850.518.229,23	-	472.797.030,00	305.319.942,00	36.097.104.409,86	122.730.239.611,09	350.109.400,00	302.406.142,00	36.107.264.438,86	84.391.658,00	-	36.844.171.669,86	776.470.625.052,57
2	**Dinas Kesehatan**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	426.419.901.253,78	22.270.547.017,19		296.290.000,00	3.381.766.276,80		40.807.403.293,99	434.766.667,00	3.435.847.160,60	9.893.646.245,83		2.275.100,00	13.765.535.173,43	453.558.968.374,34
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	71.303.380.179,25	7.880.622.958,10					7.880.622.958,10			869.459.817,02			869.459.817,02	78.521.360.320,33
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	3.533.540.587,99	668.628.653,83					668.628.653,83						-	4.028.127.241,82
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	503.160.633.821,83	45.778.798.829,32	-	296.290.000,00	3.381.766.276,80	-	49.456.354.906,12	434.766.667,00	3.435.847.160,60	10.584.106.057,85	-	2.275.100,00	14.456.994.985,45	536.169.513.941,04
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	899.360.923,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	676.339.340,00	133.847.283,00					133.347.283,00						-	809.686.623,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	8.930.111.082,21					10.584.106.057,85	10.584.106.057,85				446.710.250,00		446.710.250,00	19.067.586.890,06
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	9.606.450.422,21	133.847.283,00	-	-	-	10.584.106.057,85	10.717.453.340,85	-	-	-	446.710.250,00	-	446.710.250,00	19.876.893.813,06
	JUMLAH	512.767.183.643,33	45.911.846.814,32	-	296.290.000,00	3.381.766.276,80	10.584.106.057,85	60.174.008.246,97	434.766.667,00	3.435.847.160,60	10.584.106.057,85	446.710.250,00	2.275.100,00	14.903.705.235,45	556.046.407.754,78
3	**Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	34.857.399.185,00	1.243.819.986,34	13.650.000,00			122.850.000,00	1.380.319.986,34	6.468.369.317,60		2.213.687.222,23			8.682.056.539,83	27.555.662.632,51
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	72.533.486.987,57	6.810.756.870,09					6.810.756.870,09	9.976.960,00					9.976.960,00	79.334.166.897,66
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	903.689.087.237,82	87.337.710.387,66					87.337.710.387,66						-	989.943.717.781,48
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.009.950.813.409,39	95.392.317.439,09	13.650.000,00	-	-	122.850.000,00	95.528.817.439,09	6.478.346.277,60	-	2.213.687.222,23	-	-	8.692.033.499,83	1.096.835.547.545,64
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	1.880.374.800,00	472.343.700,00					472.343.700,00						-	2.352.718.500,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	4.413.824.011,57					2.213.687.222,23	2.686.038.922,23	-	-	122.850.000,00	71.314.101,40	-	194.164.101,40	6.905.865.832,40
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	6.303.198.811,57	472.343.700,00	-	-	-	2.213.687.222,23	2.686.038.922,23	-	-	122.850.000,00	71.314.101,40	-	194.164.101,40	9.258.584.332,40
	JUMLAH	1.016.302.012.417,95	95.864.661.139,09	13.650.000,00	-	-	2.336.537.222,23	98.214.856.361,32	6.478.346.277,60	-	2.336.537.222,23	71.314.101,40	-	8.886.197.601,23	1.106.030.665.178,04
4	**Dinas Permukiman dan Kawasan Permukiman**													1.801.666.249,00	7.201.702.272,71
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	2.760.436.530,78	450.021.720,31			102.900.371,62		552.922.108,93		102.900.371,62	898.765.976,38			-	12.064.595.910,52
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	10.539.944.135,30	2.424.641.783,22					2.424.641.783,22						-	44.790.265.676,41
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	38.074.188.560,07	8.038.959.996,34	8.955.063.120,00				16.994.023.116,34					10.277.946.000,00	10.277.946.000,00	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	58.364.579.216,15	10.913.623.500,87	8.955.063.120,00	-	102.900.371,62	-	19.971.587.008,49	-	102.900.371,62	898.765.976,38	-	10.277.946.000,00	11.279.612.348,00	68.856.553.868,64
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	553.327.737,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	452.762.980,40	100.815.746,60					100.815.746,60						-	5.560.372.522,65
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	4.662.006.546,48					808.765.976,38	808.765.976,38						-	6.116.351.255,86
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	5.114.769.526,88	100.815.746,60	-	-	-	808.765.976,38	909.581.722,98	-	-	-	-	-	-	12.230.051.515,51
	JUMLAH	63.479.348.749,03	11.014.439.255,47	8.955.063.120,00	-	102.900.371,62	808.765.976,38	20.971.168.723,47	-	102.900.371,62	898.765.976,38	-	10.277.946.000,00	11.379.612.348,00	71.170.905.124,59
5	**Satuan Polisi Pamong Praja**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	4.737.940.672,95	325.146.957,01			22.600.500,00		397.747.457,01		20.913.000,00	75.863.949,00			96.776.949,00	5.038.911.179,96
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	138.574.870,00	79.616.934,70					79.616.934,70						-	106.191.634,70
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	-	-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	4.876.515.593,95	404.763.886,71	-	-	22.600.500,00	-	427.364.386,71	-	20.913.000,00	75.863.949,00	-	-	96.776.949,00	5.227.103.031,66
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	329.842.100,00					75.863.949,00	75.863.949,00				16.994.000,00		16.994.000,00	578.912.049,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	329.842.100,00	-	-	-	-	75.863.949,00	75.863.949,00	-	-	-	16.994.000,00	-	16.994.000,00	578.912.049,00
	JUMLAH	5.206.357.693,95	404.763.886,71	-	-	22.600.500,00	75.863.949,00	503.228.335,71	-	20.913.000,00	75.863.949,00	16.994.000,00	-	112.770.949,00	5.806.015.080,66
6	**Badan Penanggulangan Bencana Daerah**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	8.538.108.422,98	950.806.665,23			54.800.000,00		1.005.606.665,23		54.800.000,00	438.079.000,00			492.879.000,00	8.850.910.088,13
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	-	-					-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	2.733.255,31	171.827,33					171.827,33						-	2.405.543,64
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	8.540.329.170,31	951.071.492,56	-	-	54.800.000,00	-	1.005.871.492,56	-	54.800.000,00	438.079.000,00	-	-	492.879.000,00	8.853.315.670,77
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	204.017.000,00	38.973.000,00					38.973.000,00						-	242.990.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	52.717.300,00	-				438.079.000,00	438.079.000,00						-	490.796.300,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	256.734.300,00	38.973.000,00	-	-	-	438.079.000,00	477.052.000,00	-	-	-	-	-	-	733.786.300,00
	JUMLAH	8.797.057.670,31	990.044.492,56	-	-	54.800.000,00	438.079.000,00	1.482.923.492,56	-	54.800.000,00	438.079.000,00	-	-	492.879.000,00	9.587.102.170,77
7	**Dinas Penanaman Kebakaran dan Penyelamatan**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	12.385.930.012,10	1.052.230.986,60			10.838.500,00		1.063.069.486,60		10.663.100,00	203.525.145,00			214.188.245,00	13.234.811.253,70
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	594.535.184,74	326.558.341,30					326.558.341,30						-	921.093.526,04
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	-	5.169.358,16					5.169.358,16						-	4.169.358,16
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	12.980.465.196,84	1.383.958.686,05	-	-	10.838.500,00	-	1.394.877.186,45	-	10.663.100,00	203.525.145,00	-	-	214.188.245,00	14.160.344.142,54
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-

LAMPIRAN CaLK 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Keadaan per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Keadaan per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Belum Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penambahan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penambahan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	844.181.116,66					283.525.145,00	283.525.145,00	-			-	-	-	1.127.706.261,66
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	844.181.116,66	-	-	-	-	283.525.145,00	283.525.145,00	-	10.663.100,00	203.525.145,00	-	-	214.188.245,00	15.809.850.404,00
	JUMLAH	13.824.636.313,55	1.983.238.698,45	-	-	10.838.810,00	283.525.145,00	2.197.602.335,45	-	10.663.100,00	203.525.145,00	-	-	214.188.245,00	
8	Dinas Sosial														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	3.605.375.386,00	153.197.275,00					153.197.275,00			627.377.598,97			627.377.598,97	4.131.195.012,03
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	361.678.430,00	28.779.836,38					28.779.836,38						-	390.458.266,38
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	3.967.053.816,00	181.977.111,38	-	-	-	-	181.977.111,38	-	-	627.377.598,97	-	-	627.377.598,97	4.521.653.328,41
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-				40.850.000,00		40.850.000,00	1.018.065.598,97
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	431.538.000,00					627.377.598,97	627.377.598,97						40.850.000,00	1.018.065.598,97
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	431.538.000,00	-	-	-	-	627.377.598,97	627.377.598,97	-	-	-	40.850.000,00	-	668.227.598,97	4.639.718.927,38
	JUMLAH	4.398.591.816,00	181.977.111,38	-	-	-	627.377.598,97	809.354.710,35	-	-	627.377.598,97	40.850.000,00	-	668.227.598,97	
9	Dinas Tenaga Kerja														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	6.728.591.760,92	2.729.261.974,94	948.750.000,00		16.349.600,00		3.691.360.574,94		13.478.880,00	1.017.550.038,83			1.031.028.918,83	9.388.923.416,93
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	549.231.505,03	1.996.875,00					1.996.875,00	540.644.005,03					540.644.005,03	9.904.375,00
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	2.794.000,00	222.833,33					222.833,33						-	3.016.833,33
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	7.279.527.265,95	2.730.391.683,27	948.750.000,00	-	16.349.600,00	-	3.693.498.283,27	540.644.005,03	13.478.880,00	1.017.550.038,83	-	-	1.571.672.923,86	9.401.344.625,36
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	335.421.867,00				11.226.687,40	1.017.550.038,83	1.028.776.726,23	-	11.226.687,40	-	124.550.800,00	-	135.777.487,40	1.224.421.105,83
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	335.421.867,00	-	-	-	11.226.687,40	1.017.550.038,83	1.028.776.726,23	-	11.226.687,40	-	124.550.800,00	-	135.777.487,40	1.224.421.105,83
	JUMLAH	7.614.949.132,95	2.730.391.683,27	948.750.000,00	-	27.575.287,40	1.017.550.038,83	4.722.267.009,50	540.644.005,03	24.705.567,40	1.017.550.038,83	124.550.800,00	-	1.707.450.411,26	10.625.765.731,09
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	13.356.358.179,94	134.866.057,86		336.250.000,00	20.750.000,00		1.091.866.057,86	750.415.666,00	20.750.000,00	2.180.470.011,00			2.951.635.677,00	11.496.588.570,80
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.174.827.980,83	173.634.764,91					173.634.764,91						-	1.348.462.745,74
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	14.531.186.160,77	308.500.842,77	-	336.250.000,00	20.750.000,00	-	1.265.500.842,77	750.415.666,00	20.750.000,00	2.180.470.011,00	-	-	2.951.635.677,00	12.845.044.276,54
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	2.690.806.575,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	510.330.564,00					2.180.470.011,00	2.180.470.011,00						-	2.690.806.575,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	510.330.564,00	-	-	-	-	2.180.470.011,00	2.180.470.011,00	-	-	-	-	-	-	5.381.613.150,00
	JUMLAH	15.041.517.674,77	308.500.842,77	-	336.250.000,00	20.750.000,00	2.180.470.011,00	3.445.970.853,77	750.415.666,00	20.750.000,00	2.180.470.011,00	-	-	2.951.635.677,00	18.226.657.426,54
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	32.527.964.812,37	2.735.679.201,05					2.735.679.201,05			2.074.789.468,78			2.074.789.468,78	33.188.754.544,64
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	3.988.207.031,85	579.943.034,46					579.943.034,46						-	4.568.150.066,31
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	5.142.761.304,91	274.268.549,33					274.268.549,33						-	5.417.029.854,24
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	31.658.853.149,13	3.589.890.824,84	-	-	-	-	3.589.890.824,84	-	-	2.074.789.468,78	-	-	2.074.789.468,78	38.173.934.508,19
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	138.906.300,00	34.749.000,00					34.749.000,00						-	173.245.300,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	834.058.013,58					2.074.789.468,78	2.074.789.468,78				2.283.786,00		2.283.786,00	2.906.943.696,36
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	973.034.013,58	34.749.000,00	-	-	-	2.074.789.468,78	2.109.538.468,78	-	-	-	2.283.786,00	-	2.283.786,00	3.080.188.996,36
	JUMLAH	32.631.887.162,71	3.624.639.824,84	-	-	-	2.074.789.468,78	5.699.429.293,63	-	-	2.074.789.468,78	2.283.786,00	-	2.077.073.254,78	36.254.123.504,55
12	Dinas Lingkungan Hidup														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	23.360.990.002,93	2.179.618.202,03			18.350.000,00		2.396.968.202,03		24.466.666,67	2.540.491.900,50			2.564.958.567,17	23.201.989.637,79
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.536.329.485,57	187.641.123,77		9.976.960,00			197.618.083,77						-	1.733.947.571,34
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	637.430.645,76	80.697.301,51					80.697.301,51						-	718.127.947,27
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	25.573.750.134,26	2.446.956.629,31	-	9.976.960,00	18.350.000,00	-	2.675.283.589,31	-	24.466.666,67	2.540.491.900,50	-	-	2.564.958.567,17	25.654.045.156,10
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	975.025.000,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	778.420.000,00	196.605.000,00					196.605.000,00						-	
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	2.133.320.758,00					2.540.491.900,50	2.540.491.900,50				7.940.000,00		7.940.000,00	5.665.872.658,50
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	2.911.740.758,00	196.605.000,00	-	-	-	2.540.491.900,50	2.737.096.900,50	-	-	-	7.940.000,00	-	7.940.000,00	6.640.897.658,50
	JUMLAH	29.485.440.922,26	2.643.561.629,31	-	9.976.960,00	18.350.000,00	2.540.491.900,50	5.412.380.489,81	-	24.466.666,67	2.540.491.900,50	7.940.000,00	-	2.572.898.567,17	32.294.942.814,60
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	16.713.381.590,62	739.332.834,86			248.049.200,00		986.381.234,86		248.049.200,00	3.723.174.201,55			3.971.223.401,55	13.728.459.223,93
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	16.717.381.590,62	739.332.834,86	-	-	248.049.200,00	-	986.381.234,86	-	248.049.200,00	3.723.174.201,55	-	-	3.971.223.401,55	13.732.459.223,93
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	163.934.420,00	106.030.417,00					106.030.412,00						-	367.964.832,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	1.219.227.679,03					3.723.174.201,55	3.723.174.201,53						-	4.942.996.880,58
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	1.401.162.099,03	106.030.412,00	-	-	-	3.723.174.201,55	3.829.204.613,58	-	-	-	-	-	-	5.310.961.712,58
	JUMLAH	18.118.550.189,65	844.363.246,86	-	-	248.049.200,00	3.723.174.201,55	4.815.585.848,41	-	248.049.200,00	3.723.174.201,55	-	-	3.971.223.401,55	18.963.930.936,51
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	4.196.295.926,00	181.927.870,00			33.087.800,00		295.803.629,00		23.087.800,00	419.139.439,34			442.227.239,34	3.957.372.436,66
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-

LAMPIRAN Cat K 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Keadaan per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Keadaan per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyusutan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyusutan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	4.194.595.036,00	161.922.870,00	-	-	23.082.800,00	-	285.005.670,00	-	23.082.800,00	419.139.459,34	-	-	442.222.259,34	3.937.378.436,66
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	55.632.560,00	135.138.660,00					135.138.660,00						-	671.002.200,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	213.173.250,00					419.139.459,34	419.139.459,34				78.000.000,00		78.000.000,00	554.305.209,34
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	772.846.310,00	135.138.660,00	-	-	-	419.139.459,34	554.278.099,34	-	-	-	78.000.000,00	-	78.000.000,00	1.226.308.409,34
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	4.966.441.296,00	297.053.510,00	-	-	23.082.800,00	419.139.459,34	739.275.769,34	-	23.082.800,00	419.139.459,34	78.000.000,00	-	520.238.259,34	5.185.886.840,00
	JUMLAH							-						-	-
15	Dinas Perhubungan							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	45.519.609.336,40	3.526.980.139,45	1.810.725.000,00	349.063.750,00	33.829.920,00		8.720.607.809,45		35.912.400,00	1.681.256.670,59			1.717.169.070,59	50.514.305.935,76
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	12.236.807.176,87	5.147.901.786,50					5.147.901.786,50						-	19.384.708.963,37
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	4.231.270.567,80	364.907.708,20					364.907.708,20						-	4.596.178.276,00
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-						-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	63.988.747.080,07	10.039.788.644,15	1.810.725.000,00	349.063.750,00	33.829.920,00	-	12.233.417.314,15	-	35.912.400,00	1.681.256.670,59	-	-	1.717.169.070,59	74.504.995.224,43
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	1.191.869.240,00	295.267.312,00				1.681.256.670,59	1.681.256.670,59						-	1.476.356.560,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	1.464.993.946,54						-						-	3.165.352.257,13
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	2.665.163.814,54	295.267.312,00	-	-	-	1.681.256.670,59	1.976.523.982,59	-	-	-	-	-	-	4.641.888.817,13
	JUMLAH	66.653.911.915,41	10.335.055.956,15	1.810.725.000,00	349.063.750,00	33.829.920,00	1.681.256.670,59	14.209.941.296,74	-	35.912.400,00	1.681.256.670,59	-	-	1.717.169.070,59	79.146.884.141,56
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	11.660.164.269,28	4.178.758.413,29		23.600.000,00	650.691.073,61		4.853.041.485,90	58.342.375,00	690.018.073,61	948.592.035,81			1.696.952.484,42	14.796.253.270,76
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	179.702.100,58	43.234.033,42					43.234.033,42						-	179.936.134,00
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	98.933.638,56	21.949.257,14					21.949.257,14						-	120.201.745,70
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-						-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	11.868.679.708,40	4.243.972.802,85	-	23.600.000,00	650.691.073,61	-	4.918.163.876,56	58.342.375,00	690.018.073,61	948.592.035,81	-	-	1.696.952.484,42	15.096.391.150,46
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	272.595.600,00	69.396.600,00					69.396.600,00						-	346.992.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	1.063.027.158,83	-				948.592.035,81	948.592.035,81				180.876.348,78		180.876.348,78	1.930.742.645,11
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	1.340.612.758,83	69.396.600,00	-	-	-	948.592.035,81	1.017.988.635,81	-	-	-	180.876.348,78	-	180.876.348,78	2.277.724.645,11
	JUMLAH	13.209.292.467,23	4.313.369.402,85	-	23.600.000,00	650.691.073,61	948.592.035,81	5.936.152.512,37	58.342.375,00	690.018.073,61	948.592.035,81	180.876.348,78	-	1.877.828.833,20	17.267.616.095,65
	JUMLAH							-						-	-
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	2.553.925.979,00	209.379.214,35					209.379.214,35			251.857.067,00			251.857.067,00	2.511.448.126,35
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.553.925.979,00	209.379.214,35	-	-	-	-	209.379.214,35	-	-	251.857.067,00	-	-	251.857.067,00	2.511.448.126,35
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	46.828.100,00	22.704.300,00					22.704.300,00						-	69.532.400,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	70.226.900,00					251.857.067,00	251.857.067,00						-	322.083.967,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	116.865.000,00	22.704.300,00	-	-	-	251.857.067,00	274.561.367,00	-	-	-	-	-	-	391.426.367,00
	JUMLAH	2.670.790.979,00	232.083.514,35	-	-	-	251.857.067,00	483.940.581,35	-	-	251.857.067,00	-	-	251.857.067,00	2.902.874.493,35
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	5.271.320.873,00	335.492.870,00			86.463.000,00		421.955.870,00	41.899.000,00	88.357.500,00	673.917.930,49			804.174.430,49	4.989.109.513,51
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	5.271.320.873,00	335.492.870,00	-	-	86.463.000,00	-	421.955.870,00	41.899.000,00	88.357.500,00	673.917.930,49	-	-	804.174.430,49	4.989.109.513,51
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	47.993.000,00						-						-	47.993.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	473.074.600,00					673.917.930,49	673.917.930,49				21.878.000,00		21.878.000,00	1.025.074.530,49
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	521.067.600,00	-	-	-	-	673.917.930,49	673.917.930,49	-	-	-	21.878.000,00	-	21.878.000,00	1.073.067.530,49
	JUMLAH	5.792.388.473,00	335.492.870,00	-	-	86.463.000,00	673.917.930,49	1.095.873.800,49	41.899.000,00	88.357.500,00	673.917.930,49	21.878.000,00	-	826.052.430,49	6.062.869.043,00
19	Dinas Pemuda dan Olahraga							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	2.948.430.581,60	463.124.835,00			207.116.050,00		338.240.885,00		109.161.250,00	328.846.590,00			438.007.840,00	2.780.667.976,60
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.103.219.324,60	110.459.809,85					110.459.809,85						-	1.712.679.134,45
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	1.593.375.106,70	15.455.510,87					15.455.510,87						-	1.609.830.617,57
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-						-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	4.945.024.964,30	589.040.154,72	-	-	207.116.050,00	-	696.156.204,72	-	109.161.250,00	328.846.590,00	-	-	438.007.840,00	5.201.173.349,02
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	121.341.000,00	9.702.000,00					9.702.000,00						-	133.043.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	350.265.000,00					328.846.590,00	328.846.590,00				549.409.490,00		549.409.490,00	29.701.509.590,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	471.606.000,00	9.702.000,00	-	-	-	328.846.590,00	338.548.590,00	-	-	-	549.409.490,00	-	549.409.490,00	162.745.000,00
	JUMLAH	5.416.630.964,30	598.742.154,72	-	-	207.116.050,00	328.846.590,00	1.034.704.794,72	-	109.161.250,00	328.846.590,00	549.409.490,00	-	987.417.330,00	5.363.918.349,02
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	8.962.802.602,48	546.973.218,70	26.146.000,00	63.246.500,00	83.575.000,00		723.841.218,70		83.575.000,00	2.701.562.558,51			2.785.137.558,51	7.900.705.662,67
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	972.113.350,53	134.565.715,01					134.565.715,01						-	1.106.679.065,54
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	58.117.666,67	7.247.000,00					7.247.000,00						-	65.364.666,67
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-						-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	10.093.032.989,68	688.786.433,71	26.146.000,00	63.246.500,00	83.575.000,00	-	864.853.933,71	-	83.575.000,00	2.701.562.558,51	-	-	2.785.137.558,51	9.172.749.364,88
	- Akum Peny Kerjasama Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	40.000.000,00	10.000.000,00					10.000.000,00						-	50.000.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	497.380.000,00					2.701.562.558,51	2.701.562.558,51				375.800.000,00		375.800.000,00	2.823.062.558,51
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	537.380.000,00	10.000.000,00	-	-	-	2.701.562.558,51	2.711.562.558,51	-	-	-	375.800.000,00	-	375.800.000,00	2.873.062.558,51
	JUMLAH	10.630.332.989,68	698.786.433,71	26.146.000,00	63.246.500,00	83.575.000,00	2.701.562.558,51	3.576.416.492,22	-	83.575.000,00	2.701.562.558,51	375.800.000,00	-	3.160.937.558,51	11.045.811.923,39
	JUMLAH							-						-	-
21	Dinas Perikanan dan Peternakan							-						-	-
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	12.101.259.162,83	1.399.764.365,12			87.927.734,00		1.487.712.499,12		88.192.241,50	2.602.142.569,00			2.690.334.810,50	11.498.866.851,45

LAMPIRAN Cat.K 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kondisi per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Kondisi per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Belanja Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyatuan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyatuan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	10.471.581.700,48	749.373.974,68					749.373.974,68			2.629.523.538,19			2.629.523.538,19	8.577.431.826,99
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	4.759.793.930,81	327.730.353,14					327.730.353,14			5.259.937.795,91			5.259.937.795,91	5.827.591.287,04
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-			-			-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	27.288.634.454,12	2.586.871.092,94	-	-	87.977.734,00	-	2.594.848.826,94	-	88.192.241,50	6.889.598.403,08	-	-	6.977.790.644,58	22.905.692.636,48
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	44.660.000,00						-						-	44.660.000,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	2.063.783.045,00				6.889.598.403,00		6.889.598.403,00	113.860.000,00			738.326.822,00		351.886.822,00	8.601.454.626,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	2.108.483.045,00					6.889.598.403,00	6.889.598.403,00	113.860.000,00		-	238.326.822,00	-	352.186.822,00	8.646.114.626,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	29.397.037.499,12	2.586.871.092,94	-	-	87.977.734,00	6.889.598.403,00	9.484.447.230,02	113.860.000,00	88.192.241,50	6.889.598.403,08	238.326.822,00	-	7.329.677.466,58	31.551.807.262,56
	JUMLAH														
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	5.681.409.475,72	360.757.988,56			12.983.880,00		373.741.868,56		11.911.000,00	307.157.550,00			319.068.630,00	5.736.142.714,28
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	932.124.479,81	55.263.911,77					55.263.911,77						-	987.388.391,58
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	966.869.729,33	25.196.650,01					25.196.650,01						-	992.066.379,34
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	7.570.403.684,86	441.218.550,34	-	-	12.983.880,00	-	454.202.430,34	-	11.911.000,00	307.157.550,00	-	-	319.068.630,00	7.705.597.485,20
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	791.117.040,00	197.779.260,00					197.779.260,00						-	988.896.300,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	1.132.599.677,76					307.157.550,00	307.157.550,00				101.633.200,00		101.633.200,00	1.337.234.027,76
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	1.923.326.717,76	197.779.260,00	-	-	-	307.157.550,00	504.936.810,00	-	-	-	101.633.200,00	-	101.633.200,00	2.326.630.327,76
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	9.493.730.402,62	638.997.810,34	-	-	12.983.880,00	307.157.550,00	959.139.240,34	-	11.911.000,00	307.157.550,00	101.633.200,00	-	420.701.830,00	10.032.227.812,96
	JUMLAH														
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	8.648.672.913,80	181.409.371,23		41.899.000,00	86.877.700,00		510.266.071,23		86.877.700,00	1.102.582.678,95			1.189.460.378,95	7.969.478.603,28
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	7.062.393.638,83	959.623.456,95					959.623.456,95						-	8.022.017.095,78
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	4.259.991.511,77	463.984.977,78					463.984.977,78						-	4.723.976.489,55
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	19.967.048.064,46	1.885.877.807,94	-	41.899.000,00	86.877.700,00	-	1.933.854.507,94	-	86.877.700,00	1.102.582.678,95	-	-	1.189.460.378,95	20.711.442.193,45
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	140.169.300,00	31.253.100,00					31.253.100,00				12.487.600,00		12.487.600,00	159.421.400,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	492.289.068,18				1.102.582.678,95		1.102.582.678,95				12.487.600,00		12.487.600,00	1.782.384.147,13
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	632.458.368,18	31.253.100,00	-	-	-	1.102.582.678,95	1.133.835.778,95	-	-	-	12.487.600,00	-	1.201.947.978,95	22.465.249.540,58
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	20.599.506.232,64	1.836.330.907,94	-	41.899.000,00	86.877.700,00	1.102.582.678,95	2.067.698.286,89	-	86.877.700,00	1.102.582.678,95	12.487.600,00	-	1.201.947.978,95	22.465.249.540,58
	JUMLAH														
24	Sekretariat Daerah	44.887.715.567,85	3.882.681.627,85		347.396.292,00	17.500.000,00		4.247.577.919,85	773.581.030,00	17.500.000,00	10.511.022.585,37		144.927.500,00	11.447.032.415,37	37.647.736.067,33
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	19.903.246.140,80	1.475.903.036,23					475.903.036,23	322.926.740,00		71.500.200,00			394.426.940,00	20.084.422.237,12
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan		-					-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	64.790.961.708,74	5.358.584.664,08	-	347.396.292,00	17.500.000,00	-	5.723.480.956,08	1.096.613.770,00	17.500.000,00	10.582.022.085,37	-	144.927.500,00	11.841.063.355,37	58.672.159.304,45
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	2.051.861.570,00	472.394.190,00					472.394.190,00						-	2.524.255.760,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	492.587.950,65				10.582.622.085,37		10.582.622.085,37	35.000.000,00			124.137.065,00		159.137.065,00	10.916.072.071,02
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	492.587.950,65	-	-	-	-	10.582.622.085,37	11.055.016.275,37	35.000.000,00	-	-	124.137.065,00	-	159.137.065,00	13.440.328.721,02
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	2.544.449.520,65	472.394.190,00	-	-	-	10.582.622.085,37	11.527.410.465,37	35.000.000,00	-	-	124.137.065,00	-	159.137.065,00	13.440.328.721,02
	JUMLAH	67.334.811.229,39	5.830.978.854,08	-	347.396.292,00	17.500.000,00	10.582.622.085,37	16.778.477.231,45	1.131.613.770,00	17.500.000,00	10.582.622.085,37	124.137.065,00	144.927.500,00	12.000.800.420,37	72.112.488.025,47
	JUMLAH														
25	Sekretariat DPRD	11.942.095.740,02	7.095.639.277,82		5.445.667.034,60	132.883.800,00		13.674.189.312,42	23.600.000,00	132.883.000,00	577.861.400,00			734.344.400,00	24.882.140.652,44
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	13.361.782.788,53	3.841.935.788,45					3.841.935.788,45						-	16.760.818.576,98
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	14.949.955,16	146.999.171,85					146.999.171,85						-	161.949.127,01
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	24.318.827.983,71	11.083.574.238,12	-	5.445.667.034,60	132.883.800,00	-	17.662.724.272,72	23.600.000,00	132.883.000,00	577.861.400,00	-	-	734.344.400,00	41.246.907.856,43
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	469.097.100,00	34.616.900,00					34.616.900,00						-	503.683.000,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	763.759.924,75				577.661.400,00		577.661.400,00				109.438.500,00		109.438.500,00	1.231.982.824,75
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	763.759.924,75	-	-	-	577.661.400,00		612.278.300,00	-	-	-	109.438.500,00	-	109.438.500,00	1.735.660.824,75
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	1.232.857.024,75	34.616.900,00	-	-	577.661.400,00		646.895.200,00	-	-	-	109.438.500,00	-	109.438.500,00	2.239.643.824,75
	JUMLAH	25.551.685.008,46	11.118.191.138,12	-	5.445.667.034,60	132.883.800,00	577.661.400,00	18.274.502.572,72	23.600.000,00	132.883.000,00	577.861.400,00	109.438.500,00	-	843.582.900,00	43.972.574.681,18
	JUMLAH														
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	8.133.372.556,86	385.581.998,13		77.866.600,00	15.514.400,00		478.962.998,13		15.514.400,00	1.091.665.333,00			1.107.179.733,00	7.485.155.821,99
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin							-						-	-
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	8.133.372.556,86	385.581.998,13	-	77.866.600,00	15.514.400,00	-	478.962.998,13	-	15.514.400,00	1.091.665.333,00	-	-	1.107.179.733,00	7.485.155.821,99
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	2.557.121.520,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	2.008.109.120,00	549.012.000,00					549.012.000,00						-	2.557.121.520,00
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	1.099.161.500,00				1.091.665.333,00		1.091.665.333,00				375.698.680,00		375.698.680,00	1.815.428.161,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	1.099.161.500,00	-	-	-	1.091.665.333,00		1.640.677.333,00	-	-	-	375.698.680,00	-	375.698.680,00	4.372.549.681,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	3.107.270.620,00	549.012.000,00	-	-	1.091.665.333,00		2.099.690.333,13	-	15.514.400,00	1.091.665.333,00	375.698.680,00	-	1.482.878.413,00	11.857.405.302,99
	JUMLAH	11.240.643.384,86	934.593.998,13	-	77.866.600,00	15.514.400,00	1.091.665.333,00								
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	17.059.496.391,72	1.324.597.703,85		934.658.566,00	116.656.385,00		2.425.912.554,85	356.361.467,00	116.656.385,00	3.895.913.815,44		29.879.500,00	4.398.811.167,44	15.086.597.940,13
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin		73.780.971,66		963.679.745,03	-		937.651.716,69						-	937.651.716,69
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	31.534.929,76	151.483.416,37					151.483.416,37						-	183.018.346,13
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	17.091.041.230,48	1.549.862.091,88	-	1.848.329.211,03	116.656.385,00	-	3.514.847.687,91	356.361.467,00	116.656.385,00	3.895.913.815,44	-	29.879.500,00	4.398.811.167,44	16.207.077.250,95
	JUMLAH														
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	3.035.777.745,72			186.860.000,00	83.934.642,00	3.895.913.815,44	4.165.908.457,44		83.934.642,00		399.591.075,72		483.525.717,72	7.718.160.488,44
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	3.035.777.745,72	-	-	186.860.000,00	83.934.642,00	3.895.913.815,44	4.165.908.457,44	-	83.934.642,00	-	399.591.075,72	-	483.525.717,72	7.718.160.488,44
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA														

LAMPIRAN LAIK 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kondisi per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Kondisi per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Beban Penyusutan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Beban Penyusutan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Beban KIB	Beban Aset			Beban KIB	Beban Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	JUMLAH	28.726.818.959,30	1.549.862.691,58	-	2.83-.389.211,03	280.591.027,00	3.895.913.815,44	7.680.756.145,35	356.361.467,00	200.591.027,00	3.895.913.815,44	399.881.075,72	29.879.500,00	4.882.336.885,16	23.524.238.239,39
29	Badan Pendapatan Daerah														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	9.998.769.991,07	795.791.436,84			23.444.798,00		819.236.234,84	21.862.258,00	23.444.798,00	1.260.846.776,76			1.305.353.824,76	9.412.652.401,15
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	9.998.769.991,07	795.791.436,84	-	-	23.444.798,00	-	819.236.234,84	21.862.258,00	23.444.798,00	1.260.846.776,76	-	-	1.305.353.824,76	9.412.652.401,15
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	1.175.475.399,80	235.443.100,00					235.443.100,00						-	1.410.920.499,80
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	923.718.335,61					1.260.846.776,76	1.260.846.776,76				68.970.629,00		68.970.629,00	2.115.594.483,37
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	2.109.193.735,61	235.443.100,00	-	-	-	1.260.846.776,76	1.496.289.876,76	-	-	-	68.970.629,00	-	68.970.629,00	3.524.514.981,17
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	12.005.965.726,68	1.031.234.536,84	-	-	23.444.798,00	1.260.846.776,76	2.315.526.111,60	21.862.258,00	23.444.798,00	1.260.846.776,76	68.970.629,00	-	1.374.324.453,76	12.937.167.382,52
	JUMLAH														
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	6.835.227.707,60	200.744.253,90			110.400.000,00		311.144.253,90		110.400.000,00	1.140.718.240,00			1.251.118.240,00	5.945.253.721,50
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	487.608.567,68	36.953.608,73					36.953.608,73						-	524.644.176,47
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	59.511.000,00						-						-	59.511.000,00
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	7.432.429.275,34	237.697.862,63	-	-	110.400.000,00	-	348.097.862,63	-	110.400.000,00	1.140.718.240,00	-	-	1.251.118.240,00	6.529.408.897,97
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	133.647.750,00						-						-	133.647.750,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	345.662.977,00					1.140.718.240,00	1.140.718.240,00				325.433.729,00		325.433.729,00	1.163.947.535,09
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	479.310.227,00	-	-	-	-	1.140.718.240,00	1.140.718.240,00	-	-	-	322.433.729,00	-	322.433.729,00	1.297.594.729,09
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	7.911.739.502,34	237.697.862,63	-	-	110.400.000,00	1.140.718.240,00	1.488.816.102,63	-	110.400.000,00	1.140.718.240,00	322.433.729,00	-	1.573.551.969,00	7.827.003.626,87
	JUMLAH														
30	Inspektorat Daerah														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	5.430.321.178,00	486.644.153,75			17.500.000,00		504.144.153,75	54.895.500,00	17.500.000,00	716.400.460,00			788.795.960,00	5.145.669.371,75
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	5.430.321.178,00	486.644.153,75	-	-	17.500.000,00	-	504.144.153,75	54.895.500,00	17.500.000,00	716.400.460,00	-	-	788.795.960,00	5.145.669.371,75
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	175.945.000,00					716.400.460,00	716.400.460,00				14.445.000,00		14.445.000,00	877.800.460,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	175.945.000,00	-	-	-	-	716.400.460,00	716.400.460,00	-	-	-	14.445.000,00	-	14.445.000,00	877.800.460,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	5.606.266.178,00	486.644.153,75	-	-	17.500.000,00	716.400.460,00	1.220.544.613,75	54.895.500,00	17.500.000,00	716.400.460,00	14.445.000,00	-	803.240.960,00	6.023.469.831,75
	JUMLAH														
31	Kecamatan Batujajar														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.034.798.487,00	93.590.280,00			16.875.000,00		110.465.280,00		16.875.000,00	264.344.335,00			281.219.335,00	864.044.232,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	853.445.390,00	3.904.800,00					3.904.800,00						-	857.440.278,00
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	1.459.000,00						-						-	1.459.000,00
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.889.702.857,00	97.595.760,00	-	-	16.875.000,00	-	114.460.760,00	-	16.875.000,00	264.344.335,00	-	-	281.219.335,00	1.722.944.293,00
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	279.344.335,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	15.000.000,00					264.344.335,30	264.344.335,00						-	279.344.335,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	15.000.000,00	-	-	-	-	264.344.335,00	264.344.335,00	-	-	-	-	-	-	279.344.335,00
	JUMLAH	1.924.702.857,00	97.595.760,00	-	-	16.875.000,00	264.344.335,00	378.805.095,00	-	16.875.000,00	264.344.335,00	-	-	281.219.335,00	2.022.288.617,00
32	Kecamatan Cipeundeuy														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	3.137.199.440,03	130.149.385,00					130.149.385,00			166.136.780,03			166.136.780,03	3.101.211.045,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	663.223.503,23	39.050.512,46					39.050.512,46						-	702.274.015,69
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.795.422.943,26	168.198.897,46	-	-	-	-	168.198.897,46	-	-	166.136.780,03	-	-	166.136.780,03	1.797.485.060,69
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	54.407.000,00					166.136.780,03	166.136.780,03	37.500.000,00					37.500.000,00	183.043.780,03
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	54.407.000,00	-	-	-	-	166.136.780,03	166.136.780,03	37.500.000,00	-	-	-	-	37.500.000,00	183.043.780,03
	JUMLAH	1.849.829.943,26	168.198.897,46	-	-	-	166.136.780,03	334.335.677,49	37.500.000,00	-	166.136.780,03	-	-	203.636.780,03	1.980.528.840,72
33	Kecamatan Gununghalu														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	992.539.691,00	120.453.040,00					120.453.040,00			119.294.950,00			119.294.950,00	993.697.781,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	653.700.519,99	54.795.500,91					54.795.500,91						-	708.496.020,90
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.646.240.210,99	175.248.540,91	-	-	-	-	175.248.540,91	-	-	119.294.950,00	-	-	119.294.950,00	1.702.193.801,90
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						119.294.950,00	119.294.950,00				8.000.000,00		8.000.000,00	144.794.950,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	33.500.000,00					119.294.950,00	119.294.950,00	-	-	-	8.000.000,00	-	8.000.000,00	144.794.950,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	33.500.000,00	-	-	-	-	119.294.950,00	294.543.490,91	-	-	119.294.950,00	8.000.000,00	-	127.294.950,00	1.846.988.751,90
	JUMLAH	1.679.740.210,99	175.248.540,91	-	-	-	119.294.950,00	294.543.490,91	-	-	119.294.950,00	8.000.000,00	-	127.294.950,00	1.846.988.751,90
34	Kecamatan Padalarang														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.221.202.664,00	141.812.450,00			7.200.000,00		149.012.450,00		9.000.000,00	199.511.000,00			208.511.000,00	1.013.704.114,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	83.681.700,00	7.795.712,50					7.795.712,50						-	91.477.412,50
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.305.064.364,00	149.608.162,50	-	-	7.200.000,00	-	156.808.162,50	-	9.000.000,00	199.511.000,00	-	-	208.511.000,00	1.105.361.526,50
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-

LAMPIRAN CALK 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

dalam rupiah

No	Nama SKPD	Keadaan per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Keadaan per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyatuan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyatuan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						99.511.000,00	99.511.000,00						-	99.511.000,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain						199.511.000,00	199.511.000,00	-	-	-	-	-	-	199.511.000,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	-	-	-	-	-	199.511.000,00	199.511.000,00	-	-	-	-	-	-	199.511.000,00
	JUMLAH	1.305.064.364,80	149.608.162,50	-	-	7.200.000,00	199.511.000,00	356.319.162,50	-	9.000.000,00	199.511.000,00	-	-	208.511.000,00	1.452.872.526,50
35	**Kecamatan Lembang**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.531.665.497,03	123.733.310,00		12.474.000,00	5.000.000,00		141.197.310,00		5.000.000,00	351.444.280,03			356.444.280,03	1.316.418.527,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.817.890.016,85	220.937.697,20					220.937.697,20						-	2.038.827.714,05
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	3.349.555.513,88	344.655.007,20	-	12.474.000,00	5.000.000,00	-	362.129.007,20	-	5.000.000,00	351.444.280,03	-	-	356.444.280,03	3.355.241.141,05
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	491.834.280,03
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	140.380.000,00					351.444.280,03	351.444.280,03	-	-	-	-	-	-	491.834.280,03
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	140.380.000,00	-	-	-	-	351.444.280,03	351.444.280,03	-	-	-	-	-	-	491.834.280,03
	JUMLAH	3.489.935.513,88	344.655.007,20	-	12.474.000,00	5.000.000,00	351.444.280,03	713.573.287,23	-	5.000.000,00	351.444.280,03	-	-	356.444.280,03	3.847.075.421,08
36	**Kecamatan Sindangkerta**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	914.586.229,20	125.929.544,80					125.929.544,80						-	1.040.515.774,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.025.839.328,92	71.294.849,64					71.294.849,64						-	1.097.134.178,56
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.942.435.568,12	197.224.394,44	-	-	-	-	197.224.394,44	-	-	101.643.600,00	-	-	101.643.600,00	2.038.016.562,56
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						101.643.600,00	101.643.600,00						-	193.290.577,40
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	91.646.977,40					101.643.600,00	101.643.600,00	-	-	-	-	-	-	193.290.577,40
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	91.646.977,40	-	-	-	-	101.643.600,00	203.287.200,00	-	-	101.643.600,00	-	-	101.643.600,00	2.231.307.139,96
	JUMLAH	2.034.082.735,52	197.224.394,44	-	-	-	101.643.600,00	298.867.994,44	-	-	101.643.600,00	-	-	101.643.600,00	4.269.323.702,52
37	**Kecamatan Cisarua**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	943.701.361,99	135.811.749,16			1.830.000,00		137.641.749,16		2.287.500,00	96.881.000,00			99.168.500,00	981.385.974,15
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	829.247.230,73	62.133.737,71					62.133.737,71						-	891.380.968,44
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.772.948.592,72	197.945.486,87	-	-	1.830.000,00	-	199.775.486,87	-	2.287.500,00	96.881.000,00	-	-	99.168.500,00	1.871.085.585,59
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						98.881.000,00	98.881.000,00				15.484.400,00		15.484.400,00	155.769.865,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	72.373.265,00					98.881.000,00	98.881.000,00	-	-	-	15.484.400,00	-	15.484.400,00	155.769.865,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	72.373.265,00	-	-	-	-	98.881.000,00	98.881.000,00	-	2.287.500,00	96.881.000,00	15.484.400,00	-	116.652.900,00	2.026.855.450,59
	JUMLAH	1.844.921.857,72	197.945.486,87	-	-	1.830.000,00	98.881.000,00	298.656.486,87	-	2.287.500,00	96.881.000,00	15.484.400,00	-	116.652.900,00	3.897.941.036,18
38	**Kecamatan Ngamprah**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.017.748.484,00	156.149.935,00					156.149.935,00						-	1.052.557.613,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	497.122.166,94	36.070.649,75					36.070.649,75						-	533.192.816,69
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		-					-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.514.870.650,94	192.220.584,75	-	-	-	-	192.220.584,75	-	-	120.876.000,00	-	-	120.876.000,00	1.585.715.235,19
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						120.876.000,00	120.876.000,00						-	176.504.643,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	55.628.643,00					120.876.000,00	120.876.000,00	-	-	-	-	-	-	176.504.643,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	55.628.643,00	-	-	-	-	120.876.000,00	241.752.000,00	-	-	120.876.000,00	-	-	120.876.000,00	1.767.219.878,19
	JUMLAH	1.569.999.294,54	192.220.584,75	-	-	-	120.876.000,00	313.096.584,75	-	-	120.876.000,00	-	-	120.876.000,00	3.352.935.113,38
39	**Kecamatan Cikalongwetan**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.237.104.152,00	160.807.890,60					160.807.890,60						-	1.397.912.042,60
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	276.672.263,85	36.503.889,88					36.503.889,88						-	313.176.153,73
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi		1.248.331,20					1.248.331,20						-	1.248.331,20
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya		-					-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.513.776.415,85	198.560.111,68	-	-	-	-	198.560.111,68	-	-	82.926.600,00	-	-	82.926.600,00	1.629.409.926,01
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						82.926.600,00	82.926.600,00						-	124.146.596,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	41.219.996,00					82.926.600,00	82.926.600,00	-	-	-	-	-	-	124.146.596,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	41.219.996,00	-	-	-	-	82.926.600,00	165.853.200,00	-	-	82.926.600,00	-	-	82.926.600,00	1.753.556.522,01
	JUMLAH	1.554.996.411,85	198.560.111,68	-	-	-	82.926.600,00	281.486.711,68	-	-	82.926.600,00	-	-	82.926.600,00	3.382.966.448,02
40	**Kecamatan Cipongkor**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	916.954.744,00	117.650.005,00					117.650.005,00			58.825.700,00			58.825.700,00	975.779.049,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.745.463.710,40	121.525.110,17					121.525.110,17						-	1.866.988.820,57
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.662.418.454,40	239.175.115,17	-	-	-	-	239.175.115,17	-	-	58.825.700,00	-	-	58.825.700,00	2.842.767.869,57
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						58.825.700,00	58.825.700,00				12.734.800,00		12.734.800,00	248.987.037,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	202.896.137,00					58.825.700,00	58.825.700,00	-	-	-	12.734.800,00	-	12.734.800,00	248.987.037,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	202.896.137,00	-	-	-	-	58.825.700,00	117.651.400,00	-	-	58.825.700,00	12.734.800,00	-	71.560.500,00	3.091.754.906,57
	JUMLAH	2.865.314.591,40	239.175.115,17	-	-	-	58.825.700,00	298.000.815,17	-	-	58.825.700,00	12.734.800,00	-	71.560.500,00	5.934.522.776,14
41	**Kecamatan Saguling**														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.248.114.595,00	127.640.300,00					127.640.300,00			107.540.000,00			107.540.000,00	1.378.314.895,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	1.309.597.037,58	148.513.952,77					148.513.952,77						-	1.458.112.990,35
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	29.666.440,00	7.366.610,00					7.366.610,00						-	37.033.050,00

LAMPIRAN Cat K 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

Idalam rupiah

No	Nama SKPD	Kondisi per 01 Januari 2025	Mutasi 2025												Kondisi per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang						
			Beban Penyusutan	Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Pencatatan		Total Penambahan	Pindah Antar SKPD	Reklas Pencatatan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Pengurangan	
						Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.587.578.062,58	288.622.852,77	-	-	-	-	288.622.852,77	-	-	102.548.800,00	-	-	102.548.800,00	2.773.660.915,35
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	93.495.455,00					102.540.000,00	102.540.000,00				9.844.750,00		9.844.750,00	186.190.685,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	93.495.455,00	-	-	-	-	102.540.000,00	102.540.000,00	-	-	-	9.844.750,00	-	9.844.750,00	186.190.685,00
	JUMLAH	2.681.073.497,58	288.622.852,77	-	-	-	102.540.000,00	391.162.852,77	-	-	102.548.800,00	9.844.750,00	-	112.393.550,00	2.959.851.600,35
42	Kecamatan Cilille														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.139.340.600,00	126.491.663,00		15.300.000,00			141.791.663,00			165.619.366,00			165.619.366,00	1.115.512.997,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	6.588.715.447,65	2.235.972.459,35					2.235.972.459,35						-	8.822.707.907,00
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	7.724.076.145,65	2.360.464.124,35	-	15.300.000,00	-	-	2.375.564.124,35	-	-	165.619.366,00	-	-	165.619.366,00	9.934.828.904,00
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	173.119.366,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	7.500.000,00					165.619.366,00	165.619.366,00						-	173.119.366,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	7.500.000,00	-	-	-	-	165.619.366,00	165.619.366,00	-	-	165.619.366,00	-	-	165.619.366,00	10.107.948.270,00
	JUMLAH	7.731.576.145,65	2.360.464.124,35	-	15.300.000,00	-	165.619.366,00	2.541.183.490,35	-	-	165.619.366,00	-	-	165.619.366,00	
43	Kecamatan Parongpong														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.174.466.510,58	146.835.800,25					146.835.800,25			253.597.889,00			253.597.889,00	1.067.704.621,83
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	668.159.344,12	42.672.857,43					42.672.857,43						-	710.832.101,55
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	93.126.000,00	11.652.000,00					11.652.000,00						-	104.778.000,00
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.927.861.854,62	220.350.657,68	-	-	-	-	220.350.657,68	-	-	253.597.889,00	-	-	253.597.889,00	1.884.614.533,38
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-						-	-
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	68.004.942,00					253.597.889,00	253.597.889,00				2.348.428,00		2.348.428,00	319.254.403,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	68.004.942,00	-	-	-	-	253.597.889,00	253.597.889,00	-	-	-	2.348.428,00	-	2.348.428,00	319.254.403,00
	JUMLAH	1.995.866.796,62	220.350.657,68	-	-	-	253.597.889,00	473.948.546,68	-	-	253.597.889,00	2.348.428,00	-	255.946.317,00	2.203.868.928,38
44	Kecamatan Cipatat														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.274.328.719,03	126.880.015,00					126.880.015,00			215.562.229,03			215.562.229,03	1.185.646.503,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	852.949.727,06	56.384.700,41					56.384.700,41						-	909.333.427,47
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.127.327.094,49	183.264.715,41	-	-	-	-	183.264.715,41	-	-	215.562.229,03	-	-	215.562.229,03	2.095.029.930,47
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-				7.500.000,00		7.500.000,00	265.800.044,03
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	57.337.865,00					215.562.229,03	215.562.229,03						-	265.400.044,03
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	57.337.865,00	-	-	-	-	215.562.229,03	215.562.229,03	-	-	-	7.500.000,00	-	7.500.000,00	265.400.044,03
	JUMLAH	2.184.665.259,49	183.264.715,41	-	-	-	215.562.229,03	398.826.944,44	-	-	215.562.229,03	7.500.000,00	-	223.062.229,03	2.360.429.974,50
45	Kecamatan Cihampelas														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.127.476.167,00	130.923.335,00					130.923.335,00			232.004.700,00			232.004.700,00	1.026.394.802,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	806.522.345,55	43.374.163,39					43.374.163,39						-	849.896.508,94
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.979.998.512,55	194.297.498,39	-	-	-	-	194.297.498,39	-	-	232.004.700,00	-	-	232.004.700,00	1.943.191.310,94
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						232.004.700,00	232.004.700,00						-	276.254.700,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	4.250.000,00					232.004.700,00	232.004.700,00						-	276.254.700,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	4.250.000,00	-	-	-	-	232.004.700,00	426.302.198,39	-	-	232.004.700,00	-	-	232.004.700,00	2.178.446.010,94
	JUMLAH	1.984.168.512,55	194.297.498,39	-	-	-	232.004.700,00	426.302.198,39	-	-	232.004.700,00	-	-	232.004.700,00	
46	Kecamatan Ngamprah														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.033.114.616,00	152.716.395,00					152.716.395,00	137.500.000,00		77.332.425,00			214.832.425,00	971.998.586,00
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	382.650.208,69	41.185.094,09					41.185.094,09						-	523.835.302,78
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	1.516.764.824,69	193.901.489,09	-	-	-	-	193.901.489,09	137.500.000,00	-	77.332.425,00	-	-	214.832.425,00	1.495.833.888,78
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud						77.332.425,00	77.332.425,00						-	174.069.525,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	100.737.100,00					77.332.425,00	77.332.425,00						-	178.069.525,00
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	100.737.100,00	-	-	-	-	77.332.425,00	271.233.914,09	137.500.000,00	-	77.332.425,00	-	-	214.832.425,00	1.673.903.413,78
	JUMLAH	1.617.501.924,69	193.901.489,09	-	-	-	77.332.425,00								
47	Badan Kesatuan Bangsa, dan Politik														
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	2.269.922.862,80	132.890.490,25			15.445.000,00		148.335.490,25		15.445.000,00				15.445.000,00	2.402.813.352,25
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan							-						-	-
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya							-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.269.922.862,80	132.890.490,25	-	-	15.445.000,00	-	148.335.490,25	-	15.445.000,00	-	-	-	15.445.000,00	2.402.813.352,25
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga							-						-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud							-				46.397.960,00		46.397.960,00	344.140.333,34
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	390.538.393,34						-						-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	390.538.393,34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.397.960,00	-	46.397.960,00	344.140.333,34
	JUMLAH	2.660.461.255,13	132.890.490,25	-	-	15.445.000,00	-	148.335.490,25	-	15.445.000,00	-	46.397.960,00	-	61.842.960,00	2.746.953.685,59

LAMPIRAN CALK 21

REKAP AKUMULASI PENYUSUTAN ASET
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kondisi per 01 Januari 2025	Mutasi 2025											Kondisi per 31 Desember 2025
			Bertambah						Berkurang					
			Koreksi Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyusutan		Nilai Penyusutan	Pindah Antar SKPD	Reklas Penyusutan		Penghapusan	Koreksi Penyusutan	Total Penyusutan	
					Reklas KIB	Reklas Aset			Reklas KIB	Reklas Aset				
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
	- Akum Peny Peralatan dan Mesin	1.257.928.859.869,43	2.802.271.000,00	9.470.908.672,60	5.432.569.131,03	122.850.000,00	160.2[illegible]1.569.247,48	9.470.908.672,60	5.933.888.649,00	94.120.542.602,90	-	177.082.186,00	109.708.402.824,50	1.309.461.997.092,12
	- Akum Peny Gedung dan Bangunan	498.622.847.727,52	-	873.647.705,03	-	-	59.2[illegible]816.047,91	873.647.705,03	-	3.470.389.959,48	-	-	4.344.037.664,51	543.555.626.989,92
	- Akum Peny Jalan Jaringan dan Irigasi	949.735.926.133,61	99.047.813.949,97	8.933.963.179,00	-	-	107.[illegible]87a.069,98	-	-	2.259.957.293,91	-	10.277.636.160,00	12.537.593.453,91	1.044.895.823.507,68
	- Akum Peny Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	JUMLAH AKUM PENY ASET TETAP	2.027.648.426.956,94	399.862.951.736,71	18.757.536.120,80	10.344.356.377,63	5.432.569.131,03	122.850.000,00	327.8[illegible]0.361.365,37	10.344.356.377,63	5.933.888.649,00	99.855.864.888,38	-	10.455.928.108,00	126.589.319.915,01	2.916.819.447.680,92
	- Akum Peny Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Akum Peny Aset Tak Berwujud	14.036.135.932,40	3.136.189.565,60	-	-	-	3.1[illegible]6.189.565,60	-	-	-	-	-	-	17.172.319.519,00
	- Akum Peny Aset Lain - Lain	42.579.302.840,88	-	196.060.000,00	95.161.329,40	99.855.864.888,38	100.1[illegible]7.886.217,78	196.060.000,00	95.161.329,40	122.850.000,00	3.850.479.072,00	-	4.254.550.402,30	139.461.838.656,30
	JUMLAH AKUM PENY ASET LAINNYA	56.615.438.773,28	3.136.189.565,60	196.060.000,00	95.161.329,40	99.855.864.888,38	103.[illegible]3.369.803,38	196.060.000,00	95.161.329,40	122.850.000,00	3.850.479.072,00	-	4.254.550.402,30	155.634.158.174,30
	JUMLAH	2.084.263.865.730,22	402.199.141.302,31	18.953.596.120,80	10.439.517.707,03	5.532.419.131,03	430.[illegible]3.369.803,38	10.538.416.377,63	6.029.050.078,40	99.978.714.888,38	3.850.479.072,00	10.455.928.108,00	130.843.868.417,31	3.072.453.605.854,22

LAMPIRAN CaLK 22a

REKAP ASET TIDAK BERWUJUD
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Mutasi 2025					Saldo Per 31 Desember 2025
			Penambahan				Total Pengurangan	
		Harga Perolehan	Realisasi Belanja Modal LRA Belanja Modal yang menambah perolehan aset 2025	Reklas Pencatatan Belanja	Total Penambahan Harga Perolehan	Bukan Hasil Inventarisasi	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Dinas Pendidikan	866.619.980,00	-	-	-	-	-	866.619.980,00
2	Dinas Kesehatan	582.986.925,00	132.000.000,00	-	132.000.000,00	-	-	714.986.925,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	2.361.718.500,00	-	-	-	-	-	2.361.718.500,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	553.578.793,00	-	-	-	-	-	553.578.793,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	242.990.000,00	-	-	-	-	-	242.990.000,00
6	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	173.745.000,00	-	-	-	-	-	173.745.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	983.925.000,00		-	-	-	-	983.925.000,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	386.305.152,00	234.602.600,00	-	234.602.600,00	-	-	620.907.752,00
9	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	674.003.200,00	-		-	-	-	674.003.200,00
10	Dinas Perhubungan	1.476.336.560,00	-	-	-	-	-	1.476.336.560,00
11	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	496.826.160,00	147.970.660,00	442.500.000,00	590.470.660,00	139.428.700,00	139.428.700,00	947.868.060,00
12	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	113.521.500,00	-	-	-	-	-	113.521.500,00
13	Terpadu Satu Pintu	47.905.000,00	-	-	-	-	-	47.905.000,00
14	Dinas Pemuda dan Olahraga	133.045.000,00	-	-	-	-		133.045.000,00
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan	50.000.000,00	-	-	-	-	-	50.000.000,00
16	Dinas Perikanan dan Peternakan	44.660.000,00	-	-	-	-	-	44.660.000,00
17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	988.896.300,00	-	-	-	-	-	988.896.300,00
18	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	191.190.500,00	-	-	-	-	-	191.190.500,00
19	Sekretariat Daerah	2.969.340.350,00	-	-	-	-	-	2.969.340.350,00
20	Sekretariat DPRD	503.684.000,00	-	-	-	-	-	503.684.000,00
21	dan Pengembangan Daerah	2.499.950.500,00	299.367.000,00	-	299.367.000,00	-	-	2.799.317.500,00
22	Badan Pendapatan Daerah	1.504.603.998,00	780.500.000,00	-	780.500.000,00	-	-	2.285.103.998,00
23	Sumber Daya Manusia	133.647.250,00	-	-	-	-	-	133.647.250,00
	Total	**17.976.579.548,00**	**1.594.440.260,00**	**442.500.000,00**	**2.036.940.260,00**	**139.428.700,00**	**139.428.700,00**	**19.876.091.108,00**

LAMPIRAN CaLK 22b

REKAP MUTASI ASET LAIN-LAIN
PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

No	Nama OPD	Saldo Per 01 Januari 2025	Penambahan					Pengurangan					Saldo Per 31 Desember 2025
			Mutasi dari SKPD Lain	Reklas Aset		Koreksi Pembukuan	Total Penambahan	Mutasi ke SKPD Lain	Penghapusan		Koreksi Pembukuan	Total Pengurangan	
		Harga Perolehan		Hasil Inventarisasi	Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Harga Perolehan			Bukan Hasil Inventarisasi	Reklas Kode Barang	Harga Perolehan	Harga Perolehan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Dinas Pendidikan	13.502.746.216,35	-	37.094.388.741,35	321.300.547,00	-	37.415.689.284,35	-	12.899.357.921,22	-	-	12.899.357.921,22	38.018.077.579,48
2	Dinas Kesehatan	12.579.718.093,13	-	9.336.556.886,08	4.194.610.356,00	-	13.531.167.242,08	-	1.257.171.900,00	-	-	1.257.171.900,00	24.853.713.435,21
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	24.718.061.887,57	-	2.100.488.898,33	136.500.000,00	-	2.236.988.898,33	-	72.513.251,40	136.500.000,00	-	209.013.251,40	26.746.037.534,50
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	9.650.614.785,62	-	1.086.865.409,63	-	-	1.086.865.409,63	-	-	-	-	-	10.737.480.195,25
5	Satuan Polisi Pamong Praja	521.040.500,00	-	75.863.949,00	-	-	75.863.949,00	-	16.994.000,00	-	-	16.994.000,00	579.910.449,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	130.467.500,00	-	438.079.000,00	-	-	438.079.000,00	-	77.750.000,00	-	-	77.750.000,00	490.796.500,00
7	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	860.515.450,00	-	203.525.145,00	-	-	203.525.145,00	-	-	-	-	-	1.064.040.595,00
8	Dinas Sosial	521.476.000,00	-	628.724.848,97	-	-	628.724.848,97	-	75.500.000,00	-	-	75.500.000,00	1.074.700.348,97
9	Dinas Tenaga Kerja	900.123.867,00	-	856.578.801,43	161.971.237,40	11.226.687,40	1.028.776.726,23	-	390.532.800,00	-	11.226.687,40	401.759.487,40	1.527.141.105,83
10	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	510.336.564,00	-	2.095.016.586,00	118.120.000,00	-	2.213.136.886,00	-	-	-	-	-	2.723.473.450,00
11	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	2.149.564.943,60	-	2.076.300.868,78	-	-	2.076.300.868,78	-	1.250.166.686,00	-	-	1.250.166.686,00	2.975.699.126,38
12	Dinas Lingkungan Hidup	6.407.214.248,00	-	2.569.973.013,50	-	-	2.569.973.013,50	-	2.601.991.300,00	-	-	2.601.991.300,00	6.375.195.961,50
13	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	1.245.705.062,36	-	3.765.106.614,05	-	-	3.765.106.614,05	-	-	-	-	-	5.010.811.576,41
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.950.536.650,00	-	419.139.459,34	-	-	419.139.459,34	-	1.815.371.100,00	-	-	1.815.371.100,00	554.305.209,34
15	Dinas Perhubungan	3.416.576.203,00	-	1.681.256.670,59	-	-	1.681.256.670,59	-	-	-	-	-	5.097.832.873,59
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	1.528.859.784,25	-	604.101.920,85	506.824.772,47	-	1.110.926.693,32	-	689.995.548,78	-	-	689.995.548,78	2.029.790.928,79
17	Dinas Koperasi,Usaha Kecil dan Menengah	70.236.900,00	-	251.857.067,00	-	-	251.857.067,00	-	-	-	-	-	322.093.967,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	1.046.530.100,00	-	682.417.930,49	82.250.000,00	-	764.667.930,49	-	695.373.500,00	-	-	695.373.500,00	1.115.824.530,49
19	Dinas Pemuda dan Olahraga	300.872.000,00	-	-	342.932.690,00	-	342.932.690,00	-	614.105.590,00	-	-	614.105.590,00	29.700.000,00
20	Dinas Arsip dan Perpustakaan	806.350.000,00	-	2.701.976.533,51	-	-	2.701.976.533,51	-	472.700.000,00	-	-	472.700.000,00	3.035.626.533,51
21	Dinas Perikanan dan Peternakan	2.159.344.653,00	-	1.076.816.894,00	12.494.362.243,45	-	13.571.179.143,45	113.560.000,00	287.766.622,00	-	-	401.326.622,00	15.329.197.174,45
22	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	4.524.241.322,00	-	307.157.550,00	-	-	307.157.550,00	-	1.547.952.000,00	-	-	1.547.952.000,00	3.283.446.872,00
23	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.909.790.035,00	-	1.102.582.678,05	-	-	1.102.582.678,05	-	1.146.527.670,00	-	-	1.146.527.670,00	3.865.845.043,05
24	Sekretariat Daerah	5.725.472.650,65	-	9.067.200.780,35	1.874.502.975,00	-	10.941.703.755,35	35.000.000,00	142.036.865,00	-	-	177.036.865,00	16.490.139.541,00
25	Sekretariat DPRD	1.221.402.015,00	-	577.661.400,00	-	-	577.661.400,00	-	109.438.500,00	-	-	109.438.500,00	1.689.624.915,00
26	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.396.587.928,00	-	1.009.754.933,00	89.353.500,00	-	1.099.108.433,00	-	4.641.936.100,00	-	-	4.641.936.100,00	1.853.760.061,00
27	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.877.873.563,72	186.060.000,00	336.133.181,00	43.950.311.453,94	83.934.642,00	44.496.339.277,94	-	40.394.746.675,72	-	83.934.642,00	40.478.681.317,72	9.895.531.519,94
28	Badan Pendapatan Daerah	987.177.535,61	-	1.269.073.264,26	-	-	1.269.073.264,26	-	124.429.929,00	-	-	124.429.929,00	2.131.820.870,87
29	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	355.982.177,00	-	819.698.015,00	321.029.225,00	-	1.140.718.240,00	-	332.752.929,00	-	-	332.752.929,00	1.163.947.488,00
30	Inspektorat Daerah	340.835.000,00	-	716.400.460,00	-	-	716.400.460,00	-	14.445.000,00	-	-	14.445.000,00	1.042.790.460,00
31	Kecamatan Batujajar	15.000.000,00	-	264.964.510,00	-	-	264.964.510,00	-	-	-	-	-	279.964.510,00
32	Kecamatan Cipeundeuy	54.407.000,00	-	167.412.880,03	-	-	167.412.880,03	37.500.000,00	-	-	-	37.500.000,00	184.319.880,03
33	Kecamatan Gununghalu	33.500.000,00	-	119.294.950,00	-	-	119.294.950,00	-	8.000.000,00	-	-	8.000.000,00	144.794.950,00
34	Kecamatan Padalarang	-	-	200.756.200,00	-	-	200.756.200,00	-	-	-	-	-	200.756.200,00
35	Kecamatan Lembang	140.380.000,00	-	351.444.280,03	-	-	351.444.280,03	-	-	-	-	-	491.824.280,03
36	Kecamatan Sindangkerta	98.503.778,00	-	101.643.600,00	-	-	101.643.600,00	-	-	-	-	-	200.147.378,00
37	Kecamatan Cisarua	72.973.265,00	-	98.881.000,00	-	-	98.881.000,00	-	15.484.400,00	-	-	15.484.400,00	156.369.865,00
38	Kecamatan Ngamprah	56.330.999,00	-	120.876.000,00	-	-	120.876.000,00	-	-	-	-	-	177.206.999,00
39	Kecamatan Cikalongwetan	41.219.996,00	-	82.926.600,00	-	-	82.926.600,00	-	-	-	-	-	124.146.596,00
40	Kecamatan Cipongkor	226.147.937,00	-	55.325.700,00	3.500.000,00	-	58.825.700,00	-	12.734.800,00	-	-	12.734.800,00	272.238.837,00
41	Kecamatan Saguling	93.495.435,00	-	102.540.000,00	-	-	102.540.000,00	-	9.844.750,00	-	-	9.844.750,00	186.190.685,00
42	Kecamatan Cililin	7.500.000,00	-	167.525.641,00	-	-	167.525.641,00	-	-	-	-	-	175.025.641,00
43	Kecamatan Parongpong	68.004.942,00	-	271.461.164,00	-	-	271.461.164,00	-	2.348.428,00	-	-	2.348.428,00	337.117.678,00
44	Kecamatan Cipatat	67.337.865,00	-	215.816.979,03	-	-	215.816.979,03	-	7.500.000,00	-	-	7.500.000,00	275.654.844,03
45	Kecamatan Cihampelas	4.250.000,00	-	233.547.450,00	-	-	233.547.450,00	-	-	-	-	-	237.797.450,00
46	Kecamatan Rongga	100.737.100,00	-	79.399.700,00	-	-	79.399.700,00	-	-	-	-	-	180.136.800,00
47	Bagian Kesatuan Bangsa dan Politik	395.243.200,00	-	-	-	-	-	-	49.236.200,00	-	-	49.236.200,00	346.007.000,00
	Total	114.791.286.051,86	186.060.000,00	87.584.514.334,55	64.536.459.993,26	95.161.329,40	152.402.195.663,51	186.060.000,00	71.696.704.366,12	136.500.000,00	95.161.329,40	72.114.425.695,52	195.079.056.019,85

LAMPIRAN Cat.K 22c

RINCIAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN 2024

(dalam rupiah)

No	Tahun Perolehan	Kondisi												Total			
		Baik				Rusak Ringan				Rusak Berat							
		Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	1925	1	0,22	-	0,22	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0,22	-	0,22
2	1948	-	-	-	-	-	-	-	-	1	35.000,00	-	35.000,00	1	35.000,00	-	35.000,00
3	1963	1	300.000,00	-	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	300.000,00	-	300.000,00
4	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	1	45.000.000,00	45.000.000,00	-	1	45.000.000,00	45.000.000,00	-
5	1971	1	750.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	750.000,00	-	750.000,00
6	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.450.000,00	-	3.450.000,00	2	3.450.000,00	-	3.450.000,00
7	1976	-	-	-	-	-	-	-	-	1	270.000,00	-	270.000,00	1	270.000,00	-	270.000,00
8	1978	-	-	-	-	-	-	-	-	2	75.075.000,00	75.000.000,00	75.000,00	2	75.075.000,00	75.000.000,00	75.000,00
9	1980	-	-	-	-	-	-	-	-	2	113.089.050,00	110.789.050,00	2.300.000,00	2	113.089.050,00	110.789.050,00	2.300.000,00
10	1981	-	-	-	-	-	-	-	-	1	10.000,00	-	10.000,00	1	10.000,00	-	10.000,00
11	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.095.000,00	-	1.095.000,00	4	1.095.000,00	-	1.095.000,00
12	1983	-	-	-	-	-	-	-	-	2	239.000,00	-	239.000,00	2	239.000,00	-	239.000,00
13	1985	-	-	-	-	-	-	-	-	2	330.012.050,00	329.012.050,00	1.000.000,00	2	330.012.050,00	329.012.050,00	1.000.000,00
14	1986	1	750.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	1	1.150.650.565,00	660.598.272,81	990.052.232,19	2	1.651.400.565,00	660.598.272,81	990.802.232,19
15	1987	1	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-	-	3	30.000,00	-	30.000,00	4	1.330.000,00	-	1.330.000,00
16	1988	1	750.000,00	-	750.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	750.000,00	-	750.000,00
17	1989	2	50.000,00	-	50.000,00	-	-	-	-	3	3.707.800,00	-	3.707.800,00	4	3.757.800,00	-	3.757.800,00
18	1990	-	-	-	-	-	-	-	-	13	1.955.000,00	-	1.955.000,00	13	1.955.000,00	-	1.955.000,00
19	1991	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-
20	1992	2	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-	-	6	282.500,00	-	282.500,00	8	1.582.500,00	-	1.582.500,00
21	1993	45	10.290.000,00	9.700.000,00	590.000,00	-	-	-	-	7	505.000,00	-	505.000,00	52	10.795.000,00	9.700.000,00	1.095.000,00
22	1994	311	4.487.500,00	-	4.487.500,00	-	-	-	-	23	1.370.500,00	-	1.370.500,00	334	5.858.000,00	-	5.858.000,00
23	1995	57	1.860.000,00	-	1.860.000,00	-	-	-	-	13	5.160.000,00	4.500.000,00	660.000,00	70	7.020.000,00	4.500.000,00	2.520.000,00
24	1996	737	5.512.000,00	-	5.512.000,00	-	-	-	-	30	8.042.500,00	7.000.000,00	1.242.500,00	767	13.754.500,00	7.000.000,00	6.754.500,00
25	1997	145	4.182.000,00	-	4.182.000,00	-	-	-	-	22	797.619,90	-	797.619,90	167	4.979.619,90	-	4.979.619,90
26	1998	-	-	-	-	-	-	-	-	15	201.010.000,00	200.000.000,00	1.010.000,00	15	201.010.000,00	200.000.000,00	1.010.000,00
27	1999	278	12.509.000,00	6.000.000,00	6.509.000,00	-	-	-	-	20	21.800.000,00	6.000.000,00	15.800.000,00	298	34.309.000,00	12.000.000,00	22.309.000,00
28	2000	28	1.582.000,00	-	1.582.000,00	-	-	-	-	67	5.585.713,00	-	5.585.713,00	95	7.167.713,00	-	7.167.713,00
29	2001	10	230.000,00	-	230.000,00	-	-	-	-	88	5.910.930,00	-	5.910.930,00	98	6.140.930,00	-	6.140.930,00
30	2002	99	6.330.500,00	-	6.330.500,00	-	-	-	-	4.860	51.556.552,00	24.324.400,00	27.232.152,00	4.959	57.887.052,00	24.324.400,00	33.562.652,00
31	2003	23	38.903.000,00	35.200.000,00	3.703.000,00	3	18.700.000,00	3.706.008,00	-	24	425.189.050,00	1.372.564.251,25	52.624.798,75	50	1.482.792.050,00	1.426.464.251,25	56.327.798,75
32	2004	2.817	59.805.529,15	7.500.000,00	52.305.529,15	-	-	-	-	7	447.500.000,00	443.500.000,00	-	2.824	507.305.529,15	450.000.000,00	52.305.529,15
33	2005	2.402	86.365.500,02	8.500.000,00	78.365.500,02	1	12.000.000,00	12.000.000,00	-	31	419.730.365,00	1.410.580.365,00	150.000,00	2.434	1.518.595.865,02	1.430.080.365,00	88.515.500,02
34	2006	5.106	204.608.831,99	-	204.608.831,99	-	-	-	-	14	575.003.786,00	575.003.786,00	-	5.110	779.612.617,99	575.003.786,00	204.608.831,99
35	2007	1.362	131.154.181,97	59.224.051,00	71.930.130,97	4	19.153.500,00	19.153.500,00	-	133	764.808.861,00	436.782.761,00	328.026.100,00	1.499	905.116.542,97	505.160.312,00	399.956.230,97
36	2008	47	2.238.868.094,00	639.239.184,00	1.599.628.910,00	5	57.735.000,00	57.735.000,00	-	111	2.437.585.968,00	2.437.585.968,00	-	163	4.734.189.062,00	3.134.560.152,00	1.599.628.910,00
37	2009	61	667.815.574,00	667.815.574,00	-	2	3.624.000,00	3.624.000,00	-	269	2.839.884.595,00	2.683.066.462,38	156.818.102,62	332	3.511.324.139,00	3.354.506.036,38	156.818.102,62
38	2010	62	10.835.912.871,00	829.278.114,36	10.006.634.756,64	5	20.044.000,00	21.044.000,00	-	288	5.843.198,3 6,00	5.027.615.833,34	815.582.482,66	355	16.699.155.187,00	5.856.937.947,70	10.822.217.239,30
39	2011	705	3.487.871.091,00	467.608.074,68	3.020.263.016,32	2	8.647.048,00	4.647.048,00	-	338	2.577.962.445,00	1.713.786.558,66	864.175.886,34	1.045	6.074.480.584,00	2.190.041.681,34	3.884.438.902,66
40	2012	96	4.151.582.336,00	1.083.164.388,50	3.068.417.947,50	3	7.330.538,00	7.330.538,00	-	1.982	2.636.095.998,00	2.476.671.263,61	159.424.734,39	2.081	6.795.008.872,00	3.567.166.190,11	3.227.842.681,89
41	2013	2.450	13.239.480.180,00	746.292.797,60	12.483.187.382,40	3	401.878.165,00	-	401.878.165,00	304	5.125.514.024,00	4.619.355.552,00	506.158.472,00	2.757	18.756.872.369,00	5.365.648.349,60	13.391.224.019,40
42	2014	356	9.708.747.692,65	523.587.691,15	9.185.160.001,50	5	12.430.000,00	12.430.000,00	-	2.595	2.731.264.585,00	2.642.354.000,36	148.910.504,64	2.956	12.512.442.197,65	3.178.371.691,51	9.334.070.506,14
43	2015	300	11.049.451.300,00	277.692.250,00	10.771.759.050,00	1	10.065.000,00	10.065.000,00	-	206	1.335.156.722,00	1.322.223.672,00	12.933.050,00	507	12.394.673.022,00	1.609.980.922,00	10.784.692.100,00
44	2016	275	10.828.221.527,90	331.682.856,00	10.496.538.671,90	-	-	-	-	2.001	338.092.292,00	1.301.796.882,00	36.295.410,00	2.276	12.166.313.819,90	1.633.479.738,00	10.532.834.081,90
45	2017	512	1.207.589.251,00	117.619.360,00	1.089.969.751,00	-	-	-	-	236	3.754.387.729,98	2.775.488.494,98	978.899.265,00	748	4.961.977.010,98	2.893.107.994,98	2.068.869.016,00
46	2018	30	852.076.523,55	115.536.057,00	736.540.465,55	-	-	-	-	194	1.452.189,4 3,53	1.152.969.963,72	299.219.479,81	224	2.304.265.936,08	1.268.506.020,72	1.035.759.915,36
47	2019	37	847.205.060,00	153.182.528,00	694.022.532,00	-	-	-	-	50	1.103.901.791,00	615.251.332,85	488.647.461,15	87	1.951.106.851,00	768.436.860,85	1.182.669.993,15
48	2020	33	1.957.074.800,00	1.181.079.880,00	775.994.920,00	-	-	-	-	30	173.470.643,35	134.893.831,53	38.577.851,82	58	2.230.545.143,35	1.315.973.701,53	914.572.741,82
49	2021	22	1.106.791.674,00	356.397.700,00	750.393.974,00	-	-	-	-	14	54.162.301,00	26.216.730,42	27.945.570,58	36	1.160.953.975,00	382.614.430,42	778.339.544,58
50	2022	08	732.810.525,00	146.562.105,00	586.248.420,00	-	-	-	-	8	34.721.730,00	15.777.531,68	18.944.198,32	26	767.532.255,00	162.339.636,68	605.192.618,32
	Total	18.543	73.475.018.542,10	7.762.862.751,29	65.712.155.790,81	34	571.607.251,00	169.729.681,00	401.878.165,00	14.020	43.744.668.258,76	34.646.711.003,59	6.097.940.255,17	32.597	117.791.286.051,86	42.579.302.840,88	72.211.983.210,98

LAMPIRAN Cetak 22d

RINCIAN ASET LAIN-LAIN
TAHUN 2025

(dalam rupiah)

No	Tahun Perolehan	Kondisi												Total			
		Baik				Rusak Ringan				Rusak Berat							
		Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku	Jumlah	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
										1	45.000.000,00	45.000.000,00	-	1	45.000.000,00	45.000.000,00	-
1	1970	-	-	-	-	-	-	-	-	2	3.300.000,00	3.300.000,00	-	2	3.300.000,00	3.300.000,00	-
2	1974	-	-	-	-	-	-	-	-	1	75.000.000,00	75.000.000,00	-	1	75.000.000,00	75.000.000,00	-
3	1978	-	-	-	-	-	-	-	-	7	117.489.050,00	117.489.050,00	-	11	122.139.050,00	122.139.050,00	-
4	1980	4	4.650.000,00	4.650.000,00	-	-	-	-	-	1	750.000,00	750.000,00	-	1	750.000,00	750.000,00	-
5	1982	-	-	-	-	-	-	-	-	2	330.012.050,00	329.012.050,00	1.000.000,00	2	330.012.050,00	329.012.050,00	1.000.000,00
6	1985	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.650.650.505,00	660.598.272,81	990.052.232,19	1	1.650.650.505,00	660.598.272,81	990.052.232,19
7	1986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6.750.000,00	6.750.000,00	-
8	1987	4	6.750.000,00	6.750.000,00	-	-	-	-	-	1	2.000.000,00	2.000.000,00	-	3	44.760.000,00	44.760.000,00	-
9	1990	2	42.760.000,00	42.760.000,00	-	-	-	-	-	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-
10	1991	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1.300.000,00	-	1.300.000,00
11	1992	2	1.300.000,00	-	1.300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	9.700.000,00	9.700.000,00	-
12	1993	1	9.700.000,00	9.700.000,00	-	-	-	-	-	2	2.500.000,00	2.500.000,00	-	2	2.500.000,00	2.500.000,00	-
13	1994	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5.500.000,00	5.500.000,00	-	3	5.500.000,00	5.500.000,00	-
14	1995	-	-	-	-	-	-	-	-	6	12.316.800,00	12.316.800,00	-	6	12.316.800,00	12.316.800,00	-
15	1996	-	-	-	-	-	-	-	-	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-
16	1997	-	-	-	-	-	-	-	-	1	200.000.000,00	200.000.000,00	-	3	209.500.000,00	209.500.000,00	-
17	1998	1	8.500.000,00	8.500.000,00	-	1	1.000.000,00	1.000.000,00	-	10	35.950.000,00	35.950.000,00	-	13	45.050.000,00	45.050.000,00	-
18	1999	3	9.100.000,00	9.100.000,00	-	-	-	-	-	11	18.950.000,00	18.950.000,00	-	15	28.300.000,00	28.300.000,00	-
19	2000	4	9.350.000,00	9.350.000,00	-	-	-	-	-	9	45.745.000,00	45.745.000,00	-	13	55.545.000,00	55.545.000,00	-
20	2001	3	6.300.000,00	6.300.000,00	-	1	3.500.000,00	3.500.000,00	-	8	36.648.000,00	36.648.000,00	-	13	50.198.000,00	50.048.000,00	150.000,00
21	2002	5	13.550.000,00	13.400.000,00	150.000,00	-	-	-	-	31	1.438.749.050,00	1.386.124.251,25	52.624.798,75	55	1.495.377.050,00	1.439.074.251,25	56.302.798,75
22	2003	22	45.925.000,00	42.750.000,00	3.078.000,00	2	10.700.000,00	10.700.000,00	-	34	492.360.000,00	492.360.000,00	-	2.851	548.665.520,15	496.360.000,00	52.305.529,15
23	2004	2.817	56.305.529,15	4.000.000,00	52.305.529,15	-	-	-	-	88	1.529.262.965,00	1.529.112.965,00	150.000,00	2.520	1.849.733.465,02	1.773.167.965,00	76.565.500,02
24	2005	2.431	308.478.500,02	232.057.000,00	76.415.500,02	1	12.000.000,00	12.000.000,00	-	24	550.433.786,00	550.433.786,00	-	5.129	897.292.617,99	692.983.786,00	204.308.831,99
25	2006	5.105	256.858.831,99	52.550.000,00	204.308.831,99	-	-	-	-	163	916.438.903,00	588.412.903,00	328.026.100,00	1.023	1.470.366.684,97	1.070.410.454,00	399.956.230,97
26	2007	1.447	479.171.281,97	407.241.151,00	71.930.130,97	13	74.756.500,00	74.756.500,00	-	223	2.829.656.068,00	2.829.656.068,00	-	426	6.182.943.366,00	4.583.314.456,00	1.599.628.910,00
27	2008	199	3.235.977.298,00	1.636.348.388,00	1.599.628.910,00	13	117.310.000,00	117.310.000,00	-	619	4.175.142.618,00	4.018.324.515,38	156.818.102,62	931	6.645.086.190,00	6.488.188.087,38	156.898.102,62
28	2009	290	2.316.173.608,00	2.316.173.608,00	-	22	153.600.564,00	153.690.564,00	-	714	7.613.073.045,00	6.803.391.562,34	809.682.482,66	1.232	21.127.227.025,00	10.097.256.681,90	11.029.965.343,01
29	2010	496	13.264.391.335,00	3.164.108.474,65	10.220.282.860,35	22	149.756.645,00	141.725.137,00	-	643	4.683.772.864,00	3.879.696.977,66	854.075.886,34	1.264	11.433.587.733,00	7.886.716.130,34	3.546.868.102,66
30	2011	581	6.608.584.247,00	3.915.794.035,68	2.692.790.716,32	70	141.725.137,00	200.351.576,00	-	475	4.820.714.288,00	4.670.350.506,61	150.363.773,39	1.070	12.815.183.178,43	9.758.236.557,11	3.056.946.621,34
31	2012	573	7.798.117.322,45	4.887.534.474,50	2.906.582.847,95	22	200.351.576,00	30.725.000,00	401.878.165,00	769	7.624.457.621,00	7.125.669.149,00	498.788.472,00	1.433	15.022.942.662,00	11.169.452.183,03	3.853.490.478,97
32	2013	656	6.965.881.816,00	4.013.028.034,03	2.952.853.781,97	8	432.603.165,00	66.266.000,00	-	732	5.374.404.168,36	5.301.324.951,72	73.079.216,64	1.536	24.060.825.227,91	14.659.607.877,66	9.401.138.150,25
33	2014	795	18.626.155.059,55	9.298.096.125,94	9.328.058.933,61	9	66.266.000,00	35.710.000,00	-	693	7.487.146.234,00	4.725.155.196,02	2.761.991.037,98	1.335	20.163.526.639,45	9.666.929.838,25	10.496.596.801,20
34	2015	636	12.640.670.405,45	4.896.064.642,23	7.744.605.763,22	6	35.710.000,00	35.600.000,00	-	1.180	6.152.566.950,00	6.152.386.950,00	180.000,00	1.811	15.874.540.754,80	11.383.648.830,78	4.490.891.924,02
35	2016	707	9.662.373.803,81	5.171.66...879,79	4.490.711.924,02	4	59.600.000,00	45.600.000,00	-	823	7.210.641.489,36	6.240.717.224,36	969.904.265,00	1.219	9.970.955.183,82	8.690.825.918,82	980.132.265,00
36	2017	395	2.756.316.694,46	2.746.088.694,46	10.228.000,00	2	4.600.000,00	4.600.000,00	-	905	5.335.031.573,30	5.038.300.782,39	296.730.790,91	1.298	9.181.689.058,33	8.446.875.465,92	734.813.592,41
37	2018	390	3.930.897.500,47	3.592.814.698,97	438.082.801,50	3	15.759.984,56	15.759.984,56	-	665	4.254.538.498,00	3.756.266.376,85	498.272.121,15	1.058	8.184.709.591,62	6.837.434.270,47	327.275.321,15
38	2019	367	3.950.171.093,52	3.101.167.993,62	829.003.100,00	-	-	-	-	2.414	7.066.345.633,35	6.912.412.411,53	134.433.221,82	3.167	12.607.124.276,35	11.752.464.796,87	854.659.479,48
39	2020	753	5.549.276.643,00	4.429.051.385,34	1.120.226.257,66	-	-	-	-	658	3.805.026.698,00	3.766.114.027,42	38.912.670,58	1.453	7.641.904.738,80	7.056.841.094,22	585.063.644,58
40	2021	495	5.836.878.040,80	5.290.727.066,80	546.150.974,00	-	-	-	-	262	1.862.659.218,91	1.385.143.565,01	477.515.653,90	389	3.000.906.109,91	2.119.120.686,02	881.785.423,89
41	2022	127	1.138.246.890,00	733.977.121,01	404.269.768,99	-	-	-	-	91	363.028.750,00	339.222.991,67	413.794.758,33	165	1.513.647.850,00	717.010.391,69	396.637.458,31
42	2023	74	760.619.100,00	377.776.400,02	382.842.699,98	-	-	-	-	25	474.410.743,00	101.691.535,75	372.719.207,25	56	642.326.842,98	143.670.560,75	498.656.282,23
43	2024	31	167.916.099,98	41.927.025,00	125.989.074,98	-	-	-	-	-	-	-	-	1	133.910.400,00	-	133.910.400,00
44	2025	1	133.910.400,00	-	133.910.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1	133.910.400,00	-	133.910.400,00
	Total	19.408	104.568.252.895,72	58.231.994.589,04	46.336.254.306,68	149	1.472.229.561,56	1.070.351.396,56	401.878.165,00	12.237	89.038.573.562,27	79.159.488.670,76	9.879.084.891,51	31.794	195.079.056.019,55	138.461.838.656,36	56.617.217.363,19

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
1	P120150010273217002001	2	2.607.625,00	537.285,37
2	P12015001039321700 8007	1	1.665.000,00	1.395.123,63
3	P12015001104321700 8002	2	2.460.750,00	1.014.045,33
4	P12015001181321700 1008	1	4.083.750,00	3.825.710,85
5	P12016000133321700 8001	1	2.660.825,00	445.907,49
6	P12016000175321700 7002	1	4.648.763,00	2.592.579,37
7	P12017000174321700 0000	1	3.827.763,00	1.409.121,54
8	P12019000051321700 8002	3	4.132.125,00	2.261.345,47
9	P12019000099321700 8007	2	1.652.719,00	1.416.616,29
10	P12019000179321700 8008	3	4.149.750,00	1.026.037,09
11	P12021000028321700 8007	1	1.358.750,00	559.924,45
12	P12021000071321700 8008	1	1.022.313,00	168.513,13
13	P12022000054321700 1002	1	1.693.125,00	348.858,17
14	P12023000023321700 8008	1	870.750,00	358.825,55
15	P12023000058321700 6009	1	3.738.000,00	2.136.000,00
16	P12023000128321700 7004	1	878.575,00	801.337,64
17	P12023000130321700 1002	1	7.523.763,00	6.138.894,54
18	P12024000031321700 8008	2	812.625,00	334.872,94
19	P12024000158321701 0003	2	2.541.750,00	1.515.274,04
20	P12025000026321700 8008	1	1.388.934,00	137.367,10
21	P12025000027321700 6004	1	849.650,00	126.046,98
22	P12025000040321700 8007	2	1.270.063,00	540.823,53
23	P12025000060321700 6009	1	1.583.750,00	652.644,23
24	P12025000062321700 6004	1	1.631.875,00	672.475,96
25	P12025000070321700 6009	1	4.873.763,00	2.035.197,74
26	P12025000079321700 6007	1	1.684.500,00	698.789,84
27	P12025000086321700 6009	1	795.750,00	330.105,08
28	P12025000098321700 8008	1	1.418.438,00	584.521,15
29	P12025000103321700 6002	1	1.389.375,00	572.544,64
30	P12025000104321700 8007	1	782.000,00	322.252,75
31	P12025000117321700 6002	2	2.162.750,00	891.243,13
32	P12025000124321700 8008	1	1.481.250,00	610.405,22
33	P12025000125321700 8007	1	2.435.825,00	1.003.774,04
34	P12025000126321700 8007	2	2.435.825,00	1.003.774,04
35	P12025000128321700 6007	2	3.029.063,00	1.248.240,25
36	P12025000131321700 6004	1	431.625,00	177.867,45
37	P12025000133321700 6004	1	771.250,00	317.822,80
38	P12025000159321700 8002	6	6.342.264,00	4.350.142,62
39	P12025000172321701 0002	1	2.585.825,00	1.953.576,58
40	P200000060108	1	2.739.375,00	1.535.254,12
41	P200000140103	1	2.081.250,00	1.166.414,84
42	P200000820807	1	733.000,00	400.733,52
43	P200000830807	1	661.063,00	108.966,43
44	P200000890609	2	5.548.576,00	198.163,43

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
45	P200002080802	2	3.486.190,00	239.436,13
46	P200002290902	1	1.976.250,00	168.307,01
47	P200002580602	18	100.052.860,00	25.256.782,90
48	P200002640807	5	14.106.110,00	2.897.897,69
49	P200003219999	3	42.837.900,00	15.451.968,82
50	P200003310602	1	3.000,00	263,74
51	P200003360810	26	27.818.342,00	1.411.956,51
52	P200003429999	3	17.787.075,00	6.972.485,99
53	P200003479999	1	11.865.825,00	4.368.188,32
54	P200003499999	8	77.317.180,00	49.352.727,57
55	P200003569999	6	7.546.502,00	3.172.018,70
56	P200003579999	2	3.220.750,00	2.159.922,73
57	P200003580602	7	41.194.050,00	10.243.775,27
58	P200003710802	1	1.741.875,00	239.268,54
59	P200003720807	5	44.952.053,00	22.373.358,55
60	P200003759999	1	7.884.575,00	5.935.092,17
61	P200003929999	1	12.090.825,00	2.524.457,97
62	P200004049999	3	23.653.725,00	15.032.678,71
63	P200004109999	16	45.256.495,00	13.529.008,78
64	P200004260807	3	30.728.763,00	1.181.875,50
65	P200004389999	11	8.363.700,00	7.173.762,77
66	P200004399999	2	104.750.000,00	51.184.615,38
67	P200004409999	9	9.417.438,00	3.906.684,45
68	P200004439999	5	22.858.200,00	4.144.618,68
69	P200004479999	9	85.036.600,00	32.866.252,20
70	P200004780801	3	3.932.938,00	1.231.744,32
71	P200005099999	143	213.590.781,00	70.553.031,69
72	P200005189999	1	1.667.325,00	691.665,04
73	P200005239999	1	11.348.763,00	498.846,73
74	P200005289999	4	5.312.500,00	1.384.223,90
75	P200005290106	1	1.771.000,00	1.644.500,00
76	P200005369999	11	14.676.750,00	11.634.366,76
77	P200005409999	1	4.462.700,00	755.976,50
78	P200005410402	2	2.821.211,00	441.783,04
79	P200005420602	2	3.945.625,00	3.035.096,15
80	P200005450113	1	6.398.763,00	3.199.381,50
81	P200005470807	5	4.944.601,00	4.346.901,98
82	P200005559999	4	43.604.176,00	13.894.040,43
83	P200005579999	1	15.853.325,00	11.889.993,75
84	P200005660910	1	1.923.750,00	1.707.063,87
85	P200005699999	102	133.708.990,00	106.518.337,86
86	P200005759999	3	24.378.338,00	21.786.280,16
87	P200005819999	1	935.750,00	17.995,19
88	P200006040103	1	1.335.000,00	3.667,58

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
89	P200006080808	5	21.185.825,00	989.447,87
90	P200006099999	2	2.142.375,00	1.430.211,88
91	P200006129999	2	6.603.920,00	5.515.361,76
92	P200006379999	1	1.461.875,00	1.008.051,17
93	P200006570103	2	4.672.388,00	2.952.333,08
94	P200006589999	34	44.494.461,00	14.213.985,46
95	P200006740704	2	1.410.876,00	680.243,79
96	P200006769999	1	7.581.250,00	6.814.606,74
97	P200007259999	2	15.862.900,00	9.635.141,00
98	P200007310808	1	708.500,00	256.928,57
99	P200007420108	2	7.684.125,00	6.755.274,73
100	P200007870910	3	7.912.537,00	3.304.136,33
101	P200008029999	43	36.916.035,00	16.879.715,05
102	P200008130807	1	909.813,00	2.499,49
103	P200008859999	4	8.378.763,00	1.875.391,30
104	P2201500091032170008002	2	2.656.250,00	1.208.595,47
105	P220150010443217000000	15	18.893.625,00	6.358.771,98
106	P2201600012432170008001	4	6.670.125,00	1.475.807,35
107	P220160001453217000000	17	28.779.257,00	17.567.270,18
108	P220160001783217000000	7	13.416.575,00	7.454.224,04
109	P2201600018232170000000	1	736.982,00	510.218,31
110	P220160001993217000000	6	31.734.226,00	21.597.084,27
111	P2201600020532170008001	1	667.938,00	275.249,18
112	P2201600022232170008008	1	1.461.875,00	1.393.600,62
113	P220170000173217008004	15	22.634.314,00	7.835.574,45
114	P2201700002632170008007	2	3.600.500,00	2.416.001,37
115	P2201700002832170008001	7	23.792.565,00	13.663.943,08
116	P220170000583217000000	1	2.248.125,00	697.906,94
117	P220170000753217000000	5	28.899.975,00	7.145.598,21
118	P220170001373217000000	9	17.952.464,00	8.509.191,56
119	P2201700014032170010l3	1	3.340.825,00	1.551.097,32
120	P2201700015132170010O3	12	51.506.553,00	9.517.081,96
121	P220170001533217000000	16	24.460.188,00	13.749.876,73
122	P220170001643217000000	2	17.714.588,00	9.946.963,35
123	P2201700016632170000000	2	22.269.150,00	18.174.492,31
124	P220170001773217004013	2	1.410.876,00	868.231,38
125	P2201700018832170090l0	7	4.938.066,00	3.467.111,49
126	P220170003853217000000	6	8.000.600,00	4.882.500,00
127	P2201800010732170000000	10	12.488.253,00	5.914.912,81
128	P2201800011332170008006	3	2.116.314,00	926.371,88
129	P220180001393217000000	5	6.423.220,00	3.211.610,00
130	P2201800014032170000000	1	2.873.763,00	2.210.586,92
131	P2201900000332170000000	4	74.680.413,00	29.889.463,07
132	P2201900000932170000000	1	24.437.500,00	1.611.263,74

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
133	P22019000013321700 6002	1	1.433.750,00	149.677,20
134	P22019000072321700 0000	3	2.156.700,00	1.848.600,00
135	P22019000086321700 8007	5	10.094.088,00	5.074.775,01
136	P22019000147321700 0000	7	10.652.500,00	6.233.468,41
137	P22019000176321700 0000	1	5.942.762,00	4.391.766,42
138	P22019000181321700 8008	1	1.508.750,00	58.028,85
139	P22019000188321700 0000	3	3.517.875,00	2.725.386,68
140	P22019000220321700 0000	3	4.223.782,00	684.624,01
141	P22020000014321700 2004	6	13.492.560,00	9.685.356,80
142	P22020000027321700 8001	2	4.441.713,00	1.195.845,81
143	P22020000045321700 0000	8	10.674.000,00	9.647.653,85
144	P22020000049321700 6009	3	12.498.338,00	11.021.885,98
145	P22020000058321700 4002	19	184.968.759,00	162.609.898,02
146	P22020000075321700 8007	2	4.817.588,00	3.626.426,13
147	P22020000076321700 1008	3	2.222.213,00	1.672.764,73
148	P22021000001321700 0000	7	166.440.618,00	1.371.763,34
149	P22021000015321700 1002	4	16.862.616,00	13.131.485,55
150	P22021000025321700 0000	7	28.725.203,00	11.980.082,37
151	P22021000035321700 1008	12	24.707.904,00	10.250.428,55
152	P22021000037321700 8006	12	8.666.375,00	3.370.925,82
153	P22021000058321700 0000	6	7.727.504,00	3.216.197,05
154	P22021000101321700 0000	3	10.341.763,00	9.233.716,96
155	P22022000004321701 1001	3	3.111.000,00	34.186,81
156	P22022000023321700 0000	41	35.198.500,00	15.181.770,60
157	P22022000033321700 0000	1	2.435.625,00	301.107,49
158	P22022000039321700 8008	5	6.174.101,00	5.478.666,55
159	P22022000041321700 0000	5	17.414.376,00	3.109.710,00
160	P22022000045321700 6002	3	5.077.500,00	1.101.984,89
161	P22022000067321700 6002	3	4.228.475,00	1.696.036,68
162	P22022000103321700 0000	23	28.908.500,00	18.028.103,02
163	P22022000113321700 0000	2	3.124.375,00	8.583,45
164	P22022000118321700 8008	1	1.463.218,00	1.029.076,40
165	P22022000122321700 8008	2	6.756.812,00	5.104.734,34
166	P22022000123321700 0000	9	8.523.264,00	7.827.467,55
167	P22022000163321700 8009	2	14.059.150,00	2.819.554,81
168	P22023000006321700 8010	1	46.137.500,00	1.267.513,74
169	P22023000007321700 0000	5	5.186.970,00	142.499,18
170	P22023000018321700 0000	5	7.018.425,00	715.399,86
171	P22023000041321700 1007	1	21.912.500,00	11.558.241,76
172	P22023000042321700 0000	19	15.997.313,00	4.044.926,09
173	P22023000051321700 0000	2	4.366.963,00	1.799.572,66
174	P22023000057321700 0000	231	329.887.235,00	256.625.147,06
175	P22023000061321700 0000	8	23.907.513,00	5.877.716,02
176	P22023000062321700 1003	2	3.076.925,00	1.453.931,59

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
177	P220230000683217006004	3	3.350.625,00	1.997.487,98
178	P220230000733217001007	1	2.623.125,00	237.810,78
179	P220230000853217007001	9	7.924.950,00	1.981.237,50
180	P220230001153217008008	1	608.250,00	250.652,47
181	P220230001173217006009	3	8.126.713,00	6.117.360,88
182	P220230001183217001008	2	10.478.338,00	8.434.486,36
183	P220230001313217000000	3	2.429.439,00	593.670,35
184	P220240000023217008007	1	1.662.825,00	31.977,40
185	P220240000133217001003	5	10.466.388,00	201.276,69
186	P220240000953217008002	4	13.129.105,00	6.167.793,83
187	P220240000963217000000	2	4.138.125,00	1.045.899,73
188	P220240001223217008008	2	2.720.268,00	1.158.355,88
189	P220240001383217006002	1	22.137.500,00	11.859.375,00
190	P220240001463217001003	2	5.444.313,00	3.051.208,38
191	P220240001513217000000	1	2.051.250,00	1.177.778,16
192	P220240001703217008001	1	1.007.000,00	641.824,18
193	P220240001733217000000	2	2.156.063,00	71.325,39
194	P220240002043217000000	7	9.635.250,00	4.808.156,59
195	P220240002113217000000	55	74.989.325,00	61.514.303,91
196	P220240002243217008001	2	1.167.025,00	480.916,90
197	P220240002253217008001	1	546.550,00	225.226,65
198	P220240002263217008008	3	6.443.946,00	88.515,74
199	P220250000013217000000	3	6.237.525,00	85.680,29
200	P220250000063217001012	3	4.605.985,00	224.132,23
201	P220250000093217008007	1	8.868.763,00	2.387.743,88
202	P220250000233217008007	2	1.322.125,00	217.932,69
203	P220250000253217006009	1	3.458.763,00	351.577,56
204	P220250000333217001003	1	705.438,00	104.652,89
205	P220250000343217000000	2	3.767.500,00	631.366,76
206	P220250000353217006003	1	705.438,00	104.652,89
207	P220250000423217000000	11	18.017.450,00	9.309.981,96
208	P220250000653217000000	2	3.489.375,00	1.667.997,94
209	P220250000873217000000	6	18.209.426,00	7.603.936,13
210	P220250000913217000000	1	1.603.750,00	660.885,99
211	P220250000923217000000	1	1.603.750,00	660.885,99
212	P220250001003217000000	1	3.487.138,00	1.590.288,21
213	P220250001013217008008	1	1.716.395,00	773.320,82
214	P220250001023217006003	1	713.825,00	294.158,65
215	P220250001083217000000	1	24.287.500,00	10.809.271,98
216	P220250001093217008007	2	8.762.950,00	4.013.939,51
217	P220250001143217000000	1	782.000,00	322.252,75
218	P220250001163217006001	1	1.720.125,00	708.842,72
219	P220250001193217008008	1	1.653.363,00	740.379,59
220	P220250001323217000000	1	812.625,00	334.872,94

LAMPIRAN CaLK 23a

DAFTAR PENERIMAAN DIMUKA PAJAK REKLAME

Tahun 2025

JENIS REKLAME : semua

(dalam rupiah)

No.	NPWPD	Jumlah Reklame	Setoran Pokok (Rp)	Pendapatan Diterima Dimuka (Rp)
221	P22025000162321700 1003	7	13.702.500,00	8.072.080,31
222	P22025000164321700 0000	1	1.508.750,00	891.157,28
223	P22025000170321700 4001	1	3.923.763,00	2.543.978,21
224	P22025000178321700 0000	1	3.372.665,00	2.260.797,42
225	P22025000179321700 8010	1	1.644.675,00	1.423.276,44
226	P22025000180321700 4008	1	1.644.675,00	1.423.276,44
227	P22025000183321700 2001	2	1.326.500,00	951.144,23
228	P22025000189321700 1007	1	6.515.825,00	4.797.365,66
229	P22025000190321700 0000	2	3.935.179,00	2.929.762,39
230	P22025000192321700 8007	1	782.729,00	627.903,48
231	P22025000193321700 8007	4	5.540.438,00	4.261.875,38
232	P22025000197321700 0000	2	4.825.020,00	3.618.765,00
233	P22025000204321700 8006	2	2.871.427,00	2.413.891,93
234	P22025000205321700 9001	1	1.358.750,00	1.116.116,07
235	P22025000208321700 0000	1	1.349.375,00	1.130.657,62
236	P22025000212321700 9010	2	3.065.625,00	2.838.229,74
	TOTAL	**1448**	**3.471.944.156,00**	**1.678.714.010,85**

LAMPIRAN CaLK 23b

REKAP PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (DINAS TENAGA KERJA)
ATAS PERPANJANGAN PENGGUNA TENAGA KERJA ASING (TKA)
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	TANGGAL BAYAR	NAMA PERUSAHAAN	NAMA TENAGA KERJA ASING (TKA)	PERIODE PENDAPATAN		PENERIMAAN	TGL CUT OFF	LAMA PENDAPATAN	PERIODE PENDAPATAN	PERIODE PDDM	PDDM/HARI	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KODE REKENING
				MULAI	BERAKHIR									
BULAN JANUARI														
1	16 JANUARI 2025	PT. NOYON SIPATA INDONESIA	ISURANGA NIROSHAN PERERA	13-Feb-25	23-Feb-26	Rp 19.398.000	12/31/2025	375,00	321,00	54,00	51.728,00	16.604.688,00	2.793.312,00	2.1.05.01.01.0001
2	20 JANUARI 2025	PT. SAMDO KARYA UTAMA TEXTILE	QI DONG LEE	2-Apr-25	2-Mar-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	334,00	273,00	61,00	59.371,26	16.208.353,29	3.621.646,71	2.1.05.01.01.0001
3	22 JANUARI 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	XUE QINGQING	22-Jan-25	18-Feb-26	Rp 19.410.000	12/31/2025	392,00	343,00	49,00	49.515,31	16.983.750,00	2.426.250,00	2.1.05.01.01.0001
BULAN FEBRUARI														
4	04 Februari 2025	PT. KWANGDUK WOLD WIDE	CHOI BYUNG SO	14-Feb-25	13-Feb-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	364,00	320,00	44,00	54.478,02	17.432.967,03	2.397.032,97	2.1.05.01.01.0001
5	04 Februari 2025	PT. KWANGDUK WOLD WIDE	TAEKUN LEE	21-Feb-25	16-Mar-26	Rp 19.422.000	12/31/2025	388,00	313,00	75,00	50.056,70	15.667.747,42	3.754.252,58	2.1.05.01.01.0001
6	07 Februari 2025	PT. RUBBER DUCK INDUSTRY	XIAOBAO LIU	3-Mar-25	15-Feb-26	Rp 19.422.000	12/31/2025	349,00	303,00	46,00	55.650,43	16.862.080,23	2.559.919,77	2.1.05.01.01.0001
7	20 Februari 2025	PT LISIANG MULTI KIMIATAMA	HSIEH HSIAO YING	27-Feb-25	15-Feb-26	Rp 19.440.000	12/31/2025	353,00	307,00	46,00	55.070,82	16.906.742,21	2.533.257,79	2.1.05.01.01.0001
8	21 Februari 2025	PT. BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	MELISSA MARIE HALL	5-Mar-25	16-Mar-26	Rp 19.728.000	12/31/2025	376,00	301,00	75,00	52.468,09	15.792.893,62	3.935.106,38	2.1.05.01.01.0001
9	26 Februari 2025	PT. NOYON SIPATA INDONESIA	CHAMILA INDIKA KOONGAHAWITA	7-Mar-25	24-Sep-25	Rp 9.876.000	12/31/2025	566,00	299,00	267,00	17.448,76	5.217.180,21	4.658.819,79	2.1.05.01.01.0001
10	26 Februari 2025	PT. ANY WORLD INTERNATIONAL	SEO YUN MI	3-Mar-25	3-Mar-26	Rp 19.815.000	12/31/2025	365,00	303,00	62,00	54.295,89	16.451.654,79	3.366.345,21	2.1.05.01.01.0001
11	28 Februari 2025	PT. CCH INDONESIA	KO CHING LING	5-Apr-25	20-Apr-26	Rp 19.734.000	12/31/2025	380,00	270,00	110,00	51.931,58	14.021.526,32	5.712.473,68	2.1.05.01.01.0001
12	28 Februari 2025	PT. CCH INDONESIA	LAI CHIH CHING	14-Feb-25	13-Feb-26	Rp 19.734.000	12/31/2025	364,00	320,00	44,00	54.214,29	17.348.571,43	2.385.428,57	2.1.05.01.01.0001
13	28 Februari 2025	PT. SAMDO KARYA UTAMA TEXTILE	JAEYANG KIM	5-Apr-25	13-Feb-26	Rp 20.064.000	12/31/2025	314,00	270,00	44,00	63.898,09	17.252.484,08	2.811.515,92	2.1.05.01.01.0001
BULAN MARET														
14	05 Maret 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	YINGMING CHEN	14-Feb-25	13-Feb-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	364,00	320,00	44,00	54.478,02	17.432.967,03	2.397.032,97	2.1.05.01.01.0001
15	05 Maret 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	JIANGKUI SONG	21-Feb-25	16-Mar-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	388,00	313,00	75,00	51.108,25	15.996.881,44	3.833.118,56	2.1.05.01.01.0001
16	05 Maret 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	LIANZHONG CHEN	3-Mar-25	15-Feb-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	349,00	303,00	46,00	56.819,48	17.216.303,72	2.613.696,28	2.1.05.01.01.0001
17	05 Maret 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	JINPING KUANG	27-Feb-25	15-Feb-26	Rp 19.830.000	12/31/2025	353,00	307,00	46,00	56.175,64	17.245.920,68	2.584.079,32	2.1.05.01.01.0001
18	11 Maret 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	LIU JUNHAO	5-Mar-25	16-Mar-26	Rp 19.512.000	12/31/2025	376,00	301,00	75,00	51.893,62	15.619.978,72	3.892.021,28	2.1.05.01.01.0001
19	12 Maret 2025	PT. MAHUGI JAYA SEJAHTERA	GUAN XIAOPING	7-Mar-25	24-Sep-26	Rp 19.944.000	12/31/2025	566,00	299,00	267,00	35.236,75	10.535.787,99	9.408.212,01	2.1.05.01.01.0001
20	14 Maret 2025	PT. RUBBER DUCK	QIONG HE	3-Mar-25	3-Mar-26	Rp 19.872.000	12/31/2025	365,00	303,00	62,00	54.443,84	16.496.482,19	3.375.517,81	2.1.05.01.01.0001
21	18 Maret 2025	PT. CEMARA ABADI TEXTILE	MOON KUN JOO	5-Apr-25	20-Apr-25	Rp 19.920.000	12/31/2025	15,00	270,00	(255,00)	1.328.000,00	358.560.000,00	(338.640.000,00)	2.1.05.01.01.0001
22	19 Maret 2025	PT. ASIA JAYA FOOD	HE ZHUOYANG	14-Feb-25	13-Feb-26	Rp 19.656.000	12/31/2025	364,00	320,00	44,00	54.000,00	17.280.000,00	2.376.000,00	2.1.05.01.01.0001
23	21 Maret 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	CHE FENG	5-Apr-25	13-Feb-26	Rp 19.614.000	12/31/2025	314,00	270,00	44,00	62.464,97	16.865.541,40	2.748.458,60	2.1.05.01.01.0001
24	24 Maret 2025	PT. INDO SEAGULL SEALRING	HUANG SHAO YI	25-Mar-25	28-Mar-26	Rp 19.656.000	12/31/2025	368,00	281,00	87,00	53.413,04	15.009.065,22	4.646.934,78	2.1.05.01.01.0001
25	26 Maret 2025	PT. ERA MUDA BOGATAMA	GUO WANGLING	11-Apr-25	21-Apr-26	Rp 20.124.000	12/31/2025	375,00	264,00	111,00	53.664,00	14.167.296,00	5.956.704,00	2.1.05.01.01.0001
26	26 Maret 2025	PT. ERA MUDA BOGATAMA	LIU BINBIN	11-Apr-25	10-Apr-25	Rp 20.124.000	12/31/2025	364,00	264,00	100,00	55.285,71	14.595.428,57	5.528.571,43	2.1.05.01.01.0001
27	26 Maret 2025	PT. LONG JOHN INNOVATION MATERIAL	PAI FU CHUAN	5-Aug-25	7-May-26	Rp 20.112.000	12/31/2025	275,00	148,00	127,00	73.134,55	10.823.912,73	9.288.087,27	2.1.05.01.01.0001
28	26 Maret 2025	PT. LONG JOHN INNOVATION MATERIAL	HUANG PIN CHIH	5-Aug-25	7-May-26	Rp 20.112.000	12/31/2025	275,00	148,00	127,00	73.134,55	10.823.912,73	9.288.087,27	2.1.05.01.01.0001
BULAN APRIL														
29	9-Apr-25	PT. INDO SEAGULL SEALRING	CHEN YEN SHUANG	14-Apr-25	14-Apr-26	Rp 20.089.000	12/31/2025	365,00	261,00	104,00	55.035,62	14.364.295,89	5.723.704,11	2.1.05.01.01.0001
30	9-Apr-25	PT. SINCUNG LAJU CITRA JAYA	LO JEN CHUNG	22-May-25	22-May-26	Rp 20.162.000	12/31/2025	365,00	223,00	142,00	55.232,88	12.316.931,51	7.845.068,49	2.1.05.01.01.0001
31	10-Apr-25	PT. INDO SEAGULL SEALRING	CHEN CHAO	14-Apr-25	14-Apr-26	Rp 19.944.000	12/31/2025	365,00	261,00	104,00	54.641,10	14.261.326,03	5.682.673,97	2.1.05.01.01.0001
32	11-Apr-25	PT. LONG HARMONY INDUSTRY	CHANG HSING LUNG	30-Apr-25	29-Apr-26	Rp 20.315.000	12/31/2025	364,00	245,00	119,00	55.813,19	13.674.230,77	6.641.769,23	2.1.05.01.01.0001
33	14-Apr-25	PT. TOYO QUALITY ONE INDONESIA	NORIYASU UKI	6-Mar-25	5-Mar-26	Rp 20.310.000	12/31/2025	364,00	300,00	64,00	55.796,70	16.739.010,99	3.570.989,01	2.1.05.01.01.0001
34	23-Apr-25	PT. CCH INDONESIA	LIN ZHENG XIANG	12-May-25	5-Nov-25	Rp 20.118.000	12/31/2025	542,00	233,00	309,00	37.118,08	8.648.512,92	11.469.487,08	2.1.05.01.01.0001
35	23-Apr-25	PT. SAMJIN HITECH	SHIN JUN CHUL	8-May-25	7-May-26	Rp 20.064.000	12/31/2025	364,00	237,00	127,00	55.120,88	13.063.648,35	7.000.351,65	2.1.05.01.01.0001
36	25-Apr-25	YAYASAN BERKAH BAGI BANGSA	DILLIN ERIN ELIZABETH	27-Jun-25	26-Jun-26	Rp 20.358.000	12/31/2025	364,00	187,00	177,00	55.928,57	10.458.642,86	9.899.357,14	2.1.05.01.01.0001
37	29-Apr-25	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	ZENG WEIBIN	5-Oct-25	5-Oct-26	Rp 19.962.000	12/31/2025	365,00	87,00	278,00	54.690,41	4.758.065,75	15.203.934,25	2.1.05.01.01.0001
38	30-Apr-25	PT. ERA MUDA BOGATAMA	WANG CHAOGE	17-May-25	16-May-26	Rp 19.962.000	12/31/2025	364,00	228,00	136,00	54.840,66	12.503.670,33	7.458.329,67	2.1.05.01.01.0001

REKAP PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (DINAS TENAGA KERJA)
ATAS PERPANJANGAN PENGGUNA TENAGA KERJA ASING (TKA)
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	TANGGAL BAYAR	NAMA PERUSAHAAN	NAMA TENAGA KERJA ASING (TKA)	PERIODE PENDAPATAN		PENERIMAAN		TGL CUT OFF	LAMA PENDAPATAN	PERIODE PENDAPATAN	PERIODE PDDM	PDDM/HARI	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KODE REKENING
				MULAI	BERAKHIR										
39	30-Apr-25	PT. ERA MUDA BOGATAMA	HE XIANYU	17-May-25	16-May-26	Rp	19.962.000	12/31/2025	364,00	228,00	136,00	54.840,66	12.503.670,33	7.458.329,67	2.1.05.01.01.0001
BULAN MEI															
40	06 Mei 2025	PT. SANWA PARTS INDONESIA	HISHIOKA RYOTARO	30-Jan-25	29-Jan-26	Rp	19.968.000	12/31/2025	364,00	184,00	180,00	54.857,14	10.093.714,29	9.874.285,71	2.1.05.01.01.0001
41	08 Mei 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	JIANWU HE	13-May-25	13-May-26	Rp	20.010.000	12/31/2025	365,00	232,00	133,00	54.821,92	12.718.684,93	7.291.315,07	2.1.05.01.01.0001
42	08 Mei 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	MATTHEW DAVID SQUIERS	1-Aug-25	31-Jul-26	Rp	19.962.000	12/31/2025	364,00	152,00	212,00	54.840,66	8.335.780,22	11.626.219,78	2.1.05.01.01.0001
43	09 Mei 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	WANMEI LUO	21-Jun-25	20-Jun-26	Rp	19.962.000	12/31/2025	364,00	193,00	171,00	54.840,66	10.584.247,25	9.377.752,75	2.1.05.01.01.0001
44	09 Mei 2025	PT. MAHUGI JAYA SEJAHTERA	ZENG CHUNHUA	31-May-25	31-May-26	Rp	20.064.000	12/31/2025	365,00	214,00	151,00	54.969,86	11.763.550,68	8.300.449,32	2.1.05.01.01.0001
45	09 Mei 2025	PT. MAHUGI JAYA SEJAHTERA	CHEN SHUIQING	25-May-25	24-Feb-26	Rp	15.048.000	12/31/2025	275,00	220,00	55,00	54.720,00	12.038.400,00	3.009.600,00	2.1.05.01.01.0001
46	14 Mei 2025	YAYASAN 'BERKAH BAGI BANGSA	BETHANY BANKS GLENN	9-Jul-25	8-Jul-26	Rp	20.082.000	12/31/2025	364,00	175,00	189,00	55.170,33	9.654.807,69	10.427.192,31	2.1.05.01.01.0001
47	14 Mei 2025	YAYASAN 'BERKAH BAGI BANGSA	TREVOR JAY GLENN			Rp	20.082.000							20.082.000,00	2.1.05.01.01.0001
48	15 Mei 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	ZILIANG HE	25-Jun-25	4-Jun-26	Rp	20.070.000	12/31/2025	344,00	189,00	155,00	58.343,02	11.026.831,40	9.043.168,60	2.1.05.01.01.0001
49	15 Mei 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	GUANGZHAO CAO	30-Jun-25	29-Jun-26	Rp	20.070.000	12/31/2025	364,00	184,00	180,00	55.137,36	10.145.274,73	9.924.725,27	2.1.05.01.01.0001
50	19 Mei 2025	PT. TOYO QUALITY ONE INDONESIA	MASATO YAMAOKA	29-Jul-25	28-Jul-26	Rp	19.962.000	12/31/2025	364,00	155,00	209,00	54.840,66	8.500.302,20	11.461.697,80	2.1.05.01.01.0001
51	19 Mei 2025	PT. MAKANAN BARU KOREA INDONESIA	LEM KYUNG NAM	10-Jun-25	9-Jun-26	Rp	19.602.000	12/31/2025	364,00	204,00	160,00	53.851,65	10.985.736,26	8.616.263,74	2.1.05.01.01.0001
52	22 Mei 2025	PT. RUBBER DUCK SNACK INDUSTRY	GUANJUN ZHONG	27-Oct-25	8-Jun-26	Rp	19.746.000	12/31/2025	224,00	65,00	159,00	88.151,79	5.729.866,07	14.016.133,93	2.1.05.01.01.0001
BULAN JUNI															
53	17 Juni 2025	PT. KITA SAMA SAMA	ZHOU JIARUI	25-Jun-25	24-Jun-26	Rp	19.752.000	12/31/2025	364,00	189,00	175,00	54.263,74	10.255.846,15	9.496.153,85	2.1.05.01.01.0001
54	17 Juni 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	RICHARD ALAN MORRIS JR	25-Jun-25	24-Jun-26	Rp	19.740.000	12/31/2025	364,00	189,00	175,00	54.230,77	10.249.615,38	9.490.384,62	2.1.05.01.01.0001
55	17 Juni 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	JAFARI NAGOMA	31-Jul-25	30-Jul-26	Rp	19.470.000	12/31/2025	364,00	153,00	211,00	53.489,01	8.183.818,68	11.286.181,32	2.1.05.01.01.0001
56	17 Juni 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	EUNICE AKUA OPOKUA OFORI	31-Jul-25	30-Jul-26	Rp	19.470.000	12/31/2025	364,00	153,00	211,00	53.489,01	8.183.818,68	11.286.181,32	2.1.05.01.01.0001
57	19 Juni 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	MICHELLE MARIE MORRIS	27-Jul-25	26-Jul-26	Rp	19.818.000	12/31/2025	364,00	157,00	207,00	54.445,05	8.547.973,63	11.270.126,37	2.1.05.01.01.0001
58	23 Juni 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	LIU JUANJUAN	11-Jul-25	10-Jul-26	Rp	19.578.000	12/31/2025	364,00	173,00	191,00	53.785,71	9.304.928,57	10.273.071,43	2.1.05.01.01.0001
BULAN JULI															
59	10 Juli 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG	JUBAL RITO ONAS ARBOLARIO	1-Sep-25	31-Aug-26	Rp	19.650.000	12/31/2025	364,00	121,00	243,00	53.983,52	6.532.005,49	13.117.994,51	2.1.05.01.01.0001
60	11 Juli 2025	PT. RUBBER DUCK SNACK INDUSTRY	DONGHAI LI	4-Aug-25	3-Aug-26	Rp	19.656.000	12/31/2025	364,00	149,00	215,00	54.000,00	8.046.000,00	11.610.000,00	2.1.05.01.01.0001
61	11 Juli 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG	ABIGAIL MERA CLAVECILLA	11-Mar-25	10-Mar-26	Rp	19.656.000	12/31/2025	364,00	295,00	69,00	54.000,00	15.930.000,00	3.726.000,00	2.1.05.01.01.0001
62	14 Juli 2025	YAYASAN PARAHYANGAN SATYA	RIDWAN RHISNAWATY FERA	28-Jul-25	27-Jul-26	Rp	19.668.000	12/31/2025	364,00	156,00	208,00	54.032,97	8.429.142,86	11.238.857,14	2.1.05.01.01.0001
63	16 Juli 2025	PT. SINERGI KARUNIA INDAH	LI BINWU	8-May-25	4-Aug-26	Rp	19.716.000	12/31/2025	453,00	237,00	216,00	43.523,18	10.314.993,38	9.401.006,62	2.1.05.01.01.0001
64	16 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	LI QIFENG	21-Aug-25	20-Aug-26	Rp	19.716.000	12/31/2025	364,00	132,00	232,00	54.164,84	7.149.758,24	12.566.241,76	2.1.05.01.01.0001
65	16 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	MICHAEL JOE DAVIS	7-Aug-25	6-Aug-26	Rp	19.716.000	12/31/2025	364,00	146,00	218,00	54.164,84	7.908.065,93	11.807.934,07	2.1.05.01.01.0001
66	17 Juli 2025	PT. ANUGERAH MAWAR SENTOSA	CARLOS EDUARDO TOCAIN MUNOZ	10-Aug-25	9-Aug-26	Rp	19.770.000	12/31/2025	364,00	143,00	221,00	54.313,19	7.766.785,71	12.003.214,29	2.1.05.01.01.0001
67	25 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	RONALD TRAVIS JULIAN	28-Aug-25	27-Aug-26	Rp	19.710.000	12/31/2025	364,00	125,00	239,00	54.148,35	6.768.543,96	12.941.456,04	2.1.05.01.01.0001
68	25 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	NATHAN CAREY LOEWEN	11-Aug-25	10-Aug-26	Rp	19.710.000	12/31/2025	364,00	142,00	222,00	54.148,35	7.689.065,93	12.020.934,07	2.1.05.01.01.0001
69	25 Juli 2025	PT. KWANGDUK WOLD WIDE	DROC SEOB JEONG	4-Sep-25	3-Sep-26	Rp	19.776.000	12/31/2025	364,00	118,00	246,00	54.329,67	6.410.901,10	13.365.098,90	2.1.05.01.01.0001
70	28 Juli 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA,	LIU JUNYANG	9-Aug-25	8-Aug-26	Rp	19.422.000	12/31/2025	364,00	144,00	220,00	53.357,14	7.683.428,57	11.738.571,43	2.1.05.01.01.0001
71	31 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL,	ROBERT JOHN STASKO	22-Sep-25	21-Sep-26	Rp	19.908.000	12/31/2025	364,00	100,00	264,00	54.692,31	5.469.230,77	14.438.769,23	2.1.05.01.01.0001
72	31 Juli 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAJ SCHOOL,	MARY NICOLE TALUSAN ARBOLARIO	18-Aug-25	17-Aug-26	Rp	19.908.000	12/31/2025	364,00	135,00	229,00	54.692,31	7.383.461,54	12.524.538,46	2.1.05.01.01.0001
73	31 Juli 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG,	WADE ALIEN STRICKLAND	11-Sep-25	10-Sep-26	Rp	19.908.000	12/31/2025	364,00	111,00	253,00	54.692,31	6.070.846,15	13.837.153,85	2.1.05.01.01.0001

REKAP PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA (DINAS TENAGA KERJA)
ATAS PERPANJANGAN PENGGUNA TENAGA KERJA ASING (TKA)
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO.	TANGGAL BAYAR	NAMA PERUSAHAAN	NAMA TENAGA KERJA ASING (TKA)	PERIODE PENDAPATAN		PENERIMAAN		TGL CUT OFF	LAMA PENDAPATAN	PERIODE PENDAPATAN	PERIODE PDDM	PDDM/HARI	PENDAPATAN TAHUN BERJALAN	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KODE REKENING
				MULAI	BERAKHIR										
74	31 Juli 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG,	DENISE STRICKLAND	16-Sep-25	15-Sep-26	Rp	19.908.000	12/31/2025	364,00	106,00	258,00	54.692,31	5.797.384,62	14.110.615,38	2.1.05.01.01.0001
BULAN AGUSTUS															
75	01 Agustus 2025	PT. ASIA JAYA FOOD	LIU ZHONGHUA	1-Sep-25	31-Aug-26	Rp	19.620.000	12/31/2025	364,00	121,00	243,00	53.901,10	6.522.032,97	13.097.967,03	2.1.05.01.01.0001
76	01 Agustus 2025	PT. ASIA JAYA FOOD	TU HONGGAO	1-Sep-25	31-Aug-26	Rp	19.620.000	12/31/2025	364,00	121,00	243,00	53.901,10	6.522.032,97	13.097.967,03	2.1.05.01.01.0001
77	01 Agustus 2025	PT. ASIA JAYA FOOD	XIANG MINGHONG	1-Sep-25	31-Aug-26	Rp	19.620.000	12/31/2025	364,00	121,00	243,00	53.901,10	6.522.032,97	13.097.967,03	2.1.05.01.01.0001
78	06 Agustus 2025	PT. CIMERANO SAKURA SPINNING	SANDEEP KUMAR SINGH	16-Sep-25	15-Sep-26	Rp	19.854.000	12/31/2025	364,00	106,00	258,00	54.543,96	5.781.659,34	14.072.340,66	2.1.05.01.01.0001
79	06 Agustus 2025	PT. CIMERANO SAKURA SPINNING	SUBRAMANIAN VENKATESAN	23-Sep-25	22-Sep-26	Rp	19.854.000	12/31/2025	364,00	99,00	265,00	54.543,96	5.399.851,65	14.454.148,35	2.1.05.01.01.0001
80	07 Agustus 2025	PT. INDONESIA ZHONG PACK	WANG LIZHANG	12-Aug-25	11-Aug-26	Rp	19.758.000	12/31/2025	364,00	141,00	223,00	54.280,22	7.653.510,99	12.104.489,01	2.1.05.01.01.0001
81	12 Agustus 2025	PT. DAMWOO INDO	DUWON PARK	19-Sep-25	19-Sep-26	Rp	19.746.000	12/31/2025	365,00	103,00	262,00	54.098,63	5.572.158,90	14.173.841,10	2.1.05.01.01.0001
82	12 Agustus 2025	PT. DAMWOO INDO	YOUNGWAN CHO	30-Sep-25	29-Sep-26	Rp	19.746.000	12/31/2025	364,00	92,00	272,00	54.247,25	4.990.747,25	14.755.252,75	2.1.05.01.01.0001
BULAN SEPTEMBER															
89	08 Oktober 2025	PT. KWANGDUK WOLD WIDE	DONG SOO HAN	9-Oct-25	8-Oct-26	Rp	19.836.000	12/31/2025	364,00	83,00	281,00	54.494,51	4.523.043,96	15.312.956,04	2.1.05.01.01.0001
90	09 Oktober 2025	PT. KITA SAMA SAMA	SU LIANHUA	2-Nov-25	1-Nov-26	Rp	19.626.000	12/31/2025	364,00	59,00	305,00	53.917,58	3.181.137,36	16.444.862,64	2.1.05.01.01.0001
91	13 Oktober 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	ERIN KELSIE SQUIERS	2-Nov-25	1-Nov-26	Rp	19.626.000	12/31/2025	364,00	59,00	305,00	53.917,58	3.181.137,36	16.444.862,64	2.1.05.01.01.0001
92	28 Oktober 2025	PT. DAMWOO INDO	MYUNG SOO LEE	2-Nov-25	1-Nov-26	Rp	19.626.000	12/31/2025	364,00	59,00	305,00	53.917,58	3.181.137,36	16.444.862,64	2.1.05.01.01.0001
93	28 Oktober 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG	NATHANIA ERNESTINE SUDIRGO	20-Aug-25	19-Aug-26	Rp	19.572.000	12/31/2025	364,00	133,00	231,00	53.769,23	7.151.307,69	12.420.692,31	2.1.05.01.01.0001
94	29 Oktober 2025	PT. SUMAPRINT TEXTILE INDONESIA	TAO XIYA	29-Sep-25	28-Sep-26	Rp	19.500.000	12/31/2025	364,00	93,00	271,00	53.571,43	4.982.142,86	14.517.857,14	2.1.05.01.01.0001
BULAN OKTOBER															
89	08 Oktober 2025	PT. KWANGDUK WOLD WIDE	DONG SOO HAN	5-Nov-25	4-Nov-26	Rp	20.124.000	12/31/2025	364,00	56,00	308,00	55.285,71	3.096.000,00	17.028.000,00	2.1.05.01.01.0001
90	09 Oktober 2025	PT. KITA SAMA SAMA	SU LIANHUA	31-Oct-25	30-Oct-26	Rp	19.668.000	12/31/2025	364,00	61,00	303,00	54.032,97	3.296.010,99	16.371.989,01	2.1.05.01.01.0001
91	13 Oktober 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	ERIN KELSIE SQUIERS	9-Nov-25	8-Nov-26	Rp	20.058.000	12/31/2025	364,00	52,00	312,00	55.104,40	2.865.428,57	17.192.571,43	2.1.05.01.01.0001
92	28 Oktober 2025	PT. DAMWOO INDO	MYUNG SOO LEE	12-Dec-25	11-Dec-26	Rp	19.770.000	12/31/2025	364,00	19,00	345,00	54.313,19	1.031.950,55	18.738.049,45	2.1.05.01.01.0001
93	28 Oktober 2025	BERKAH BAGI BANGSA BANDUNG	NATHANIA ERNESTINE SUDIRGO	7-Dec-25	6-Dec-26	Rp	20.130.000	12/31/2025	364,00	24,00	340,00	55.302,20	1.327.252,75	18.802.747,25	2.1.05.01.01.0001
94	29 Oktober 2025	PT. SUMAPRINT TEXTILE INDONESIA	TAO XIYA	15-Nov-25	14-Nov-26	Rp	19.770.000	12/31/2025	364,00	46,00	318,00	54.313,19	2.498.406,59	17.271.593,41	2.1.05.01.01.0001
BULAN NOVEMBER															
95	04 November 2025	PT. HYBRID CHEMICAL	MUN HEA NAM	10-Nov-25	9-Nov-26	Rp	20.244.000	12/31/2025	364,00	51,00	313,00	55.615,38	2.836.384,62	17.407.615,38	2.1.05.01.01.0001
96	04 November 2025	PT. HYBRID CHEMICAL	PARK JAE DONG	5-Nov-25	4-Nov-26	Rp	20.244.000	12/31/2025	364,00	56,00	308,00	55.615,38	3.114.461,54	17.129.538,46	2.1.05.01.01.0001
97	07 November 2025	PT. CITRA FOOD ABADI	ZULONG WANG	12-Dec-25	11-Dec-26	Rp	20.244.000	12/31/2025	364,00	19,00	345,00	55.615,38	1.056.692,31	19.187.307,69	2.1.05.01.01.0001
98	12 November 2025	PT. DAMWOO INDO	TAESOO HAN	8-Dec-25	7-Dec-26	Rp	20.238.000	12/31/2025	364,00	23,00	341,00	55.598,90	1.278.774,73	18.959.225,27	2.1.05.01.01.0001
99	13 November 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	LINSEY ABIGAIL KUNES	7-Dec-25	6-Dec-26	Rp	20.268.000	12/31/2025	364,00	24,00	340,00	55.681,32	1.336.351,65	18.931.648,35	2.1.05.01.01.0001
100	14 November 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESIA	CHEN YUNQING	6-Nov-25	21-Nov-26	Rp	19.878.000	12/31/2025	380,00	55,00	325,00	52.310,53	2.877.078,95	17.000.921,05	2.1.05.01.01.0001
101	14 November 2025	PT. RUBBER DUCK INDUSTRY	XIANGPING ZHENG	12-Dec-25	11-Dec-26	Rp	20.250.000	12/31/2025	364,00	19,00	345,00	55.631,87	1.057.005,49	19.192.994,51	2.1.05.01.01.0001
102	14 November 2025	BANDUNG ALIANCE INTERCULTURAL SCHOOL	MELANIE DIANE LOEWEN	3-Dec-25	2-Dec-26	Rp	20.238.000	12/31/2025	364,00	28,00	336,00	55.598,90	1.556.769,23	18.681.230,77	2.1.05.01.01.0001
103	19 November 2025	PT. CCH INDONESIA	LIAO YI MEI	9-Dec-25	8-Dec-26	Rp	19.908.000	12/31/2025	364,00	22,00	342,00	54.692,31	1.203.230,77	18.704.769,23	2.1.05.01.01.0001
104	19 November 2025	PT. CCH INDONESIA	WU HSUAN YU	14-Jan-26	13-Jan-27	Rp	19.812.000	12/31/2025						19.812.000,00	2.1.05.01.01.0001
105	24 November 2025	PT. PLANGI JAYA INDONESI	OUYANG BENXIONG	21-Dec-25	20-Dec-26	Rp	19.878.000	12/31/2025	364,00	10,00	354,00	54.609,89	546.098,90	19.331.901,10	2.1.05.01.01.0001
106	24 November 2025	PT. PLANGI JAYA INDONES	CHEN QUANXING	3-Dec-25	2-Dec-26	Rp	19.878.000	12/31/2025	364,00	28,00	336,00	54.609,89	1.529.076,92	18.348.923,08	2.1.05.01.01.0001
JUMLAH						Rp	2.089.374.000						1.314.035.742,04	775.338.257,96	

LAMPIRAN CaLK 23e

DAFTAR PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA ATAS PEMANFAATAN LAHAN/GEDUNG UNTUK PENEMPATAN ATM BJB T.A. 2025

(dalam rupiah)

NO.	PERANGKAT DAERAH	JENIS	NOMOR	PERIODE SEWA		NILAI KONTRAK	TGL CUT OFF	LAMA SEWA	PERIODEPENDAPATAN	PERIODE PEMI	PENDAPATAN/HARI	PENDAPATAN SEWA	PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA	KODE REKENING	URAIAN
				MULAI	BERAKHIR										
1	BKAD	ATM Kecamatan Banggo	032/1945/BKAD/2022	11/1/2023	10/31/2027	25.500.000,00	12/31/2025	1.825,00	1.156,00	669,00	13.972,60	16.152.328,77	9.347.671,23	4.1.04.03.01.0001	Pendapatan Hasil Sewa BMD
2	BKAD	ATM Setwan	032/599-BKAD	3/8/2023	12/31/2027	16.500.000,00	12/31/2025	1.759,00	1.029,00	730,00	9.390,33	9.662.359,20	6.837.640,80	4.1.04.03.01.0002	Pendapatan Hasil Sewa BMD
3	BKAD	Kantor Kas Perada	000.2.3.2/NPHD.33-BKAD/2024	01/09/2024	7/31/2029	598.800.000,00	12/31/2025	1.825,00	517,00	1.308,00	328.142,47	169.649.654,79	429.210.345,21	4.1.04.03.01.0004	Pendapatan Hasil Sewa BMD
4	BKAD	ATM Perada	000.2.3.2/NPHD.37-BKAD/2024	01/09/2024	7/31/2029	88.920.000,00	12/31/2025	1.825,00	517,00	1.308,00	48.723,29	25.189.934,73	63.730.065,27	4.1.04.03.01.0005	Pendapatan Hasil Sewa BMD
5	BKAD	ATM Setda	000.2.3.2/PS.84-BKAD/2025	01/09/2025	7/31/2030	39.555.000,00	12/31/2025	1.825,00	152,00	1.673,00	21.673,97	3.294.443,84	36.260.556,16	4.1.04.03.01.0003	Pendapatan Hasil Sewa BMD
6	Dinkes	Kantor Kas dan ATM RSUD CIKAWET	000.2.10.1875 Dinkes	01/08/2025	7/31/2030	165.790.800,00	12/31/2025	1.825,00	152,00	1.673,00	90.843,84	13.808.263,01	151.981.736,99	4.1.04.16.01.0001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
7	Dinkes	Kantor Kas dan ATM RSUD Arjawinangun	000.2.3.2/PS.84-BKAD/2025	01/08/2025	7/31/2026	23.432.000,00	12/31/2025	364,00	152,00	212,00	64.373,63	9.784.791,21	13.647.208,79	4.1.04.16.01.0001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
8	Dinkes	Klinik RSUD RSUD Losarang (Eks Semasih)	000.2.3.2/PS.84-BKAD/2025	10/13/2025	12/9/2026	6.061.800,00	12/31/2025	364,00	21,00	343,00	16.651,10	349.673,85	5.711.326,92	4.1.04.16.01.0001	Pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan
JUMLAH						Rp 964.610.800						247.881.463,72	716.726.546,28		

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	MAMIN PASIEN	PENGISIAN TABUNG GAS	REAGEN	Bahan Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Tidak Dikapitalisasi	Honor Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (CI)	Kalibrasi	Kertas Cover	CETAK
1	RSUD CILILIN	625.760.364,00		544.606.357,00	12.210.000,00	9.324.000,00	82.471.000,00		17.700.000,00	49.325.909,00
2	RSUD LEMBANG	44.608.426,00	70.107.600,00					94.649.700,00		27.433.650,00
3	RSUD CIKALONGWETAN	208.553.662,00	113.523.000,00					39.269.250,00		18.375.000,00
4	BLUD PKM RAJAMANDALA									
5	BLUD PKM JAYAGIRI									
6	BLUD PKM GUNUNGHALU									
7	BLUD PKM CILILIN									
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN									
9	BLUD PKM SAGULING									
10	BLUD PKM PARONGPONG									
11	BLUD PKM CIWARUGA									
12	BLUDPKM CIHAMPELAS									
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG									
14	BLUD PKM SINDANGKERTA									
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG									
16	BLUD PKM CIPATAT									
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG									
18	BLUD PKM RONGGA									
19	BLUD PKM JAYAMEKAR									
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY									
21	BLUD PKM CITALEM									
22	BLUD PKM CIPONGKOR									
23	BLUD PKM CIMAREME									
24	BLUD PKM NGAMPRAH									
25	BLUD PKM BATUJAJAR									
26	BLUD PKM CIBODAS									
27	BLUD PKM CIKOLE									
28	BLUD PKM LEMBANG									
29	BLUD PKM PASIRLANGU									
30	BLUD PKM RENDE									
31	BLUD PKM CIRATA									
32	BLUD PKM CISARUA									
33	BLUD PKM TAGOG APU									
34	BLUD PKM PADALARANG									
35	BLUD PKM PATARUMAN									
36	UPT LABKESDA			360.967.283,00						
	JUMLAH	878.922.452,00	183.630.600,00	905.573.640,00	12.210.000,00	9.324.000,00	82.471.000,00	133.918.950,00	17.700.000,00	95.134.559,00

UTANG BELANJA PEGAWAI	2.490.410.269,00
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA	14.653.617.214,00
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN	108.733.362,00
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN	20.104.730,00
	17.272.865.575,00

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	LISTRIK	TELEPON	PDAM	INTERNET	Honor Narasumber (CI)	Belanja Jasa Pemeriksaan Laboratorium	BELANJA DARAH PMI KBB	Sewa Alat Kedokteran THT	SEWA MESIN FOTOCOPY
1	RSUD CILILIN	61.703.612,00	273.736,00	23.206.500,00	15.846.467,00	7.500.000,00		171.020.000,00	5.940.000,00	5.983.022,00
2	RSUD LEMBANG	27.896.202,00	326.900,00				27.127.715,00	16.810.000,00		2.969.877,00
3	RSUD CIKALONGWETAN									
4	BLUD PKM RAJAMANDALA									
5	BLUD PKM JAYAGIRI									
6	BLUD PKM GUNUNGHALU									
7	BLUD PKM CILILIN									
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN									
9	BLUD PKM SAGULING									
10	BLUD PKM PARONGPONG									
11	BLUD PKM CIWARUGA									
12	BLUDPKM CIHAMPELAS									
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG									
14	BLUD PKM SINDANGKERTA									
15	BLUD PKM CICANGKANGHIRANG									
16	BLUD PKM CIPATAT									
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG									
18	BLUD PKM RONGGA									
19	BLUD PKM JAYAMEKAR									
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY									
21	BLUD PKM CITALEM									
22	BLUD PKM CIPONGKOR									
23	BLUD PKM CIMAREME									
24	BLUD PKM NGAMPRAH									
25	BLUD PKM BATUJAJAR									
26	BLUD PKM CIBODAS									
27	BLUD PKM CIKOLE									
28	BLUD PKM LEMBANG									
29	BLUD PKM PASIRLANGU									
30	BLUD PKM RENDE									
31	BLUD PKM CIRATA									
32	BLUD PKM CISARUA									
33	BLUD PKM TAGOG APU									
34	BLUD PKM PADALARANG									
35	BLUD PKM PATARUMAN									
36	UPT LABKESDA									
JUMLAH		89.599.814,00	600.636,00	23.206.500,00	15.846.467,00	7.500.000,00	27.127.715,00	187.830.000,00	5.940.000,00	8.952.899,00

UTANG BELANJA PEGAWAI
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	UTANG							
		Belanja Belanja Bahan - Bahan Lainnya (BHP CSSD)	BELANJA OUTSOURCHING KEBERSIHAN	BELANJA JASA PELAYANAN LABKES	BELANJA JASA TENAGA AHLI	BELANJA JASA KALIBRASI	TABUNG GAS	JASPEL PNS	JASPEL NON PNS
1	RSUD CILILIN		196.440.000,00			174.196.349,00	463.721.746,00	2.130.107.915,00	
2	RSUD LEMBANG	39.175.174,00	83.088.000,00						
3	RSUD CIKALONGWETAN								
4	BLUD PKM RAJAMANDALA								
5	BLUD PKM JAYAGIRI								
6	BLUD PKM GUNUNGHALU							142.074.050,00	89.312.865,00
7	BLUD PKM CILILIN								
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN								
9	BLUD PKM SAGULING							81.993.602,00	19.027.523,00
10	BLUD PKM PARONGPONG								
11	BLUD PKM CIWARUGA								
12	BLUDPKM CIHAMPELAS								
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG								
14	BLUD PKM SINDANGKERTA								
15	BLUD PKM CICANGKANGCIRANG								
16	BLUD PKM CIPATAT								
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG							98.218.847,00	50.913.165,00
18	BLUD PKM RONGGA								
19	BLUD PKM JAYAMEKAR								
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY								
21	BLUD PKM CITALEM								
22	BLUD PKM CIPONGKOR								
23	BLUD PKM CIMAREME								
24	BLUD PKM NGAMPRAH								
25	BLUD PKM BATUJAJAR								
26	BLUD PKM CIBODAS								
27	BLUD PKM CIKOLE								
28	BLUD PKM LEMBANG								
29	BLUD PKM PASIRLANGU								
30	BLUD PKM RENDE								
31	BLUD PKM CIRATA							29.805.007,00	8.202.193,00
32	BLUD PKM CISARUA								
33	BLUD PKM TAGOG APU								
34	BLUD PKM PADALARANG								
35	BLUD PKM PATARUMAN								
36	UPT LABKESDA			611.101.583,00	219.780.000,00				
JUMLAH		39.175.174,00	279.528.000,00	611.101.583,00	219.780.000,00	174.196.349,00	463.721.746,00	2.482.199.421,00	167.455.746,00

UTANG BELANJA PEGAWAI
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	BMHP (BHP MEDIS)	Belanja BHP Non Medis (Gelang Pasien)	Belanja alat kebersihan dan bahan pembersih	BAHAN KIMIA	SAMPAH MEDIS	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	OBAT-OBATAN	Dibayarkan Belanja Sewa Instalasi Lain
1	RSUD CILILIN	3.040.514.735,00	6.600.000,00	102.330.200,00		26.707.433,00		2.710.531.239,00	
2	RSUD LEMBANG			9.906.750,00	309.725.231,00	15.723.400,00	570.509.220,00	2.000.091.001,00	26.143.275,00
3	RSUD CIKALONGWETAN				19.700.000,00	77.019.570,00			166.500.000,00
4	BLUD PKM RAJAMANDALA								
5	BLUD PKM JAYAGIRI								
6	BLUD PKM GUNUNGHALU								
7	BLUD PKM CILILIN								
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN								
9	BLUD PKM SAGULING	490.000,00							
10	BLUD PKM PARONGPONG								
11	BLUD PKM CIWARUGA								
12	BLUDPKM CIHAMPELAS								
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG								
14	BLUD PKM SINDANGKERTA								
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG								
16	BLUD PKM CIPATAT								
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG								
18	BLUD PKM RONGGA								
19	BLUD PKM JAYAMEKAR								
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY								
21	BLUD PKM CITALEM								
22	BLUD PKM CIPONGKOR								
23	BLUD PKM CIMAREME								
24	BLUD PKM NGAMPRAH								
25	BLUD PKM BATUJAJAR								
26	BLUD PKM CIBODAS								
27	BLUD PKM CIKOLE								
28	BLUD PKM LEMBANG								
29	BLUD PKM PASIRLANGU								
30	BLUD PKM RENDE								
31	BLUD PKM CIRATA								
32	BLUD PKM CISARUA								
33	BLUD PKM TAGOG APU								
34	BLUD PKM PADALARANG								
35	BLUD PKM PATARUMAN								
36	UPT LABKESDA					9.615.264,00			
	JUMLAH	3.041.004.735,00	6.600.000,00	112.236.950,00	329.425.231,00	129.065.667,00	570.509.220,00	4.710.622.240,00	192.643.275,00

UTANG BELANJA PEGAWAI

UTANG BELANJA BARANG DAN JASA

UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN

UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	Belanja Jasa Pemeriksaan Radiognostik	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	Belanja Modal Rehabilitasi / Renovasi Ringan	Pemeliharaan Alat Kesehatan Mata
1	RSUD CILILIN	17.760.000,00					23.970.672,00
2	RSUD LEMBANG	135.000,00	15.624.360,00				
3	RSUD CIKALONGWETAN			93.109.002,00		20.104.730,00	
4	BLUD PKM RAJAMANDALA						
5	BLUD PKM JAYAGIRI						
6	BLUD PKM GUNUNGHALU						
7	BLUD PKM CILILIN						
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN						
9	BLUD PKM SAGULING						
10	BLUD PKM PARONGPONG						
11	BLUD PKM CIWARUGA						
12	BLUDPKM CIHAMPELAS						
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG						
14	BLUD PKM SINDANGKERTA						
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG						
16	BLUD PKM CIPATAT						
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG						
18	BLUD PKM RONGGA						
19	BLUD PKM JAYAMEKAR						
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY						
21	BLUD PKM CITALEM						
22	BLUD PKM CIPONGKOR						
23	BLUD PKM CIMAREME						
24	BLUD PKM NGAMPRAH						
25	BLUD PKM BATUJAJAR						
26	BLUD PKM CIBODAS						
27	BLUD PKM CIKOLE						
28	BLUD PKM LEMBANG						
29	BLUD PKM PASIRLANGU						
30	BLUD PKM RENDE						
31	BLUD PKM CIRATA						
32	BLUD PKM CISARUA						
33	BLUD PKM TAGOG APU						
34	BLUD PKM PADALARANG						
35	BLUD PKM PATARUMAN						
36	UPT LABKESDA						
	JUMLAH	17.895.000,00	15.624.360,00	93.109.002,00	-	20.104.730,00	23.970.672,00

UTANG BELANJA PEGAWAI
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	ATK	Jasa Konsultasi Penyusunan Jasa Pelayanan	Jasa Konsultasi Perencanaan	Belanja Jasa Tenaga Ahli
1	RSUD CILILIN			3.277.000,00	199.056.300,00	15.000.000,00	
2	RSUD LEMBANG						66.600.000,00
3	RSUD CIKALONGWETAN	31.600.000,00	134.998.644,00				
4	BLUD PKM RAJAMANDALA						
5	BLUD PKM JAYAGIRI						
6	BLUD PKM GUNUNGHALU						
7	BLUD PKM CILILIN						
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN						
9	BLUD PKM SAGULING						
10	BLUD PKM PARONGPONG						
11	BLUD PKM CIWARUGA						
12	BLUDPKM CIHAMPELAS						
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG						
14	BLUD PKM SINDANGKERTA						
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG						
16	BLUD PKM CIPATAT						
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG						
18	BLUD PKM RONGGA						
19	BLUD PKM JAYAMEKAR						
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY						
21	BLUD PKM CITALEM						
22	BLUD PKM CIPONGKOR						
23	BLUD PKM CIMAREME						
24	BLUD PKM NGAMPRAH						
25	BLUD PKM BATUJAJAR						
26	BLUD PKM CIBODAS						
27	BLUD PKM CIKOLE						
28	BLUD PKM LEMBANG						
29	BLUD PKM PASIRLANGU						
30	BLUD PKM RENDE						
31	BLUD PKM CIRATA						
32	BLUD PKM CISARUA						
33	BLUD PKM TAGOG APU						
34	BLUD PKM PADALARANG						
35	BLUD PKM PATARUMAN						
36	UPT LABKESDA						
JUMLAH		31.600.000,00	134.998.644,00	3.277.000,00	199.056.300,00	15.000.000,00	66.600.000,00

UTANG BELANJA PEGAWAI
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 24

Rekap Utang Belanja BLUD 2025

(dalam rupiah)

NOMOR	BLUD	Belanja Jasa Keamanan	Belanja Sewa Personal Computer	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	Pemeliharaan Kedokteran umum	Pemeliharaan Feeder	Pemeriksaan Jaringan PA	Belanja KLB	BPJS	JUMLAH
1	RSUD CILILIN	165.480.000,00			29.415.000,00	1.650.000,00	84.900.000,00			11.024.529.556,00
2	RSUD LEMBANG	66.240.000,00	15.900.300,00	50.388.450,00						3.511.610.654,00
3	RSUD CIKALONGWETAN							8.991.000,00		1.001.313.735,00
4	BLUD PKM RAJAMANDALA									-
5	BLUD PKM JAYAGIRI									-
6	BLUD PKM GUNUNGHALU								2.410.758,00	2.410.758,00
7	BLUD PKM CILILIN								4.022.843,00	235.409.758,00
8	BLUD PKM CIKALONGWETAN									-
9	BLUD PKM SAGULING									490.000,00
10	BLUD PKM PARONGPONG									101.021.125,00
11	BLUD PKM CIWARUGA								1.777.247,00	1.777.247,00
12	BLUDPKM CIHAMPELAS									-
13	BLUD PKM MUKAPAYUNG									-
14	BLUD PKM SINDANGKERTA									-
15	BLUD PKM CICANGKANGGIRANG									-
16	BLUD PKM CIPATAT									-
17	BLUD PKM SUMUR BANDUNG									-
18	BLUD PKM RONGGA									149.132.012,00
19	BLUD PKM JAYAMEKAR									-
20	BLUD PKM CIPEUNDEUY									-
21	BLUD PKM CITALEM									-
22	BLUD PKM CIPONGKOR									-
23	BLUD PKM CIMAREME									-
24	BLUD PKM NGAMPRAH									-
25	BLUD PKM BATUJAJAR									-
26	BLUD PKM CIBODAS									-
27	BLUD PKM CIKOLE									-
28	BLUD PKM LEMBANG									-
29	BLUD PKM PASIRLANGU									-
30	BLUD PKM RENDE									-
31	BLUD PKM CIRATA							5.700.000,00		43.707.200,00
32	BLUD PKM CISARUA									-
33	BLUD PKM TAGOG APU									-
34	BLUD PKM PADALARANG									-
35	BLUD PKM PATARUMAN									1.201.464.130,00
36	UPT LABKESDA									
	JUMLAH	231.720.000,00	15.900.000,00	50.388.450,00	29.415.000,00	1.650.000,00	84.900.000,00	14.691.000,00	8.210.848,00	17.272.865.575,00

UTANG BELANJA PEGAWAI
UTANG BELANJA BARANG DAN JASA
UTANG BELANJA MODAL PERALATAN DAN MESIN
UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN

LAMPIRAN CaLK 25

REKAPITULASI UTANG BELANJA MODAL GEDUNG DAN BANGUNAN
TAHUN ANGGARAN 2025

dalam rupiah

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA AKUN	URAIAN	KODE AKUN	SUMBER DANA	NOMINAL
1	Dinas Pendidikan	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	Pekerjaan Pembangunan MCK SMPN 4 Lembang Kec. Lembang Keg. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary SPK No. 027/16.14/216.27-SPK Konstruksi/Disdik/2018.27-11-2018	2.1.06.08.01.0010.	PAD	49.730.000,00
2	RSUD Cikalongwetan	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	Belanja Modal Rehabilitasi/Renovasi Ruangan RSUD Cikalongwetan Gedung Utara dan Gedung Rawat Inap	2.1.06.08.99.9999	BLUD	20.104.730,00
JUMLAH TOTAL						**69.834.730,00**

LAMPIRAN CaLK 26

KEWAJIBAN KOMPENSASI JASA PELAYANAN (KJP)
PERSAMPAHAN SARIMUKTI
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

No.	Bulan	Kuantitas Sampah (Ton)	KDN TPPAS (Rp50000/ton)	Penyetoran/Pembayaran		Lebih/Kurang Bayar	Keterangan
				Tanggal	Jumlah (Rp)		
1	*2*	*3*	*4=3*50000*	*5*	*6*	*7 = 6-4*	*8*
			659.855.000,00	*7/30/2025*	*1.287.761.750,00*	-	Hutang KJP 2024 serta pembayaran bulan Januari s.d April 2025
1	JANUARI	3.056,396	152.819.800,00				
2	FEBRUARI	2.940,252	147.012.600,00				
3	MARET	3.182,536	159.126.800,00				
4	APRIL	3.378,951	168.947.550,00				
5	MEI	3.811,892	190.594.600,00				
6	JUNI	4.308,322	215.416.100,00				
7	JULI	5.850,228	292.511.400,00	12/9/2025	1.120.655.800,00	-	Pembayaran KJP bulan Mei s.d. September 2025
8	AGUSTUS	4.540,154	227.007.700,00				
9	SEPTEMBER	3.902,520	195.126.000,00				
10	OKTOBER	6.389,406	319.470.300,00			*319.470.300,00*	Pembayaran KJP bulan Oktober 2025
11	NOVEMBER	4.945,616	247.280.800,00			*247.280.800,00*	Pembayaran KJP bulan November 2025
12	DESEMBER	4.401,144	220.057.200,00			*220.057.200,00*	Hutang KJP bulan Desember 2025
Total		**50.707,417**	**2.535.370.850,00**		**2.408.417.550,00**	**786.808.300,00**	

LAMPIRAN CaLK 27

REKAPITULASI UTANG BELANJA BARANG DAN JASA Per 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

NO	PERANGKAT DAERAH	REKENING							JUMLAH TAGIHAN
		LISTRIK	TELEPON	AIR	INTERNET	BPJS NON ASN	KJP	BLUD	
1	BKAD	1.379.686.386,00		2.528.000,00		29.108.215,00			1.411.322.601,00
2	BKPSDM		63.936,00						63.936,00
3	DISPARBUD	152.140,00							152.140,00
4	BAPPELITBANGDA		217.000,00		2.021.000,00				2.238.000,00
5	DISDIK				5.163.629,00				5.163.629,00
6	DINKES		408.570,00					14.653.617.214,00	14.654.025.784,00
7	DINAS PEMADAM KEBAKARAN	1.603.854,00	7.089.196,00	12.166.200,00					20.859.250,00
8	DKPP	1.087.287,00							1.087.287,00
9	KECAMATAN CIHAMPELAS		60.860,00						60.860,00
10	DLH						786.808.300,00		786.808.300,00
	JUMLAH	1.382.529.667,00	7.839.562,00	14.694.200,00	7.184.629,00	29.108.215,00	786.808.300,00	14.653.617.214,00	16.881.781.787,00

LAMPIRAN CaLK 28a

DATA KURANG SALUR BAGI HASIL PAJAK DAERAH KE DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	BATUJAJAR BARAT-BATUJAJAR	(12.602.800,00)	Kurang Salur
2	BATUJAJAR	CANGKORAH	CANGKORAH-BATUJAJAR	(3.373.400,00)	Kurang Salur
3	BATUJAJAR	GALANGGANG	GALANGGANG-BATUJAJAR	(103.100,00)	Kurang Salur
4	BATUJAJAR	GIRIASIH	GIRIASIH-BATUJAJAR	(10.953.900,00)	Kurang Salur
5	BATUJAJAR	PANGAUBAN	PANGAUBAN-BATUJAJAR	(638.400,00)	Kurang Salur
6	BATUJAJAR	SELACAU	SELACAU-BATUJAJAR	(31.536.500,00)	Kurang Salur
7	CIHAMPELAS	CIPATIK	CIPATIK-CIHAMPELAS	(9.394.599,90)	Kurang Salur
8	CIHAMPELAS	CITAPEN	CITAPEN-CIHAMPELAS	(1.840.900,00)	Kurang Salur
9	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	MEKARJAYA-CIHAMPELAS	(436.300,00)	Kurang Salur
10	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	MEKARMUKTI-CIHAMPELAS	(1.461.300,00)	Kurang Salur
11	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	SINGAJAYA-CIHAMPELAS	(22.800,00)	Kurang Salur
12	CIHAMPELAS	SITUWANGI	SITUWANGI-CIHAMPELAS	(74.948.000,00)	Kurang Salur
13	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	TANJUNGJAYA-CIHAMPELAS	(18.828.100,00)	Kurang Salur
14	CIKALONG WETAN	CIKALONG	CIKALONG-CIKALONG WETAN	(3.862.300,00)	Kurang Salur
15	CIKALONG WETAN	CIPADA	CIPADA-CIKALONG WETAN	(1.758.000,00)	Kurang Salur
16	CIKALONG WETAN	CIPTAGUMATI	CIPTAGUMATI-CIKALONG WETAN	(12.464.700,00)	Kurang Salur
17	CIKALONG WETAN	CISOMANG BARAT	CISOMANG BARAT-CIKALONG WETAN	(276.900,00)	Kurang Salur
18	CIKALONG WETAN	GANJARSARI	GANJARSARI-CIKALONG WETAN	(9.364.500,00)	Kurang Salur
19	CIKALONG WETAN	KANANGASARI	KANANGASARI-CIKALONG WETAN	(721.000,00)	Kurang Salur
20	CIKALONG WETAN	MANDALAMUKTI	MANDALAMUKTI-CIKALONG WETAN	(798.900,00)	Kurang Salur
21	CIKALONG WETAN	TENJOLAUT	TENJOLAUT-CIKALONG WETAN	(458.100,00)	Kurang Salur
22	CILILIN	BATULAYANG	BATULAYANG-CILILIN	(2.130.100,00)	Kurang Salur
23	CILILIN	BONGAS	BONGAS-CILILIN	(16.644.100,00)	Kurang Salur
24	CILILIN	KARANGANYAR	KARANGANYAR-CILILIN	(2.675.100,00)	Kurang Salur
25	CILILIN	KARYAMUKTI	KARYAMUKTI-CILILIN	(7.100,00)	Kurang Salur
26	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	KIDANGPANANJUNG-CILILIN	(21.100,00)	Kurang Salur
27	CILILIN	RANCAPANGGUNG	RANCAPANGGUNG-CILILIN	(11.246.100,00)	Kurang Salur

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
28	CIPATAT	CIPATAT	CIPATAT-CIPATAT	(261.600,00)	Kurang Salur
29	CIPATAT	CIPTAHARJA	CIPTAHARJA-CIPATAT	(4.784.900,00)	Kurang Salur
30	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	CIRAWAMEKAR-CIPATAT	(2.260.600,00)	Kurang Salur
31	CIPATAT	CITATAH	CITATAH-CIPATAT	(12.836.000,00)	Kurang Salur
32	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	GUNUNGMASIGIT-CIPATAT	(41.130.900,00)	Kurang Salur
33	CIPATAT	KERTAMUKTI	KERTAMUKTI-CIPATAT	(20.579.300,00)	Kurang Salur
34	CIPATAT	RAJAMANDALA KULON	RAJAMANDALA KULON-CIPATAT	(2.680.400,00)	Kurang Salur
35	CIPATAT	SARIMUKTI	SARIMUKTI-CIPATAT	(1.314.000,00)	Kurang Salur
36	CIPATAT	SUMURBANDUNG	SUMURBANDUNG-CIPATAT	(895.400,00)	Kurang Salur
37	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	BOJONGMEKAR-CIPEUNDEUY	(168.300,00)	Kurang Salur
38	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY-CIPEUNDEUY	(3.538.800,00)	Kurang Salur
39	CIPEUNDEUY	CIROYOM	CIROYOM-CIPEUNDEUY	(5.033.500,00)	Kurang Salur
40	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	NANGGELENG-CIPEUNDEUY	(476.000,00)	Kurang Salur
41	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	SIRNAGALIH-CIPEUNDEUY	(32.419.000,00)	Kurang Salur
42	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	SUKAHAJI-CIPEUNDEUY	(231.000,00)	Kurang Salur
43	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	BARANANGSIANG-CIPONGKOR	(7.683.700,00)	Kurang Salur
44	CIPONGKOR	CIBENDA	CIBENDA-CIPONGKOR	(101.000,00)	Kurang Salur
45	CIPONGKOR	CIJAMBU	CIJAMBU-CIPONGKOR	(1.845.400,00)	Kurang Salur
46	CIPONGKOR	CIJENUK	CIJENUK-CIPONGKOR	(228.500,00)	Kurang Salur
47	CIPONGKOR	CITALEM	CITALEM-CIPONGKOR	(8.754.100,00)	Kurang Salur
48	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	GIRIMUKTI-CIPONGKOR	(51.100,00)	Kurang Salur
49	CIPONGKOR	KARANGSARI	KARANGSARI-CIPONGKOR	(1.311.100,00)	Kurang Salur
50	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	SIRNAGALIH-CIPONGKOR	(6.728.000,00)	Kurang Salur
51	CIPONGKOR	SUKAMULYA	SUKAMULYA-CIPONGKOR	(68.000,00)	Kurang Salur
52	CISARUA	CIPADA	CIPADA-CISARUA	(639.900,00)	Kurang Salur
53	CISARUA	JAMBUDIPA	JAMBUDIPA-CISARUA	(40.063.200,00)	Kurang Salur
54	CISARUA	PADAASIH	PADAASIH-CISARUA	(392.800,00)	Kurang Salur
55	CISARUA	PASIRLANGU	PASIRLANGU-CISARUA	(601.100,00)	Kurang Salur
56	CISARUA	SADANGMEKAR	SADANGMEKAR-CISARUA	(93.600,00)	Kurang Salur
57	CISARUA	TUGUMUKTI	TUGUMUKTI-CISARUA	(3.367.600,00)	Kurang Salur
58	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	BUNIJAYA-GUNUNGHALU	(192.500,00)	Kurang Salur

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
59	GUNUNGHALU	CELAK	CELAK-GUNUNGHALU	(230.200,00)	Kurang Salur
60	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU-GUNUNGHALU	(12.874.800,00)	Kurang Salur
61	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	SIRNAJAYA-GUNUNGHALU	(158.600,00)	Kurang Salur
62	LEMBANG	CIKAHURIPAN	CIKAHURIPAN-LEMBANG	(38.917.400,00)	Kurang Salur
63	LEMBANG	CIKOLE	CIKOLE-LEMBANG	(4.968.300,00)	Kurang Salur
64	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	GUDANGKAHURIPAN-LEMBANG	(28.941.000,00)	Kurang Salur
65	LEMBANG	JAYAGIRI	JAYAGIRI-LEMBANG	(4.988.600,00)	Kurang Salur
66	LEMBANG	LANGENSARI	LANGENSARI-LEMBANG	(2.303.500,00)	Kurang Salur
67	LEMBANG	LEMBANG	LEMBANG-LEMBANG	(153.849.900,00)	Kurang Salur
68	LEMBANG	MEKARWANGI	MEKARWANGI-LEMBANG	(1.785.300,00)	Kurang Salur
69	LEMBANG	PAGERWANGI	PAGERWANGI-LEMBANG	(7.904.000,00)	Kurang Salur
70	LEMBANG	SUKAJAYA	SUKAJAYA-LEMBANG	(10.665.300,00)	Kurang Salur
71	LEMBANG	WANGUNSARI	WANGUNSARI-LEMBANG	(500.800,00)	Kurang Salur
72	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	BOJONGKONENG-NGAMPRAH	(14.692.200,00)	Kurang Salur
73	NGAMPRAH	CILAME	CILAME-NGAMPRAH	(3.147.165,00)	Kurang Salur
74	NGAMPRAH	CIMANGGU	CIMANGGU-NGAMPRAH	(729.400,00)	Kurang Salur
75	NGAMPRAH	CIMAREME	CIMAREME-NGAMPRAH	(63.370.300,00)	Kurang Salur
76	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	GADOBANGKONG-NGAMPRAH	(25.207.500,00)	Kurang Salur
77	NGAMPRAH	MARGAJAYA	MARGAJAYA-NGAMPRAH	(869.300,00)	Kurang Salur
78	NGAMPRAH	NGAMPRAH	NGAMPRAH-NGAMPRAH	(12.967.600,00)	Kurang Salur
79	NGAMPRAH	TANIMULYA	TANIMULYA-NGAMPRAH	(73.880.100,00)	Kurang Salur
80	PADALARANG	CEMPAKAMEKAR	CEMPAKAMEKAR-PADALARANG	(2.312.100,00)	Kurang Salur
81	PADALARANG	CIBURUY	CIBURUY-PADALARANG	(22.672.700,00)	Kurang Salur
82	PADALARANG	CIMERANG	CIMERANG-PADALARANG	(75.194.100,00)	Kurang Salur
83	PADALARANG	JAYAMEKAR	JAYAMEKAR-PADALARANG	(10.052.800,00)	Kurang Salur
84	PADALARANG	KERTAMULYA	KERTAMULYA-PADALARANG	(776.600,00)	Kurang Salur
85	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	LAKSANAMEKAR-PADALARANG	(10.053.900,00)	Kurang Salur
86	PADALARANG	PADALARANG	PADALARANG-PADALARANG	(3.904.500,00)	Kurang Salur
87	PADALARANG	TAGOGAPU	TAGOGAPU-PADALARANG	(654.300,00)	Kurang Salur
88	PARONGPONG	CIHANJUANG	CIHANJUANG-PARONGPONG	(6.243.900,00)	Kurang Salur

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
89	PARONGPONG	CIHIDEUNG	CIHIDEUNG-PARONGPONG	(32.628.300,00)	Kurang Salur
90	PARONGPONG	CIWARUGA	CIWARUGA-PARONGPONG	(8.464.100,00)	Kurang Salur
91	PARONGPONG	KARYAWANGI	KARYAWANGI-PARONGPONG	(47.199.700,00)	Kurang Salur
92	RONGGA	CIBEDUG	CIBEDUG-RONGGA	(31.600,00)	Kurang Salur
93	RONGGA	CINENGAH	CINENGAH-RONGGA	(6.639.700,00)	Kurang Salur
94	RONGGA	SUKAMANAH	SUKAMANAH-RONGGA	(6.100,00)	Kurang Salur
95	RONGGA	SUKARESMI	SUKARESMI-RONGGA	(1.101.300,00)	Kurang Salur
96	SAGULING	BOJONGHALEUANG	BOJONGHALEUANG-SAGULING	(367.831.704,70)	Kurang Salur
97	SAGULING	CIKANDE	CIKANDE-SAGULING	(15.081.400,00)	Kurang Salur
98	SAGULING	CIPANGERAN	CIPANGERAN-SAGULING	(1.119.500,00)	Kurang Salur
99	SAGULING	GIRIMUKTI	GIRIMUKTI-SAGULING	(12.306.400,00)	Kurang Salur
100	SAGULING	SAGULING	SAGULING-SAGULING	(6.986.300,00)	Kurang Salur
101	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	BUNINAGARA-SINDANGKERTA	(12.769.100,00)	Kurang Salur
102	SINDANGKERTA	CICANGKANG GIRANG	CICANGKANG GIRANG-SINDANGKERTA	(117.800,00)	Kurang Salur
103	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	CINTAKARYA-SINDANGKERTA	(277.500,00)	Kurang Salur
104	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	MEKARWANGI-SINDANGKERTA	(335.700,00)	Kurang Salur
105	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	PASIRPOGOR-SINDANGKERTA	(6.453.797,00)	Kurang Salur
106	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	PUNCAKSARI-SINDANGKERTA	(72.100,00)	Kurang Salur
107	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	RANCASENGGANG-SINDANGKERTA	(2.508.454,00)	Kurang Salur
108	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA-SINDANGKERTA	(9.119.500,00)	Kurang Salur
109	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	WANGUNSARI-SINDANGKERTA	(21.169,00)	Kurang Salur
Total				**(1.555.186.789,60)**	

LAMPIRAN CaLK 28b

DATA KURANG SALUR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	BATUJAJAR BARAT-BATUJAJAR	(46.100,00)	Kurang Salur
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	BATUJAJAR TIMUR-BATUJAJAR	(1.224.200,00)	Kurang Salur
3	BATUJAJAR	GIRIASIH	GIRIASIH-BATUJAJAR	(19.309.271,00)	Kurang Salur
4	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS-CIHAMPELAS	(26.300,00)	Kurang Salur
5	CIHAMPELAS	CITAPEN	CITAPEN-CIHAMPELAS	(410.700,00)	Kurang Salur
6	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	MEKARJAYA-CIHAMPELAS	(100,00)	Kurang Salur
7	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	MEKARMUKTI-CIHAMPELAS	(5.700,00)	Kurang Salur
8	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	SINGAJAYA-CIHAMPELAS	(208.200,00)	Kurang Salur
9	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	TANJUNGJAYA-CIHAMPELAS	(819.300,00)	Kurang Salur
10	CIKALONGWETAN	CIKALONG	CIKALONG-CIKALONGWETAN	(284.500,00)	Kurang Salur
11	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	MANDALAMUKTI-CIKALONGWETAN	(345.100,00)	Kurang Salur
12	CILILIN	BATULAYANG	BATULAYANG-CILILIN	(57.300,00)	Kurang Salur
13	CILILIN	KARYAMUKTI	KARYAMUKTI-CILILIN	(12.500,00)	Kurang Salur
14	CILILIN	MUKAPAYUNG	MUKAPAYUNG-CILILIN	(28.800,00)	Kurang Salur
15	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	CIRAWAMEKAR-CIPATAT	(40.300,00)	Kurang Salur
16	CIPATAT	CITATAH	CITATAH-CIPATAT	(3.977.100,00)	Kurang Salur
17	CIPATAT	MANDALAWANGI	MANDALAWANGI-CIPATAT	(91.600,00)	Kurang Salur
18	CIPATAT	RAJAMANDALA KULON	RAJAMANDALA KULON-CIPATAT	(300,00)	Kurang Salur
19	CIPATAT	SUMURBANDUNG	SUMURBANDUNG-CIPATAT	(445.800,00)	Kurang Salur
20	CIPONGKOR	CIBENDA	CIBENDA-CIPONGKOR	(6.500,00)	Kurang Salur
21	CIPONGKOR	CINTAASIH	CINTAASIH-CIPONGKOR	(78.000,00)	Kurang Salur
22	CISARUA	JAMBUDIPA	JAMBUDIPA-CISARUA	(12.642.200,00)	Kurang Salur
23	CISARUA	PADAASIH	PADAASIH-CISARUA	(314.600,00)	Kurang Salur
24	CISARUA	TUGUMUKTI	TUGUMUKTI-CISARUA	(1.359.200,00)	Kurang Salur
25	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	TAMANJAYA-GUNUNGHALU	(560.000,00)	Kurang Salur
26	LEMBANG	CIBODAS	CIBODAS-LEMBANG	(20.300,00)	Kurang Salur
27	LEMBANG	CIBOGO	CIBOGO-LEMBANG	(13.827.500,00)	Kurang Salur
28	LEMBANG	CIKAHURIPAN	CIKAHURIPAN-LEMBANG	(69.300,00)	Kurang Salur
29	LEMBANG	CIKOLE	CIKOLE-LEMBANG	(3.055.700,00)	Kurang Salur

LAMPIRAN CaLK 28b

DATA KURANG SALUR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
30	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	GUDANGKAHURIPAN-LEMBANG	(569.700,00)	Kurang Salur
31	LEMBANG	LANGENSARI	LANGENSARI-LEMBANG	(1.876.700,00)	Kurang Salur
32	LEMBANG	MEKARWANGI	MEKARWANGI-LEMBANG	(4.171.400,00)	Kurang Salur
33	LEMBANG	PAGERWANGI	PAGERWANGI-LEMBANG	(144.300,00)	Kurang Salur
34	LEMBANG	SUNTENJAYA	SUNTENJAYA-LEMBANG	(149.900,00)	Kurang Salur
35	LEMBANG	WANGUNHARJA	WANGUNHARJA-LEMBANG	(5.300,00)	Kurang Salur
36	LEMBANG	WANGUNSARI	WANGUNSARI-LEMBANG	(1.018.800,00)	Kurang Salur
37	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	BOJONGKONENG-NGAMPRAH	(192.700,00)	Kurang Salur
38	NGAMPRAH	CILAME	CILAME-NGAMPRAH	(20.080.800,00)	Kurang Salur
39	NGAMPRAH	CIMANGGU	CIMANGGU-NGAMPRAH	(83.700,00)	Kurang Salur
40	NGAMPRAH	CIMAREME	CIMAREME-NGAMPRAH	(3.103.900,00)	Kurang Salur
41	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	GADOBANGKONG-NGAMPRAH	(381.200,00)	Kurang Salur
42	NGAMPRAH	MEKARSARI	MEKARSARI-NGAMPRAH	(55.500,00)	Kurang Salur
43	NGAMPRAH	PAKUHAJI	PAKUHAJI-NGAMPRAH	(4.225.700,00)	Kurang Salur
44	PADALARANG	CAMPAKAMEKAR	CAMPAKAMEKAR-PADALARANG	(2.419.900,00)	Kurang Salur
45	PADALARANG	CIBURUY	CIBURUY-PADALARANG	(554.300,00)	Kurang Salur
46	PADALARANG	CIMERANG	CIMERANG-PADALARANG	(13.103.700,00)	Kurang Salur
47	PADALARANG	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY-PADALARANG	(78.546.400,00)	Kurang Salur
48	PADALARANG	JAYAMEKAR	JAYAMEKAR-PADALARANG	(46.232.700,00)	Kurang Salur
49	PADALARANG	KERTAJAYA	KERTAJAYA-PADALARANG	(28.158.700,00)	Kurang Salur
50	PADALARANG	KERTAMULYA	KERTAMULYA-PADALARANG	(7.936.700,00)	Kurang Salur
51	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	LAKSANAMEKAR-PADALARANG	(32.478.900,00)	Kurang Salur
52	PADALARANG	PADALARANG	PADALARANG-PADALARANG	(18.262.800,00)	Kurang Salur
53	PADALARANG	TAGOGAPU	TAGOGAPU-PADALARANG	(261.400,00)	Kurang Salur
54	PARONGPONG	CIHANJUANG RAHAYU	CIHANJUANG RAHAYU-PARONGPONG	(1.289.600,00)	Kurang Salur
55	PARONGPONG	CIWARUGA	CIWARUGA-PARONGPONG	(14.884.900,00)	Kurang Salur

LAMPIRAN CaLK 28b

DATA KURANG SALUR BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH KE DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	GABUNGAN	TOTAL KURANG SALUR	KET
1	2	3	4	5	6
56	SAGULING	CIKANDE	CIKANDE-SAGULING	(13.761.251,00)	Kurang Salur
57	SAGULING	SAGULING	SAGULING-SAGULING	(1.232.700,00)	Kurang Salur
58	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	MEKARWANGI-SINDANGKERTA	(3.084,00)	Kurang Salur
59	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	PUNCAKSARI-SINDANGKERTA	(4.198,00)	Kurang Salur
60	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	RANCASENGGANG-SINDANGKERTA	(91.600,00)	Kurang Salur
61	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA-SINDANGKERTA	(91.400,00)	Kurang Salur
Total				**(354.640.304,00)**	

LAMPIRAN CaLK 28c

DATA KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL KURANG SALUR 2025
1	2	3	4
1	BATUJAJAR	BATUJAJAR BARAT	(3.547.700,00)
2	BATUJAJAR	BATUJAJAR TIMUR	(4.144.800,00)
3	BATUJAJAR	CANGKORAH	(3.377.700,00)
4	BATUJAJAR	GALANGGANG	(3.894.200,00)
5	BATUJAJAR	GIRIASIH	(3.563.400,00)
6	BATUJAJAR	PANGAUBAN	(3.399.600,00)
7	BATUJAJAR	SELACAU	(3.517.400,00)
8	CIHAMPELAS	CIHAMPELAS	(2.963.400,00)
9	CIHAMPELAS	CIPATIK	(3.088.700,00)
10	CIHAMPELAS	CITAPEN	(4.510.800,00)
11	CIHAMPELAS	MEKARJAYA	(3.535.900,00)
12	CIHAMPELAS	MEKARMUKTI	(3.633.900,00)
13	CIHAMPELAS	PATARUMAN	(4.164.900,00)
14	CIHAMPELAS	SINGAJAYA	(2.788.300,00)
15	CIHAMPELAS	SITUWANGI	(2.998.100,00)
16	CIHAMPELAS	TANJUNGJAYA	(3.242.000,00)
17	CIHAMPELAS	TANJUNGWANGI	(3.946.200,00)
18	CIKALONGWETAN	CIKALONG	(3.891.300,00)
19	CIKALONGWETAN	CIPADA	(4.081.900,00)
20	CIKALONGWETAN	CIPTAGUMATI	(3.518.000,00)
21	CIKALONGWETAN	CISOMANGBARAT	(4.456.600,00)
22	CIKALONGWETAN	GANJARSARI	(4.342.500,00)
23	CIKALONGWETAN	KANANGASARI	(3.809.100,00)
24	CIKALONGWETAN	MANDALAMUKTI	(3.876.100,00)
25	CIKALONGWETAN	MANDALASARI	(4.212.300,00)
26	CIKALONGWETAN	MEKARJAYA	(4.005.800,00)
27	CIKALONGWETAN	PUTERAN	(4.360.100,00)
28	CIKALONGWETAN	RENDE	(4.794.300,00)
29	CIKALONGWETAN	TENJOLAUT	(4.621.200,00)
30	CIKALONGWETAN	WANGUNJAYA	(3.572.300,00)
31	CILILIN	BATULAYANG	(4.070.900,00)
32	CILILIN	BONGAS	(3.382.500,00)
33	CILILIN	BUDIHARJA	(3.404.500,00)
34	CILILIN	CILILIN	(2.891.500,00)
35	CILILIN	KARANGANYAR	(3.458.200,00)
36	CILILIN	KARANGTANJUNG	(3.705.200,00)
37	CILILIN	KARYAMUKTI	(3.595.500,00)

LAMPIRAN CaLK 28c

DATA KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL KURANG SALUR 2025
1	2	3	4
38	CILILIN	KIDANGPANANJUNG	(3.028.200,00)
39	CILILIN	MUKAPAYUNG	(3.116.100,00)
40	CILILIN	NANGGERANG	(3.267.600,00)
41	CILILIN	RANCAPANGGUNG	(3.228.600,00)
42	CIPATAT	CIPATAT	(2.522.600,00)
43	CIPATAT	CIPTAHARJA	(6.287.000,00)
44	CIPATAT	CIRAWAMEKAR	(3.684.700,00)
45	CIPATAT	CITATAH	(3.168.459,00)
46	CIPATAT	GUNUNGMASIGIT	(2.261.100,00)
47	CIPATAT	KERTAMUKTI	(2.948.100,00)
48	CIPATAT	MANDALASARI	(3.536.200,00)
49	CIPATAT	MANDALAWANGI	(3.279.300,00)
50	CIPATAT	NYALINDUNG	(3.282.100,00)
51	CIPATAT	RAJAMANDALAKULON	(3.228.700,00)
52	CIPATAT	SARIMUKTI	(3.017.200,00)
53	CIPATAT	SUMURBANDUNG	(3.632.500,00)
54	CIPEUNDEUY	BOJONGMEKAR	(4.077.000,00)
55	CIPEUNDEUY	CIHARASHAS	(4.071.900,00)
56	CIPEUNDEUY	CIPEUNDEUY	(3.132.000,00)
57	CIPEUNDEUY	CIROYOM	(3.193.100,00)
58	CIPEUNDEUY	JATIMEKAR	(3.910.000,00)
59	CIPEUNDEUY	MARGALAKSANA	(3.807.300,00)
60	CIPEUNDEUY	MARGALUYU	(4.726.301,00)
61	CIPEUNDEUY	NANGGELENG	(5.308.466,00)
62	CIPEUNDEUY	NYENANG	(3.593.000,00)
63	CIPEUNDEUY	SIRNAGALIH	(4.138.967,00)
64	CIPEUNDEUY	SIRNARAJA	(6.409.801,00)
65	CIPEUNDEUY	SUKAHAJI	(3.100.800,00)
66	CIPONGKOR	BARANANGSIANG	(4.601.200,00)
67	CIPONGKOR	CIBENDA	(4.084.000,00)
68	CIPONGKOR	CICANGKANGHILIR	(3.667.200,00)
69	CIPONGKOR	CIJAMBU	(4.006.100,00)
70	CIPONGKOR	CIJENUK	(4.413.900,00)
71	CIPONGKOR	CINTAASIH	(3.479.100,00)
72	CIPONGKOR	CITALEM	(4.008.900,00)
73	CIPONGKOR	GIRIMUKTI	(3.410.600,00)
74	CIPONGKOR	KARANGSARI	(3.574.600,00)

LAMPIRAN CaLK 28c

DATA KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL KURANG SALUR 2025
1	2	3	4
75	CIPONGKOR	MEKARSARI	(3.596.600,00)
76	CIPONGKOR	NEGLASARI	(3.590.800,00)
77	CIPONGKOR	SARINAGEN	(3.297.500,00)
78	CIPONGKOR	SIRNAGALIH	(3.449.500,00)
79	CIPONGKOR	SUKAMULYA	(3.233.400,00)
80	CISARUA	CIPADA	(4.023.800,00)
81	CISARUA	JAMBUDIPA	(3.173.000,00)
82	CISARUA	KERTAWANGI	(3.918.100,00)
83	CISARUA	PADAASIH	(3.942.200,00)
84	CISARUA	PASIRHALANG	(3.447.700,00)
85	CISARUA	PASIRLANGU	(4.329.200,00)
86	CISARUA	SADANGMEKAR	(4.023.200,00)
87	CISARUA	TUGUMUKTI	(3.826.300,00)
88	GUNUNGHALU	BUNIJAYA	(4.412.900,00)
89	GUNUNGHALU	CELAK	(3.745.300,00)
90	GUNUNGHALU	CILANGARI	(3.579.200,00)
91	GUNUNGHALU	GUNUNGHALU	(5.338.629,00)
92	GUNUNGHALU	SINDANGJAYA	(4.336.600,00)
93	GUNUNGHALU	SIRNAJAYA	(4.738.700,00)
94	GUNUNGHALU	SUKASARI	(3.277.300,00)
95	GUNUNGHALU	TAMANJAYA	(4.545.400,00)
96	GUNUNGHALU	WARGASALUYU	(3.938.900,00)
97	LEMBANG	CIBODAS	(3.071.100,00)
98	LEMBANG	CIBOGO	(3.287.400,00)
99	LEMBANG	CIKAHURIPAN	(3.793.000,00)
100	LEMBANG	CIKIDANG	(3.999.800,00)
101	LEMBANG	CIKOLE	(3.604.100,00)
102	LEMBANG	GUDANGKAHURIPAN	(3.212.400,00)
103	LEMBANG	JAYAGIRI	(4.091.500,00)
104	LEMBANG	KAYUAMBON	(3.520.100,00)
105	LEMBANG	LANGENSARI	(3.255.300,00)
106	LEMBANG	LEMBANG	(3.603.500,00)
107	LEMBANG	MEKARWANGI	(2.785.600,00)
108	LEMBANG	PAGERWANGI	(3.051.400,00)
109	LEMBANG	SUKAJAYA	(3.993.900,00)
110	LEMBANG	SUNTENJAYA	(3.084.500,00)
111	LEMBANG	WANGUNHARJA	(3.384.500,00)

LAMPIRAN CaLK 28c

DATA KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL KURANG SALUR 2025
1	2	3	4
112	LEMBANG	WANGUNSARI	(3.038.400,00)
113	NGAMPRAH	BOJONGKONENG	(3.835.200,00)
114	NGAMPRAH	CILAME	(1.068.200,00)
115	NGAMPRAH	CIMANGGU	(3.423.300,00)
116	NGAMPRAH	CIMAREME	(2.400.200,00)
117	NGAMPRAH	GADOBANGKONG	(2.369.400,00)
118	NGAMPRAH	MARGAJAYA	(2.614.900,00)
119	NGAMPRAH	MEKARSARI	(4.523.400,00)
120	NGAMPRAH	NGAMPRAH	(2.799.000,00)
121	NGAMPRAH	PAKUHAJI	(2.602.400,00)
122	NGAMPRAH	SUKATANI	(2.856.300,00)
123	NGAMPRAH	TANIMULYA	(1.264.700,00)
124	PADALARANG	CAMPAKA MEKAR	(3.578.500,00)
125	PADALARANG	CIBURUY	(3.352.300,00)
126	PADALARANG	CIMERANG	(4.201.100,00)
127	PADALARANG	CIPEUNDEUY	(3.309.300,00)
128	PADALARANG	JAYAMEKAR	(3.270.500,00)
129	PADALARANG	KERTAJAYA	(3.357.800,00)
130	PADALARANG	KERTAMULYA	(2.919.900,00)
131	PADALARANG	LAKSANAMEKAR	(3.406.700,00)
132	PADALARANG	PADALARANG	(4.129.645,00)
133	PADALARANG	TAGOGAPU	(3.932.700,00)
134	PARONGPONG	CIGUGURGIRANG	(3.482.000,00)
135	PARONGPONG	CIHANJUANG	(3.432.300,00)
136	PARONGPONG	CIHANJUANGRAHAYU	(3.525.700,00)
137	PARONGPONG	CIHIDEUNG	(3.818.400,00)
138	PARONGPONG	CIWARUGA	(3.681.500,00)
139	PARONGPONG	KARYAWANGI	(3.493.700,00)
140	PARONGPONG	SARIWANGI	(4.119.000,00)
141	RONGGA	BOJONG	(34.359.660,00)
142	RONGGA	BOJONGSALAM	(3.638.700,00)
143	RONGGA	CIBEDUG	(3.176.000,00)
144	RONGGA	CIBITUNG	(4.275.000,00)
145	RONGGA	CICADAS	(3.843.000,00)
146	RONGGA	CINENGAH	(3.311.200,00)
147	RONGGA	SUKAMANAH	(3.298.700,00)
148	RONGGA	SUKARESMI	(3.406.700,00)

LAMPIRAN CaLK 28c

DATA KURANG SALUR ALOKASI DANA DESA
KABUPATEN BANDUNG BARAT
TAHUN ANGGARAN 2025

(dalam rupiah)

NO	KECAMATAN	DESA	TOTAL KURANG SALUR 2025
1	2	3	4
149	SAGULING	BOJONGHALEUANG	(2.974.300,00)
150	SAGULING	CIKANDE	(3.329.700,00)
151	SAGULING	CIPANGERAN	(3.099.800,00)
152	SAGULING	GIRIMUKTI	(3.005.700,00)
153	SAGULING	JATI	(3.235.400,00)
154	SAGULING	SAGULING	(3.623.200,00)
155	SINDANGKERTA	BUNINAGARA	(3.621.800,00)
156	SINDANGKERTA	CICANGKANGGIRANG	(4.084.400,00)
157	SINDANGKERTA	CIKADU	(3.679.500,00)
158	SINDANGKERTA	CINTAKARYA	(3.282.300,00)
159	SINDANGKERTA	MEKARWANGI	(4.008.500,00)
160	SINDANGKERTA	PASIRPOGOR	(3.726.100,00)
161	SINDANGKERTA	PUNCAKSARI	(3.102.700,00)
162	SINDANGKERTA	RANCASENGGANG	(3.925.900,00)
163	SINDANGKERTA	SINDANGKERTA	(3.361.900,00)
164	SINDANGKERTA	WANGUNSARI	(4.252.100,00)
165	SINDANGKERTA	WENINGGALIH	(3.716.100,00)
Total			**(627.216.628,00)**

LAMPIRAN Cat.K 29

Kertas Kerja Bahan Persediaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN								PENGURANGAN						SALDO AKHIR
			Realisasi	Retur	Utang	Aset tetap	Hibah	Ketahfan	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	Bahan Persediaan	Retur	Utang	Aset tetap	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Dipertimbangkan dari Konsumsi	49.821.600,00	2.291.691.407,00	843.000,00	-	-	-	-	-	-	2.251.091.407,00	-	-	-	-	-	1.294.500,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	1.912.750.242,47	479.039.500,00	-	-	-	447.307.500,00	-	0,01	-	655.911.337,50	-	-	-	-	-	1.530.693.012,98
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	530.000,00	4.987.951.950,00	-	-	-	-	-	-	-	4.988.122.950,00	-	-	-	-	-	359.000,00
5.1.02.01.01.0005	Belanja Bahan-Bahan Hias	67.500,00	33.510.900,00	667.000,00	-	-	-	-	-	-	33.510.900,00	-	-	-	-	-	734.500,00
5.1.02.01.01.0008	Belanja Bahan-Bahan/Obat Tanaman	10.131.759,00	1.586.471.623,00	-	-	-	-	-	-	-	1.441.582.882,00	-	-	-	-	-	155.020.000,00
5.1.02.01.01.0009	Belanja Bahan-Bahan Tabung Pemadam Kebakaran	670.000,00	-	3.155.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.825.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Bahan Tabung Gas	20.338.116,00	9.136.800,00	195.000,00	-	-	-	-	-	-	24.893.260,00	-	-	-	-	-	5.576.736,00
5.1.02.01.01.0011	Belanja Bahan-Bahan/Obat Tanaman Dalam Pot	219.977.150,00	34.350.000,00	-	-	-	-	143.316.650,00	-	-	146.389.300,00	-	-	-	-	-	264.554.500,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	13.521.038.646,36	13.295.108.991,00	-	-	-	2.494.455.552,34	-	-	-	16.256.175.247,19	-	-	-	0,01	-	12.054.427.942,51
5.1.02.01.01.0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	4.864.600,00	314.992.710,00	-	-	-	-	-	-	-	319.857.310,00	-	-	-	-	-	3.250.000,00
5.1.02.01.01.0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Berat	-	573.154.150,00	-	-	-	-	-	-	-	573.154.150,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	548.607.676,83	-	-	-	-	-	-	-	-	40.017.413,66	-	-	-	-	-	468.590.263,17
5.1.02.01.01.0016	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Laboratorium	-	-	75.036,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75.036,00
5.1.02.01.01.0018	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Studio dan Komunikasi	-	-	650.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	650.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	3.668.774,00	-	-	-	-	1.628.039.830,00	-	-	-	3.889.274,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.458.355.330,46	2.254.818.621,05	725.100,00	-	-	-	-	-	-	6.716.320.229,79	-	-	-	46.500,00	-	226.371.570,72
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cetak	210.734.816,50	2.606.713.023,00	-	-	-	-	-	46.500,00	-	2.596.352.704,34	725.100,00	-	-	-	-	1.019.276.591,76
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1.487.624.194,00	11.227.685.374,00	-	-	-	-	-	-	-	11.705.020.976,44	-	-	-	-	-	26.282.450,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	10.700.500,00	527.371.040,00	-	-	-	-	-	-	-	512.074.090,00	-	-	-	-	-	2.631.102.476,72
5.1.02.01.01.0028	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Dalam Kegiatan	4.910.438.992,00	4.812.809.548,00	-	-	-	-	-	-	-	4.084.140.959,28	-	-	-	-	-	547.749.717,69
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Kantor	427.166.914,77	2.107.460.241,00	-	-	-	-	-	-	-	2.016.305.435,08	-	-	-	-	-	1.536.749.309,21
5.1.02.01.01.0041	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	105.561.466,76	2.192.996.530,00	1.125.100,00	-	-	-	-	-	-	747.394.703,05	-	-	-	-	-	77.940.210,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	106.965.415,00	4.334.201.107,00	62.600,00	-	-	-	-	-	-	4.950.255.207,00	-	-	133.500.000,00	-	-	357.611.715,00
5.1.02.01.01.0043	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	51.965.492,00	1.360.161.965,00	-	-	-	-	-	-	-	1.406.001.029,05	-	-	-	-	-	6.126.428,95
5.1.02.01.01.0044	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Natura	88.881.000,00	1.406.251.085,00	-	-	-	-	-	-	-	1.452.307.000,00	-	-	-	-	-	42.825.085,00
5.1.02.01.01.0045	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Rumah tangga, Cenderamata	89.000,00	1.903.935.752,99	398.003,90	-	-	-	-	-	-	1.910.030.949,89	-	-	-	-	-	89.292.906,89
5.1.02.01.01.0046	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Rumah tangga, Kegiatan Kantor Lainnya	80.209.241,02	1.913.335.752,99	398.003,90	-	-	386.535,00	-	-	-	29.315.854.490,65	-	-	-	510.588.919,50	-	12.144.403.463,07
5.1.02.01.01.0047	Belanja Obat-Obatan/Obat	15.257.159.830,37	3.716.373.256,00	-	-	-	12.074.431.786,00	-	-	-	13.013.350.871,05	-	-	-	-	-	13.901.940.473,75
5.1.02.01.01.0048	Belanja Obat-Obatan/Obat-Obatan Laboratorium	9.393.745.569,42	1.183.731.532,00	60.000,00	-	-	15.756.882.135,00	-	510.569.814,78	-	89.699.360.923,00	26.322.350,00	-	5.962.800,00	-	-	217.256.115,00
5.1.02.01.01.0049	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan/Persediaan untuk Dijual/Diserahkan untuk Masyarakat	739.853.739,00	60.503.035.309,00	5.506.120,00	-	-	-	-	-	-	2.961.290.549,00	76.000,00	-	-	-	-	152.249.109,00
5.1.02.01.01.0050	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	207.989.810,00	2.859.096.549,00	146.694.300,00	-	-	-	-	-	-	1.762.866,00	-	-	-	-	-	9.252.650,00
5.1.02.01.01.0051	Bahan Persediaan untuk Cadangan Strategis Berjangka-Persediaan untuk Dalam Keadaan Darurat/Mitigasi	9.281.200,00	-	4.533.700,00	-	-	-	-	-	-	8.958.026.336,00	123.700.005,00	-	-	-	-	285.896.740,00
5.1.02.01.01.0042	Belanja Semen dan Pasir-Semen	1.022.000,00	9.314.665.491,00	-	-	-	-	-	-	-	1.976.571.950,00	-	-	-	-	-	26.910.000,00
5.1.02.01.01.0044	Belanja Semen dan Pasir-Pasir	17.400.000,00	1.995.171.950,00	-	-	-	-	-	-	-	24.984.303.255,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	-	24.984.103.439,00	-	-	-	-	-	-	-	15.205.189.673,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	15.205.189.413,00	-	-	-	-	-	-	-	2.395.756.137,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Sentra Pelayanan Utama Kesehatan	-	2.395.756.137,00	-	-	-	-	-	-	-	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0057	Belanja Makanan dan Minuman pada Direktur Pelayanan Utama Sosial	-	20.400.000,00	-	-	-	-	-	-	-	676.347.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	-	676.347.000,00	-	-	-	-	-	-	-	920.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0059	Belanja Pakaian Dinas KDH dan WKDH	-	920.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	447.330.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0060	Belanja Pakaian Dinas dan Atribut Pimpinan dan Anggota DPRD	-	447.330.000,00	-	-	-	-	-	-	-	48.716.560,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0061	Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH)	-	49.716.560,00	-	-	-	-	-	-	-	241.557.100,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0062	Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL)	-	241.557.100,00	-	-	-	-	-	-	-	435.949.350,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	-	435.949.350,00	-	-	-	-	-	-	-	510.519.050,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	-	510.519.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.600.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0073	Belanja Pakaian KORPRI	-	10.600.000,00	-	-	-	-	-	-	-	258.687.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Adat Daerah	-	266.681.000,00	-	-	-	-	-	-	-	324.916.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Dinas Tradisional	-	324.916.000,00	-	-	-	-	-	-	-	745.775.600,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0077	Belanja Pakaian Hakim	-	745.775.600,00	-	-	-	-	-	-	-	155.263.400,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0078	Belanja Pakaian Pedalaman	-	155.263.400,00	-	-	-	-	-	-	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0079	Belanja Barang Sampel Proyek	-	7.500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	261.443.091,00	-	-	-	-	-	14.062.909,00
5.1.02.01.02.0004	Belanja Komponen-Komponen Rumah-Rumah	-	279.506.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.02.0007	Belanja Pipa-Pipa Air Besi Tuang (DCI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.187.975,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.02.0012	Belanja Pipa-Pipa Plastik PVC (UPVC)	-	5.187.975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.02.0013	Belanja Pipa-Pipa Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.1.02.88.88.9999	Belanja Barang dari Jasa HOD	-	-	-	-	-	-	-	-	-	157.665.771.255,00	4.005.000,00	-	-	-	-	-
5.1.02.89.01.0001	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOS Reguler	-	153.649.418.255,00	-	-	-	-	-	-	-	2.724.279.200,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.89.01.0002	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOS Kinerja	-	2.724.279.200,00	-	-	-	-	-	-	-	21.287.331.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.89.02.0001	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOP PAUD Reguler	-	21.287.331.000,00	-	-	-	-	-	-	-	210.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.89.02.0002	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOP PAUD Kinerja	-	210.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	9.936.112.200,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.89.03.0001	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Reguler	-	9.936.112.200,00	-	-	-	-	-	-	-	270.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.89.03.0002	Belanja Barang dari Jasa BOSP-BOP Kesetaraan Kinerja	-	270.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	14.911.007.075,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.90.01.0001	Belanja Barang dari Jasa BLU Pusat/rsu	-	14.411.007.075,00	-	-	-	-	-	-	-	115.021.235.479,10	7.664.064,90	-	-	-	-	-
5.1.02.99.99.9999	Belanja Barang dari Jasa YBLUD	-	111.392.150.863,00	-	1.630.746.190,00	-	-	-	-	-	1.264.753.110,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0110	Bahan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya	-	-	-	-	1.264.753.110,00	-	-	-	-	1.416.900,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.01.0016	Bahan Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Pendukung Tata Ruang dan Peralatan Tukang Pos	-	-	-	-	1.416.900,00	-	-	-	-							

LAMPIRAN CaLK 29

Kertas Kerja Beban Penyesilaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN								PENGURANGAN						SALDO AKHIR
			Mutasi	Rekla	Utang	Aset tetap	Hibah	Kelahiran	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	Beban Penyesilaan	Rekla	Utang	Aset tetap	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	
5.1.02.01.04.0110	Beban Penyusutan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	-	-	-	-	5.855.500,00	-	-	-	-	5.855.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0717	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Agama	-	-	-	-	579.160.800,00	-	-	-	-	579.160.800,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0718	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Bacaan Bahasa	-	-	-	-	1.163.254.406,60	-	-	-	-	1.163.254.406,60	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0719	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Matematika dan Pengetahuan Alam	-	-	-	-	677.209.200,00	-	-	-	-	677.209.200,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0916	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	-	-	-	-	123.312.600,00	-	-	-	-	123.312.600,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0718	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Geografi, Historis, dan Sejenis	-	-	-	-	53.039.100,00	-	-	-	-	53.039.100,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0032	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu-Alat Bantu Peralatan SAR Manufacture	-	-	-	-	561.100,00	-	-	-	-	561.100,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0025	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Lainnya (Lainnya Unit)	-	-	-	-	82.090.832,24	-	-	-	-	82.090.832,24	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0409	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	-	-	-	-	3.817.000,00	-	-	-	-	3.817.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0411	Beban Peralatan dan Mesin-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	-	-	-	-	15.799.985,00	-	-	-	-	15.799.985,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Dapur	-	-	-	-	7.922.100,00	-	-	-	-	7.922.100,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0023	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu-Alat Bantu Pompa	-	-	-	-	7.177.600,00	-	-	-	-	7.177.600,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0105	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Panen	-	-	-	-	131.334.600,00	-	-	-	-	131.334.600,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0028	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bantu-Alat Bantu Air Pasi Maintenance Equipment, Alat Bantu Pengukuran	-	-	-	-	1.103.000,00	-	-	-	-	1.103.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0034	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Tak Bermotor-Kendaraan Tak Bermotor Lainnya	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0077	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Bengkel Tak Bermesin-Perlengkapan Ukuru Kayu	-	-	-	-	116.550,00	-	-	-	-	116.550,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0063	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Ukur Lainnya	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	-	95.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0091	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Instrumen Biaya	-	-	-	-	1.147.281,00	-	-	-	-	1.147.281,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0106	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Pengupasan Hasil Pascapanen Perangkat	-	-	-	-	2.940.000,00	-	-	-	-	2.940.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0110	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah-Alat Penunjang Perlengkapan Kantor	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	1.800.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0117	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah-Alat Kantor Lainnya	-	-	-	-	19.379.476,60	-	-	-	-	19.379.476,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0119	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pengolah Warna	-	-	-	-	16.821.300,60	-	-	-	-	16.821.300,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0121	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	-	-	-	-	39.040.000,00	-	-	-	-	39.040.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0122	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat-Kursi Kerja Pejabat	-	-	-	-	8.560.000,00	-	-	-	-	8.560.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0128	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja Rapat Pejabat-Kursi Rapat Pejabat	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0133	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Audio	-	-	-	-	11.371.000,00	-	-	-	-	11.371.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0135	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Mixing and Editing	-	-	-	-	2.065.000,00	-	-	-	-	2.065.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0137	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Alat Studio Lainnya	-	-	-	-	1.560.000,00	-	-	-	-	1.560.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0138	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Komunikasi-Alat Komunikasi Telefoto	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-	-	1.900.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0139	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Peralatan Pemancar-Pemancar Satelit Tetap	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	450.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.06.0204	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	-	-	-	-	114.3 7.067,13	-	-	-	-	11.137.067,13	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0205	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gigi	-	-	-	-	3.633.014,00	-	-	-	-	3.633.014,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0206	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Kelenjar Penyerap	-	-	-	-	1.095.000,00	-	-	-	-	1.095.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0208	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit Kelainan	-	-	-	-	35.2--8.570,61	-	-	-	-	35.240.570,61	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0209	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran THT	-	-	-	-	2.253.612,00	-	-	-	-	2.753.612,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0210	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Mata	-	-	-	-	1 2.610,00	-	-	-	-	112.610,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0211	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bantu Pemakai Dalam	-	-	-	-	8.0 2.392,00	-	-	-	-	8.012.392,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0213	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Anak	-	-	-	-	664.910,00	-	-	-	-	664.910,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0214	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiologi	-	-	-	-	1.139.763,00	-	-	-	-	1.139.763,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0215	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis	-	-	-	-	5.647.352,00	-	-	-	-	5.647.352,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0224	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum Lainnya	-	-	-	-	1.021.200,00	-	-	-	-	1.021.200,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0226	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	-	-	-	-	2.0 8.0,00	-	-	-	-	283.050,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0234	Beban Peralatan dan Mesin-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah Forensi	-	-	-	-	2.319.614,00	-	-	-	-	2.262.614,00	-	-	-	-	-	-

LAMPIRAN Cat.K 29

Kertas Kerja Beban Persediaan Tahun 2025

(dalam rupiah)

Kode Rekening	URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN								PENGURANGAN						SALDO AKHIR
			Pembelian	Hibah	Lainnya	Aset Tetap	Hibah	Kelebihan	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	Beban Persediaan	Retur	Lainnya	Aset Tetap	Koreksi SA	Jurnal Koreksi Audited	
5.1.02.01.04.0210	Beban Persediaan dan Model-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Tradisional Akupuntur	-	-	-	-	142.592,00	-	-	-	-	142.592,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0212	Beban Persediaan dan Model-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	-	-	-	-	249.000,00	-	-	-	-	249.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0235	Beban Persediaan dan Model-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Lainnya	-	-	-	-	431.250,00	-	-	-	-	431.250,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0237	Beban Persediaan dan Model-Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kesehatan Umum-Alat Kesehatan Umum Lainnya	-	-	-	-	3.343.000,00	-	-	-	-	3.343.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0239	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Kimia Alat Teknik Pengukuran	-	-	-	-	821.400,00	-	-	-	-	821.400,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0247	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lainnya, Mesin, dan Listrik	-	-	-	-	330.300,00	-	-	-	-	330.300,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0248	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Umum	-	-	-	-	1.013.893,00	-	-	-	-	1.013.893,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0249	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Alat Kedokteran	-	-	-	-	17.940,00	-	-	-	-	5.940,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0255	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lainnya	-	-	-	-	966.621,00	-	-	-	-	966.621,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0291	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Laboratorium Kesehatan	-	-	-	-	93.379,00	-	-	-	-	93.379,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0293	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Lain	-	-	-	-	2.011.875,00	-	-	-	-	2.011.875,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0305	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Unit Alat Laboratorium-Alat Kimia Non Listrik Gelas dan Porselin Lainnya	-	-	-	-	175.017,00	-	-	-	-	175.017,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0306	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Bahasa Indonesia	-	-	-	-	299.000,00	-	-	-	-	299.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0309	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Matematika	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	1.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0310	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Dasar	-	-	-	-	437.715,00	-	-	-	-	437.715,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0311	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Lanjutan	-	-	-	-	109.574,00	-	-	-	-	109.574,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0312	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi IPA Alat	-	-	-	-	373.750,00	-	-	-	-	373.750,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0317	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Kerajinan	-	-	-	-	139.864,00	-	-	-	-	139.864,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0319	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Bidang Studi Olahraga	-	-	-	-	141.313,00	-	-	-	-	141.313,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0322	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Peraga Praktik Sekolah-Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya	-	-	-	-	620.000,00	-	-	-	-	620.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0333	Beban Persediaan dan Model-Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Fisika Nuklir, Elektronika-Alat Laboratorium Fisika Nuklir, Elektronika Lainnya	-	-	-	-	77.702,00	-	-	-	-	77.702,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0404	Beban Persediaan dan Model-Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	-	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	165.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0406	Beban Persediaan dan Model-Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	-	-	-	-	20.867.990,00	-	-	-	-	20.867.990,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0408	Beban Persediaan dan Model-Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	4.000.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0409	Beban Persediaan dan Model-Peralatan Gudang-Perlengkapan Gudang-Peralatan Gudang Lainnya	-	-	-	-	604.500,00	-	-	-	-	604.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0710	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Umum	-	-	-	-	17.549.460.160,00	-	-	-	-	17.549.460.160,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0711	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Filsafat	-	-	-	-	1.915.600,00	-	-	-	-	1.915.600,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0713	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Ilmu Sosial	-	-	-	-	759.011.500,00	-	-	-	-	759.011.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0717	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Antologi, Kesusilaan dan Olahraga	-	-	-	-	580.266.400,00	-	-	-	-	580.266.400,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0720	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Bahan Perpustakaan Tercetak-Buku Lainnya	-	-	-	-	12.511.500,00	-	-	-	-	12.511.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0725	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Karangan, Naskah, dan Laporan Bahan Kearsipan	-	-	-	-	1.762.500,00	-	-	-	-	1.762.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0727	Beban Aset Tetap Lainnya-Bahan Perpustakaan-Barang Bersejarah Artifacts and Realities-Barang Bersejarah Artifacts and Realities	-	-	-	-	12.622.800,00	-	-	-	-	12.622.800,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0729	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Bahan-Barang Bercorak Kesenian-Lainnya	-	-	-	-	2.125.500,00	-	-	-	-	2.125.500,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0773	Beban Aset Tetap Lainnya-Barang Kiriman Non Budaya-Barang Kiriman Non Budaya-Barang Kiriman Non Budaya Lainnya	-	-	-	-	21.250.000,00	-	-	-	-	21.250.000,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0804	Beban Persediaan dan Model-Rambu-rambu-Rambu-rambu Lalu Lintas Darat-Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	-	-	-	-	42.120.900,00	-	-	-	-	42.120.900,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0922	Beban Gedung dan Bangunan-Tugu Titik Kontrol Pasti-Tugu Titik Batas-Tugu	-	-	-	-	9.425.053,00	-	-	-	-	9.425.053,00	-	-	-	-	-	-
5.1.02.01.04.0105	Beban Persediaan dan Model-Alat Pertanian-Alat Pengolahan-Alat Processing	-	-	-	-	21.822.500,00	-	-	-	-	21.822.500,00	-	-	-	-	-	-
	Jumlah Total	81.703.115.477,01	517.202.867.606,00	164.592.519,00	3.686.746.400,00	23.511.780.867,00	39.256.418.409,94	143.916.650,00	518.627.419,79	-	582.312.397.649,47	164.592.519,00	-	374.867.800,00	518.627.419,79	-	82.854.924.557,36

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Dinas Pendidikan	Dinas Kesehatan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
URAIAN	1	2	3
EKUITAS AWAL	1.134.141.969.460,03	401.741.416.755,19	1.132.766.661.890,59
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(536.417.625.901,48)	(364.343.601.582,34)	(150.210.338.428,07)
KOREKSI EKUITAS	(13.137.989.463,22)	(655.895.396,20)	(29.296.878.910,40)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH	50.000.000,00		
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN		182.770.270,00	
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	(2.913.800,00)	56.355.983,80	(13.650.000,00)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	(12.834.966.263,22)	(810.461.650,00)	(1.199.150,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			17.283.400,00
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	1.099.654.921.071,33	409.498.798.378,65	1.101.670.185.569,12

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	Satuan Polisi Pamong Praja	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
URAIAN	4	5	6
EKUITAS AWAL	**947.116.436.550,75**	**734.770.029,05**	**2.557.438.054,79**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**87.718.875.560,53**	**(16.176.756.278,84)**	**(12.545.197.525,56)**
KOREKSI EKUITAS	**(1.197.099.429,00)**	**(1.687.500,00)**	**(77.750.000,00)**
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH	5.811.700.728,00		
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	-	(1.687.500,00)	-
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI	1.322.882.880,00		
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN		-	(77.750.000,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	**1.065.909.791.233,28**	**951.124.804,21**	**2.286.349.447,23**

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	Dinas Sosial	Dinas Tenaga Kerja
URAIAN	7	8	9
EKUITAS AWAL	7.715.865.347,42	1.727.706.550,00	13.334.046.275,15
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(16.829.083.429,45)	(12.390.283.414,06)	(18.611.101.399,54)
KOREKSI EKUITAS	18.152.549.083,00	(34.650.000,00)	(4.179.843.714,97)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	(175.400,00)		(949.619.720,00)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN		(34.650.000,00)	(265.982.000,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	25.646.951.893,97	2.381.418.976,94	6.836.054.258,64

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	DP2KBP3A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Dinas Lingkungan Hidup
URAIAN	10	11	12
EKUITAS AWAL	6.759.101.930,23	32.976.753.467,46	12.264.818.240,74
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(36.804.959.005,58)	(44.799.250.049,38)	(42.914.754.005,01)
KOREKSI EKUITAS	205.500.000,00	(1.247.882.900,00)	(2.198.746.493,33)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	-		6.116.666,67
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN		(1.247.882.900,00)	(2.594.051.300,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	6.491.582.710,65	31.551.035.631,08	11.439.771.513,40

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Perhubungan
URAIAN	13	14	15
EKUITAS AWAL	9.743.561.821,02	2.168.873.442,50	130.804.267.866,01
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(15.938.842.487,86)	(17.658.266.366,00)	(29.938.869.613,15)
KOREKSI EKUITAS	-	(1.737.363.100,00)	655.523.730,00
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	-	-	(1.808.642.520,00)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN		(1.737.363.100,00)	
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	8.029.056.987,16	313.825.651,50	130.366.417.438,86

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
URAIAN	16	17	18
EKUITAS AWAL	**6.699.025.841,69**	**480.370.570,00**	**1.593.221.601,45**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(42.371.067.703,92)**	**(13.459.127.474,35)**	**1.278.424.720,98**
KOREKSI EKUITAS	**(419.994.325,00)**	**-**	**(674.601.000,00)**
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	39.327.000,00		1.894.500,00
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	(429.119.200,00)		(673.495.500,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	**-**	**-**	**-**
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	**12.103.422.817,77**	**491.530.464,65**	**790.466.079,43**

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Dinas Pemuda dan Olahraga	Dinas arsip dan Perpustakaan	Dinas Perikanan dan Peternakan
URAIAN	19	20	21
EKUITAS AWAL	**13.476.941.344,70**	**7.281.397.868,42**	**35.334.605.515,12**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(45.811.806.465,34)**	**(11.530.487.534,71)**	**(33.411.529.346,18)**
KOREKSI EKUITAS	**(62.650.900,00)**	**(96.900.000,00)**	**(49.225.292,50)**
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	2.045.200,00	(29.146.000,00)	214.507,50
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	(64.696.100,00)	(96.900.000,00)	(49.439.800,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	**13.483.921.155,36**	**8.040.905.233,71**	**37.994.420.933,44**

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Sekretariat Daerah
URAIAN	22	23	24
EKUITAS AWAL	**19.127.670.399,25**	**97.154.979.280,97**	**72.194.978.405,58**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(15.692.443.431,97)**	**(24.872.373.474,68)**	**(88.335.022.308,80)**
KOREKSI EKUITAS	**(1.381.973.328,75)**	**(1.436.885.821,25)**	**(798.824.585,00)**
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG		(240.427.480,00)	
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			(144.927.500,00)
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	(1.072.800,00)	-	144.927.500,00
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	(1.446.318.800,00)	(1.134.040.070,00)	(17.899.800,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	**17.065.868.440,53**	**91.682.800.253,04**	**67.671.878.298,78**

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Sekretariat DPRD	Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah	Badan Keuangan dan Aset Daerah
URAIAN	25	26	27
EKUITAS AWAL	146.147.797.086,69	5.539.320.080,74	408.824.081.950,02
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(158.742.071.383,06)	(18.362.580.208,58)	1.368.743.325.663,12
KOREKSI EKUITAS	19.289.943.667,40	(4.133.525.720,00)	(42.188.384.513,13)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			(1.396.763.627,00)
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			(29.879.500,00)
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			(1.728.020.298,10)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	-	-	29.879.500,00
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	-	(4.266.237.420,00)	(39.995.155.600,00)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	177.621.989,00
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			177.621.989,00
EKUITAS AKHIR	171.246.593.403,03	945.847.183,16	498.126.704.727,01

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Badan Pendapatan Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Inspektorat Daerah
URAIAN	28	29	30
EKUITAS AWAL	**171.069.391.052,99**	**4.538.333.602,76**	**954.307.115,00**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**751.051.453.838,02**	**(29.212.273.070,63)**	**(26.766.745.296,75)**
KOREKSI EKUITAS	**(51.346.286.218,00)**	**(10.319.200,00)**	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG	(51.283.806.268,00)		
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	-	-	-
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	(55.459.200,00)	(10.319.200,00)	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	**159.823.178.588,01**	**4.551.314.155,13**	**1.092.973.136,25**

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Kecamatan Batujajar	Kecamatan Cipeundeuy	Kecamatan Gununghalu
URAIAN	31	32	33
EKUITAS AWAL	662.139.455,00	1.069.314.096,77	1.463.560.060,01
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.559.531.932,00)	(5.430.268.867,46)	(5.552.045.580,91)
KOREKSI EKUITAS	-	253.120.000,00	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN			-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	580.382.345,00	1.172.448.299,31	1.323.335.819,10

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

OPD	Kecamatan Padalarang	Kecamatan Lembang	Kecamatan Sindangkerta
URAIAN	34	35	36
EKUITAS AWAL	513.704.185,00	8.335.236.470,15	1.399.574.202,48
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(6.623.989.673,50)	(8.307.190.576,20)	(5.169.329.486,44)
KOREKSI EKUITAS	1.800.000,00	-	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	1.800.000,00	-	
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN			
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	436.746.922,50	7.554.339.362,95	1.237.835.908,04

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Kecamatan Cisarua	Kecamatan Ngamprah	Kecamatan Cikalongwetan
URAIAN	37	38	39
EKUITAS AWAL	1.446.473.373,28	1.478.069.296,46	1.151.653.316,17
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.932.113.009,87)	(6.067.460.271,25)	(6.303.977.989,08)
KOREKSI EKUITAS	457.500,00	-	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN	457.500,00		
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	-		
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	1.313.086.836,41	1.303.514.512,21	1.227.409.562,09

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Kecamatan Cipongkor	Kecamatan Saguling	Kecamatan Cililin
URAIAN	40	41	42
EKUITAS AWAL	1.154.451.888,60	4.750.086.005,42	17.740.494.077,35
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.818.254.805,57)	(4.816.411.995,77)	(8.449.637.724,35)
KOREKSI EKUITAS	-	-	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	-	-	
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	977.318.169,03	4.532.522.352,65	15.555.385.647,00

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

0PD	Kecamatan Parongpong	Kecamatan Cipatat	Kecamatan Cihampelas
URAIAN	43	44	45
EKUITAS AWAL	3.680.283.026,38	2.333.266.356,34	1.287.978.752,45
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	(5.716.315.462,68)	(6.161.450.869,41)	(5.612.300.003,39)
KOREKSI EKUITAS	-	-	-
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN	-	-	
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	-	-	-
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			
EKUITAS AKHIR	3.541.677.368,70	2.229.975.040,93	1.203.405.254,06

LAMPIRAN CaLK 30

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT

PERHITUNGAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

PER 31 DESEMBER 2025

(dalam rupiah)

LAMPIRAN CaLK 30

(dalam rupiah)

OPD	Kecamatan Rongga	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Jumlah
URAIAN	46	47	
EKUITAS AWAL	**1.254.945.069,31**	**261.772.786,66**	**4.876.953.111.814,14**
SURPLUS / (DEFISIT) - LO	**(5.202.089.375,09)**	**(13.517.656.434,25)**	**274.405.598.540,14**
KOREKSI EKUITAS	**-**	**(2.838.240,00)**	**(117.809.302.070,35)**
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN PIUTANG			(240.427.480,00)
KOREKSI PENCATATAN PIUTANG			(52.680.569.895,00)
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - TANAH			5.861.700.728,00
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN			(174.807.000,00)
KOREKSI PENCATATAN ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN			182.770.270,00
KOREKSI PENCATATAN ASET LAINNYA - TGR			(1.728.020.298,10)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN		-	(2.523.889.382,03)
KOREKSI PENCATATAN AKM. PENYUSUTAN ASET TETAP - JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI			1.322.882.880,00
KOREKSI PENGHAPUSAN - ASET LAIN-LAIN		(2.838.240,00)	(67.846.225.293,22)
KOREKSI SALDO AWAL PENCATATAN UTANG			17.283.400,00
DAMPAK DARI KEBIJAKAN AKUNTANSI	**-**	**-**	**177.621.989,00**
PENAMBAHAN NILAI INVESTASI TERHADAP PENYERTAAN MODAL PADA PERUSAHAAN DAERAH			177.621.989,00
EKUITAS AKHIR	**1.188.569.880,22**	**209.966.557,41**	**5.033.727.030.272,93**

LAMPIRAN CaLK 31

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
1	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	5.03.01.0001.001	2018	Reklas Barang	4	110.400.000,00	(110.400.000,00)	-
2	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	8.01.01.0001.001	2016	Reklas Barang	10	15.445.000,00	(15.445.000,00)	-
3	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0001.001	2009	Koreksi Berkurang	1	14.879.500,00	-	14.879.500,00
4	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0002.001	2013	Koreksi Berkurang	1	15.000.000,00	-	15.000.000,00
5	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0001.001	2012	Reklas Barang	2	7.139.929,00	(7.139.929,00)	-
6	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0001.001	2013	Reklas Barang	4	13.469.716,00	(13.469.716,00)	-
7	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0001.001	2018	Reklas Barang	4	90.942.500,00	(90.942.500,00)	-
8	Badan Keuangan dan Aset Daerah	5.02.01.0001.001	2023	Reklas Barang	2	5.104.240,00	(5.104.240,00)	-
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.0001.001	2017	Reklas Barang	2	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.05.02.0001.001	2023	Reklas Barang	14	51.800.000,00	(51.800.000,00)	-
11	Badan Pendapatan Daerah	5.02.02.0001.001	2011	Reklas Barang	6	9.570.000,00	(9.570.000,00)	-
12	Badan Pendapatan Daerah	5.02.02.0001.001	2012	Reklas Barang	2	7.139.929,00	(7.139.929,00)	-
13	Badan Pendapatan Daerah	5.02.02.0001.001	2013	Reklas Barang	2	6.734.869,00	(6.734.869,00)	-
14	Badan Perencanaan, Pembangunan , Penelitian dan Pengembangan Daerah	5.01.01.0001.001	2021	Reklas Barang	2	15.514.400,00	(15.514.400,00)	-
15	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.24.01.0001.001	2019	Koreksi Penyusutan	4	-	(29.146.000,00)	(29.146.000,00)
16	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.24.01.0001.001	2016	Reklas Barang	2	13.750.000,00	(13.750.000,00)	-
17	Dinas Arsip dan Perpustakaan	2.24.01.0001.001	2022	Reklas Barang	14	69.825.000,00	(69.825.000,00)	-
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.0001.001	2012	Reklas Barang	2	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.0001.001	2019	Reklas Barang	26	226.424.400,00	(226.424.400,00)	-
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.12.01.0001.001	2023	Reklas Barang	8	19.624.800,00	(19.624.800,00)	-
21	Dinas Kesehatan	1.02.01.0003.001	2016	Koreksi Penyusutan	2	2.275.100,00	-	2.275.100,00
22	Dinas Kesehatan	1.02.01.0001.001	2009	Reklas Barang	2	14.055.864,00	(14.055.864,00)	-
23	Dinas Kesehatan	1.02.01.0001.001	2014	Reklas Barang	14	35.600.000,00	(35.600.000,00)	-
24	Dinas Kesehatan	1.02.01.0001.001	2021	Reklas Barang	72	31.204.800,00	(39.006.000,00)	(7.801.200,00)
25	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2015	Reklas Barang	16	26.920.000,00	(26.920.000,00)	-
26	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2016	Reklas Barang	2	7.000.000,00	(7.000.000,00)	-
27	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2017	Reklas Barang	12	30.463.900,00	(30.463.900,00)	-
28	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2018	Reklas Barang	8	12.404.375,00	(12.404.375,00)	-
29	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2020	Reklas Barang	26	354.777.000,00	(182.823.750,00)	171.953.250,00
30	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2021	Reklas Barang	2	35.454.457,00	(28.363.565,60)	7.090.891,40
31	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2022	Reklas Barang	24	99.112.500,00	(102.940.800,00)	(3.828.300,00)
32	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2023	Reklas Barang	18	26.714.175,00	(24.779.675,00)	1.934.500,00
33	Dinas Kesehatan	1.02.01.0002.001	2024	Reklas Barang	4	488.500,00	(576.000,00)	(87.500,00)
34	Dinas Kesehatan	1.02.01.0003.001	2019	Reklas Barang	10	11.190.000,00	(11.190.000,00)	-
35	Dinas Kesehatan	1.02.01.0003.001	2020	Reklas Barang	26	63.074.000,00	(63.798.000,00)	(724.000,00)
36	Dinas Kesehatan	1.02.01.0003.001	2021	Reklas Barang	4	6.415.200,00	(6.415.200,00)	-
37	Dinas Kesehatan	1.02.01.0004.001	2018	Reklas Barang	6	28.953.656,00	(28.953.656,00)	-
38	Dinas Kesehatan	1.02.01.0004.001	2019	Reklas Barang	40	103.515.027,00	(103.515.027,00)	-
39	Dinas Kesehatan	1.02.01.0004.001	2020	Reklas Barang	92	392.472.800,00	(392.472.800,00)	-
40	Dinas Kesehatan	1.02.01.0004.001	2023	Reklas Barang	94	121.634.000,00	(106.371.000,00)	15.263.000,00
41	Dinas Kesehatan	1.02.01.0005.001	1995	Reklas Barang	2	800.000,00	(800.000,00)	-

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
42	Dinas Kesehatan	1.02.01.0005.001	2013	Reklas Barang	2	5.565.000,00	(5.565.000,00)	-
43	Dinas Kesehatan	1.02.01.0005.001	2018	Reklas Barang	8	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
44	Dinas Kesehatan	1.02.01.0006.001	2018	Reklas Barang	6	41.816.700,00	(41.816.700,00)	-
45	Dinas Kesehatan	1.02.01.0007.001	2015	Reklas Barang	4	14.500.000,00	(14.500.000,00)	-
46	Dinas Kesehatan	1.02.01.0007.001	2019	Reklas Barang	4	31.700.000,00	(31.700.000,00)	-
47	Dinas Kesehatan	1.02.01.0007.001	2020	Reklas Barang	2	29.600.000,00	(29.600.000,00)	-
48	Dinas Kesehatan	1.02.01.0008.001	2010	Reklas Barang	10	21.985.000,00	(21.985.000,00)	-
49	Dinas Kesehatan	1.02.01.0008.001	2013	Reklas Barang	2	5.565.000,00	(5.565.000,00)	-
50	Dinas Kesehatan	1.02.01.0008.001	2018	Reklas Barang	2	5.085.000,00	(5.085.000,00)	-
51	Dinas Kesehatan	1.02.01.0008.001	2020	Reklas Barang	8	9.400.000,00	(9.400.000,00)	-
52	Dinas Kesehatan	1.02.01.0008.001	2021	Reklas Barang	18	51.720.000,00	(41.376.000,00)	10.344.000,00
53	Dinas Kesehatan	1.02.01.0009.001	2017	Reklas Barang	30	16.293.505,00	(16.293.505,00)	-
54	Dinas Kesehatan	1.02.01.0011.001	2014	Reklas Barang	2	16.743.842,00	(16.743.842,00)	-
55	Dinas Kesehatan	1.02.01.0011.001	2016	Reklas Barang	4	20.684.000,00	(20.684.000,00)	-
56	Dinas Kesehatan	1.02.01.0011.001	2017	Reklas Barang	8	25.068.600,00	(25.068.600,00)	-
57	Dinas Kesehatan	1.02.01.0011.001	2020	Reklas Barang	6	14.623.500,00	(14.623.500,00)	-
58	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2014	Reklas Barang	2	5.995.000,00	(5.995.000,00)	-
59	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2015	Reklas Barang	2	7.920.000,00	(7.920.000,00)	-
60	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2016	Reklas Barang	10	43.582.500,00	(43.582.500,00)	-
61	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2017	Reklas Barang	2	25.880.000,00	(25.880.000,00)	-
62	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2019	Reklas Barang	2	6.490.000,00	(6.490.000,00)	-
63	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2020	Reklas Barang	8	10.050.000,00	(10.050.000,00)	-
64	Dinas Kesehatan	1.02.01.0013.001	2023	Reklas Barang	6	21.748.000,00	(21.748.000,00)	-
65	Dinas Kesehatan	1.02.01.0015.001	2015	Reklas Barang	4	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
66	Dinas Kesehatan	1.02.01.0015.001	2017	Reklas Barang	10	2.656.500,00	(2.656.500,00)	-
67	Dinas Kesehatan	1.02.01.0015.001	2018	Reklas Barang	2	2.000.000,00	(2.000.000,00)	-
68	Dinas Kesehatan	1.02.01.0015.001	2020	Reklas Barang	6	6.700.000,00	(6.700.000,00)	-
69	Dinas Kesehatan	1.02.01.0018.001	2016	Reklas Barang	2	4.859.000,00	(4.859.000,00)	-
70	Dinas Kesehatan	1.02.01.0018.001	2017	Reklas Barang	16	42.355.000,00	(42.355.000,00)	-
71	Dinas Kesehatan	1.02.01.0018.001	2018	Reklas Barang	4	23.285.349,00	(23.286.349,00)	-
72	Dinas Kesehatan	1.02.01.0018.001	2020	Reklas Barang	4	4.700.000,00	(4.700.000,00)	-
73	Dinas Kesehatan	1.02.01.0018.001	2024	Reklas Barang	2	712.500,00	(570.000,00)	142.500,00
74	Dinas Kesehatan	1.02.01.0019.001	2018	Reklas Barang	4	8.215.000,00	(8.216.000,00)	-
75	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2003	Reklas Barang	2	600.000,00	(600.000,00)	-
76	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2006	Reklas Barang	10	6.050.000,00	(6.050.000,00)	-
77	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2008	Reklas Barang	2	800.000,00	(800.000,00)	-
78	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2014	Reklas Barang	2	7.000.000,00	(7.000.000,00)	-
79	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2018	Reklas Barang	32	92.930.500,00	(92.930.500,00)	-
80	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2020	Reklas Barang	4	4.700.000,00	(4.700.000,00)	-
81	Dinas Kesehatan	1.02.01.0020.001	2023	Reklas Barang	2	592.000,00	(355.200,00)	236.800,00
82	Dinas Kesehatan	1.02.01.0022.001	2011	Reklas Barang	2	3.217.500,00	(3.217.500,00)	-
83	Dinas Kesehatan	1.02.01.0022.001	2019	Reklas Barang	2	22.430.000,00	(22.430.000,00)	-

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
84	Dinas Kesehatan	1.02.01.0025.001	2011	Reklas Barang	2	1.464.000,00	(1.464.000,00)	-
85	Dinas Kesehatan	1.02.01.0025.001	2017	Reklas Barang	14	48.490.000,00	(49.490.000,00)	(1.000.000,00)
86	Dinas Kesehatan	1.02.01.0025.001	2018	Reklas Barang	2	43.838.500,00	(43.838.500,00)	-
87	Dinas Kesehatan	1.02.01.0025.001	2022	Reklas Barang	4	4.500.000,00	(3.600.000,00)	900.000,00
88	Dinas Kesehatan	1.02.01.0026.001	2017	Reklas Barang	8	6.086.980,00	(6.086.980,00)	-
89	Dinas Kesehatan	1.02.01.0026.001	2018	Reklas Barang	4	58.009.000,00	(58.009.000,00)	-
90	Dinas Kesehatan	1.02.01.0027.001	2013	Reklas Barang	2	1.320.000,00	(1.320.000,00)	-
91	Dinas Kesehatan	1.02.01.0027.001	2017	Reklas Barang	10	12.475.000,00	(12.475.000,00)	-
92	Dinas Kesehatan	1.02.01.0027.001	2018	Reklas Barang	38	69.391.500,00	(73.045.500,00)	(3.654.000,00)
93	Dinas Kesehatan	1.02.01.0027.001	2020	Reklas Barang	8	9.400.000,00	(9.400.000,00)	-
94	Dinas Kesehatan	1.02.01.0027.001	2021	Reklas Barang	8	2.971.345,60	(5.942.691,20)	(2.971.345,60)
95	Dinas Kesehatan	1.02.01.0029.001	2014	Reklas Barang	2	37.360.000,00	(37.360.000,00)	-
96	Dinas Kesehatan	1.02.01.0029.001	2015	Reklas Barang	2	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
97	Dinas Kesehatan	1.02.01.0029.001	2017	Reklas Barang	2	15.643.585,00	(15.643.585,00)	-
98	Dinas Kesehatan	1.02.01.0030.001	2018	Reklas Barang	10	35.347.600,00	(35.347.600,00)	-
99	Dinas Kesehatan	1.02.01.0030.001	2022	Reklas Barang	2	742.500,00	(594.000,00)	148.500,00
100	Dinas Kesehatan	1.02.01.0031.001	2014	Reklas Barang	2	35.310.000,00	(35.310.000,00)	-
101	Dinas Kesehatan	1.02.01.0031.001	2018	Reklas Barang	2	4.508.000,00	(4.508.000,00)	-
102	Dinas Kesehatan	1.02.01.0031.001	2019	Reklas Barang	2	5.900.000,00	(5.900.000,00)	-
103	Dinas Kesehatan	1.02.01.0031.001	2020	Reklas Barang	6	7.050.000,00	(7.050.000,00)	-
104	Dinas Kesehatan	1.02.01.0031.001	2021	Reklas Barang	12	9.974.790,00	(7.979.832,00)	1.994.958,00
105	Dinas Kesehatan	1.02.01.0032.001	2016	Reklas Barang	14	453.268.800,00	(453.268.800,00)	-
106	Dinas Kesehatan	1.02.01.0032.001	2020	Reklas Barang	4	4.700.000,00	(4.700.000,00)	-
107	Dinas Kesehatan	1.02.01.0032.001	2021	Reklas Barang	4	2.260.000,00	(1.808.000,00)	452.000,00
108	Dinas Kesehatan	1.02.01.0032.001	2024	Reklas Barang	2	919.080,00	(1.531.800,00)	(612.720,00)
109	Dinas Kesehatan	1.02.01.0033.001	2014	Reklas Barang	2	7.029.000,00	(7.029.000,00)	-
110	Dinas Kesehatan	1.02.01.0033.001	2024	Reklas Barang	2	160.000,00	(160.000,00)	-
111	Dinas Kesehatan	1.02.01.0034.001	2015	Reklas Barang	2	3.500.000,00	(3.500.000,00)	-
112	Dinas Kesehatan	1.02.01.0034.001	2017	Reklas Barang	6	5.940.000,00	(5.940.000,00)	-
113	Dinas Kesehatan	1.02.01.0034.001	2018	Reklas Barang	2	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-
114	Dinas Kesehatan	1.02.01.0034.001	2020	Reklas Barang	12	17.507.550,00	(17.507.550,00)	-
115	Dinas Kesehatan	1.02.01.0036.001	2010	Reklas Barang	2	500.000,00	(500.000,00)	-
116	Dinas Kesehatan	1.02.01.0036.001	2013	Reklas Barang	2	5.016.880,00	(5.016.880,00)	-
117	Dinas Kesehatan	1.02.01.0036.001	2020	Reklas Barang	4	4.700.000,00	(4.700.000,00)	-
118	Dinas Kesehatan	1.02.01.0036.001	2024	Reklas Barang	2	2.375.000,00	(1.900.000,00)	475.000,00
119	Dinas Kesehatan	1.02.01.0037.001	2019	Reklas Barang	2	15.000.000,00	(15.000.000,00)	-
120	Dinas Kesehatan	1.02.01.0038.001	2013	Reklas Barang	2	1.320.000,00	(1.320.000,00)	-
121	Dinas Kesehatan	1.02.01.0038.001	2014	Reklas Barang	2	9.234.500,00	(9.234.500,00)	-
122	Dinas Kesehatan	1.02.01.0038.001	2015	Reklas Barang	4	20.290.000,00	(20.290.000,00)	-
123	Dinas Kesehatan	1.02.01.0038.001	2016	Reklas Barang	2	6.751.500,00	(6.751.500,00)	-
124	Dinas Kesehatan	1.02.01.0038.001	2018	Reklas Barang	12	22.706.500,00	(22.706.500,00)	-
125	Dinas Kesehatan	1.02.01.0040.001	2021	Reklas Barang	4	352.314.300,00	(488.489.750,00)	(136.175.450,00)

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
126	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2015	Reklas Barang	2	207.690.000,00	(207.690.000,00)	-
127	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2016	Reklas Barang	4	23.380.000,00	(23.380.000,00)	-
128	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2017	Reklas Barang	4	213.922.037,04	(174.175.037,04)	39.747.000,00
129	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2019	Reklas Barang	8	4.940.000,00	(4.940.000,00)	-
130	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2020	Reklas Barang	52	85.136.335,65	(85.136.335,65)	-
131	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2021	Reklas Barang	2	1.680.000,00	(2.100.000,00)	(420.000,00)
132	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2022	Reklas Barang	18	152.694.975,92	(152.694.975,92)	-
133	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	2.16.01.0001.001	2024	Reklas Barang	2	574.725,00	(574.725,00)	-
134	Dinas Lingkungan Hidup	2.11.01.0001.001	2023	Reklas Barang	2	24.466.666,67	(18.350.000,00)	6.116.666,67
135	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.26.01.0001.001	2014	Reklas Barang	2	3.991.680,00	(3.991.680,00)	-
136	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	3.26.01.0001.001	2024	Reklas Barang	6	7.919.400,00	(8.992.200,00)	(1.072.800,00)
137	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.03.01.0001.001	2012	Koreksi Penyusutan	1	-	(13.650.000,00)	(13.650.000,00)
138	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	1.05.03.0001.001	2023	Reklas Barang	10	10.663.100,00	(10.838.500,00)	(175.400,00)
139	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.01.0001.001	2016	Reklas Barang	2	6.502.800,00	(6.502.800,00)	-
140	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.13.01.0001.001	2017	Reklas Barang	2	16.580.000,00	(16.580.000,00)	-
141	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2017	Reklas Barang	2	4.000.000,00	(4.000.000,00)	-
142	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2018	Reklas Barang	4	6.564.000,00	(6.564.000,00)	-
143	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2019	Reklas Barang	14	59.771.250,00	(59.771.250,00)	-
144	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2020	Reklas Barang	4	7.000.000,00	(7.000.000,00)	-
145	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2021	Reklas Barang	4	6.686.000,00	(5.348.800,00)	1.337.200,00
146	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2023	Reklas Barang	2	3.640.000,00	(2.912.000,00)	728.000,00
147	Dinas Pemuda dan Olahraga	2.19.01.0001.001	2024	Reklas Barang	30	21.500.000,00	(21.520.000,00)	(20.000,00)
148	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.18.01.0001.001	2012	Reklas Barang	2	30.485.000,00	(30.485.000,00)	-
149	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.18.01.0001.001	2016	Reklas Barang	2	48.400.000,00	(48.400.000,00)	-
150	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.18.01.0001.001	2023	Reklas Barang	2	1.425.000,00	(1.140.000,00)	285.000,00
151	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu	2.18.01.0001.001	2024	Reklas Barang	2	8.047.500,00	(6.438.000,00)	1.609.500,00
152	Dinas Pendidikan	1.01.01.0001.001	2020	Reklas Barang	2	4.378.000,00	(4.378.000,00)	-
153	Dinas Pendidikan	1.01.01.0001.001	2021	Reklas Barang	2	13.980.000,00	(17.475.000,00)	(3.495.000,00)
154	Dinas Pendidikan	1.01.01.0001.001	2023	Reklas Barang	48	236.880.000,00	(236.880.000,00)	-
155	Dinas Pendidikan	1.01.01.0003.053	2013	Reklas Barang	2	3.000.000,00	(3.000.000,00)	-
156	Dinas Pendidikan	1.01.01.0004.002	2017	Reklas Barang	4	1.284.400,00	(1.284.400,00)	-
157	Dinas Pendidikan	1.01.01.0006.002	2018	Reklas Barang	2	8.745.000,00	(8.745.000,00)	-
158	Dinas Pendidikan	1.01.01.0014.007	2023	Reklas Barang	2	1.250.000,00	(1.000.000,00)	250.000,00
159	Dinas Pendidikan	1.01.01.0015.011	2013	Reklas Barang	2	598.000,00	(598.000,00)	-
160	Dinas Pendidikan	1.01.01.0015.054	2021	Reklas Barang	2	1.120.000,00	(1.400.000,00)	(280.000,00)
161	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.006	2003	Reklas Barang	2	750.000,00	(750.000,00)	-
162	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.008	2010	Reklas Barang	2	735.000,00	(735.000,00)	-
163	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.008	2014	Reklas Barang	4	2.370.346,00	(2.370.346,00)	-
164	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.008	2017	Reklas Barang	2	1.634.050,00	(1.634.050,00)	-
165	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.008	2021	Reklas Barang	2	6.940.500,00	(5.552.400,00)	1.388.100,00
166	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.009	2014	Reklas Barang	2	1.185.173,00	(1.185.173,00)	-
167	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	1986	Reklas Barang	2	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
168	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	1988	Reklas Barang	2	735.000,00	(735.000,00)	-
169	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	1991	Reklas Barang	2	1.470.000,00	(1.470.000,00)	-
170	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	2008	Reklas Barang	2	1.000.000,00	(1.000.000,00)	-
171	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	2009	Reklas Barang	4	2.400.000,00	(2.400.000,00)	-
172	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	2021	Reklas Barang	2	6.940.500,00	(5.552.400,00)	1.388.100,00
173	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.013	2023	Reklas Barang	2	925.000,00	(740.000,00)	185.000,00
174	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.024	2014	Reklas Barang	2	1.185.173,00	(1.185.173,00)	-
175	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.027	2021	Reklas Barang	2	1.000.000,00	(2.000.000,00)	(1.000.000,00)
176	Dinas Pendidikan	1.01.01.0018.057	2022	Reklas Barang	4	900.000,00	(2.250.000,00)	(1.350.000,00)
177	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.08.01.0001.001	2012	Reklas Barang	2	1.350.000,00	(1.350.000,00)	-
178	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.08.01.0001.001	2013	Reklas Barang	2	9.200.000,00	(9.200.000,00)	-
179	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2KBP3A)	2.08.01.0001.001	2016	Reklas Barang	2	10.200.000,00	(10.200.000,00)	-
180	Dinas Perhubungan	2.15.01.0001.001	2019	Koreksi Penyusutan	2	-	(1.810.725.000,00)	(1.810.725.000,00)
181	Dinas Perhubungan	2.15.01.0001.001	2020	Reklas Barang	6	25.500.000,00	(25.500.000,00)	-
182	Dinas Perhubungan	2.15.01.0001.001	2023	Reklas Barang	8	10.412.400,00	(8.329.920,00)	2.082.480,00
183	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0001.001	2009	Reklas Barang	2	7.900.000,00	(7.900.000,00)	-
184	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0001.001	2010	Reklas Barang	2	18.417.404,00	(18.417.404,00)	-
185	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0001.001	2013	Reklas Barang	2	5.500.000,00	(5.500.000,00)	-
186	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0001.001	2016	Reklas Barang	2	14.600.000,00	(14.600.000,00)	-
187	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0001.001	2020	Reklas Barang	2	4.920.000,00	(4.920.000,00)	-
188	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0003.001	2013	Reklas Barang	2	5.500.000,00	(5.500.000,00)	-
189	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0004.001	2018	Reklas Barang	2	12.000.000,00	(12.000.000,00)	-
190	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0005.001	2014	Reklas Barang	4	2.600.000,00	(2.600.000,00)	-
191	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0005.001	2018	Reklas Barang	4	9.988.000,00	(9.988.000,00)	-
192	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0005.001	2022	Reklas Barang	4	5.694.300,00	(5.694.300,00)	-
193	Dinas Perikanan dan Peternakan	3.25.01.0005.001	2024	Reklas Barang	2	1.072.537,50	(858.030,00)	214.507,50
194	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01.0001.001	2013	Reklas Barang	78	77.777.700,00	(77.777.700,00)	-
195	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	3.31.01.0001.001	2017	Reklas Barang	2	9.100.000,00	(9.100.000,00)	-
196	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.04.01.0001.001	2013	Reklas Barang	2	12.222.000,00	(12.222.000,00)	-
197	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.04.01.0001.001	2017	Reklas Barang	2	11.887.121,62	(11.887.121,62)	-
198	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.04.01.0001.001	2018	Reklas Barang	2	11.718.750,00	(11.718.750,00)	-
199	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.04.01.0001.001	2019	Reklas Barang	4	49.830.000,00	(49.830.000,00)	-
200	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	1.04.01.0001.001	2024	Reklas Barang	8	17.242.500,00	(17.242.500,00)	-
201	Dinas Tenaga Kerja	2.07.01.0001.001	2019	Koreksi Penyusutan	1	-	(948.750.000,00)	(948.750.000,00)
202	Dinas Tenaga Kerja	2.07.01.0001.001	2013	Reklas Barang	4	10.000.000,00	(10.000.000,00)	-
203	Dinas Tenaga Kerja	2.07.01.0001.001	2023	Reklas Barang	2	3.478.880,00	(4.348.600,00)	(869.720,00)
204	Inspektorat Daerah	6.01.01.0001.001	2017	Reklas Barang	2	17.500.000,00	(17.500.000,00)	-
205	Kecamatan Batujajar	7.01.01.0001.001	2014	Reklas Barang	2	16.875.000,00	(16.875.000,00)	-
206	Kecamatan Cisarua	7.01.07.0001.001	2022	Reklas Barang	2	2.287.500,00	(1.830.000,00)	457.500,00

LAMPIRAN CaLK 31

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN PERALATAN DAN MESIN

(dalam rupiah)

No	Nama SKPD	Kode SKPD	Tahun	Uraian	Jumlah	Koreksi Tambah	Koreksi Kurang	Total
207	Kecamatan Lembang	7.01.05.0001.001	2007	Reklas Barang	2	3.500.000,00	(3.500.000,00)	-
208	Kecamatan Lembang	7.01.05.0001.001	2014	Reklas Barang	2	1.500.000,00	(1.500.000,00)	-
209	Kecamatan Padalarang	7.01.04.0001.001	2021	Reklas Barang	6	9.000.000,00	(7.200.000,00)	1.800.000,00
210	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.01.0001.001	2014	Reklas Barang	2	14.163.000,00	(14.163.000,00)	-
211	Satuan Polisi Pamong Praja	1.05.01.0001.001	2022	Reklas Barang	2	6.750.000,00	(8.437.500,00)	(1.687.500,00)
212	Sekretariat Daerah	4.01.01.0001.001	2008	Koreksi Berkurang	1	13.548.000,00	-	13.548.000,00
213	Sekretariat Daerah	4.01.01.0001.001	2009	Koreksi Berkurang	1	14.879.500,00	-	14.879.500,00
214	Sekretariat Daerah	4.01.01.0001.001	2009	Penghapusan Karena Koreksi	1	116.500.000,00	-	116.500.000,00
215	Sekretariat Daerah	4.01.01.0001.001	2017	Reklas Barang	14	17.500.000,00	(17.500.000,00)	-
216	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.01.0001.001	2011	Reklas Barang	2	22.500.000,00	(22.500.000,00)	-
217	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.01.0001.001	2016	Reklas Barang	18	72.360.000,00	(72.360.000,00)	-
218	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	4.02.01.0001.001	2018	Reklas Barang	10	38.023.000,00	(38.023.000,00)	-
	JUMLAH				1.589	**6.110.950.749,00**	**(8.634.840.131,03)**	**(2.523.889.382,03)**

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
1	Koreksi Penyusutan	(113.160.000,00)	23493183	23493183	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
2	Koreksi Penyusutan	(6.765.000,00)	23493184	23493184	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
3	Koreksi Penyusutan	(6.765.000,00)	23493185	23493185	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
4	Koreksi Penyusutan	(41.745.000,00)	23493186	23493186	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
5	Koreksi Penyusutan	(3.430.350,00)	23493187	23493187	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
6	Koreksi Penyusutan	(3.430.350,00)	23493188	23493188	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
7	Koreksi Penyusutan	(110.400.000,00)	23493189	23493189	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
8	Koreksi Penyusutan	(11.550.000,00)	23493190	23493190	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
9	Koreksi Penyusutan	(11.550.000,00)	23493191	23493191	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
10	Koreksi Penyusutan	(104.880.000,00)	23493192	23493192	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
11	Koreksi Penyusutan	(9.405.000,00)	23493193	23493193	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
12	Koreksi Penyusutan	(9.405.000,00)	23493194	23493194	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
13	Koreksi Penyusutan	(41.400.000,00)	23493195	23493195	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
14	Koreksi Penyusutan	(2.475.000,00)	23493196	23493196	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
15	Koreksi Penyusutan	(2.475.000,00)	23493197	23493197	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
16	Koreksi Penyusutan	(34.494.000,00)	23493198	23493198	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
17	Koreksi Penyusutan	(2.887.500,00)	23493199	23493199	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
18	Koreksi Penyusutan	(2.887.500,00)	23493200	23493200	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
19	Koreksi Penyusutan	(213.624.000,00)	23493201	23493201	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
20	Koreksi Penyusutan	(21.942.900,00)	23493202	23493202	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
21	Koreksi Penyusutan	(21.942.900,00)	23493203	23493203	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
22	Koreksi Penyusutan	(73.416.000,00)	23493204	23493204	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
23	Koreksi Penyusutan	(4.290.000,00)	23493205	23493205	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
24	Koreksi Penyusutan	(4.290.000,00)	23493206	23493206	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
25	Koreksi Penyusutan	(48.300.000,00)	23493207	23493207	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
26	Koreksi Penyusutan	(4.042.500,00)	23493208	23493208	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
27	Koreksi Penyusutan	(4.042.500,00)	23493209	23493209	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
28	Koreksi Penyusutan	(126.960.000,00)	23493210	23493210	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
29	Koreksi Penyusutan	(13.282.500,00)	23493211	23493211	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
30	Koreksi Penyusutan	(13.282.500,00)	23493212	23493212	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
31	Koreksi Penyusutan	(33.696.000,00)	23493213	23493213	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
32	Koreksi Penyusutan	(2.970.000,00)	23493214	23493214	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
33	Koreksi Penyusutan	(2.970.000,00)	23493215	23493215	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
34	Koreksi Penyusutan	(28.601.760,00)	23493216	23493216	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
35	Koreksi Penyusutan	(3.412.710,00)	23493217	23493217	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
36	Koreksi Penyusutan	(3.412.710,00)	23493218	23493218	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
37	Koreksi Penyusutan	(10.385.760,00)	23493219	23493219	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
38	Koreksi Penyusutan	(1.239.210,00)	23493220	23493220	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
39	Koreksi Penyusutan	(1.239.210,00)	23493221	23493221	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
40	Koreksi Penyusutan	(19.261.800,00)	23493222	23493222	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
41	Koreksi Penyusutan	(2.247.210,00)	23493223	23493223	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
42	Koreksi Penyusutan	(2.247.210,00)	23493224	23493224	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
43	Koreksi Penyusutan	(6.398.400,00)	23493225	23493225	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
44	Koreksi Penyusutan	(839.790,00)	23493226	23493226	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
45	Koreksi Penyusutan	(839.790,00)	23493227	23493227	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
46	Koreksi Penyusutan	(110.061.600,00)	23493228	23493228	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
47	Koreksi Penyusutan	(7.504.200,00)	23493229	23493229	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
48	Koreksi Penyusutan	(7.504.200,00)	23493230	23493230	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
49	Koreksi Penyusutan	(38.364.480,00)	23493231	23493231	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
50	Koreksi Penyusutan	(3.923.640,00)	23493232	23493232	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
51	Koreksi Penyusutan	(3.923.640,00)	23493233	23493233	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
52	Koreksi Penyusutan	(135.775.200,00)	23493234	23493234	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
53	Koreksi Penyusutan	(12.960.360,00)	23493235	23493235	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
54	Koreksi Penyusutan	(12.960.360,00)	23493236	23493236	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
55	Koreksi Penyusutan	(123.702.120,00)	23493237	23493237	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
56	Koreksi Penyusutan	(13.817.790,00)	23493238	23493238	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
57	Koreksi Penyusutan	(13.817.790,00)	23493239	23493239	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
58	Koreksi Penyusutan	(40.451.400,00)	23493240	23493240	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
59	Koreksi Penyusutan	(3.861.270,00)	23493241	23493241	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
60	Koreksi Penyusutan	(3.861.270,00)	23493242	23493242	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
61	Koreksi Penyusutan	(50.789.700,00)	23493243	23493243	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
62	Koreksi Penyusutan	(4.914.000,00)	23493244	23493244	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
63	Koreksi Penyusutan	(4.914.000,00)	23493245	23493245	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
64	Koreksi Penyusutan	(48.800.400,00)	23493246	23493246	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
65	Koreksi Penyusutan	(3.327.300,00)	23493247	23493247	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
66	Koreksi Penyusutan	(3.327.300,00)	23493248	23493248	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
67	Koreksi Penyusutan	(17.082.000,00)	23493249	23493249	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
68	Koreksi Penyusutan	(1.638.000,00)	23493250	23493250	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
69	Koreksi Penyusutan	(1.638.000,00)	23493251	23493251	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
70	Koreksi Penyusutan	(43.032.000,00)	23493252	23493252	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
71	Koreksi Penyusutan	(5.134.500,00)	23493253	23493253	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
72	Koreksi Penyusutan	(5.134.500,00)	23493254	23493254	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
73	Koreksi Penyusutan	(6.507.600,00)	23493255	23493255	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
74	Koreksi Penyusutan	(621.180,00)	23493256	23493256	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
75	Koreksi Penyusutan	(621.180,00)	23493257	23493257	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
76	Koreksi Penyusutan	(99.851.400,00)	23493258	23493258	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
77	Koreksi Penyusutan	(9.531.270,00)	23493259	23493259	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
78	Koreksi Penyusutan	(9.531.270,00)	23493260	23493260	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
79	Koreksi Penyusutan	(37.455.000,00)	23493261	23493261	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
80	Koreksi Penyusutan	(3.575.250,00)	23493262	23493262	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
81	Koreksi Penyusutan	(3.575.250,00)	23493263	23493263	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
82	Koreksi Penyusutan	(61.143.000,00)	23493264	23493264	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
83	Koreksi Penyusutan	(7.182.000,00)	23493265	23493265	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
84	Koreksi Penyusutan	(7.182.000,00)	23493266	23493266	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
85	Koreksi Penyusutan	(146.916.000,00)	23493267	23493267	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
86	Koreksi Penyusutan	(7.152.300,00)	23493268	23493268	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
87	Koreksi Penyusutan	(7.152.300,00)	23493269	23493269	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
88	Koreksi Penyusutan	(616.605.660,00)	23493270	23493270	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
89	Koreksi Penyusutan	(50.436.000,00)	23493271	23493271	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
90	Koreksi Penyusutan	(50.436.000,00)	23493272	23493272	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
91	Koreksi Penyusutan	(24.940.800,00)	23493273	23493273	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
92	Koreksi Penyusutan	(2.961.000,00)	23493274	23493274	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
93	Koreksi Penyusutan	(2.961.000,00)	23493275	23493275	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
94	Koreksi Penyusutan	(23.163.300,00)	23493276	23493276	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
95	Koreksi Penyusutan	(1.934.625,00)	23493277	23493277	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
96	Koreksi Penyusutan	(1.934.625,00)	23493278	23493278	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
97	Koreksi Penyusutan	(89.059.680,00)	23493279	23493279	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
98	Koreksi Penyusutan	(9.317.385,00)	23493280	23493280	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
99	Koreksi Penyusutan	(9.317.385,00)	23493281	23493281	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
100	Koreksi Penyusutan	(24.840.000,00)	23493282	23493282	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
101	Koreksi Penyusutan	(1.237.500,00)	23493283	23493283	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
102	Koreksi Penyusutan	(1.237.500,00)	23493284	23493284	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
103	Koreksi Penyusutan	(25.040.100,00)	23493285	23493285	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
104	Koreksi Penyusutan	(2.095.747,50)	23493286	23493286	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
105	Koreksi Penyusutan	(2.095.747,50)	23493287	23493287	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
106	Koreksi Penyusutan	(18.585.840,00)	23493288	23493288	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
107	Koreksi Penyusutan	(1.944.442,50)	23493289	23493289	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
108	Koreksi Penyusutan	(1.944.442,50)	23493290	23493290	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
109	Koreksi Penyusutan	(51.198.000,00)	23493291	23493291	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
110	Koreksi Penyusutan	(3.935.250,00)	23493292	23493292	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
111	Koreksi Penyusutan	(3.935.250,00)	23493293	23493293	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
112	Koreksi Penyusutan	(27.235.680,00)	23493294	23493294	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
113	Koreksi Penyusutan	(2.849.385,00)	23493295	23493295	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
114	Koreksi Penyusutan	(2.849.385,00)	23493296	23493296	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
115	Koreksi Penyusutan	(115.506.000,00)	23493297	23493297	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
116	Koreksi Penyusutan	(6.905.250,00)	23493298	23493298	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
117	Koreksi Penyusutan	(6.905.250,00)	23493299	23493299	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
118	Koreksi Penyusutan	(53.820.000,00)	23493300	23493300	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
119	Koreksi Penyusutan	(4.504.500,00)	23493301	23493301	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
120	Koreksi Penyusutan	(4.504.500,00)	23493302	23493302	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
121	Koreksi Penyusutan	(85.747.680,00)	23493303	23493303	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
122	Koreksi Penyusutan	(8.970.885,00)	23493304	23493304	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
123	Koreksi Penyusutan	(8.970.885,00)	23493305	23493305	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
124	Koreksi Penyusutan	(18.105.600,00)	23493306	23493306	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
125	Koreksi Penyusutan	(1.894.200,00)	23493307	23493307	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
126	Koreksi Penyusutan	(1.894.200,00)	23493308	23493308	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
127	Koreksi Penyusutan	(96.186.000,00)	23493309	23493309	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
128	Koreksi Penyusutan	(5.750.250,00)	23493310	23493310	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
129	Koreksi Penyusutan	(5.750.250,00)	23493311	23493311	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
130	Koreksi Penyusutan	(61.548.000,00)	23493312	23493312	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
131	Koreksi Penyusutan	(6.439.125,00)	23493313	23493313	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
132	Koreksi Penyusutan	(6.439.125,00)	23493314	23493314	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
133	Koreksi Penyusutan	(21.562.500,00)	23493315	23493315	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
134	Koreksi Penyusutan	(1.790.250,00)	23493316	23493316	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
135	Koreksi Penyusutan	(1.790.250,00)	23493317	23493317	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
136	Koreksi Penyusutan	(41.949.600,00)	23493318	23493318	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
137	Koreksi Penyusutan	(4.446.750,00)	23493319	23493319	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
138	Koreksi Penyusutan	(4.446.750,00)	23493320	23493320	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
139	Koreksi Penyusutan	(37.070.040,00)	23493321	23493321	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
140	Koreksi Penyusutan	(3.465.000,00)	23493322	23493322	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
141	Koreksi Penyusutan	(3.465.000,00)	23493323	23493323	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
142	Koreksi Penyusutan	(53.713.800,00)	23493324	23493324	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
143	Koreksi Penyusutan	(4.306.500,00)	23493325	23493325	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
144	Koreksi Penyusutan	(4.306.500,00)	23493326	23493326	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
145	Koreksi Penyusutan	(20.306.700,00)	23493327	23493327	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
146	Koreksi Penyusutan	(1.699.582,50)	23493328	23493328	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
147	Koreksi Penyusutan	(1.699.582,50)	23493329	23493329	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
148	Koreksi Penyusutan	(47.008.320,00)	23493330	23493330	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
149	Koreksi Penyusutan	(4.917.990,00)	23493331	23493331	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
150	Koreksi Penyusutan	(4.917.990,00)	23493332	23493332	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
151	Koreksi Penyusutan	(19.137.840,00)	23493333	23493333	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
152	Koreksi Penyusutan	(2.002.192,50)	23493334	23493334	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
153	Koreksi Penyusutan	(2.002.192,50)	23493335	23493335	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
154	Koreksi Penyusutan	(15.966.600,00)	23493336	23493336	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
155	Koreksi Penyusutan	(1.336.335,00)	23493337	23493337	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
156	Koreksi Penyusutan	(1.336.335,00)	23493338	23493338	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
157	Koreksi Penyusutan	(14.391.000,00)	23493339	23493339	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
158	Koreksi Penyusutan	(1.501.500,00)	23493340	23493340	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
159	Koreksi Penyusutan	(1.501.500,00)	23493341	23493341	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
160	Koreksi Penyusutan	(10.305.840,00)	23493342	23493342	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
161	Koreksi Penyusutan	(980.175,00)	23493343	23493343	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
162	Koreksi Penyusutan	(980.175,00)	23493344	23493344	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
163	Koreksi Penyusutan	(92.694.600,00)	23493345	23493345	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
164	Koreksi Penyusutan	(5.541.525,00)	23493346	23493346	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
165	Koreksi Penyusutan	(5.541.525,00)	23493347	23493347	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
166	Koreksi Penyusutan	(75.900.000,00)	23493348	23493348	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
167	Koreksi Penyusutan	(6.352.500,00)	23493349	23493349	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
168	Koreksi Penyusutan	(6.352.500,00)	23493350	23493350	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
169	Koreksi Penyusutan	(40.848.000,00)	23493351	23493351	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
170	Koreksi Penyusutan	(4.273.500,00)	23493352	23493352	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
171	Koreksi Penyusutan	(4.273.500,00)	23493353	23493353	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
172	Koreksi Penyusutan	(61.138.800,00)	23493354	23493354	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
173	Koreksi Penyusutan	(6.410.250,00)	23493355	23493355	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
174	Koreksi Penyusutan	(6.410.250,00)	23493356	23493356	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
175	Koreksi Penyusutan	(116.968.800,00)	23493357	23493357	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
176	Koreksi Penyusutan	(6.992.700,00)	23493358	23493358	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
177	Koreksi Penyusutan	(6.992.700,00)	23493359	23493359	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
178	Koreksi Penyusutan	(60.519.900,00)	23493360	23493360	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
179	Koreksi Penyusutan	(4.604.775,00)	23493361	23493361	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
180	Koreksi Penyusutan	(4.604.775,00)	23493362	23493362	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
181	Koreksi Penyusutan	(122.080.320,00)	23493363	23493363	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
182	Koreksi Penyusutan	(12.771.990,00)	23493364	23493364	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
183	Koreksi Penyusutan	(12.771.990,00)	23493365	23493365	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
184	Koreksi Penyusutan	(116.692.800,00)	23493366	23493366	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
185	Koreksi Penyusutan	(8.969.400,00)	23493367	23493367	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
186	Koreksi Penyusutan	(8.969.400,00)	23493368	23493368	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
187	Koreksi Penyusutan	(261.924.000,00)	23493369	23493369	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
188	Koreksi Penyusutan	(23.487.750,00)	23493370	23493370	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
189	Koreksi Penyusutan	(23.487.750,00)	23493371	23493371	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
190	Koreksi Penyusutan	(44.339.400,00)	23493372	23493372	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
191	Koreksi Penyusutan	(4.648.875,00)	23493373	23493373	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
192	Koreksi Penyusutan	(4.648.875,00)	23493374	23493374	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
193	Koreksi Penyusutan	(87.933.600,00)	23493375	23493375	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
194	Koreksi Penyusutan	(5.256.900,00)	23493376	23493376	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
195	Koreksi Penyusutan	(5.256.900,00)	23493377	23493377	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
196	Koreksi Penyusutan	(60.547.500,00)	23493378	23493378	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
197	Koreksi Penyusutan	(4.606.875,00)	23493379	23493379	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
198	Koreksi Penyusutan	(4.604.775,00)	23493380	23493380	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
199	Koreksi Penyusutan	(111.868.320,00)	23493381	23493381	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
200	Koreksi Penyusutan	(10.639.650,00)	23493382	23493382	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
201	Koreksi Penyusutan	(10.639.650,00)	23493383	23493383	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
202	Koreksi Penyusutan	(175.260.000,00)	23493384	23493384	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
203	Koreksi Penyusutan	(10.477.500,00)	23493385	23493385	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
204	Koreksi Penyusutan	(10.477.500,00)	23493386	23493386	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
205	Koreksi Penyusutan	(263.856.000,00)	23493387	23493387	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
206	Koreksi Penyusutan	(27.604.500,00)	23493388	23493388	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
207	Koreksi Penyusutan	(27.604.500,00)	23493389	23493389	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
208	Koreksi Penyusutan	(48.300.000,00)	23493390	23493390	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
209	Koreksi Penyusutan	(2.887.500,00)	23493391	23493391	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
210	Koreksi Penyusutan	(2.887.500,00)	23493392	23493392	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
211	Koreksi Penyusutan	(28.290.000,00)	23493393	23493393	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
212	Koreksi Penyusutan	(2.367.750,00)	23493394	23493394	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
213	Koreksi Penyusutan	(2.367.750,00)	23493395	23493395	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
214	Koreksi Penyusutan	(81.696.000,00)	23493396	23493396	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
215	Koreksi Penyusutan	(8.547.000,00)	23493397	23493397	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
216	Koreksi Penyusutan	(8.547.000,00)	23493398	23493398	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
217	Koreksi Penyusutan	(44.160.000,00)	23493399	23493399	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
218	Koreksi Penyusutan	(3.696.000,00)	23493400	23493400	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
219	Koreksi Penyusutan	(3.696.000,00)	23493401	23493401	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
220	Koreksi Penyusutan	(43.056.000,00)	23493402	23493402	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
221	Koreksi Penyusutan	(4.504.500,00)	23493403	23493403	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
222	Koreksi Penyusutan	(4.504.500,00)	23493404	23493404	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
223	Koreksi Penyusutan	(58.926.000,00)	23493405	23493405	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
224	Koreksi Penyusutan	(4.529.250,00)	23493406	23493406	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
225	Koreksi Penyusutan	(4.529.250,00)	23493407	23493407	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
226	Koreksi Penyusutan	(140.208.000,00)	23493408	23493408	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
227	Koreksi Penyusutan	(12.573.000,00)	23493409	23493409	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
228	Koreksi Penyusutan	(12.573.000,00)	23493410	23493410	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
229	Koreksi Penyusutan	(106.260.000,00)	23493411	23493411	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
230	Koreksi Penyusutan	(8.167.500,00)	23493412	23493412	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
231	Koreksi Penyusutan	(8.167.500,00)	23493413	23493413	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
232	Koreksi Penyusutan	(109.020.000,00)	23493414	23493414	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
233	Koreksi Penyusutan	(6.517.500,00)	23493415	23493415	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
234	Koreksi Penyusutan	(6.517.500,00)	23493416	23493416	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
235	Koreksi Penyusutan	(56.580.000,00)	23493417	23493417	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
236	Koreksi Penyusutan	(4.735.500,00)	23493418	23493418	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
237	Koreksi Penyusutan	(4.735.500,00)	23493419	23493419	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
238	Koreksi Penyusutan	(86.664.000,00)	23493420	23493420	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
239	Koreksi Penyusutan	(9.066.750,00)	23493421	23493421	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
240	Koreksi Penyusutan	(9.066.750,00)	23493422	23493422	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
241	Koreksi Penyusutan	(42.780.000,00)	23493423	23493423	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
242	Koreksi Penyusutan	(3.580.500,00)	23493424	23493424	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
243	Koreksi Penyusutan	(3.580.500,00)	23493425	23493425	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
244	Koreksi Penyusutan	(7.452.000,00)	23493426	23493426	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
245	Koreksi Penyusutan	(750.750,00)	23493427	23493427	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
246	Koreksi Penyusutan	(750.750,00)	23493428	23493428	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
247	Koreksi Penyusutan	(16.560.000,00)	23493429	23493429	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
248	Koreksi Penyusutan	(1.732.500,00)	23493430	23493430	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
249	Koreksi Penyusutan	(1.732.500,00)	23493431	23493431	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
250	Koreksi Penyusutan	(183.540.000,00)	23493432	23493432	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
251	Koreksi Penyusutan	(10.972.500,00)	23493433	23493433	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
252	Koreksi Penyusutan	(10.972.500,00)	23493434	23493434	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
253	Koreksi Penyusutan	(65.550.000,00)	23493435	23493435	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
254	Koreksi Penyusutan	(5.486.250,00)	23493436	23493436	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
255	Koreksi Penyusutan	(5.486.250,00)	23493437	23493437	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
256	Koreksi Penyusutan	(153.456.000,00)	23493438	23493438	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
257	Koreksi Penyusutan	(16.054.500,00)	23493439	23493439	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
258	Koreksi Penyusutan	(16.054.500,00)	23493440	23493440	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
259	Koreksi Penyusutan	(72.450.000,00)	23493441	23493441	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
260	Koreksi Penyusutan	(6.063.750,00)	23493442	23493442	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
261	Koreksi Penyusutan	(6.063.750,00)	23493443	23493443	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
262	Koreksi Penyusutan	(48.300.000,00)	23493444	23493444	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
263	Koreksi Penyusutan	(3.712.500,00)	23493445	23493445	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
264	Koreksi Penyusutan	(3.712.500,00)	23493446	23493446	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
265	Koreksi Penyusutan	(30.360.000,00)	23493447	23493447	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
266	Koreksi Penyusutan	(3.176.250,00)	23493448	23493448	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
267	Koreksi Penyusutan	(3.176.250,00)	23493449	23493449	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
268	Koreksi Penyusutan	(38.640.000,00)	23493450	23493450	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
269	Koreksi Penyusutan	(4.042.500,00)	23493451	23493451	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
270	Koreksi Penyusutan	(4.042.500,00)	23493452	23493452	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
271	Koreksi Penyusutan	(136.275.000,00)	23493453	23493453	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
272	Koreksi Penyusutan	(8.250.000,00)	23493454	23493454	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
273	Koreksi Penyusutan	(8.250.000,00)	23493455	23493455	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
274	Koreksi Penyusutan	(187.920.000,00)	23493456	23493456	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
275	Koreksi Penyusutan	(20.097.000,00)	23493457	23493457	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
276	Koreksi Penyusutan	(20.097.000,00)	23493458	23493458	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
277	Koreksi Penyusutan	(8.280.000,00)	23493459	23493459	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
278	Koreksi Penyusutan	(540.000,00)	23493460	23493460	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
279	Koreksi Penyusutan	(540.000,00)	23493461	23493461	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
280	Koreksi Penyusutan	(54.096.000,00)	23493462	23493462	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
281	Koreksi Penyusutan	(2.520.000,00)	23493463	23493463	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
282	Koreksi Penyusutan	(2.520.000,00)	23493464	23493464	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
283	Koreksi Penyusutan	(85.008.000,00)	23493465	23493465	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
284	Koreksi Penyusutan	(8.316.000,00)	23493466	23493466	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
285	Koreksi Penyusutan	(8.316.000,00)	23493467	23493467	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
286	Koreksi Penyusutan	(63.480.000,00)	23493468	23493468	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
287	Koreksi Penyusutan	(7.245.000,00)	23493469	23493469	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
288	Koreksi Penyusutan	(7.245.000,00)	23493470	23493470	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
289	Koreksi Penyusutan	(79.488.000,00)	23493471	23493471	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
290	Koreksi Penyusutan	(7.776.000,00)	23493472	23493472	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
291	Koreksi Penyusutan	(7.776.000,00)	23493473	23493473	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
292	Koreksi Penyusutan	(55.200.000,00)	23493474	23493474	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
293	Koreksi Penyusutan	(3.600.000,00)	23493475	23493475	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
294	Koreksi Penyusutan	(3.600.000,00)	23493476	23493476	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
295	Koreksi Penyusutan	(118.800.000,00)	23493477	23493477	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
296	Koreksi Penyusutan	(11.088.000,00)	23493478	23493478	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
297	Koreksi Penyusutan	(11.088.000,00)	23493479	23493479	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
298	Koreksi Penyusutan	(58.579.200,00)	23493480	23493480	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
299	Koreksi Penyusutan	(6.804.000,00)	23493481	23493481	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
300	Koreksi Penyusutan	(6.804.000,00)	23493482	23493482	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
301	Koreksi Penyusutan	(5.467.800,00)	23493483	23493483	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
302	Koreksi Penyusutan	(630.000,00)	23493484	23493484	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
303	Koreksi Penyusutan	(630.000,00)	23493485	23493485	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
304	Koreksi Penyusutan	(45.117.000,00)	23493486	23493486	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
305	Koreksi Penyusutan	(5.229.000,00)	23493487	23493487	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
306	Koreksi Penyusutan	(5.229.000,00)	23493488	23493488	BANGUNAN AIR KOTOR LAINNYA	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.02.07.06.001	2019
307	Pecah	1.274.238.000,00	23372910	23372910	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
308	Pecah	2.251.242.000,00	23372911	23372911	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019

KOREKSI AKUMULASI PENYUSUTAN JALAN, JARINGAN, DAN IRIGASI

(dalam rupiah)

No.	Uraian	Total	Barang						
			ID Barang	ID Awal	Jenis Barang	Kode SKPD	Nama SKPD	Kode Barang	Tahun
309	Pecah	788.508.000,00	23372912	23372912	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
310	Pecah	2.983.932.000,00	23372913	23372913	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
311	Pecah	1.848.546.000,00	23372914	23372914	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
312	Pecah	1.131.480.000,00	23372915	23372915	Jalan Khusus Kompleks	1.04.01.0001.001	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	4.01.01.09.002	2019
TOTAL		**1.322.882.880,00**							

KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN

(dalam rupiah)

No	No. SK Kep. Daerah	Tanggal SK Kep. Daerah	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1	100.3.3.5//Kep.218-BKAD-2025	12/1/2025	Rusak Ringan	2009	1	89.499.000,00	71.599.200,00	17.899.800,00
2	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2002	1	16.000.000,00	16.000.000,00	-
3	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2004	1	15.000.000,00	15.000.000,00	-
4	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2005	6	59.000.000,00	59.000.000,00	-
5	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2006	5	62.250.000,00	62.250.000,00	-
6	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2007	1	7.000.000,00	7.000.000,00	-
7	100.3.3.5/Kep.203-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2010	1	11.500.000,00	11.500.000,00	-
8	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	1962	1	300.000,00	-	300.000,00
9	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	1987	1	1.300.000,00	-	1.300.000,00
10	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2005	2	1.775.000,00	-	1.775.000,00
11	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2006	1	300.000,00	-	300.000,00
12	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2010	2	28.500.000,00	-	28.500.000,00
13	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2011	629	335.464.000,00	7.991.200,00	327.472.800,00
14	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2012	20	716.360.000,00	405.610.000,00	310.750.000,00
15	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2013	2.358	10.264.952.327,00	-	10.264.952.327,00
16	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2014	44	3.888.527.370,00	-	3.888.527.370,00
17	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2015	172	3.447.804.800,00	660.000,00	3.447.144.800,00
18	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2016	254	5.931.531.154,90	49.475.000,00	5.882.056.154,90
19	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2017	201	190.282.390,95	-	190.282.390,95
20	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2018	23	512.985.065,55	64.952.800,00	448.032.265,55
21	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2019	7	111.063.160,00	80.850.528,00	30.212.632,00
22	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2020	10	661.825.300,00	397.095.180,00	264.730.120,00
23	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2021	8	375.615.000,00	150.246.000,00	225.369.000,00
24	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2022	13	496.683.775,00	99.336.755,00	397.347.020,00
25	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025		2016	12	904.670.000,00	-	904.670.000,00
26	100.3.3.5/Kep.204-BKAD/2025	11/24/2025		2017	252	885.279.360,05	-	885.279.360,05
27	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	1925	1	- 0,22	-	- 0,22
28	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2003	5	25.000,00	-	25.000,00
29	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2005	7	175.000,00	-	175.000,00
30	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2011	12	18.051.400,00	18.051.400,00	-
31	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2012	1	1.250.000,00	1.250.000,00	-
32	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Baik	2013	5	4.695.750,00	3.756.600,00	939.150,00
33	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2002	1	824.400,00	824.400,00	-
34	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2005	1	5.000.000,00	5.000.000,00	-
35	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2007	28	31.990.300,00	31.990.300,00	-
36	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2008	23	48.217.900,00	48.217.900,00	-
37	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2009	33	50.033.500,00	50.033.500,00	-
38	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2010	68	87.091.000,00	81.191.000,00	5.900.000,00
39	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2011	97	92.908.750,00	82.808.750,00	10.100.000,00
40	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2012	1.816	153.047.500,00	104.400.100,00	48.647.400,00
41	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2013	80	111.698.600,00	104.298.600,00	7.400.000,00

KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN

(dalam rupiah)

No	No. SK Kep. Daerah	Tanggal SK Kep. Daerah	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
42	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2014	2.361	159.970.073,00	84.138.785,00	75.831.288,00
43	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2015	45	25.293.276,00	17.115.076,00	8.178.200,00
44	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2016	1.782	145.882.438,00	109.587.028,00	36.295.410,00
45	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2017	76	67.622.265,90	58.627.265,90	8.995.000,00
46	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2018	49	76.982.000,00	70.797.000,00	6.185.000,00
47	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2019	14	25.391.200,00	22.552.960,00	2.838.240,00
48	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2020	1	1.300.000,00	1.040.000,00	260.000,00
49	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2021	1	500.000,00	300.000,00	200.000,00
50	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Berat	2022	1	11.000.000,00	4.400.000,00	6.600.000,00
51	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Ringan	2009	1	2.464.000,00	2.464.000,00	-
52	100.3.3.5/Kep.205-BKAD/2025	11/24/2025	Rusak Ringan	2010	2	5.584.000,00	5.584.000,00	-
53	100.3.3.5/Kep.216-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2012	1	39.928.500.000,00	-	39.928.500.000,00
54	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2004	1	7.500.000,00	7.500.000,00	-
55	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2009	4	56.494.500,00	56.494.500,00	-
56	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2010	1	2.283.786,00	2.283.786,00	-
57	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2012	1	22.837.865,00	22.837.865,00	-
58	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2013	1	15.798.429,00	15.798.429,00	-
59	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2014	1	25.219.996,00	25.219.996,00	-
60	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2016	2	40.850.000,00	40.850.000,00	-
61	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2017	1	20.900.000,00	16.720.000,00	4.180.000,00
62	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2018	1	29.700.000,00	29.700.000,00	-
63	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2019	1	31.219.000,00	12.487.600,00	18.731.400,00
64	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Baik	2022	2	56.927.000,00	25.040.250,00	31.886.750,00
65	100.3.3.5/Kep.217-BKAD/2025	12/1/2025	Rusak Ringan	2003	1	8.000.000,00	8.000.000,00	-
66	100.3.3.5/Kep.42-BKAD/2025	5/17/2025	Rusak Berat	2012	1	256.680.000,00	256.680.000,00	-
67	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2004	1	2.500.000,00	2.500.000,00	-
68	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2005	4	4.000.000,00	4.000.000,00	-
69	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2009	12	65.675.500,00	65.675.500,00	-
70	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2010	2	8.387.979,00	8.387.979,00	-
71	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2012	4	20.700.550,00	20.700.550,00	-
72	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2013	28	118.458.000,00	118.458.000,00	-
73	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2014	13	21.482.400,00	21.482.400,00	-
74	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2016	5	6.355.000,00	6.355.000,00	-
75	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2017	1	2.090.000,00	2.090.000,00	-
76	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2019	1	4.730.000,00	4.730.000,00	-
77	100.3.3.5/Kep.43-BKAD/2025	5/7/2025	Rusak Berat	2020	1	8.956.000,00	3.582.400,00	5.373.600,00
78	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2011	3	12.325.000,00	12.325.000,00	-
79	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2015	21	61.706.000,00	61.706.000,00	-
80	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2016	1	6.000.000,00	6.000.000,00	-
81	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2017	52	73.554.000,00	73.554.000,00	-
82	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2018	1	5.633.500,00	5.633.500,00	-

KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN

(dalam rupiah)

No	No. SK Kep. Daerah	Tanggal SK Kep. Daerah	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Tahun Peroleh an	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
83	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2019	21	59.844.400,00	59.844.400,00	-
84	100.3.3.5/Kep.48-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2021	2	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00
85	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1971	1	750.000,00	-	750.000,00
86	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1986	1	750.000,00	-	750.000,00
87	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1988	1	750.000,00	-	750.000,00
88	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1989	2	50.000,00	-	50.000,00
89	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1993	44	590.000,00	-	590.000,00
90	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1994	311	4.487.500,00	-	4.487.500,00
91	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1995	57	1.860.000,00	-	1.860.000,00
92	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1996	737	5.512.000,00	-	5.512.000,00
93	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1997	145	4.182.000,00	-	4.182.000,00
94	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	1999	277	6.509.000,00	-	6.509.000,00
95	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2000	28	1.582.000,09	-	1.582.000,09
96	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2001	10	230.000,00	-	230.000,00
97	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2002	98	6.180.500,00	-	6.180.500,00
98	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1948	1	35.000,00	-	35.000,00
99	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1974	2	3.450.000,00	-	3.450.000,00
100	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1976	1	270.000,00	-	270.000,00
101	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1978	1	75.000,00	-	75.000,00
102	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1980	1	2.300.000,00	-	2.300.000,00
103	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1981	1	10.000,00	-	10.000,00
104	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1982	4	1.095.000,00	-	1.095.000,00
105	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1983	2	239.000,00	-	239.000,00
106	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1987	3	30.000,00	-	30.000,00
107	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1989	2	3.707.800,00	-	3.707.800,00
108	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1990	13	1.955.000,00	-	1.955.000,00
109	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1992	6	282.500,00	-	282.500,00
110	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1993	7	505.000,00	-	505.000,00
111	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1994	23	1.370.500,00	-	1.370.500,00
112	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1995	12	660.000,00	-	660.000,00
113	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1996	28	1.242.500,00	-	1.242.500,00
114	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1997	22	797.619,90	-	797.619,90
115	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1998	14	1.010.000,00	-	1.010.000,00
116	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	1999	19	15.800.000,00	-	15.800.000,00
117	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	2000	67	5.585.713,00	-	5.585.713,00
118	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	2001	88	5.910.930,00	-	5.910.930,00
119	100.3.3.5/Kep.49-BKAD/2025	6/26/2025	Rusak Berat	2002	4.857	27.232.152,00	-	27.232.152,00
120	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2016	1	10.980.000,00	10.980.000,00	-
121	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2017	30	129.984.000,00	129.984.000,00	-
122	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2018	6	29.632.000,00	29.632.000,00	-
123	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2019	16	58.990.690,00	58.990.690,00	-

KOREKSI PENGHAPUSAN ASET LAIN-LAIN

(dalam rupiah)

No	No. SK Kep. Daerah	Tanggal SK Kep. Daerah	Kondisi Barang (B,KB,RB)	Tahun Perolehan	Jumlah Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
124	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2020	1	24.999.000,00	24.999.000,00	-
125	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2021	14	72.013.000,00	62.010.400,00	10.002.600,00
126	100.3.3.5/Kep.50-BKAD/2025	6/26/2025	Baik	2022	2	16.334.000,00	12.250.500,00	4.083.500,00
127	100.3.3.5/Kep.52-BKAD/2024	11/15/2024	Rusak Ringan	2008	1	116.500.000,00	116.500.000,00	-
JUMLAH					**17.686**	**71.696.704.366,12**	**3.850.479.072,90**	**67.846.225.293,22**